

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD

Kabupaten Sukabumi

2021 - 2026

GEOPARK Ciletuh Palabuhanratu



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Sukabumi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
16. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
22. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.
23. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
24. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai Sasaran RPJMD.
27. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.
29. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026 merupakan:

a. penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati kedalam tujuan, sasaran, strategi, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sukabumi, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN.

b. dokumen perencanaan Daerah Kabupaten yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah Kabupaten dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Maksud Dan Tujuan

Pasal 3

(1) Maksud penetapan RPJMD adalah:
   a. sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
   b. sebagai pedoman penyusunan RKPD;
   c. sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah;
   d. sebagai pedoman perencanaan penganggaran; dan
   e. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah:
   a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
   b. menetapkan pedoman dalam penyususnan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJMD, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, kebijakan keuangan daerah dan kapasitas keuangan daerah untuk mendukung kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan,

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih, selain itu dijelaskan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Merupakan penutup dari keseluruhan dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah Kabupaten terhadap RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
b. pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD;
b. pelaksanaan RPJMD; dan
c. hasil RPJMD.

(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perencenaan pembangunan daerah.

(5) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB IV

PERUBAHAN

Pasal 7

(1) RPJMD dapat diubah dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
c. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, menjadi pedoman penyusunan RKPD 2026 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2026-2031.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 26 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

BARNAS ADJIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT : (5/125/2021)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I - 1**
1.1 Latar Belakang ..... **I - 1**
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... **I - 5**
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... **I - 10**
1.3.1 RPJM Nasional 2020-2024 ..... I - 10
1.3.2 RPJMD Provinsi Jawa Barat ..... I - 10
1.3.3 RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005-2025 ..... I - 11
1.3.4 Renstra Perangkat Daerah ..... I - 11
1.3.5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ..... I - 12
1.3.6 Dokumen Perencanaan Lainnya ..... I - 13
1.4 Maksud dan Tujuan ..... **I - 13**
1.5 Sistematika Penulisan ..... **I - 15**

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... **II - 1**
2.1 Aspek Geografis dan Demografis ..... **II - 1**
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Sukabumi ..... II - 1
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana ..... II - 26
2.1.3 Demografi ..... II - 39
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... **II - 41**
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II - 41
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II - 57
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..... II - 77
2.3 Aspek Pelayanan Umum ..... **II - 79**
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib ..... II - 79
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-171
2.3.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-195
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... **II - 205**
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-205
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-214
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-217
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-221
2.5 Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 ..... **II - 225**
2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Makro II-225
2.5.2 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-227

2.5.3 Capaian Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah II-312
2.5.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-336

2.6 Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).. II-342
2.6.1 Ketercapaian Pilar Sosial II-343
2.6.2 Ketercapaian Pilar Ekonomi II-344
2.6.3 Ketercapaian Pilar Lingkungan II-345
2.6.4 Ketercapaian Pilar Hukum dan Tata Kelola II-346

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... III - 1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ..... III - 3
3.1.2 Neraca Daerah III-17
3.2 Kebijakan Keuangan Masa Lalu III-20
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-20
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-22
3.3 Kerangka Pendanaan III-26
3.2.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-26
3.2.2 Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah III-29
3.3.3 Perhitungan Kerangka pendanaan III-29

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ..... IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan ..... IV - 1
4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... IV - 1
4.1.2 Aspek Pelayanan Umum ..... IV - 9
4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah ..... IV - 35
4.2 Isu Strategis ..... IV- 38
4.2.1 Telaah RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2024 ..... IV - 39
4.2.2 Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024 ..... IV - 40
4.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ..... IV - 42
4.2.4 Dinamika Internasional ..... IV - 47
4.2.5 Kebijakan RTRW Kabupaten Sukabumi ..... IV - 51
4.2.6 Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sukabumi ..... IV - 51
4.2.7 Pemetaan Masalah ..... IV - 64
4.2.8 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Sukabumi ..... IV - 82

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..... V - 1

5.1 Visi ..... V - 1
5.1.1 Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif ..... V - 1
5.1.2 Masyarakat Sejahtera Lahir Batin ..... V - 2

5.2 Misi ..... V - 2
5.2.1 Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing ..... V - 2
5.2.2 Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan ..... V - 3
5.2.3 Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah..... V - 3
5.2.4 Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel ..... V - 3
5.3 Tujuan dan Sasaran ..... V - 4
5.4 Prioritas Pembangunan Daerah 2021-2026 ..... V - 19

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... VI - 1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik - Tematik dan Integratif ..... VI - 2
6.2 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial..... VI- 31
6.2.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah ..... VI - 36
6.2.2 Kebijakan Struktur Ruang ..... VI - 45
6.2.3 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang..... VI - 46
6.2.4 Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang .... VI - 51
6.3 Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Daerah ..... VI- 54

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... VII - 1
7.1 Kerangka Pendanaan pembangunan ..... VIII- 2
7.2 Program Perangkat Daerah ..... VIII- 4

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... VIII - 1
8.1 Indikator Kinerja Makro ..... VIII- 2
8.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ..... VIII- 3
8.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah..... VIII-19
8.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) VIII-24

BAB IX PENUTUP..... IX - 1
9.1 Pedoman Transisi ..... IX - 1
9.2 Kaidah Pelaksanaan ..... IX - 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas wilayah, jumlah desa/kelurahan per kecamatan di Kabupaten Sukabumi	II - 2
Tabel 2.2	Pengamatan unsur iklim Kabupaten Sukabumi Tahun 2020……	II - 11
Tabel 2.3	Penggunaan lahan di Kabupaten Sukabumi tahun 2014……	II - 12
Tabel 2.4	Tingkat risiko di Kabupaten Sukabumi	II - 26
Tabel 2.5	Komposisi penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2020	II - 40
Tabel 2.6	Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan Kabupaten Sukabumi menurut lapangan usaha tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)	II - 43
Tabel 2.7	Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan Kabupaten Sukabumi menurut lapangan usaha tahun 2016-2020.....	II - 45
Tabel 2.8	Kontribusi setiap sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	II - 48
Tabel 2.9	Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020.....	II - 74
Tabel 2.10	Jumlah festival seni budaya dan pemeliharaan sejarah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020.....	II - 78
Tabel 2.11	Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	II - 81
Tabel 2.12	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten Sukabumi tahun 2018 - 2020 (Jiwa)……	II - 82
Tabel 2.13	Rasio Posyandu Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020	II - 91
Tabel 2.14	Persentase stunting di Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2020.....	II - 92
Tabel 2.15	Rasio Puskesmas Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020	II - 92

Tabel 2.16	Rasio Rumah Sakit Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020	II - 93
Tabel 2.17	Rasio dokter umum per satuan penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020	II - 94
Tabel 2.18	Rasio Perawat dan Bidang Per Satuan Penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020	II - 95
Tabel 2.19	Cakupan Pelayanan Puskesmas Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	II - 95
Tabel 2.20	Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu Kabupaten Sukabumi tahun 2014-2020	II - 96
Tabel 2.21	Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Sukabumi Tahun 2017-2020	II - 97
Tabel 2.22	Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020	II - 98
Tabel 2.23	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2020	II - 99
Tabel 2.24	Luasan RTH realisasi dan Target berdasarkan RTRW Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	II -99
Tabel 2.25	Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 100
Tabel 2.26	Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 102
Tabel 2.27	Lingkungan yang didukung PSU di Kabupaten Sukabumi Tahun 2017-2020	II - 102
Tabel 2.28	Persentase sumber air minum layak dan sanitasi layak di Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020	II - 103
Tabel 2.29	Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020	II - 104
Tabel 2.30	Data K3 di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 104
Tabel 2.31	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2018	II - 105
Tabel 2.32	Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 106
Tabel 2.33	Jumlah PPKS Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020	II - 107
Tabel 2.34	Jumlah Panti dan Penghuninya di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	II - 108

Tabel 2.35 Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Sukabumi Tahun 2017-2020 ..... II - 109

Tabel 2.36 Jumlah Korban Bencana Alam Kabupaten Sukabumi tahun 2017-2020 ..... II - 110

Tabel 2.37 Permasalahan Sosial Masyarakat Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 ..... II - 110

Tabel 2.38 Permasalahan Sosial Masyarakat Berdasarkan Jumlah Desa kabupaten Sukabumi Tahun 2018 ..... II - 111

Tabel 2.39 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan yang ditempatkan Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020 ..... II - 113

Tabel 2.40 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019 ..... II - 114

Tabel 2.41 Jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2020 ..... II - 115

Tabel 2.42 Persentase Pekerja Perempuan yang Menjadi PNS di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 ..... II - 116

Tabel 2.43 Persentase Kursi yang diduduki Perempuann di DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 ..... II - 117

Tabel 2.44 Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019 ..... II - 118

Tabel 2.45 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019 ..... II - 126

Tabel 2.46 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 ..... II - 129

Tabel 2.47 Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 ..... II - 131

Tabel 2.48 Timbulan Sampah (m^3) menurut Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017-2019 ..... II - 134

Tabel 2.49 Persentase Kepemilikan KTP Kabupaten Sukabumi Tahun 2017-2020 ..... II - 136

Tabel 2.50 Persentase Anak Berakta Kelahiran Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020 ..... II - 137

Tabel 2.51	Jumlah Pernikahan dan Jumlah Kepemilikan Akta Pernikahan Menurut Kepemelukan Agama Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020	II - 137
Tabel 2.52	Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2020	II - 142
Tabel 2.53	Angka Kelahiran Remaja di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019	II - 144
Tabel 2.54	Cakupan PUS yang Istrinya <20 Tahun Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019	II - 145
Tabel 2.55	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 146
Tabel 2.56	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 146
Tabel 2.57	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019	II - 147
Tabel 2.58	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019	II - 148
Tabel 2.59	PPKS Setiap Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019	II - 148
Tabel 2.60	Cakupan Remaja dalam PIK R Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019	II - 149
Tabel 2.61	Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020	II - 150
Tabel 2.62	Jumlah UPPKS yang ber-KB mandiri Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2019	II - 151
Tabel 2.63	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB di setiap Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019	II - 151
Tabel 2.64	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020	II - 152
Tabel 2.65	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Setiap Desa di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020	II - 153
Tabel 2.66	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 153

Tabel 2.67	Jumlah Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 154
Tabel 2.68	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami, Melaksanakan, Pengasuhan, dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020.....	II - 155
Tabel 2.69	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020 (unit)	II - 156
Tabel 2.70	Jumlah Terminal, Jumlah Kendaraan dan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019	II - 158
Tabel 2.71	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019.....	II - 158
Tabel 2.72	Pemasangan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2019.....	II - 159
Tabel 2.73	Jumlah Unit Koperasi, Anggota, dan Simpanan Kabupaten Sukabumi tahun 2013-2020.....	II -161
Tabel 2.74	Jumlah UMKM per Kecamatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2020.....	II - 162
Tabel 2.75	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (Rp)	II - 165
Tabel 2.76	Relisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Kabupaten Sukabumi Tahun 2017-2020	II - 166
Tabel 2.77	Publikasi Buku Statistik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020.....	II - 167
Tabel 2.78	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020	II - 168
Tabel 2.79	Jumlah Koleksi Buku di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020.....	II -169
Tabel 2.80	Jumlah penganut agama di Kabupaten Sukabumi tahun 2017-2020 (jiwa)	II - 171
Tabel 2.81	Jumlah Obyek WIsata Menurut Jenisnya di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020	II - 172
Tabel 2.82	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020.....	II - 173

Tabel 2.83	Produktivitas Padi Sawah dan Padi Gogo per Hektar Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 178
Tabel 2.84	Produktivitas Bahan Pangan Lainnya per Hektar Kabupaten Sukabumi Tahun 2014-2020	II - 181
Tabel 2.85	Luas Kawasan Hutan KPH di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (Ha)	II - 183
Tabel 2.86	Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2020 (Ha)	II - 183
Tabel 2.87	Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2018	II - 185
Tabel 2.88	Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2021	II - 185
Tabel 2.89	Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Sukabumi	II - 186
Tabel 2.90	Jenis Sarana Perdagangan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 187
Tabel 2.91	Luas Lahan dan Luas Bangunan Pasar di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018	II - 188
Tabel 2.92	Jumlah IKM Berdasarkan Bidang Usaha di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 189
Tabel 2.93	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2020	II - 189
Tabel 2.94	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Lokal Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020 (jiwa)	II - 191
Tabel 2.95	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Luar Pulau Jawa Tahun 2019	II - 191
Tabel 2.96	Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Ikan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu Tahun 2008-2020	II - 192
Tabel 2.97	Produksi Daging menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (Kg)	II - 194
Tabel 2.98	Jumlah, Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019	II - 195
Tabel 2.99	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020	II - 196

Tabel 2.100	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020	II - 198
Tabel 2.101	Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung di Kabupaten Sukabumi Tahun 2017-2019	II - 198
Tabel 2.102	Proporsi komponen pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	II - 199
Tabel 2.103	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020	II - 202
Tabel 2.104	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020..... ..	II - 202
Tabel 2.105	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020.....	II - 204
Tabel 2.106	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan kelompok barang di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	II - 205
Tabel 2.107	Nilai Tukar Petani Jawa Barat tahun 2018-2020	II - 208
Tabel 2.108	Jumlah komoditi Ekspor Non Migas di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	II - 210
Tabel 2.109	Jumlah Bank Berdasarkan Jenis Kepemilikannya di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020	II - 214
Tabel 2.110	Jumlah Bank Berdasarkan Jumlah Kantor di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020	II - 215
Tabel 2.111	Jumlah Hotel, Kamar, Tempat Tidur, dan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 216
Tabel 2.112	Posisi pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	II - 217
Tabel 2.113	Jumlah Tindakan Kriminalitas Menurut Jenisnya Kabupaten Sukabumi tahun 2013-2018	II - 220
Tabel 2.114	Rasio Ketergantungan Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020 (%)	II - 222

Tabel 2.115	Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020	II - 223
Tabel 2.116	Capaian Indikator makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020	II - 226
Tabel 2.117	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sukabumi Tahun 2020	II - 228
Tabel 2.118	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020.....	II - 314
Tabel 2.119	Evaluasi indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	II - 319
Tabel 2.120	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2020	II - 336
Tabel 2.121	Capaian TPB Kabupaten Sukabumi.....	II - 343
Tabel 3.1	Realisasi APBD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2020.....	III - 3
Tabel 3.2	Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2020..	III - 5
Tabel 3.3	Perkembangan proporsi realisasi komponen pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020.....	III - 7
Tabel 3.4	Target dan realisasi PAD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2020	III - 8
Tabel 3.5	Target dan realisasi pendapatan transfer Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020.....	III - 10
Tabel 3.6	Target dan realisasi lain–lain pendapatan yang sah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-202.....	III - 13
Tabel 3.7	Klasifikasi kondisi kemandirian fiskal daerah	III - 14
Tabel 3.8	Target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2020.....	III - 16
Tabel 3.9	Rata–rata pertumbuhan neraca keuangan daerah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2020.....	III - 17
Tabel 3.10	Analisis neraca keuangan Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2020	III - 19
Tabel 3.11	Proporsi realisasi jenis belanja daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	III - 20

Tabel 3.12	Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	III - 21
Tabel 3.13	Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020 ...	III - 22
Tabel 3.14	Pembiayaan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	III - 23
Tabel 3.15	Defisit riil anggaran Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2020	III - 23
Tabel 3.16	Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	III - 24
Tabel 3.17	Realisasi Sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	III - 25
Tabel 3.18	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026	III - 27
Tabel 3.19	Proyeksi pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026	III - 30
Tabel 3.20	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026	III - 31
Tabel 3.21	Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2022-2026	III - 32
Tabel 4.1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan jenis kelamin tahun 2016-2020.....	IV - 5
Tabel 4.2	Proporsi pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan jenis kelamin tahun 2016-2020.....	IV - 5
Tabel 4.3	Serapan Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Usaha.....	IV - 7
Tabel 4.4	Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1 tanpa kemiskinan	IV - 53
Tabel 4.5	Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 3 kehidupan sehat dan sejahter .	IV - 55
Tabel 4.6	Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 10 berkurangnya kesenjangan....	IV - 57

Tabel 4.7	Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 11 kota dan pemukiman berkelanjutan.....	IV - 59
Tabel 4.8	Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 15 ekosistem darat.....	IV - 62
Tabel 4.9	Pemetaan masalah pada sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi.....	IV - 65
Tabel 4.10	Pemetaan masalah kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sukabumi.....	IV - 68
Tabel 4.11	Pemetaan masalah berdasarkan kondisi ekonomi dan sumber daya alam Kabupaten Sukabumi.....	IV - 70
Tabel 4.12	Pemetaan masalah berdasarkan kondisi infrastruktur Kabupaten Sukabumi	IV - 72
Tabel 4.13	Pemetaan masalah berdasarkan kondisi pemerintah Kabupaten Sukabumi.....	IV - 76
Tabel 5.1	Penetapan Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026	V - 6
Tabel 5.2	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.....	V - 7
Tabel 5.3	Keterkaitan Sasaran RPJMN, RPJMD Jawa Barat, dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi.....	V - 15
Tabel 5.4	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi 2021-2026.....	V - 19
Tabel 5.5	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi	V - 20
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.....	VI - 4
Tabel 6.2	Deskripsi Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.....	VI - 12
Tabel 6.3	Wilayah Pengembangan berdasarkan Konsep Pemanfaatan Wilayah Perekonomian	VI - 40
Tabel 6.4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Prioritas Pembangunan, dengan Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi.....	VI - 55

Tabel 6.5	Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi	VI - 77
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Sukabumi	VII - 3
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sukabumi	VII - 5
Tabel 8.1	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026	VIII - 3
Tabel 8.2	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2026	VIII - 4
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026	VIII - 20
Tabel 8.4	Penetapan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026	VIII - 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram *Pentahelix* Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi.....	I - 3
Gambar 1.2	Rencana Tahapan 5 (Lima) Tahunan Pencapaian Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025.....	I - 11
Gambar 1.3	Tahapan Penyusunan RKPD	I - 13
Gambar 2.1	Peta Topografi Kabupaten Sukabumi	II - 4
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sukabumi	II - 5
Gambar 2.3	Peta Jenis Tanah Kabupaten Sukabumi	II - 6
Gambar 2.4	Peta Formasi Batuan Kabupaten Sukabumi	II - 7
Gambar 2.5	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sukabumi	II - 9
Gambar 2.6	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Sukabumi	II - 10
Gambar 2.7	Peta Curah Hujan Kabupaten Sukabumi	II - 12
Gambar 2.8	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukabumi 2014.....	II - 25
Gambar 2.9	Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Sukabumi	II - 28
Gambar 2.10	Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Sukabumi.....	II - 29
Gambar 2.11	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Sukabumi	II - 30
Gambar 2.12	Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Sukabumi.....	II - 31
Gambar 2.13	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sukabumi	II - 32
Gambar 2.14	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Sukabumi	II - 33
Gambar 2.15	Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Sukabumi	II - 34
Gambar 2.16	Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api Gede di Kabupaten Sukabumi	II - 35
Gambar 2.17	Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api Salak di Kabupaten Sukabumi.....	II - 36

Gambar 2.18 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sukabumi ..... II - 37
Gambar 2.19 Peta Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Sukabumi ..... II - 38
Gambar 2.20 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020 ..... II - 39
Gambar 2.21 Piramida penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2020..... II - 41
Gambar 2.22 Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2016-2020..... II - 47
Gambar 2.23 Laju inflasi Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2010-2020 ..... II - 50
Gambar 2.24 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) ..... II - 51
Gambar 2.25 Tren Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Sukabumi dengan Jawa Barat Tahun 2010-2020 (poin) ..... II - 53
Gambar 2.26 Grafik Indeks Gini Kabupaten/kota Se-Jawa Barat tahun 2020 ..... II - 53
Gambar 2.27 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi dengan Jawa Barat, dan Target Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)..... II - 54
Gambar 2.28 Perbandingan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2015-2020 (%) ..... II - 55
Gambar 2.29 Perbandingan Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2015-2020 (%)..... II - 56
Gambar 2.30 Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan Target Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (Poin) ..... II - 58
Gambar 2.31 Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Sukabumi dengan IPM Kabupaten/Kota Se Jawa Barat Tahun 2020 (Poin)..... II - 58
Gambar 2.32 Trend Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Kabupaten Sukabumi, Jawa

Barat, dan Target Sukabumi Tahun 2016 – 2020 (Ribu Rupiah) ..... II - 59

Gambar 2.33 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Kabupaten/Kota Se Jawa Barat tahun 2020 (Ribu Rupiah)..... II - 60

Gambar 2.34 Tren Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2016 – 2020 (Tahun) ..... II - 61

Gambar 2.35 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat Tahun 2020 (Tahun)..... II - 62

Gambar 2.36 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (Tahun)..... II - 63

Gambar 2.37 Angka partisipasi kasar Sekolah Dasar Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%) ..... II - 64

Gambar 2.38 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%) ..... II - 64

Gambar 2.39 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%) ..... II - 66

Gambar 2.40 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%) ..... II - 66

Gambar 2.41 Tren Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2016 – 2020 (Tahun) ..... II - 68

Gambar 2.42 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se Jawa Barat Tahun 2020 (Tahun) ..... II - 69

Gambar 2.43 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Sukabmi Tahun 2016-2020 (%) ..... II - 70

Gambar 2.44 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%) ..... II - 71

Gambar 2.45 Bagan Harian Terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Sukabumi Maret 2020 – Juli 2021..... II - 72

Gambar 2.46 Risiko Covid 19 Provinsi Jawa Barat Januari-Februari 2021 ..... II - 73

Gambar 2.47 Skor dan Peta Risiko Covid 19 Provinsi Jawa Barat Januari-Februari 2021..... II - 73

Gambar 2.48	Skor Covid 19 Provinsi Jawa Barat Januari – Februari 2021	II - 73
Gambar 2.49	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)	II - 75
Gambar 2.50	Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020 (%)	II - 76
Gambar 2.51	Atlet Berprestasi Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	II - 79
Gambar 2.52	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 80
Gambar 2.53	Rasio Guru Terhadap Murid Menurut Jenis Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020.....	II - 83
Gambar 2.54	Persentase Kondisi Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kabupaten Sukabumi 2016-2020.....	II - 84
Gambar 2.55	Persentase Kondisi Ruang Kelas Sekolah Menengah di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020.....	II - 84
Gambar 2.56	Aksesibilitas SD Per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi	II - 85
Gambar 2.57	Aksesibilitas SMP Per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi	II - 86
Gambar 2.58	Aksesibilitas SMA Per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi	II - 86
Gambar 2.59	Angka Kematian Bayi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020.....	II - 88
Gambar 2.60	Angka Kematian Ibu Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 89
Gambar 2.61	Aksesibilitas Sarana Kesehatan Per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi	II - 90
Gambar 2.62	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020	II - 97
Gambar 2.63	Persentase Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)	II - 101
Gambar 2.64	Intensitas Permasalahan Sosial (Standar <1)	II - 112

Gambar 2.65	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	II - 116
Gambar 2.66	IPG, IPM Kabupaten Sukabumi, dan IPG Jawa Barat Tahun 2010-2020	II - 119
Gambar 2.67	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se Jawa Barat Tahun 2020	II - 120
Gambar 2.68	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020	II - 122
Gambar 2.69	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota se Jawa Barat Tahun 2020	II - 124
Gambar 2.70	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019	II - 125
Gambar 2.71	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota se Jawa Barat Tahun 2019	II - 127
Gambar 2.72	Ketersediaan Energi Per Kapita Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 130
Gambar 2.73	Ketersediaan Protein Per Kapita Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 130
Gambar 2.74	Target dan capaian indeks lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	II - 132
Gambar 2.75	Capaian Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 133
Gambar 2.76	Target dan capaian persentase penanganan sampah di Kabupaten Sukabumi	II - 134
Gambar 2.77	Peta Status Desa Berdasarkan IDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	II - 139
Gambar 2.78	Peta Status Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2020	II - 141
Gambar 2.79	Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2020 (%)	II - 143
Gambar 2.80	Peserta KB Menurut Jenis Alat KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 (%)	II - 143
Gambar 2.81	Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2018	II - 157

Gambar 2.82 Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Sukabumi ..... II - 160
Gambar 2.83 Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019 ..... II - 164
Gambar 2.84 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 ..... II - 168
Gambar 2.85 Jumlah Koleksi Buku Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 ..... II - 170
Gambar 2.86 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020 ..... II - 173
Gambar 2.87 Wilayah Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geoprak* ..... II – 174
Gambar 2.88 Capaian PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020 ..... II - 176
Gambar 2.89 Persentase Kontribusi Bidang Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020..... II - 177
Gambar 2.90 PDRB Sub Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 ..... II - 178
Gambar 2.91 Produktivitas Padi dan Padi Gogo per Hektar Kabupaten Sukabumi Tahun 2014-2020 ..... II - 179
Gambar 2.92 Luas Lahan Sawah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2020 ..... II - 180
Gambar 2.93 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2003, 2013, 2018 dan 2020..... II - 182
Gambar 2.94 Luas Kawasan Hutan KPH di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2018 (Ha) ..... II - 184
Gambar 2.95 Persentase Jumlah PUMK Berdasarkan Sektor di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 ..... II - 190
Gambar 2.96 Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhanratu Tahun 2008-2020 ..... II - 193
Gambar 2.97 Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020 ..... II - 200
Gambar 2.98 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2019 ..... II - 201

Gambar 2.99	Persentase ASN Diklat Formal dan Pejabat ASN Diklat Struktural di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2019	II - 203
Gambar 2.100	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020	II - 204
Gambar 2.101	Upah Minimum Regional Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2020 (Rupiah)	II - 206
Gambar 2.102	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	II - 212
Gambar 2.103	Penanganan daerah Rawan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (Desa)	II - 213
Gambar 2.104	Jumlah Restoran di Kabupaten Sukabumi Tahun 2014-2020	II - 216
Gambar 2.105	Capaian Kinerja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 (%)	II - 312
Gambar 2.106	Ketercapaian Indikator TPB Kabupaten Sukabumi Pilar Sosial (%)	II - 344
Gambar 2.107	Ketercapaian Indikator TPB Kabupaten Sukabumi Pilar Ekonomi (%)	II - 344
Gambar 2.108	Ketercapaian Indikator TPB Kabupaten Sukabumi Pilar Lingkungan (%)	II - 345
Gambar 2.109	Ketercapaian Indikator TPB Kabupaten Sukabumi Pilar Hukum dan Tata Kelola (%)	II - 346
Gambar 3.1	Tren Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021	III - 6
Gambar 3.2	Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	III - 7
Gambar 3.3	Proporsi Realisasi Komponen PAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020	III - 9
Gambar 3.4	Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	III - 11
Gambar 3.5	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020	III - 11

Gambar 3.6	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2020	III - 12
Gambar 3.7	Proporsi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dalam APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2020.....	III - 13
Gambar 3.8	Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020.....	III - 15
Gambar 4.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020.....	IV - 21
Gambar 4.2	*Total Fertility Rate* Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020	IV - 22
Gambar 4.3	Tingkat Reproduksi Netto atau *Net Reproduction Rate* (NRR) Kabupaten Sukabumi 2018-2020	IV - 23
Gambar 4.4	Rasio Beban Ketergantungan atau *Dependency Ratio* (DR) Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2019	IV - 38
Gambar 4.5	Rencana Tahapan Lima Tahunan Pencapaian Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025	IV - 40
Gambar 4.6	Visi, Misi, Arahan Presiden, serta Agenda Pembangunan Nasional.....	IV - 42
Gambar 4.7	Hasil Penapisan TPB Prioritas	IV - 48
Gambar 5.1	Peta Strategi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026.....	V - 14
Gambar 6.1	Posisi RPJMD tahun 2021-2026 dalam RPJPD 2005-2025.....	VI - 3
Gambar 6.2	Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi 2021-2026.....	VI – 31+
Gambar 6.3	Peta Kawasan Strategis di Kabupaten Sukabumi .	VI - 38

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan sangat penting dilakukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, serta dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat. Perencanaan pembangunan juga memungkinkan pemerintah untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pemerintah kemudian menetapkan peraturan perundangan yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menjamin tercapainya tujuan negara dan menjamin terlaksananya pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, juga menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah menetapkan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu hal yang diamanatkan yaitu Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan tersebut merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun

secara berjangka, meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (iii) Renstra-SKPD. Selanjutnya dokumen RPJMD tersebut dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

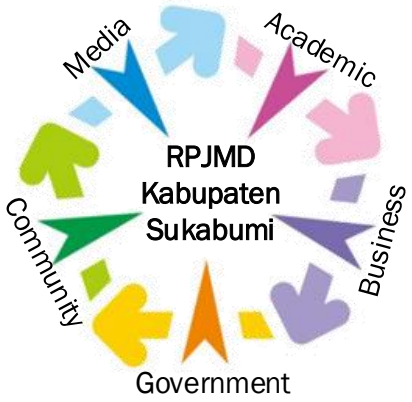
Pada tanggal 9 Desember 2020 Kabupaten Sukabumi melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan Marwan Hamami dan Iyos Somantri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Periode 2021-2026 serta dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkan dalam bentuk peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, sehingga menjadi tahapan yang sangat penting karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Sukabumi. Tahapan lima tahun terakhir pembangunan ini diarahkan kepada pengembangan inovasi berkelanjutan pada berbagai komoditas unggulan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Masyarakat diharapkan memiliki daya saing dan daya juang yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain khususnya di Jawa Barat, serta memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan Jawa Barat dan pembangunan Nasional.

RPJMD Kabupaten Sukabumi disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun ditingkat provinsi. Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD.

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 mengacu kepada visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 dan berbagai kebijakan serta prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semua dokumen perencanaan tersebut diharapkan dapat menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 juga disusun dengan memperhatikan pemenuhan pendekatan kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *Pentahelix* – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government,* dan *Media*).



Gambar 1.1 Diagram *Pentahelix* Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi

Pihak yang terlibat dalam pendekatan kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan terbagi atas 5 (lima) elemen yaitu: elemen pertama pemerintah (*government*) meliputi pemerintah Kabupaten Sukabumi berikut dengan perangkat daerah Kabupaten Sukabumi; elemen kedua akademisi (*academic*) meliputi universitas-universitas maupun lembaga-lembaga pendidikan terkait yang berada daerah Kabupaten Sukabumi; elemen ketiga pelaku usaha (*business*) meliputi para pelaku usaha serta asosiasi terkait yang berada di daerah Kabupaten Sukabumi; elemen keempat komunitas (*community*) meliputi komunitas-komunitas hobi ataupun komunitas kreatif di daerah Kabupaten Sukabumi; dan elemen kelima media meliputi media-media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar.

Secara umum metode penyusunan RPJMD dimulai dari penyusunan rancangan teknokratik meliputi prediksi kondisi umum daerah yang terdiri dari geomorfologi dan lingkungan, ekonomi dan sumber daya alam, demografi, serta sarana dan prasarana. Dari penilaian yang telah dilakukan tersebut selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya pemerintah daerah sebagai elemen pertama meminta partisipasi publik melalui forum konsultasi publik untuk melakukan pembahasan dengan musyawarah perencanaan pembangunan yang menghasilkan rumusan hasil kesepakatan dan komitmen antara pemerintah daerah dengan 4 (empat) elemen lain selain pemerintah daerah. Hasil forum konsultasi publik bertujuan memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Hasil penyempurnaan RPJMD dilakukan melalui berbagai proses sehingga akhirnya terbentuk rancangan RPJMD. Dalam hal ini pendekatan kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan juga kembali dilakukan dalam hal pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan 5 (lima) elemen yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu ABCGM (*Academic, Business, Community, Government,* dan *Media*).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah8n 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioanl dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2021 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 32);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 7, Tambahan Lembaran Daerah No 236);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 8, Tambahan Lembaran Daerah No 237);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032; dan
36. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum penyusunan RPJMD, maka dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026 ini memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun keterhubungan dari RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain adalah sebagai berikut:

1.3.1 RPJM Nasional 2020-2024

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Sukabumi.

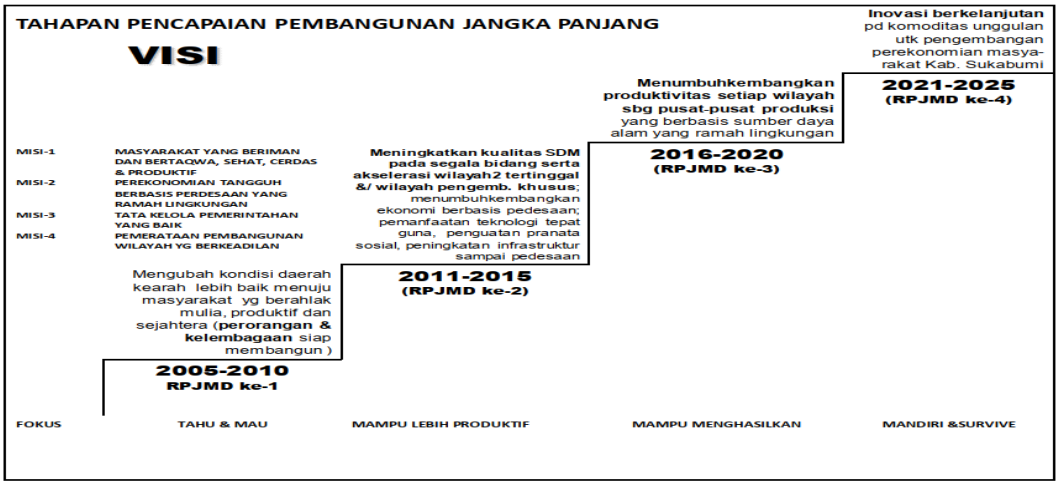
1.3.2 RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Hal ini sangat penting

dilakukan agar tercipta keselarasan arah dan tujuan sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

1.3.3 RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026 merupakan tahap keempat dari perencanaan pembangunan tahun 2005-2025, sehingga arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tersebut menjadi hal penting yang harus dimasukan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini, fokus dari RPJPD Kabupaten Sukabumi 2002-2025 di tahap keempat yaitu pada kemandirian dan ketahanan. Arah kebijakan yang ditetapkan yaitu inovasi berkelanjutan pada komunitas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut:



Sumber: RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005-2025

Gambar 1.2 Rencana Tahapan 5 (Lima) Tahunan Pencapaian Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025

1.3.4 Renstra Perangkat Daerah

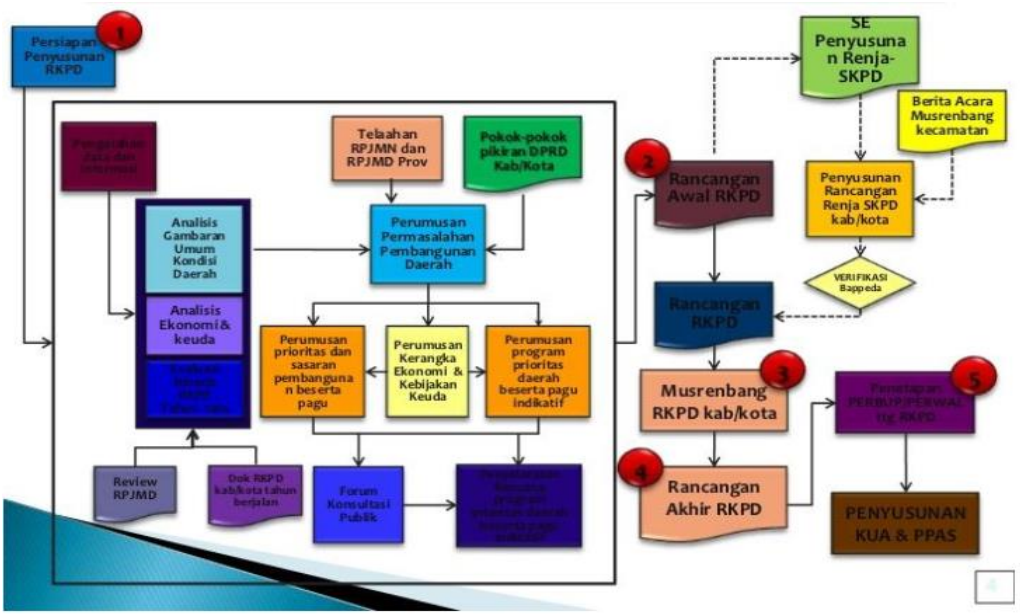
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD

Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi BAPPEDA Kabupaten Sukabumi.

1.3.5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 setiap tahunnya dijabarkan dalam RKPD. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukabumi. Hal ini mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Disamping itu, prioritas dan sasaran tersebut harus berpedoman pula pada RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional. Tahapan penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.3 Tahapan Penyusunan RKPD

1.3.6 Dokumen Perencanaan Lainnya

Berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 perlu ditelaah lebih lanjut, baik dokumen pada level Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota di sekitar wilayah Kabupaten Sukabumi. Dokumen-dokumen tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kabupaten Sukabumi.
5. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi pada periode tahun 2021-2026;

2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi selama periode 2021-2026;
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Tujuan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan perihal pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar proyeksi kapasitas riil kemampuan pendanaan tahunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menetapkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dari tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah dan Perencanaan Penganggaran Kabupaten Sukabumi;
4. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
5. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dengan tujuan perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan serta tahunan; dan

6. Menjadi landasan dalam integrasi dan sinergi perencanaan dengan penganggaran serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan di Kabupaten Sukabumi;

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menunjukkan gambaran umum kondisi daerah, menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Sukabumi secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (i) geografi dan demografi; (ii) kesejahteraan masyarakat; (iii) pelayanan umum; serta (iv) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran

tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memberikan gambaran mengenai permasalahan dan isu-isu strategis karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD. Penyajian analisis ini dapat menjelaskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam bab ini menguraikan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan dengan yang ditetapkan dalam RPJMD.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu memberikan penjelasan tentang hubungan dari setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan Kabupaten Sukabumi dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan Kabupaten Sukabumi menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dan juga berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Sukabumi

A. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Sukabumi berada dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh sejauh 95 km dari ibu kota Provinsi Jawa Barat, dan sejauh 120 Km dari Ibu Kota Negara Indonesia. Secara geografis wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 6° 57' - 7° 25' Lintang Selatan dan 106° 49' - 107° 00' Bujur Timur. Kabupaten Sukabumi mempunyai luas wilayah sebesar 4.162 km^2 atau 11,21 persen dari luas Provinsi Jawa Barat dan 3,01 persen dari luas Pulau Jawa. Wilayah Kabupaten Sukabumi berada pada 0 - 2.960 meter di atas permukaan laut dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bogor
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Indonesia, serta
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Sukabumi terbagi ke dalam 47 kecamatan, 5 kelurahan dan 381 desa. Dari 386 desa/kelurahan yang ada, wilayah yang dikategorikan masuk perkotaan sebanyak 120 desa/kelurahan dan sisanya 266 desa/kelurahan merupakan kategori pedesaan. Kecamatan Cisaat, Cisolok dan Cicurug memiliki jumlah desa/kelurahan yang paling banyak yaitu 13 desa, sedangkan kecamatan Cidolog, Lengkong, Kebon pedes, Cireunghas, dan Bojong genteng memiliki jumlah desa/kelurahan terkecil hanya mempunyai 5 desa/kelurahan. Luas wilayah, jumlah desa, dan jumlah kelurahan per kecamatan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dalam data wilayah administratif kabupaten Sukabumi pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas wilayah, jumlah desa/kelurahan per kecamatan di Kabupaten Sukabumi

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah Desa	Kelurahan
1	Ciemas	314,14	9	0
2	Ciracap	134,22	8	0
3	Waluran	100,64	6	0
4	Surade	119,59	11	1
5	Cibitung	90,76	6	0
6	Jampangkulon	69,66	10	1
7	Cimanggu	146,16	6	0
8	Kalibunder	85,78	7	0
9	Tegalbuleud	255,52	8	0
10	Cidolog	97,72	5	0
11	Sagaranten	116,65	12	0
12	Cidadap	83,82	6	0
13	Curugkembar	62,03	7	0
14	Pabuaran	115,81	7	0
15	Lengkong	141,36	5	0
16	Palabuhanratu	91,86	9	1
17	Simpenan	170,69	7	0
18	Warungkiara	89,66	12	0
19	Bantargadung	75,85	7	0
20	Jampangtengah	204,21	11	0
21	Purabaya	103,37	7	0
22	Cikembar	81,68	10	0
23	Nyalindung	107,92	10	0
24	Gegerbitung	68,97	7	0
25	Sukaraja	42,13	9	0
26	Kebonpedes	11,36	5	0
27	Cireunghas	29,56	5	0

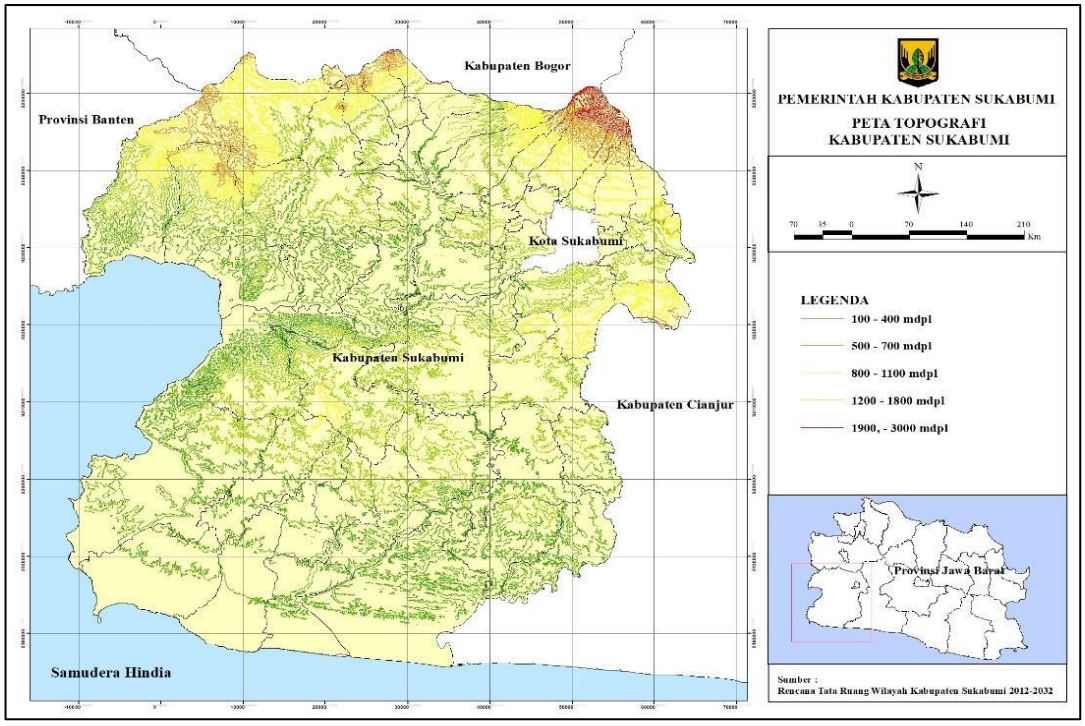
No	Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Desa	Kelurahan
28	Sukalarang	30,77	6	0
29	Sukabumi	30,34	6	0
30	Kadudampit	69,62	9	0
31	Cisaat	23,09	13	0
32	Gunungguruh	26,31	7	0
33	Cibadak	64,03	9	1
34	Cicantayan	35,81	8	0
35	Caringin	36,89	9	0
36	Nagrak	69,04	10	0
37	Ciambar	61,34	6	0
38	Cicurug	46,59	12	1
39	Cidahu	34,58	8	0
40	Parakansalak	38,08	6	0
41	Parungkuda	25,87	8	0
42	Bojonggenteng	17,32	5	0
43	Kalapanunggal	49,09	7	0
44	Cikidang	155,59	12	0
45	Cisolok	173,49	13	0
46	Cikakak	113,61	9	0
47	Kabandungan	136,77	6	0
Kabupaten Sukabumi		**4.145,70**	**381**	**5**

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2020

Pada Tabel 2.1 menunjukkan Kecamatan Ciemas merupakan kecamatan paling luas di Kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah mencapai 314,14 km², sedangkan Kecamatan Kebonpedes merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 11,36 km².

B. Topografi

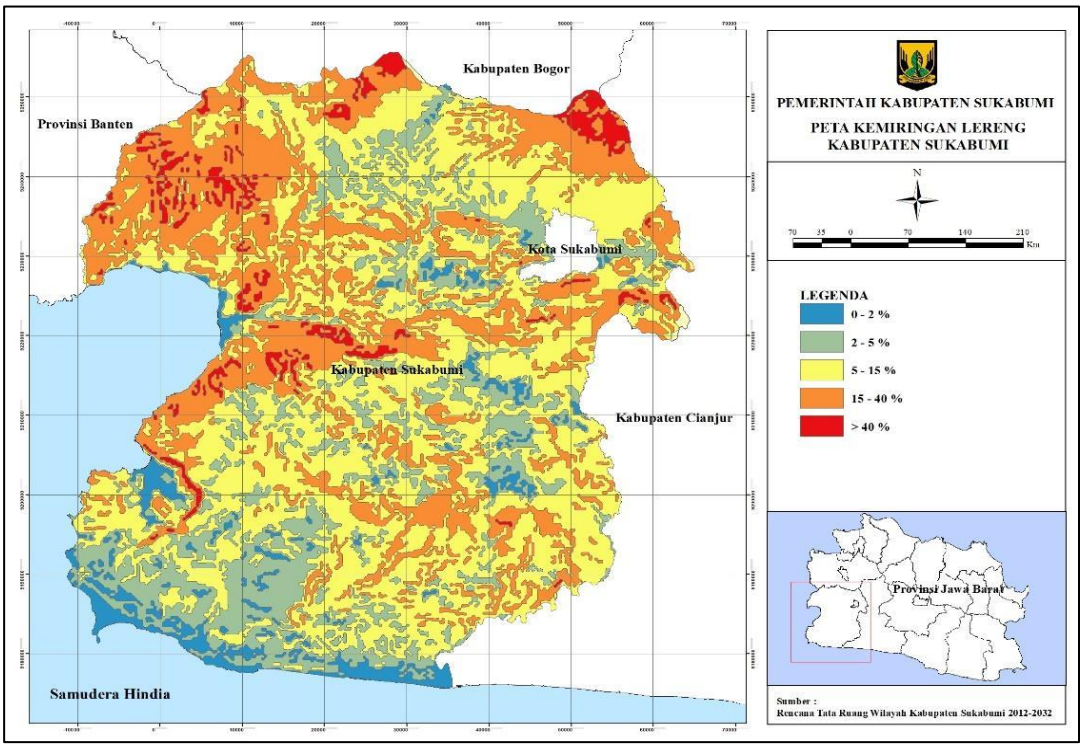
Bentuk topografi wilayah Kabupaten Sukabumi umumnya meliputi permukaan yang bergelombang di daerah selatan, bentuk permukaan pegunungan di daerah bagian utara, dan bentuk permukaan berbukit di daerah wilayah bagian tengah, dengan ketinggian berkisar antara 0 - 2.960 mdpl, secara detail dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

Gambar 2.1 Peta Topografi Kabupaten Sukabumi

Topografi Kabupaten Sukabumi terbentang dari daerah pesisir hingga pegunungan. Terdapat 2 (dua) gunung api aktif di Kabupaten Sukabumi, yaitu Gunung Halimun dan Gunung Gede yang masing-masing mempunyai puncak ketinggian setinggi 1.925 mdpl dan 2.958 mdpl. Hal tersebut menyebabkan Kabupaten Sukabumi memiliki lereng yang sangat miring sebesar lebih dari 35°. Wilayah Kabupaten Sukabumi dengan kemiringan antara 13° - 35° meliputi 37 persen, kemiringan antara 2° -13° meliputi 21 persen, dan sisanya daerah datar meliputi 13 persen. Sebaran kemiringan wilayah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.2.



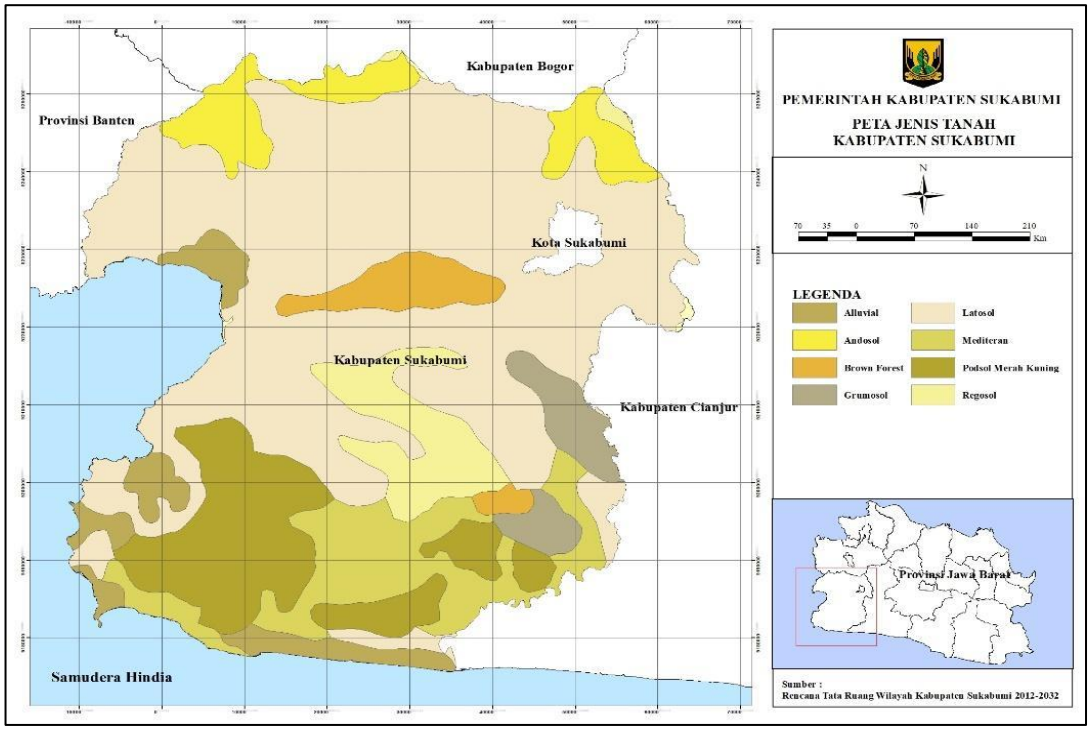
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sukabumi

Peta di atas menunjukkan bahwa terdapat wilayah yang memiliki kemiringan 15 sampai 40 persen yang ditandai dengan wilayah berwarna merah dan jingga. Dengan tingkat kemiringan seperti itu, wilayah tersebut dapat diklasifikasikan memiliki kemiringan dari agak curam hingga curam. Daerah dengan kemiringan dengan kurang dari 15 persen dapat diklasifikasikan sebagai daerah dengan kemiringan datar atau landai, seperti pada Kabupaten Sukabumi bagian selatan didominasi dengan kemiringan yang landai.

Kontur permukaan Kabupaten Sukabumi yang bergelombang dengan derajat dan persentase kemiringan yang beragam serta terdapat wilayah pegunungan di wilayah utara, dan pesisir di wilayah selatan mengakibatkan terdapat perbedaan dan ciri khas jenis tanah disetiap wilayah. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut karena mengalami perubahan yang alami dikarenakan pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati (Dokuchaev, 1870). Informasi mengenai jenis tanah dapat menjadi acuan

dalam perencanaan pembangunan pada sektor pertanian untuk menentukan komoditas yang ditanam. Berdasarkan data dalam peta jenis tanah, di Kabupaten Sukabumi di dominasi oleh jenis tanah *latosol, aluvial,* dan *mediteran*. Menurut (Supriyo, 2009), tanah *aluvial* berasal dari endapan yang berlapis-lapis, sifat dan kesuburannya dipengaruhi oleh sumber bahan asalnya. Tanah *aluvial* dapat terendap dari sungai atau aliran besar yang banyak mengandung unsur hara dan cocok untuk ditanami padi. Tanah *aluvial* dapat pula terendap dari gunung merapi yang dapat menyebabkan tanah menjadi subur. Tanah *latosol* merupakan jenis tanah mineral yang cukup cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman seperti tebu, kakao, tembakau, panili, dan pala. Sebaran jenis tanah di Kabupaten Sukabumi lebih detail dapat dilihat pada Gambar 2.3.



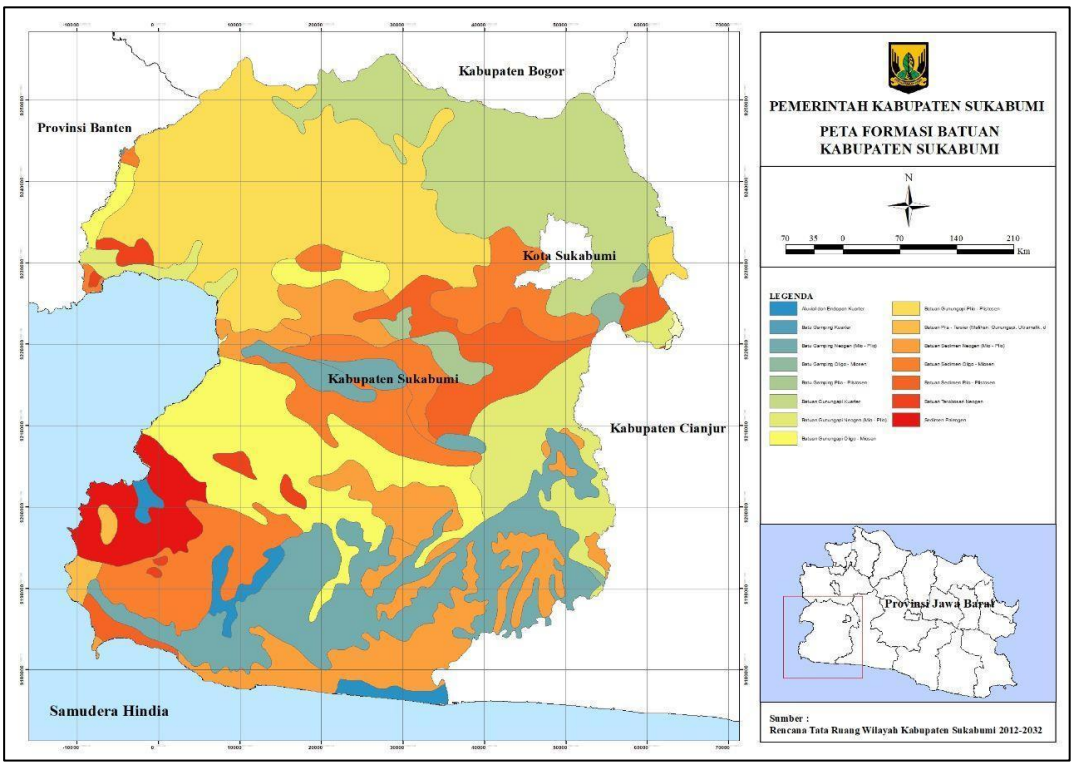
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

Gambar 2.3 Peta Jenis Tanah Kabupaten Sukabumi

C. Geologi

Geologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan mengenai kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya, membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, dan proses yang bekerja di dalam ataupun di atas permukaan

bumi (Noor, 2014). Informasi mengenai geologi bagi rencana pembangunan memiliki peranan yang penting sebagai informasi penunjang dan pendukung bagi program rencana pembangunan disuatu wilayah. Salah satu informasi geologi yang dapat dimanfaatkan yaitu jenis dan sebaran batuan wilayah. Hal ini diperlukan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan aspek fisik maupun non-fisik. Peta mengenai formasi batuan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

Gambar 2.4 Peta Formasi Batuan Kabupaten Sukabumi

Gambar 2.4 menunjukkan formasi batuan di Kabupaten Sukabumi yang beragam disetiap wilayah. Formasi batuan tersebut berdasarkan batuan penyusunnya dapat dikelompokkan dalam batuan Gunungapi, Batu Gamping, Batuan Pra-Tersier, Batuan Sedimen, dan Sedimen Paleogen. Batuan gunungapi merupakan batuan yang terbentuk sebagai hasil dari aktivitas gunung api baik langsung maupun tidak langsung. Aktivitas gunung api dapat berupa proses erupsi atau keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan dalam berbagai bentuk. Magma atau bahan erupsi yang keluar setelah mendingin kemudian akan mengendap dan membentuk batuan. Batuan gunungapi banyak di temui di sukabumi

bagian utara Kabupaten Sukabumi. Menurut (Gaffar, 2014) batuan gunungapi di Kabupaten Sukabumi dapat berasal dari batuan produk Gunungapi tua Gunung Beser, Gunung Butak, Gunung Salak, Gunung Gede dan Pangrango.

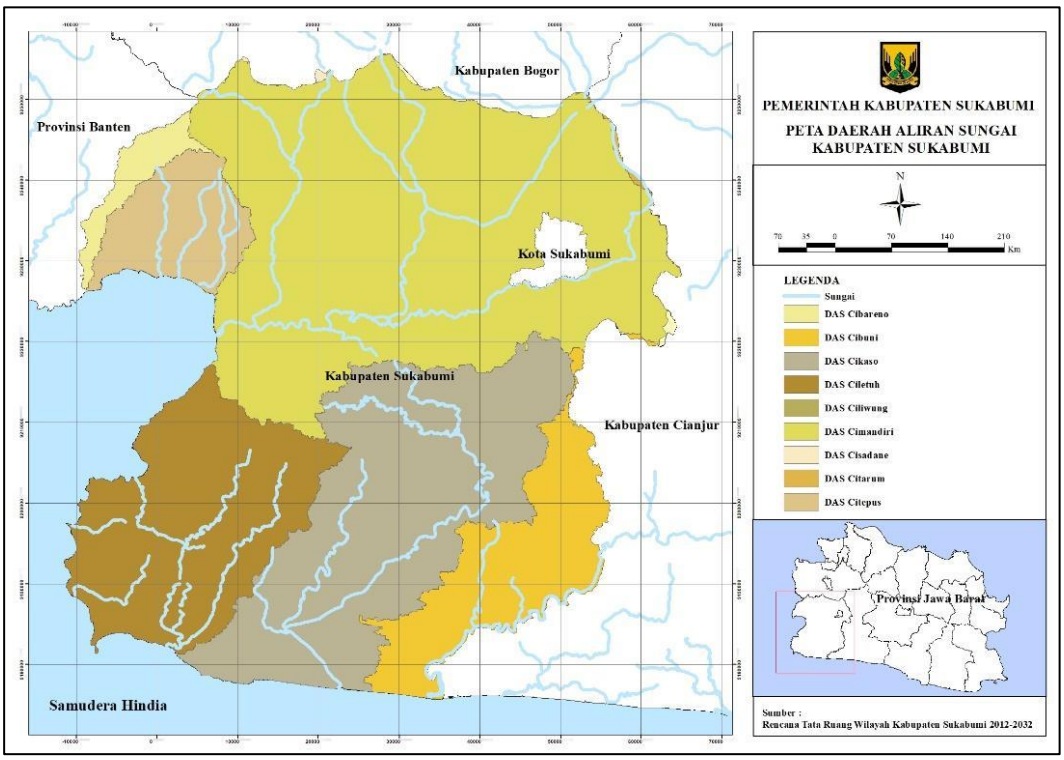
Batu gamping atau disebut dengan istilah batu kapur merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi cangkang, karang, alga, dan pecahan-pecahan sisa organisme, atau endapan dari kalsium karbonat dari air danau ataupun air laut. Batu gamping juga dapat ditemukan di dalam gua berupa stalaktit atau stalakmit akibat dari penguapan, sehingga wilayah di Sukabumi yang terdapat banyak batu gamping merupakan daerah yang terdapat banyak gua, daerah yang sebelumnya merupakan lautan atau daerah yang dekat dengan lautan. Batu gamping dapat digunakan sebagai bahan material konstruksi seperti landasan jalan dan kereta api, bahan pembuatan semen Portland. Batu gamping banyak ditemukan di Kabupaten Sukabumi bagian selatan yaitu di Kecamatan Surade, Jampangkulon, Kalibunder, Cidolog, Cidadap, Sagaranten, dan Curug Kembar.

Struktur geologi wilayah di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten/kota lain di Jawa Barat banyak dipengaruhi oleh peristiwa tumbukan lempeng atau peristiwa geologi tektonik, dengan batuan sedimen yang banyak membentuk pola lipatan. Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu merupakan salah satu kawasan geologi yang unik terbentuk akibat peristiwa tumbukan antar lempeng. Jenis batuan sedimen yang terdapat banyak di kawasan Kabupaten Sukabumi merupakan batuan yang banyak mengandung mineral dan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan kontruksi yang bernilai ekonomi tinggi, dan berpotensi sebagai bahan galian tambang. Berdasarkan data ESDM Provinsi Jawa Barat potensi bahan tambang yang ada di Kabupaten Sukabumi yaitu batu gamping/kapur, feldspar, pasir kwarsa, trass, pasir besi, dan batu ares.

D. Hidrologi

Hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Bila diamati dari

keberadaan sumber air di Kabupaten Sukabumi, terdapat kuantitas sumber air yang cukup banyak. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya aliran sungai seperti DAS Cimandiri dan anak sungainya, DAS Cibareno, Cibuni, Cikaso, Ciletuh, Ciliwung, Cisadane, Citarum, dan Citepus yang dapat dilihat pada Gambar 2.5. Sumber air tersebut digunakan masyarakat untuk keperluan mengairi lahan pertanian dan kegiatan non pertanian lainnya.



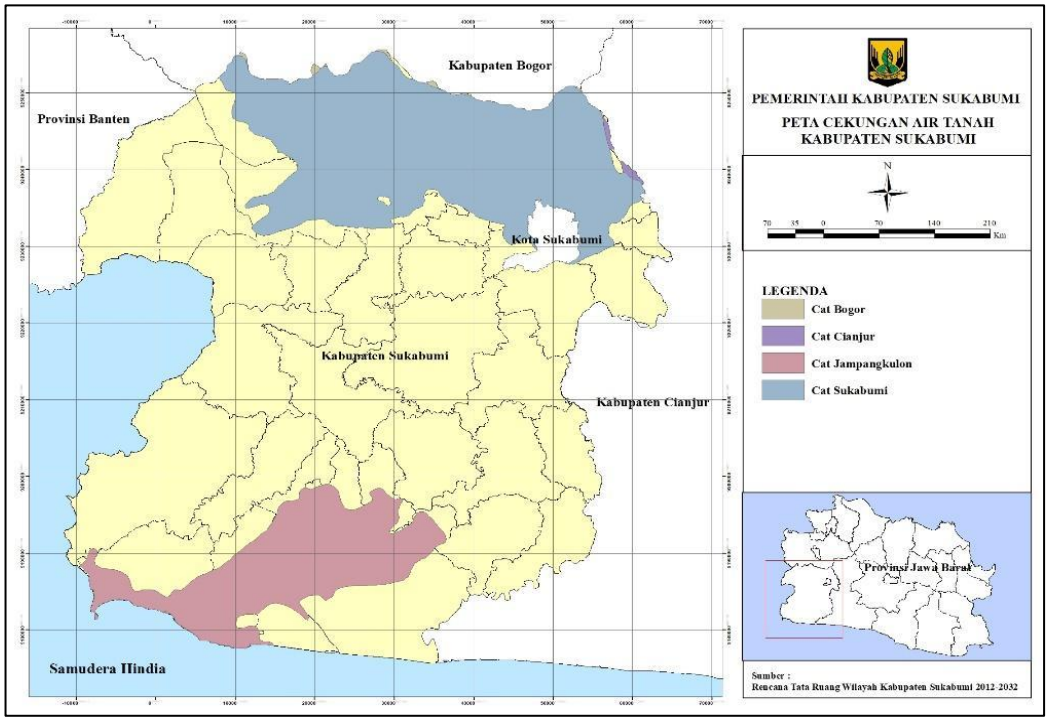
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

Gambar 2.5 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sukabumi

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi dimana air berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut. DAS berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai. DAS yang ada di Kabupaten Sukabumi yaitu DAS Cimandiri, DAS Ciletuh, DAS Cikarang, DAS Cikaso, DAS Cibuni, dan DAS Cibareno.

Air hujan yang jatuh dan mengalir dapat pula menyerap ke bawah permukaan tanah hingga mencapai zona jenuh dan terbentuk air tanah. Daerah yang terbentuk karena memiliki cadangan air tanah atau *groundwater* disebut dengan daerah Cekungan Air Tanah. Cekungan Air

Tanah merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Terdapat Cekungan Air Tanah Sukabumi di bagian utara Sukabumi, CAT Jampangkulon, dan CAT dari perbatasan Bogor dan Cianjur. Peta sebaran cekungan air tanah di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

Gambar 2.6 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Sukabumi

E. Klimatologi

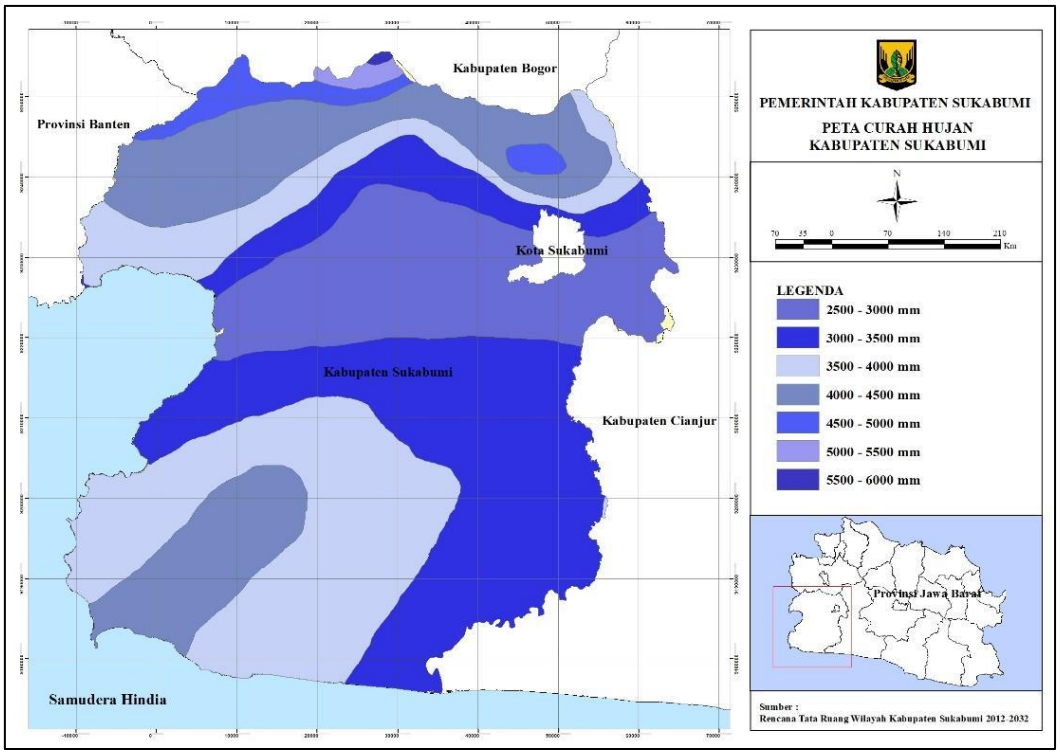
Klimatologi merupakan kondisi cuaca yang di rata-ratakan selama periode waktu tertentu. Klimatologi digunakan untuk mempelajari dinamika atau pola cuaca dan iklim di suatu daerah/kawasan. Data klimatologi Kabupaten Sukabumi setiap bulan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pengamatan unsur iklim Kabupaten Sukabumi tahun 2020

Bulan	Suhu (°C)		Curah Hujan (mm)
	Minimum	Maksimum	
Januari	16,2	31,6	599
Februari	17,6	31,6	328
Maret	17,6	31,6	586
April	16,2	31,8	350
Mei	16,2	31,6	392
Juni	16,8	31,8	211
Juli	17,2	31,8	95
Agustus	17,0	31,8	33
September	17,4	31,2	189
Oktober	17,0	31,0	528
November	18,6	30,2	427
Desember	NA	NA	NA

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021

Kabupaten Sukabumi sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, memiliki kelembaban yang cukup tinggi, mencapai 100 persen pada malam hingga pagi hari. Pada tahun 2020, tren suhu di Kabupaten Sukabumi secara umum baik dengan suhu minimum dan maksimum per bulan cenderung stabil, dengan bervariasi sekitar 0,03 °C setiap tahunnya. Curah hujan Kabupaten Sukabumi mencapai 2500-6000 mm per tahun, dengan rata-rata curah hujan bulanan antara 40-500 mm per bulan. Curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Sukabumi salah satunya disebabkan oleh posisi Kabupaten Sukabumi yang berbatasan langsung dengan samudera hindia dan termasuk ke dalam daerah beriklim tropis basah, sehingga memiliki iklim laut yang sifatnya lembab dan sering terjadi hujan. Sebaran curah hujan di Kabupaten Sukabumi secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

Gambar 2.7 Peta Curah Hujan Kabupaten Sukabumi

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Sukabumi meliputi kawasan hutan, lahan pertanian (ladang, rumput/ilalang, sawah, semak belukar, perkebunan, kebun campuran, dan lainnya), permukiman, tubuh air serta kawasan yang tidak teridentifikasi. Penggunaan lahan pada tahun 2014 di masing-masing kecamatan berdasarkan RTRW, memiliki penggunaan lahan yang beragam dan dengan luasan yang berbeda-beda. Data penggunaan lahan di setiap kecamatan pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.8.

Tabel 2.3 Penggunaan lahan di Kabupaten Sukabumi tahun 2014

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Ciemas	Air Danau / Sit	8,46
		Air Empang	3,39
		Air Tawar Sungai	108,40
		Hutan	10.180,42
		Padang Rumput	568,87

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
		Pasir Pantai	42,52
		Perkebunan / Kebun	5.313,67
		Permukiman	604,30
		Sawah Tadah Hujan	3.875,39
		Semak Belukar / Alang Alang	8.324,00
		Tegalan / Ladang	1.417,56
2	Ciracap	Air Danau / Situ	8,33
		Air Empang	37,62
		Air Tawar Sungai	50,30
		Hutan	2,29
		Padang Rumput	167,29
		Pasir Pantai	91,97
		Perkebunan / Kebun	5.148,53
		Permukiman	606,68
		Sawah Tadah Hujan	6.611,32
		Semak Belukar / Alang Alang	447,26
		Tegalan / Ladang	1.694,14
3	Waluran	Air Danau / Situ	0,96
		Air Tawar Sungai	48,32
		Hutan	2.484,28
		Padang Rumput	57,00
		Perkebunan / Kebun	2.176,18
		Permukiman	236,01
		Sawah Tadah Hujan	2.343,57
		Semak Belukar / Alang Alang	1.299,07
		Tegalan / Ladang	1.269,26
4	Surade	Air Tawar Sungai	72,94
		Padang Rumput	28,82
		Pasir Pantai	2,99
		Perkebunan / Kebun	5.354,53
		Permukiman	999,25
		Sawah Tadah Hujan	3.809,99
		Semak Belukar / Alang Alang	112,70
		Tegalan / Ladang	1.554,98
5	Cibitung	Air Tawar Sungai	143,39
		Hutan	14,84
		Padang Rumput	101,54
		Pasir Pantai	74,68
		Perkebunan / Kebun	4.564,20
		Permukiman	211,10

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
		Sawah	34,01
		Sawah Tadah Hujan	1.398,43
		Semak Belukar / Alang Alang	1.044,82
		Tegalan / Ladang	1.305,64
6	Jampang Kulon	Air Tawar Sungai	28,96
		Padang Rumput	29,02
		Perkebunan / Kebun	1.095,03
		Permukiman	432,79
		Sawah Tadah Hujan	2.815,00
		Semak Belukar / Alang Alang	267,28
		Tegalan / Ladang	641,24
7	Cimanggu	Air Danau / Situ	0,69
		Air Tawar Sungai	22,66
		Hutan	1.872,59
		Padang Rumput	34,04
		Perkebunan / Kebun	462,94
		Permukiman	130,55
		Sawah Tadah Hujan	2.475,03
		Semak Belukar / Alang Alang	1.352,92
		Tegalan / Ladang	871,97
8	Kalibunder	Air Danau / Situ	0,06
		Air Tawar Sungai	44,02
		Hutan	1.176,20
		Padang Rumput	2,42
		Perkebunan / Kebun	386,27
		Permukiman	133,80
		Sawah	29,00
		Sawah Tadah Hujan	1.365,95
		Semak Belukar / Alang Alang	1.831,47
		Tegalan / Ladang	3.646,17
9	Tegalbuleud	Air Tawar Sungai	214,97
		Hutan	454,20
		Padang Rumput	1,36
		Pasir Pantai	22,30
		Perkebunan / Kebun	9.200,14
		Permukiman	363,21
		Sawah	80,04
		Sawah Tadah Hujan	2.527,70
		Semak Belukar / Alang Alang	6.446,55

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
		Tegalan / Ladang	6.252,93
10	Cidolog	Air Tawar Sungai	8,40
		Padang Rumput	1,94
		Perkebunan / Kebun	1.340,17
		Permukiman	234,46
		Sawah	2,26
		Sawah Tadah Hujan	1.963,77
		Semak Belukar / Alang Alang	1.723,72
		Tegalan / Ladang	4.306,23
11	Sagaranten	Air Danau / Situ	3,71
		Air Tawar Sungai	60,06
		Padang Rumput	163,72
		Perkebunan / Kebun	3.058,57
		Permukiman	670,26
		Sawah	86,05
		Sawah Tadah Hujan	2.814,07
		Semak Belukar / Alang Alang	1.254,15
		Tegalan / Ladang	3.199,80
12	Cidadap	Air Tawar Sungai	98,47
		Perkebunan / Kebun	2.300,86
		Permukiman	372,80
		Sawah	103,34
		Sawah Tadah Hujan	2.338,96
		Semak Belukar / Alang Alang	764,79
		Tegalan / Ladang	2.611,71
13	Curug Kembar	Air Danau / Situ	0,18
		Air Tawar Sungai	48,97
		Padang Rumput	19,52
		Perkebunan / Kebun	1.553,49
		Permukiman	422,49
		Sawah	740,05
		Sawah Tadah Hujan	1.931,92
		Semak Belukar / Alang Alang	756,14
		Tegalan / Ladang	127,55
14	Pabuaran	Air Danau / Situ	2,51
		Air Tawar Sungai	70,06
		Hutan	388,74
		Padang Rumput	123,33
		Perkebunan / Kebun	1.942,17
		Permukiman	371,79

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
		Sawah	47,83
		Sawah Tadah Hujan	2.242,41
		Semak Belukar / Alang Alang	932,38
		Tegalan / Ladang	5.456,27
15	Lengkong	Air Tawar Sungai	12,30
		Hutan	2.622,60
		Padang Rumput	76,78
		Perkebunan / Kebun	5.526,95
		Permukiman	261,94
		Sawah	28,18
		Sawah Tadah Hujan	489,01
		Semak Belukar / Alang Alang	3.205,20
		Tegalan / Ladang	2.440,02
16	Pelabuhanratu	Air Tawar Sungai	99,70
		Hutan	1.551,75
		Padang Rumput	137,51
		Pasir Pantai	30,67
		Perkebunan / Kebun	3.717,53
		Permukiman	1.196,54
		Sawah	307,16
		Sawah Tadah Hujan	621,03
		Semak Belukar / Alang Alang	1.052,80
		Tegalan / Ladang	503,66
17	Simpenan	Air Danau / Situ	2,29
		Air Tawar Sungai	126,42
		Hutan	1.232,24
		Padang Rumput	232,54
		Pasir Pantai	22,51
		Perkebunan / Kebun	3.470,21
		Permukiman	556,70
		Sawah	100,60
		Sawah Tadah Hujan	866,00
		Semak Belukar / Alang Alang	8.524,81
		Tegalan / Ladang	1.662,28
18	Warungkiara	Air Danau / Situ	6,94
		Air Tawar Sungai	127,76
		Padang Rumput	1,25
		Perkebunan / Kebun	4.386,48
		Permukiman	843,63
		Sawah	263,24

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
		Sawah Tadah Hujan	985,34
		Semak Belukar / Alang Alang	1.190,77
		Tegalan / Ladang	1.706,03
19	Bantargadung	Air Danau / Situ	0,56
		Air Tawar Sungai	90,92
		Perkebunan / Kebun	3.041,18
		Permukiman	450,08
		Sawah	736,52
		Sawah Tadah Hujan	284,20
		Semak Belukar / Alang Alang	994,53
		Tegalan / Ladang	1.979,85
20	Jampangtengah	Air Danau / Situ	4,26
		Air Tawar Sungai	87,05
		Hutan	30,19
		Padang Rumput	211,31
		Perkebunan / Kebun	7.319,24
		Permukiman	761,11
		Sawah	172,27
		Sawah Tadah Hujan	896,99
		Semak Belukar / Alang Alang	2.169,56
		Tegalan / Ladang	8.207,44
21	Purabaya	Air Tawar Sungai	22,34
		Hutan	461,75
		Padang Rumput	173,61
		Perkebunan / Kebun	2.576,81
		Permukiman	553,72
		Sawah	12,06
		Sawah Tadah Hujan	1.457,49
		Semak Belukar / Alang Alang	1.173,39
		Tegalan / Ladang	5.190,78
22	Cikembar	Air Tawar Sungai	103,83
		Hutan	58,43
		Padang Rumput	106,67
		Perkebunan / Kebun	3.383,46
		Permukiman	1.418,12
		Sawah	544,50
		Sawah Tadah Hujan	636,52
		Semak Belukar / Alang Alang	146,61
		Tegalan / Ladang	2.499,10

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
23	Nyalindung	Air Danau / Situ	4,46
		Air Tawar Sungai	51,98
		Hutan	395,73
		Padang Rumput	172,75
		Perkebunan / Kebun	2.664,69
		Permukiman	665,02
		Sawah	202,40
		Sawah Tadah Hujan	1.475,37
		Semak Belukar / Alang Alang	2.046,22
		Tegalan / Ladang	2.760,73
24	Gegerbitung	Air Danau / Situ	0,92
		Air Tawar Sungai	22,14
		Hutan	929,04
		Padang Rumput	0,13
		Perkebunan / Kebun	970,76
		Permukiman	563,35
		Sawah	503,97
		Sawah Tadah Hujan	326,59
		Semak Belukar / Alang Alang	444,35
		Tegalan / Ladang	3.014,44
25	Sukaraja	Air Danau / Situ	4,56
		Hutan	454,76
		Padang Rumput	1,16
		Perkebunan / Kebun	355,20
		Permukiman	712,73
		Sawah	1.377,12
		Sawah Tadah Hujan	160,46
		Semak Belukar / Alang Alang	207,88
		Tegalan / Ladang	929,26
26	Kebonpedes	Air Tawar Sungai	8,38
		Perkebunan / Kebun	26,91
		Permukiman	257,58
		Sawah	687,74
		Tegalan / Ladang	40,71
27	Cireunghas	Air Tawar Sungai	7,65
		Hutan	78,03
		Padang Rumput	4,81
		Perkebunan / Kebun	841,17
		Permukiman	400,92
		Sawah	655,54
		Sawah Tadah Hujan	61,17

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
		Semak Belukar / Alang Alang	989,80
		Tegalan / Ladang	32,89
28	Sukalarang	Air Danau / Situ	3,29
		Air Tawar Sungai	1,12
		Hutan	101,58
		Padang Rumput	0,68
		Perkebunan / Kebun	904,31
		Permukiman	538,74
		Sawah	703,95
		Sawah Tadah Hujan	55,99
		Semak Belukar / Alang Alang	614,16
		Tegalan / Ladang	193,59
29	Sukabumi	Air Danau / Situ	0,55
		Hutan	953,09
		Padang Rumput	13,00
		Perkebunan / Kebun	381,62
		Permukiman	336,16
		Sawah	83,68
		Sawah Tadah Hujan	444,04
		Semak Belukar / Alang Alang	265,68
		Tegalan / Ladang	523,71
30	Kadudampit	Air Danau / Situ	11,00
		Air Tawar Sungai	5,76
		Hutan	3.515,45
		Padang Rumput	25,60
		Perkebunan / Kebun	412,76
		Permukiman	408,70
		Sawah	128,08
		Sawah Tadah Hujan	815,71
		Semak Belukar / Alang Alang	971,64
		Tegalan / Ladang	713,27
31	Cisaat	Air Danau / Situ	1,20
		Padang Rumput	2,17
		Perkebunan / Kebun	131,06
		Permukiman	770,48
		Sawah	1.237,46
		Sawah Tadah Hujan	15,61
		Tegalan / Ladang	4,54
32	Gunung Guruh	Air Tawar Sungai	16,47
		Padang Rumput	6,33

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
		Perkebunan / Kebun	635,92
		Permukiman	570,37
		Sawah	547,02
		Sawah Tadah Hujan	13,11
		Semak Belukar / Alang Alang	229,36
		Tegalan / Ladang	478,08
33	Cibadak	Air Danau / Situ	0,57
		Air Tawar Sungai	48,50
		Padang Rumput	9,76
		Perkebunan / Kebun	2.397,93
		Permukiman	1.124,89
		Sawah	505,77
		Sawah Tadah Hujan	27,62
		Semak Belukar / Alang Alang	341,06
		Tegalan / Ladang	1.904,41
34	Cicantayan	Air Tawar Sungai	2,28
		Padang Rumput	0,61
		Perkebunan / Kebun	1.308,31
		Permukiman	583,24
		Sawah	722,08
		Sawah Tadah Hujan	2,62
		Semak Belukar / Alang Alang	171,92
		Tegalan / Ladang	359,67
35	Caringin	Hutan	684,80
		Padang Rumput	27,83
		Perkebunan / Kebun	293,23
		Permukiman	466,05
		Sawah	544,02
		Sawah Tadah Hujan	739,25
		Semak Belukar / Alang Alang	566,93
		Tegalan / Ladang	340,82
36	Nagrak	Air Tawar Sungai	6,75
		Hutan	1.155,17
		Padang Rumput	86,09
		Perkebunan / Kebun	1.703,61
		Permukiman	925,64
		Sawah	100,22
		Sawah Tadah Hujan	1.148,65
		Semak Belukar / Alang Alang	958,75

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
		Tegalan / Ladang	1.023,74
37	Ciambar	Air Tawar Sungai	5,32
		Hutan	1.601,57
		Padang Rumput	2,02
		Perkebunan / Kebun	694,45
		Permukiman	310,90
		Sawah	19,90
		Sawah Tadah Hujan	305,78
		Semak Belukar / Alang Alang	534,90
		Tegalan / Ladang	1.895,83
38	Cicurug	Hutan	733,38
		Padang Rumput	12,43
		Perkebunan / Kebun	930,76
		Permukiman	1.064,19
		Sawah	594,83
		Sawah Tadah Hujan	10,97
		Semak Belukar / Alang Alang	393,11
		Tegalan / Ladang	1.351,18
39	Cidahu	Air Danau / Situ	0,53
		Hutan	868,05
		Padang Rumput	2,64
		Perkebunan / Kebun	416,80
		Permukiman	484,81
		Sawah	559,85
		Sawah Tadah Hujan	633,15
		Semak Belukar / Alang Alang	432,56
		Tegalan / Ladang	153,24
40	Parakansalak	Air Danau / Situ	4,09
		Hutan	835,45
		Perkebunan / Kebun	1.254,51
		Permukiman	374,78
		Sawah	190,43
		Sawah Tadah Hujan	373,84
		Semak Belukar / Alang Alang	422,12
		Tegalan / Ladang	241,53
41	Parungkuda	Air Danau / Situ	0,01
		Air Tawar Sungai	15,11
		Padang Rumput	6,11
		Perkebunan / Kebun	707,89
		Permukiman	593,69

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
		Sawah	458,68
		Sawah Tadah Hujan	125,76
		Tegalan / Ladang	512,31
42	Bojonggenteng	Padang Rumput	5,45
		Perkebunan / Kebun	939,39
		Permukiman	351,83
		Sawah	158,20
		Sawah Tadah Hujan	295,51
		Tegalan / Ladang	293,77
43	Kalapanunggal	Air Danau / Situ	0,27
		Air Tawar Sungai	7,35
		Hutan	517,68
		Padang Rumput	46,15
		Perkebunan / Kebun	2.038,06
		Permukiman	513,28
		Sawah	18,07
		Sawah Tadah Hujan	480,65
		Semak Belukar / Alang Alang	807,81
		Tegalan / Ladang	530,77
44	Cikidang	Air Danau / Situ	0,70
		Air Tawar Sungai	46,55
		Hutan	3.331,65
		Padang Rumput	115,42
		Perkebunan / Kebun	6.052,49
		Permukiman	905,61
		Sawah	48,16
		Sawah Tadah Hujan	855,32
		Semak Belukar / Alang Alang	2.173,77
		Tegalan / Ladang	1.949,88
45	Cisolok	Air Danau / Situ	0,15
		Air Tawar Sungai	70,89
		Hutan	3.906,51
		Pasir Pantai	11,79
		Perkebunan / Kebun	2.309,94
		Permukiman	351,52
		Sawah	164,05
		Sawah Tadah Hujan	985,53
		Semak Belukar / Alang Alang	4.719,69
		Tegalan / Ladang	4.858,59
46	Cikakak	Air Tawar Sungai	6,66
		Hutan	4.189,33

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
		Padang Rumput	18,38
		Pasir Pantai	8,92
		Perkebunan / Kebun	3.081,50
		Permukiman	531,17
		Sawah	26,14
		Sawah Tadah Hujan	664,33
		Semak Belukar / Alang Alang	1.909,40
		Tegalan / Ladang	870,17
47	Kabandungan	Air Danau / Situ	0,42
		Air Tawar Sungai	46,10
		Hutan	7.871,92
		Padang Rumput	10,91
		Perkebunan / Kebun	2.123,40
		Permukiman	560,92
		Sawah Tadah Hujan	1.332,19
		Semak Belukar / Alang Alang	1.267,33
		Tegalan / Ladang	470,65
		Jumlah	**416.135,74**

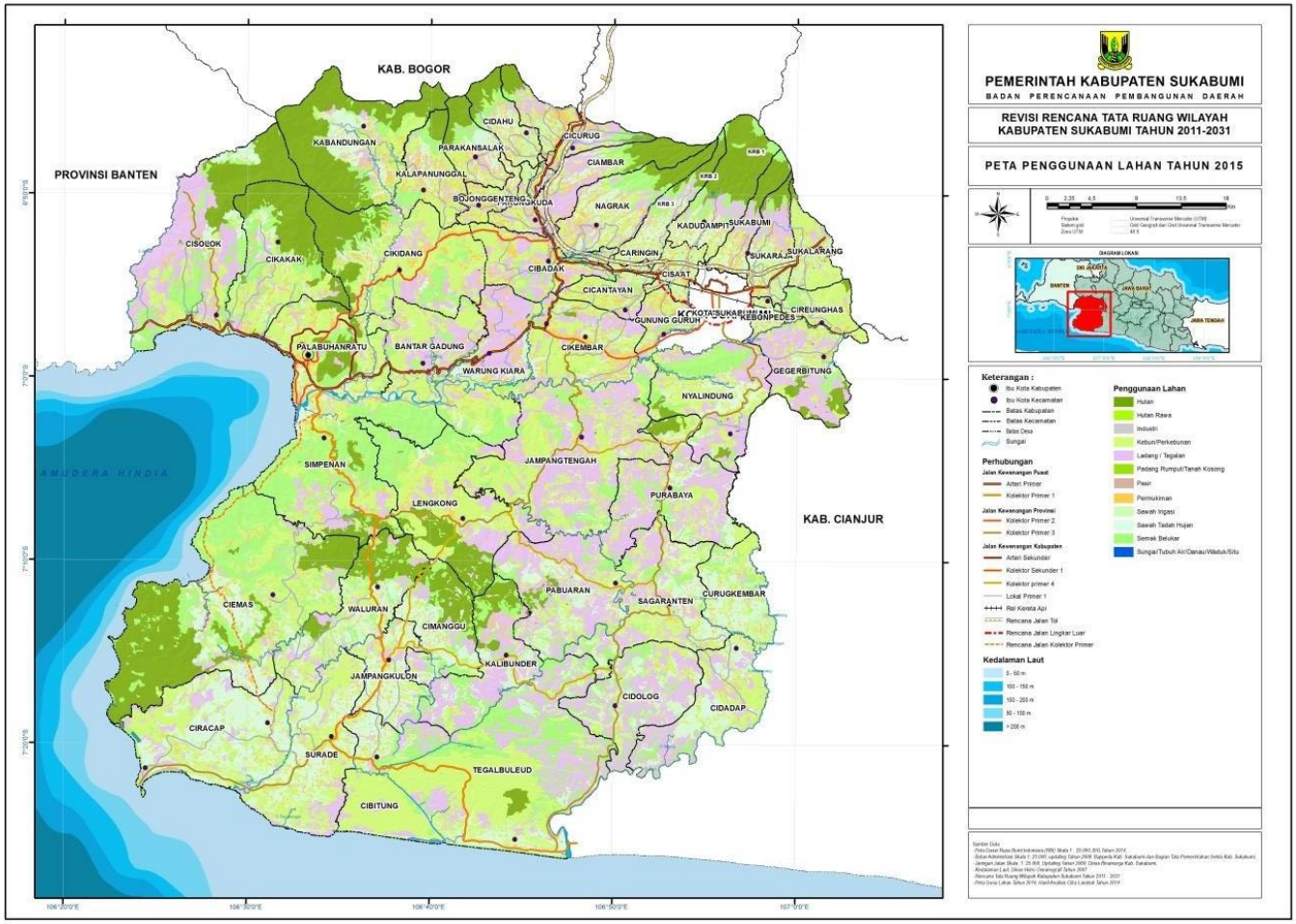
Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2021

Pembangunan suatu daerah tidak dapat terpisahkan dari upaya pengintegrasian antara sumber daya yang dimiliki dengan rencana pengembangan yang akan dilakukan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Kabupaten Sukabumi dalam pembangunan di tahun 2021-2026. Mengacu pada kondisi geografis Kabupaten Sukabumi sangat mendukung untuk pengembangan sektor primer seperti pertanian, peternakan dan perikanan. Sebagai bagian dari cincin api pembentuk gunung berapi (Ring Of Fire) di Indonesia, selain menjadi etalase bencana alam, Kabupaten Sukabumi juga memiliki lahan yang sangat subur. Terdapat 2 (dua) taman nasional yang beririsan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi menunjukan potensi kesuburan lahan yang luar biasa.

Potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Sukabumi juga sangat besar mengingat garis pantai Sukabumi yang terbentang sepanjang 112 Km. Kawasan sepanjang garis pantai tersebut menjadi bagian dari Ciletuh Palabuanratu UNESCO Global Geopark (CPUGG) dan juga bagian dari

Integrated Coastal Management (ICM) di Indonesia. Kekayaan potensi alam Sukabumi dirangkum dalam kata GURILAPS yang merupakan akronim dari Gunung, Rimba, Laut, Pantai dan Sungai.

Sebagai Kabupaten dengan luas wilayah terluas kedua dengan lokasi yang diapit oleh 2 (dua) kota metropolitan Indonesia (Jabodetabek dan Bandung Raya), potensi pengembangan kawasan budidaya Sukabumi sangat terbuka. Kabupaten Sukabumi selama ini berperan sebagai salah satu daerah penunjang pangan utama untuk kedua kota metropolitan tersebut. Diharapkan pengembangan wilayah yang tepat dalam perencanaan pembangunan melalui pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sukabumi mampu meningkatkan peranan Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu sentra sektor primer di Jawa Barat. Disamping potensi yang ada dari aspek geografis, administrasi, topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan tetap ada potensi bencana dan masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dari hal tersebut. Namun begitu melalui mitigasi risiko yang menyeluruh diharapkan dapat mendukung pengembangan wilayah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan pada tahun 2021-2026.



Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2020

Gambar 2.8 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukabumi tahun 2014

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki tingkat risiko bencana cukup tinggi. Tingkat risiko diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas untuk seluruh jenis bencana di Kabupaten Sukabumi. Berbagai jenis bencana dengan tingkat risikonya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Tingkat Risiko di Kabupaten Sukabumi

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Lahan Terpapar (Ha)	Kerugian (Juta Rupiah)
1	Banjir	Sedang	715.313	495	651.951
2	Banjir Bandang	Tinggi	132.887	590	459.511
3	Cuaca Ekstrim	Tinggi	2.078.557	-	4.791.231
4	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Tinggi	20.253	178	83.057
5	Gempa bumi	Tinggi	2.541.965	-	11.129.823
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sedang	-	3.121	435.865
7	Kekeringan	Sedang	2.541.965	25.684	3.044.627
8	Letusan Gunung Api	Sedang	36.027	658	23.374
9	Tanah Longsor	Sedang	496.431	22.109	3.288.172
10	Tsunami	Tinggi	44.491	115	279.823

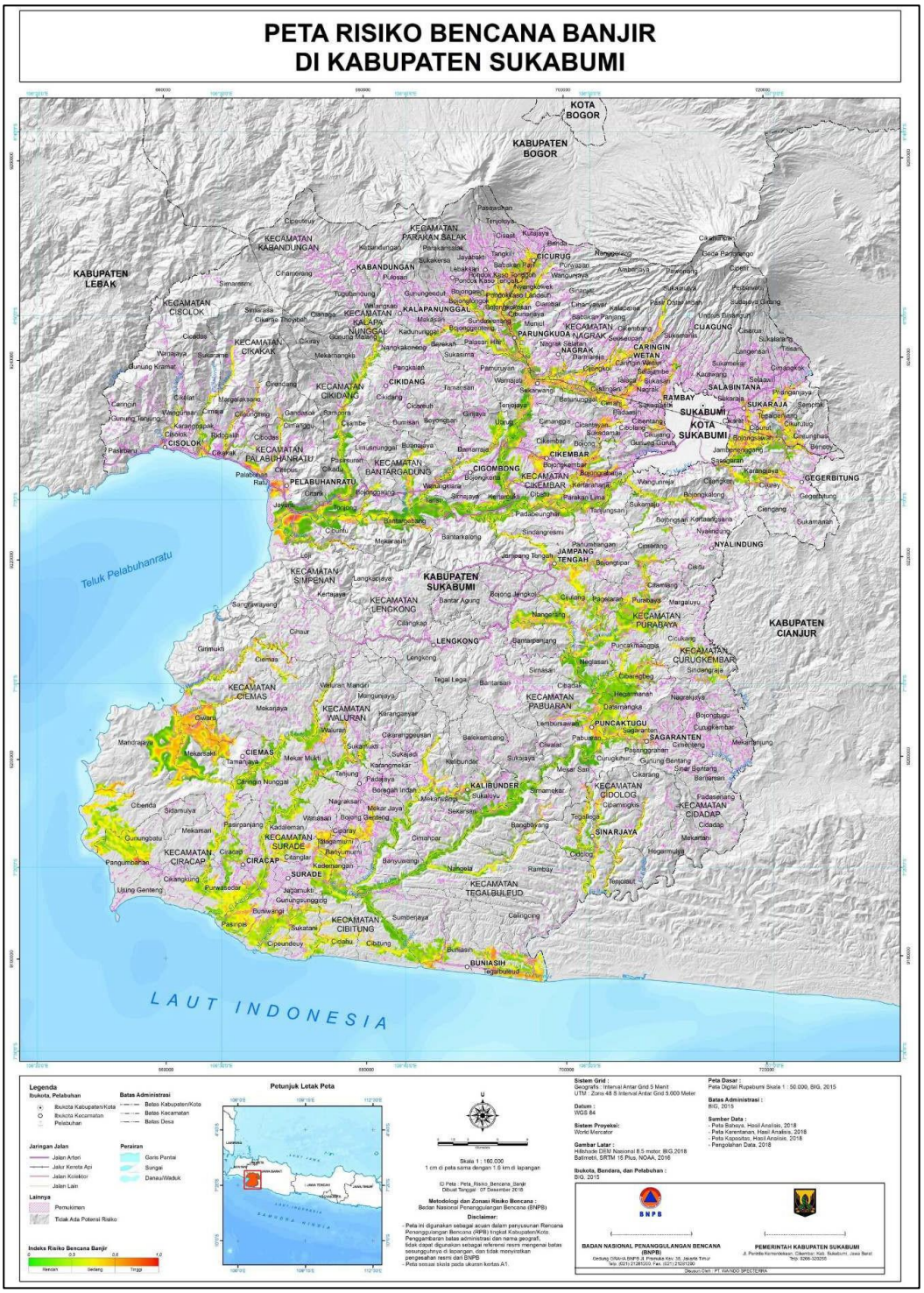
Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Sukabumi, 2018

Berdasarkan perhitungan dan analisa kelas bahaya, kerentanan dan kapasitas, didapatkan bahwa tingkat risiko di Kabupaten Sukabumi adalah tinggi untuk jenis bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, dan tsunami. Sementara itu, tingkat risiko sedang berpotensi terjadi pada bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan tanah longsor.

Jumlah penduduk terpapar bahaya terbanyak berpotensi terjadi pada bencana cuaca ekstrim, gempa bumi, dan kekeringan. Hal tersebut terjadi karena bencana tersebut rentan terjadi di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Sukabumi. Bencana kekeringan dan tanah longsor paling tinggi berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Sementara bencana cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor paling tinggi berpotensi menyebabkan kerugian rupiah.

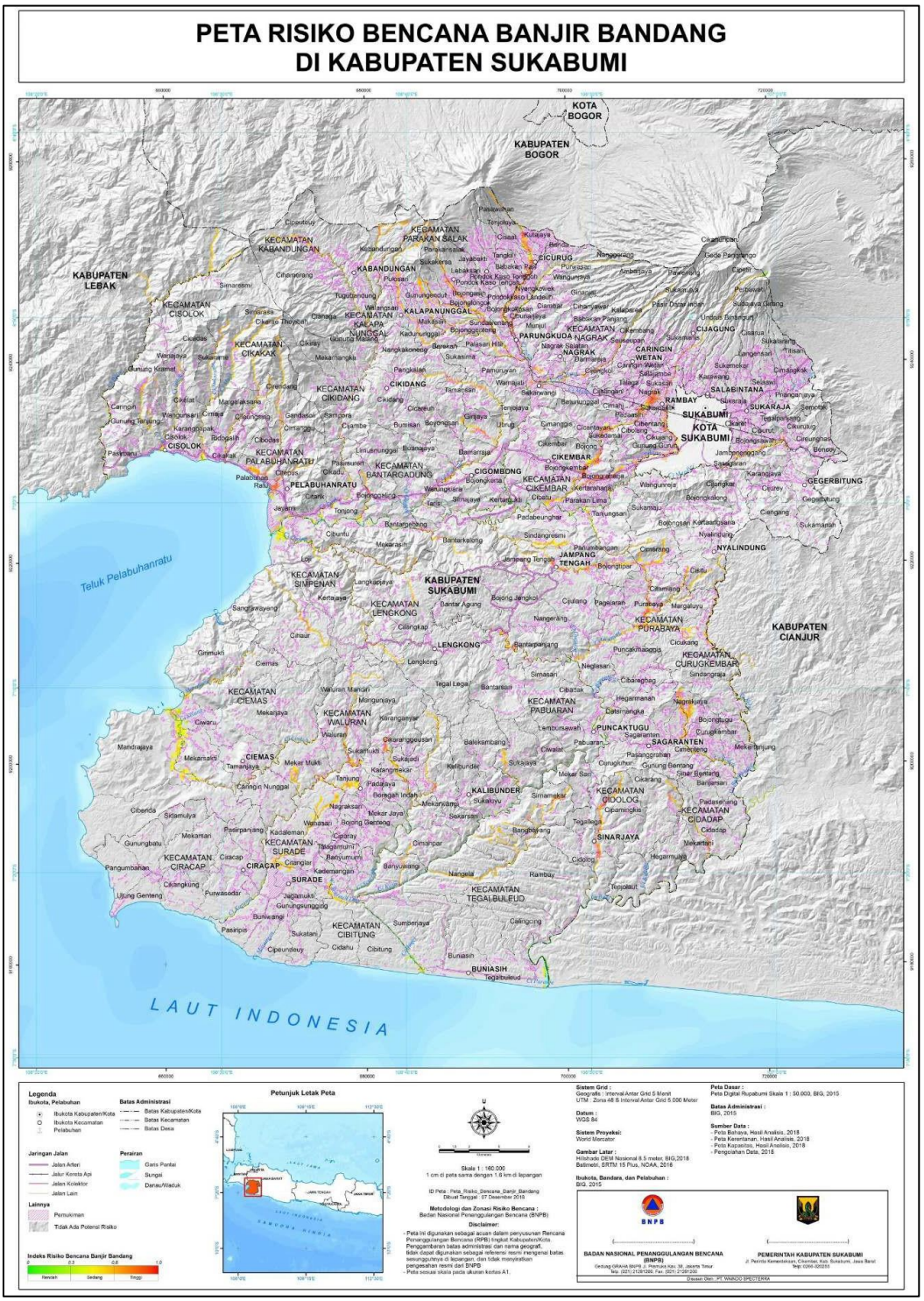
Hasil dari penilaian tingkat risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan daerah dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain hasil tingkat risiko, penilaian juga diproyeksikan ke dalam peta risiko untuk setiap jenis bahaya dan peta risiko multi bahaya.

Peta risiko bencana disusun untuk setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Sukabumi. Peta risiko digunakan sebagai petunjuk zona tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu. Tingkat risiko bencana dalam peta divisualisasikan ke dalam indeks risiko bencana, dimana tingkat risiko rendah divisualisasikan dengan warna hijau, tingkat risiko sedang divisualisasikan dengan warna kuning, dan tingkat risiko tinggi divisualisasikan dengan warna merah. Sebaran indeks risiko bencana untuk masing-masing jenis bencana di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.9, Gambar 2.10, Gambar 2.11, Gambar 2.12, Gambar 2.13, Gambar 2.14, Gambar 2.15, Gambar 2.16, Gambar 2.17, dan Gambar 2.18.



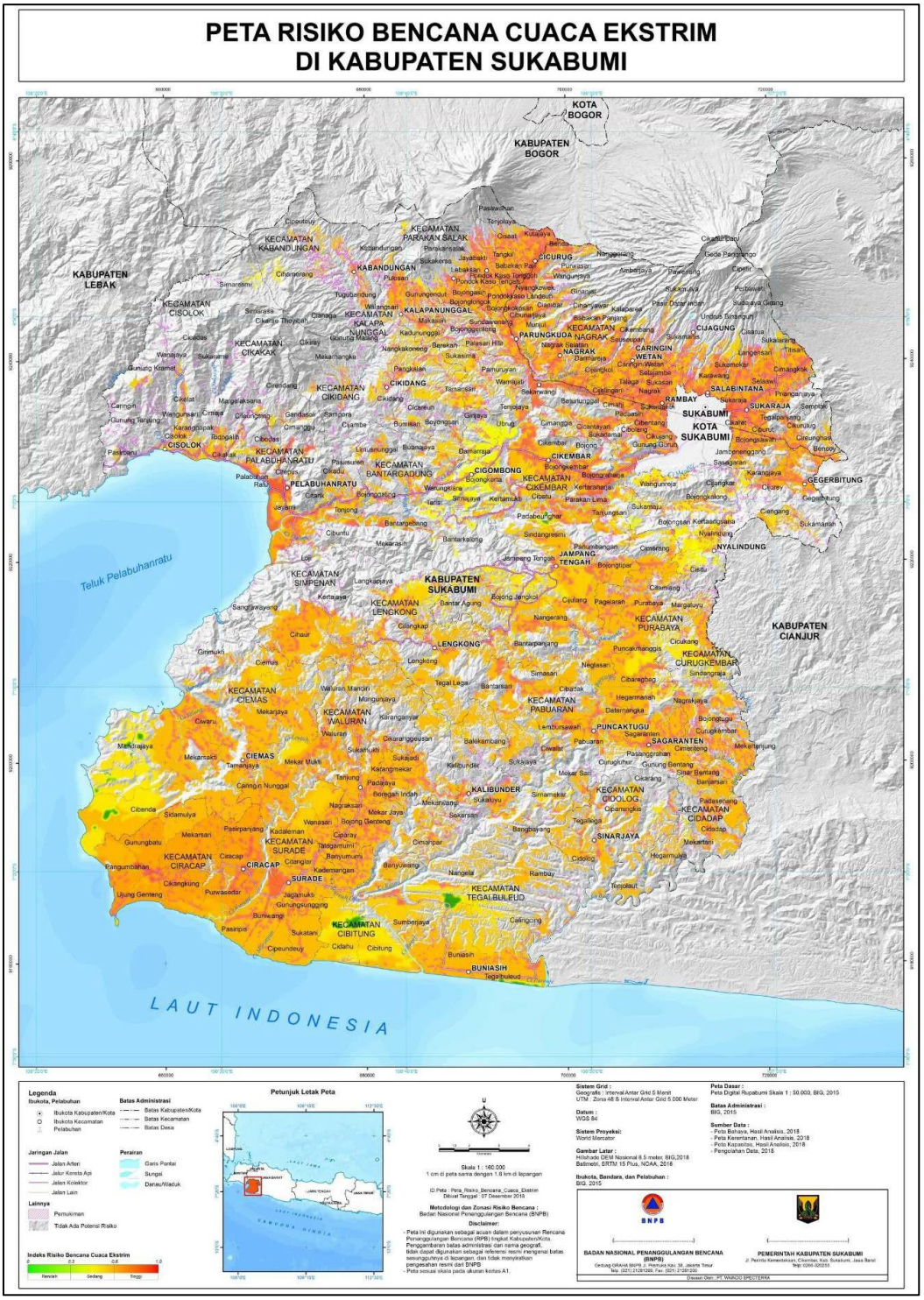
Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Sukabumi, 2018

Gambar 2.9 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Sukabumi



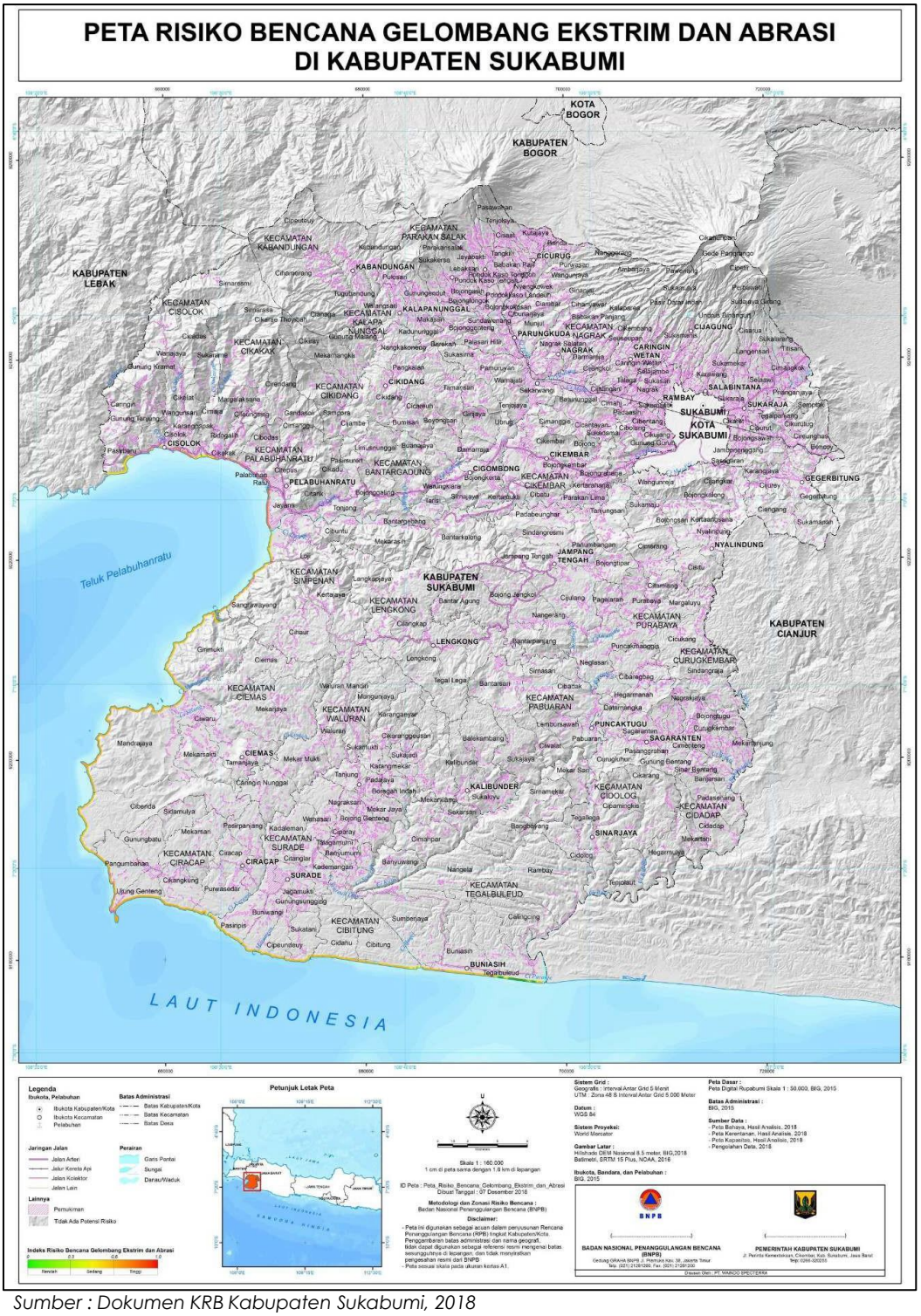
Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Sukabumi, 2018

Gambar 2.10 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Sukabumi



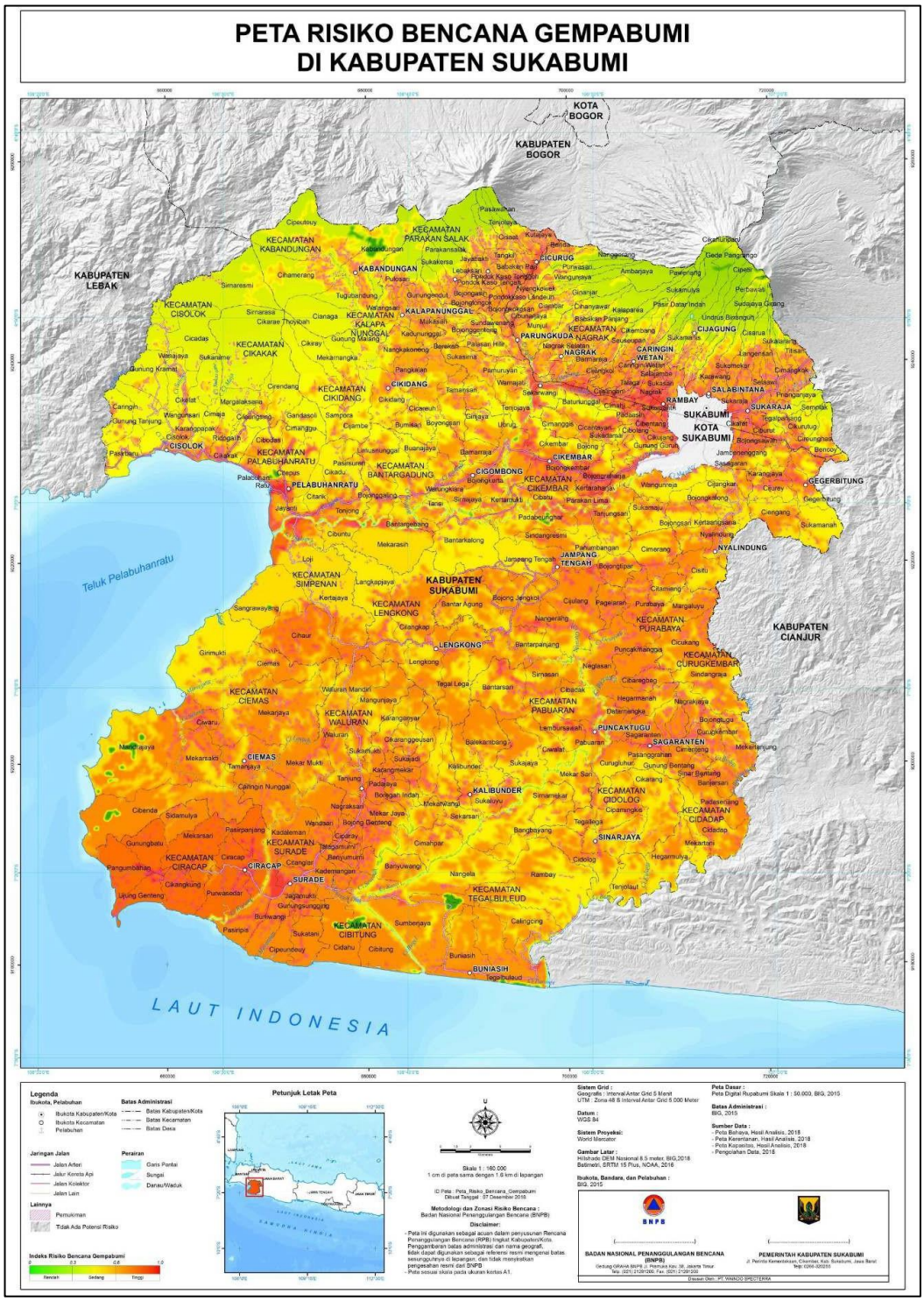
Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Sukabumi, 2018

Gambar 2.11 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Sukabumi



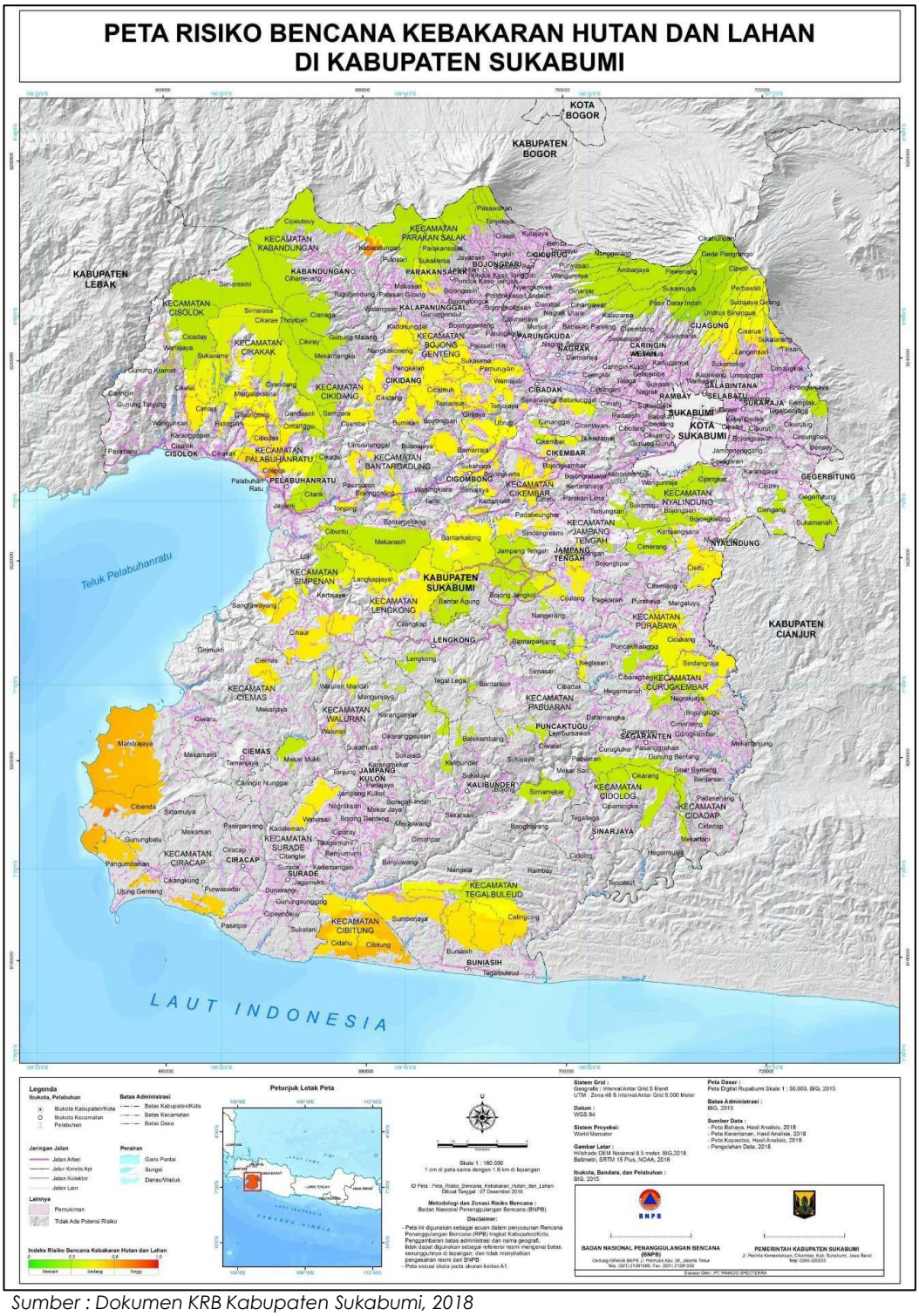
Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Sukabumi, 2018

Gambar 2.12 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Sukabumi



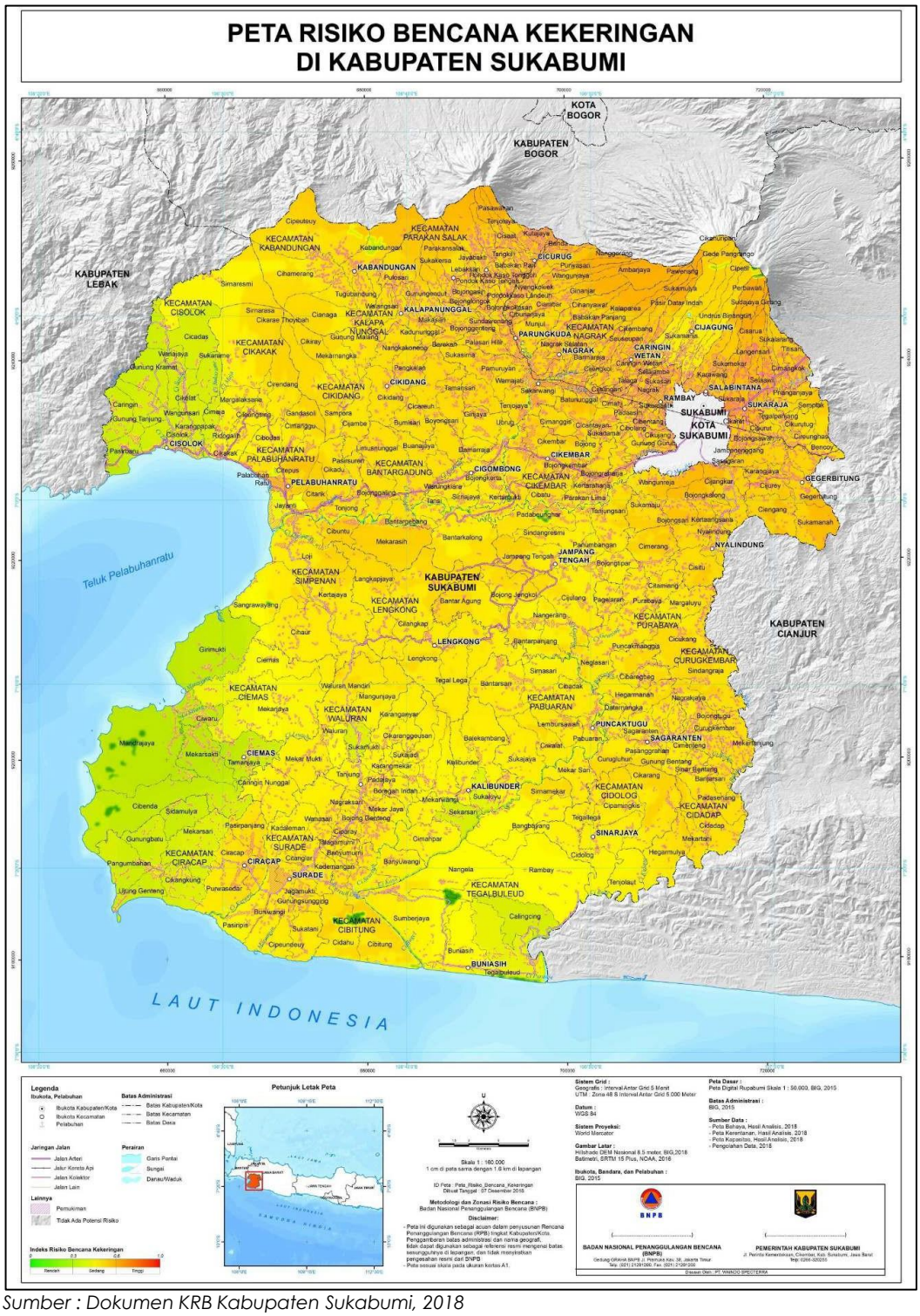
Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Sukabumi, 2018

Gambar 2.13 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sukabumi



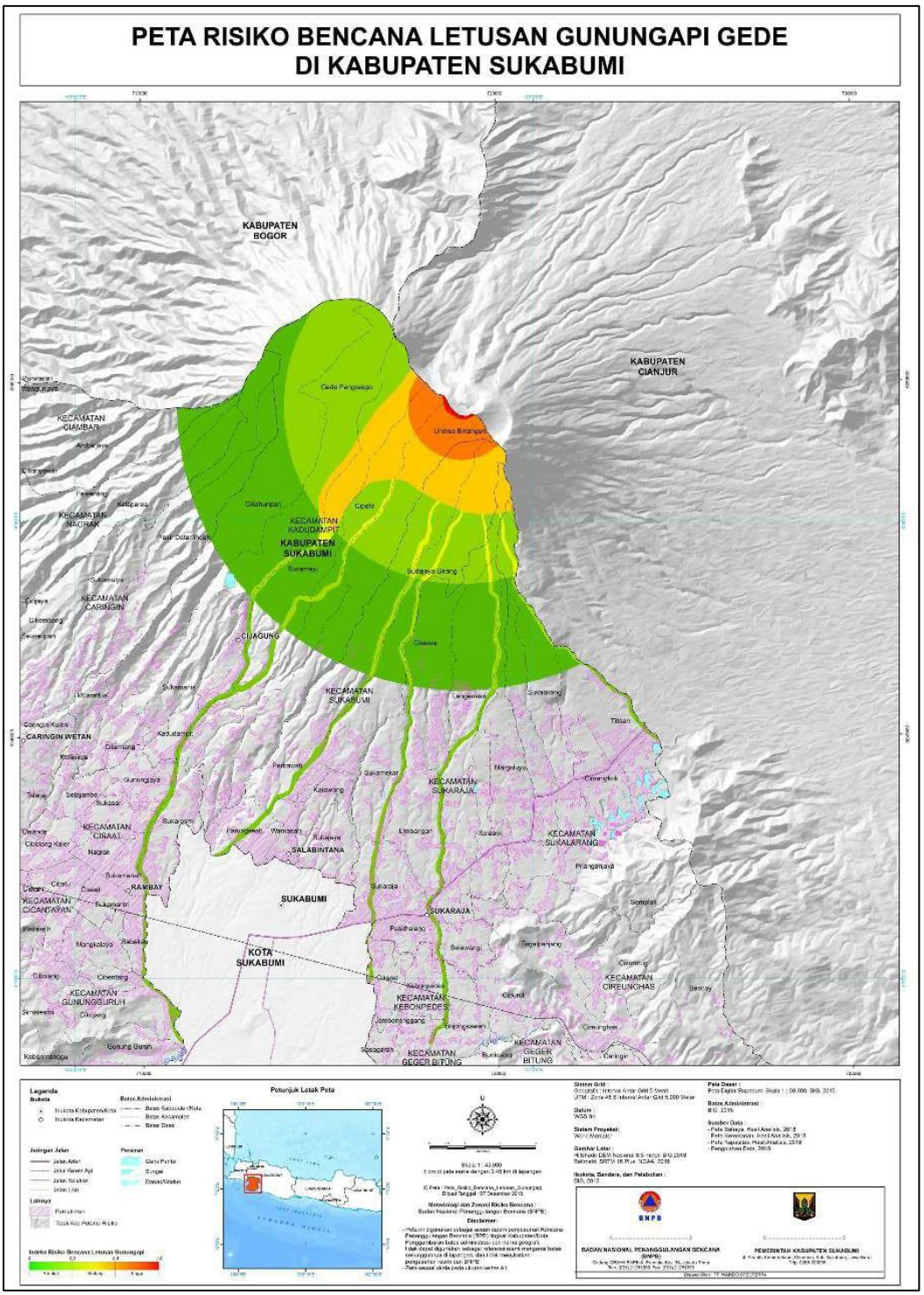
Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Sukabumi, 2018

Gambar 2.14 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sukabumi



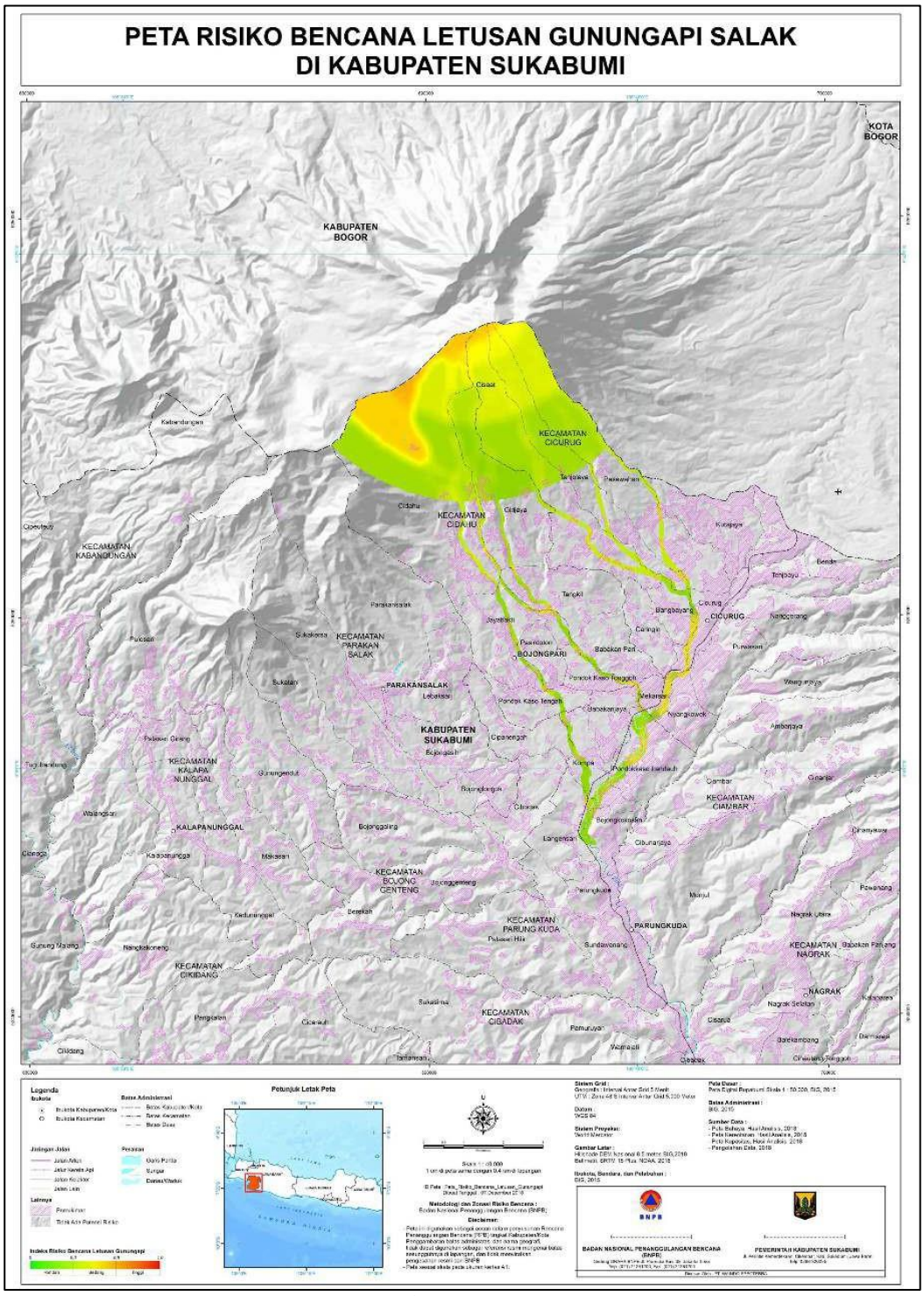
Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Sukabumi, 2018

Gambar 2.15 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Sukabumi



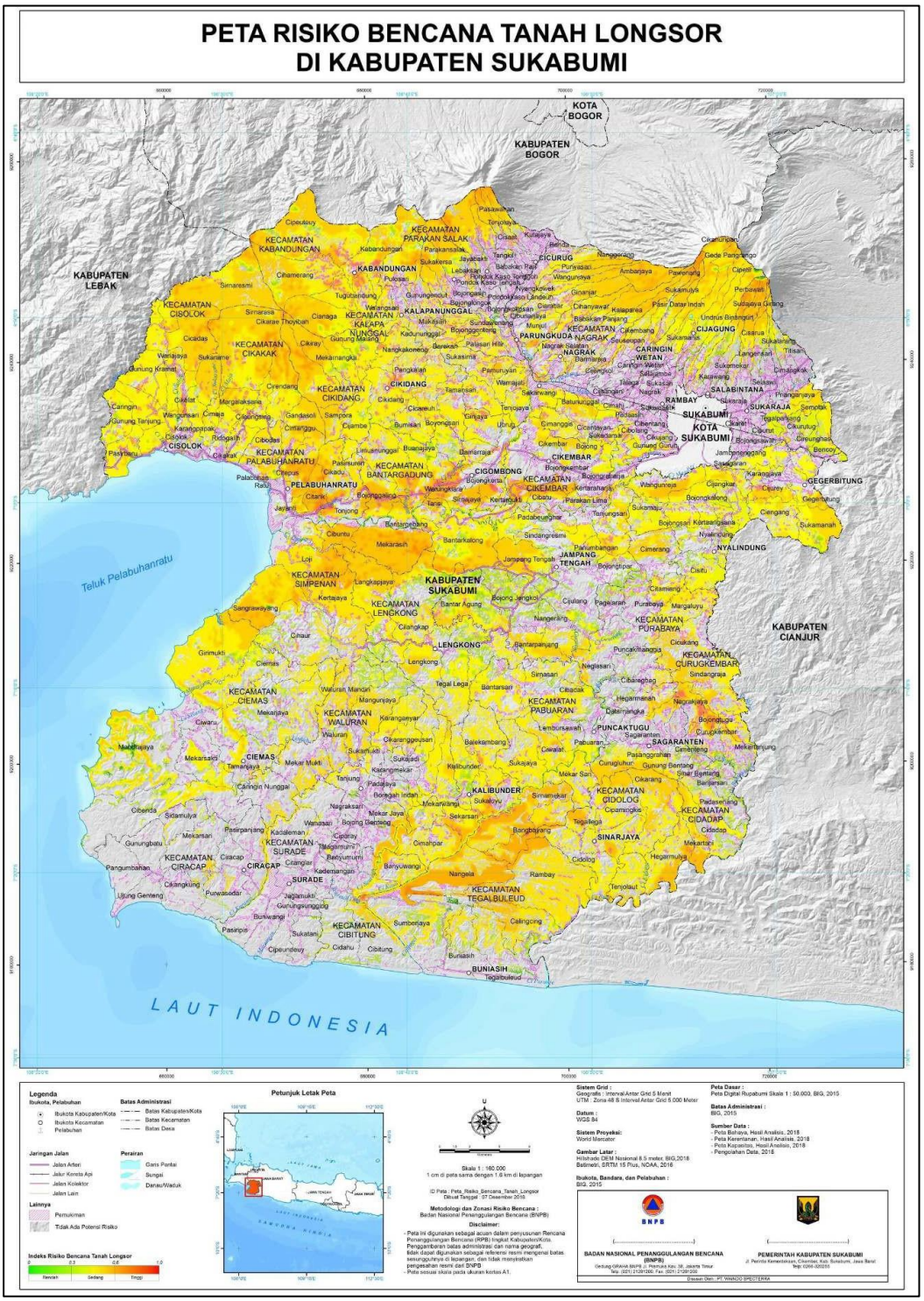
Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Sukabumi, 2018

Gambar 2.16 Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api Gede di Kabupaten Sukabumi



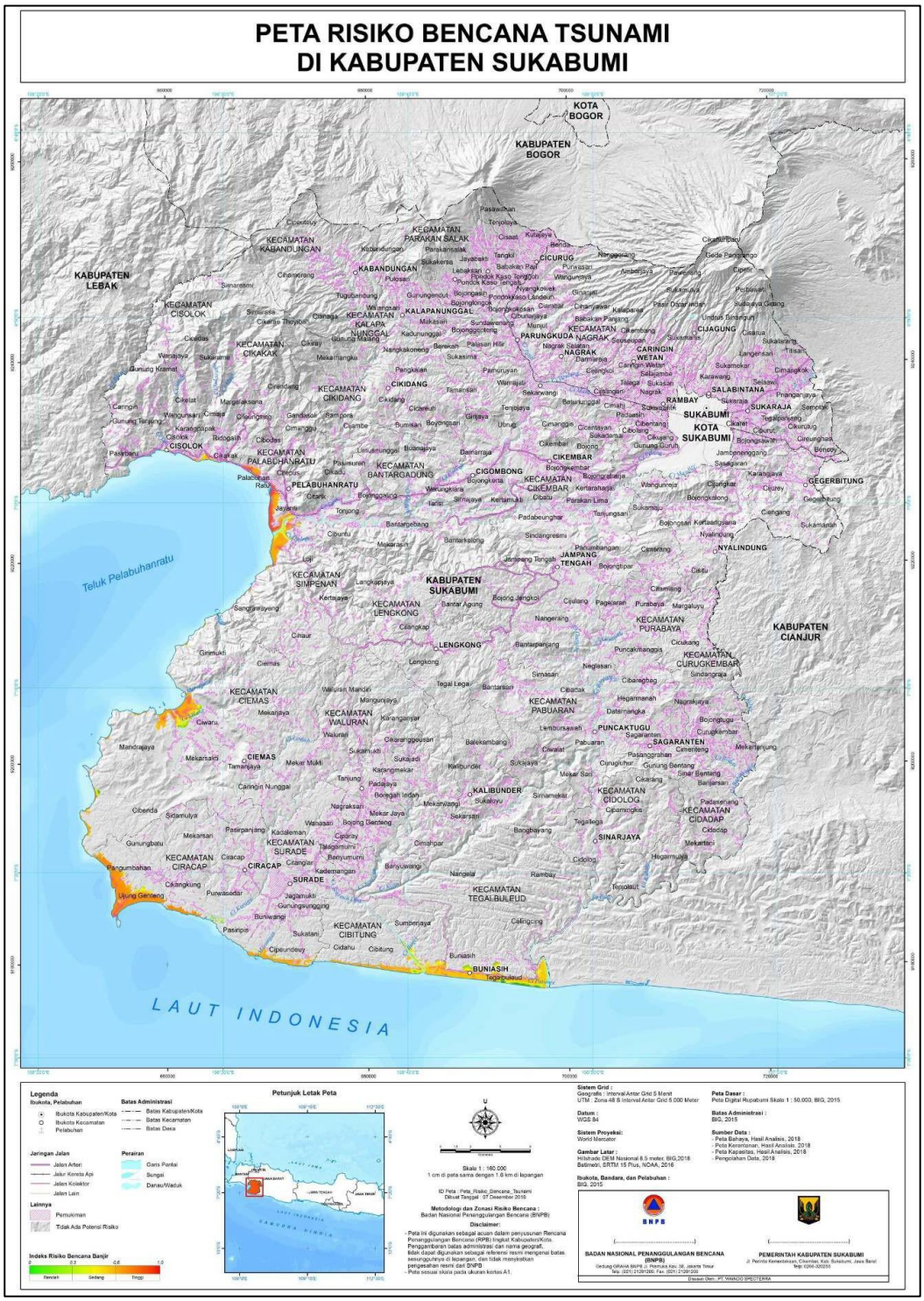
Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Sukabumi, 2018

Gambar 2.17 Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api Salak di Kabupaten Sukabumi



Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Sukabumi, 2018

Gambar 2.18 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sukabumi



Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Sukabumi, 2018

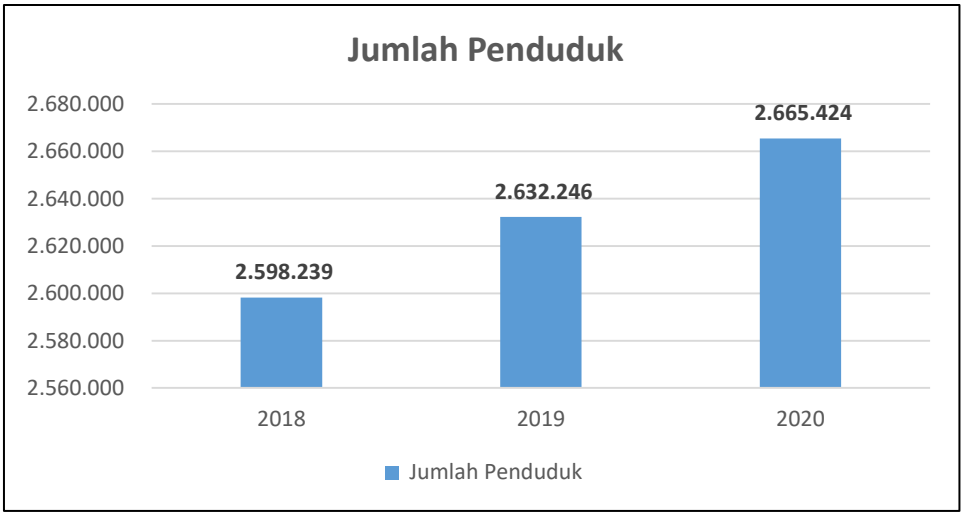
Gambar 2.19 Peta Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Sukabumi

2.1.3 Demografi

Penduduk Kabupaten Sukabumi saat ini sebesar 2.665.424 jiwa (DPPKB Kab. Sukabumi, 2020) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dan *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,24. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi diharapkan tetap seimbang dan terkendali, sehingga dapat menjadi kekuatan positif bagi pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa variabel yang perlu dilihat seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR) dan angka reproduksi netto atau *Net Reproduction Rate* (NRR), angka beban ketergantungan atau *Dependency Ratio* (DR), kepadatan penduduk dan penduduk usia lanjut.

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi sebanyak 2.598.239 jiwa. Jumlah ini meningkat menjadi 2.632.246 jiwa pada tahun 2019 dan 2.665.424 jiwa pada tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.20



Sumber: DPPKB Kabupaten Sukabumi Tahun 2020

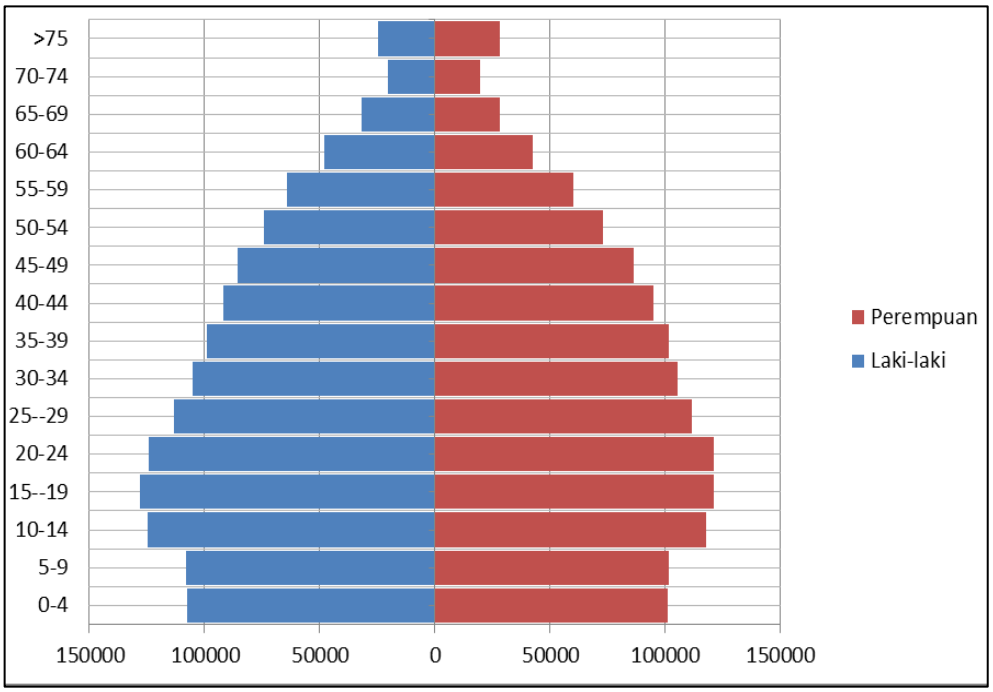
Gambar 2.20 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020

Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2020 secara proporsi jenis kelamin masih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 1.351.175 jiwa atau sebesar 50,69 persen dari total penduduk, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 1.314.249 jiwa atau hanya sebesar 49,31persen dari total penduduk. Berdasarkan kelompok usia penduduk Kabupaten Sukabumi didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 69,47 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.21.

Tabel 2.5 Komposisi penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2020

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	107.354	100.923	208.277
5-9	108.218	101.323	209.541
10-14	124.548	117.984	242.532
15--19	128.120	120.902	249.022
20-24	124.276	121.248	245.524
25--29	113.376	111.759	225.135
30-34	105.346	105.457	210.803
35-39	99.168	101.332	200.500
40-44	92.025	94.941	186.966
45-49	85.427	86.107	171.534
50-54	74.171	73.212	147.383
55-59	63.962	60.085	124.047
60-64	48.195	42.450	90.645
65-69	31.926	28.308	60.234
70-74	20.546	19.846	40.392
>75	24517	28372	52.889
Jumlah	**1.351.175**	**1.314.249**	**2.665.424**

Sumber: DPPKB Kabupaten Sukabumi Tahun 2020



Sumber ; DPPKB Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 2.21 Piramida Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2020

Gambar piramida di atas bentuk piramida penduduk yang mulai mengalami pergeseran dari piramida penduduk muda (ekspansif) ke piramida stationer (seimbang). Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian kelahiran dan program KB yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi berhasil menekan angka kelahiran. Disisi lain dapat dilihat bahwa jumlah terbesar yang digambarkan oleh piramida penduduk diatas berada pada usia 15-19 tahun. Hal ini akan berdampak pada penyedian fasilitas pendidikan menengah dan penciptaan lapangan kerja di masa depan yang lebih banyak mengingat jumlah usia yang cukup besar pada rentang usia tersebut.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang perkembangan kesejahteraan wilayah Kabupaten Sukabumi yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan

sosial. Pada aspek kesejahteraan masyarakat akan dideskripsikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sukabumi secara umum yang mencakup indikator-indikator perekonomian Kabupaten Sukabumi secara makro. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Berdasarkan kondisi tersebut, pengetahuan dan informasi mengenai indikator yang mendukung pembangunan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi penting untuk dikaji.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga angka kemiskinan. Indikator-indikator tersebut akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam *monitoring* dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan daerah, dan mendukung program pembangunan provinsi hingga nasional.

A. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di Kabupaten Sukabumi yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.132,06	8.183,96	8.423,72	8.888,32	8.861,25
B	Pertambangan dan Penggalian	2.946,63	2.921,93	2.834,19	2.668,54	2.743,47
C	Industri Pengolahan	6.076,66	6.581,23	7.299,51	7.872,62	7.932,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	40,59	41,85	45,43	46,21	44,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,49	11,26	12,35	13,40	16,14
F	Konstruksi	4.661,36	5.146,43	5.580,13	5.964,08	5.707,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.787,69	8.209,33	8.629,14	9.048,26	8.332,80
H	Transportasi dan Pergudangan	2.602,80	2.834,10	2.982,67	3.151,64	3.115,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	959,24	1.044,60	1.121,86	1.190,47	1.169,58
J	Informasi dan Komunikasi	1.191,80	1.346,28	1.480,37	1.615,37	2.035,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	280,19	297,14	313,64	330,61	336,85
L	Real Estate	685,44	769,54	866,67	976,14	989,05
M,N	Jasa Perusahaan	122,85	133,07	145,19	157,09	141,11
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.112,02	1.163,63	1.181,93	1.243,02	1.180,19
P	Jasa Pendidikan	1.681,54	1.826,22	1.991,10	2.186,55	2.297,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	361,73	391,80	427,50	469,19	460,17
R,S,T,U	Jasa Lainnya	685,35	749,70	797,35	847,12	835,42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		39.338,46	41.652,07	44.132,75	46.668,63	46.199,32
Target PDRB Kabupaten Sukabumi		38.574,95	40.237,35	41.899,78	43.562,16	45.224,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021

PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengidentifikasi laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor lapangan usaha dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kinerja perekonomian

Kabupaten Sukabumi secara riil. Data menunjukkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sukabumi meningkat setiap tahunnya, dan berada di atas target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 nilai PDRB sebesar 39.338,46 (Miliar Rupiah), dan meningkat menjadi 46.668,63 (Miliar Rupiah) pada tahun 2019. Namun demikian, capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 46.199,32 (Miliar Rupiah) yang diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19, meskipun angka tersebut masih berada di atas target indikator makro Kabupaten Sukabumi, dimana pada tahun 2020 target PDRB sebesar 45.224,56 (Miliar Rupiah).

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki nilai tambah barang dan/ jasa tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada tahun 2020 sektor-sektor tersebut, masing-masing sebesar 8.861,25 (Miliar Rupiah); 8.332,80 (Miliar Rupiah); dan 7.932,58 (Miliar Rupiah). Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto setiap tahunnya disebabkan oleh meningkatnya produksi pada setiap lapangan usaha tanpa dipengaruhi oleh perubahan inflasi. Nilai lapangan usaha yang paling tinggi pada rentang tahun 2016 hingga 2020 yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan usaha tersebut mencakup segala bentuk usaha yang didapatkan dari alam baik berupa benda atau barang yang hidup, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk kegiatan penjualan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 cukup berdampak pada kondisi perekonomian pusat hingga daerah, sehingga PDRB Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai. Namun demikian, nilai lapangan usaha yang paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun masih sama yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Lapangan usaha tersebut meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran yaitu penjualan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Di samping itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, masih menjadi

sektor dengan kontribusi nilai yang tertinggi. Nilai lapangan usaha yang paling kecil yaitu pengadaan listrik dan gas, dimana lapangan usaha tersebut mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur yang permanen. Laju pertumbuhan setiap sektor berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan Kabupaten Sukabumi menurut lapangan usaha tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,31	0,64	2,93	5,52	1,05
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,53	-0,84	-3,00	-5,84	2,81
C	Industri Pengolahan	6,74	8,30	10,91	7,85	-1,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,38	3,11	8,55	1,72	-3,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,43	7,36	9,68	8,50	20,44
F	Konstruksi	6,84	10,41	8,43	6,88	-4,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,35	5,41	5,11	4,86	-7,59
H	Transportasi dan Pergudangan	8,19	8,89	5,24	5,67	-1,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,88	8,90	7,40	6,12	-4,58
J	Informasi dan Komunikasi	11,86	12,96	9,96	9,12	25,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,62	6,05	5,55	5,41	1,89
L	Real Estate	10,84	12,27	12,62	12,63	1,32
M,N	Jasa Perusahaan	6,99	8,32	9,11	8,20	-10,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,10	4,64	1,57	5,17	-5,06

Kategori	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
P	Jasa Pendidikan	8,07	8,60	9,03	9,82	5,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,97	8,31	9,11	9,75	-1,92
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,93	9,39	6,36	6,24	-1,38
Kabupaten Sukabumi		**5,85**	**5,75**	**5,79**	**5,81**	**-1,08**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menjadi landasan penentuan laju pertumbuhan ekonomi, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kinerja perekonomian daerah. Data menunjukkan perekonomian Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,81 persen, mengalami peningkatan dari laju pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh hampir seluruh sektor lapangan usaha, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi lebih dari 5 persen pada tahun 2019, dan memiliki pertumbuhan yang negatif dari tahun-tahun sebelumnya.

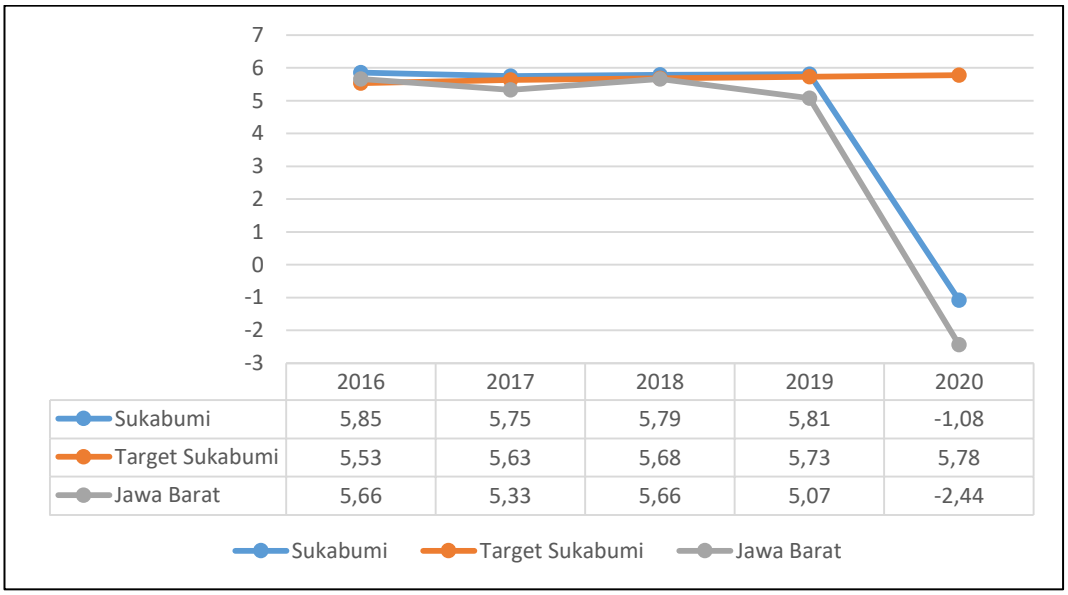
Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Sukabumi mengalami kontraksi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi hampir sepanjang tahun 2020, hal tersebut menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha. Hal tersebut, dapat dilihat dari data hampir semua lapangan usaha yang mengalami pelambatan pertumbuhan hingga mengalami kontraksi ekonomi. Kontraksi tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 12,45 persen, dan lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 18,37 persen. Hal tersebut menunjukkan dampak pandemi Covid-19 sangat memengaruhi aktivitas dari lapangan usaha tersebut yang menyebabkan kontraksi yang tinggi.

Dari keseluruhan jenis lapangan usaha, hanya terdapat tujuh lapangan usaha yang mampu tumbuh positif dimasa pandemi Covid-19, sedangkan empat yang lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan. Tiga lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan yang signifikan dan

tinggi, yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 8,65 persen; lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tumbuh sebesar 11,94 persen, dan lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu informasi dan komunikasi sebesar 16,86 persen. Hal tersebut dikarenakan, lapangan usaha informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan pada saat pademi Covid-19, terutama ketika sebagian besar aktivitas pekerja dan pelajar dilaksanakan melalui metode daring (*work from home* dan *school from home*.

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu daerah yang berimplikasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dan perbandingannya dengan target indikator makro Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.22.



	2016	2017	2018	2019	2020
Sukabumi	5,85	5,75	5,79	5,81	-1,08
Target Sukabumi	5,53	5,63	5,68	5,73	5,78
Jawa Barat	5,66	5,33	5,66	5,07	-2,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.22 Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2016-2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung stabil, namun pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Sukabumi mengalami kontraksi hingga 1,08 persen, sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang mulai menyebar secara nasional dan di daerah pada triwulan I tahun 2020.

C. Struktur Ekonomi Wilayah

Struktur perekonomian wilayah memberikan suatu gambaran mengenai kategori perekonomian melalui sektor-sektor pembentuk perekonomian wilayah. Struktur ekonomi wilayah dapat diidentifikasi melalui besaran peran berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan/jasa. Kontribusi setiap sektor lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan Kabupaten Sukabumi tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kontribusi setiap sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sukabumi menurut lapangan usaha tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	Kontribusi (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,67	19,65	19,09	19,05	19,18
B	Pertambangan dan Penggalian	7,49	7,02	6,42	5,72	5,94
C	Industri Pengolahan	15,45	15,80	16,54	16,87	17,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	11,85	12,36	12,64	12,78	12,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,80	19,71	19,55	19,39	18,04
H	Transportasi dan Pergudangan	6,62	6,80	6,76	6,57	6,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,44	2,51	2,54	2,55	2,53
J	Informasi dan Komunikasi	3,03	3,23	3,35	3,46	4,40

Kategori	Lapangan Usaha	Kontribusi (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,71	0,71	0,71	0,71	0,73
L	Real Estate	1,74	1,85	1,96	2,09	2,14
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,33	0,34	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,83	2,79	2,68	2,66	2,55
P	Jasa Pendidikan	4,27	4,38	4,51	4,69	4,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,92	0,94	0,97	1,01	1,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,74	1,80	1,81	1,82	1,81
Kabupaten Sukabumi		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

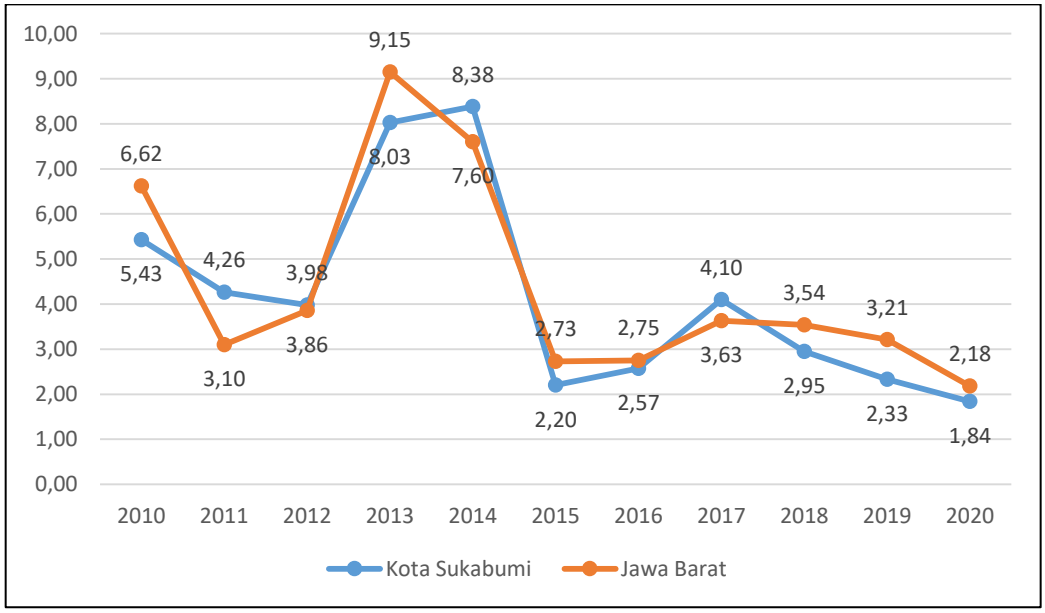
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021 (diolah)

Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan kondisi ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha tersebut. Lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; karena lapangan usaha tersebut memiliki kontribusi lebih dari 15 persen terhadap perekonomian Kabupaten Sukabumi. Hal ini menunjukkan sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki persentase kontribusi yang tinggi, namun cenderung menurun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Penurunan kontribusi lapangan usaha tersebut disebabkan oleh berkurangnya luas lahan pertanian, lambatnya kenaikan harga produk hasil pertanian, atau meningkatnya peranan lapangan usaha lainnya. Lapangan usaha yang memiliki nilai dan kontribusi yang meningkat setiap tahunnya yaitu sektor lapangan usaha industri pengolahan.

D. Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga. Inflasi dapat disebabkan oleh mekanisme pasar antara penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa. Inflasi Kabupaten Sukabumi didekati oleh nilai inflasi yang terjadi di Kota Sukabumi. Hal ini disebabkan Kabupaten Sukabumi tidak menjadi daerah sampel oleh Badan Pusat Statistik. Inflasi sukabumi didapatkan dari Indeks Harga Konsumen (IHK) atau perubahan harga barang dan jasa yang umum dikonsumsi oleh masyarakat dari tahun ke tahun di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Secara agregat inflasi sukabumi mengalami perubahan yang fluktuatif dalam rentang tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2014, Sukabumi mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 8,38 persen. Pada tahun 2020, Sukabumi mengalami deflasi atau penurunan harga barang-barang konsumsi, dari 5,43 persen menjadi 1,84 persen. Laju inflasi Kabupaten Sukabumi yang digambarkan oleh laju inflasi Kota Sukabumi dan perbandingannya dengan Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.23.

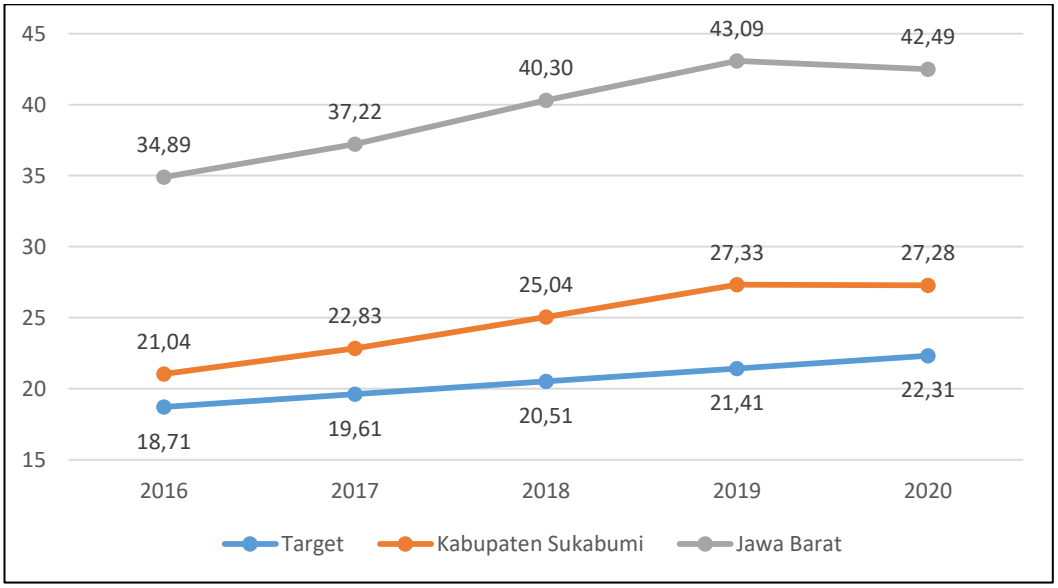


Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.23 Laju inflasi Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2010-2020

E. PDRB per Kapita

PDRB per kapita dapat menjadi ukuran kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita didapatkan dengan membandingkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi terhadap jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk di Kabupaten Sukabumi. PDRB per kapita mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga 2019, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 27,28 juta per kapita sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Nilai tersebut memiliki makna bahwa satu orang penduduk Kabupaten Sukabumi selama tahun 2020 dapat memproduksi barang dan jasa atau memiliki pendapatan senilai 27,28 juta rupiah. Berdasarkan target indikator makro yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021, realisasi PDRB per Kapita Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 telah melebihi target. PDRB per kapita Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan perbandingannya dengan target RPJMD 2016-2021 serta capaian PDRB per Kapita Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.24.



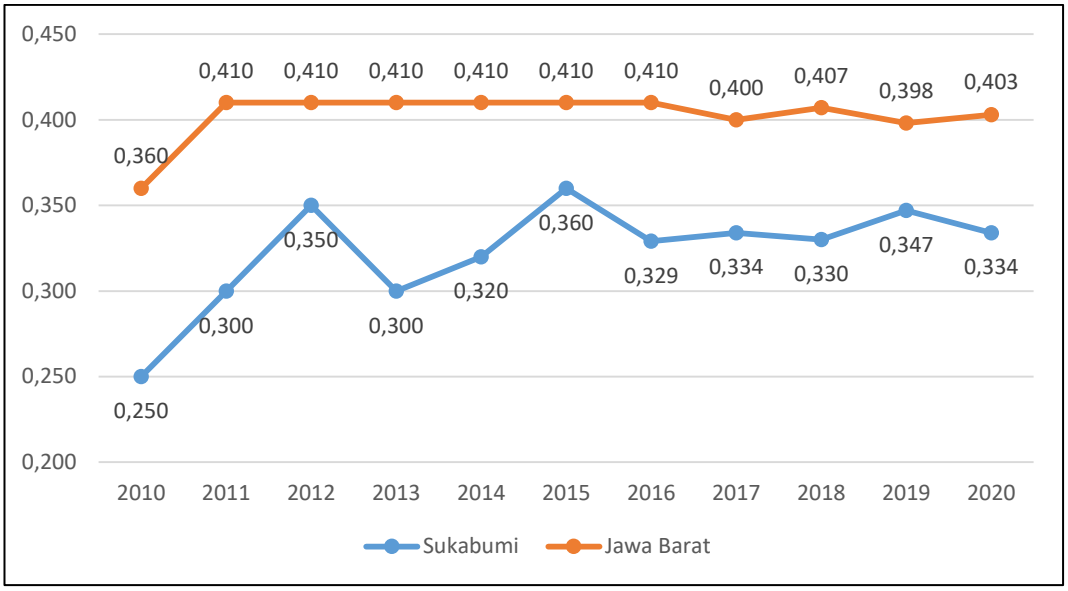
Sumber: Statistik daerah Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.24 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Tren capaian PDRB per kapita atas dasar harga berlaku belum mencerminkan kondisi ekonomi secara nyata atau yang sebenarnya, karena masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Oleh karena itu, untuk melihat perkembangan PDRB per Kapita dari tahun ke tahun digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi mencatat PDRB per kapita atas dasar harga konstan hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019 PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Sukabumi sebesar 18,92 Juta Rupiah meningkat sebanyak 6,79 juta dari tahun 2010 sebagai tahun dasar perhitungan. Angka tersebut menurun 4,88 Juta Rupiah pada tahun 2020 menjadi 14,04 Juta Rupiah. Penurunan PDRB per kapita pada tahun 2020 disebabkan oleh perekonomian yang terkontraksi sehingga berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dan penurunan pendapatan penduduk.

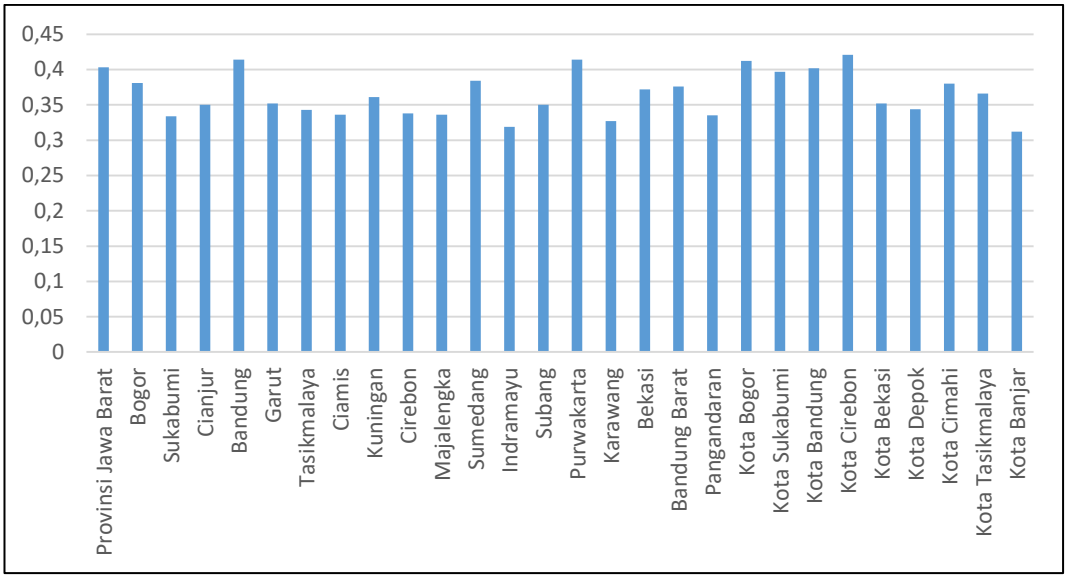
F. Indeks Gini

Indeks gini menunjukkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu daerah. Indeks gini Kabupaten Sukabumi dalam rentang waktu tahun 2010 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan ketimpangan. Pada tahun 2010 indeks gini Kabupaten Sukabumi sebesar 0,250 poin dan meningkat menjadi 0,334 poin pada tahun 2020. Selama rentang waktu tersebut ketimpangan Kabupaten Sukabumi lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat, yaitu sebesar 0,360 pada tahun 2010 dan sebesar 0,403 pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, pada tahun 2020 Kabupaten Sukabumi menempati urutan ke empat dari kabupaten/kota yang memiliki indeks gini terendah, setelah Kota Banjar (0,312 poin), Kabupaten Indramayu (0,319 poin), dan Kabupaten Karawang (0,327 poin). Perkembangan indeks gini Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010-2020, serta perbandingannya dengan rata-rata indeks gini Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota lain di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.25 dan Gambar 2.26.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.25 Tren Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Sukabumi dengan Jawa Barat Tahun 2010 – 2020 (poin)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021

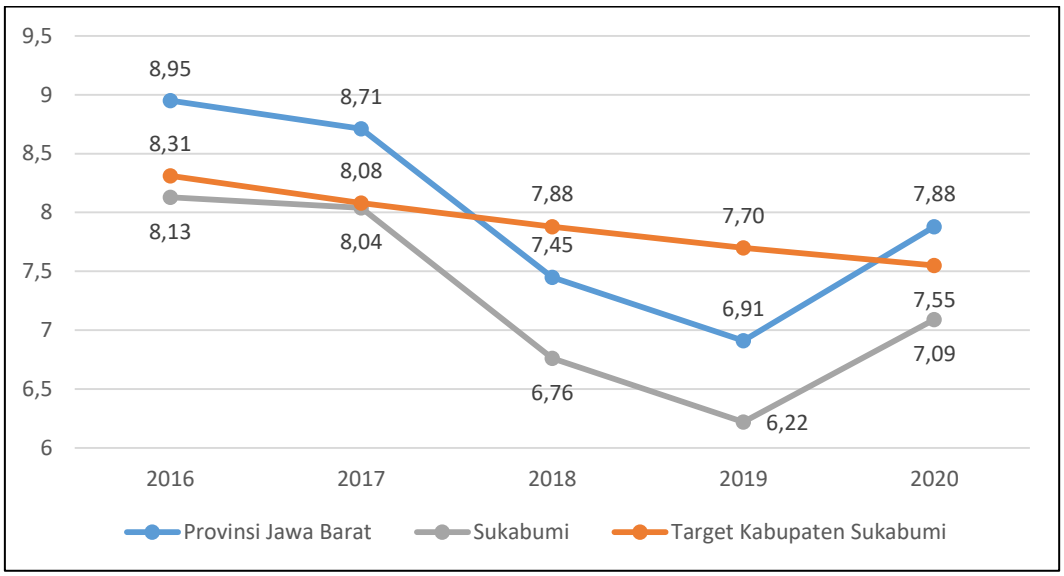
Gambar 2.26 Grafik Indeks Gini Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2020 (Poin)

Berdasarkan (Todaro, 2006) apabila nilai indeks gini suatu daerah berada pada rentang 0,20-0,35 poin, maka daerah tersebut memiliki ketimpangan pendapatan yang cenderung merata. Berdasarkan hal tersebut, ketimpangan pendapatan penduduk sukabumi cenderung merata meskipun hampir menyentuh angka 0,35 poin, namun dengan kondisi tingkat kemiskinan, kedalaman, dan keparahan kemiskinan yang relatif

rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, maka pendapatan penduduk Kabupaten Sukabumi cenderung merata pada level pendapatan yang rendah atau menengah.

G. Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, atau ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan target Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.27.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

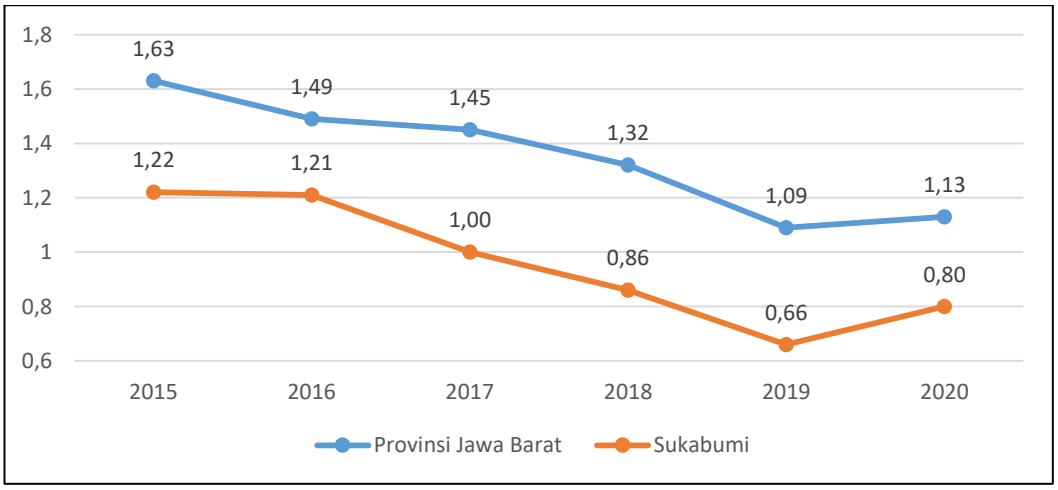
Gambar 2.27 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi Dengan Jawa Barat, dan Target Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan mencapai 8,13 persen dan menurun menjadi sebesar 6,22 persen pada tahun 2019. Namun demikian pandemi Covid-19 yang melanda pada awal tahun 2020 menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan hingga mencapai angka 7,09 persen. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, capaian tingkat kemiskinan masih berada pada level yang sangat baik, bahkan capaian

tersebut jauh lebih baik dibandingkan capaian tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat.

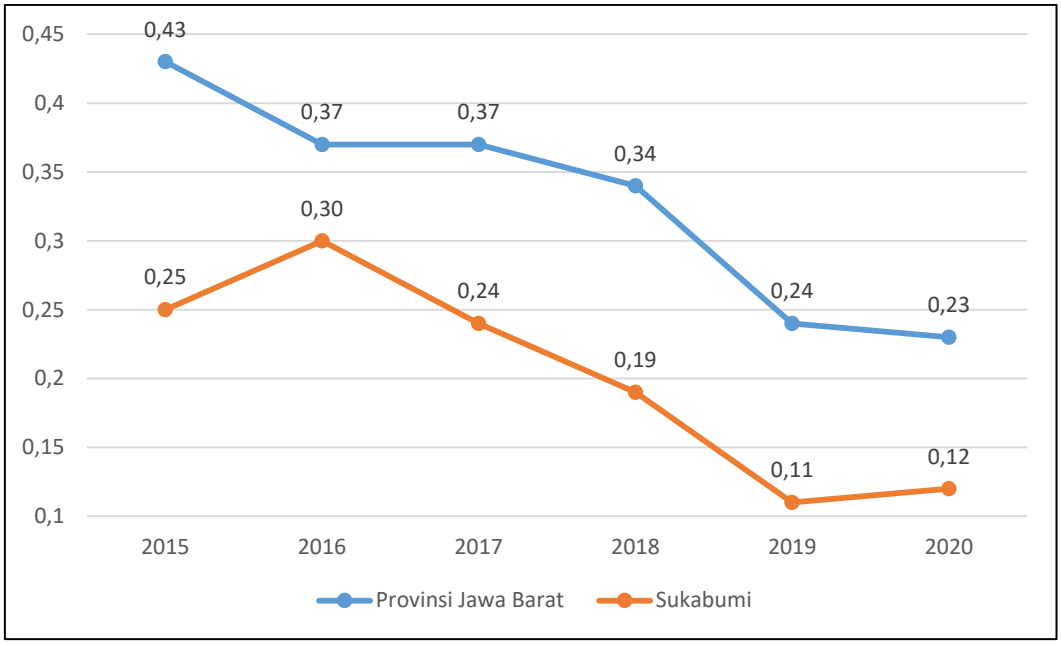
Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menetapkan garis kemiskinan Kabupaten Sukabumi sebesar Rp.328.284 per kapita per bulan, sehingga tingkat kemiskinan 7,09 persen pada tahun 2020 memiliki arti bahwa sebanyak 7,09 persen penduduk Kabupaten Sukabumi memiliki pengeluaran kurang dari Rp.328.284 per kapita per bulan. Di samping garis kemiskinan, indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas penanggulangan kemiskinan di suatu daerah adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin, atau penyebaran pengeluaran penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Besaran indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.28, dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.29.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.28 Perbandingan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2015-2020 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.29 Perbandingan Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi Dan Jawa Barat Tahun 2015-2020 (%)

Gambar 2.28 menunjukan bahwa indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan *gap* atau kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin mengecil. Nilai indeks kedalaman kemiskinan tersebut lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat. Namun demikian, pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 0,80. Hal tersebut menunjukkan, pada tahun 2020 rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menurun dan semakin menjauhi garis kemiskinan.

Gambar 2.29 menunjukkan bahwa perubahan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Jawa barat yang mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2019, namun pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan sukabumi mengalami peningkatan. Kondisi tersebut sejalan dengan tingkat kemiskinan dan tingkat kedalaman kemiskinan kabupaten sukabumi yang mengalami peningkatan pada tahun 2020. Kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi, nasional, bahkan global pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat dari penyebaran pandemi Covid-19. Dimana, laju ekonomi, pertumbuhan lapangan usaha

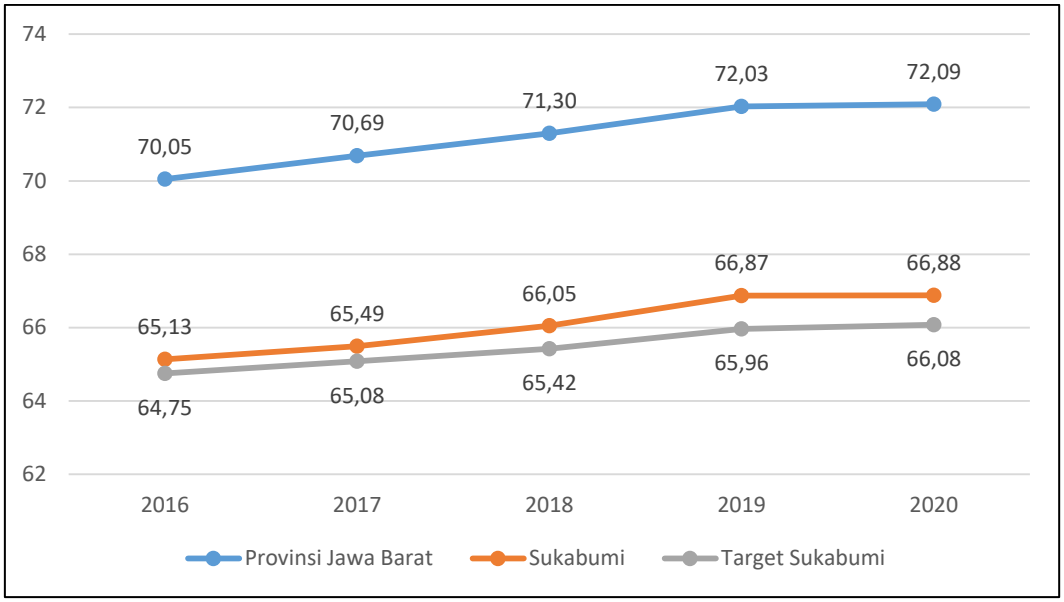
PDRB, pendapatan per kapita Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan, yang menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat, baik dari kedalaman maupun keparahan kemiskinan.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

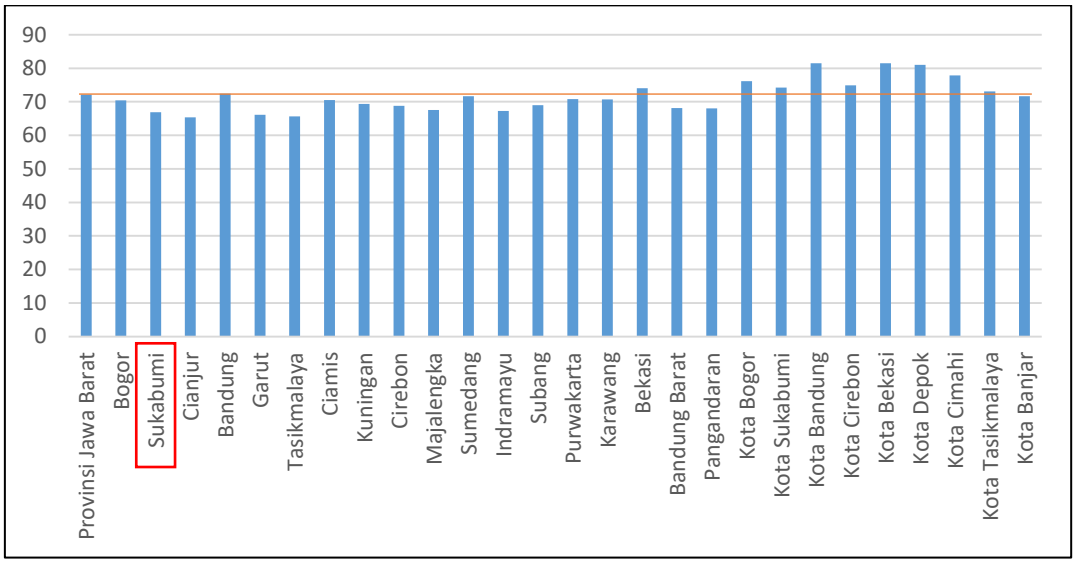
IPM merupakan indeks komposit yang menggabungkan tiga komponen dasar yaitu kesehatan melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta ekonomi melalui indikator Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP). IPM sering dijadikan sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dari sisi pembangunan sumber daya manusia. Menurut Todaro (2006) IPM digunakan untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi secara sistematis dan komprehensif, dengan tiga tujuan atau produk akhir pembangunan yaitu masa hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), serta standar kehidupan (*standard of living*).

IPM Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan nilai indeks setiap tahunnya, pada tahun 2016 nilai IPM Kabupaten Sukabumi sebesar 65,13 poin dan meningkat menjadi 66,88 poin pada tahun 2020. IPM Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020, telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Meskipun demikian, laju pertumbuhan IPM Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung menurun. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat, IPM Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah rata-rata IPM kabupaten/kota lainnya. Selain itu, *gap* antara IPM Kabupaten Sukabumi dengan rata-rata IPM Jawa Barat cenderung bertambah besar setiap tahunnya. Perbandingan capaian IPM Kabupaten Sukabumi, IPM Jawa Barat, dan IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.30 dan Gambar 2.31.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2021

Gambar 2.30 Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan target Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (poin)



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2021

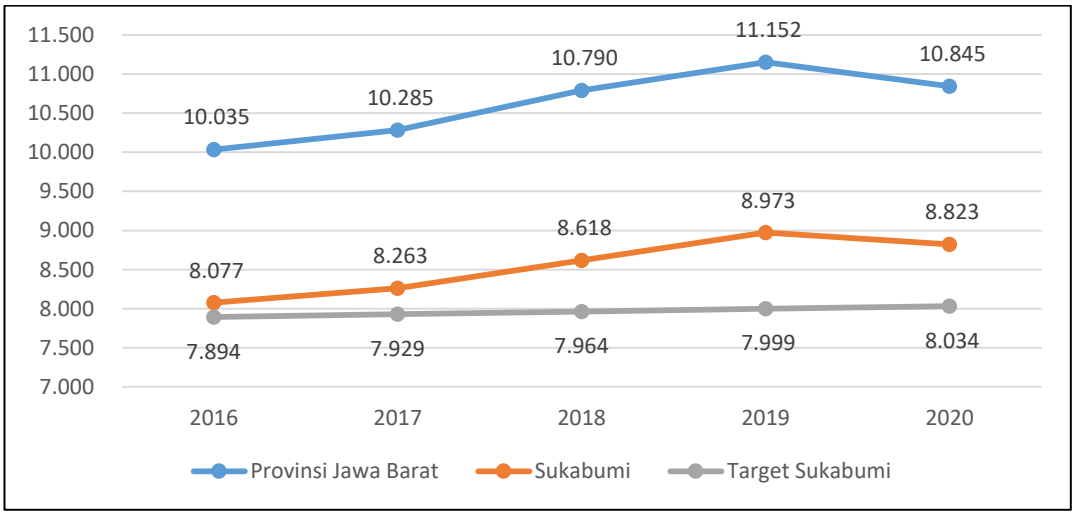
Gambar 2.31 Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Sukabumi dengan IPM Kabupaten/Kota Se Jawa Barat Tahun 2020 (Poin)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sukabumi berada di posisi keempat terbawah dari kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Berdasarkan kondisi yang terjadi pada tahun 2020 dengan menyebarnya pandemi Covid-19, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami pertumbuhan IPM yang negatif. Namun, Kabupaten Sukabumi termasuk ke dalam 13 kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengalami pertumbuhan

IPM yang positif. UNDP dalam (Todaro, 2006) mengelompokkan tingkat pembangunan manusia menjadi tiga kelompok, yaitu tingkat pembangunan manusia yang rendah, menengah, dan tinggi. Berdasarkan data pada gambar di atas, tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi tergolong ke dalam tingkat pembangunan yang menengah berada dalam *range* (50-79,99 poin). Di samping itu, BPS mengelompokkan tingkat pembangunan manusia menjadi empat kelompok, yaitu tingkat pembangunan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, sehingga Kabupaten Sukabumi termasuk kedalam kelompok pembangunan manusia yang sedang dengan *range* (60-70 poin).

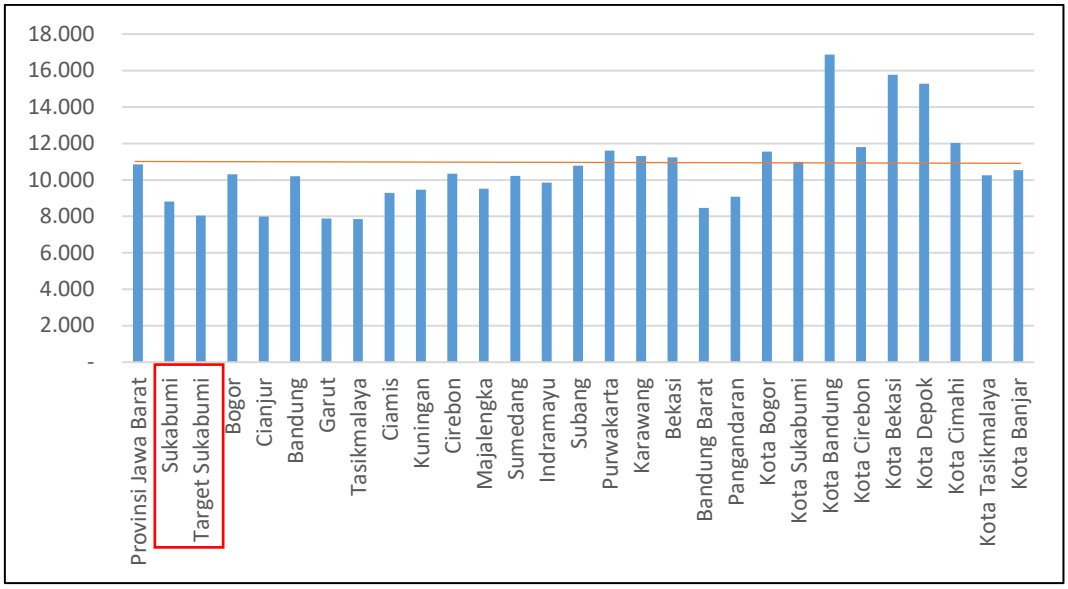
B. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (*Purchasing Power Parity*)

Pengeluaran per kapita disesuaikan atau *Purchasing Power Parity* (PPP) merupakan indikator ekonomi yang dapat menggambarkan standar hidup layak penduduk. PPP merupakan besaran daya beli masyarakat di suatu daerah. Upaya pembangunan di sektor ekonomi, pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar kualitas kehidupan masyarakat lebih baik. Tren perkembangan PPP Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020, serta perbandingannya dengan rata-rata PPP Jawa Barat dan PPP Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.32 dan Gambar 2.33.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2021

Gambar 2.32 Tren Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan target Sukabumi Tahun 2016 – 2020 (Ribu Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2021

Gambar 2.33 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2020 (Ribu Rupiah)

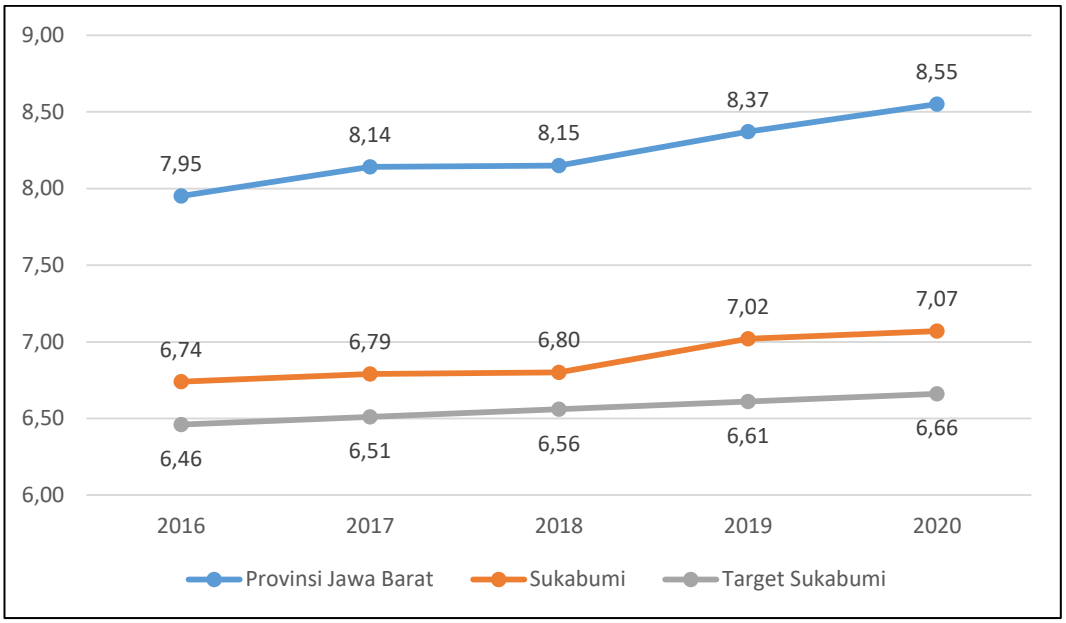
Pada tahun 2016 Kabupaten Sukabumi memiliki daya beli masyarakat sebesar Rp.8.077.000 per kapita/tahun, besaran ini terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi Rp.8.823.000 per kapita/tahun. PPP Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 telah melebihi target, namun kondisi daya beli pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Apabila ditinjau dari laju pertumbuhannya, PPP Kabupaten Sukabumi tumbuh secara fluktuatif. Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020, PPP Kabupaten Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 2,16 persen per tahun. Pada tahun 2020, PPP seluruh kabupaten/kota Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang negatif. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat, PPP Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya dan berada di posisi kelima terbawah. Selain itu, jarak antara PPP Kabupaten Sukabumi dengan Jawa Barat cenderung semakin besar setiap tahunnya.

C. Pendidikan

1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tren perkembangan RLS Kabupaten

Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.34.



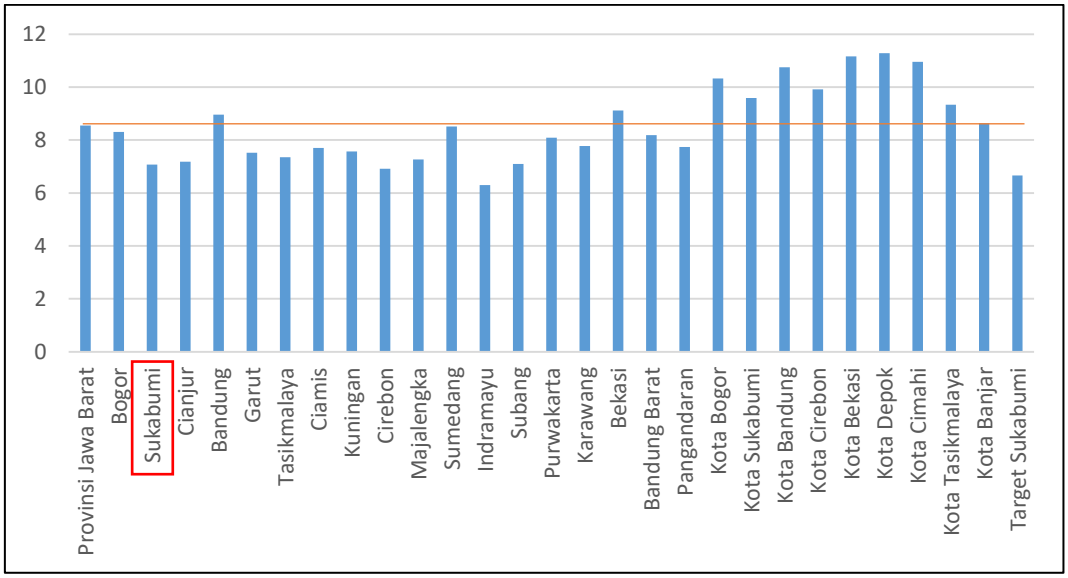
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.34 Tren Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2016 – 2020 (Tahun)

Indikator Rata-rata Lama Sekolah menjadi acuan utama untuk melihat keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukabumi, dan upaya-upaya pembangunan pendidikan yang direpresentasikan dalam program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan. RLS Kabupaten Sukabumi mengalami tren yang meningkat dari 6,74 tahun pada tahun 2016, menjadi 7,07 tahun pada tahun 2020. Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020, RLS Kabupaten Sukabumi meningkat rata-rata per tahun sebesar 1,18 persen. Pada tahun 2020, RLS Kabupaten Sukabumi mencapai 7,07 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Sukabumi usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 7,07 tahun, atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas 1 Sekolah Menengah Pertama.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, RLS Kabupaten Sukabumi masih berada pada peringkat 5 terbawah. RLS Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah rata-rata RLS kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, namun capaian telah melebihi target RLS yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Perbandingan

RLS Kabupaten Sukabumi dengan RLS kabupaten/kota lain di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.35.

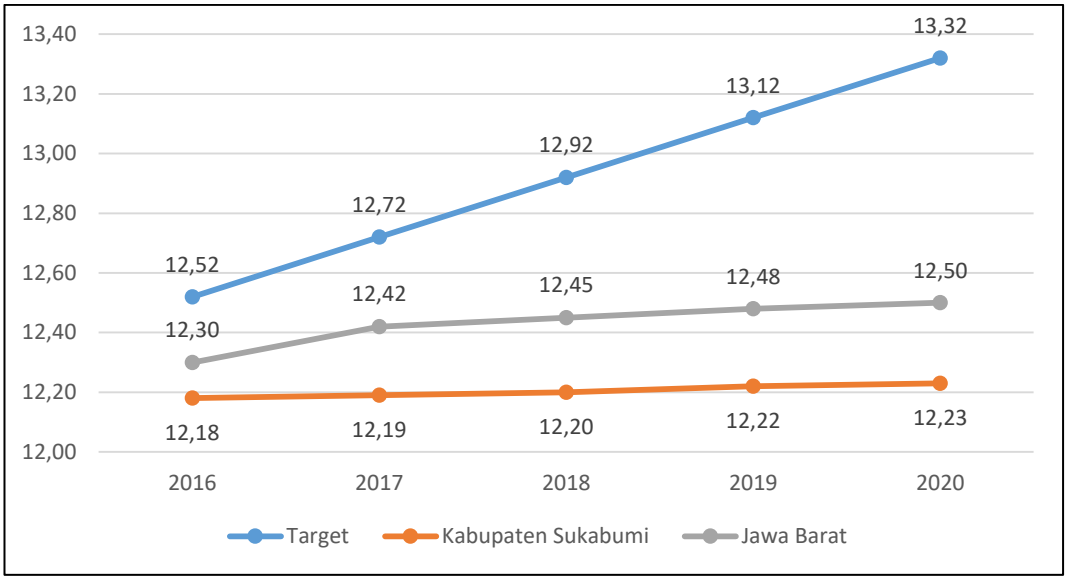


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.35 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2020 (Tahun)

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu. HLS digunakan untuk mengidentifkasi kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Angka HLS Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan target Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.36.



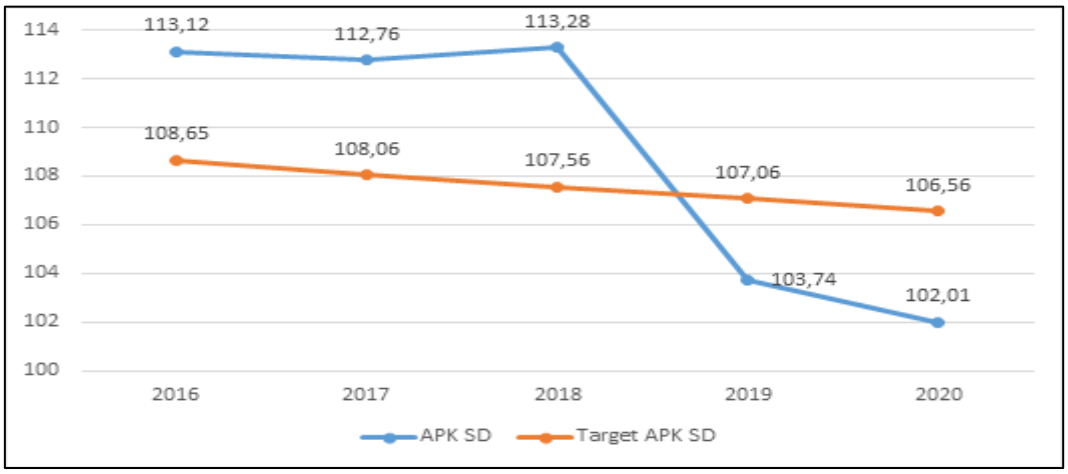
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.36 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (Tahun)

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 angka HLS Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dan cenderung stagnan. Di samping itu, capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, dan berada di bawah rata-rata HLS kabupaten/kota di Jawa Barat. Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020, HLS Kabupaten Sukabumi meningkat rata-rata per tahun sebesar 0,102 persen. Pada tahun 2020, HLS Kabupaten Sukabumi mencapai 12,23 tahun, artinya anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Sukabumi memiliki peluang untuk menamatkan pendidikannya hingga lulus SMA. Harapan lama sekolah Kabupaten Sukabumi berada di posisi kesepuluh terbawah dari kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2020. Di samping itu, *gap* antara HLS Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan, peluang anak-anak usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Sukabumi untuk menamatkan pendidikan masih lebih rendah dibandingkan dengan peluang rata-rata anak usia 7 tahun di kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

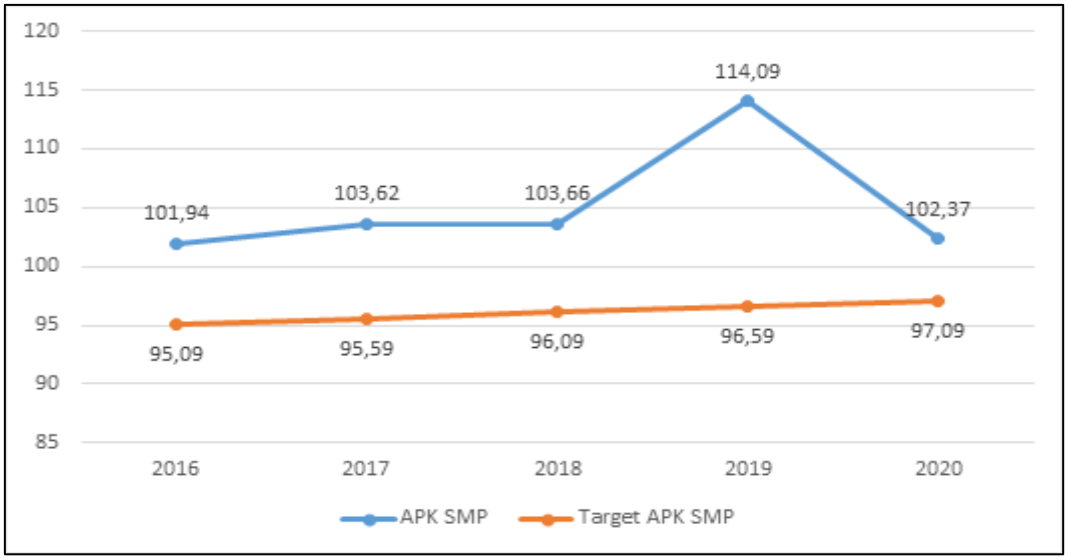
3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan indikator pembangunan manusia pada bidang pendidikan yang digunakan untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada tiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi capaian APK di Kabupaten Sukabumi, maka tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan tertentu semakin tinggi. APK Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.37 dan Gambar 2.38.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.37 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.38 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)

APK merupakan rasio jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu yang sedang bersekolah terhadap jumlah penduduk dengan kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK SD/SMP didapatkan dari perbandingan jumlah siswa pada jenjang SD/SMP yang dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun. APK dapat menjadi salah satu indikator yang dapat mengukur daya tampung atau kapasitas sistem pendidikan di Kabupaten Sukabumi pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia penduduk yang bersekolah pada masing-masing jenjang pendidikan.

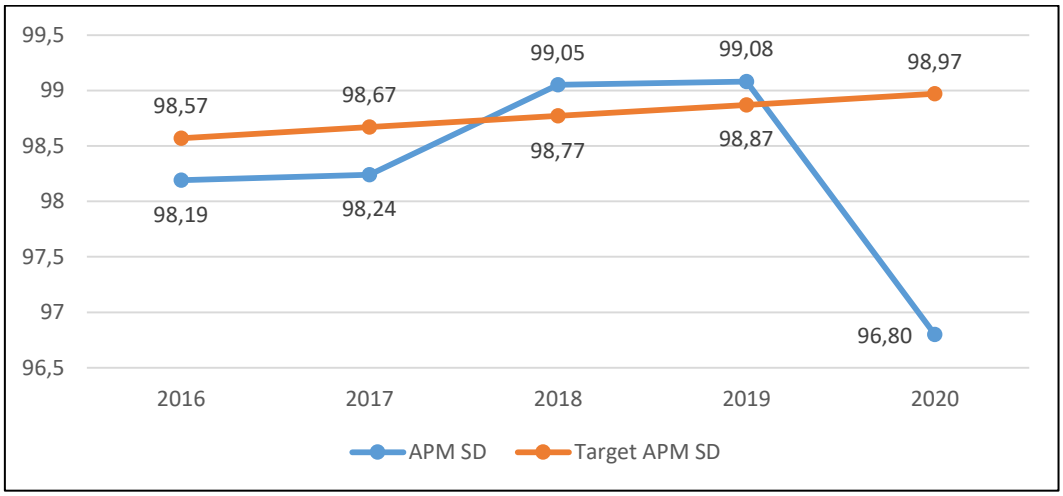
Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, capaian APK SD mengalami penurunan dari 113,12 persen menjadi 102,01 persen. Nilai APK dapat melebihi nilai 100 persen, karena populasi murid yang bersekolah dapat melebihi usia anak yang seharusnya bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK yang tinggi dapat pula menunjukkan bahwa lingkungan sekolah tertentu memiliki kapasitas yang besar untuk menerima anak di luar batas usia. Pada tahun 2016 dan tahun 2018 nilai APK Kabupaten Sukabumi lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dan 2020, hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya pendaftaran sekolah dengan usia yang terlalu dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Pada tahun 2019 APK SD mengalami penurunan dan telah melebihi target. Hal tersebut menunjukkan penduduk Kabupaten Sukabumi telah mulai mendaftar Sekolah Dasar sesuai dengan kelompok usia 7-12 tahun.

Berbeda dengan APK SD, APK SMP dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan dan memiliki *gap* yang semakin besar dengan target Kabupaten Sukabumi. Namun sayangnya, pada tahun 2020 nilai APK SMP mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMP yang telah melebihi jumlah populasi penduduk kelompok usia 13-15 tahun. Pada tahun 2020, APK SMP Kabupaten Sukabumi sebesar 102,37 persen, artinya sebanyak 2,37 persen murid SMP/sederajat yang bersekolah bukan dari kelompok usia 13-15 tahun. Di samping itu, hal tersebut menunjukkan kemampuan jenjang pendidikan SMP mampu menampung penduduk usia sekolah dari

target yang ditetapkan, dapat juga disebabkan oleh semakin banyak murid yang memiliki kemampuan untuk dapat mempercepat waktu sekolahnya dalam program akselerasi.

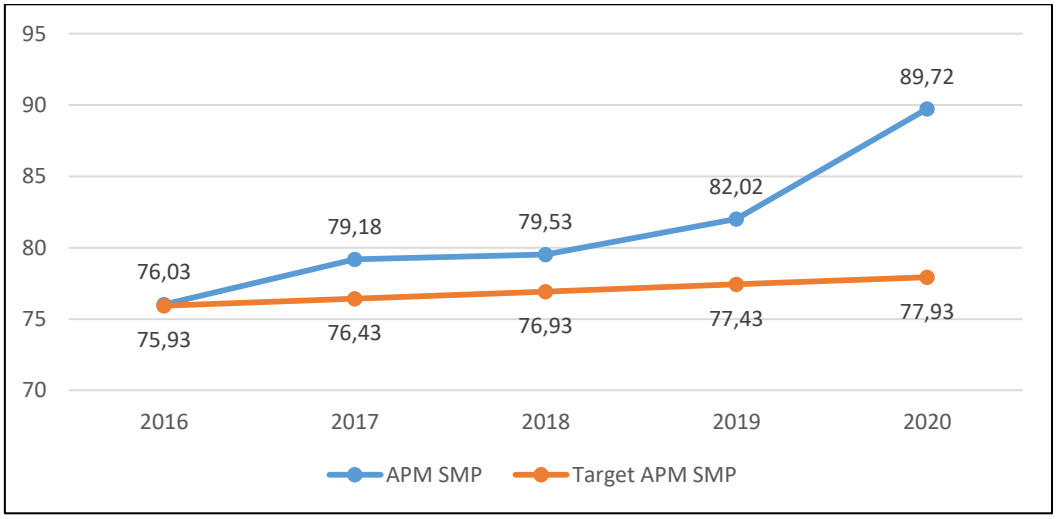
4) Angka Partisipiasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukabumi tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.39 dan 2.40.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.39 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.40 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)

APM merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat pada jenjang pendidikan yang seharusnya,

atau penduduk dengan kelompok umur yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan tertentu. APM dapat digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APM selalu akan lebih rendah dari APK yang mengikutsertakan jumlah penduduk di luar usia pada jenjang pendidikan tertentu.

Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, APM SD Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2016 nilai APM SD sebesar 98,19 persen sedangkan pada tahun 2020 menjadi 96,80 persen. Capaian APM SD pada tahun 2020 tersebut, menunjukkan bahwa sebesar 96,80 persen penduduk di Kabupaten Sukabumi yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu pada jenjang SD/sederajat. Apabila seluruh penduduk usia 7-12 tahun dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM dapat mencapai 100 persen.

APM SMP didapatkan dari perbandingan jumlah murid SMP/sederajat yang berusia 13-15 tahun terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun. APM SMP digunakan juga untuk mengidentifikasi persentase siswa SMP yang bersekolah tepat waktu. Capaian APM SMP meningkat setiap tahunnya dan telah melebihi target dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 APM SMP sebesar 89,72 persen, artinya terdapat sebanyakr 89,72 persen penduduk usia 13-15 tahun telah bersekolah pada jenjang SMP/sederajat dengan tepat waktu. Peningkatan APM SMP tersebut menunjukkan peningkatan minat penduduk Kabupaten Sukabumi maupun bukan penduduk Kabupaten Sukabumi untuk bersekolah pada jenjang SMP/sederajat di wilayah Kabupaten Sukabumi.

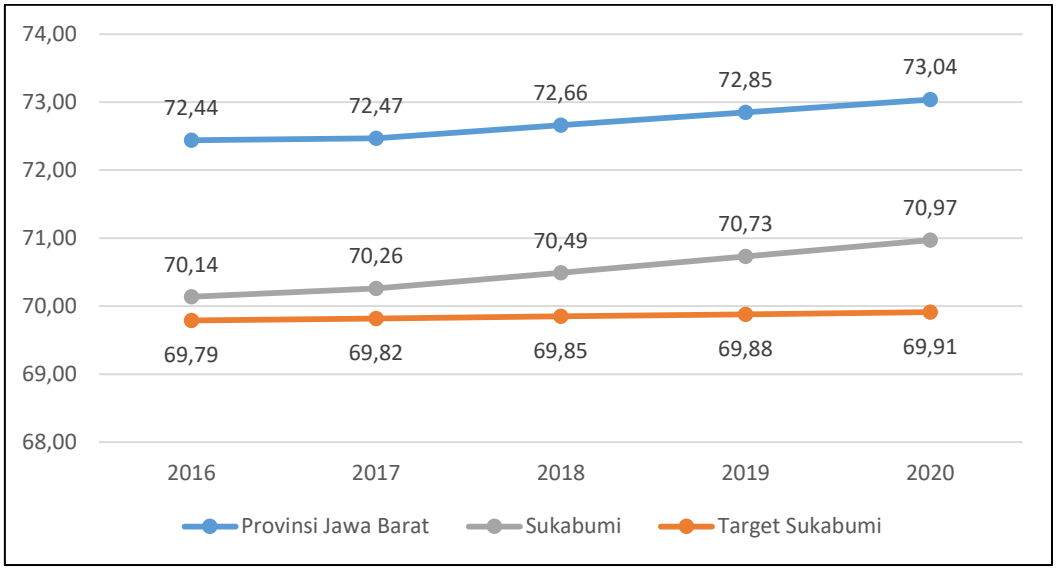
D. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dari indikator pembangunan daerah. Pembangunan kesehatan yang baik, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan, kemampuan hidup sehat, sehingga dapat tercapai

derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan sangat penting dalam mendukung kualitas dan daya saing sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan capaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. Menurut WHO (*World Health Organization*) kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit dan kelemahan fisik.

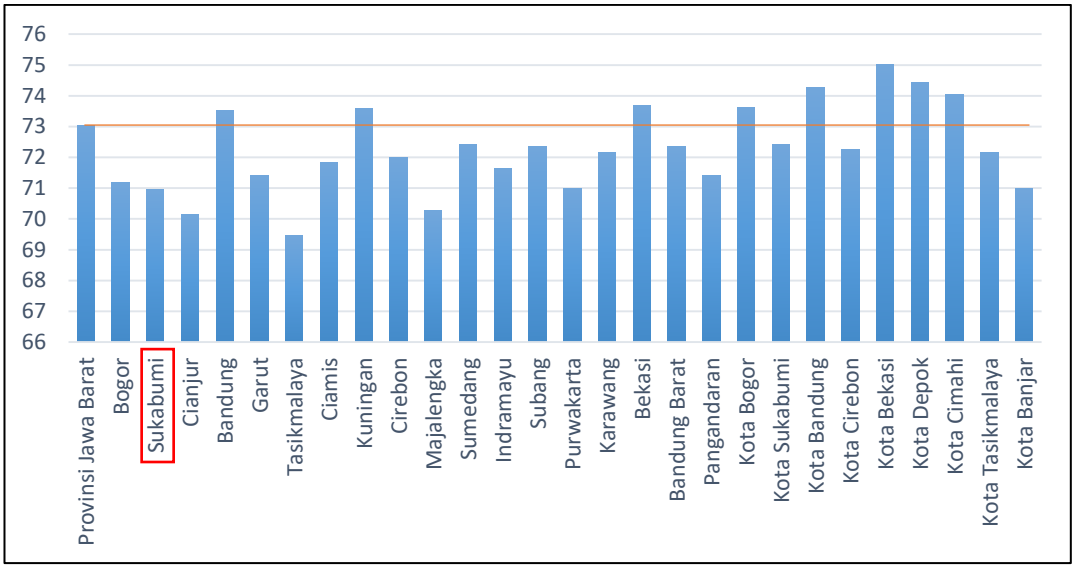
1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Tren Perkembangan AHH Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dan perbandingannya dengan kabupaten/kota lain di Jawa barat pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.41 dan Gambar 2.42.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.41 Tren Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2016 – 2020 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2021

Gambar 2.42 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2020 (Tahun)

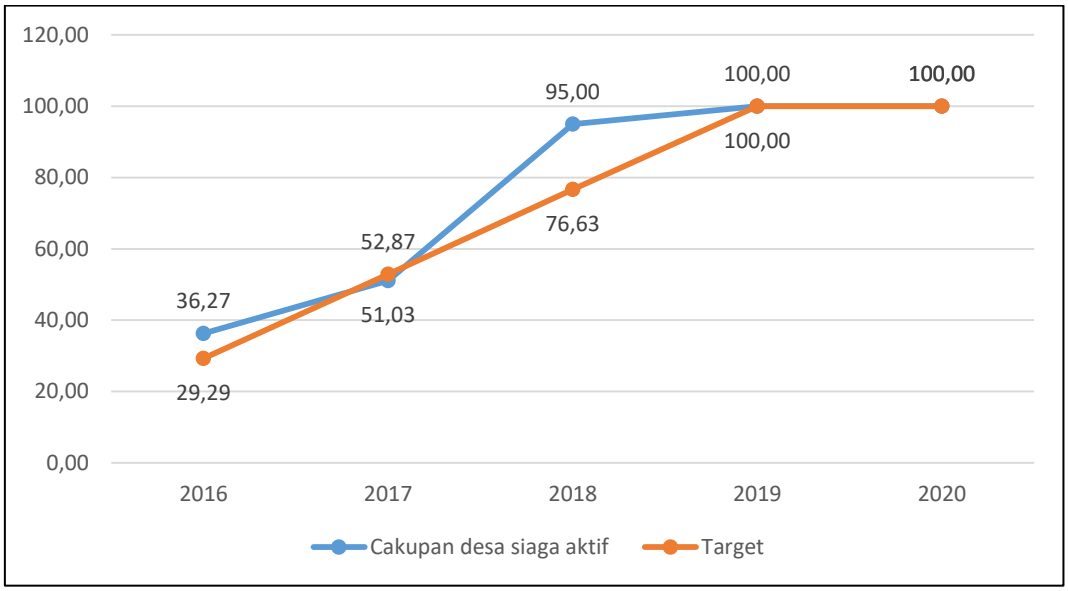
AHH Kabupaten Sukabumi meningkat setiap tahunnya, selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah berhasil meningkatkan AHH saat lahir sebesar 0,83 tahun. Pada periode tersebut, AHH rata-rata meningkat sebesar 0,29 persen per tahun. Pada tahun 2020 tercatat AHH Kabupaten Sukabumi mencapai 70,97 tahun, meningkat dari tahun 2016 yaitu 70,14 tahun. AHH masyarakat Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah rata-rata AHH Jawa Barat, namun jarak antara AHH Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat cenderung mengecil setiap tahunnya.

AHH Kabupaten Sukabumi berada di posisi keempat terbawah pada tahun 2020, meningkat satu peringkat dari posisi ketiga terbawah dari tahun 2019 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. UNDP menentukkan AHH terendah seseorang selama 25 tahun, dan AHH terlama seseorang selama 85 tahun. Penentuan tersebut merupakan pengukuran atau perkiraan AHH yang wajar, yang dapat dicapai oleh penduduk sebuah negara.

2) Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga aktif merupakan pengembangan dari desa siaga, yaitu desa dengan penduduk yang dapat mengakses dengan mudah pelayanan

kesehatan dasar melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan sarana kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan tersebut berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan keadaan gawat darurat, pemantauan pertumbuhan gizi, dan pengendalian penyakit. Cakupan desa siaga aktif didapatkan dengan perbandingan dari jumlah desa siaga yang aktif terhadap jumlah desa siaga yang dibentuk dikalikan dengan 100 persen. Cakupan strata desa siaga aktif Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.43.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2021

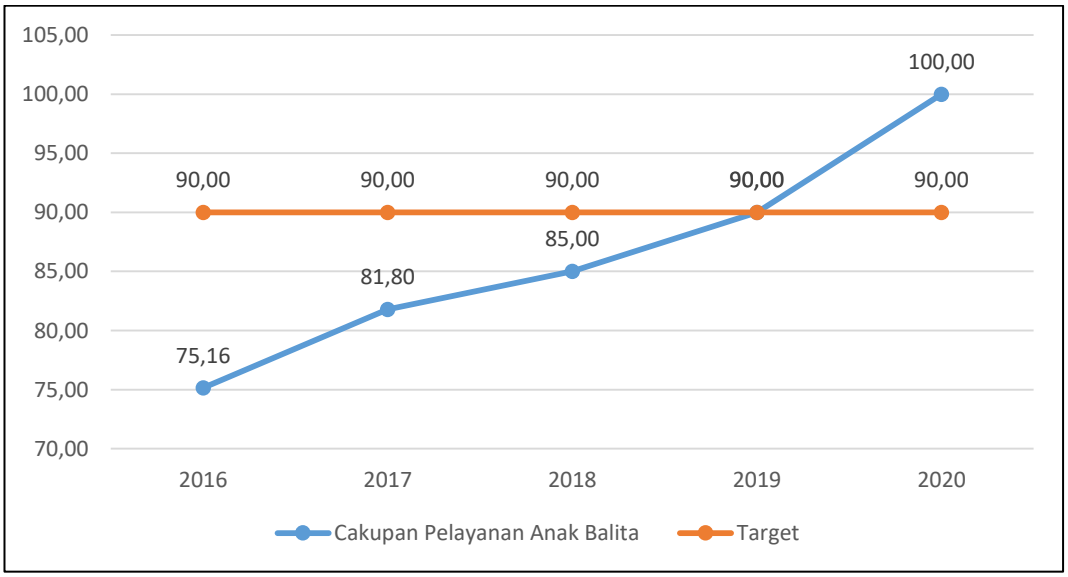
Gambar 2.43 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)

Cakupan desa siaga aktif terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Seluruh desa siaga yang dibentuk telah berkembang menjadi desa siaga aktif yang penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dengan mudah melalui berbagai fasilitas kesehatan yang disediakan. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan IIPM pada bidang kesehatan yaitu AHH yang meningkat setiap tahunnya, meskipun AHH Kabupaten Sukabumi berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat, namun berada di atas target yang ditetapkan.

3) Cakupan Pelayaan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita merupakan indikator yang menunjukkan tingkat layanan kesehatan terhadap anak balita. Cakupan pelayanan anak balita bertujuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita yang berisiko dengan keadaan gizinya, status gizi buruk dan gangguan pertumbuhan. Cakupan pelayanan anak balita dari tahun 2016 hingga tahun 2020 meningkat setiap tahunnya.

Pelayanan kesehatan anak balita harus memenuhi 4 kriteria pelayanan, yaitu: ditimbang minimal 8 kali dalam setahun; mendapatkan vitamin A dua kali setahun; dilakukaan SDIDTL minimal 2 kali setahun; dan mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. Berdasarkan data, empat kriteria pelayanan telah sepenuhnya dilakukan dan dirasakan oleh total balita yang ada sehingga persentase data menunjukkan kondisi melebihi target pada tahun 2020. Dimana, pada tahun 2020 cakupan pelayanan anak balita yang mendapatkan pelayanan tersebut sudah mencapai 100 persen. Cakupan pelayanan anak balita Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.44.

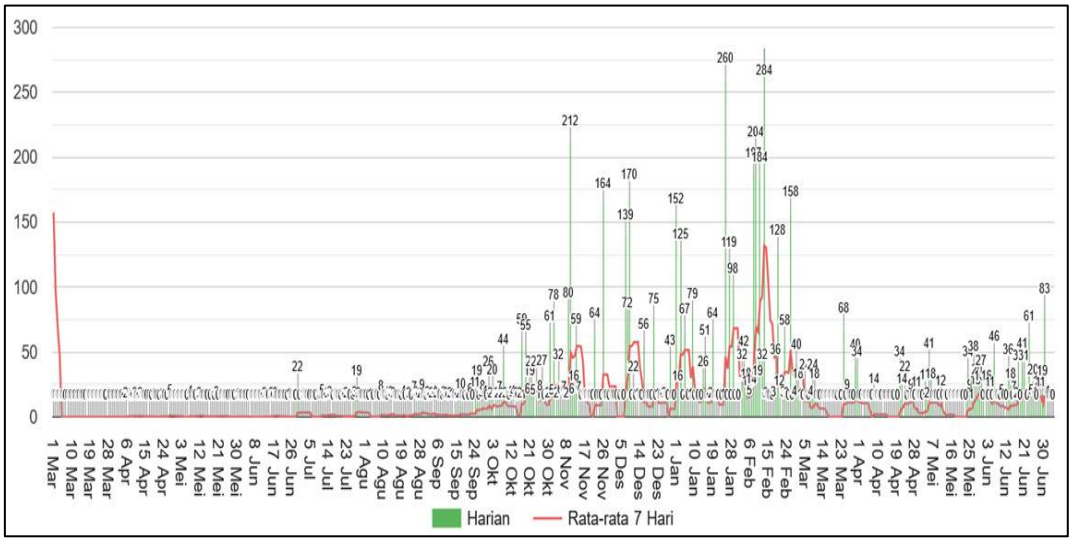


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.44 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)

4) Pandemi Covid-19

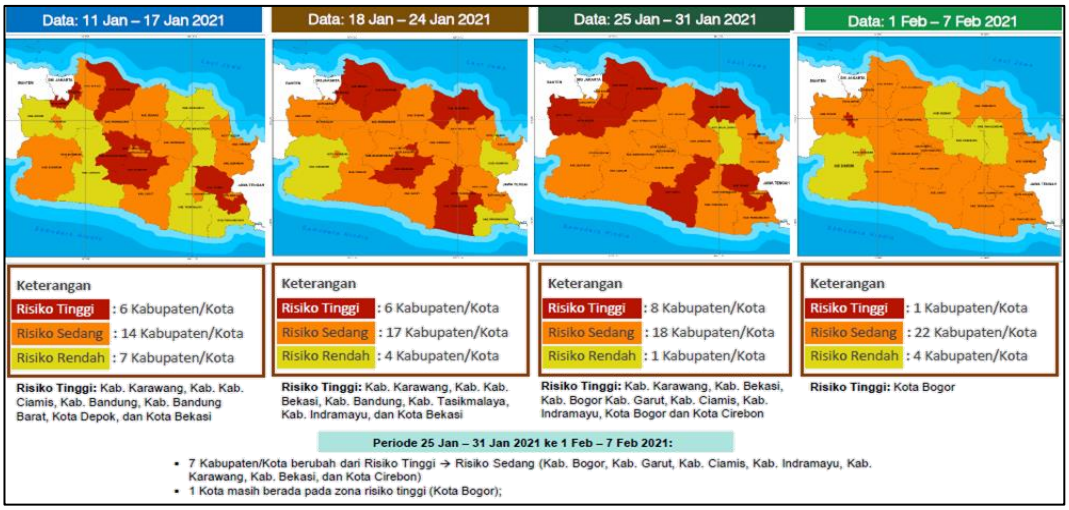
Pandemi Covid-19 merupakan pandemi yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan publikasi dari pusat informasi dan koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat periode Maret 2020 hingga Juni 2021, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Sukabumi kasus terkonfirmasi tertinggi terjadi pada akhir bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2021. Kasus tertinggi terjadi pada periode 6 februari -15 februari mencapai 284 kasus positif, dan periode 19 januari – 28 januari mencapai 260 kasus positif. Secara rinci bagan harian terkonfirmasi covid-19 di Kabupaten Sukabumi periode maret 2020 hingga juli 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.45.



Sumber: Publikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat, 2021

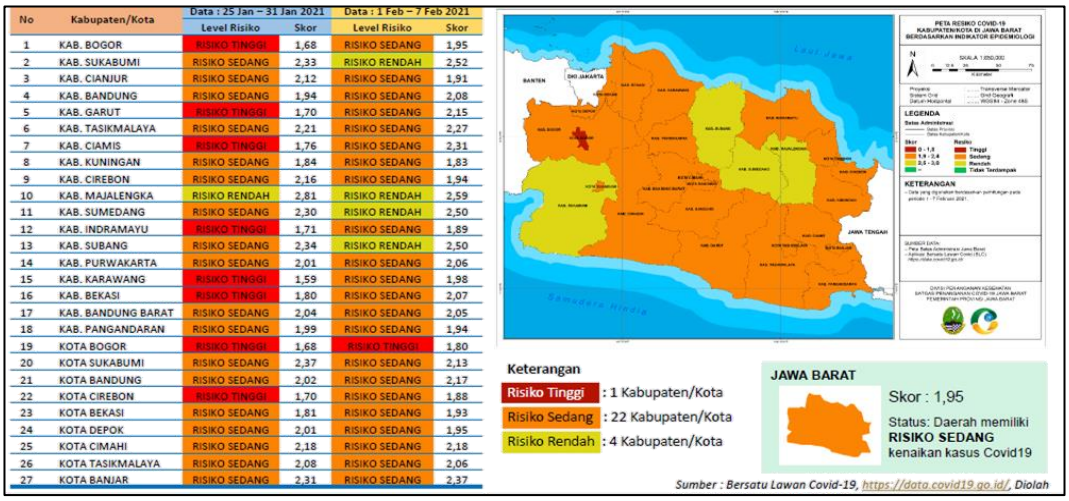
Gambar 2.45 Bagan Harian Terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Sukabumi Maret 2020 – Juli 2021

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Pandemi Covid-19 Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi termasuk dalam kategori risiko sedang dan rendah selama periode Januari hingga Februari 2021. Data dan informasi pandemi Covid-19 di Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat disajikan dalam Gambar 2.46, 2.47, dan 2.48.



Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat, 2021

Gambar 2.46 Risiko Covid 19 Prov. Jawa Barat Januari – Februari 2021



No	Kabupaten/Kota	Data : 25 Jan – 31 Jan 2021		Data : 1 Feb – 7 Feb 2021	
		Level Risiko	Skor	Level Risiko	Skor
1	KAB. BOGOR	RISIKO TINGGI	1,68	RISIKO SEDANG	1,95
2	KAB. SUKABUMI	RISIKO SEDANG	2,33	RISIKO RENDAH	2,52
3	KAB. CIANJUR	RISIKO SEDANG	2,12	RISIKO SEDANG	1,91
4	KAB. BANDUNG	RISIKO SEDANG	1,94	RISIKO SEDANG	2,08
5	KAB. GARUT	RISIKO TINGGI	1,70	RISIKO SEDANG	2,15
6	KAB. TASIKMALAYA	RISIKO SEDANG	2,21	RISIKO SEDANG	2,27
7	KAB. CIAMIS	RISIKO TINGGI	1,76	RISIKO SEDANG	2,31
8	KAB. KUNINGAN	RISIKO SEDANG	1,84	RISIKO SEDANG	1,83
9	KAB. CIREBON	RISIKO SEDANG	2,16	RISIKO SEDANG	1,94
10	KAB. MAJALENGKA	RISIKO RENDAH	2,81	RISIKO RENDAH	2,59
11	KAB. SUMEDANG	RISIKO SEDANG	2,30	RISIKO RENDAH	2,50
12	KAB. INDRAMAYU	RISIKO TINGGI	1,71	RISIKO SEDANG	1,89
13	KAB. SUBANG	RISIKO SEDANG	2,34	RISIKO RENDAH	2,50
14	KAB. PURWAKARTA	RISIKO SEDANG	2,01	RISIKO SEDANG	2,06
15	KAB. KARAWANG	RISIKO TINGGI	1,59	RISIKO SEDANG	1,98
16	KAB. BEKASI	RISIKO TINGGI	1,80	RISIKO SEDANG	2,07
17	KAB. BANDUNG BARAT	RISIKO SEDANG	2,04	RISIKO SEDANG	2,05
18	KAB. PANGANDARAN	RISIKO SEDANG	1,99	RISIKO SEDANG	1,94
19	KOTA BOGOR	RISIKO TINGGI	1,68	RISIKO TINGGI	1,80
20	KOTA SUKABUMI	RISIKO SEDANG	2,37	RISIKO SEDANG	2,13
21	KOTA BANDUNG	RISIKO SEDANG	2,02	RISIKO SEDANG	2,17
22	KOTA CIREBON	RISIKO TINGGI	1,70	RISIKO SEDANG	1,88
23	KOTA BEKASI	RISIKO SEDANG	1,81	RISIKO SEDANG	1,93
24	KOTA DEPOK	RISIKO SEDANG	2,01	RISIKO SEDANG	1,95
25	KOTA CIMAHI	RISIKO SEDANG	2,18	RISIKO SEDANG	2,18
26	KOTA TASIKMALAYA	RISIKO SEDANG	2,08	RISIKO SEDANG	2,06
27	KOTA BANJAR	RISIKO SEDANG	2,31	RISIKO SEDANG	2,37

Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat, 2021

Gambar 2.47 Skor dan Peta Risiko Covid 19 Prov. Jawa Barat Januari – Februari 2021

No	Kabupaten/Kota	14 – 20 Des 2020	21 – 27 Des 2020	28 Des 20 – 3 Jan 21	4 – 10 Jan 2021	11 – 17 Jan 2021	18 – 24 Jan 2021	25 – 31 Jan 2021	1 - 7 Feb 2021
1	KAB. BOGOR	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SEDANG
2	KAB. SUKABUMI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	RENDAH
3	KAB. CIANJUR	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4	KAB. BANDUNG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
5	KAB. GARUT	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG
6	KAB. TASIKMALAYA	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	TINGGI	SEDANG	SEDANG
7	KAB. CIAMIS	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI	SEDANG
8	KAB. KUNINGAN	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG
9	KAB. CIREBON	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
10	KAB. MAJALENGKA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	RENDAH	RENDAH
11	KAB. SUMEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH
12	KAB. INDRAMAYU	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	TINGGI	TINGGI	SEDANG
13	KAB. SUBANG	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH
14	KAB. PURWAKARTA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
15	KAB. KARAWANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG
16	KAB. BEKASI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG
17	KAB. BANDUNG BARAT	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
18	KAB. PANGANDARAN	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG	SEDANG
19	KOTA BOGOR	SEDANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI
20	KOTA SUKABUMI	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
21	KOTA BANDUNG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
22	KOTA CIREBON	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG	RENDAH	RENDAH	TINGGI	SEDANG
23	KOTA BEKASI	SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
24	KOTA DEPOK	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
25	KOTA CIMAHI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
26	KOTA TASIKMALAYA	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
27	KOTA BANJAR	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG

Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat, 2021

Gambar 2.48 Skor Covid 19 Prov. Jawa Barat Januari – Februari 2021

E. Ketenagakerjaan

1) Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan dari jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja, terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2017 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Sukabumi tahun 2017-2020

Kegiatan Utama		2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja (jiwa)		1.123.546	1.114.171	1.120.711	1.146.833
	Bekerja	1.037.532	1.027.606	1.031.213	1.036.735
	Pengangguran Terbuka	86.014	86.565	89.498	110.098
Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)		639.012	662.277	667.289	715.978
	Sekolah	129.486	123.077	128.437	134.592
	Mengurus RT	444.055	478.659	460.739	489.413
	Lainnya	65.471	60.491	78.113	91.973
Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)		92,34	92,23	92,01	90,40

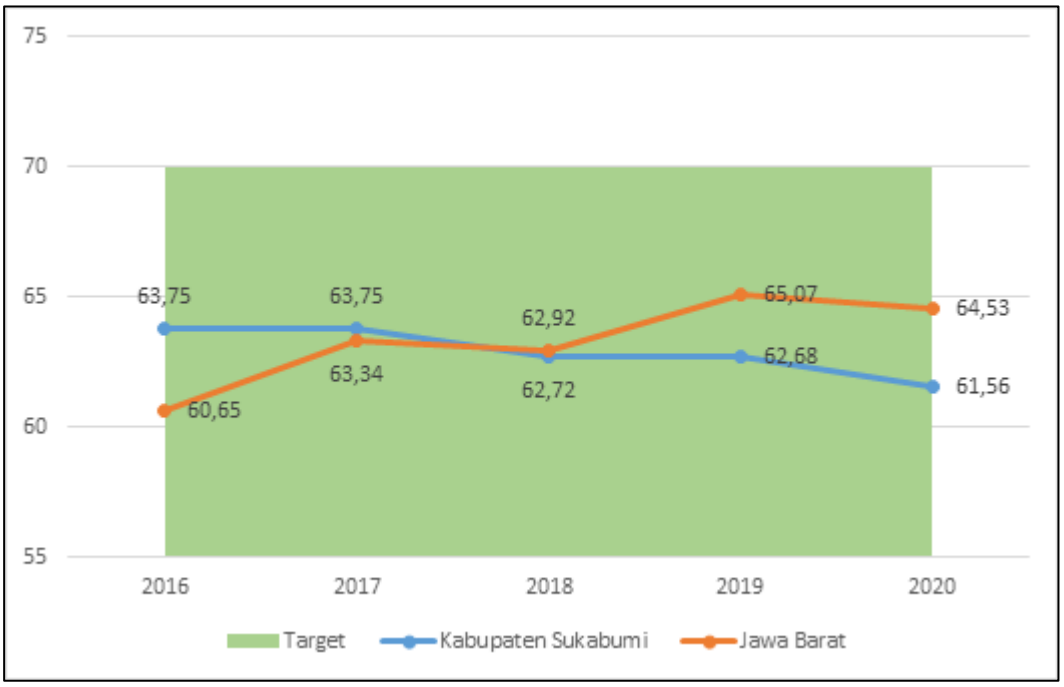
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021

Rasio penduduk yang bekerja menunjukkan hubungan antara angkatan kerja dengan permintaan tenaga kerja, atau kemampuan penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja, ataupun belum bekerja namun aktif dalam bursa kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang berusia di atas 15 tahun, namun tidak aktif dalam bursa kerja seperti memiliki kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya serta tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukan kedalam kategori bekerja, dan mencari pekerjaan. Rasio penduduk di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari 92,34 persen pada tahun 2017 menjadi 90,40 persen pada tahun 2020.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia di atas 15 tahun yang termasuk ke dalam angkatan kerja. TPAK didapatkan dari perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah

penduduk usia di atas 15 tahun. TPAK Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan target TPAK Kabupaten Sukabumi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.49.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

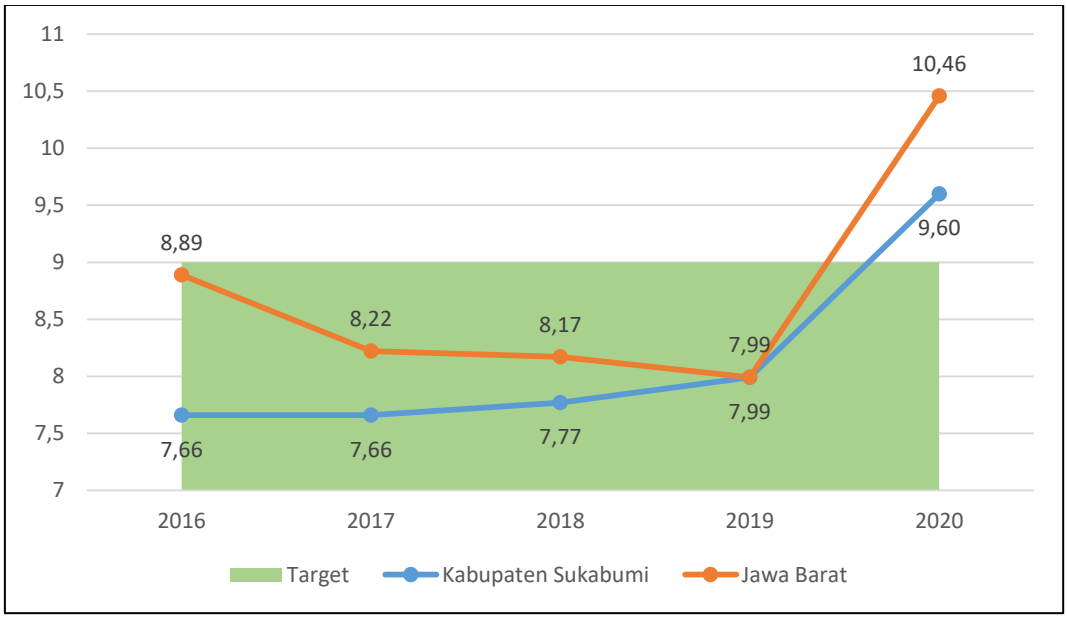
Gambar 2.49 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)

TPAK digunakan untuk mengidentifikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Semakin tinggi nilai TPAK suatu daerah maka semakin tinggi kesempatan kerja yang tersedia di daerah tersebut. Capaian TPAK Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu dari 63,75 persen pada tahun 2016 menjadi 61,56 persen pada tahun 2020. Walaupun demikian, angka tersebut masih berada dalam *range* target TPAK Kabupaten Sukabumi yaitu sebesar 55-70 persen. Penurunan TPAK dapat disebabkan oleh menurunnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sukabumi, karena terjadi PHK, atau sulitnya mencari lapangan pekerjaan. TPAK yang menurun dapat pula disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia di atas 15 tahun, sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat menampung seluruh penduduk usia produktif yang aktif bekerja.

Jika dibandingkan dengan capaian TPAK Jawa Barat, TPAK Kabupaten Sukabumi cenderung menurun dan bergerak menjauh dari rata-rata TPAK Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan, baik lapangan pekerjaan, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi lebih rendah dan tertinggal dari kondisi rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan target Kabupaten Sukabumi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.50.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.50 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)

TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT didapatkan dari perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100 persen. Tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk mengidentifikasi besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap kedalam pasar kerja suatu daerah. TPT Kabupaten Sukabumi setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga terdapat banyak penduduk usia angkatan kerja yang tidak

terserap dalam lapangan pekerjaan di Kabupaten Sukabumi. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia atau rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan perkerjaan. Sebesar 7,99 persen penduduk Kabupaten Sukabumi termasuk kedalam kelompok pengangguran, dimana angka tersebut sama dengan angka tingkat pengangguran Jawa Barat pada tahun 2019. Persentase TPT Kabupaten Sukabumi berada dalam *range* target sukabumi yaitu sebesar 7-9 persen dari tahun 2016 hingga 2019, namun berdasarkan data *time series* TPT sukabumi setiap tahunnya cenderung meningkat berbanding lurus dengan penurunan TPAK.

Pada tahun 2020, baik Jawa Barat maupun Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan angka pengangguran yang tinggi. Dimana, Kabupaten Sukabumi mencapai angka 9,60 persen, dan Jawa Barat mencapai 10,46 persen. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh dampak dari penyebaran Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020. Penyebaran pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran akibat pembatasan aktivitas dan banyak perusahaan yang melakukan PHK dalam jumlah yang besar.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang memiliki seni budaya yang tinggi. Potensi kebudayaan di Kabupaten Sukabumi diantaranya syukuran hari nelayan, tarian tradisi dan karawitan, serta upacara adat di kampung adat seperti Kasepuhan Ciptagelar, Ciptamulya, Sirnaresmi, dan Padepokan Girijaya. Jumlah festival dan seni budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020 telah diadakan festival seni dan budaya sebanyak 61 kali.

Pengembangan nilai-nilai budaya dan kesenian diarahkan kepada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang diselenggarakan

melalui festival dan berbagai kegiatan/acara-acara yang mengandung kebudayaan dan kearifan lokal, pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala. Terdapat satu situs peninggalan sejarah di Kabupaten Sukabumi yang dilestarikan, yaitu Museum Palagan Bojongkokosan. Diadakannya festival seni dan budaya, serta pemeliharaan sejarah diharapkan dapat meningkatkan pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal. Jumlah festival seni dan budaya, serta pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

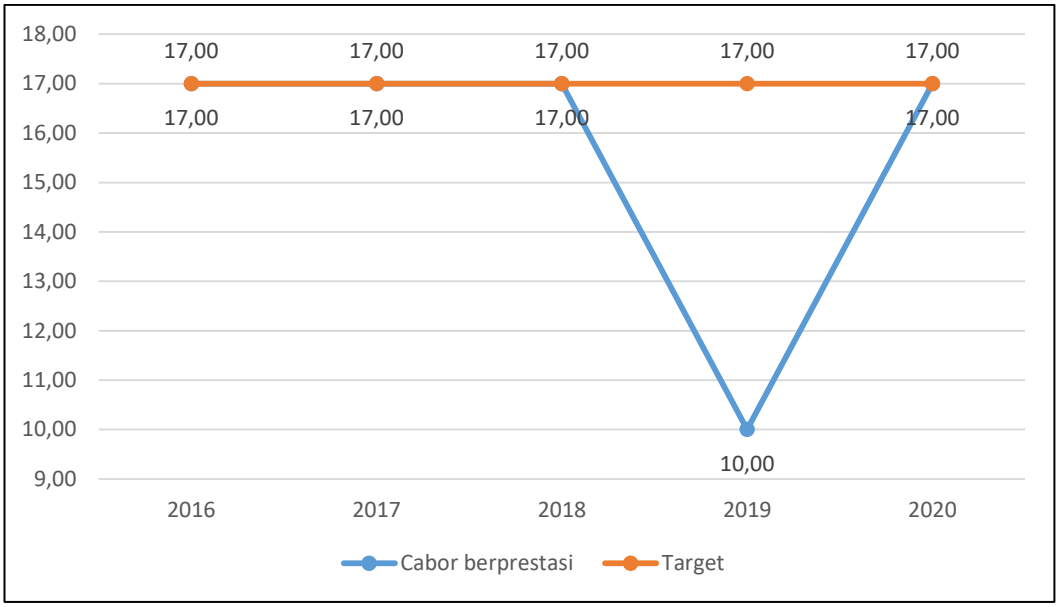
Tabel 2.10 Jumlah festival seni budaya dan pemeliharaan sejarah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Festival seni dan budaya (Kejadian)	5	12	12	12	20
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air (Buah)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, 2021

B. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet yang berprestasi merupakan jumlah atlet yang menjuarai *event* olahraga tingkat nasional maupun internasional dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 17 orang. Namun demikian jumlah tersebut menurun pada tahun 2019 menjadi 10 orang, dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 17 orang. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021. Jumlah atlet dari cabang olahraga yang berprestasi di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.51.



Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.51 Atlet Berprestasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

A. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1) Pendidikan

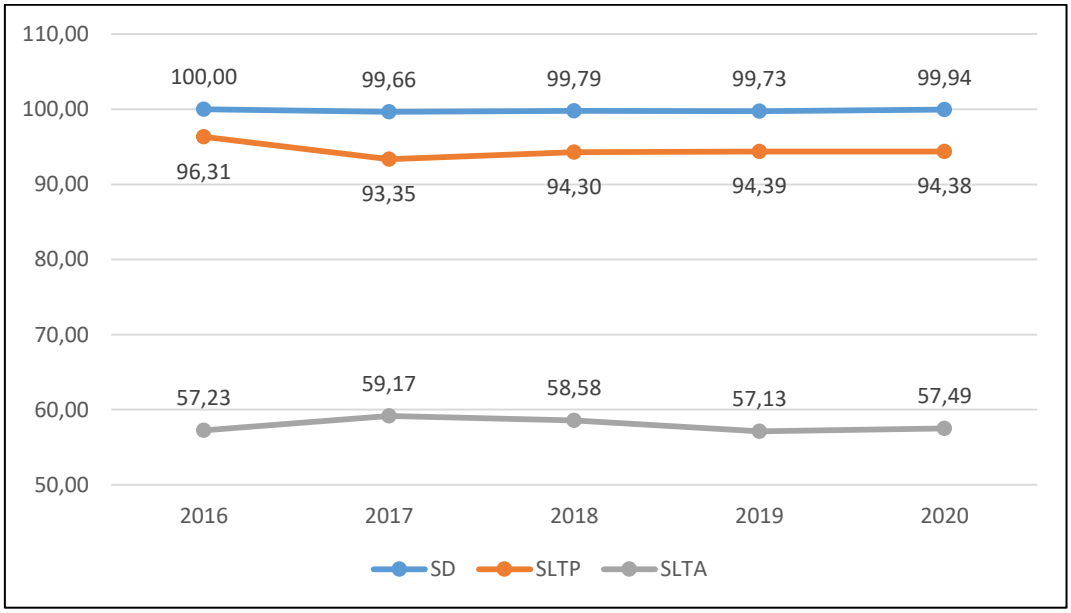
Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut merupakan aset yang berharga bagi pembangunan untuk kedepannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu Angkat Partisipasi Sekolah, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, dan Angka Melanjutkan, Rasio Guru-Murid, Persentase Kondisi Ruang Kelas, serta Aksesibilitas Sarana Pendidikan.

a) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas

jangkauan pelayanan pendidikan. APS yang terus mengalami peningkatan mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah yang seharusnya bersekolah semakin meningkat.

Keberhasilan peningkatan APS tidak terlepas dari dukungan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan pemerintah secara langsung dapat dilihat dari pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS Daerah), pemberian beasiswa kepada pelajar, peningkatan insentif tenaga pengajar dan pemberian beasiswa transisi untuk melanjutkan dari jenjang SD/Mi ke SMP/Mts dan dari SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/MA. Dukungan secara tidak langsung dapat dilihat pada peningkatan sarana prasarana pendukung pendidikan seperti perbaikan jalan menuju akses pendidikan, peningkatan jangkauan listrik ke desa-desa terpencil, dan sebagainya. APS Kabupaten Sukabumi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.52.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021

Gambar 2.52 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)

Berdasarkan data pada tahun 2016 hingga tahun 2020, penduduk usia sekolah 7-12 tahun (SD) di Kabupaten Sukabumi memiliki nilai APS tertinggi dibandingkan dengan nilai APS pada usia sekolah 13-15 tahun (SLTP) dan 16-18 tahun (SLTA). Nilai APS usia 7-12 tahun tersebut cenderung fluktuatif. Nilai APS usia 7-12 pada tahun 2016 sebesar 100 persen dan menurun

menjadi 99,94 persen pada tahun 2020. Demikian pula dengan nilai APS usia 13-15 tahun yang menurun dari 96,31 persen pada tahun 2016 dan menjadi 94,38 persen pada tahun 2020. Hal tersebut berbeda dengan nilai APS usia 16-18 tahun yang mengalami peningkatan dari 57,23 persen pada tahun 2016 menjadi 57,49 persen pada tahun 2020. Nilai APS usia 16-18 tahun merupakan nilai APS terendah dibandingkan dengan nilai APS pada jenjang usia lainnya. Berdasarkan nilai APS pada jenjang usia 7-12 tahun dan nilai APS pada jenjang usia 13-15 yang cenderung mengalami penurunan, dapat disimpulkan bahwa program wajib belajar 9 tahun belum optimal.

b) Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, dan Angka Melanjutkan

Di samping APS, indikator lain yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah dengan melihat angka putus sekolah, angka kelulusan dan angka melanjutkan. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah sebelum dinyatakan lulus disuatu jenjang pendidikan. Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa pada tingkat tertinggi di suatu jenjang pendidikan, sedangkan angka melanjutkan menunjukkan jumlah siswa baru tingkat I pada suatu jenjang pendidikan. Angka putus sekolah, angka kelulusan dan angka melanjutkan di Kabupaten Sukabumi tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Angka putus sekolah, angka kelulusan dan angka melanjutkan di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun	Putus Sekolah (%)	Angka Kelulusan (%)	Angka Melanjutkan (%)
SD	2016	0,04	100	99,57
	2017	0,04	100	97,81
	2018	0,03	100	98,70
	2019	0,03	100	99,16
	2020	0,04	100	99,43
SMP	2016	0,25	100	74,82
	2017	0,25	100	78,90
	2018	0,13	100	80,16
	2019	0,12	100	82,20
	2020	0,15	100	81,43

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.11 dapat dilihat bahwa pada setiap jenjang pendidikan terdapat angka putus sekolah. Oleh karena itu, belum seluruhnya anak usia sekolah baik laki-laki maupun perempuan dapat menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Angka putus sekolah tesebut cenderung flktuatif setiap tahunnya. Angka kelulusan pada setiap jenjang pendidikan cukup tinggi namun tidak semua siswa dapat lulus karena masih terdapat angka putus sekolah, sedangkan angka melanjutkan cukup tinggi disetiap jenjang pendidikan namun tidak sama dengan angka kelulusan sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua siswa lulus pada setiap jenjang pendidikan, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

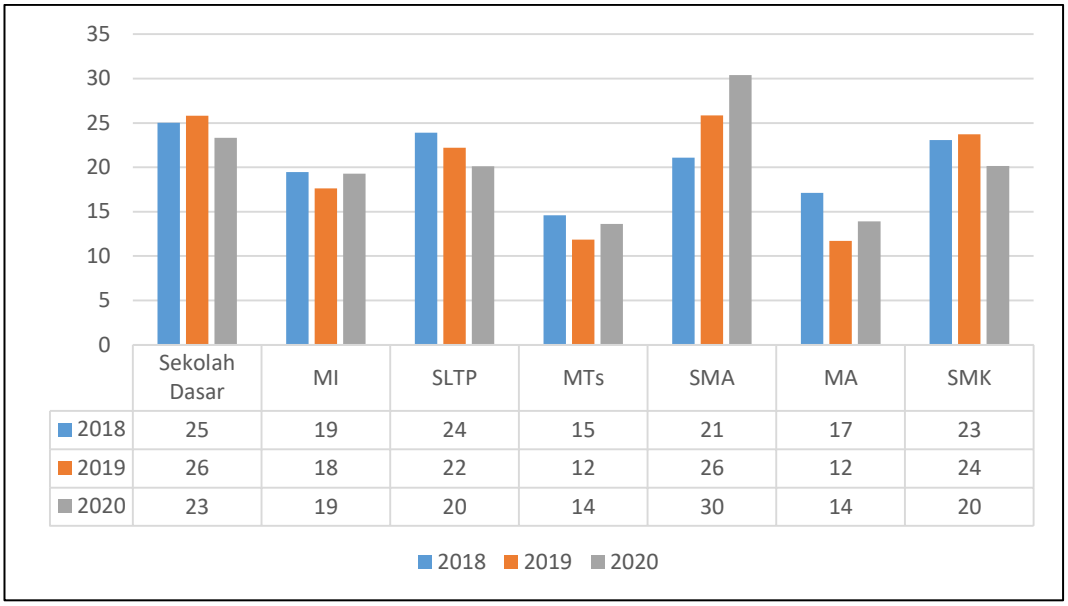
c) Rasio Guru-Murid

Rasio guru-murid menggambarkan pemenuhan kuantitas atau jumlah tenaga kependidikan bagi masyarakat di suatu wilayah. Permasalahan mendasar pada pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah terkait kualitas dan distribusi/persebaran guru yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai program-program prioritas khusus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat. Jumlah sekolah, guru, dan murid, serta rasio murid terhadap guru menurut jenis pendidikan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.12 dan Gambar 2.53.

Tabel 2.12 Jumlah sekolah, guru, dan murid di Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020 (Jiwa)

Jenjang Pendidikan	Sekolah			Guru			Murid		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Sekolah Dasar	1.210	1.211	1.216	9.304	8.955	10.060	232.858	231.061	234.797
MI	337	339	344	2.866	3.071	2.857	55.823	54.141	55.112
SLTP	326	330	350	3.736	3.916	4.334	89.367	86.908	87.227
MTs	277	298	302	3.747	3.672	3.428	54.684	43.526	46.703
SMA	75	78	83	1.345	1.352	1.587	28.364	34.945	48.254
MA	108	124	124	1.076	1.438	1.261	18.419	16.813	17.558
SMK	153	160	162	1.826	1.893	2.394	42.147	44.877	48.254

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021



	Sekolah Dasar	MI	SLTP	MTs	SMA	MA	SMK
2018	25	19	24	15	21	17	23
2019	26	18	22	12	26	12	24
2020	23	19	20	14	30	14	20

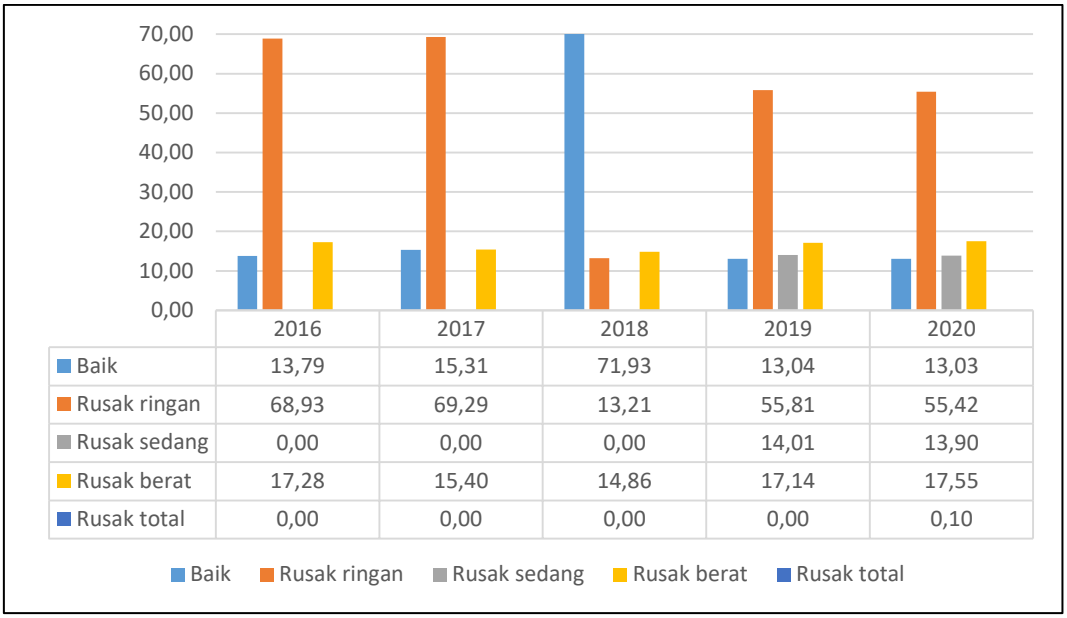
Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2020

Gambar 2.53 Rasio Guru Terhadap Murid Menurut Jenis Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020

Berdasarkan gambar di atas, jenjang pendidikan sekolah dasar menempati urutan tertinggi dalam hal jumlah sekolah, guru, dan murid pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.216 unit, 10.060 guru, dan 234.797 murid. Di samping itu, berdasarkan rasio guru terhadap murid, rata-rata guru di Kabupaten Sukabumi mengajar 26 murid untuk jenjang SD, 18 murid untuk jenjang MI, 22 murid untuk jenjang SMP, 12 murid untuk jenjang MTs, 26 murid untuk jenjang SMA, 12 murid untuk jenjang MA, dan 24 murid untuk jenjang SMK.

d) Persentase Kondisi Ruang Kelas

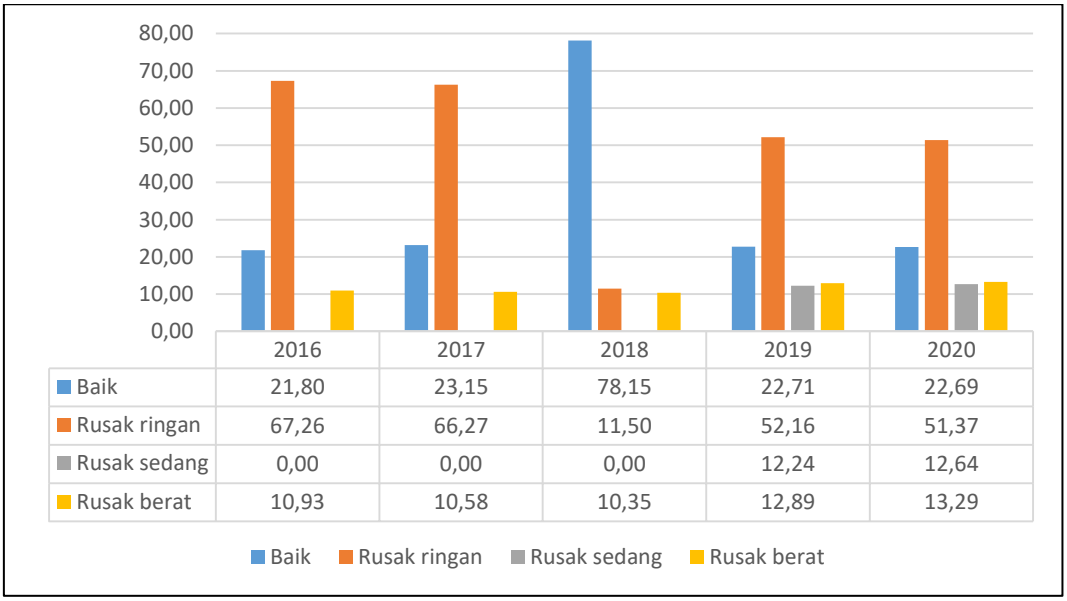
Ketersediaan ruang kelas merupakan salah satu pendukung dalam proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam mendukung proses belajar yang optimal, diperlukan ruang kelas dengan kondisi baik agar nyaman saat digunakan dalam proses pembelajaran. Persentase kondisi ruang kelas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.54 dan Gambar 2.55.



	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	13,79	15,31	71,93	13,04	13,03
Rusak ringan	68,93	69,29	13,21	55,81	55,42
Rusak sedang	0,00	0,00	0,00	14,01	13,90
Rusak berat	17,28	15,40	14,86	17,14	17,55
Rusak total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 2.54 Persentase Kondisi Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	21,80	23,15	78,15	22,71	22,69
Rusak ringan	67,26	66,27	11,50	52,16	51,37
Rusak sedang	0,00	0,00	0,00	12,24	12,64
Rusak berat	10,93	10,58	10,35	12,89	13,29

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2020

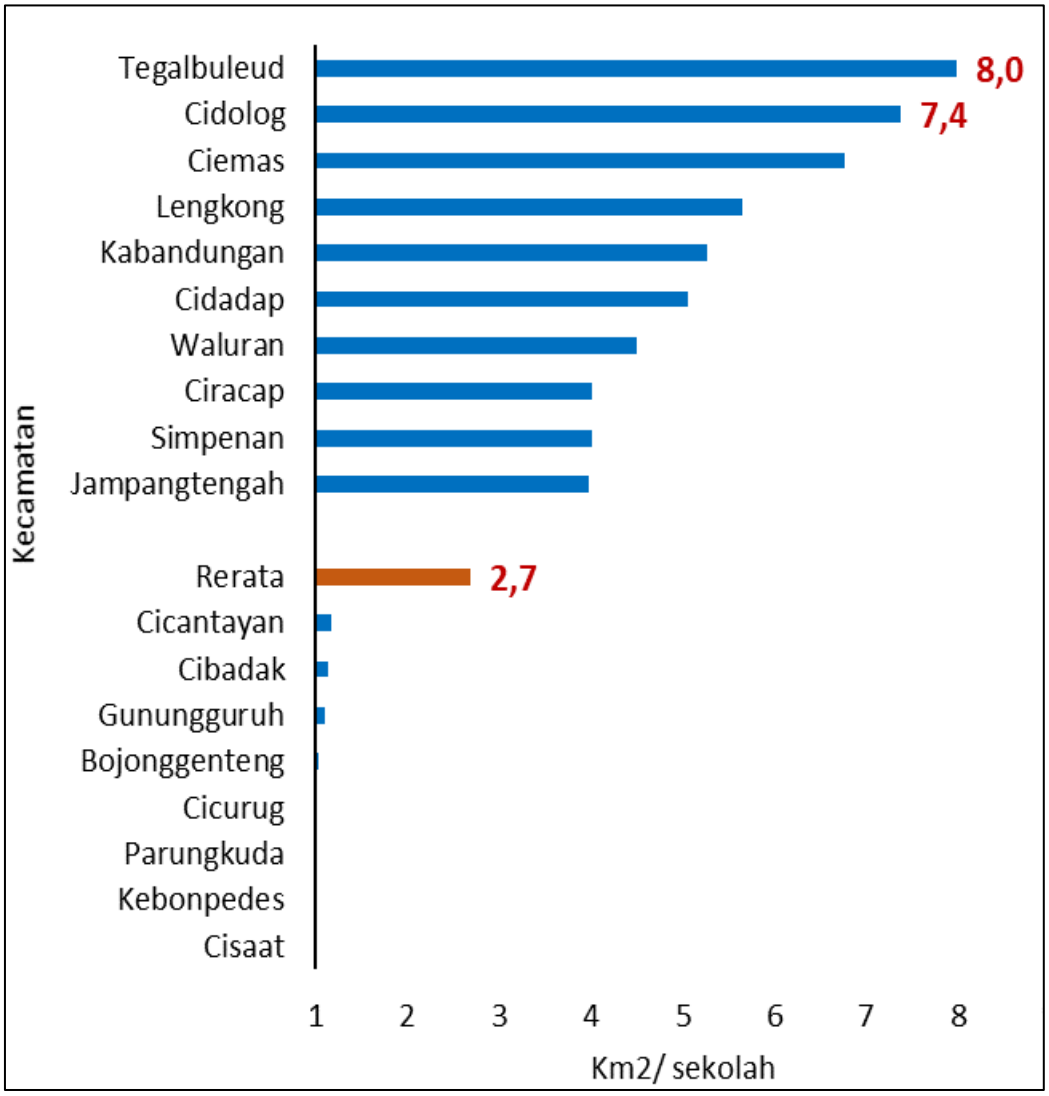
Gambar 2.55 Persentase Kondisi Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020 kodisi ruang kelas SD dengan kategori baik mencapai 13,03 persen, sementara kondisi ruang kelas SMP dengan kategori baik mencapai 22,69 persen. Pada tahun 2020 baik SD maupun SMP, banyak mengalami kerusakan. Hal tersebut disebabkan oleh diberlakukannya

kebijakan belajar dari rumah sebagai dampak dari pandemi Covid-19, sehingga ruang kelas dan kondisi sekolah tidak terawat.

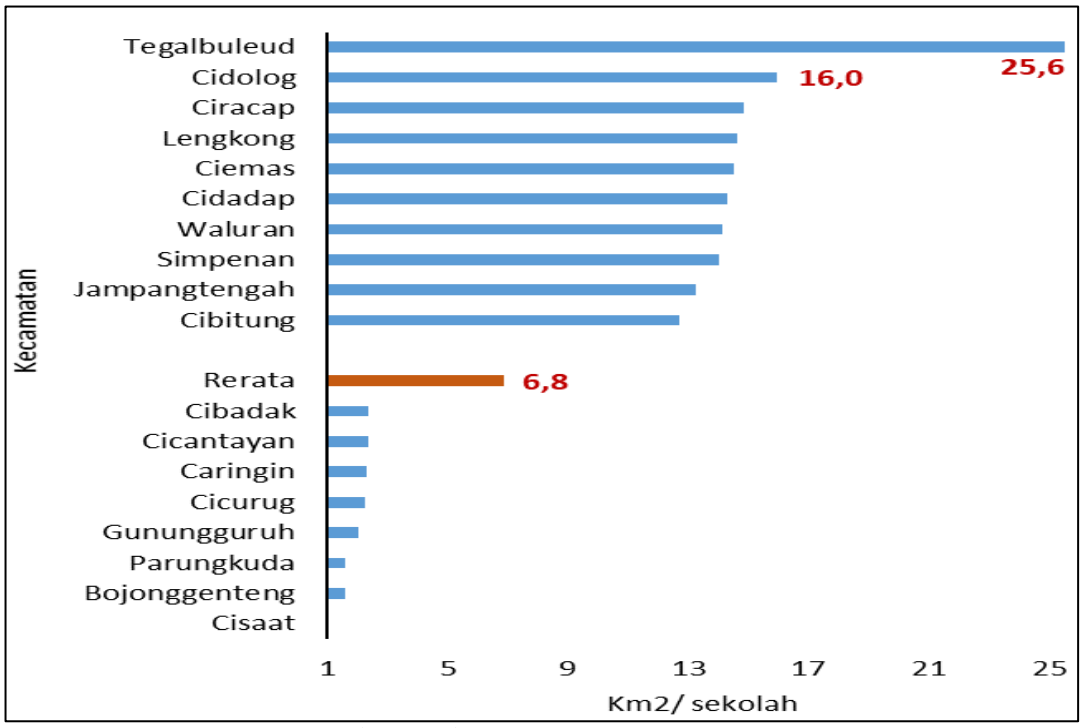
e) Aksesibilitas Sarana Pendidikan

Aksesibilitas atau luas wilayah pelayanan sekolah merupakan indikator mempengaruhi nilai APM. Semakin luas wilayah layanan, menunjukkan semakin besar upaya untuk mencapai sekolah, sehingga menjadi hambatan anak untuk bersekolah. Data aksesibilitas SD, SMP dan SMA per kecamatan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.56, Gambar 2.57, dan Gambar 2.58.



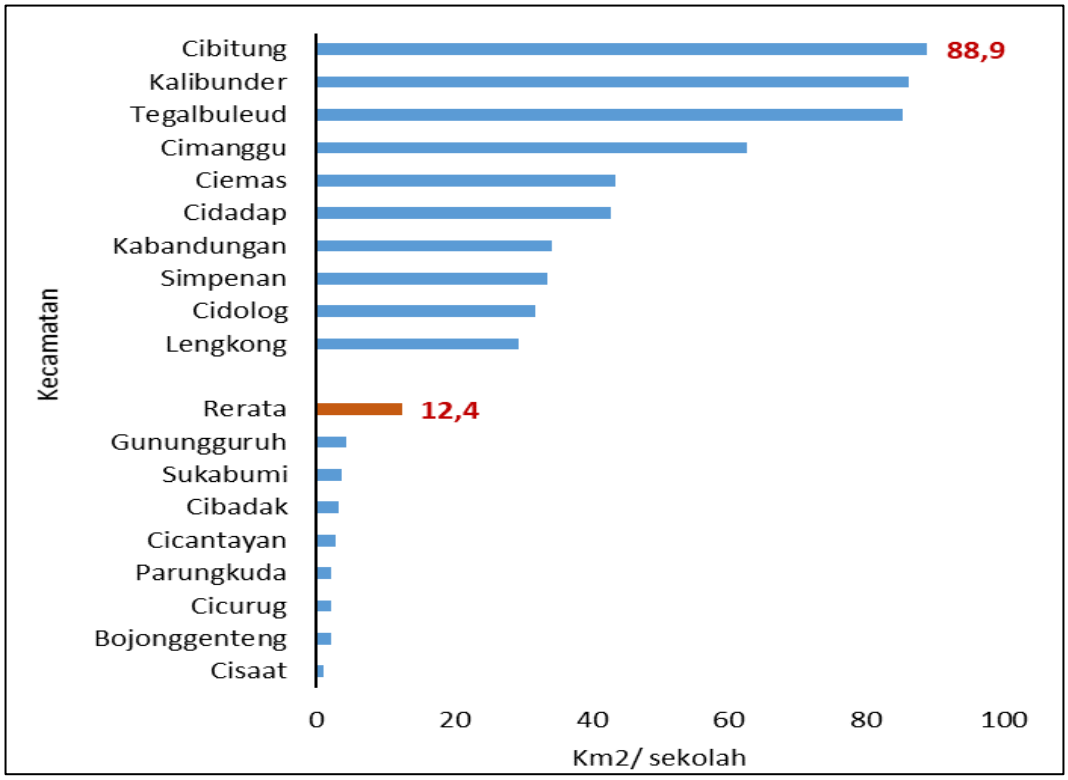
Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2019 (Diolah)

Gambar 2.56 Aksesibilitas SD per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi



Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2019 (Diolah)

Gambar 2.57 Aksesibilitas SMP per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi



Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2019

Gambar 2.58 Aksesibilitas SMA per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan data pada grafik di atas, rata-rata wilayah layanan SD sekitar 2,7 km^2 atau bila ditempuh dengan berjalan kaki dapat dicapai dalam waktu sekitar 30 menit. Di samping itu, rata-rata wilayah layanan SMP dan SMA dibandingkan dengan rata-rata wilayah layanan SD. Rata-rata wilayah layanan SMP sebesar 6,8 km^2 dan rata-rata wilayah layanan SMA sebesar 12,4 km^2. Semakin tinggi luas wilayah layanan, maka aksesibilitas semakin menurun. Beberapa kecamatan seperti Tegalbuleud, Ciemas, Cidadap, Cidolog, dan Lengkong, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses sarana pendidikan.

2) Kesehatan

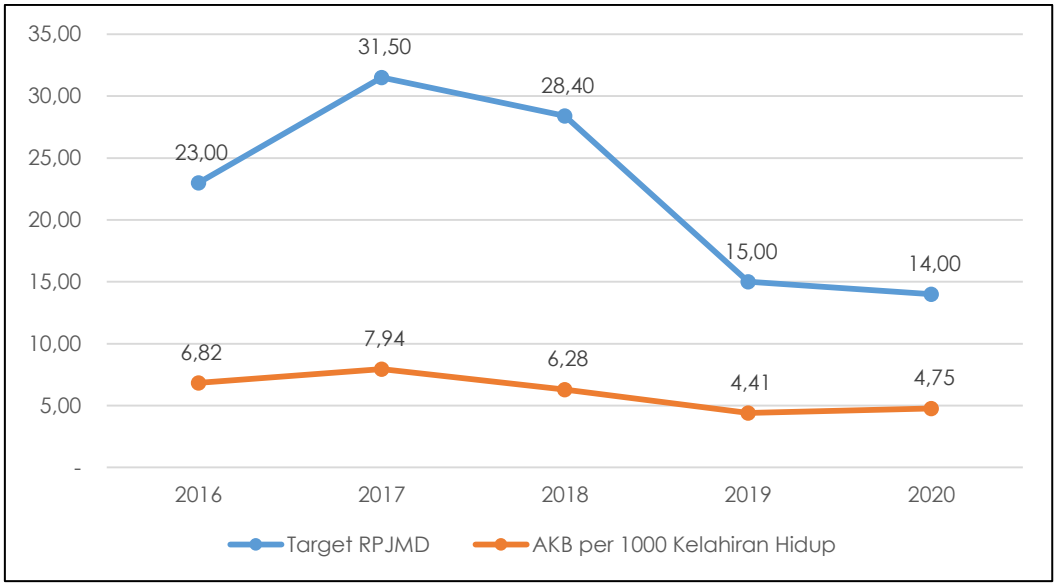
Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan menjadi prasyarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan ke depannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah perkembangan kesehatan masyarakat baik dari segi sarana prasarana, pemerataan layanan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk.

Peningkatan berbagai pelayanan kesehatan terus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas, terlebih adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 mengharuskan pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memperbaiki sistem kesehatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Gambaran kondisi daerah terkait dengan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti angka kematian bayi, angka

kematian ibu, aksesibilitas sarana kesehatan, rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter umum per satuan penduduk, rasio tenaga medis (perawat dan bidan) per satuan penduduk, cakupan pelayanan puskesmas, serta cakupan pelayanan puskesmas pembantu.

a) Angka Kematian Bayi

Menurut Kementerian Kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun (0-12 bulan) di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah per 1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun. AKB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.59.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2021

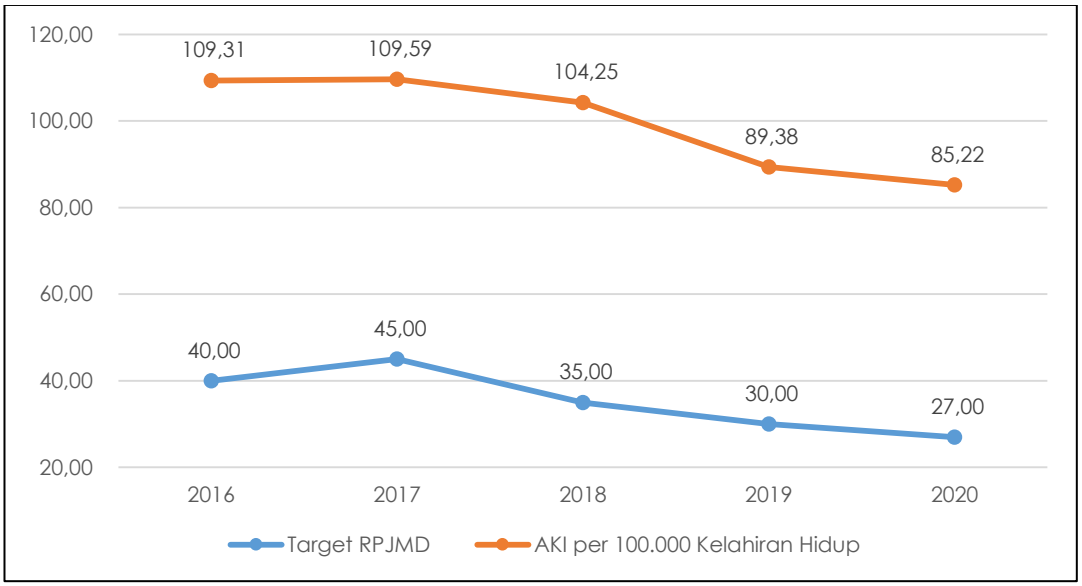
Gambar 2.59 Angka Kematian Bayi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar diatas, nilai AKB di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 sebesar 6,82 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan menjadi 4,75 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. AKB dengan kategori rendah ketika kurang dari 20 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. AKB di Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan termasuk ke dalam kategori rendah dari tahun 2016 hingga

tahun 2020. Target kinerja AKB termasuk indikator kinerja negatif, artinya semakin rendah AKB, maka kondisi tersebut semakin baik.

b) Angka Kematian Ibu

Menurut WHO, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian selama kehamilan atau selama periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Menurut Kementrian Kesehatan, AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, bersalin dan nifas setiap 100.000 kelahiran hidup di suatu wilayah. AKI di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.60.



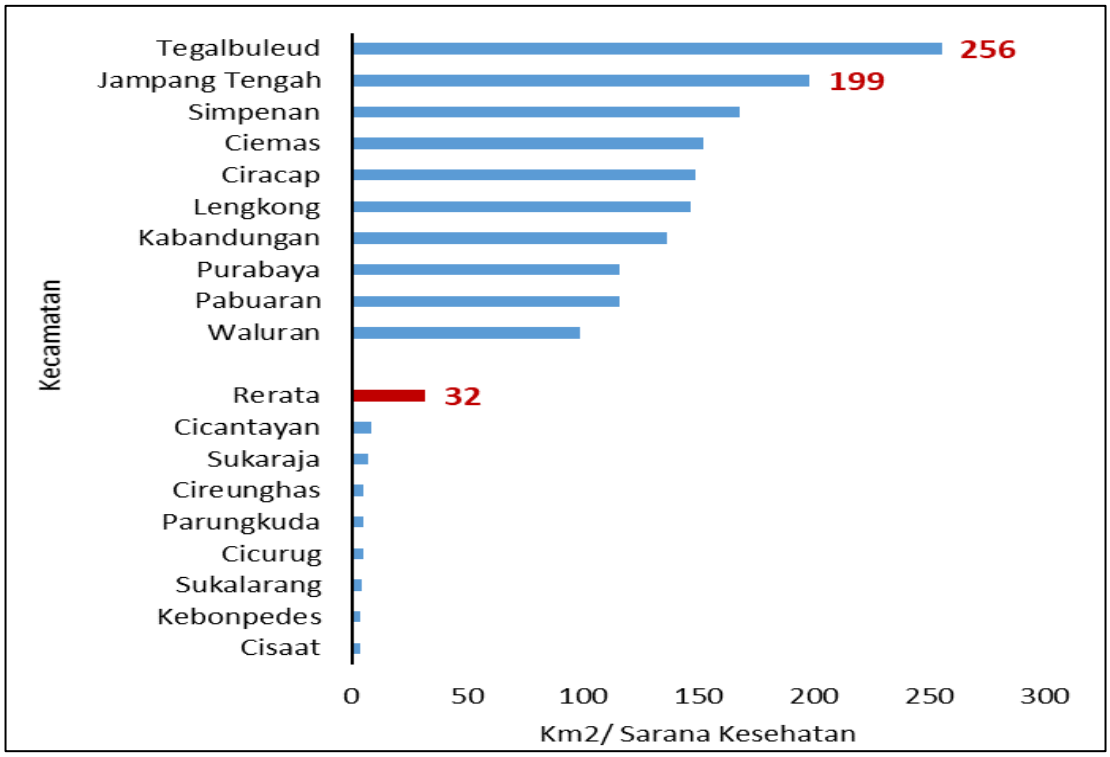
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.60 Angka Kematian Ibu Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar di atas, AKI di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung menurun. Pada tahun 2016 capaian AKI sebesar 109,31 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, dan mengalami penurunan menjadi 85,22 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Sama halnya dengan AKB, target kinerja dan realisasi AKI termasuk indikator kinerja negatif, artinya semakin rendah AKI, maka kondisi tersebut semakin baik.

c) Aksesibilitas Sarana Kesehatan

Aspek aksesibilitas atau luas wilayah pelayanan sarana kesehatan dapat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Akesibilitas sarana kesehatan per kecamatan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.61.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2019

Gambar 2.61 Aksesibilitas Sarana Kesehatan per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan grafik di atas, rata-rata wilayah layanan sarana kesehatan sekitar 32 km^2. Semakin luas wilayah layanan dan semakin rendahnya aksesibilitas sarana kesehatan, menunjukkan bahwa semakin besar upaya masyarakat untuk dapat mencapai sarana kesehatan. Beberapa kecamatan sepertu Kecamatan Tegalbuleud, Jampang Tengah, Simpenan, Ciemas, Ciracap, dan Lengkong memiliki kesulitan untuk mengakses sarana kesehatan yang ada.

d) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan anak, keluarga berencana,

pemberantasan penyakit menular dengan imunisasi, penanggulangan diare dan gizi balita. Posyandu biasanya dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan atau tempat lainnya di sekitar permukiman masyarakat yang bertujuan agar mampu menjangkau semua masyarakat. Rasio posyandu per satuan balita dihitung dengan membandingkan jumlah posyandu per 1.000 balita. Data rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Rasio posyandu Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2020

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2020
Jumlah Posyandu	3.418	3.244	3.447	3.510	2.180
Jumlah Balita (Proyeksi penduduk umur 0-4 tahun)	117.595	115.971	114.302	112.566	N/A
Rasio Posyandu per satuan balita	29,07	28,97	30,16	31,18	N/A

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021 (diolah)

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2018, rasio posyandu per satuan balita adalah 31,18. Angka tersebut artinya terdapat 31,18 unit posyandu untuk melayani 1.000 balita di Kabupaten Sukabumi.

e) Stunting

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan adatang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kongnitif yang optimal. Persentase balita penderita stunting di Kabupaten Sukabumi mengalami tren yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Penderita stunting tertinggi terjadi pada tahun 2016 hingga mencapai 13,42 persen, dengan jumlah penderita sebanyak 28.376 jiwa. Pada tahun 2020 persentase stunting mencapai 6,91 persen, dengan jumlah penderita sebanyak 14.154 jiwa dari 204.946 jumlah balita yang

diukur. Secara lebih rinci jumlah dan persentase penderita balita stunting di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Persentase stunting di Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Balita diukur (Jiwa)	210.571	211.518	214.380	201.050	191.158	204.946
Jumlah penderita stunting (Jiwa)	20.488	28.376	21.369	10.691	15.936	14.154
Persentase stunting	9,73	13,42	9,97	5,32	8,34	6,91

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2021

f) Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar, sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal. Rasio Puskesmas per satuan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah puskemas per 1.000 penduduk. Data rasio puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15 Rasio puskesmas Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	58	58	58
Jumlah Puskesmas Pembantu	133	169	187
Jumlah Penduduk	2.598.239	2.632.246	2.665.424
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,02	0,02	0,02
Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0,05	0,06	0,07

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021 (diolah)

Pada tahun 2020, rasio puskesmas per satuan penduduk adalah 0,02. Angka tersebut artinya terdapat 0,02 puskesmas untuk melayani 1.000 penduduk. Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk pada tahun 2020 adalah 0,07. Angka tersebut artinya terdapat 0,07 puskesmas pembantu untuk melayani 1.000 penduduk.

g) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan yang lengkap. Rumah sakit yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah sakit umum dan tidak termasuk rumah sakit bersalin. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa rumah sakit melalui tenaga medis serta peralatan kesehatan yang tersedia dapat memberikan pelayanan kesehatan serta pengobatan yang berkualitas bagi masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk.

Pada tahun 2020, rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah 0,002. Angka tersebut artinya terdapat 0,02 rumah sakit untuk melayani 1.000 penduduk. Target kinerja rasio rumah sakit per satuan penduduk termasuk indikator kinerja negatif, sehingga rasio rumah sakit per satuan penduduk harus semakin rendah setiap tahunnya, agar pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada penduduk semakin optimal. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16 Rasio Rumah Sakit Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit	7	7	7
Jumlah Penduduk	2.598.239	2.632.246	2.665.424
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,002	0,002	0,002

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2019 (diolah)

h) Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan sangat diperlukan agar dapat melayani masyarakat dengan baik, sehingga berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan di Kabupaten Sukabumi terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan serta tenaga kesehatan lainnya. Rasio dokter umum per satuan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah dokter umum per 1.000 penduduk. Rasio dokter umum per satuan penduduk menunjukkan jumlah penduduk yang dilayani oleh seorang dokter umum. Rasio dokter umum

per satuan penduduk termasuk indikator kinerja negatif, artinya semakin rendah rasio dokter umum per satuan penduduk maka ketersediaan dokter umum semakin meningkat dan dapat melayani masyarakat secara optimal. Data rasio dokter umum per satuan penduduk di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Rasio dokter umum per satuan penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Dokter Umum	84	81	126
Jumlah Penduduk	2.598.239	2.632.246	2.665.424
Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	0,032	0,030	0,047

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021

Jumlah dokter umum di Kabupaten Sukabumi meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2020 yaitu dari 88 orang menjadi 126 orang. Pada tahun 2020, rasio dokter umum per satuan penduduk adalah 0,047. Angka tersebut artinya terdapat 0,047 dokter umum untuk melayani 1.000 penduduk.

i) Rasio Tenaga Medis (Perawat dan Bidan) per Satuan Penduduk

Disamping dokter umum, keberadaan tenaga medis seperti perawat dan bidang sangat diperlukan untuk melayani masyarakat dengan baik. Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rasio tenaga medis (perawat dan bidan) per satuan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah perawat dan bidang per 1.000 penduduk. Jumlah perawat dan bidan terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 1.631 orang menjadi 1.785 orang pada tahun 2020. Pada tahun 2020, rasio perawat dan bidan per satuan penduduk adalah 0,669. Angka tersebut artinya terdapat 0,669 perawat dan bidan untuk melayani 1.000 penduduk. Data rasio perawat dan bidan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Rasio perawat dan bidan per satuan penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Perawat dan Bidan	1.631	1.733	1.785
Jumlah Penduduk	2.598.239	2.632.246	2.665.424
Rasio Perawat dan Bidan per satuan penduduk	0,627	0,658	0,669

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021 (diolah)

j) Cakupan Pelayanan Puskesmas

Cakupan pelayanan puskesmas menunjukkan cakupan wilayah yang terlayani oleh puskesmas. Berdasarkan SNI, satu kecamatan minimal memiliki 1 puskesmas untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. data cakupan pelayanan puskesmas di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Cakupan pelayanan puskesmas Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	58	58	58	58	58
Jumlah Kecamatan	47	47	47	47	47
Cakupan Pelayanan Puskesmas	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 2.19 cakupan pelayanan puskesmas bernilai 1,23 dan memiliki nilai yang tetap setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi telah memiliki setidaknya 1 puskesmas dan ada kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas sehingga nilai cakupan pelayanan puskesmasnya lebih dari 1.

k) Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu yang termasuk dalam perhitungan cakupan pelayanan puskesmas pembantu terdiri dari puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Berdasarkan SNI, satu desa/kelurahan minimal memiliki

1 puskesmas pembantu. Data cakupan pelayanan puskesmas pembantu di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20 Cakupan pelayanan puskesmas pembantu Kabupaten Sukabumi tahun 2014-2020

Indikator	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas Pembantu	186	154	156	148	133	169	187
Jumlah seluruh desa dan kelurahan	386	386	386	386	386	386	386
Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu	0,48	0,40	0,40	0,38	0,34	0.34	0,48

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021 (diolah)

Berdasarkan data diatas, cakupan pelayanan puskesmas pembantu pada tahun 2020 di Kabupaten Sukabumi bernilai 0,48. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum semua atau hanya setengah dari jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Sukabumi yang memiliki puskesmas pembantu untuk melayani kebutuhan masyarakat. Satu unit puskesmas pembantu yang ada melayani lebih dari 1 desa/kelurahan di Kabupaten Sukabumi.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator seperti persentase kondisi jalan kabupaten, rasio panjang jalan per satuan penduduk, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, kondisi trotoar, serta luasan ruang terbuka hijau.

a) Persentase Kondisi Jalan Kabupaten

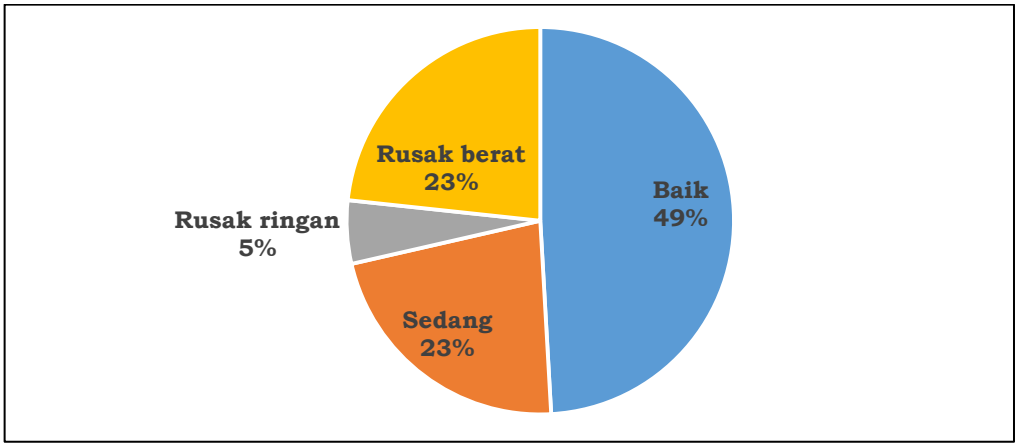
Pengembangan wilayah dari segi ekonomi maupun pengembangan infrastruktur perlu didukung dengan kondisi jalan yang baik. Data kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2017 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Sukabumi tahun 2017-2020

Kondisi	2017		2018		2019		2020	
	Panjang Jalan (km)	(%)	Panjang Jalan (km)	(%)	Panjang Jalan (km)	(%)	Panjang Jalan (km)	(%)
Baik	301,54	25,40	270,917	21,80	388,467	31	621,984	49,1
Sedang	390,94	33,00	445,533	35,80	413,048	33	282,736	22,3
Rusak ringan	214,26	18,10	130,740	10,50	144,008	11	66,850	5,3
Rusak berat	278,11	23,50	396,395	31,90	321,191	25	295,144	23,3
Total	1.184,85	100,00	1.243,585	100,00	1.266,714	100	1266,714	100,0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 49,1 persen. Persentase tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, kondisi jalan kabupaten sudah didominasi oleh jalan dengan kondisi baik. Akan tetapi, masih terdapat jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat yaitu sebesar 23,3 persen. Aksesibilitas wilayah terkait perhubungan darat masih menjadi tugas yang cukup penting untuk diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Jalan sebagai penghubung utama antar wilayah, khususnya daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kota masih belum optimal, karena persentase kondisi jalan rusak berat masih cukup tinggi. Secara lebih rinci data persentase kondisi jalan Kabupaten di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.62.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, 2021 (diolah)

Gambar 2.62 Persentase Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020

b) Rasio Panjang Jalan per Satuan Penduduk

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 dengan per 1.000 penduduk. Data jumlah panjang jalan yang digunakan adalah data jumlah panjang jalan kabupaten. Data rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
Jumlah panjang jalan kabupaten (km)	1.243,585	1.266,714	1.266,714
jumlah penduduk (jiwa)	2.598.239	2.632.246	2.665.424
Rasio panjang jalan per 1.000 jumlah penduduk (km/jiwa)	0,479	0,481	0,475

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, 2021 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 2.22 rasio panjang jalan per 1.000 penduduk di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 sebesar 0,475 km/1.000 penduduk. Rasio tersebut belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan yaitu 0,6 km/1.000 penduduk (Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001).

c) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Kabupaten Sukabumi memiliki saluran irigasi dengan panjang 562.648 m untuk mendukung pengairan lahan pertanian. Pada tahun 2019 persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 58,75 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 59,28 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa irigasi kabupaten dalam kondisi baik hanya sekitar setengahnya dari seluruh luasan irigasi yang ada di Kabupaten Sukabumi. Irigasi dengan kondisi yang kurang baik tidak dapat mendukung pengairan lahan pertanian di Kabupaten Sukabumi secara optimal. Data persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Sukabumi tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha)	16.527	16.676
Luas irigasi kabupaten (Ha)	28.131	28.131
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	58,75	59,28

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, 2021

d) Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu area terbuka yang pemanfaatan lahannya diperuntukkan untuk penghijauan tanaman secara alamiah maupun buatan. Standar luasan RTH publik disuatu wilayah sebesar 20 persen dari total luasan wilayah tersebut. Data luasan RTH realisasi dan target pada tahun 2016 hingga tahun 2020 yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Luasan RTH realisasi dan target berdasarkan RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas RTH realisasi	110,24	55,63	58,78	58,92	59,97
Rencana dalam RTRW	5.188,01	5.188,01	5.188,01	5.188,01	5.188,01
Capaian RTH (%)	2,12	1,07	1,13	1,14	1,16

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Persentase capaian RTH pada tahun 2016 sebesar 2,12 persen dari rencana RTH dalam RTRW Kabupaten Sukabumi. Namun demikian, capaian tersebut menurun menjadi 1,16 persen pada tahun 2020. Capain RTH perlu mendapat perhatian lebih, mengingat RTH sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai resapan air suatu wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang serius untuk mencapai standar luasan RTH minimal 20 persen dari total seluruh luasan wilayah.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai

bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilihat berdasarkan indikator seperti rasio rumah layak huni, persentase kawasan kumuh, cakupan lingkungan yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas, serta sumber ari minum layak dan sanitasi layak.

a) Rasio Rumah Layak Huni

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggal harus layak huni agar nyaman dan sehat serta harus didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum. Ketersediaan perumahan layak saat ini masih terkendala karena terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat, ketersediaan tanah dan pembiayaan, serta bantuan bahan bangunan yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, perlu dukungan pemberian kredit mikro dari bank/lembaga keuangan serta dukungan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Data jumlah rumah layak huni di Kabupaten Sukabumi tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.25.

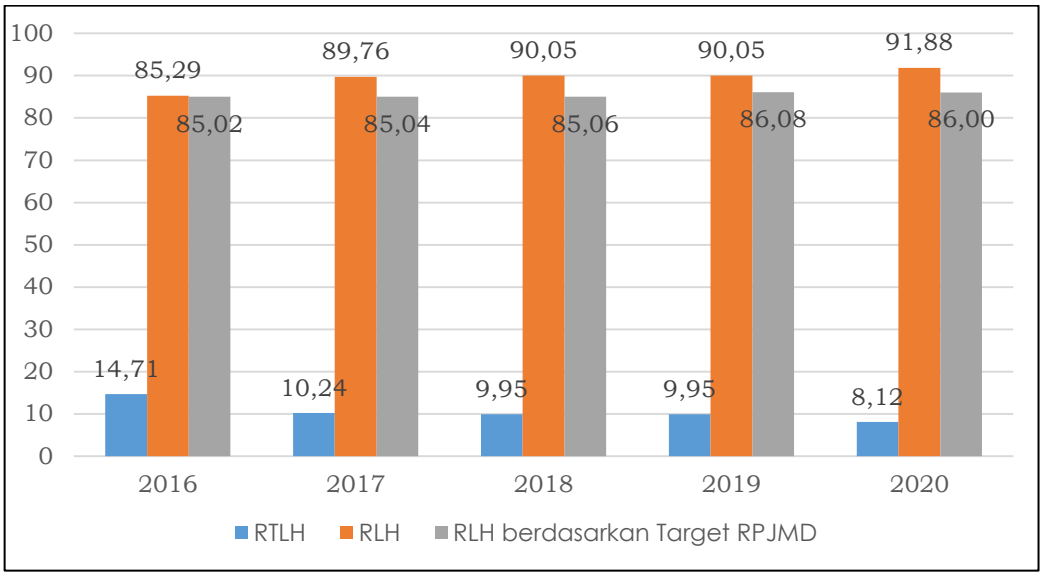
Tabel 2.25 Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah	569.103	672.403	679.125	679.125	679.125
Jumlah rumah layak huni	485.396	603.558	611.568	619.777	623.964
Jumlah rumah tidak layak huni	83.707	68.845	67.557	59.348	55.161
Rasio rumah layak huni terhadap total rumah (%)	85,29	89,76	90,05	90,05	91,88
Target RPJMD	85,02	85,04	85,06	85,08	86,00

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio rumah tidak layak huni terhadap total rumah (%)	14,71	10,24	9,95	9,95	8,12

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.25, rasio jumlah rumah layak huni di Kabupaten Sukabumi terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016, rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah total di Kabupaten Sukabumi sebesar 85,29 persen dan mengalami peningkatan menjadi 91,88 persen pada tahun 2020. Persentase rumah layak huni tersebut telah melebihi target RPJMD tahun 2016-2021. Walaupun persentase jumlah rumah layak huni semakin meningkat dan nilainya cukup tinggi, namun masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukabumi. Persentase rumah tidak layak huni tersebut pada tahun 2016 sebesar 14,71 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 8,12 persen pada tahun 2020. Perbandingan rumah layak huni, rumah tidak layak huni serta target RPJMD tahun 2016-2021 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.63.



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021 (diolah)

Gambar 2.63 Persentase Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (%)

b) Persentase Kawasan Kumuh

Persentase luas kawasan kumuh mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016, terdapat 77,65 Ha luas kawasan kumuh di Kabupaten Sukabumi. Luasan tersebut berkurang setiap tahunnya dikarenakan adanya penanganan kawasan kumuh, sehingga sisa luas kawasan kumuh yang belum ditangani hingga tahun 2020 adalah sebesar 6,08 Ha atau 7,83 persen. Data luas kawasan kumuh di Kabupaten Sukabumi tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas kawasan kumuh (Ha)	77,65	77,65	77,65	77,65	77,65
Luas kawasan kumuh yang ditangani (Ha)	0,00	3,34	64,80	71,39	71,57
Sisa luas kawasan kumuh (Ha)	77,65	74,31	12,85	6,26	6,08
Persentase kawasan kumuh yang ditangani (%)	0	4,30	83,45	91,94	92,17
Persentase sisa kawasan kumuh (%)	100	95,70	16,55	8,06	7,83

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

c) Cakupan Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)

Lingkungan yang sehat dan aman adalah lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang baik. Kelengkapan PSU di suatu lingkungan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. PSU dalam hal ini terdiri dari fasilitas jalan, sanitasi, drainase, penampungan sampah, air minum dan pasokan listrik. Data lingkungan yang didukung PSU dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27 Lingkungan yang didukung PSU di Kabupaten Sukabumi Tahun 2017-2020

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah desa	386	386	386	386
Jumlah desa PSU	254	254	254	259

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Cakupan lingkungan yang didukung PSU (%)	65,80	65,80	65,80	67,10

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa cakupan lingkungan yang didukung PSU tetap dari tahun 2017 hingga tahun 2019, namun mengalami peningkatan pada tahun 2020. Cakupan lingkungan yang didukung PSU pada tahun 2019 sebesar 65,80 persen, meningkat menjadi 67,10 persen pada tahun 2020.

d) Sumber Air Minum Layak dan Sanitasi Layak

Sumber air minum layak dan sanitasi layak merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kualitas kesehatan penduduk. Persentase sumber air minum layak dan sanitasi layak di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Persentase sumber air minum layak dan sanitasi layak di Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Cakupan air minum layak	67,28	81,33	85,08
Cakupan sanitasi layak	46,18	61,75	79,05

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi , 2021

Persentase sumber air minum layak dan sanitasi layak di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Persentase sumber air minum layak di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 sebesar 85,08 persen. Angka tersebut meningkat dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 67,28 persen. Sementara itu, cakupan sanitasi layak pada tahun 2020 sebesar 79,05 persen. Angka tersebut meningkat dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 46,18 persen.

5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Gambaran umum kondisi daerah mengenai ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat berdasarkan beberapa

indikator seperti rasio petugas perlindungan masyarakat, tingkat penyelesaian pelanggaran K3, cakupan pelayanan bencana kebakaran, serta persentase penegakan pertaruran daerah.

a) Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah lingkungannya. Rasio petugas linmas di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018, rasio petugas linmas sebesar 61,3 petugas per 10.000 penduduk. Rasio ini mengalami penurunan menjadi 56,4 petugas per 10.000 penduduk pada tahun 2020. Semakin besar rasio petugas linmas, maka semakin banyak jumlah penduduk yang terlayani oleh petugas linmas. Data jumlah petugas linmas dan cakupannya pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29 Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah petugas linmas	15.434	15.034	15.034
Jumlah penduduk	2.516.461	2.523.992	2.665.424
Rasio petugas linmas per 10.000 penduduk	61,3	59,6	56,4

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2020 (diolah)

b) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 menunjukkan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah pelanggaran K3. Data pelanggaran K3 di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30 Data K3 di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Jenis Kejadian / Gangguan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tindakan Kriminalitas	260	210	211	207	197
Kecelakaan	186	148	157	469	96
Bencana Alam	114	72	114	337	247
Lain-Lain	47	42	48	46	45
Jumlah	**607**	**472**	**530**	**1059**	**585**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jumlah pelanggaran K3 dari tahun 2016 hingga tahun 2020 bersifat fluktuatif. Pelanggaran K3 terbesar terjadi yaitu sebanyak 1059 kejadian, sedangkan pelanggaran K3 terkecil terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 472 kejadian. Jika dilihat dari jenisnya, kecelakaan menjadi jenis pelanggaran K3 yang sering terjadi dibandingkan jenis pelanggaran yang lain.

c) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran menunjukkan persentase luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sukabumi. Data cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2018

Indikator	Tahun		
	2016	2017	2018
Jumlah kejadian Kebakaran	81	175	144
luas WMK (Km^2)	1.413,04	1.413,04	1.413,04
Luas wilayah kabupaten (Km^2)	4.162	4.162	4.162
Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	33,95	33,95	33,95

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 2.31, jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Sukabumi tahun 2016 sampai tahun 2018 meningkat, namun persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran tetap. Jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2016 sebanyak 81 kejadian dan meningkat menjadi 144 kejadian pada tahun 2018, sedangkan cakupan pelayanan bancana kebakaran tetap yaitu sebesar 33,95 persen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa cakupan pelayanan bencana kebakaran belum menyeluruh di Kabupaten Sukabumi dan perlu diperluas mengingat jumlah kejadian kebakaran yang terus bertambah setiap tahunnya.

d) Persentase Penegakan PERDA

Penegakan PERDA merupakan salah satu aktivitas yang penting karena memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman dan tertib. Setiap PERDA perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat dan optimal dalam mengatur suatu subjek yang telah dituangkan dalam PERDA sejak waktu berlakunya PERDA tersebut. Data persentase penegakan PERDA di Kabupaten Sukabum dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32 Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2020
Jumlah pelanggaran PERDA	48	48	30	33
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	48	48	28	-
Persentase penegakan PERDA (%)	100,00	100,00	93,33	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2020

Berdasarkan data di atas, persentase penegakan PERDA di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 dan 2017 mencapai angka 100 persen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua kasus pelanggaran PERDA yang terjadi dapat terselesaikan secara keseluruhan. Namun demikian, persentase penegakan PERDA pada tahun 2018 tidak mencapai 100 persen, yaitu sebesar 93,33 persen karena masih ada pelanggaran PERDA yang belum terselesaikan, yaitu sebanyak dua kasus pelanggaran. Pada tahun 2020, jumlah pelanggaran PERDA meningkat menjadi 33 kasus.

6) Sosial

Kesejahteraan sosial adalah upaya terencana meliputi berbagai bentuk pelayanan sosial untuk mengatasi dan pencegahan masalah sosial, serta memenuhi kebutuhan manusia. Aspek sosial dalam pembangunan menjadi penting karena terkait dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan kehidupan baik secara fisik maupun psikologis. Gambaran umum kondisi daerah mengenai sosial dilihat

berdasarkan beberapa indikator seperti jumlah PPKS, jumlah panti sosial, jumlah kejadian bencana alam dan jumlah korban bencana alam, serta permasalahan sosial masyarakat.

a) Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi keutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana sosial. Jumlah PPKS di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33 Jumlah PPKS Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020 (Jiwa)

Jenis PPKS	Tahun		
	2018	2019	2020
Anak Balita Terlantar	11,569	7,520	1,545
Anak dengan Kedisabilitasan	-	900	900
Anak Jalanan	108	108	45
Anak Terlantar	47,494	47,494	14,090
Anak Berhadapan dengan Hukum	185	185	72
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	44
Anak Yang Jadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	51	51	45
Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan	114	35	30
Fakir Miskin	196.855 Ruta	1.502.130 / 441.059 Ruta	1.424.651 / 433.125 Ruta
Gelandangan	24	17	25
Kelompok Minoritas	109	320	370
Keluarga Bermasalah Sosial Phsikologis	84	50	45
Komunitas Adat Terpencil	23,342	17,507	13,344
Korban Bencana Alam	7,775	2,432	2,415
Korban Penyalahgunaan Napza	301	301	74
Korban Tindak Kekerasan	54	54	10
Korban Trafficking	87	87	6
Korban Bencana Sosial	202	-	-
Lanjut Usia Terlantar	14,999	14,999	15,035
Orang dengan HIV AIDs	713	103	118
Pekerja Migran Bermasalah	614	614	485

Jenis PPKS	Tahun		
	2018	2019	2020
Pemulung	166	166	20
Pengemis	50	28	12
Penyandang Disabilitas	10,010	9,899	9,899
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	7,731	7,731	585
Total	322,951	1,612,835	1,483,980

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 2.33 di Kabupaten Sukabumi terdapat 26 jenis PPKS. Jenis PPKS dengan jumlah terbanyak setiap tahunnya adalah fakir miskin. Berdasarkan jumlah total PPKS di Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2018 sebanyak 322.951 jiwa. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.483.980 jiwa pada tahun 2020.

b) Jumlah Panti Sosial

Penyediaan panti sosial bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Data jumlah panti sosial dan penghuninya di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34 Jumlah panti dan penghuninya di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Jenis Panti	2016		2017		2018		2020	
	Jumlah Panti	Jumlah Penghuni	Jumlah Panti	Jumlah Penghuni	Jumlah Panti	Jumlah Penghuni	Jumlah Panti	Jumlah Penghuni
Panti Sosial Asuhan Anak	21	987	12	13	13	951	13	951
Panti Sosial Tresna Wirda	-	-	-	1	1	60	1	60
Panti Sosial Bina Netra	-	-	-	1	1	18	1	18
Panti Sosial Bina Laras	-	-	-	3	3	339	3	339
Panti Sosial Karya Wanita	-	-	-	1	1	30	1	30
Panti Sosial Korban Napza	-	-	-	1	1	90	1	90

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2016 di Kabupaten Sukabumi terdapat panti asuhan anak sebanyak 21 panti. Kemudian, jumlah panti asuhan anak menurun pada tahun 2017 menjadi 12 panti dan bertambah jumlahnya menjadi 13 panti pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Jumlah panti asuhan anak yang fluktuatif menyebabkan jumlah penghuni panti pun cenderung fluktuatif menyesuaikan dengan jumlah panti. Jumlah penghuni panti asuhan anak pada tahun 2016 sebanyak 987 orang, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 821 orang. Pada tahun 2018 hingga 2020, dikarenakan jumlah panti bertambah, maka kapasitas jumlah penghuni yang dapat ditampung menjadi bertambah sehingga jumlah penghuni panti asuhan anak meningkat menjadi 951 orang. Jenis panti lainnya yang terdapat di Kabupaten Sukabumi yaitu Panti Sosial Tresna Wirda, Bina Netra, Bina Laras, Karya Wanita, dan Panti Sosial Bina Napza, dan loka rehabilitasi HIV AIDS sebanyak 70 orang pada tahun 2020.

c) Jumlah Kejadian Bencana Alam dan Jumlah Korban Bencana Alam

Jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu dari 746 kejadian menjadi 470 kejadian. Namun demikian, jumlah korban bencana alam tersebut mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 4.420 jiwa pada tahun 2017 menjadi 7.503 jiwa pada tahun 2020. Hal tersebut mengindikasikan peningkatan rata-rata korban setiap bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Korban bencana tersebut mencakup korban yang menderita, meninggal dunia, luka, dan mengungsi. Data kejadian bencana alam dan jumlah korban yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut dari tahun 2017 hingga tahun 2020 di Kabupaten Sukabumi dapat dilhat pada Tabel 2.35 dan Tabel 2.36.

Tabel 2.35 Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Sukabumi Tahun 2017-2020

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian			
	2017	2018	2019	2020
Longsor	353	353	312	248
Banjir	58	58	30	27
Angin Kencang	121	121	105	104
Gempa Bumi	3	4	3	2

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian			
	2017	2018	2019	2020
Pergerakan Tanah	29	14	24	16
Kebakaran	117	117	141	63
Tenggelam	1	0	0	0
Kekeringan	0	0	81	0
Lain-lain	64	60	2	10
Total	746	727	698	470

Sumber: BPBD Kabupaten Sukabumi, 2020; BNPB dalam Provinsi Jawa Barat dalam Angka, 2021

Tabel 2.36 Jumlah Korban Bencana Alam Kabupaten Sukabumi tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah
2017	4.420
2018	2.982
2019	4.270
2020	7.503

Sumber: BPBD Kabupaten Sukabumi, 2020; BNPB dalam Provinsi Jawa Barat dalam Angka, 2021

d) Permasalahan Sosial Masyarakat

Berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan gangguan dan kerugian nyata maupun kerugian sosial yang dapat menurunkan kualitas hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan sosial di masyarakat penting dan patut menjadi perhatian pemerintah daerah. Data permasalahan sosial di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.37 dan 2.38.

Tabel 2.37 Permasalahan sosial masyarakat Kabupaten Sukabumi tahun 2018

Jenis Permasalahan Sosial	Kab. Sukabumi	Jawa Barat	Rerata Kab/Kota di Jawa Barat
Penyandang disabilitas	10.010	5.824	216
Lokasi Anak Jalanan	10	250	9
Bunuh Diri	26	366	14
Lokasi Gelandangan	3	123	5
Lokasi PSK	2	130	5

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2019 (diolah)

Tabel 2.38 Permasalahan sosial masyarakat berdasarkan jumlah desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2018

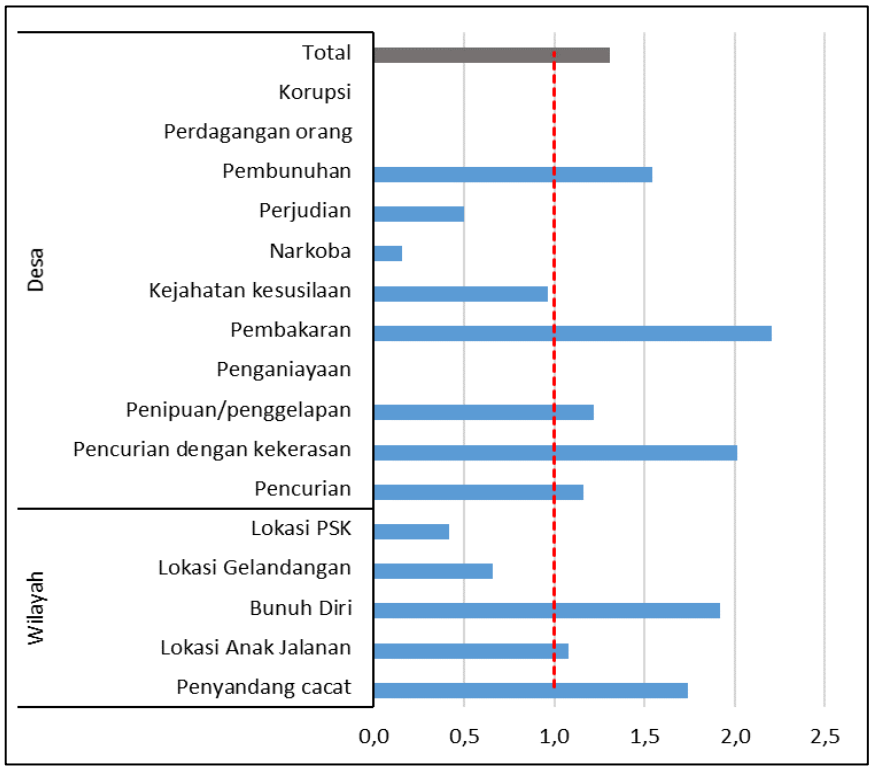
Kejahatan Paling Sering	Kab. Sukabumi		Jawa Barat	
	Jumlah Desa	Kejadian (%)	Jumlah Desa	Kejadian (%)
Pencurian	315	81,6	4194	70,4
Pencurian dengan kekerasan	3	0,8	23	0,4
Penipuan/penggelapan	6	1,6	76	1,3
Penganiayaan			37	0,6
Pembakaran	1	0,3	7	0,1
Kejahatan kesusilaan	1	0,3	16	0,3
Narkoba	1	0,3	99	1,7
Perjudian	3	0,8	93	1,6
Pembunuhan	1	0,3	10	0,2
Perdagangan orang				0,0
Korupsi			4	0,1
Total	**386**	**100,0**	**4559**	**76,5**

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2019 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel diatas, secara umum permasalahan sosial masyarakat di Kabupaten Sukabumi lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Jawa Barat. Permasalahan sosial masyarakat di Kabupaten Sukabumi diantaranya jumlah penyandang disabilitas sebanyak 10.010 orang, lokasi anak jalanan terdapat 10 titik, jumlah bunuh diri sebanyak 26 kasus, lokasi gelangan 3 titik dan lokasi PSK 2 titik. Dari lima jenis permasalahan sosial tersebut, yang termasuk intensitas tinggi atau yang melebihi rata-rata kab/kota lain di Jawa Barat, yaitu jumlah penyandang cacat, lokasi anak jalanan dan jumlah bunuh diri.

Pada kejadian di tingkat desa/kelurahan, di Kabupaten Sukabumi ada 315 desa dari 386 desa yang pernah terjadi pencurian pada tahun 2018. Kejadian berikutnya yaitu pencurian/penggelapan, pencurian dengan kekerasan, perjudian. Bila dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat, maka dapat diketahui intensitas kejadian di Kabupaten Sukabumi yang tergolong tinggi, yaitu masalah pembakaran, pencurian dengan kekerasan, bunuh diri, penyandang cacat, pembunuhan, penipuan/penggelapan, pencurian, dan lokasi anak jalanan. Upaya mengatasi permasalahan sosial masyarakat sangat penting diantaranya dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban serta mendukung

kelancaran berbagai aktivitas masyarakat. Intensitas Permasalahan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.64.



Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2019 (diolah)

Gambar 2.64 Intensitas Permasalahan Sosial (Standar < 1)

B. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan non dasar

1) Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk

usia diatas 15 tahun, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selain itu, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja atau mencari kerja. Gambaran umum kondisi daerah terkait tenaga kerja dapat dilihat dari berbagai indikator seperti besaran pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan, jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan, serta jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan.

a) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan

Pada tahun 2016 besaran pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan di Kabupatenn Sukabumi sebesar 72,28 persen. Besaran tersebut semakin mengalami penurunan hingga pada tahun 2020, besaran pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan menjadi 26,83 persen. Data pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39 Besaran pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri	14.016	18.129	12.089	10.124	4.464
Pencari kerja yang ditempatkan di luar negeri	695	1.157	1.065	1.145	244
Total pencari kerja yang ditempatkan	14.711	19.286	13.154	11.269	4.708
Total pencari kerja yang terdaftar	20.076	25.150	23.493	21.579	17.547
Besaran pencari kerja terdaftar	72,28	76,68	55,99	52,22	26,83

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
yang ditempatkan (%)					

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, 2021

b) Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan

Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan UPTD di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan didanai melalui APBD maupun APBN. Data jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan melalui BLK di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pelatihan berbasis masyarakat/ kompetensi	764	1.076	376	2.316	475
Pelatihan berbasis kewirausahaan	-	60	60	80	120

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, jenis pelatihan yang diberikan di Kabupaten Sukabumi terdiri dari pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kewirausahaan. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat cenderung lebih banyak dibandingkan dengan pelatihan berbasis kewirausahaan. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat pada tahun 2019 sebanyak 2.316 orang. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan hanya berjumlah 80 orang pada tahun 2019.

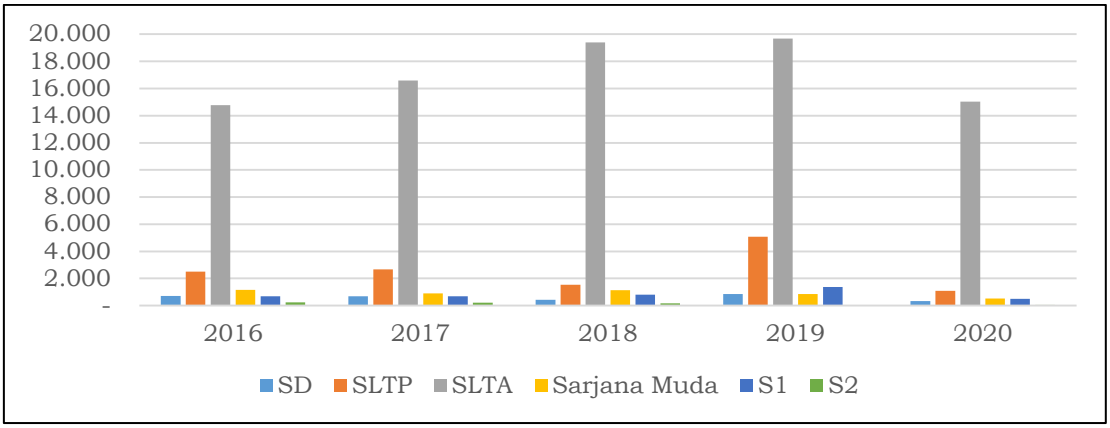
c) Jumlah Pencari Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah faktor yang memengaruhi kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA pada tahun 2015 sebanyak 12.971 orang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 15.023 orang. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMP memiliki jumlah kedua terbanyak setelah SMA. Namun, untuk tenaga kerja dengan tingkat pendidikan sarjana muda, S1 dan S2 jumlahnya relatif masih sedikit, sehingga perlu dilakukan peningkatan untuk ke depannya agar tingkat pendidikan para tenaga kerja semakin tinggi dan semakin berkualitas. Data jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.41 dan Gambar 2.65.

Tabel 2.41 Jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikian di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Pendidikan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD	1.138	718	688	424	846	344
SLTP	5.480	2.495	2.660	1.550	5.083	1.102
SLTA	12.971	14.772	16.583	19.394	19.686	15.023
Sarjana Muda	1.071	1.163	905	1.132	860	530
S1	673	699	688	811	1.384	508
S2	58	231	220	182	8	42
Total	21.391	20.078	21.744	23.493	27.867	17.549

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, 2020



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.65 Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, sedangkan perlindungan anak diarahkan untuk melindungi hak-hak anak. Gambaran umum mengenai pemberdayaan perempuan dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator seperti persentase perempuan yang menjadi PNS, persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD, persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, indeks pembangunan gender, serta indeks pemberdayaan gender.

a) Persentase Perempuan yang Menjadi PNS

Perempuan dapat bekerja di berbagai sektor pekerjaan salah satunya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sukabumi. Data persentase pekerja perempuan yang menjadi PNS di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42 Persentase pekerja perempuan yang menjadi PNS di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pekerja perempuan yang menjadi PNS	5.684	5.316	5.120	5.062	4.748
Jumlah total PNS	14.262	12.843	12.155	11.825	10.918

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pekerja perempuan yang menjadi PNS (%)	39,85	41,39	42,12	42,81	43,49

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, komposisi Pegawai Negri Sipil (PNS) perempuan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, persentase pekerja perempuan dilembaga pemerintahan sebesar 39,85 persen dan semakin meningkat menjadi 43,49 persen pada tahun 2020. Peningkatan persentase pekerja perempuan dilembaga pemerintahan yang semakin meningkat tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam kesetaraan gender di lingkungan PNS.

b) Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD mengindikasikan eksistensi perempuan dalam kancah politik daerah. Oleh karena itu, perlu upaya bersama baik dari partai politik, pemerintah maupun masyarakat untuk mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman perempuan terhadap politik, sehingga kuota perempuan di parlemen sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. Data persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43 Persentase Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD	6	7	7	8	8
Jumlah total kursi keanggotaan DPRD	50	50	49	50	50

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	12	14	14	16	16

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tahun 2016 anggota DPRD di Kabupaten Sukabumi berjumlah 50 orang dengan komposisi perempuan hanya 12 persen. Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD meningkat pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 14 persen dan meningkat kembali menjadi 16 persen pada tahun 2019. Meskipun mengalami peningkatan, namun tetap saja jumlah tersebut terbilang sangat rendah. Oleh karena itu, eksistensi perempuan di dalam kancah perpolitikan perlu didorong agar terjadi peningkatan daya saing perempuan dalam segala bidang.

c) Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Data persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44 Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah korban perempuan dan anak yang dilaporkan	101	64	118	149
Jumlah korban perempuan dan anak yang ditangani	101	64	118	149
Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100

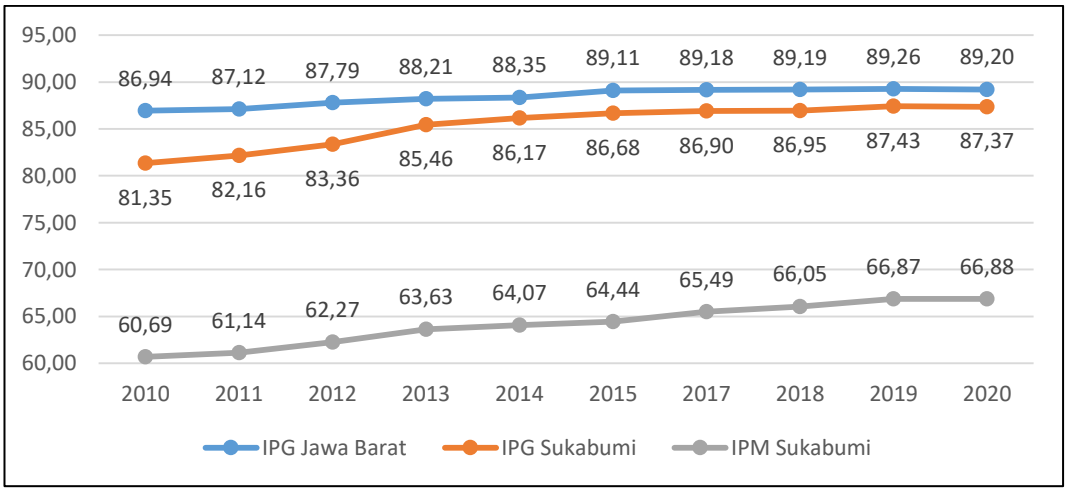
Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tahun 2016 sampai tahun 2019 jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan cenderung meningkat. Namun demikian, penanganan terhadap korban kekerasan

tersebut telah berhasil ditangani seluruhnya, sehingga selalu mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan.

d) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan komponen penyusun IPM. Namun demikian, IPG lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat pula dikatakan sebagai rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Data IPG Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat serta perbandingannya dengan IPM Kabupaten Sukabumi dari tahun 2010 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.66.



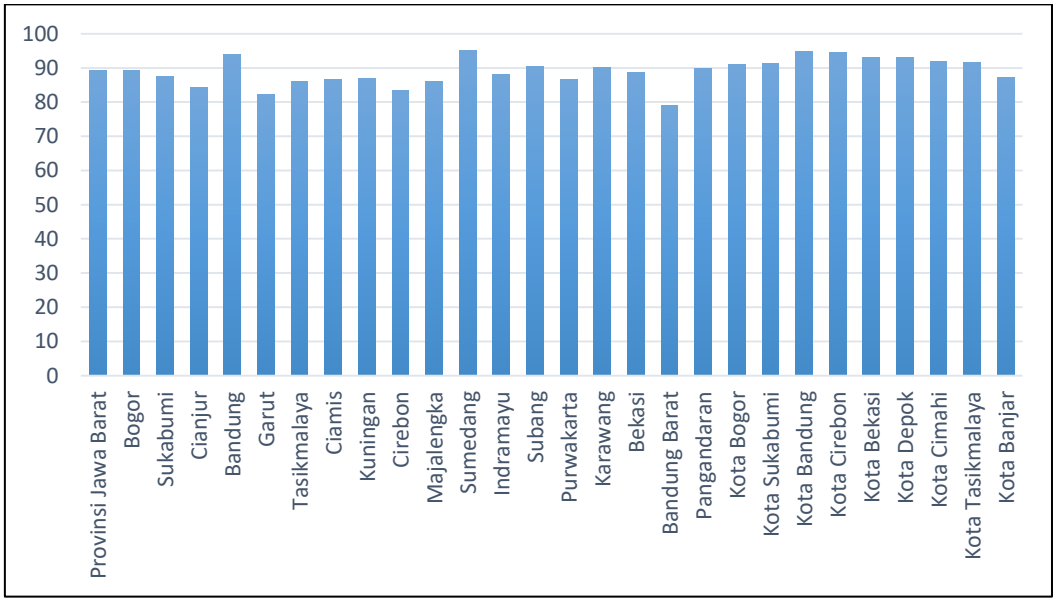
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.66 IPG, IPM Kabupaten Sukabumi, dan IPG Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020

Tingkat kesetaraan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki dapat tergambar dengan menganalisis perbandingan antara IPM dan IPG. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi *gap* antara IPM dan IPG. Jika nilai IPM sama dengan nilai IPG maka tidak terjadi ketimpangan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, semakin besar *gap* antara IPG dan IPM maka menunjukkan

semakin besar pula ketimpangan gender disuatu wilayah. Interpretasi tersebut berlaku untuk data yang dianalisis sebelum tahun 2014, sedangkan, data IPG dari tahun 2014 dianalisis menggunakan hasil indeks yang paling mendekati angka 100. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan metodologi perhitungan dalam penyusunan IPM dan IPG pada tahun 2014.

Gambar 2.60 menunjukkan IPG Kabupaten Sukabumi dari tahun 2010 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 IPG berada pada angka 81,35 poin, dan meningkat sebanyak 6,08 poin hingga tahun 2019 menjadi 87,43 poin. Namun demikian, pada tahun 2020 IPG mengalami penurunan menjadi 87,37. Kondisi IPG Kabupaten Sukabumi dari tahun 2010 hingga tahun 2020 berada di bawah rata-rata Kabupaten/kota di Jawa Barat. Adapun perbandingan IPG berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.67.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.67 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2020

Pada tahun 2020 kondisi IPG Kabupaten Sukabumi berada pada urutan ke-17 dari kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Kabupaten dengan nilai IPG tertinggi yaitu Kabupaten Sumedang dengan nilai IPG sebesar 95,18,

sedangkan Kabupaten dengan nilai IPG terendah yaitu Kabupaten Bandung Barat sebesar 79,06. Capaian pembangunan gender menjadi tolak ukur dalam memastikan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian.

Komponen Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan yang menyusun IPG. Berdasarkan data BPS, AHH Kabupaten Sukabumi baik penduduk laki-laki maupun perempuan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Komponen AHH merupakan satu-satunya indikator penyusun IDG dengan nilai indeks penduduk perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Dimana pada tahun 2020 nilai indeks AHH laki-laki sebesar 69,03 tahun, sedangkan AHH perempuan sebesar 72,87 tahun. Secara umum, level AHH penduduk laki-laki cenderung lebih rendah sekitar tiga tahun dibandingkan dengan level AHH penduduk perempuan. Selama periode tahun 2010-2020 pergerakan AHH perempuan dan laki-laki cenderung stagnan, sehingga *gap* capaian tidak berubah signifikan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penduduk perempuan cenderung memiliki umur lebih panjang dari laki-laki. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor biologis dan tingkah laku atau kebiasaan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

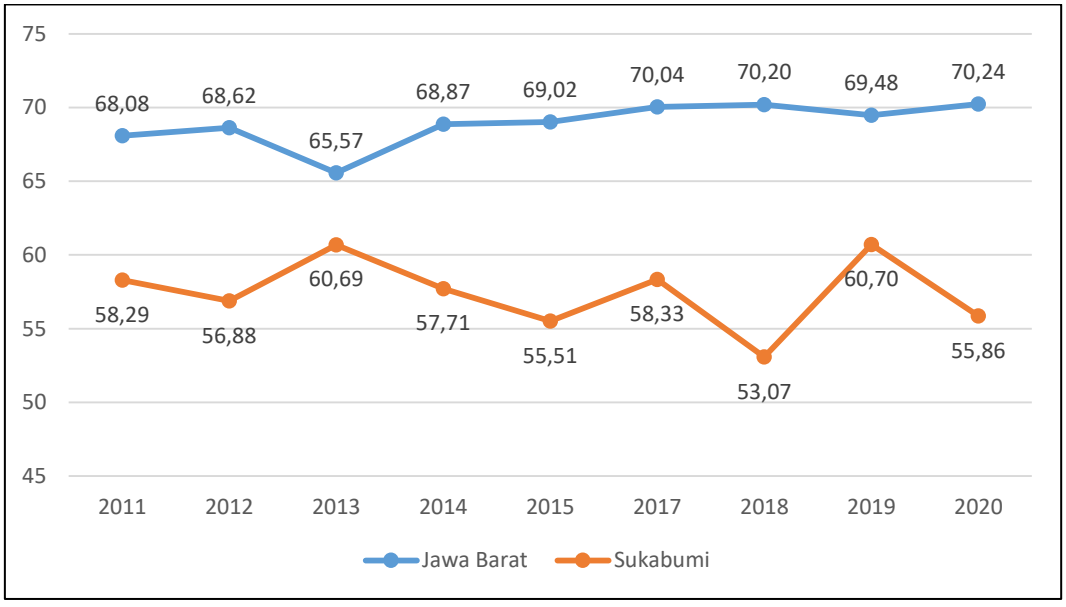
Indikator lain yang menjadi penyusun IPG adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Berdasarkan data BPS, capaian HLS Kabupaten Sukabumi berdasarkan gender dari tahun 2014 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, dan nilai HLS antara penduduk laki-laki dan perempuan memiliki pencapaian yang hampir sama. Pada tahun 2020 HLS perempuan sebesar 12,06 tahun dan HLS laki-laki sebesar 12,61 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan pada bidang pendidikan hampir menunjukkan kesetaraan yang merata.

Indikator yang menunjukkan kesetaraan gender dalam perekonomian yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) antara penduduk perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data BPS, dari tahun 2014 hingga tahun 2019 kondisi PPP baik penduduk laki-laki maupun perempuan

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 keduanya mengalami penurunan. Secara umum, nilai PPP penduduk perempuan cenderung lebih rendah sekitar Rp 6 juta/tahun dibandingkan dengan besaran PPP penduduk laki-laki selama rentang tahun 2014 hingga tahun 2020. Dimana, pada tahun 2020 besaran PPP penduduk laki-laki sebesar Rp 12,98 Juta/tahun, sedangkan PPP penduduk perempuan sebesar Rp 6,72 Juta/tahun.

e) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender dimanfaatkan untuk mengukur partisipasi dan peranan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan proses pengambilan keputusan. IDG dapat digunakan pula sebagai salah satu alat monitoring hasil pembangunan gender. IDG Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.68.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.68 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020

IDG terdiri dari tiga komponen penyusun yaitu keterwakilan perempuan di parlemen; pengambilan keputusan dengan perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan distribusi pendapatan dari sumbangan pendapatan. IDG menunjukkan sejauh mana peran aktif

perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG yang mendekati angka seratus mengindikasikan semakin kecil kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan.

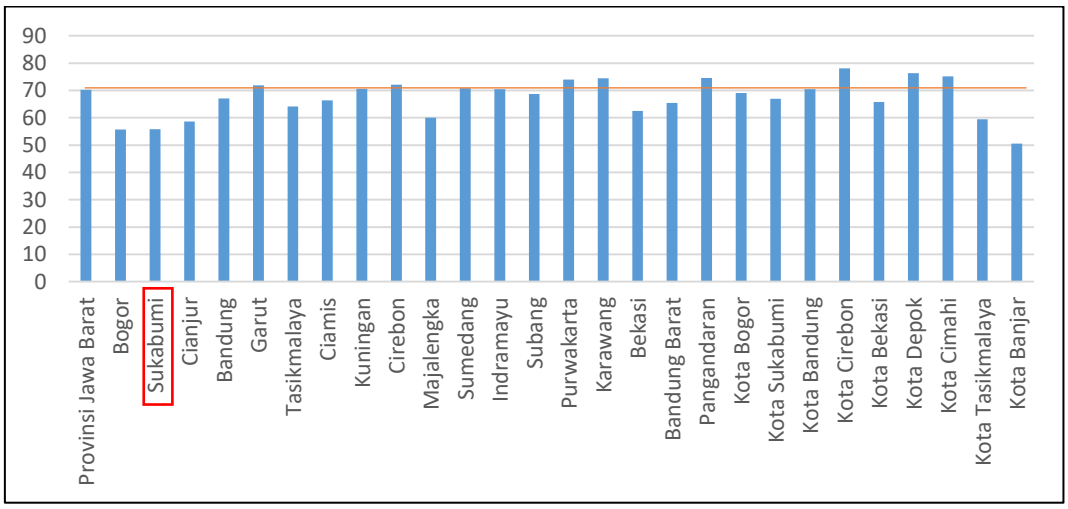
Gambar 2.68 menunjukkan bahwa IDG Kabupaten Sukabumi mengalami tren yang fluktuatif dari tahun 2011 hingga tahun 2020, dan pertumbuhannya cenderung menurun pada rentang tahun tersebut. Kondisi IDG Kabupaten Sukabumi dari tahun 2011 hingga tahun 2020 berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat. Pada tahun 2019, IDG di Kabupaten Sukabumi mencapai 60,70 poin. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi, sedangkan, pada tahun 2018 menunjukkan angka IDG terendah sebesar 53,07 poin.

Salah satu komponen IDG yaitu keterlibatan perempuan di parlemen. Komponen tersebut dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang meningkat, meskipun relatif lambat. Hal tersebut dikarenakan masih terjadi ketimpangan aksesibilitas antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ditunjukkan dengan masih rendahnya persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2020 komponen keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 14 persen.

Indikator lainnya yang digunakan dalam IDG yaitu persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, kepemimpinan, dan teknisi. Pada tahun 2018 capaian indikator tersebut sebesar 27,84 persen, menurun dari tahun 2015 yang mencapai 33,43 persen. Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam mengambil keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, keputusan ekonomi, dan sosial. Keterlibatan perempuan di posisi tersebut memberikan gambaran terhadap kemajuan peranan perempuan, karena perempuan memiliki potensi yang sama baiknya dengan laki-laki. Namun, keterlibatan perempuan relatif rendah karena masih terbatasnya kuantitas dan kualitas perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan/managerial, administrasi, serta teknisi.

komponen terakhir yaitu sumbangan pendapatan. Indikator ini mencerminkan kontribusi perempuan di bidang ketenagakerjaan untuk

sektor non pertanian. Secara umum, perkembangan sumbangan pendapatan perempuan dari tahun 2012 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, sumbangan pendapatan perempuan mencapai 25,83 persen dan meningkat menjadi 27,12 persen pada tahun 2018. Dalam kurun waktu enam tahun sumbangan pendapatan perempuan hanya meningkat sekitar 1,29 persen. Faktor yang memengaruhi indikator ini yaitu angkatan kerja dan upah yang diterima oleh perempuan dan laki-laki. Artinya, penduduk laki-laki masih mendominasi angkatan kerja di Kabupaten Sukabumi, sehingga berpengaruh pada sumbangan pendapatan perempuan yang relatif kecil. Data IDG berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.69.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

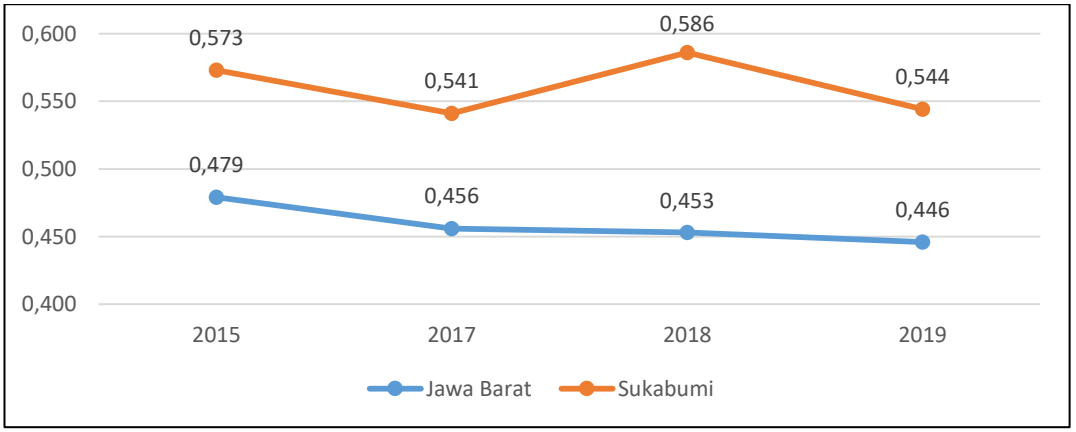
Gambar 2.69 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota se Jawa Barat Tahun 2020

Pada tahun 2020 IDG Kabupaten Sukabumi berada di posisi ketiga terbawah dari kabupaten/kota lainnya di Jawa barat. Posisi tersebut menurun dari tahun 2017, dimana IDG Kabupaten Sukabumi berada di posisi ke tujuh terbawah. UNDP menyusun dua indeks turunan dari IPM yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengadopsi persoalan mengenai gender. IPM Kabupaten Sukabumi berada di posisi rentang lima terbawah dari kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, dan IDG cenderung menurun. Maka, diperlukan usaha yang lebih keras dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi

untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas peran perempuan di berbagai bidang. Selain harus meningkatkan pembangunan manusia secara umum, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan peranan perempuan dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial.

f) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kesetaraan gender merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang setara untuk dapat mengakses haknya secara penuh sebagai manusia. Adanya ketimpangan pembangunan antara penduduk perempuan dan laki-laki menyebabkan proses pembangunan daerah tidak dapat mencapai potensi yang optimal. Kondisi yang diharapkan dalam pembangunan manusia yaitu dimana penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan. Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan *Gender Inequality Index* (GII) sebagai ukuran ketimpangan gender. Kemudian, BPS mengadopsi pengukuran tersebut, dengan melakukan perhitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang menggambarkan ketidakoptimalan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan pencapaian pembangunan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Adapun IKG Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.70.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Publikasi Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender), 2020

Gambar 2.70 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2019

Pengukuran IKG mencakup aspek kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi, menggunakan lima indikator yang tersedia. Indikator tersebut diantaranya faktor risiko kematian ibu menggunakan proporsi persalinan tidak pada fasilitas kesehatan, fertilisasi remaja menggunakan proporsi perempuan umur kurang dari 20 tahun saat melahirkan hidup pertama, proporsi penduduk 25 tahun keatas berpendidikan minimal SMA, persentase laki-laki dan perempuan yang duduk di parlemen, dan persentase angkatan kerja terhadap usia kerja. Nilai IKG berkisar antara 0 sampai 1. Nilai sebesar nol mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna, sedangkan angka satu mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna.

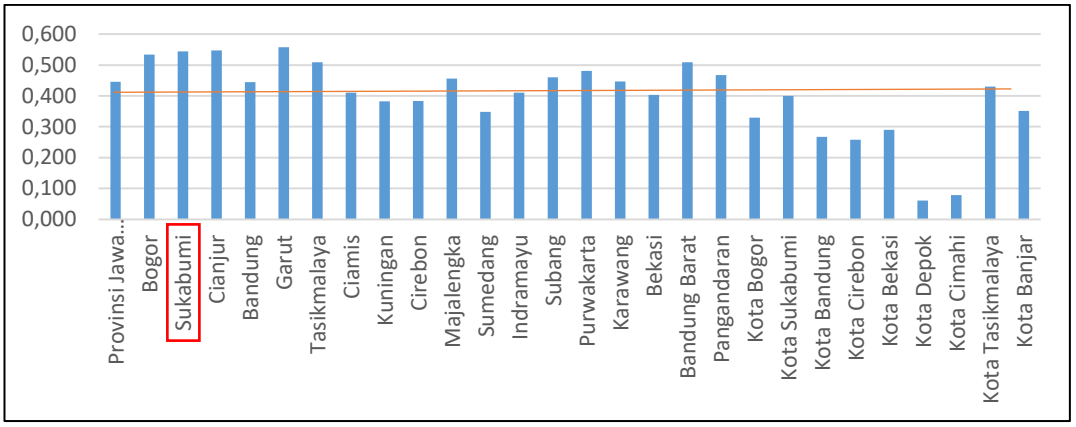
Dari tahun 2015 hingga tahun 2019, IKG Kabupaten Sukabumi capaiannya lebih dari 0,495 poin. Walaupun mengalami tren yang fluktuatif, IKG Kabupaten Sukabumi masih berada pada level yang tinggi. Semakin kecil nilai IKG maka semakin rendah ketimpangan peran pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Perbandingan kondisi IKG Kabupaten Sukabumi dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.45 dan Gambar 2.71.

Tabel 2.45 Indeks ketimpangan gender kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Faskes (%)	ULP (%)	keterwakilan di parlemen (%)		Pendidikan Min SMA (%)		TPAK (%)		IKG	Status
			L	P	L	P	L	P		
Provinsi Jawa Barat	14,59	30,97	80,00	20,00	38,24	28,89	83,38	46,45	0,446	Menengah Bawah
Sukabumi	20,95	41,70	88,00	12,00	22,20	13,48	84,81	40,14	0,544	Tinggi
Cianjur	36,69	45,57	84,00	16,00	17,82	13,25	84,56	46,61	0,548	Tinggi
Bandung	10,24	31,86	87,27	12,73	39,16	30,23	82,31	48,13	0,445	Menengah Bawah
Indramayu	10,15	39,60	66,00	34,00	23,49	14,00	84,53	50,26	0,410	Menengah Bawah
Purwakarta	28,15	30,09	71,11	28,89	34,66	24,11	84,51	42,76	0,481	Menengah Atas
Pangandaran	20,38	37,00	77,50	22,50	26,38	16,12	89,07	61,65	0,468	Menengah Atas
Kota Depok	0,10	16,61	76,00	24,00	70,48	56,76	81,82	48,23	0,061	Rendah
Kota Cimahi	0,10	18,48	80,00	20,00	60,82	47,20	79,88	46,87	0,078	Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistik (Publikasi Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender), 2020

Keterangan :
Faskes : Proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan
ULP : Proporsi perempuan umur <20 tahun saat melahirkan hidup pertama



Sumber: Badan Pusat Statistik (Publikasi Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender), 2020

Gambar 2.71 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota se Jawa Barat Tahun 2019

Data pada tabel 2.45 menunjukkan perbandingan komponen penyusun IKG Kabupaten Sukabumi dengan beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat. Nilai IKG Kabupaten Sukabumi masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat, dan posisi IKG Kabupaten Sukabumi berada pada posisi ketiga teratas dari kabupaten/kota lainnya. Dari tahun 2015 hingga tahun 2019 status Ketimpangan gender Kabupaten Sukabumi masih tinggi, artinya ketimpangan peran dan kontribusi penduduk laki-laki dan perempuan dalam pembangunan masih tinggi. Hubungan antara IKG dengan IDG, IPG, dan IPM memiliki hubungan terbalik. Angka IKG yang rendah selayaknya didukung dengan angka IPM, IPG, dan IDG yang tinggi.

Dimensi kesehatan terdiri dari indikator faskes dan ULP, dimensi kesehatan hanya dihitung dari penduduk perempuan karena dalam perhitungannya melibatkan risiko kematian ibu dan fertilitas remaja. Komponen faskes Kabupaten Sukabumi menunjukkan persentase persalinan penduduk yang tidak pada fasilitas kesehatan masih tinggi, dibandingkan dengan Kabupaten Kota lainnya, dimana terdapat sebanyak 20,59 persen perempuan dibawah umur 20 tahun yang melakukan persalinan tanpa fasilitas kesehatan yang layak, dan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kematian ibu. Komponen ke dua dari dimensi kesehatan yaitu fertilitas remaja menggunakan indikator ULP, dan menunjukkan Kabupaten Sukabumi berada pada angka 41,70 persen.

Artinya, sebanyak 41,70 persen perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang memiliki umur saat kelahiran hidup pertama kurang dari 20 tahun.

Dimensi kedua yaitu pemberdayaan yang terdiri dari persentase antara penduduk laki-laki dan perempuan pada keterwakilan di parlemen dan pendidikan minimal SMA. Persentase keterwakilan gender di parlemen didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 88,00 persen. Aspek pendidikan menunjukkan sebanyak 13,48 persen penduduk perempuan dengan pendidikan minimal SMA, sedangkan penduduk laki-laki yang bersekolah minimal hingga jenjang SMA sebanyak 22,20 persen. Dimensi terakhir yaitu pasar tenaga kerja. Dimensi ini menggunakan indikator persentase TPAK laki-laki dan perempuan. TPAK penduduk laki-laki dan perempuan memiliki gap yang cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan partisipasi penduduk laki-laki pada lapangan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan

3) Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). Gambaran umum kondisi pangan Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dari beberapa indikator seperti ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi dan protein, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

a) Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Data ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46 Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

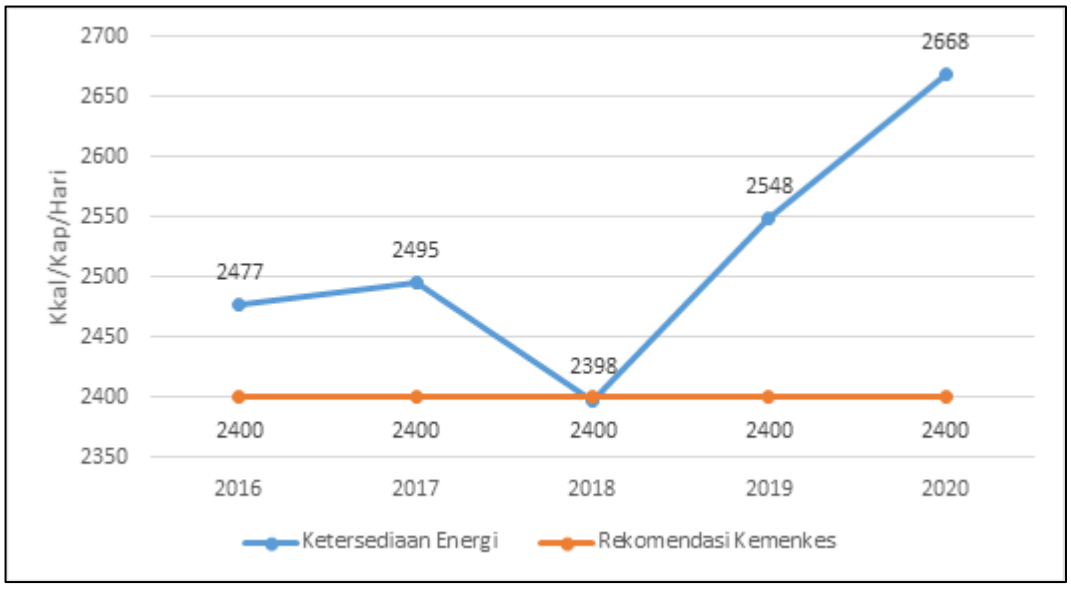
Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)	518.432.506	563.835.945	538.655.052	542.983.318	535.598.231
Jumlah penduduk	2.516.461	2.536.611	2.551.440	2.571.890	2.626.762
Ketersediaan Pangan Utama Per Kapita (kg/jiwa)	206,02	222.28	211,12	211,12	203,90

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2021 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sukabumi mengalami perubahan yang *fluktuatif,* dan cenderung menurun dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2016, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sukabumi sebesar 206,02 kg/jiwa. Pada 2017 ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan menjadi 222,28 kg/jiwa. Namun sayangnya pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 203,90 Kg/jiwa.

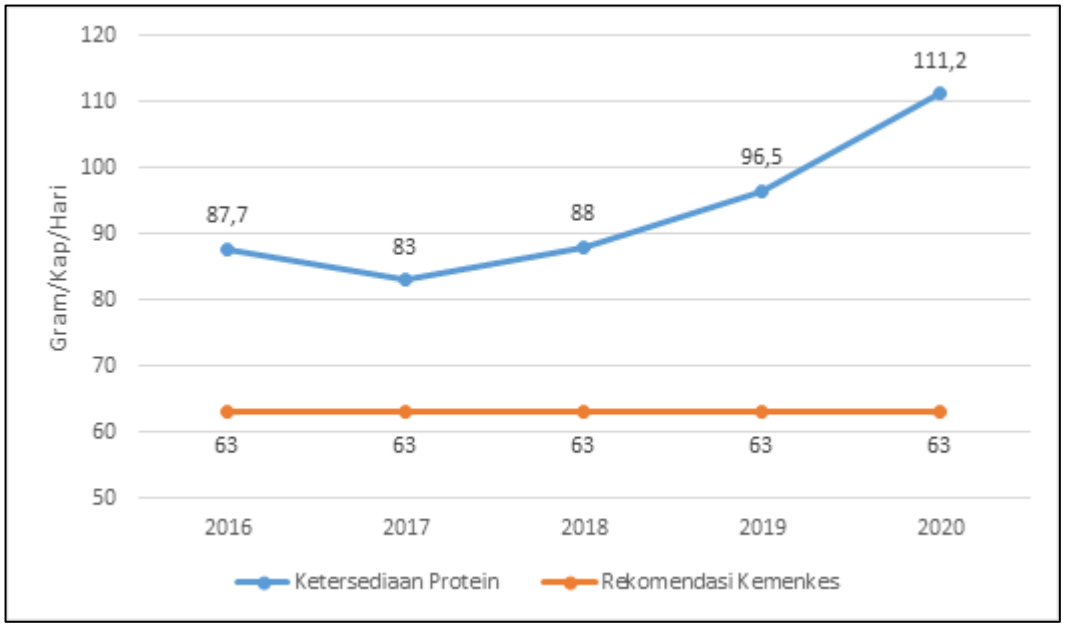
b) Ketersediaan Energi dan Protein

Ketersediaan energi dan protein merupakan salah satu indikator dalam ketahanan pangan. Data ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Sukabumi tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.72 dan 2.73.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.72 Ketersediaan Energi Per Kapita Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.73 Ketersediaan Protein Per Kapita Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Berdasarkan data pada gambar di atas, ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 sebesar 2.477 kkal/kap/hari dan mengalami peningkatan menjadi 2.495 kkal/kap/hari pada tahun 2017. Namun demikian, pada tahun 2018 ketersediaan energi mengalami penurunan menjadi 2.398 kkal/kap/hari, wlaupun dpat meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 2668 kkal/kapita/hari. Dalam rentang tahun 2016

hingga tahun 2020, hanya pada tahun 2018 saja ketersediaan energi berada dibawah rekomendasi Kementerian Kesehatan. Sementara itu, ketersediaan protein per kapita di Kabupaten Sukabumi selalu di atas dari jumlah yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2016, ketersediaan protein per kapita di Kabupaten Sukabumi sebesar 87,7 gram/kap/hari dan menurun pada tahun 2017 menjadi 83 gram/kap/hari, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 111,2 gram/kap/hari.

c) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Ketersediaan pangan, selain harus terjamin dari sisi jumlah, namun perlu dipastikan pula keamanannya. Hal tersebut dilakukan agar panganyang tersedia sesuai standar dan layak dikonsumsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengawasi dan juga membina produsen/penyedia pangan untuk menjamin keamanan pangan. Data persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47 Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disuatu tempat sesuai standar	4	6	14	65	3
Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang sesuai standar	7	8	17	68	3
Persentase	**57,14**	**75,00**	**82,35**	**95,59**	**100,00**

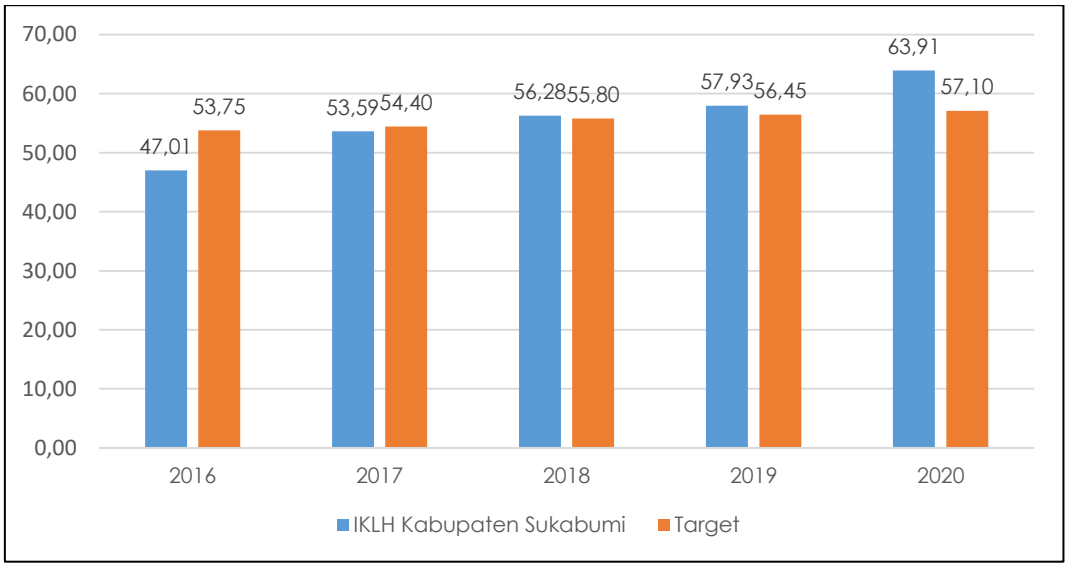
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.47 persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan terhadap sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2016 sebesar 57,14 persen. Pada tahun 2020, angka tersebut meningkat menjadi 100 persen. Peningkatan persentase tersebut menunjukkan bahwa

pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Sukabumi semakin baik.

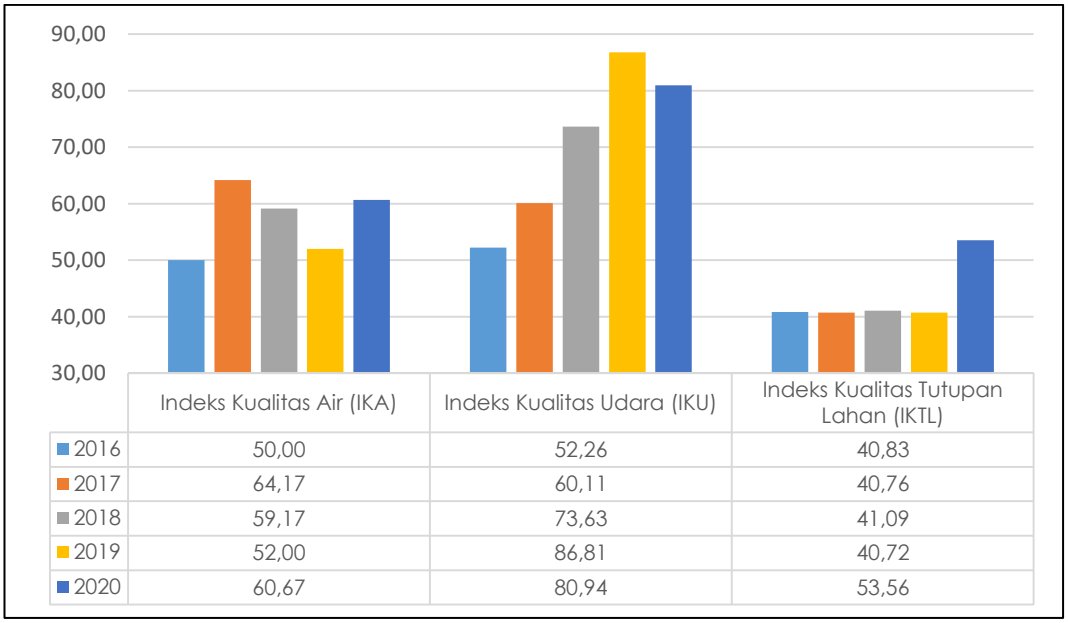
4) Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kualitas lingkungan hidup di suatu daerah dapat dilihat dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2016, IKLH Kabupaten Sukabumi sebesar 47,01 dari nilai skala indeks 1-100. Capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu 53,75. Namun demikian, IKLH terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 IKLH Kabupaten Sukabumi adalah 63,91 dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 57,10. Data target dan capaian IKLH Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.74, dan capaian komponen IKLH yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.75.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2.74 Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020



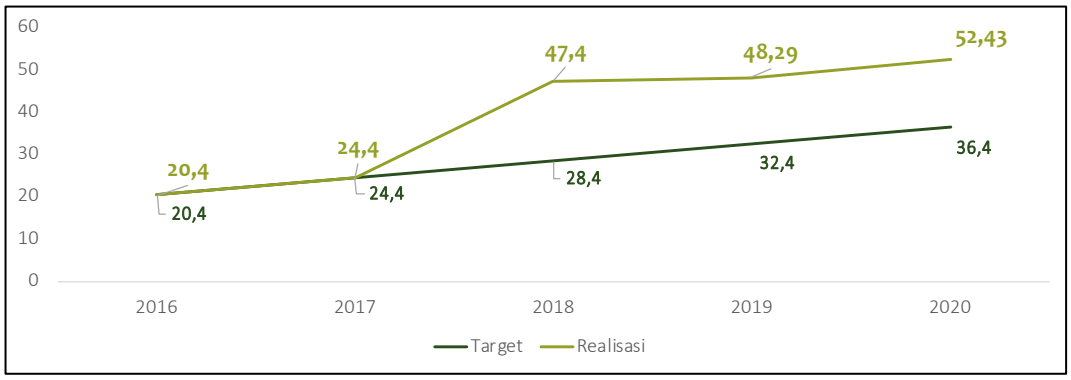
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
2016	50,00	52,26	40,83
2017	64,17	60,11	40,76
2018	59,17	73,63	41,09
2019	52,00	86,81	40,72
2020	60,67	80,94	53,56

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2.75 Capaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

IKA menunjukkan nilai yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020, ini berarti kualitas air di Kabupaten Sukabumi belum menunjukkan perubahan yang stabil. IKU menunjukkan peningkatan hingga tahun 2019, namun menurun pada tahun 2020. Sedangkan, IKTL cenderung stabil hingga tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2020. Di samping IKLH, indikator lain untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi adalah penanganan sampah. Dalam pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten Sukabumi telah membagi wilayahnya menjadi 6 koordinator wilayah. Masing-masing koordinator wilayah memiliki cakupan pelayanan yang berbeda-beda.

Dari tahun 2016 hingga tahun 2020, kualitas penanganan sampah di Kabupaten Sukabumi semakin membaik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase penanganan sampah yang capaiannya terus meningkat dan melebihi target. Pada tahun 2020 persentase penanganan sampah di Kabupaten Sukabumi sebesar 52,43 persen, sementara terget penanganan sampah pada tahun 2020 sendiri adalah 36,4 persen. Tren peningkatan persentase penanganan sampah di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.76.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2.76 Target dan Capaian Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Sementara itu, jika dilihat dari timbulan sampah, terjadi peningkatan timbulan sampah dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Pada tahun 2017 jumlah total timbulan sampah sebanyak 2.034,08 m3/hari. Wilayah yang paling banyak menghasilkan timbulan sampah pada tahun 2017 yaitu koordinator wilayah Cisaat, sedangkan wilayah yang paling sedikit menghasilkan timbulan sampah yaitu koordinator wilayah Jampang Kulon. Pada tahun 2018, jumlah total timbulan sampah sebanyak 2.091,42 m3/hari. Wilayah yang paling banyak menghasilkan timbulan sampah yaitu koordinator wilayah Sukaraja, sedangkan wilayah yang paling sedikit menghasilkan timbulan sampah yaitu koordinator wilayah Jampang Kulon. Data jumlah timbulan sampah setiap koordinator wilayah di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48 Timbulan Sampah (m^3) Menurut Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017-2019

Wilayah	Timbulan Sampah (m3/hari)		
	2017	2018	2019
Korwil Cisaat	425,45	425,45	425,45
Korwil Cibadak	368,93	380,86	380,87
Korwil Cicurug	300,62	315,48	315,47
Korwil PL Ratu	343,66	354,22	354,21
Korwil Jampang Kulon	230,69	250,69	250,69
Korwil Sukaraja	364,73	447,67	364,73
Total	**2,034,08**	**2174,37**	**2091,42**

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data pada tahun 2021 yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) di

wilayah Kabupaten Sukabumi hanya ada 2, yaitu TPA Cimenteng dan TPA Kadaleman. Jumlah angkutan pengangkut sampah yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak 73 unit, yang terdiri dari 35 unit *Dump Truk, 13 unit Arm Roll*, 2 unit compactor truck, 8 unit *Pick Up*, dan 15 unit Motor roda tiga. Di samping itu, terdapat pula, *excavator* 20 ton 2 unit, *excavator* 13 ton 1 unit, *buldozer* 1 unit, *bechoe loader* 1 unit, dan mesin gilas pemadat sampah 1 unit.

Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya timbunan sampah yang terkumpul pada tempat yang salah, serta belum optimalnya penanganan (diangkut/ditanam) sampah. Penyebab dari permasalahan banyaknya timbulan sampah tersebut karena masih kurangnya penyediaan tempat sampah yang memadai, masih kurangnya kesadaran masyarakat dengan banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya seperti ke sungai, pada beberapa daerah yang padat penduduknya hanya memiliki TPS yang sangat kecil dan tidak cukup untuk menampung sampah yang ditimbulkan, masih terbatasnya jumlah truk yang dijadikan sebagai pengangkut sampah, serta luas TPA yang digunakan semakin kecil.

Di samping itu, masih terdapat 11 kecamatan yang belum terlayani armada pengangkut sampah, yaitu Kecamatan Kabandungan, Kecamatan Kalapanunggal, Kecamatan Parakansalak, Kecamatan Ciambar, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Curugkembar, Kecamatan CIdadap, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Tegalbuleud, dan Kecamatan Cireunghas. Melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai akan mengurangi masalah terkait sampah. Guna mengoptimalkan pengelolaan sampah, diperlukan penanganan secara terintegrasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta agar bisa dicapai pelayanan secara optimal.

5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kepemilikan KTP, kepemilikan akta kelahiran, dan kepemilikan akta pernikahan,

a) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas seseorang untuk menyatakan status identitas jati diri kependudukan dalam sebuah negara atau wilayah bagi penduduk yang sudah menginjak usia 17 tahun. Setiap masyarakat sangat penting untuk memiliki KTP. Data persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2017 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49 Persentase kepemilikan KTP Kabupaten Sukabumi tahun 2017-2020

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk wajib KTP	1.811.696	1.880.707	1.850.428	-
Cetak KTP	1.673.599	1.899.968	1.801.462	-
Persentase kepemilikan KTP-elektronik (%)	92,38	100,97	97,35	99,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP di Kabupaten Sukabumi meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sangat fluktuatif. Persentase kepemilikan KTP pada tahun 2017 sebesar 92,38 persen dan meningkat menjadi 100,97 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kepemilikan KTP menurun kembali menjadi 97,35 persen, namun meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 99,87 persen. Data tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 0,13 persen penduduk yang wajib memiliki KTP belum memiliki KTP.

b) Kepemlikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran menunjukkan status hukum seorang anak yang lahir dan sebagai bukti bahwa seorang anak yang lahir dari orang tua yang berkebangsaan Indonesia serta untuk kepentingan administrasi lainnya.

Data persentase anak berakte kelahiran di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50 Persentase Anak Berakta Kelahiran Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah anak 0-18 tahun (Jiwa)	742.596	764.524	-
Anak memiliki akta (Jiwa)	742.519	719.464	-
Anak belum memiliki akta (jiwa)	77	45.060	-
Persentase anak berakta kelahiran (%)	99,99	94,11	99,08
Persentase anak belum berakta kelahiran (%)	0,01	5,89	0,92

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020

Berdasarkan data di atas, persentase anak berakta kelahiran pada tahun 2018 sebanyak 99,99 persen. Persentase tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh anak di Kabupaten Sukabumi memiliki akta kelahiran karena hanya 0,01 persen atau sebanyak 77 anak yang belum memiliki akta kelahiran. Sementara itu, pada tahun 2020 persentase anak berakta kelahiran menurun menjadi 99,08 persen. Persentase tersebut menunjukkan bahwa belum seluruh anak memiliki akta kelahiran yaitu sebanyak 0,92 persen.

c) Kepemilikan Akta pernikahan

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, akta pernikahan merupakan suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Data persentase pasangan yang berakta nikah di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51 Jumlah Pernikahan dan Jumlah Kepemilikan Akta Pernikahan Menurut Kepemelukan Agama Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020

Agama	2018		2019		2020	
	Jumlah Pernikahan	Jumlah Akta	Jumlah Pernikahan	Jumlah Akta	Jumlah Pernikahan	Jumlah Akta
Islam	82.268	82.268	83.657	83.657	386.407	386.407
Katholik	138	138	149	149	284	284

Agama	2018		2019		2020	
	Jumlah Pernikahan	Jumlah Akta	Jumlah Pernikahan	Jumlah Akta	Jumlah Pernikahan	Jumlah Akta
Protestan	424	424	447	447	880	880
Hindu	1	1	3	3	13	13
Budha	55	55	60	60	115	115
Konghucu	4	4	4	4	4	4
Kepercayaan	-	-	-	-	-	-
Pengadilan			-	-	-	-
Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
Total	**82.890**	**82.890**	**84.320**	**84.320**	**387.703**	**387.703**
Pasangan Berakta Nikah (%)	**100**		**100**		**100**	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

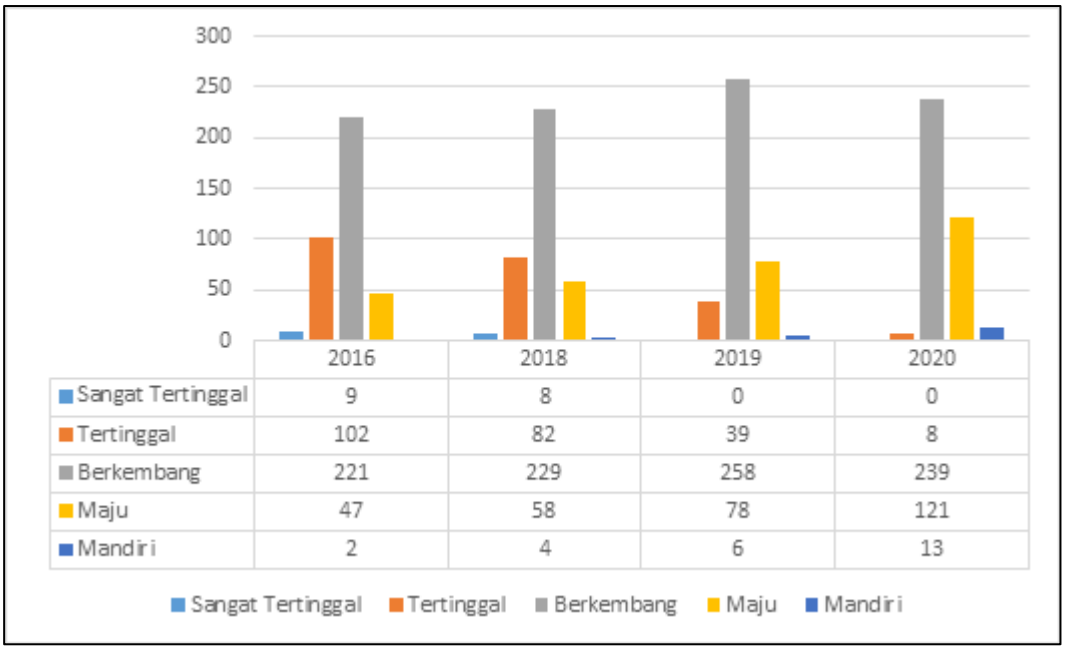
Berdasarkan data di atas, persentase pasangan berakta nikah pada tahun 2018 hingga tahun 2020 sebesar 100 persen. Angka tersebut didapat dari jumlah pernikahan dan jumlah akta pernikahan memiliki nilai yang sama. Persentase tersebut menunjukkan bahwa seluruh perkawinan di Kabupaten Sukabumi, yang memeluk agama apapun, sudah tercatat dan memiliki akta pernikahan yang sah sebagai alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah.

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum kondisi daerah terkait pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga komponen yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Klasifikasi status desa berdasarkan IDM terdiri dari lima yaitu desa sangat tertinggal, Desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memiliki IDM ≤ 0,4907 dan merupakan desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial, sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk. Desa tertinggal atau desa pra-madya adalah desa yang memiliki IDM ≤ 0,5989 dan > 0,4907 dan merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi namun belum dan kurang dalam

pengelolaannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

Desa berkembang atau desa madya adalah desa yang memiliki IDM ≤ 0,7072 dan > 0,5989 dan merupakan desa potensial menjadi desa maju karena memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi namun belum memiliki kemampuan untuk mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa maju atau desa pra-sembada adalah desa yang memiliki IDM ≤ 0,8155 dan ≥ 0,7072 dan merupakan desa potensial yang menjadi desa maju karena memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta memiliki kemampuan untuk mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa mandiri atau desa sembada adalah desa yang memiliki IDM > 0,8155 dan merupakan desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Data status desa berdasarkan IDM di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.77.



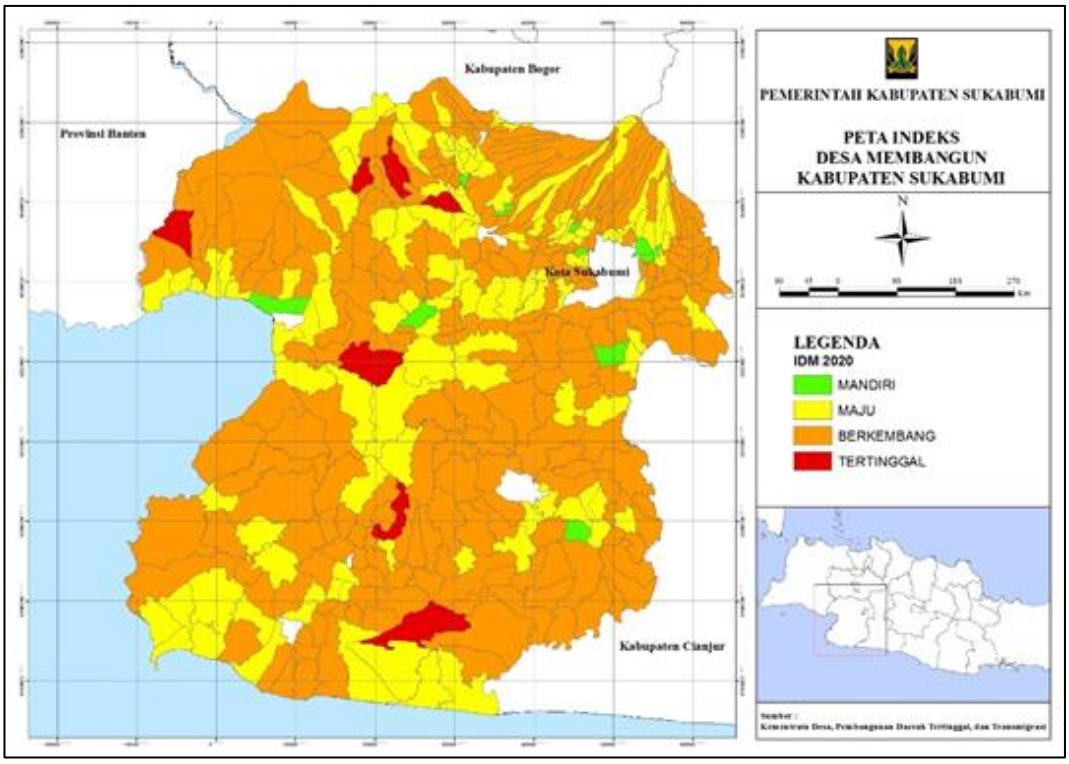
	2016	2018	2019	2020
Sangat Tertinggal	9	8	0	0
Tertinggal	102	82	39	8
Berkembang	221	229	258	239
Maju	47	58	78	121
Mandiri	2	4	6	13

Sumber: Indeks Desa Membangun, 2021

Gambar 2.77 Status Desa Berdasarkan IDM Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Berdasarkan data di atas, secara umum setiap tahunnya desa di Kabupaten Sukabumi masih didominasi oleh desa dengan status berkembang. Pada tahun 2016, didominasi oleh desa berkembang sebanyak 221 desa dan desa tertinggal sebanyak 102 desa. Desa dengan status mandiri memiliki jumlah paling sedikit hanya 2 desa. Pada tahun 2016 masih terdapat desa dengan status sangat tertinggal yaitu sebanyak 9 desa. Pada tahun 2018, didominasi oleh desa berkembang sebanyak 229 desa dan desa tertinggal sebanyak 82 desa. Sedangkan, desa dengan status mandiri memiliki jumlah paling sedikit hanya 4 desa. Pada tahun 2018 masih terdapat desa dengan status sangat tertinggal yaitu sebanyak 8 desa. Pada tahun 2019, masih didominasi oleh desa berkembang sebanyak 258 desa dan desa maju sebanyak 78 desa. Sedangkan desa dengan status mandiri memiliki jumlah paling sedikit hanya 6 desa yaitu Desa Citepus, Desa Bojongkokosan, Desa Sukamanah, Desa Warungkiara, Desa Pasirhalang dan Desa Pasanggrahan. Sejak tahun 2019 sudah tidak ada desa dengan status sangat tertinggal di Kabupaten Sukabumi.

Pada tahun 2020, desa dengan status tertinggal dan berkembang mengalami penurunan yang signifikan, sehingga banyak desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa maju maupun desa mandiri. Adapun desa yang masih berstatus tertinggal yaitu Desa Sukajadi, Desa Nangela, Desa Mekarasih, Desa Palasarai Hilir, Desa Gunung Kramat, Desa Walangsari, Desa Makarsari, dan Desa Gunung Endut. Adapun peta status Desa Kabupaten Sukabumi tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.78.



Sumber: Indeks Desa Membangun, 2021

Gambar 2.78 Peta Status Desa Kabupaten Sukabumi tahun 2020

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program nasional yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk melalui perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera baik dari segi kualitas kehidupan sosial maupun ekonomi. Program nasional ini sudah dilaksanakan sejak Orde Baru, namun hingga saat ini masih ditemui keluarga yang belum sadar akan arti pentingnya keluarga berencana. Gambaran umum kondisi daerah terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rasio akseptor keluarga berencana, angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun), cakupan pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun, cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(Unmeet Need),* cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB, cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB, cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB, pusat pelayanan keluarga sejahtera di setiap kecamatan, cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja, cakupan penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana, jumlah usaha peningkatan

pendapatan keluarga sejahtera, rasio petugas pembantu pembina keluarga berencana desa di setiap desa, persentase faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS, cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa, persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual, jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga, serta cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

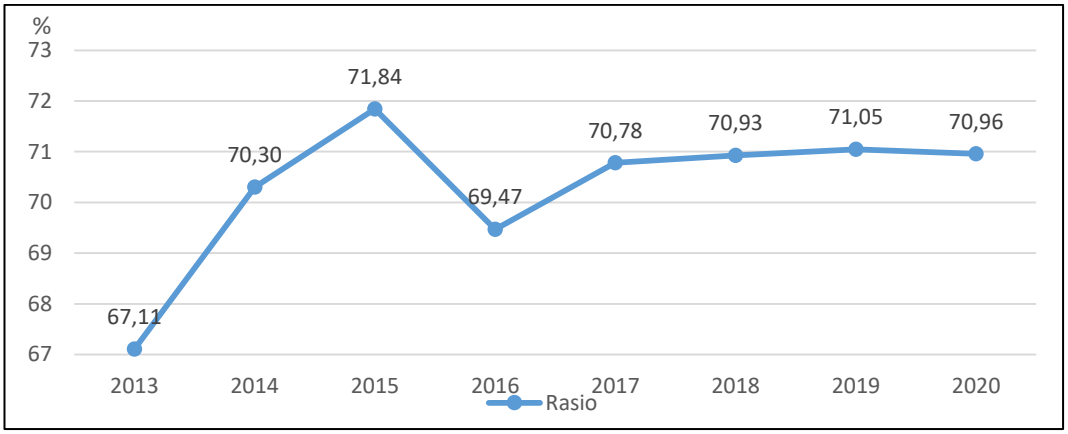
a) Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Akseptor Keluarga Berencana (KB) merupakan anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Data rasio akseptor KB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2013 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.52 dan Gambar 2.79.

Tabel 2.52 Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2020

Tahun	Peserta KB (Jiwa)	PUS (Jiwa)	Rasio Akseptor KB (%)
2013	306.241	456.356	67,11
2014	330.457	470.095	70,30
2015	338.918	471.800	71,84
2016	342.402	492.874	69,47
2017	360.528	509.363	70,78
2018	373.312	526.312	70,93
2019	393.797	554.268	71,05
2020	412.204	580.867	70,96

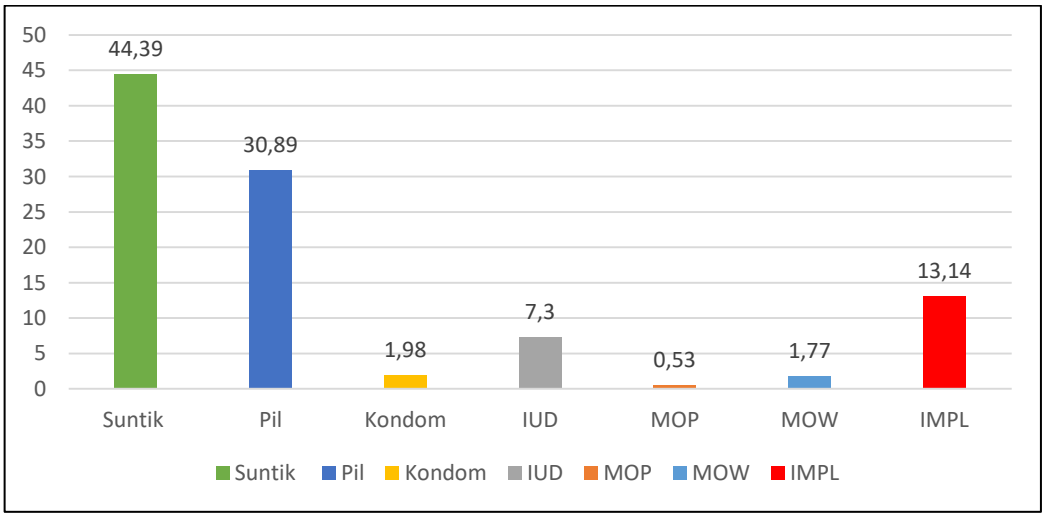
Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021

Gambar 2.79 Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2020 (%)

Berdasarkan data di atas, jumlah peserta KB, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan rasio akseptor KB cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, persentase akseptor KB sebesar 67,11 persen dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 71,05 persen, namun menurun Kembali menjadi 70,96 persen pada tahun 2020. Akseptor KB yang aktif menggunakan alat kontrasepsi beragam, mulai dari Pil KB, KB suntik, hingga metode operasi terhadap pria maupun wanita. Beberapa metode KB lainnya yaitu IUD, MOP, MOW, IMPL dan kondom. Data peserta KB menurut jenis alat KB Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 dilihat pada Gambar 2.80.



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2020

Gambar 2.80 Peserta KB Menurut Jenis Alat KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 (%)

Berdasarkan data di atas, sebagian besar akseptor KB pada tahun 2020 menggunakan alat kontrasepsi suntik KB yang mencapai 44,39 persen pengguna, dan diikuti oleh pil KB sebanyak 30,89 persen. Jenis alat kontrasepsi yang paling sedikit digunakan adalah Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak 0,53 persen dan MOW sebanyak 1,77 persen.

b) Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun)

Angka kelahiran remaja menunjukkan jumlah kelahiran remaja per 1000 remaja atau perempuan berusia 15-19 tahun. Data angka kelahiran remaja di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53 Angka Kelahiran Remaja di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah kelahiran remaja	5.563	5.683	5.593	5.583
Jumlah total remaja	195.741	153.974	153.128	139.459
Angka kelahiran remaja per 1.000 remaja	28	37	37	40

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Berdasarkan data di atas, angka kelahiran remaja di Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, angka kelahiran remaja sebesar 28 kelahiran remaja setiap 1.000 remaja perempuan. Angka kelahiran tersebut meningkat, sehingga pada tahun 2019 menjadi 40 kelahiran remaja setiap 1.000 remaja perempuan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan upaya untuk menekan agar angka kelahiran remaja semakin berkurang. Hal ini dikarenakan kelahiran pada usia remaja sangat beresiko.

c) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya kurang dari 20 tahun

Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam pendewasaan usia perkawinan. Data cakupan PUS istri < 20 tahun di Kabupaten Sukabumi dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54 Cakupan PUS yang Istrinya < 20 Tahun Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah PUS istri <20 tahun	13.421	13.419	13.413	13.406
Jumlah PUS	492.874	509.363	526.708	554.268
Cakupan PUS istri <20 tahun (%)	2,72	2,63	2,55	2,42

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Berdasarkan data diatas, cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya berusia < 20 tahun cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, cakupan PUS istri < 20 tahun sebesar 2,72 persen dan menurun menjadi 2,42 persen pada tahun 2019. Persentase cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun jika semakin menurun maka akan semakin baik karena dapat mengurangi resiko kehamilan ataupun kelahiran istri yang berusia < 20 tahun.

d) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) menunjukkan adanya pasangan usia subur yang belum terpenuhi keinginannya untuk ber-KB. Data cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55 Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani	492.874	509.363	526.708	554.268	-
Jumlah PUS	83.473	73.012	70.222	66.807	-
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	16,94	14,33	13,33	12,05	10,94

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Berdasarkan data di atas, cakupan PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi mengalami penurunan setiap tahunnya. Cakupan PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi pada tahun 2016 sebesar 16,94 persen dan menurun menjadi 10,94 persen pada tahun 2020. Angka persentase tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak PUS yang ingin ber-KB dan telah terpenuhi.

e) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina keluarga Balita (BKB) adalah program penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak. Data cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggota BKB ber-KB	43.703	42.443	45.179	52.348	-
Jumlah anggota BKB	55.125	51.902	52.742	61.077	-
Cakupan anggota BKB ber-KB (%)	79,28	81,78	85,66	85,71	86,86

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Berdasarkan data di atas, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, cakupan anggota BKB ber-KB sebesar 79,28 persen dan meningkat menjadi 86,86 persen

pada tahun 2020. Persentase cakupan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak anggota BKB yang telah terlayani KB.

f) Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah program untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orangtua dan anggoa keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orangtua dan anak. Data cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota BKR ber-KB	18.556	19.452	19.992	28.501
Jumlah anggota BKR	24.654	23.284	24.127	34.072
Cakupan anggota BKR ber-KB (%)	75,27	83,54	82,86	83,65

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Berdasarkan data di atas, cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, cakupan anggota BKR ber-KB sebesar 75,27 persen dan meningkat menjadi 83,65 persen pada tahun 2019. Persentase cakupan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak anggota BKR yang telah terpenuhi oleh pelayanan KB.

g) Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Data cakupan anggota BKL ber-KB di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota BKL ber-KB	7.242	10.612	11.819	13.329
Jumlah anggota BKL	10.731	12.742	14.332	16.039
Cakupan anggota BKL ber-KB (%)	67,49	83,28	82,47	83,10

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Berdasarkan data di atas, cakupan anggota BKL ber-KB cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 cakupan anggota BKL ber-KB mengalami peningkatan dari 67,49 persen pada tahun 2016 menjadi 83,28 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2017 hingga tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 82,47 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 menjadi 83,10 persen. Persentase cakupan tersebut menunjukkan bahwa cakupan anggota BKL ber-KB sebagian besar telah mendapat pelayanan KB meskipun belum secara menyeluruh.

h) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konseling, bimbingan, dan fasilitasi pembentukan wadah KIE dan konseling langsung pada keluarga yang berbasis untuk menuju keluarga berkualitas. Data PPKS di setiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59 PPKS setiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Jumlah PPKS	397	397	402	402
Jumlah kecamatan	47	47	47	47
PPKS di setiap kecamatan	8,45	8,45	8,55	8,55

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 2.53, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kabupaten Sukabumi cenderung meningkat. Jumlah PPKS di setiap kecamatan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 sebanyak 8 PPKS dan terdapat beberapa kecamatan dengan jumlah PPKS lebih dari 8 karena nilai perbandingannya selalu lebih dari 8,0 persen. Semakin banyak jumlah PPKS disetiap kecamatan maka semakin banyak masyarakat yang terlayani oleh PPKS.

i) Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR)

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) adalah wadah kegiatan yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Data cakupan remaja dalam PIK R di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60 Cakupan remaja dalam PIK R Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Jumlah remaja dalam PIK R	15.267	15.880	16.900	19.397
Jumlah kecamatan	47	47	47	47
Cakupan remaja dalam PIK R	324,83	337,87	359,57	412,70

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Berdasarkan data di atas, cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 cakupan remaja dalam PIK R sebesar 324,83 dan meningkat menjadi 412,70 pada tahun 2019. Angka cakupan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 412 orang remaja di setiap kecamatan telah tercakup dalam PIK R. Di samping itu, data tersebut mengindikasikan pula bahwa setiap tahunnya semakin banyak remaja di setiap kecamatan yang telah tercakup PIK R.

j) Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan

PKB adalah petugas penyuluh KB sedangkan PLKB adalah petugas lapangan KB. Cakupan PKB maupun PLKB non PNS yang didayagunakan di Kabupaten Sukabumi selalu tetap setiap tahunnya. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, cakupan PKB maupun PLKB non PNS yang didayagunakan mencapai 100 persen. Data PKB dan PLKB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61 Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PKB yang didayagunakan	96	96	98	96	84	83
Jumlah PKB	96	96	98	96	84	83
Cakupan PKB yang didayagunakan (%)	100	100	100	100	100	100
Jumlah PLKB Non PNS yang didayagunakan	303	309	311	310	308	393
Jumlah PLKB Non PNS	303	309	311	310	308	393
Cakupan PLKB Non PNS yang didayagunakan (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

k) Jumlah UPPKS ber-KB Mandiri

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga, khususnya keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I. Berdasarkan data dari tahun 2015 hingga tahun 2020, jumlah UPPKS ber-KB mandiri cenderung *fluktuatif* setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah UPPKS ber-KB mandiri sebanyak 3.512 keluarga. Jumlah tersebut menurun menjadi 3.474 keluarga pada tahun 2019, dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 3.651 keluarga. Data jumlah UPPKS yang ber-KB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62 Jumlah UPPKS yang ber-KB mandiri Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah UPPKS yang ber-KB mandiri	3.512	3.512	3.513	3.156	3.474	3.651

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

l) Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) di setiap Desa

Petugas PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan dan kompetensi aktif melaksanakan atau mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan. Data rasio petugas PPKBD di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB di setiap Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Jumlah petugas pembantu pembina KB desa	386	386	386	386
Jumlah desa	386	386	386	386
Rasio petugas pembantu pembina KB setiap desa (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Berdasarkan data di atas, rasio petugas pembantu pembina KB setiap desa dari tahun 2016 sampai tahun 2019 bernilai 100 persen. Rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap desa memiliki satu orang petugas pembantu pembina desa. Petugas tersebut dapat melayani masyarakat di setiap desa yang ada di Kabupaten Sukabumi. Semakin banyak petugas pembina di KB di setiap desa, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani terkait dengan pembinaan KB.

m) Persentase Faskes dan Jejaring yang Bekerjasama dengan BPJS

BPJS merupakan bentuk implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Implementasi program ini tentu tidak lepas dari peran fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerjasama dengan BPJS untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan data pada tahun 2015 hingga tahun 2019, persentase faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS tetap setiap tahunnya. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS hanya 50,33 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 49,01 persen. Persentase tersebut menunjukkan bahwa belum semua faskes dan jejaring bekerjasama dengan BPJS. Di samping itu, jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS tidak bertambah ataupun berkurang setiap tahunnya. Data jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64 Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	76	76	76	76	76	74
Jumlah faskes dan jejaring	151	151	151	151	151	151
Persentase Faskes dan Jejaring yang Bekerjasama dengan BPJS (%)	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	49,01

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

n) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Informasi data mikro keluarga merupakan salah satu hal yang penting untuk membantu dalam pelaksanaan program maupun penyusunan kebijakan terkait dengan kependudukan, pembangunan keluarga, KB, dan lainnya. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa mencapai 100 persen sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Persentase cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa tersebut tetap dan diharapkan semakin banyak jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia untuk tahun-tahun selanjutnya. Data cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Setiap Desa di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	40	40	40
Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	40	40	40
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa (%)	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

o) Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi Menular Seksual (IMS) atau penyakit kelamin adalah infeksi yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual. Berdasarkan data sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, persentase remaja yang terkena IMS sebesar 0 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada remaja yang terjangkit atau terinfeksi penyakit kelamin. Kondisi ini tentunya sangat baik dan perlu untuk dipertahankan agar remaja di Kabupaten Sukabumi dapat terbebas dari IMS. Data persentase remaja yang terkena IMS di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66 Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah remaja yang terkena IMS	0	0	0	0	0	0
Jumlah total remaja	176.516	195.741	153.974	153.128	139.459	68.910
Persentase remaja yang terkena IMS (%)	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

p) Jumlah Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Data jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Sukabumi dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67 Jumlah Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	47.749	48.646	49.883	53.984	61.106	64.682

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

q) Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Menurut BKKBN, 8 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, sosial budaya, cita dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi pelestarian lingkungan. Ke delapan fungsi keluarga tersebut diharapkan keluarga Indonesia dapat menjadi keluarga sejahtera secara ekonomi dan menjadi keluarga yang berkualitas, sehingga terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan menjadikan Indonesia lebih maju. Selain itu, implementasi 8 fungsi keluarga bertujuan untuk menghindari pernikahan usia dini, pencegahan HIV/AIDS, menghindari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan lainnya.

Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga sebanyak 47.749 kelompok. Jumlah tersebut meningkat menjadi 64.682 kelompok pada tahun 2020 dan diharapkan jumlahnya akan terus meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. Data cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di

Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami, melaksanakan pengasuhan, dan pembinaan tumbuh kembang anak di Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	68.749	69.646	66.082	66.374	75.193	77.296
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak	109.304	118.348	111.470	116.097	101.771	93.435
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang (%)	62,90	58,85	59,28	57,17	73,88	82,73

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Anak merupakan calon generasi penerus suatu bangsa, maka dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan bangsa yang baik. Untuk membentuk anak dengan kualitas yang baik dibutuhkan pengasuhan dan pembinaan yang baik khususnya dari keluarga. Berdasarkan data pada Tabel 2.65, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak cenderung meningkat mendekati akhir tahun analisis. Pada tahun 2015, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebesar 62,90 persen dan meningkat

menjadi 82,73 persen pada tahun 2020. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga yang mempunyai balita dan anak telah memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

8) Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah terminal, jumlah kendaraan umum, trayek angkutan umum, jumlah uji KIR angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu.

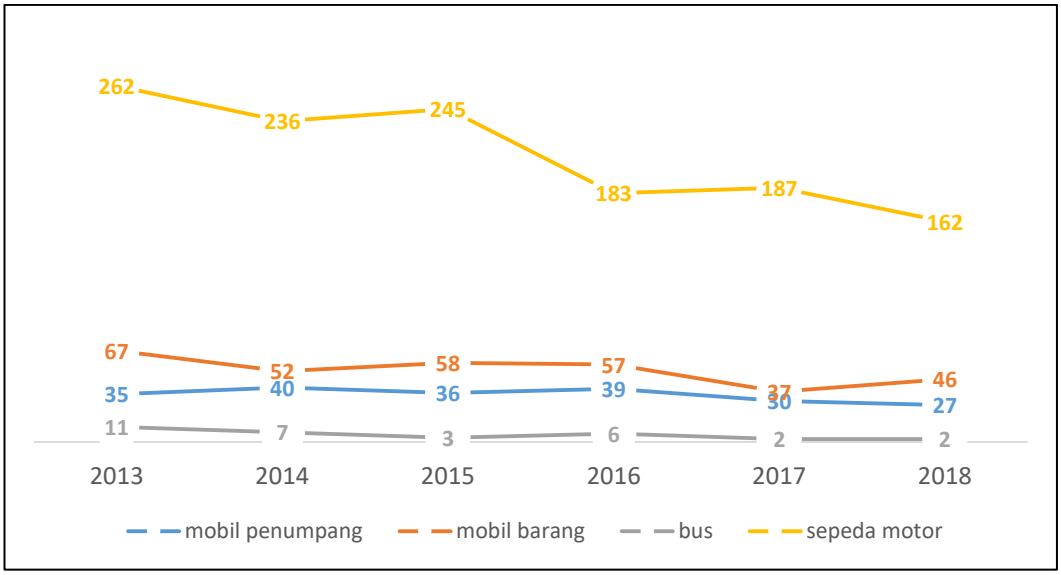
a) Jumlah Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2020, jenis kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi didominasi oleh sepeda motor/*scooter* sebanyak 645.242 unit. Jenis kendaraan bermotor yang paling sedikit yaitu bus sebanyak 454 unit. Data Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.69, sedangkan jumlah kecelakaan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan jenis kendaraan dari tahun 2013 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada Gambar 2.81.

Tabel 2.69 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020 (unit)

Jenis Kendaraan	2018	2019	2020
Mobil Penumpang	34.507	37.673	56.746
Bus	425	467	454
Truk	20.544	20.912	25.958
Sepeda Motor	477.197	492.193	645.242
Jumlah Total	532.673	551.245	728.400

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2021



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2019

Gambar 2.81 Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2018

Berdasarkan data di atas, angka kecelakaan tertinggi dialami oleh pengguna sepeda motor dikarenakan pengguna kendaraan sepeda motor/*scooter* paling banyak dibandingkan dengan kendaraan lainnya, sehingga peluang terjadinya kecelakaan pengguna sepeda motor lebih besar. Jumlah kecelakaan setiap jenis kendaraan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, jumlah kecelakaan pengguna sepeda motor sebanyak 262 kejadian, dan menurun hingga tahun 2018 sebanyak 162 kejadian. Jumlah kecelakaan paling sedikit yaitu bus. Pada tahun 2013 jumlah kecelakaan bus sebanyak 11 kejadian, dan menurun hingga tahun 2018 menjadi sebanyak 2 kejadian.

b) Jumlah Terminal, Jumlah Kendaraan Umum dan Trayek Angkutan Umum

Di Kabupaten Sukabumi terdapat 21 terminal bus, namun 4 terminal bus memiliki status tidak aktif sehingga terminal bus yang aktif hanya 17 terminal. Kendaraan umum yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi terdapat 3 jenis yaitu angkot, L300/minibus dan bus ¾ masing-masing sebanyak 2.459, 163 dan 16 kendaraan. Jumlah trayek angkot sebanyak 37 trayek, L300/minibus sebanyak 21 trayek dan bus ¾ sebanyak 7 trayek. Data jumlah terminal, jumlah kendaraan dan trayek angkutan umum di

Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70 Jumlah Terminal, Jumlah Kendaraan dan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

No.	Status Terminal	Jumlah	
1	Jumlah terminal aktif	17	
2	Jumlah terminal tidak aktif	4	
3	Total	21	
	Jenis Kendaraan Umum	**Jumlah Kendaraan**	**Jumlah Trayek**
1	Angkot	2.459	37
2	L300/minibus	163	21
3	Bus 3/4	16	7

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

c) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Angkutan umum di Kabupaten Sukabumi yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Tujuan dari pengujian tersebut adalah untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Data jumlah kendaraan umum yang diuji KIR dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah Kendaraan yang diuji KIR
2016	24.664
2017	20.247
2018	17.970
2019	21.414

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Berdasarkan data pada Tabel di atas, jumlah kendaraan umum yang diuji KIR cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah kendaraan umum yang di uji KIR sebanyak 24.664 kendaraan. Pada tahun 2017, jumlah kendaraan umum yang diuji KIR sebanyak 20.247 kendaraan dan mengalami penurunan menjadi 17.970 kendaraan pada tahun 2018. Sementara itu, pada tahun 2019, terjadi peningkatan sehingga jumlah kendaraan umum yang di uji KIR sebanyak 21.414 kendaraan.

d) Pemasangan rambu-rambu

Perlengkapan jalan berupa pemasangan rambu-rambu berfungsi sebagai petunjuk dan pemberi informasi kepada para pengendara dan pemakai jalan agar terjaga keselamatannya saat berkendara. Jenis perlengkapan jalan yang telah dipasang di Kabupaten Sukabumi berupa rambu lalu lintas, rambu petunjuk batas, rambu lalu lintas tiang F, rambu papan nama jalan, dan rambu pendahulu petunjuk jurusan. Rambu lalu lintas dan rambu pendahulu petunjuk jurusan setiap tahun dilakukan pemasangan di titik-titik tertentu. Sementara itu, rambu lainnya dipasang sesuai kebutuhan. Data pemasangan perlengkapan jalan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2013 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.72.

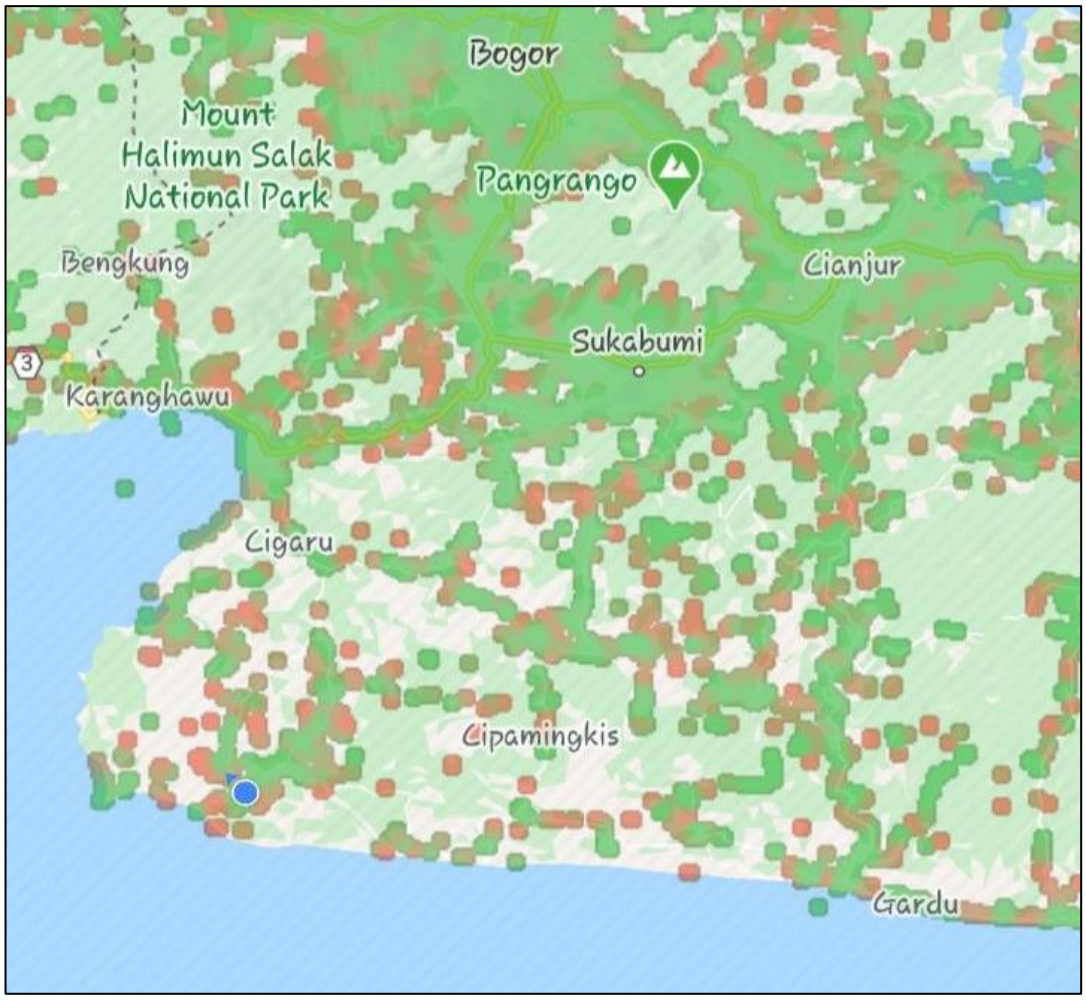
Tabel 2.72 Pemasangan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Sukabumi tahun 2013-2019

Jenis Perlengkapan Jalan	Pembangunan (titik)							Jumlah
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Rambu Lalu Lintas Uk. 60 x 60 cm (Unit)	145	50	209	235	10	66	83	798
Rambu Petunjuk Batas Wilayah Uk. 40 x 100 cm (Unit)					40	20	53	113
Rambu Petunjuk Jurusan uk. 40 x 130 cm (Unit)					9	15	15	39
Rambu Lalu Lintas Tiang F (Unit)	54			100		4		158
Rambu Papan Nama Jalan						42		42
Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	15	16	38	10	30	11		132

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

9) Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika merupakan hal yang penting dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan sangat membantu dalam menjalankan sistem pemerintahan. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan umum kondisi daerah terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah cakupan layanan komunikasi. Cakupan layanan telekomunikasi menunjukkan area di Kabupaten Sukabumi yang sudah terlayani jaringan telekomunikasi. Sebaran data cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.82.



Sumber: Aplikasi Open Signal, Diakses pada 26 Maret 2020

Gambar 2.82 Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan Gambar 2.82, cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Sukabumi belum mencakup seluruh wilayah. Wilayah yang tercakup dalam layanan telekomunikasi secara umum telah dilayani oleh semua

operator dalam jaringan 2G, 3G maupun 4G. Kualitas cakupan layanan telekomunikasi tersebut beragam disetiap wilayahnya. Mulai dari wilayah dengan kualitas layanan baik yaitu ditandai dengan warna hijau dan wilayah dengan kualitas layanan yang rendah ditandai dengan warna merah.

10) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah koperasi serta jumlah UMKM per kecamatan.

a) Jumlah Koperasi

Koperasi adalah salah satu wadah perekonomian yang menunjang pengembangan ekonomi masyarakat. Koperasi dapat menjadi wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Data jumlah, anggota dan simpanan pada koperasi di Kabupaten Sukabumi dapat dari tahun 2013 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73 Jumlah Unit Koperasi, Anggota, dan Simpanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2020

Tahun	Unit	Anggota	Simpanan (Rp)
2013	1.852	116.426	126.577.550.058
2014	1.880	117.766	126.577.550.058
2016	1.949	118.807	126.577.550.058
2017	1.960	118.977	126.587.560.007
2018	1.964	118.967	126.577.550.058
2019	2.008	123.544	511.252.813.574
2020	2.147	124.496	523.659.454.117

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Berdasarkan data di atas, perkembangan koperasi di kabupaten Sukabumi cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya kenaikan jumlah unit koperasi setiap tahunnya. Jumlah anggota dan besaran simpangan koperasi secara umum mengalami peningkatan sampai tahun 2020. Pada tahun 2017, jumlah anggota koperasi sebanyak 118.977 anggota dan

simpanan sebesar Rp.126.587.560.007. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan menjadi 124.496 anggota dan simpanan sebesar Rp523.659.454.117 pada tahun 2020.

b) Jumlah UMKM per Kecamatan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki peran dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Data jumlah UMKM per kecamatan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74 Jumlah UMKM per Kecamatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah	Persentase (%)	Kecamatan	Jumlah	Persentase (%)
Bantargadung	1.103	1,05	Jampang Kulon	935	0,89
Bojong Genteng	1.548	1,47	Jampang Tengah	486	0,46
Caringin	2.062	1,95	Kabandungan	920	0,87
Ciambar	1.742	1,65	Kadudampit	2.636	2,50
Cibadak	6.708	6,36	Kalapanunggal	2.654	2,52
Cibitung	912	0,86	Kalibunder	904	0,86
Cicantayan	4.004	3,79	Kebonpedes	1.936	1,83
Cicurug	4.544	4,31	Lengkong	183	0,17
Cidadap	355	0,34	Nagrak	3.681	3,49
Cidahu	2.471	2,34	Nyalindung	762	0,72
Cidolog	306	0,29	Pabuaran	227	0,22
Ciemas	2.327	2,21	Palabuhanratu	7.060	6,69
Cikakak	1.339	1,27	Parakansalak	1.602	1,52
Cikembar	3.319	3,15	Parungkuda	3.037	2,88
Cikidang	2.333	2,21	Purabaya	215	0,20
Cimanggu	721	0,68	Sagaranten	1.142	1,08
Ciracap	3.387	3,21	Simpenan	2.886	2,74
Cireunghas	1.367	1,30	Sukabumi	2.451	2,32
Cisaat	9.512	9,01	Sukalarang	2.299	2,18
Cisolok	2.160	2,05	Sukaraja	5.503	5,22
Curugkembar	179	0,17	Surade	5.382	5,10
Gegerbitung	786	0,74	Tegalbuleud	933	0,88
Gunung Guruh	2.669	2,53	Waluran	952	0,90
Jumlah Total			**105.520**		

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

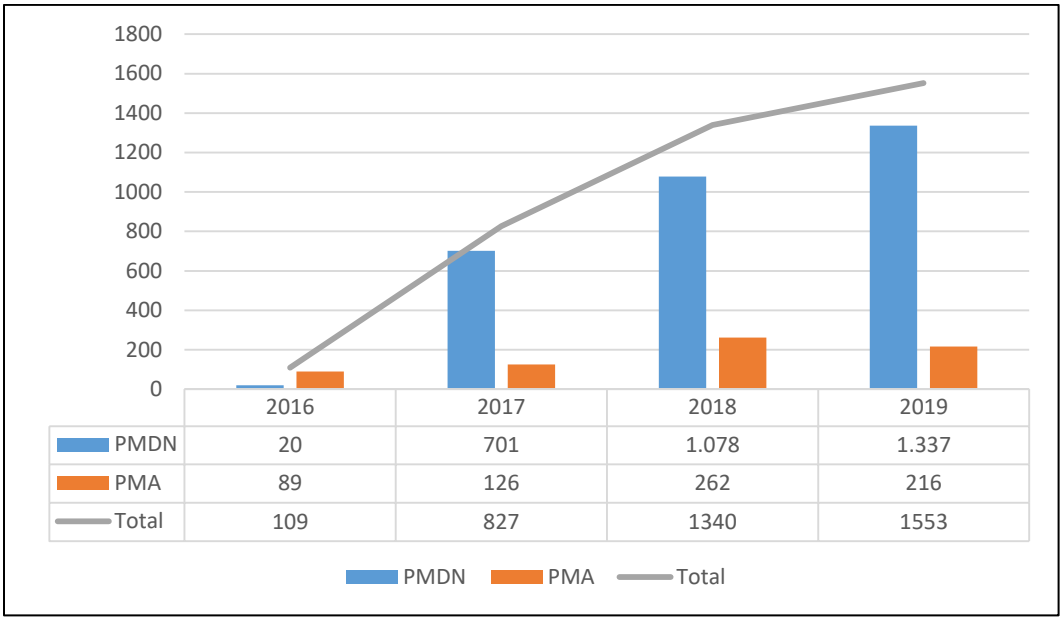
Berdasarkan data di atas, jumlah UMKM di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 sebanyak 105.520 UMKM. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, maka diketahui bahwa Kecamatan Cisaat merupakan kecamatan di Kabupaten Sukabumi dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu sekitar 9,01 persen atau sebanyak 9.512 UMKM. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan seiring dengan beroperasinya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). PLUT diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sukabumi untuk membina UMKM di Kabupaten Sukabumi.

11) Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu sumber pembiayaan yang potensial di suatu wilayah. Adanya penanaman modal berskala nasional yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, diharapkan mampu memaksimalkan potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penanaman modal dapat dilihat beberapa indikator seperti jumlah investor berkala nasional, jumlah nilai investasi, serta realisasi investasi PMD yang dibagi berdasarkan sektor.

a) Jumlah Investor Berskala Nasional

Investor berskala nasional di Kabupaten Sukabumi banyak diarahkan pada sektor primer, sekunder, maupun tersier. Sektor primer seperti tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Sektor sekunder seperti berbagai macam industri dan sektor tersier seperti listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan dan refarasi, hotel dan restoran, transportasi, gudang dan komunikasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran serta jasa lainnya. Data jumlah investor berskala nasional pada tahun 2016 hingga tahun 2019 di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.83.



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2021

Gambar 2.83 Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2019

Berdasarkan data di atas, jumlah perusahaan PMA dan PMDN di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 109 perusahaan yang terbagi menjadi 89 perusahaan asing dan 20 lainnya adalah perusahaan dalam negeri. Jumlah perusahaan baik PMA atau PMDN meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2019, jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi mencapai 1.553 perusahaan, dengan perusahaan asing (PMA) sebanyak 216 perusahaan dan perusahaan dalam negeri (PMDN) sebanyak 1.337 perusahaan.

b) Jumlah Nilai Investasi

Jumlah nilai investasi di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Investasi ini berasal dari investasi PMA dan PMDN. Pada tahun 2016, jumlah nilai investasi mencapai Rp 772.803.037.766,00 dan meningkat hingga mencapai Rp 1.465.875.774.338 pada tahun 2020. Data jumlah nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75 Jumlah nilai investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (Rp)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai investasi PMDN	97.967.900.000	354.482.382.138	527.901.368.812	1.019.171.634.413	1.523.064.188.157
Nilai investasi PMA	994.063.000.000	425.962.800.000	614.292.180.000	367.021.543.200	211.651.296.672
Total	1.092.030.900.000	780.445.182.138	1.142.193.548.812	1.386.193.177.613	1.734.715.484.829

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2020

c) Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor

Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor pertumbuhan sektor-sektor di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data dari tahun 2017 hingga tahun 2020 bidang tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan masih menjadi pilihan utama investasi di Kabupaten Sukabumi untuk sektor primer. Jumlah proyek terus meningkat dari tahun 2017-2019. Potensi wilayah pesisir Sukabumi masih perlu diperhatikan agar menarik investor untuk berinvestasi di bidang perikanan. Namun demikian, jika dilihat dari nilai investasi, terjadi penurunan nilai investasi pada sektor primer dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 nilai investasi untuk sektor primer mencapai 48,93 Milyar Rupiah. Nilai tersebut turun dari tahun 2018 yang mencapai 145,28 M. Di sektor sekunder, nilai investasi terbesar Kabupaten Sukabumi ada pada bidang industri kimia dan farmasi, yang diikuti industri makanan di peringkat kedua.

Nilai investasi sektor sekunder mengalami kenaikan setiap tahun, hingga mencapai 140,85 M pada tahun 2019 dari sebelumnya 10,86 M di tahun 2017. Sementara itu, investasi di sektor tersier mengalami penurunan signifikan di tahun 2019 setelah sempat naik di tahun 2018. Semakin berkembangnya teknologi, banyaknya jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Sukabumi, Investasi di bidang transportasi, gudang dan telekomunikasi menjadi yang paling besar di sektor tersier. Data realisasi nilai investasi PMDN berdasarkan sektor di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2017 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Kabupaten Sukabumi tahun 2017-2020

PMDN		2017		2018		2019		2020	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Sektor Primer	Tanaman pangan, prkebunan, dan peternakan	2	8.294,60	7	141.682,60	18	48.933,40	9	n.a
	Perikanan			1	3.600,00	1	0	1	n.a
	Pertambanagn							1	n.a
	Total sektor	2	8.294,60	8	145.282,60	19	48.933,40	11	n.a
Sektor Sekunder	Industri makanan	5	1.770,00	7	29.774,60	7	1.116,70	6	n.a
	Industri tekstil	2	0	2	0	5	0	1	n.a
	Industri kayu								
	Industri kertas dan percetakan	1	1.316,00			1	0	1	n.a
	Industri kimia dan farmasi			2	11.410,00	4	138.736,90	4	n.a
	Industri karet dan plastik	2	0	1	0	1	0	1	n.a
	Industri mineral non logam	1	0	1	0	1	0	1	n.a
	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya	2	2.353,00			2	0		
	Industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam	3	3,750,00	1	0	5	0		
	Industri lainnya	4	1.495,00	2	0	2	0	3	n.a
	Total sektor	20	10.684,00	16	41.184,60	28	140.853,60	17	n.a
Sektor Tersier	Listrik, gas dan air	6	60.140,80	6	41.184,60	5	4	1	n.a
	Konstruksi					2	32,9	6	n.a
	Perdagangan dan reparasi	1	0	1	4.446,30	5	0	20	n.a
	Hotel dan restoran					1	0	2	n.a
	Transportasi, gedung dan telekomunikasi	1	0	1	130.774,40	1	0		
	Total sektor	8	60.140,80	8	165.237,50	20	28.328,20	29	n.a
	Total	30	79.119,40	32	351.704,70	67	218.169,20	57	n.a

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021

12) Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi secara kontinyu mempublikasikan buku publikasi "Kabupaten Sukabumi Dalam Angka" dan "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi" sebagai bagian dari partisipasi pelaksanaan pembangunan daerah. Publikasi statistik tersebut digunakan sebagai landasan bagi perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan Kabupaten Sukabumi oleh *stakeholders* terkait. Berdasarkan publikasi tersebut, BPS sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 konsisten selalu menerbitkan setiap tahunnya. Adapun data publikasi buku statistic di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77 Publikasi Buku Statistik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Buku Kabupaten Sukabumi Dalam Angka	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Buku PDRB Kabupaten Sukabumi	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021

13) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan referensi pendidikan baik formal maupun informal. Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan di suatu daerah sangatlah penting. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan jumlah koleksi buku.

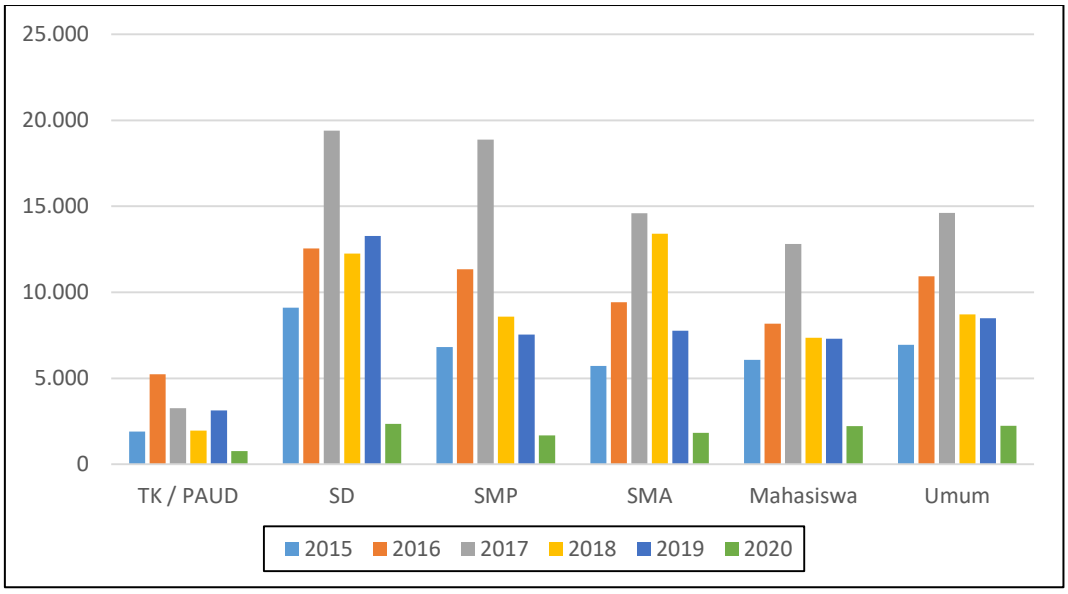
a) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Status pengunjung perpustakaan di Kabupaten Sukabumi terdiri dari RK/Paud, SD. SMP, SMA, Mahasiswa, dan Umum. Data jumlah pengunjung perpustaakan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.78 dan Gambar 2.84.

Tabel 2.78 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2020

Tahun	Status Pengunjung						Total Pengunjung
	TK/ PAUD	SD	SMP	SMA	Mahasiswa	Umum	
2015	1.903	9.115	6.822	5.724	6.081	6.943	36.588
2016	5.238	12.561	11.346	9.423	8.185	10.927	57.680
2017	3.268	19.409	18.877	14.594	12.804	14.614	83.566
2018	1.970	12.257	8.594	13.400	7.351	8.709	52.281
2019	3.128	13.274	7.554	7.771	7.310	8.497	47.534
2020	773	2.352	1.678	1.838	2.225	2.238	11.104
Rata-rata per tahun							**48.125**

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021

Gambar 2.84 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2020

Berdasarkan data di atas, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Sukabumi cenderung fluktuatif. Total pengunjung tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 83.566 pengunjung. Sementara itu, total pengunjung terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 36.588 pengunjung. Rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun yaitu sebesar 55.530 pengunjung. Jumlah pengunjung terbanyak dari tahun 2015-2017 dan

tahun 2019 merupakan siswa SD, sedangkan pada tahun 2018, jumlah pengunjung terbanyak merupakan siswa SMA. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan perpustakaan tercatat hingga bulan maret oleh BPS, karena dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi jumlah kunjungan perpustakaan karena pengurangan aktivitas dan diberlakukannya belajar dari rumah.

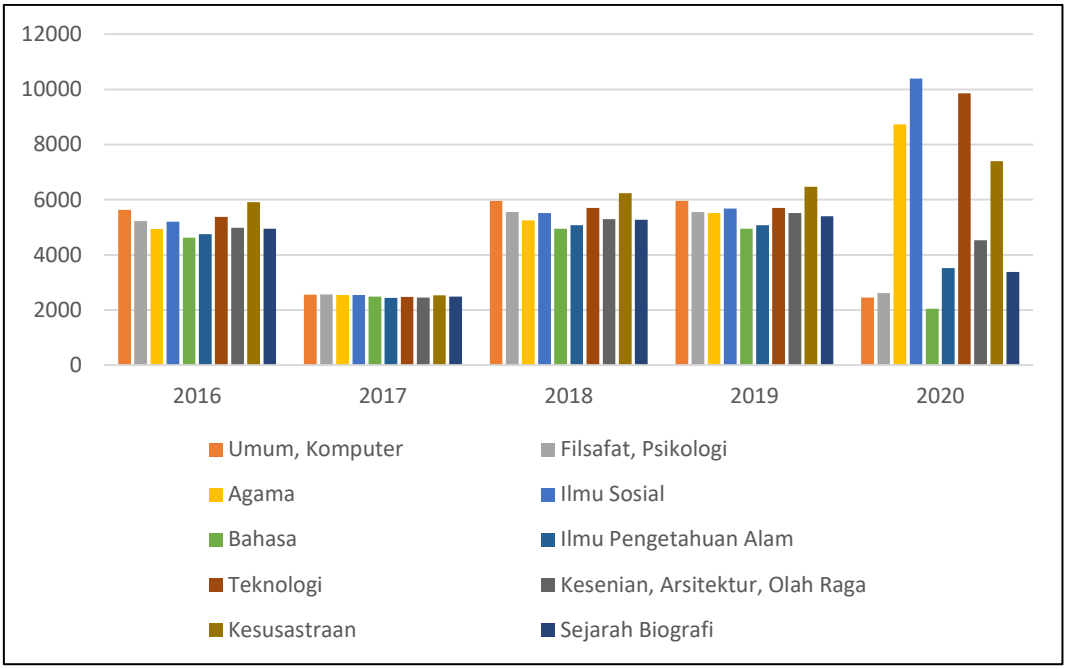
b) Jumlah Koleksi Buku

Tersedianya berbagai jenis buku di perpustakaan dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Sukabumi terdiri dari berbagai macam jenis buku, seperti buku pengetahuan umum, komputer, filsafat, psikologi, agama, ilmu sosial, bahasa, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), teknologi, kesenian, arsitektur, olahraga, kesusastraan, sejarah biografi, dan referensi. Jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.79 dan Gambar 2.85.

Tabel 2.79 Jumlah Koleksi Buku di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020

Jenis Buku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umum, Komputer	2.633	5.635	2.562	5.955	5.955	2.455
Filsafat, Psikologi	3.433	5.230	2.570	5.550	5.550	2.613
Agama	5.527	4.933	2.545	5.253	5.517	8.733
Ilmu Sosial	6.106	5.203	2.550	5.523	5.679	10.396
Bahasa	3.266	4.627	2.491	4.947	4.947	2.042
IPA	3.618	4.753	2.446	5.073	5.073	3.522
Teknologi	6.384	5.383	2.471	5.703	5.703	9.858
Kesenian, Arsitektur, Olah raga	4.829	4.978	2.451	5.298	5.514	4.527
Kesusastraan	7.381	5.914	2.535	6.234	6.474	7.394
Sejarah Biografi	3.872	4.949	2.490	5.269	5.398	3.380
Referensi	1.556	-	-	-	-	-
Total	**48.605**	**51.605**	**25.111**	**54.805**	**55.810**	**54.920**

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021 (diolah)

Gambar 2.85 Jumlah Koleksi Buku Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2015, 2016, 2018 dan tahun 2019 jenis buku dengan koleksi terbanyak adalah buku kesusastraan dengan jumlah masing-masing pertahun adalah 7.381, 5.914, 6.234, dan 6.474 buku. Pada tahun 2020 jumlah buku terbanyak yaitu buku sosial dengan jumlah 10.396 eksemplar dan buku dengan jumlah paling sedikit yaitu buku bahasa yaitu hanya sebanyak 2.042 eksemplar.

14) Keagamaan

Agama yang dianut oleh penduduk kabupaten sukabumi yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Penduduk Kabupaten Sukabumi sebagian besar menganut agama islam, dimana pada tahun 2020 penduduk yang beragama islam sebanyak 2.388.237 jiwa, penduduk yang beragama kristen protestan sebanyak 40.608 jiwa, penduduk yang beragama katolik sebanyak 6.806 jiwa, penduduk yang beragama budha sebanyak 8.192 jiwa dan penduduk yang beragama hindu sebanyak 15 jiwa. Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan memberikan andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pengembangan kehidupan beragama maka pembangunan yang akan datang perlu kebijakan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Jumlah penganut agama di Kabupaten

Sukabumi tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80 Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Sukabumi tahun 2017-2020 (jiwa)

Agama	2017	2018	2019	2020
Islam	2.528.384	2.543.277	2.563.583	2.388.237
Kristen Protestan	5.651	5.570	5.649	40.608
Katolik	1.814	1.815	1.855	6.806
Hindu	49	52	53	15
Budha	673	694	722	8.192

Sumber: Kabupaten Sukabumi dalam Angka (2017-2019); Provinsi Jawa Barat dalam Angka (2020), 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Besarnya potensi kewilayahan yang dimiliki Kabupaten Sukabumi menjadikan setiap fokus layanan pilihan memiliki integrasi yang cukup signifikan pada pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut fokus layanan urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

A. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang memiliki potensi sangat tinggi di Kabupaten Sukabumi. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dari perkembangan wistawan yang berkunjung, perkembangan jumlah hotel/penginapan dan perkembangan fasilitas akomodasi lainnya.

a) Kunjungan Wisata

Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai jenis objek wisata seperti wisata alam, buatan, maupun minat khusus. Data jumlah objek wisata berdasarkan jenisnya yang terdapat di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81 Jumlah Obyek Wisata Menurut Jenisnya di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020

Jenis Wisata	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Alam	34	41	49	44	47	47
Buatan	8	8	8	8	7	7
Minat Khusus	8	8	8	8	6	6
Total	**50**	**57**	**65**	**60**	**60**	**60**

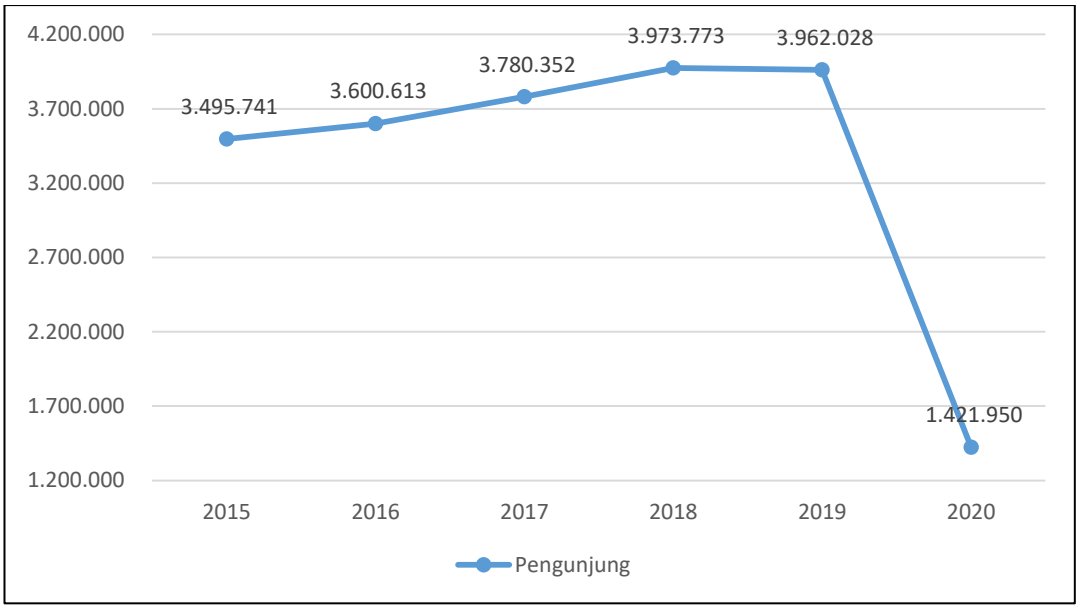
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2021

Berdasarkan data di atas, jenis wisata dengan jumlah terbanyak setiap tahunnya adalah jenis wisata alam. Jenis wisata alam ini didominasi oleh objek wisata pantai karena Kabupaten Sukabumi berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Objek wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi mampu mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara. Jumlah total kunjungan wisatawan di Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2019, namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2015, jumlah total kunjungan wisatawan sebesar 3.495.741 pengunjung dan mengalami peningkatan menjadi 3.962.028 pengunjung pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kunjungan wisata ke Kabupaten Sukabumi menurun sebanyak 2.540.078 pengunjung. Hal tersebut merupakan dampak dari penurunan aktivitas pariwisata akibat penyebaran Covid-19. Data jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.82 dan Gambar 2.86.

Tabel 2.82 Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Sukabumi tahun 2015 - 2020

Wisatawan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mancanegara	**115.548**	**115.547**	**122.810**	**127.145**	**130.960**	**2.226**
Menginap	50.455	103.993	108.802	110.549	99.055	1.640
Tidak Menginap	65.093	11.554	14.008	16.596	31.905	586
Domestik	**3.380.193**	**3.485.066**	**3.657.767**	**3.719.483**	**3.831.068**	**1.419.724**
Menginap	829.083	1.394.027	1.490.479	1.512.631	2.614.240	680.942
Tidak Menginap	2.551.110	2.091.039	2.167.288	2.206.852	1.216.828	738.782
Total	**3.495.741**	**3.600.613**	**3.780.577**	**3.846.628**	**3.962.028**	**1.421.950**

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2021

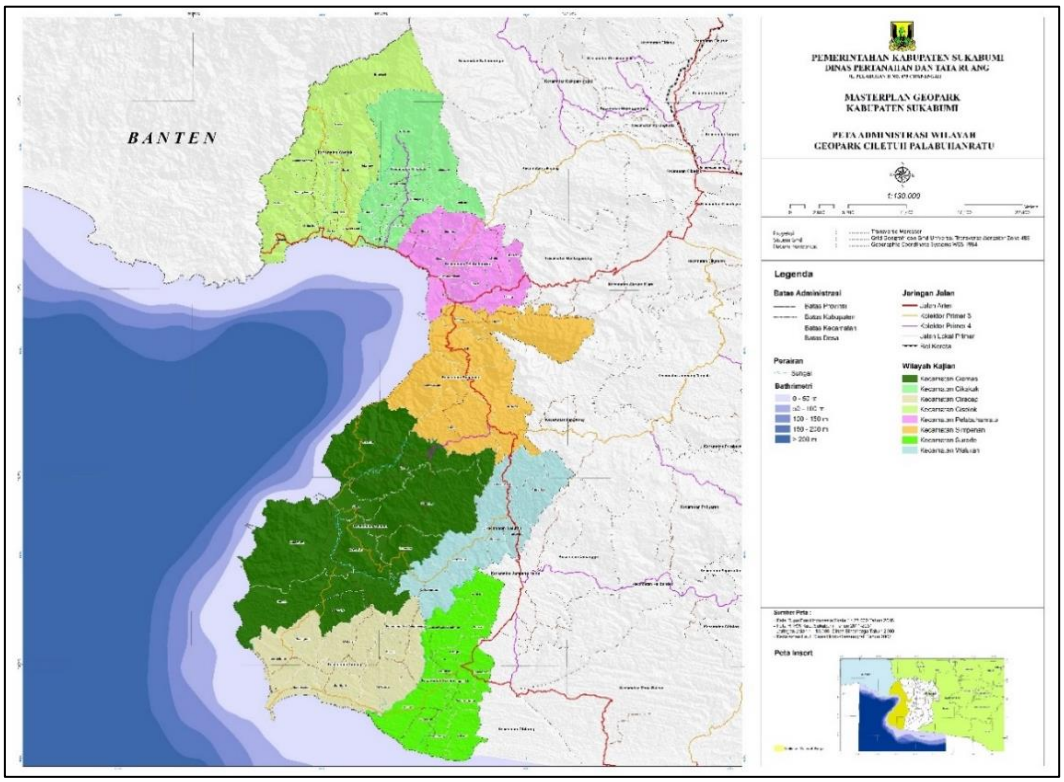


Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.86 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2020

Salah satu objek wisata alam di Kabupaten Sukabumi yaitu, *Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu. Geopark Ciletuh-Palabuhanratu merupakan salah satu warisan bumi yang dimiliki oleh Indonesia khususnya Kabupaten Sukabumi. Memiliki luas 126.100 Ha atau 1.261 Km^2 yang meliputi 74 desa di delapan kecamatan yaitu Kecamatan Ciracap, Surade, Ciemas, Waluran, Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak, dan Cisolok. Berfokus pada pengembangan potensi yang ada dengan orientasi pada edukasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat diharapkan keberadaan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu yang telah ditetapkan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark sejak tahun 2018 dapat memberikan nilai

tambah. Pengembangan Geopark, selain dari manfaat yang diperoleh pada poin diatas juga guna mewujudkan pelestarian warisan geologi (*Geoheritage*), keanekaragaman hayati (*Biodiversity*), dan keragaman budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari *Pentahelix*. Adapun peta wilayah Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark* dapat dilihat pada Gambar 2.87.



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.87 Wilayah Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark*

Mengacu pada terminologi dalam dokumen Masterplan CPUGGp, terdapat 26 *Geosite* yang meliputi *Geosite* Puncak Habibie, *Geosite Geyser* Cisolok, *Geosite* Kawasan Cisolok-Cikakak, *Geosite* Kawasan Pantai Palabuhanratu, *Geosite* Gua Lalay, *Geosite* Plato Jampang, *Geosite* Teluh Ciletuh, *Geosite* Gunung Badak, *Geosite* Legon Pandan, *Geosite* Batu Naga, *Geosite* Gunung Beas, *Geosite* Sodong Parat, *Geosite* Pasir Luhur, *Geosite* Pantai Citirem, *Geosite* Pantai Pangumbahan, *Geosite* Ujung Genteng, *Geosite* Muara Cikarang, *Geosite* Pantai Karang Bolong, *Geosite* Gua Gunung Sungging, *Geosite* Curug Luhur Cigangsa, *Geosite* Leuwikenit,

Geosite Morfologi Amfiteater Ciletuh, *Geosite* Curug Puncak Manik, *Geosite* Taman Batu Waluran, *Geosite* Bunker dan Kekar Kolom Waluran, dan *Geosite* Curug Gentong.

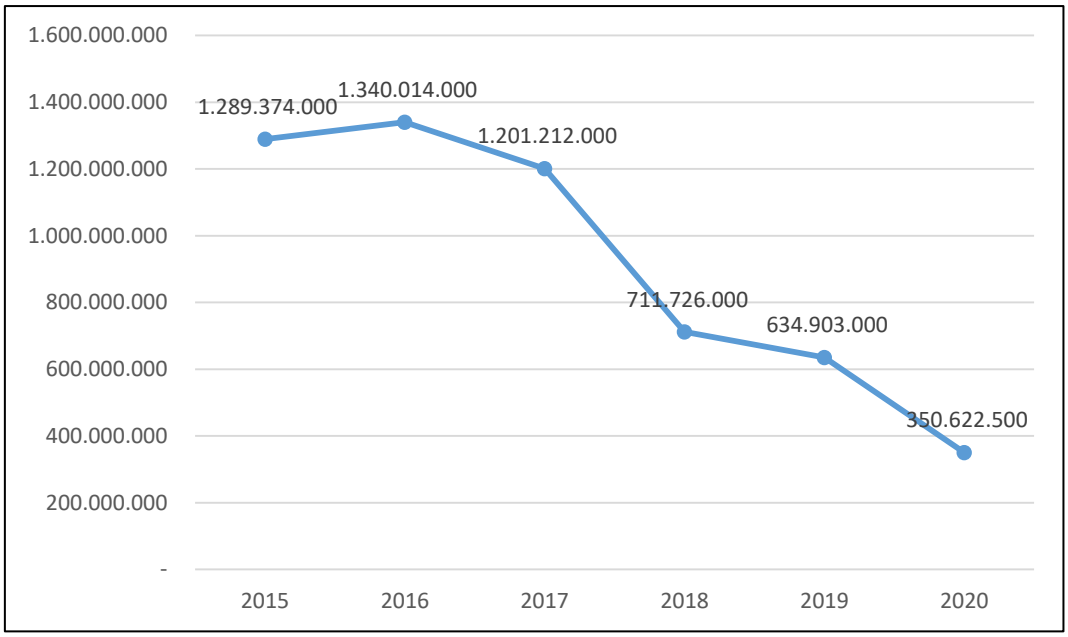
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019, pengembangan geopark perlu mengintergrasikan seluruh aspek guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Suistainable Development Goals*/SDG's). Terdapat 10 dari 17 tujuan dalam agenda PBB yang disepakati untuk pengembangan SDG's terhadap Global Geopark adalah merupakan agenda utama secara universal pengembangan geopark diseluruh dunia.

Melalui visi Geopark Ciletuh-Palabuhanratu yakni Terwujudnya Geopark Ciletuh-Palabuhanratu sebagai Destinasi Berkelas Dunia Yang Berbasis Konservasi, Edukasi dan Pembangunan Berkelanjutan maka diharapkan destinasi yang berkelas dunia mengingat di dalam kawasan Geopark terdapat beberapa objek dan daya tarik destinasi. Diharapkan dengan tujuan destinasi yang berkelas dunia, maka membawa dampak terhadap daya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara di Ciletuh-Palabuhanratu, meningkatkan pemahaman masyarakat dan wisatawan terhadap nilai signifikan geologi, biologi dan budaya dengan nilai-nilai konservasi, edukasi dan pembangunan berkelanjutan. Diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan mendorong kontribusi seluruh pihak terhadap Geopark Ciletuh-Palabuhanratu dalam hal menjaga kelestariannya. Selain itu, bersamaan dengan potensi yang ada. Pengembangan kawasan CPUGGp yang mengacu pada potensi wilayah secara langsung beririsan dengan pengembangan pertanian, perikanan dan pariwisata yang menjadi salah satu misi pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Sehingga diharapkan hal tersebut dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.

b) PAD Sektor Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Walaupun demikian, PAD sektor pariwisata sempat mengalami peningkatan pada tahun 2016. Pada tahun 2015, PAD sektor pariwisata

mencapai Rp.1.289.374.000 dan menurun menjadi Rp.350.622.500 pada tahun 2020. Capain PAD sektor pariwisata terbesar terjadi pada tahun 2016 yang mencapai Rp.1.340.014.000. Data capaian PAD sektor pariwisata di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.88.



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.88 Capaian PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2020

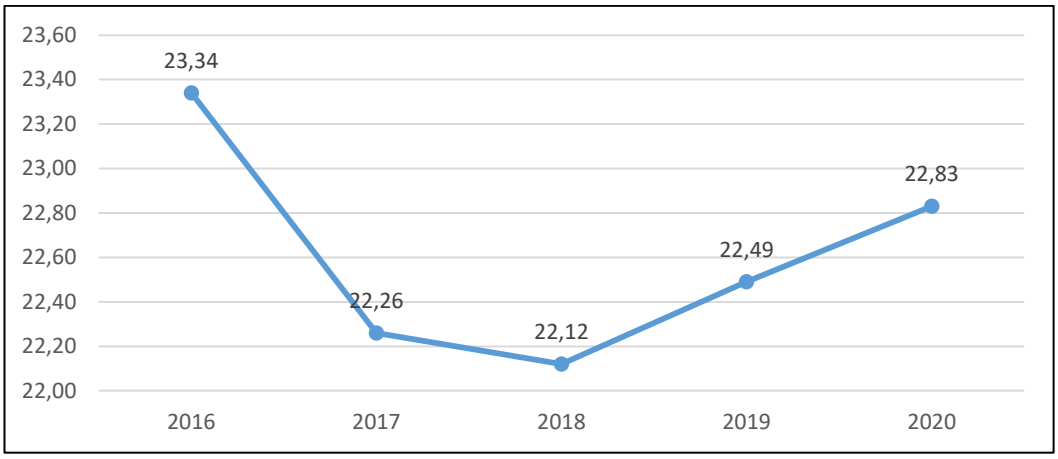
B. Pertanian

Pertanian merupakan sektor yang menjadi unggulan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Potensi pertanian di Kabupaten Sukabumi sebagian besar pada komoditas tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pertanian dapat dilihat beberapa indikator seperti kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, produktivitas padi per hektar, produktivitas bahan pangan lainnya per hektar, serta rumah tangga usaha pertanian.

a) Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Sukabumi, sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi. Data persentase kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB di Kabupaten

Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.89.

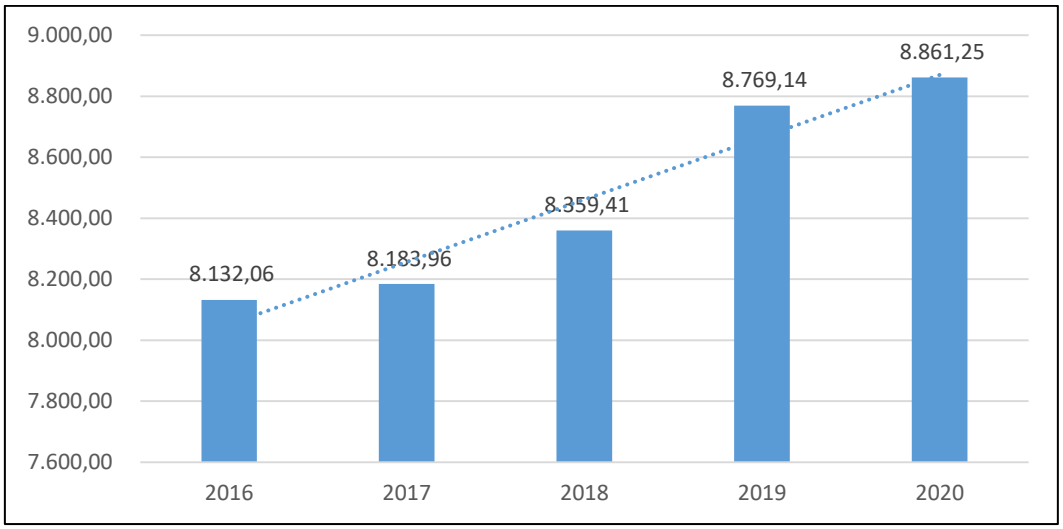


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021 (diolah)

Gambar 2.89 Persentase Kontribusi Bidang Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Berdasarkan data di atas, kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi selama lima tahun terakhir cenderung memiliki tren yang fluktuatif, namun masih menjadi sumbangan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi yaitu di atas 22 persen. Pada tahun 2018, persentase kontribusi bidang pertanian sebesar 22,12 persen dan merupakan titik terendah persentase kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi selama sepuluh tahun terakhir.

Walaupun persentase kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan, nilai PDRB sektor pertanian mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Pertanian pada tahun 2016 sebesar 8,13 Milyar Rupiah, kemudian terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 8,86 Miliar. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB beriringan dengan peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor-sektor yang lainnya. Walaupun demikian, kondisi tersebut tetap positif karena menunjukkan adanya perkembangan untuk menciptakan *added value* dari hasil pertanian melalui industri pengolahan dan lapangan usaha yang lainnya. Tren perkembangan PDRB Sub Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.90.



Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2021 (diolah)

Gambar 2.90 PDRB Sub Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

b) Produktivitas Padi per Hektar

Analisis produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya di suatu wilayah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Data produktivitas padi sawah dan padi gogo per hektar di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.83.

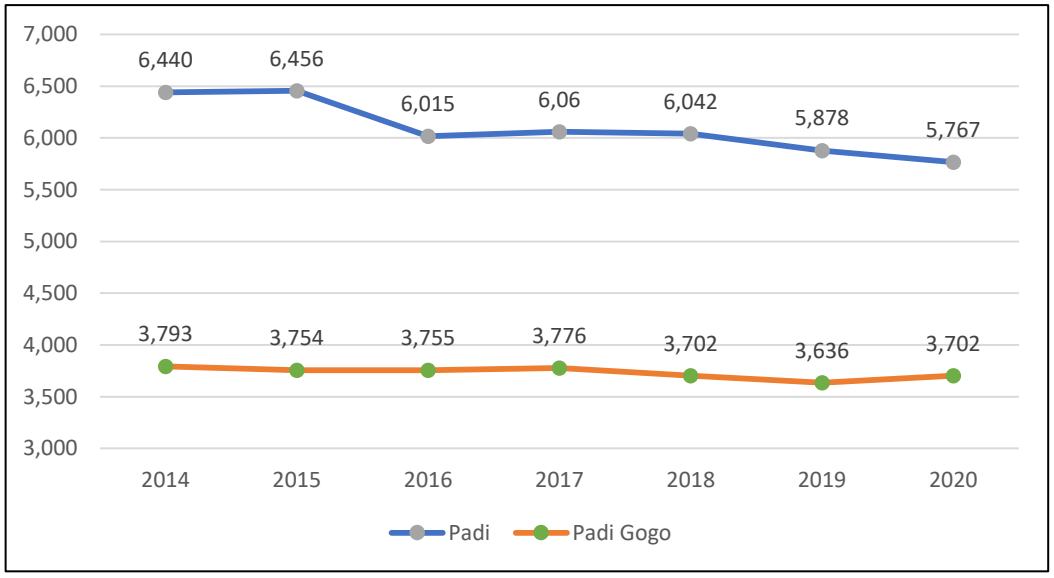
Tabel 2.83 Produktivitas Padi Sawah dan Padi Gogo per Hektar Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi padi (ton)	868,014	841,183	837,016	802.369	817,787
Luas panen padi bersih (Ha)	144,316	138,818	138,522	136.500	141,814
Produktivitas padi (ton/Ha)	**6,015**	**6,060**	**6,042**	**5,878**	**5,767**
Produksi padi gogo (ton)	95,911	79,712	82,111	104.257	113,547
Luas panen padi gogo bersih (Ha)	25,539	21,109	22,181	28.670	31,208

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Produktivitas padi gogo (ton/Ha)	**3,755**	**3,776**	**3,702**	**3,636**	**3,702**

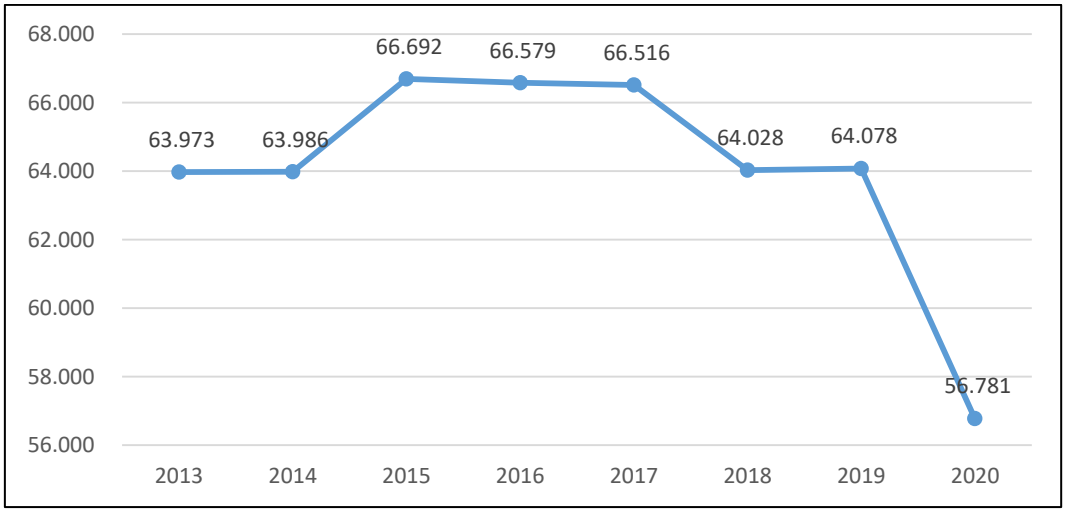
Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.83, produktivitas padi di Kabupaten Sukabumi cenderung menurun hingga tahun 2020. Nilai produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan nilai produktivitas sebesar 6,060 ton/Ha. Sementara itu, nilai produktivitas terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai produktivitas sebesar 5,767 ton/ha. Selain padi sawah, terdapat padi yang ditanam pada area lahan kering yang disebut dengan padi gogo. Produktivitas padi gogo di Kabupaten Sukabumi cenderung fluktuatif setiap tahunnya namun penurunan maupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Nilai produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan nilai produktivitas sebesar 3,776 ton/Ha. Sementara itu, nilai produktivitas terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai produktivitas sebesar 3,636 ton/ha. Nilai produktivitas tidak berbanding lurus dengan luasan panen padi gogo bersih. Data produktivitas padi dan padi gogo per hektar serta luas lahan sawah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.91 dan Gambar 2.92.



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021

Gambar 2.91 Produktivitas Padi dan Padi Gogo per Hektar Kabupaten Sukabumi tahun 2014-2020



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021 (diolah)

Gambar 2.92 Luas Lahan Sawah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2020

Komoditas padi menjadi perhatian serius bagi Kabupaten Sukabumi. Salah satu cara mempertahankan komoditas padi adalah mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan industri. Luas lahan sawah di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020 akibat alih fungsi lahan.

c) Produktivitas Bahan Pangan Lainnya per Hektar

Di samping komoditas padi dan ubi kayu, bahan pangan lain di Kabupaten Sukabumi yang potensial adalah jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi jalar, ubi kayu dan kacang hijau. Di antara bahan pangan tersebut, yang memiliki produktivitas terbesar adalah ubi kayu dan ubi jalar. Produktivitas jagung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun besaran produkstivitasnya cenderung stabil, yaitu selalu di atas 6 ton/ha. Produktivitas kedelai cenderung fluktuatif setiap tahunnya dan besaran produktivitasnya berada pada kisaran 1,2 – 1,7 ton/Ha. Kecamatan yang menjadi lokasi produksi kedelai diantaranya Kecamatan Tegalbuleud, Surade, Jampangtengah, Cibitung, Ciracap dan Ciemas.

Produktivitas ubi jalar cenderung fluktuatif setiap tahunnya dengan produktivitas berada pada kisaran 15 – 16 ton/ha. Kondisi tersebut terjadi pula pada produktivitas kacang tanah yang fluktuatif dan berada pada kisaran 1,5 – 1,6 ton/ha. Di samping itu, produktivitas ubi kayu cenderung meningkat setiap tahunnya walaupun sempat terjadi penurunan pada

tahun 2016. Besaran produktivitas ubi kayu berada pada kisaran 20,5 – 24,2 ton/ha. Hal ini berbeda dengan komoditas kacang hijau yang memiliki produktivitas menurun dari 1,5 ton/ha pada tahun 2014 menjadi 1,2 ton/ha pada tahun 2020. Data produktivitas bahan pangan lainnya per hektar di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2014 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.84.

Tabel 2.84 Produktivitas Bahan Pangan Lainnya per Hektar Kabupaten Sukabumi sahun 2014-2020

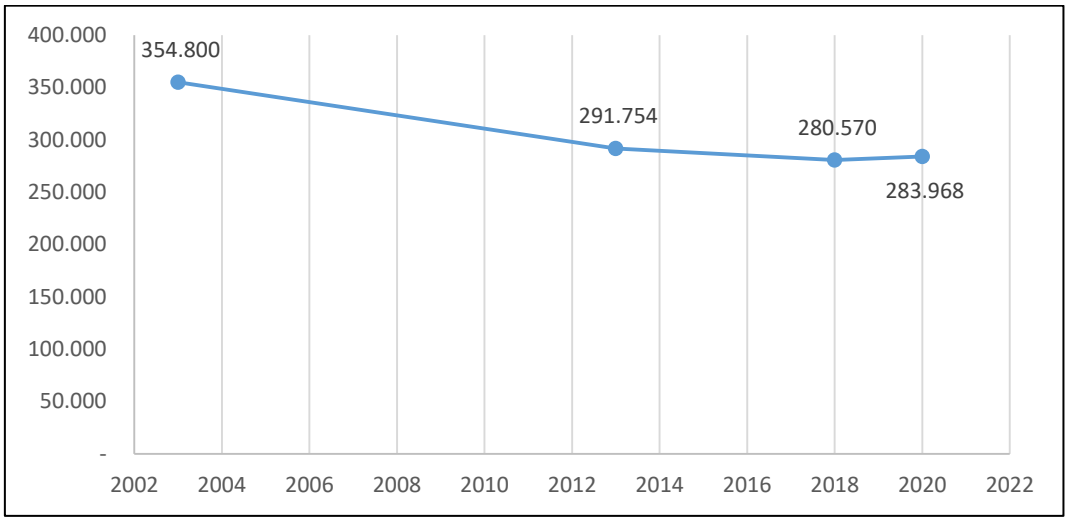
Jenis Bahan Pangan	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jagung	Produksi (ton)	34.993	38.424	112.603	64.714	98.825	n.a	175.864
	Luas panen (Ha)	5.679	6.168	17.484	9.919	n.a	n.a	31.943
	Produktivitas (ton/Ha)	**6,16**	**6,23**	**6,44**	**6,52**	n.a	n.a	5,49
Kedelai	Produksi (ton)	18.127	10.922	6.905	4.228	35.092	n.a	n.a
	Luas panen (Ha)	11.124	6.720	4.030	2.447	28.586	n.a	n.a
	Produktivitas (ton/Ha)	**1,63**	**1,63**	**1,71**	**1,73**	**1,23**	n.a	**n.a**
Ubi jalar	Produksi (ton)	18.093	13.856	10.712	13.339	12.255	n.a	14.140
	Luas panen (Ha)	1.172	893	669	836	770	n.a	911
	Produktivitas (ton/Ha)	**15,44**	**15,52**	**16,01**	**15,96**	**15,92**	n.a	**15,798**
Kacang tanah	Produksi (ton)	9.478	8.023	5.233	3.235	4.016	n.a	6.514
	Luas panen (Ha)	5.980	4.904	3.228	1.991	2.471	n.a	2471
	Produktivitas (ton/Ha)	**1,58**	**1,64**	**1,62**	**1,62**	**1,63**	n.a	**1,648**
Ubi kayu	Produksi (ton)	165.520	153.381	135.493	137.385	98.552	n.a	119.117
	Luas panen (Ha)	7.923	7.463	6.597	6.612	4.727	n.a	4.923
	Produktivitas (ton/Ha)	**20,89**	**20,55**	**20,54**	**20,78**	**20,85**	n.a	**24,196**
Kacang hijau	Produksi (ton)	1.723	1.665	682	13	682	n.a	833
	Luas panen (Ha)	1.147	1.045	428	8	428	n.a	428
	Produktivitas (ton/Ha)	**1,50**	**1,59**	**1,59**	**1,63**	**1,59**	n.a	**1,233**

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021

d) Rumah Tangga Usaha Pertanian

Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Sukabumi dalam 15 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2003 terdapat 354.800 rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Sukabumi. Jumlah tersebut menurun menjadi 280.570 rumah tangga pada tahun 2018, walaupun meningkat Kembali pada tahun 2020 menjadi 283.968 rumah

tangga. Penurunan jumlah rumah tangga pertanian tersebut menunjukkan bahwa banyak rumah tangga yang berganti mata pencaharian dari pertanian ke sektor usaha yang lain. Ada beberapa hal yang menjadi faktor turunnya jumlah rumah tangga usaha pertanian diantara faktor utamanya adalah nilai tukar petani. Tren penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2003, 2013, 2018 dan 2020 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.93.



Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2021 (diolah)

Gambar 2.93 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2003, 2013, 2018 dan 2020

C. Kehutanan

Kawasan hutan merupakan kawasan penting dalam menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kehutanan dapat dilihat beberapa indikator seperti rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan dan luas lahan hutan rakyat.

a) Rasio Luas Kawasan Lindung Terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah dapat tetap berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Rasio hutan kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 hanya sebesar 1,14 persen.

Keberadaan hutan lindung ini harus dijaga agar luasannya tidak berkurang, sehingga tidak mengganggu fungsi ekologisnya. Data luas kawasan hutan KPH di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85 Luas Kawasan Hutan KPH di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (Ha)

Jenis Hutan	2016	2017	2018	2019	2020
Lindung (Ha)	667,43	667,43	667,43	n.a	667,43
Produksi (Ha)	57.828,10	57.828,10	57.828,10	n.a	57.828,10
Jumlah total kawasan hutan	58.495,53	58.495,53	58.495,53	n.a	58.495,53
Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan (%)	1,14	1,14	1,14	n.a	1,14

Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021

b) Luas Lahan Hutan Rakyat

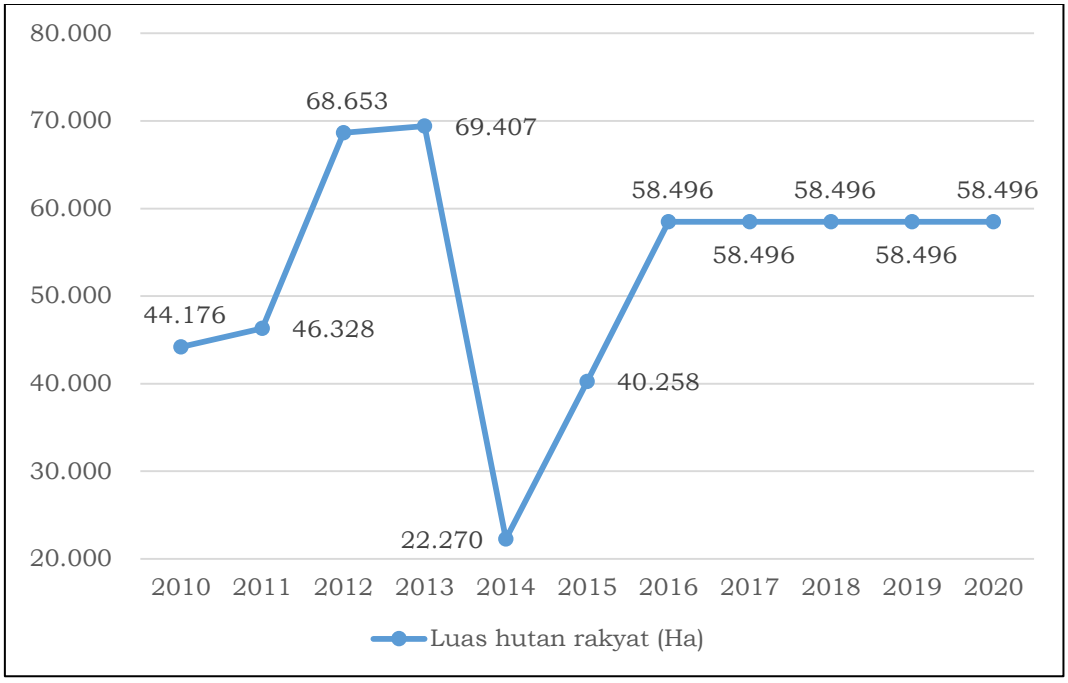
Kehutanan memiliki peran secara ekonomi, sosial ekonomi, dan lingkungan. Hutan rakyat apabila dikelola secara benar dan dalam skala besar dapat menjadi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan kayu. Luas lahan hutan rakyat di Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan pada tahun 2010 hingga tahun 2013, yaitu dari 44.175,68 ha menjadi 69.406,83 ha. Namun demikian, jumlah tersebut turun drastis pada tahun 2014 menjadi seluas 22.270,09 ha. Pada tahun 2015 hingga tahun 2020, luas hutan rakyat meningkat kembali menjadi seluas 58.495,53 ha. Luasan hutan rakyat tersebut sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung tetap dan tidak bertambah ataupun berkurang. Data luas hutan rakyat di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2010 hingga tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.86 dan Gambar 2.94.

Tabel 2.86 Luas hutan rakyat di Kabupaten Sukabumi tahun 2010-2020 (Ha)

Tahun	Luas Hutan Rakyat (Ha)
2010	44.175,68
2011	46.327,68
2012	68.653,28

Tahun	Luas Hutan Rakyat (Ha)
2013	69.406,83
2014	22.270,09
2015	40.257,81
2016	58.495,53
2017	58.495,53
2018	58.495,53
2019	58.495,53
2020	58.495,53

Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2021



Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.94 Luas Kawasan Hutan KPH di Kabupaten Sukabumi tahun 2010-2018 (Ha)

D. Energi dan Sumber Daya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan energi dan sumber daya mineral dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rumah tangga pengguna listrik, rasio ketersediaan daya listrik, serta pertambangan tanpa izin.

a) Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupakan energi yang dibutuhkan mendukung berbagai kegiatan manusia. Berdasarkan data dari tahun 2016 hingga tahun 2018, jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Sukabumi cenderung fluktuatif. Namun demikian, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Sukabumi telah menjadi pengguna listrik. Data rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87 Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2018

Indikator	2016	2017	2018
Rumah tangga pengguna listrik	3.881.264	6.999.109	1.689.349

Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2019

b) Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 adalah sebesar 0,96. Rasio tersebut menurun menjadi 0,91 di tahun 2021 dengan asumsi daya listrik yang terpasang tidak bertambah. Data rasio tersebut menunjukkan bahwa daya listrik yang terpasang saat ini belum mampu memenuhi proyeksi jumlah kebutuhan listrik sehingga perlu dilakukan upaya agar kebutuhan daya listrik tercukupi. Data rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2021

Indikator	Tahun	
	2020	2021
Daya listrik terpasang (MVA)	1.057,21	1.057,21
Proyeksi jumlah kebutuhan (MVA)	1.100,50	1.162,80
Rasio ketersediaan daya listrik	0,96	0,91

Sumber: Dinas Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi, 2021

c) Pertambangan Tanpa Izin

Hingga tahun 2019 masih terdapat beberapa penambangan ilegal atau penambangan tanpa izin di Kabupaten Sukabumi. Lokasi penambangan tanpa izin tersebut tersebar dibeberapa kecamatan dan desa di

Kabupaten Sukabumi. Sebagian dari lokasi penambagan ilegal tersebut sudah mengajukan izin ke Provinsi Jawa Barat dan sebagian masih melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Data lokasi pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89 Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Sukabumi

Lokasi		Komoditas bahan galian			Estimasi luas (Ha)	Keterangan
Kecamatan	Desa	Mineral logam	Mineral bukan logam	Batuan		
Waluran	Waluran mandiri	Emas			0,2 - 2,5	Lokasi kegiatan ilegal mining spot-spot
	Sukamukti			Andesit	0,89	
Ciemas	Mekarjaya dan Ciemas	Emas			1 - 1,5	Lokasi kegiatan ilegal mining spot-spot
	Tamanjaya			Andesit	0,1	Lokasi bekas PIR
Ciracap	Ujunggenteng			Pasir	1,5	Lokasi kegiatan ilegal mining spot-spot di lahan milik warga
	Mekarsakti			Andesit	0,5 - 1	Lokasi kegiatan pada lahan milik warga
Simpenan	Kertajaya dan Cihaur	Emas			0,2 - 3	Lokasi kegiatan ilegal mining spot-spot
	Cidadap dan Loji			Pasir dan batu	0,01 - 0,5	Ilegal mining di DAS Cidadap dan Cimandiri
Lengkong	Langkapjaya dan Cilangkap	Emas			0,01 - 1,5	Lokasi kegiatan ilegal mining spot-spot di area perhutani dan perkebunan serta tanah milik
Palabuhanratu	Cikadu dan Citarik			Andesit	0,5 - 1	
Cisolok	Cisolok			Pasir dan batu	0,02 - 0,5	Lokasi di Sungai Cisolok dan Cimaja
Cikakak	Sirnarasa			Andesit	0,5 - 1	
	Cisukarame dan Sirnaresmi	Emas			0,02 - 1	Lokasi kegiatan ilegal mining spot-spot
Jampangtengah	Padabeunghar		Batu gamping		0,02 - 2	Lokasi kegiatan ilegal mining berada di tanah milik warga, batugamping untuk dibakar

Lokasi		Komoditas bahan galian			Estimasi luas (Ha)	Keterangan
Kecamatan	Desa	Mineral logam	Mineral bukan logam	Batuan		
						menjadi kapur dan industri semen
Cikembar	Bojongraharja		Zeolit		0,02- 1,5	Lokasi kegiatan ilegal mining berada di lahan/tanah milik warga

Sumber: Dinas Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi, 2019

E. Perdagangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah sarana perdagangan, serta luas lahan dan luas bangunan pasar.

a) Jumlah Sarana Perdagangan

Jenis sarana perdagangan di Kabupaten Sukabumi terdiri dari pasar, ruko, guki, kios, los, counter, auning, dan PTM. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah sarana perdagangan tidak mengalami perubahan yaitu 7.755 unit. Sarana perdagangan tersebut didominasi oleh kios dengan jumlah 4.574 buah. Data jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90 Jenis Sarana Perdagangan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Jenis Sarana Pedagangan	2016	2017	2018	2019	2020
Pasar	12	12	12	12	12
Ruko	167	167	167	167	167
Guki	25	25	25	25	25
Kios	4.574	4.574	4.574	4.574	4.574
Los	2.634	2.634	2..634	2.634	2.634
Counter	279	279	279	279	279
Auning	38	38	38	38	38
PTM	38	38	38	38	38
Jumlah	7.755	7.755	7.755	7.755	7.755

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, 2021

b) Luas Lahan dan Luas Bangunan Pasar

Kabupaten Sukabumi memiliki dua jenis pasar, yaitu pasar desa dan pasar kabupaten. Pasar desa memiliki luas lahan 86.624 m^2 dan luas bangunan sebesar 15.126 m^2, sedangkan pasar kabupaten memiliki luas lahan 132.968 m^2 dan luas bangunan sebesar 22.940,5 m^2. Di pasar kabupaten terdapat

3.433 *outlet* yang terdata di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Di Kabupaten Sukabumi tidak memiliki pasar induk, sehingga berbagai hasil pertanian yang dihasilkan di Kabupaten Sukabumi dipasarkan di pasar induk sekitar wilayah Kabupaten Sukabumi, seperti Pasar Induk TU di Kota Bogor dan Pasar Induk Caringin Bandung. Hal tersebut menyebabkan panjangnya rantai pasok produk pertanian di Kabupaten Sukabumi. Data luas lahan dan luas bangunan pasar di Kabupaten Sukabumi tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91 Luas Lahan dan Luas Bangunan Pasar di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018

Jenis Pasar		Luas (m2)
Pasar Desa	Luas Lahan	86.624
	Luas Bangunan	15.126
Pasar Kabupaten	Luas Lahan	132.968
	Luas Bangunan	22.940,5

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, 2019

F. Perindustrian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan perindustrian dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah industri kecil menengah dan jumlah pelaku usaha mikro kecil.

a) Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)

Di Kabupaten Sukabumi, bidang-bidang IKM dikelompokkan menjadi 3 sektor yaitu sektor primer (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan), sektor sekunder (industri makanan, logam, kerajinan, elektronik, tekstil, klit, batu, kayu, kendaraan, genteng/bata), dan sektor tersier (perdagangan dan reparasi, jasa, dan lainnya). Jumlah IKM di Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 3.632 IKM menjadi 21.081 IKM. Data jumlah IKM berdasarkan bidang usaha di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92 Jumlah IKM Berdasarkan Bidang Usaha di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Bidang Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Agro	583	838	968	9.873	10.822
Non-Agro	3.266	3.566	3.819	9.275	10.259
Total	**3.849**	**4.404**	**4.787**	**19.148**	**21.081**

Sumber : Dinas Perindustrian dan ESDM, 2021

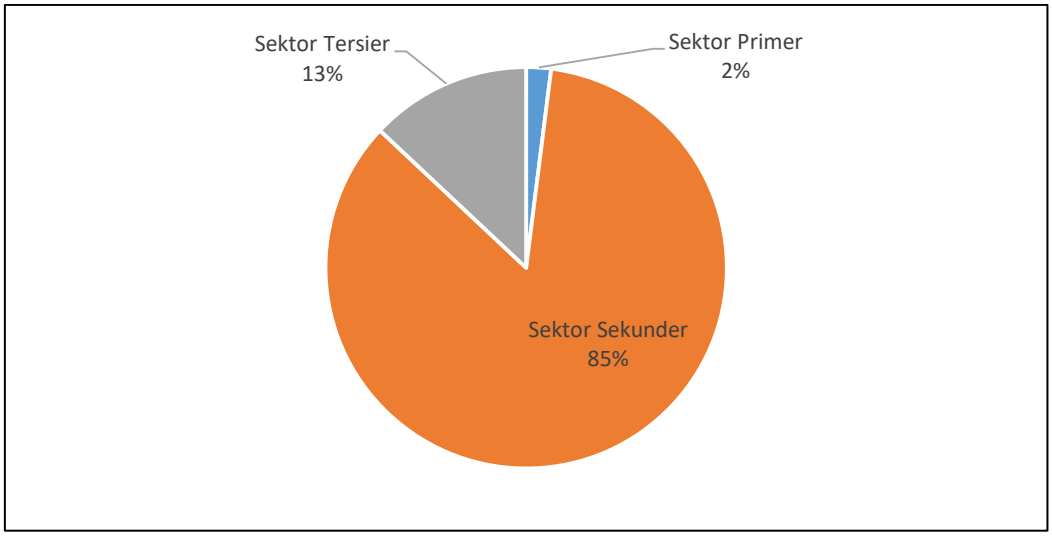
b) Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK)

Persentase jumlah pelaku usaha mikro kecil (PUMK) di Kabupaten Sukabumi meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 52.299 PUMK. Jumlah tersebut merupakan jumlah PUMK tertinggi dalam rengtang waktu tahun 2011 hingga tahun 2020. Sektor tersier memiliki persentase jumlah PUMK sebesar 13 persen. Sektor primer memiliki persentase jumlah PUMK sebesar 2 persen dan merupakan sektor dengan persentase jumlah PUMK terkecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Data jumlah PUMK dan Persentase Jumlah PUMK Berdasarkan Sektor di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2011 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.93 dan Gambar 2.95.

Tabel 2.93 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) Kabupaten Sukabumi tahun 2011-2020

Tahun	Jumlah
2011	6.420
2012	8.346
2013	11.614
2014	19.230
2015	22.642
2016	23.824
2017	24.995
2018	52.299
2019	25.904
2020	105.520

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukabumi, 2021



Sumber : Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi, 2019 (diolah)

Gambar 2.95 Persentase Jumlah PUMK Berdasarkan Sektor di Kabupaten Sukabumi tahun 2018

G. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan transmigrasi dapat dari beberapa indikator seperti jumlah transmigran yang ditempatkan di UPT lokal kabupaten sukabumi dan jumlah transmigran yang ditempatkan di UPT luar pulau jawa.

a) Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Lokal Kabupaten Sukabumi

Jumlah transmigran yang ditempatkan di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Lokal pada tahun 2015 adalah sebanyak 2.581 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 2.415 jiwa Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dan 166 jiwa transmigran eksodan. Jumlah transmigran mengalami peningkatan menjadi 4.849 jiwa pada tahun 2018, yang terdiri dari 3.611 jiwa TPS dan 1.238 jiwa eksodan. Sementara itu, pada tahun 2019 jumlah transmigran sama dengan tahun 2018. Data jumlah transmigran asal Kabupaten Sukabumi yang ditempatkan di UPT lokal di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94 Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Lokal Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020 (jiwa)

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TPS	2.415	3.331	3.138	3.611	3.611	3.842
Eksodan	166	1.242	461	1.238	1.238	-
Total transmigran	2.581	4.573	3.599	4.849	4.849	3.842

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2020

b) Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Luar Pulau Jawa

Selain ditempatkan di UPT lokal di Kabupaten Sukabumi, transmigran asal Kabupaten Sukabumi ada yang ditempatkan di UPT diluar Pulau Jawa. Data jumlah transmigran asal Kabupaten Sukabumi yang ditempatkan di UPT diluar Pulau Jawa pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95 Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Luar Pulau Jawa Tahun 2019

Indikator	UPT Sandalan, Pohuwato, Gorontalo		UPT Metihelino, Gorontalo Utara, Gorontalo	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Realisasi	3	12	2	5
Target	3	12	2	5
Persentase realisasi terhadap target (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, 2019

Berdasarkan data di atas, jumlah total transmigran asal Kabupaten Sukabumi yang ditempatkan di UPT diluar Pulau Jawa pada tahun 2019 sebanyak 5 KK atau 17 jiwa. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 2 UPT yaitu UPT Sandalan sebanyak 3 KK atau 12 jiwa dan UPT Metihelino sebanyak 2 KK atau 5 jiwa. Jumlah realisasi transmigran yang ditempatkan di UPT di luar Pulau Jawa tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditargetkan, sehingga persentasenya mencapai 100 persen.

H. Kelautan dan Perikanan

Sektor Kelautan dan perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya yang akan memberikan dampak signifikan pada perekonomian Kabupaten Sukabumi. Potensi tersebut harus dioptimalkan secara baik dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pengembangan pelabuhan perikanan merupakan langkah

maju dalam pengembangan wilayah Kabupaten Sukabumi. Pelabuhan perikanan dibutuhkan untuk membantu kelancaran distribusi hasil tangkapan ikan (sebagai *fishing base)* yang dapat mempercepat pengembangan wilayah di Kabupaten Sukabumi.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Palabuhanratu diharapkan akan mampu menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan khususnya di sektor perikanan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi gambaran umum kondisi daerah terkait dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu jumlah produksi dan nilai produksi ikan. Kabupaten Sukabumi memiliki satu pelabuhan perikanan tipe B yaitu PPN Pelabuhanratu. Data jumlah produksi dan nilai produksi ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi dari tahun 2008 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.96.

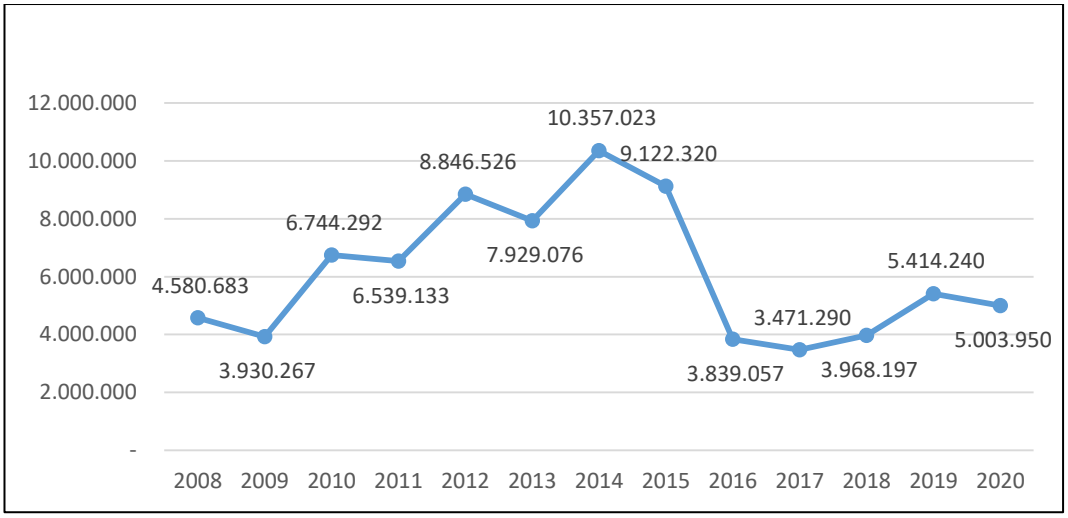
Tabel 2.96 Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhanratu tahun 2008-2020

Tahun	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
2008	4.580.683	42.562.536.675
2009	3.930.267	56.735.939.610
2010	6.744.292	144.701.150.000
2011	6.539.133	120.339.550.319
2012	8.846.526	183.439.608.741
2013	7.929.076	213.439.504.947
2014	10.357.023	288.233.337.400
2015	9.122.320	225.823.087.000
2016	3.839.057	106.224.971.000
2017	3.471.290	79.824.295.000
2018	3.968.197	75.083.594.000
2019	5.414.240	111.363.857.750
2020	5.003.951	110.449.972.184

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data di atas, jumlah produksi perikanan di Kabupaten Sukabumi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2008, produksi ikan mencapai 4.580.683 kg dengan nilai produksi sebesar

Rp.42.562.536.675,00. Pada tahun 2020 jumlah produksi sebanyak 5.003.951 kg dengan nilai produksi sebesar Rp.110.449.972.184,00. Jumlah produksi dan nilai produksi tertinggi pada tahun 2014 yang mencapai 10.357.023 kg dengan nilai produksi sebesar Rp.288.233.337.400,00. Fluktuasi produksi ikan yang di daratkan di PPN Palabuhanratu dari tahun 2008 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.96.



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021 (diolah)

Gambar 2.96 Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhanratu tahun 2008-2020

I. Peternakan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan peternakan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti produksi daging menurut jenis ternak, dan produksi telur unggas dan susu sapi.

a) Produksi Daging Menurut Jenis Ternak

Produksi daging di Kabupaten Sukabumi berasal dari 13 jenis ternak, yaitu kerbau, sapi potong, sapi perah, domba, kambing, kelinci, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, puyuh, itik, manila, dan breeder. Jumlah produksi daging yang dihasilkan dari masing-masing jenis ternak setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020, produksi daging terbesar dari jenis ternak ayam ras pedaging yang produksi setiap tahunnya mencapai lebih dari 50 juta kg. Data produksi daging menurut jenis ternak di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.97.

Tabel 2.97 Produksi Daging Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020 (kg)

Jenis Ternak	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kerbau	127.490	38.248	83.680	87.864	87.864
Sapi potong	1.553.820	1.719.214	1.743.323	1.830.489	1.835.338
Sapi perah	45.220	15.700	-	-	-
Domba	658.339	660.251	1.666.741	1.750.078	1.750.080
Kambing	157.449	161.824	24.780	26.019	26.004
Kelinci	2.093	2.680	-	-	-
Ayam buras	1.160.064	1.404.082	1.154.491	1.212.216	-
Ayam ras pedaging	51.964.926	53.851.177	54.928.300	57.674.715	55.266.993
Ayam ras petelur	1.532.558	1.942.312	1.341.610	1.408.691	1.421.815
Puyuh	2.040	3.464	6.128	6.529	-
Itik	78.423	81.178	72.328	75.944	167.342
Manila	111.087	117.870	86.159	90.467	-
Breeder	1.339.538	-	1.677.564	-	-

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka (2016-2019), 2020; Provinsi Jawa Barat dalam Angka (2020), 2021

b) Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi

Berdasarkan data dari tahun 2016 hingga tahun 2020 produksi telur di Kabupaten Sukabumi cenderung meningkat. Produksi telur terbesar bersumber dari ayam ras petelur yang mencapai 91.154.000 kg pada tahun 2020. Produksi telur terbesar kedua yaitu bersumber dari breeder yang mencapai 8.068.983 kg pada tahun 2018. Sumber produksi telur lainnya yaitu ayam buras, puyuh, itik dan manila dengan jumlah produksi masing mencapai ratusan kilogram setiap tahunnya. Sementara itu, produksi susu cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Produksi susu di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 mencapai 5.916.000 liter. Data produksi telur unggas dan susu di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.98.

Tabel 2.98 Jumlah, Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Produksi Telur Unggas (kg)					
Jenis ternak	**Tahun**				
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ayam buras	684.570	845.269,73	930.518	958.434	-
Ayam ras petelur	29.298.156	26.177.709,28	28.038.326	28.879.476	91.154.000
Puyuh	315.926	181.832,89	376.521	387.817	-
Itik	201.645	490.526,16	232.135	239.099	241.000
Manila	336.649	547.403,22	-	-	-
Breeder	2.552.956	5.415.559,28	8.068.983	-	-
Jumlah	33.389.902	33.658.300,56	37.646.483	30.464.826	91.395.000
Produksi Susu Sapi (liter)					
Jenis ternak	**Tahun**				
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Sapi perah	7.859.271	5.335.359	6.095.585	6.400.364	5.916.000

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2021

2.3.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan Pembangunan

Tahapan pembangunan diawali dengan adanya proses penyusunan dokumen perencanan pembangunan. Salah satu indikator yang dapat mengetahui gambaran umum kondisi daerah terkait dengan perencanaan pembangunan yaitu tersedianya dokumen perencanaan yang baik dan lengkap. Dokumen rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pembangunan secara periodik. Data ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dokumen RTRW	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen Renstra	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan data di atas, dokumen perencanaan pembangunan di daerah meliputi :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menekankan tentang pentingnya arahan kebijakan dan strategi dalam pemanfatan ruang wilayah yang dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan jangka panjang daerah. RTRW tersebut berlaku selama 20 tahun. RTRW periode 2012-2032 ditetapkan melalui peraturan daerah Kabupaten Sukabumi nomor 22 tahun 2012.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) menekankan tentang pentingnya penggunaan perencanaan strategis berbasis skenario (*scenario planning*), keterlibatan *stakeholders* yang relevan dan kompeten, terutama lembaga penelitian untuk merumuskan skenario perkembangan faktor-faktor eksternal pendorong pembangunan daerah (sosial, politik, ekonomi, teknologi, lingkungan hidup) dan implikasinya pada pembangunan daerah selama 20 tahun. RPJPD pada periode 2005-2025 ditetapkan melalui peraturan daerah nomor 13 tahun 2009.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menekankan tentang pentingnya menerjemahkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilengkapi dengan indikator

kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun.

4. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) menekankan tentang pentingnya setiap PD memiliki tolak ukur kinerja pelayanan yang jelas berdasarkan tupoksi dan dapat memberikan gambaran secara cepat kepada masyarakat tentang status kinerja pelayanan PD dan rencana pencapaian program PD sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menekankan tentang pentingnya penyusunan perencanaan berdasarkan kerangka penyelenggaraan fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah; perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang realistis dan konsisten dengan visi, misi Kepala Daerah, dan RPJMD; memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu pembangunan daerah yang prioritas dan mendesak selama satu tahun.

B. Keuangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti opini BPK terhadap laporan keuangan dan perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.

a) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 selalu mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Opini WTP tersebut adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Hasil opini BPK tersebut menunjukkan bahwa auditor meyakini bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan jika ada kesalahan, kesalahan tersebut dianggap tidak material dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan. Data opini BPK terhadap laporan

keuangan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2020

Tahun	Hasil Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2020

b) Perbandingan Antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Belanja langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sementara itu, belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pada tahun 2017, persentase alokasi belanja langsung lebih besar dibandingkan alokasi belanja tidak langsung. Namun pada tahun 2018 dan 2019, persentase alokasi belanja langsung lebih kecil dibandingkan dengan persentase belanja tidak langsung. Data perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja daerah di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101 Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung di Kabupaten Sukabumi Tahun 2017-2019

Indikator	2017	2018	2019
Total Belanja Langsung	2.028.119.671.982	2.030.798.213.895	2.075.694.651.599
Total Belanja Tidak Langsung	1.997.673.069.620	2.059.454.602.705	2.211.786.462.041
Total belanja daerah	4.025.792.741.602	4.090.252.816.600	4.287.481.113.640

Indikator	2017	2018	2019
Persentase total belanja langsung terhadap total belanja (%)	50,38	49,65	48,41
Persentase total belanja tidak langsung terhadap total belanja (%)	49,62	50,35	51,59

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2020

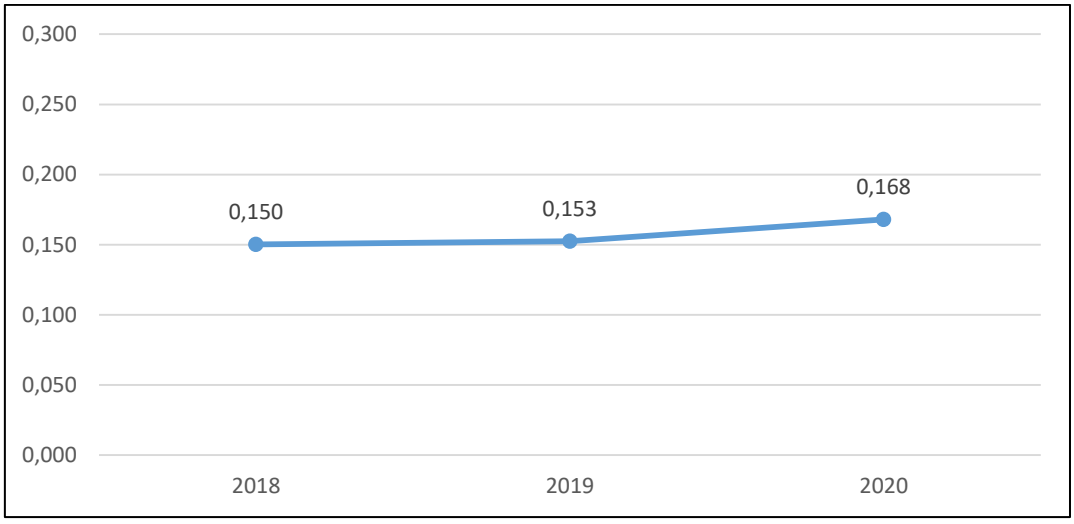
c) Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah

Tingkat kemandirian fiskal daerah merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Proporsi PAD Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.102, dan tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilhat pada Gambar 2.97.

Tabel 2.102 Proporsi komponen pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Pendapatan Daerah (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Pendapatan Asli Daerah	16,12	21,32	15,03	15,25	16,83
Proporsi Dana Perimbangan	65,72	60,08	60,2	60,69	54,43
Penerimaan Lainnya yang Sah	18,16	18,6	24,78	24,06	28,74
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Laporan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi (diolah)



Sumber: Laporan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi (diolah)

Gambar 2.97 Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020

Berdasarkan tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 termasuk kedalam kategori tingkat kemandirian sangat rendah. Hal ini tentu tidak lepas dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Hal tersebut menujukkan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk menopang pendanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi masih kurang.

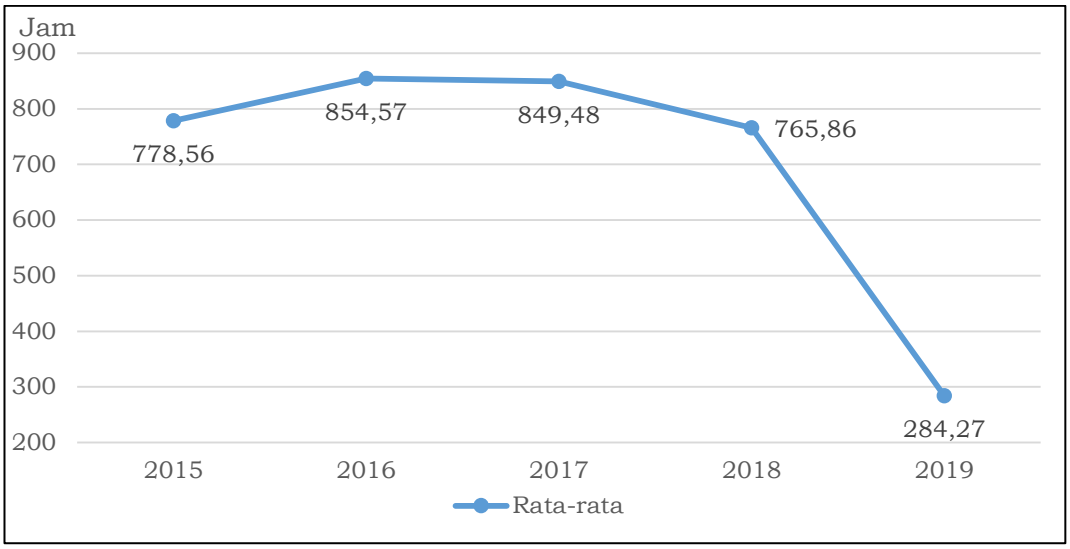
C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rata-rata lama pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, serta jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan.

a) Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pegawai yang lebih terampil, produktif dan bertanggung jawab dalam bekerja. Data rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten

Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.98.



Sumber: BKPSDM Kab.Sukabumi, 2020

Gambar 2.98 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2019

Berdasarkan data di atas, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan cenderung *fluktuatif* setiap tahunnya. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 854,57 jam. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 284,27 jam. Semakin tinggi rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai.

b) Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti diklat formal cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Persentase tertinggi ASN yang mengikuti diklat formal yaitu sebesar 4,13 persen pada tahun 2017. Persentase terendah ASN yang mengikuti diklat formal terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,20 persen. Semakin tinggi persentase ASN yang mengikuti diklat formal maka semakin baik untuk peningkatan kinerja ASN tersebut. Data persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.103.

Tabel 2.103 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal	390	328	530	435	260	-
Jumlah total ASN	14.786	14.262	12.843	12.155	11.825	10918
Persentase ASN yang mengikuti diklat formal (%)	2,64	2,30	4,13	3,58	2,20	-

Sumber: BKPSDM Kab.Sukabumi, 2020

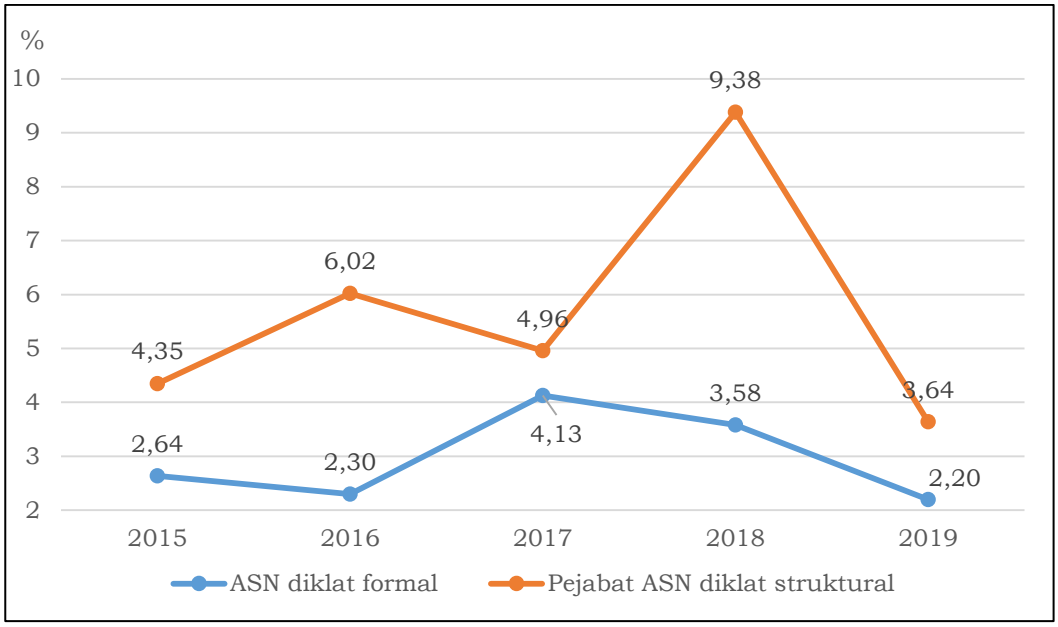
c) Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural cenderung fluktuatif. Persentase tertinggi pejabat ASN mengikuti diklat struktural yaitu pada tahun 2018 sebesar 9,38 persen. Persentase terendah pejabat ASN mengikuti diklat struktural yaitu pada tahun 2019 sebesar 3,64 persen. Semakin banyak pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural maka semakin baik untuk peningkatan kinerja pejabat ASN sesuai jabatan yang dimilikinya. Data persentase pejabat asn yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.104 dan Gambar 2.99.

Tabel 2.104 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	78	108	74	126	51	
Jumlah total jabatan	1.794	1.794	1.491	1.343	1.403	1.349
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	4,35	6,02	4,96	9,38	3,64	

Sumber: BKPSDM Kab.Sukabumi, 2020



Sumber: BKPSDM Kab.Sukabumi, 2020

Gambar 2.99 Persentase ASN Diklat Formal dan Pejabat ASN Diklat Struktural di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2019

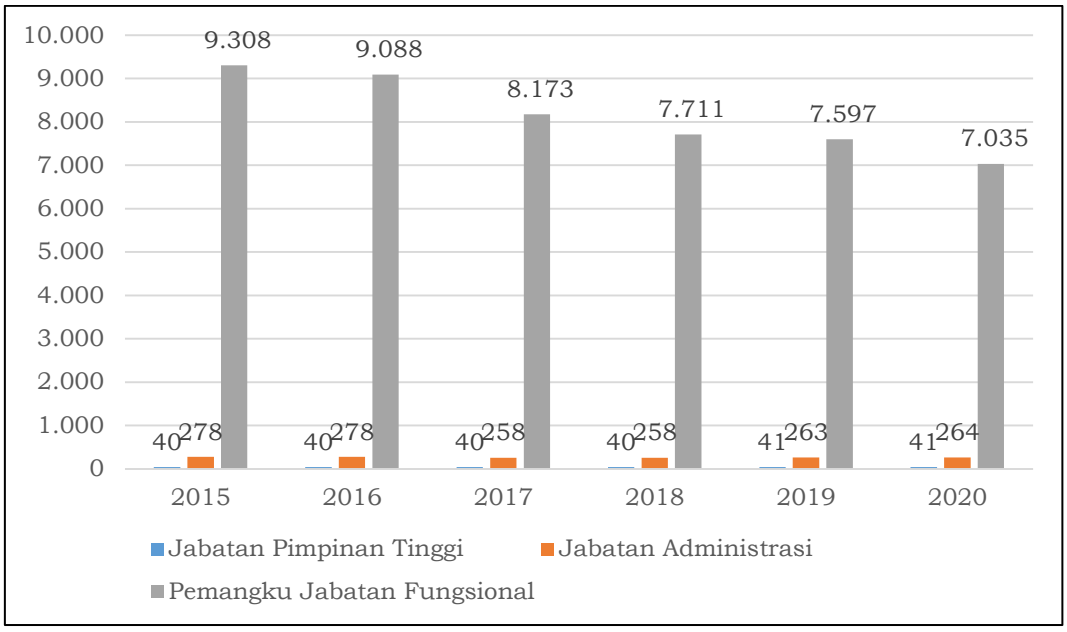
d) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintahan

Jumlah jabatan pimpinan tinggi di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2018 cenderung tetap yaitu sebanyak 40 jabatan. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2019 menjadi 41 jabatan. Disamping itu, jumlah jabatan administrasi, pada tahun 2015 hingga tahun 2016 cenderung tetap yaitu sebanyak 278 jabatan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 258 jabatan serta mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 menjadi 263 jabatan. Pemangku jabatan fungsional tertentu, jumlahya lebih banyak dibandingkan jabatan lainnya. Jumlah tertinggi pemangku jabatan fungsional tertentu yaitu pada tahun 2015 sebanyak 9.308 jabatan sedangkan jumlah terendah yaitu pada tahun 2020 sebanyak 7.035 jabatan. Data jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.105 dan Gambar 2.100.

Tabel 2.105 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan pimpinan tinggi	40	40	40	40	41	41
Jumlah jabatan administrasi	278	278	258	258	263	264
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu	9.308	9.088	8.173	7.711	7.597	7.035

Sumber:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Sukabumi, 2020



Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Sukabumi 2020

Gambar 2.100 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2020

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan salah satu kunci keberhasilan daerah dalam membangkitkan atau menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Menurut Porter (1990), pentingnya daya saing yaitu untuk: (1) mendorong produktivitas dan dan meningkatkan kemampuan masyarakat secara mandiri, (2) meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi maupun pelaku ekonomi level mikro, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Aspek daya saing meliputi kemampuan ekonomi daerah dan penduduk, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini, rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran dimaksudkan hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja dan tidak termasuk dalam pengeluaran untuk usaha. Pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita sebulan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.106.

Tabel 2.106 Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan kelompok barang di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Tahun	Kelompok Barang				
	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah
	Nilai	%	Nilai	%	
2016	384.556	55,12	313.106	44,88	697.662
2017	468.234	58,38	333.850	41,62	802.084
2018	542.209	60,18	358.840	39,82	901.049
2019	572.518	58,19	411.323	41,81	983.841
2020	550.412	59,91	368.345	40,09	918.757

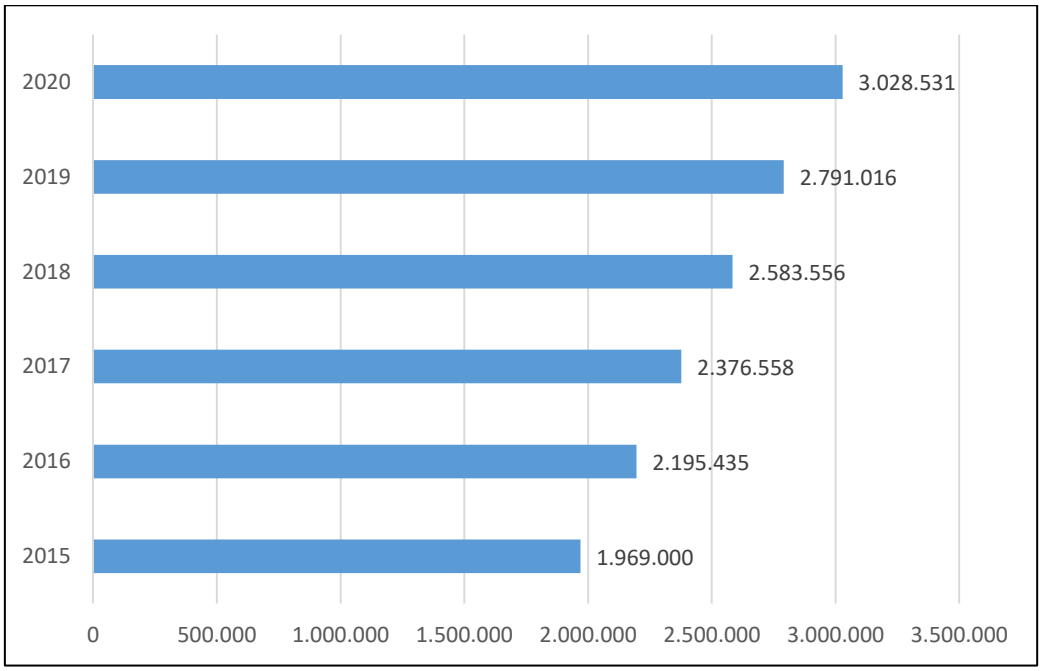
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa jumlah pengeluaran rumah tangga per kapita di Kabupaten Sukabumi meningkat dari tahun 2016

hingga tahun 2019, yaitu dari Rp 697.662 per kapita per bulan menjadi Rp 983.841 per kapita per bulan. Namun demikian, capaian tersebut menurun pada tahun 2020 menjadi Rp 918.757 per kapita per bulan. Kondisi tersebut dipicu oleh kondisi nasional maupun global akibat dari penyebaran pandemi covid-19, yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat dipicu oleh ketidakpastian dan terganggunya pola pendapatan penduduk, akibat pembatasan kegiatan dan aktivitas masyarakat untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

B. Upah Minimum Regional

Upah minimum Regional (UMR) merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usha kerjanya. Data upah minimum regional Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.101.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 2.101 Upah Minimum Regional Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020 (Rupiah)

Menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Upah Minumum Regional (UMR), UMR merupakan sebuah imbal jasa yang dapat dianggap

sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang kepada pekerja dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukan. UMR Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Peningkatan UMR tersebut merupakan hal yang positif bagi pekerja, dimana pendapatan pekerja Kabupaten Sukabumi meningkat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Meningkatnya UMR berdampak kepada meningkatnya konsumsi domestik, apabila pekerja memiliki pendapatan yang meningkat maka akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakatnya, namun dengan asumsi harga barang dan jasa di wilayah tersebut tidak meningkat. Jika harga-harga barang dan jasa meningkat, maka tingkat konsumsi pekerja tidak akan berubah. Meningkatnya konsumsi masyarakat, maka akan meningkatkan pula roda perekonomian domestik, karena lebih banyak konsumsi, maka akan meningkatkan produksi barang dan jasa sektor-sektor terkait di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, peningkatan pendapatan dapat mendorong masyarakat untuk semakin banyak menabung atau bahkan berinvestasi.

Dampak negatif yang dapat timbul akibat peningkatan UMR yaitu akan meningkatkan biaya pengeluaran perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam industri/perusahaan menengah ke bawah akan kesulitan untuk menutupi biaya tambahan karena kenaikan UMR.Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Di samping itu, dengan meningkatnya tingkat permintaan terhadap barang dan jasa, jika tidak dapat terpenuhi oleh produksi/stok yang ada maka harga-harga barang dan jasa akan meningkat, kemudian kondisi terburuknya yaitu terjadi inflasi barang dan jasa di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah selaku pembuat kebijakan mengenai UMR setiap wilayah harus dapat mempertimbangkan kondisi yang berpotensi timbul akibat penetapan tersebut. Kebijakan yang ditetapkan harus berpihak

kepada setiap sasarannya, baik kepada pekerja, perusahaan, dan pelaku ekonomi lainnya.

C. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan petani, melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani. Nilai Tukar Petani Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107 Nilai Tukar Petani Jawa Barat tahun 2018-2020

Bulan	Nilai Tukar Petani		
	2018	2019	2020
Januari	109,25	111,52	104,46
Februari	109,27	111,42	104,48
Maret	108,26	109,91	104,13
April	107,45	109,69	102,04
Mei	107,87	109,67	100,44
Juni	108,57	109,52	100,00
Juli	108,03	109,27	100,08
Agustus	108,94	110,18	99,52
September	109,61	110,97	99,98
Oktober	109,77	111,36	100.94
November	110,10	112,24	100.73
Desember	110,90	112,36	100,19
Rata-rata	109,00	110,68	101,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2021

Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan atau daya beli petani, dan tingkat pengeluaran petani. NTP juga menunjukkan kemampuan tukar (*term of trade*) komoditas hasil pertanian dengan barang dan jasa konsumsi petani baik untuk keperluan rumah tangga petani maupun biaya keperluan proses produksi. Semakin tinggi angka NTP maka semakin tinggi kemampuan daya beli petani. Berdasarkan data dari tahun 2018 hingga tahun 2019 nilai NTP Jawa Barat mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020. NTP memiliki nilai lebih dari 100, sehingga petani mengalami surplus atau pendapatan petani lebih besar dari pada pengeluarannya.

Pada tahun 2020 bulan agustus dan oktober, NTP Jawa Barat berada dibawah angka 100. Hal tersebut menunjukkan petani mengalami defisit, tingkat kesejahteraan petani pada bulan agustus dan oktober tahun 2020 mengalami penurunan, pendapatan petani lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya baik untuk keperluan rumah tangga petani maupun biaya keperluan proses produksi. Pada bulan Agustus tahun 2020 terdapat tiga sub sektor yang mengalami penurunan NTP yaitu sub sektor tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan, sedangkan sub sektor lainnya mengalami peningkatan yaitu tanaman pangan dan perikanan.

D. Ekspor

Ekspor termasuk ke dalam transaksi perdagangan dengan pihak luar dari wilayah Kabupaten Sukabumi, atau kegiatan menjual barang dan jasa ke luar wilayah Kabupaten Sukabumi. Menurut Badan Pusat Statistik, ekspor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi melalui aktivitas penjualan, barter, pemberian atau hibah barang dan/ jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada diluar wilayah atau luar negeri. Aktivitas ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendistribusikan barang dan/ jasa dari sektor ekonomi, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan pemanfaatan faktor produksi. Pada jangka pendek ataupun panjang, hal tersebut dapat berpengaruh positif pada pertumbuhan dan pembangunan daerah.

Menurut *World Bank* (1993), ekspansi ekspor dan melakukan promosi ekspor dapat memberikan manfaat bagi negara berkembang ataupun negara maju, melalui perbaikan dalam penggunaan kapasitas SDAL, pencapaian *economies of scale,* pertukaran dan alih teknologi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja, perbaikan alokasi sumber daya langka dan dapat menarik investasi asing. Jumlah nilai dan volume komoditas yang di ekspor dari Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.108.

Tabel 2.108 Jumlah komoditas Ekspor Non Migas di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

No.	Komoditas	Nilai (US $)	Persentase	Negara Tujuan Ekspor
1	Garment	182.146.830,96	72,31	USA, China, Korea, UE, Jepang, Australia, New Zealend
2	Elektrik/ Lampu hias	20.680.966,61	8,21	USA
3	Minuman (Susu)	15.079.009,03	5,99	Cambodja
4	Elektronik	17.777.663,17	7,06	USA, China, Korea, Jepang, Philiphina, Peru
5	Boneka	7.446.825,17	2,96	USA, UAE, UE, New Zealand
6	Ikan Beku	3.229.445,36	1,28	Malaysia
7	Kosmetik	2.43.053,80	0,97	Yaman, Ukraina
8	Tanaman Hias	1.067.676,74	0,42	Korea, Jepang, China
9	Handycraft and Furniture	776.012,13	0,31	Taiwan, Hongkong, Switzerland
10	Batu Templek/ Batu Alam	475.986,17	0,189	Brazil
11	Makanan	261.800,00	0,104	Thailand
12	Kayu olahan	212.020,00	0,084	Thailand
13	Rambut Palsu	149.744,70	0,059	France
14	Obat-obatan	138.426,85	0,055	Oman
15	Teh	18.248,00	0,007	France
16	Zeolite	11.600,00	0,005	Vietnam

	Jumlah		**Target Nilai (US $)**
Tahun	**Nilai US $**	**Volume**	
2020	**251.907.308,69**	**-**	**188.000.000**
2019	266.098.268,00	-	**184.000.000**

No.	Komoditas	Nilai (US $)	Persentase	Negara Tujuan Ekspor
2018		325.687.440,97	776.115.998,43	**180.000.000**
2017		226,701,338.99	38,766,510.17	**176.000.000**
2016		212.318.225,11	24.592.928,24	**172.000.000**

Sumber: Badan Pusat Statsitik Kabupaten Sukabumi, 2021

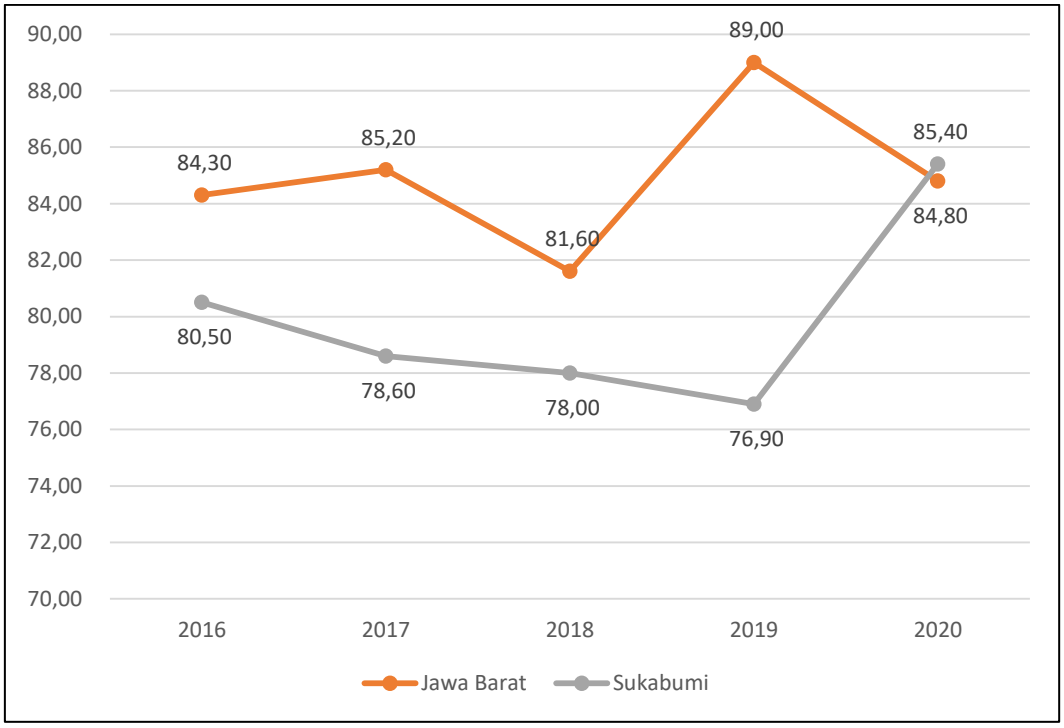
Berdasarkan data di atas, nilai penerimaan dari ekspor meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Capaian tersebut telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Namun demikian, pada tahun 2020 nilai ekspor mengalami penurunan. Komoditas yang paling banyak di ekspor yaitu produk dari garment yang di ekspor ke berbagai negara yaitu USA, China, Korea, UE, Jepang, Australia, dan New Zealend, dan produk elektrik atau lampu hias. Komoditas garment menjadi produk dengan nilai penjualan yang paling tinggi di ekspor dibandingkan komoditas lainnya, secara persentase sebesar 72,31 persen dari total komoditas yang di ekspor. Kabupaten Sukabumi telah mengekspor sebanyak 16 komoditas, dengan sebanyak 21 negara tujuan ekspor.

E. Ketahanan pangan

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, diolah maupun tidak diolah, yang digunakan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang terpenting dan harus dipenuhi setiap hari. Pangan dikelompokkan menurut neraca bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kelompok pangan terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah. Konsumsi terhadap kelompok pangan tersebut setelah dihitung dengan formula tertentu akan didapatkan skor pola pangan harapan, yang menggambarkan ketahanan pangan suatu daerah.

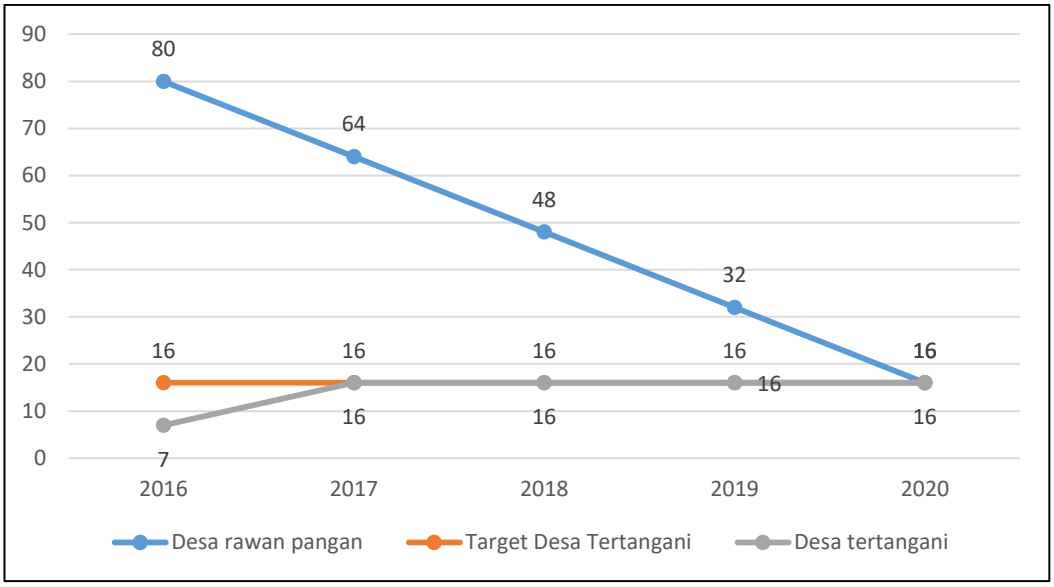
Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*), ketahanan pangan merupakan kondisi dimana seluruh rumah tangga memiliki akses baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh

anggota keluarganya, dan rumah tangga tersebut tidak memiliki resiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga dan seluruh penduduk di suatu wilayah dapat tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau bagi seluruh penduduk. Terpenuhinya energi dari berbagai kelompok pangan merupakan terwujudnya kebutuhan zat gizi, sehingga skor pola pangan harapan menunjukkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan penduduk. Skor pola pangan harapan dan penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.102 dan Gambar 2.103.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 2.102 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 2.103 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (Desa)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2019, dan mengalami peningkatan pada tahun 2020. Pada tahun 2016, skor pola pangan harapan sebesar 80,5 dan menurun menjadi 76,9 pada tahun 2019, hingga pada tahun 2020 meningkat menjadi 84,80 poin. Pada tahun 2016, *gap* pola pangan harapan Kabupaten Sukabumi dengan Jawa Barat sebesar 3,8 poin, hingga tahun 2019 rata-rata PPH Jawa Barat selalu lebih tinggi dari kabupaten Sukabumi. Namun, pada tahun 2020 PPH Kabupaten Sukabumi mampu lebih unggul dari rata-rata Jawa Barat. Dimana, pada tahun 2020 skor PPH Kabupaten Sukabumi mencapai 85,40 poin, sedangkan Jawa Barat menurun hingga berada pada 84,80 poin. Peningkatan skor PPH menunjukkan kualitas konsumsi pangan Kabupaten Sukabumi semakin baik, lebih beragam dan gizi seimbang.

Data pada Gambar 2.100 menunjukkan, daerah rawan pangan di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan, hingga jumlahnya tersisa 16 desa pada tahun 2020. Sebanyak 7,8 persen desa yang masih harus ditangani sebagai daerah rawan pangan. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020, penanganan daerah rawan pangan Kabupaten Sukabumi telah

mencapai target yang ditetapkan. Penurunan desa rawan pangan ditunjukkan dengan garis yang berwarna biru. Sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020, Kabupaten Sukabumi telah menangani daerah yang masih rawan pangan sebanyak 64 desa.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Jenis dan Jumlah Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, bank telah menyediakan berbagai layanan seperti transfer antar bank, pembayaran tagihan, sarana investasi, penukaran mata uang dan lain sebagainya. Data jumlah bank berdasarkan jenis kepemilikannya di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.109.

Tabel 2.109 Jumlah Bank Berdasarkan Jenis Kepemilikannya di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020

Jenis Bank	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Pemerintah	6	6	6	6	6	6
Bank Swasta Nasional	10	10	10	10	10	10
Bank Swasta Asing	-	-	-	-	-	-
Bank Pemerintah Daerah	2	2	2	2	2	2
Total	18	18	18	18	18	18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021

Berdasarkan data di atas, jumlah bank di Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 tetap yaitu sebanyak 18 jenis bank. Jumlah tersebut terbagi ke dalam bank milik pemerintah sebanyak 6 bank, bank milik swasta nasional sebanyak 10 bank, dan bank milik Pemerintah Daerah sebanyak 2 bank. Selain itu, tidak terdapat bank swasta asing di Kabupaten Sukabumi. Jumlah bank berdasarkan jumlah kantornya, meningkat dari 176 unit pada tahun 2015 menjadi 180 unit pada tahun 2020. Data jumlah bang berdasarkan jumlah kantornya termasuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor Unit di

Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.110.

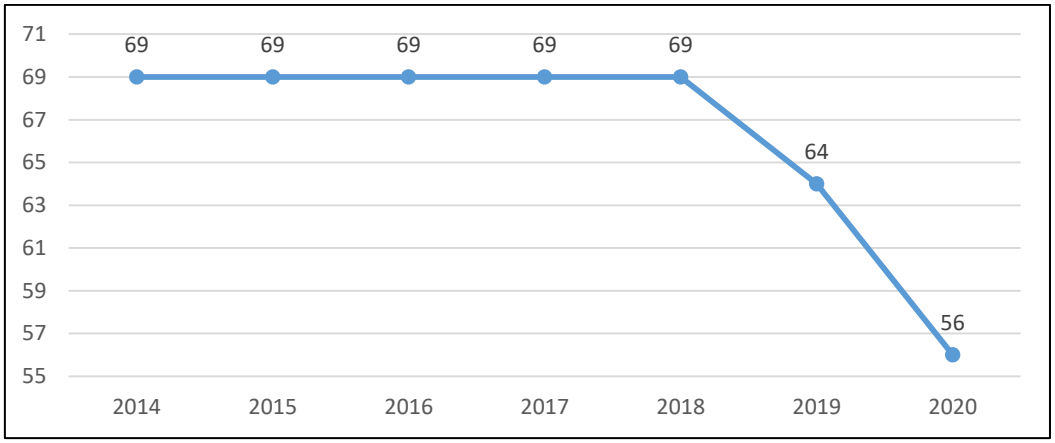
Tabel 2.110 Jumlah Bank Berdasarkan Jumlah Kantor di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020

Jenis Bank	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Pemerintah	90	90	91	91	91	91
Bank Swasta Nasional	42	43	43	43	43	43
Bank Swasta Asing	-	-	-	-	-	-
Bank Pemerintah Daerah	44	46	46	46	46	46
Total	176	179	180	180	180	180

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021

B. Jumlah Restoran

Restoran atau rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Restoran juga memiliki peran dalam mendukung sektor pariwisata dengan membantu dalam penyediaan makan dan minum bagi para wisatawan. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Kabupaten Sukabumi, terjadi penurunan jumlah restoran yang ada disekitar area objek wisata di Kabupaten Sukabumi dari jumlah 69 restoran pada tahun 2014, menjadi 56 restoran pada tahun 2020. Data jumlah restoran di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2014 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.104.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 2.104 Jumlah Restoran di Kabupaten Sukabumi Tahun 2014-2020

C. Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel

Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai macam jenis pariwisata yang menjadi potensi untuk terus dikembangkan. Pariwisata diharapkan menjadi lokomotif utama pembangunan perekonomian Kabupaten Sukabumi. Kegiatan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan atraksi atau objek wisata, tetapi juga berkaitan dengan faktor pendukung lainnya seperti ketersediaan tempat penginapan/hotel. Pertumbuhan hotel di Kabupaten Sukabumi cenderung stagnan. Jumlah hotel hanya mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu dari 131 unit menjadi 143 unit, setelah itu jumlahnya tidak berubah hingga tahun 2020. Data jumlah hotel, kamar, tempat tidur, dan tenaga kerja bidang pariwisata di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111 Jumlah Hotel, Kamar, Tempat Tidur, dan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Hotel	Jumlah			Jumlah Tenaga Kerja	
		Hotel	Kamar	Tempat Tidur	Laki-laki	Perempuan
2016	Hotel Bintang	3	281	352	264	30
	Hotel Melati	128	2.048	3.055	764	282
	Jumlah	131	2.329	3.407	1.028	312
2017	Hotel Bintang	3	281	352	314	54
	Hotel Melati	140	2.219	3.273	815	294

Tahun	Jenis Hotel	Jumlah			Jumlah Tenaga Kerja	
		Hotel	Kamar	Tempat Tidur	Laki-laki	Perempuan
	Jumlah	143	2.500	3.625	1.129	348
2018	Hotel Bintang	3	281	352	314	54
	Hotel Melati	140	2.219	3.273	815	294
	Jumlah	143	2.500	3.625	1.129	348
2019	Hotel Bintang	3	n.a	n.a	n.a	n.a
	Hotel Melati	140	n.a	n.a	n.a	n.a
	Jumlah	143	n.a	n.a	n.a	n.a
2020	Hotel Bintang	3	281	352	314	54
	Hotel Melati	140	2.219	3.273	815	294
	Jumlah	143	2.500	3.625	1.129	348

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2020

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Pinjaman

Posisi pinjaman Kabupaten Sukabumi dapat bersumber dari Bank umum dan/ Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pinjaman sendiri peruntukannya dibagi atas lapangan usaha dan bukan lapangan usaha. Detail posisi pinjaman dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.112.

Tabel 2.112 Posisi pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Sektor Ekonomi	2016	2017	2018	2019	2020
Berdasarkan Lapangan Usaha	**7,676,973**	**8,516,059**	**8,606,801**	**10,057,702**	**11,954,342**
Persentase terhadap total pinjaman (%)	**62,78**	**63,23**	**60,03**	**n.a**	**n.a**
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	553,254	716,409,	837,581	630,770	589,448
Pertambangan dan Penggalian	415,274	406,512	410,521	425,996	243.043
Industri Pengolahan	2,185,007	2,827,524	2,414,165	2,357,828	6,318,199
Pengadaan Listrik Dan Gas	66,571	7,099	6,642	43,378	42,769

Sektor Ekonomi	2016	2017	2018	2019	2020
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	2,077	4,381	5,629	3,326	2,855
Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor	3,214,091	3,618,419	3,914,202	5,435,017	3,592,650
Transportasi Dan Pergudangan	54,797	75,166	103,429	122,738	65,165
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	50,818	70,472	70,501	100,932	142,922
Informasi Dan Komunikasi	18,277	11,546	10,363	7,407	5,720
Jasa Keuangan Dan Asuransi	18,256	15,2	16,233	14,998	14,391
Real Estate	109,306	103,936	94,871	87,609	74,622
Jasa Perusahaan	64,197	36,271	47,598	45,312	42,209
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Wajib	300	625	3,312	1,764	902
Jasa Pendidikan	57,556	56,94	32,624	38,087	35,097
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	96,855	72,232	82,242	112,425	136,006
Jasa Lainnya	159,771	187,847	191,182	250,328	274,172
Bukan Lapangan Usaha	**4,550,653**	**4,951,756**	**5,730,517**	n.a	n.a
Persentase terhadap total pinjaman (%)	**37,22**	**36,77**	**39,97**	n.a	n.a
Rumah tinggal	854,649	1,005,129	1,392,294	n.a	n.a
Flat dan apartemen	5,514	4,724	5,533	n.a	n.a
Ruko dan Rukan	29,713	31,996	34,867	n.a	n.a
Kendaraan Bermotor	580,001	598,353	713,139	n.a	n.a
Lainnya	3,080,775	3,311,554	3,584,684	n.a	n.a
Jumlah	**12,227,626**	**13,467,815**	**14,337,318**	**16,616,131**	**18,866,944**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2020

Jumlah posisi pinjaman dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus meningkat, baik untuk lapangan usaha maupun untuk bukan lapangan

usaha. Posisi nilai pinjaman peruntukan lapangan usaha lebih besar dibandingkan dengan bukan lapangan usaha, dan pelaku sektor yang paling tinggi melakukan pinjaman yaitu sektor pedangan besar, dan eceran, reparasi mobil, dan motor; serta sektor industri pengolahan. Berdasarkan besaran persentase pinjaman terhadap total pinjaman, peruntukan lapangan usaha lebih besar dibandingkan dengan bukan lapangan usaha. Namun, persentase pinjaman untuk lapangan usaha dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan setiap tahunnya dan persentase pinjaman terhadap bukan lapangan usaha mulai meningkat, meskipun perubahannya tidak signifikan namun penduduk mulai beralih melakukan pinjaman untuk kegiatan konsumtif.

Persentase pinjaman bukan untuk lapangan usaha mengalami peningkatan, dengan peruntukan pinjaman yang paling tinggi digunakan untuk rumah tinggal dan pinjaman lainnya. Pinjaman untuk rumah tinggal setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, keadaan tersebut berbanding lurus dengan dampak dari meningkatnya penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif merupakan penduduk dengan kelompok usia 15-64 tahun, dimana seiring meningkatnya penduduk kelompok usia tersebut akan meningkatkan permintaan terhadap lahan dan tempat tinggal. Berdasarkan hal tersebut, posisi pinjaman untuk rumah tinggal salah satunya dapat disebabkan oleh meningkatnya penduduk Kabupaten Sukabumi, sehingga meningkatkan pinjaman untuk kebutuhan rumah tinggal.

Nilai pinjaman untuk lapangan usaha dengan kontribusi setiap sektor terhadap PDRB dalam lapangan usaha memiliki hubungan yang berbanding lurus. Berdasarkan nilai pinjaman dan kontribusinya terhadap PDRB, sektor perdagangan, dan sektor industri memiliki nilai yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan tingginya pinjaman pelaku usaha dapat meningkatkan kemampuan dalam peningkatan nilai tambah lapangan usaha sektor tersebut melalui kemampuan permodalan. Pinjaman untuk lapangan usaha dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya karena memiliki

modal yang cukup, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah terhadap pelaku usaha dan sektor terkait secara keseluruhan.

Pinjaman untuk lapangan usaha dapat mendorong sektor tersebut dalam permodalan, seperti menyediakan input produksi, meningkatkan kualitas dan kapasitas operasional, serta meningkatkan produksinya, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah terhadap sektor terkait. Berdasarkan PDRB lapangan usaha, sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi yang paling tinggi terhadap PDRB, sedangkan pinjaman untuk lapangan usaha sektor pertanian bernilai rendah. Hal tersebut dapat disebabkan karena pelaku usaha sektor pertanian telah memiliki modal yang cukup, sehingga tidak diperlukan lagi meminjam modal untuk sektor pertanian. Namun, berdasarkan data PDRB nilai tambah sektor pertanian mengalami *trend* yang *fluktuatif* dan cenderung menurun, sehingga hal tersebut dapat menunjukkan bahwa nilai pinjaman sektor pertanian yang rendah salah satunya dapat disebabkan oleh pelaku usaha sektor pertanian tidak memiliki akses terhadap pinjaman modal pertanian dikarenakan tidak memiliki aset jaminan untuk pinjaman.

B. Angka Kriminalitas

Angka kejadian kriminalitas menjadi tolak ukur situasi dan kondisi keamanan disuatu wilayah, jumlah kejadian kriminalitas di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.113.

Tabel 2.113 Jumlah Tindakan Kriminalitas Menurut Jenisnya Kabupaten Sukabumi tahun 2013-2018

No	Tindakan Kriminalitas	2013	2014	2016	2017	2018
1	Perampokan dengan senjata api	-	-	36	8	11
2	Perampokan dengan senjata tajam	23	-	96	106	81
3	Pencurian kendaraan roda 4	4	-	34	18	16
4	Pencurian kendaraan roda 2	42	-	218	114	165
5	Pencurian biasa (umum)	110	200	45	41	42
6	Pencurian kawat listrik/telphone	-	-	-	-	-
7	Pencurian kayu hutan	4	5	1	2	7

No	Tindakan Kriminalitas	2013	2014	2016	2017	2018
8	Pencurian hewan	6	-	-	-	2
9	Pembunuhan	29	15	2	2	2
10	Penganiayaan	26	14	60	40	47
11	Pemerkosaan	-	2	2	5	3
12	Pelanggaran susila/adat	-	3	-	-	-
13	Penipuan	12	19	18	18	34
14	Pemerasan	-	-	2	-	4
15	Penodongan	-	1	0	-	-
16	Penculikan	-	-	-	-	1
17	Perkelahian/kenakalan remaja	10	6	-	-	-
18	Pengrusakan barang/bangunan	9	12	12	12	14
19	Perjudian gelap	-	-	11	6	1
20	Pemalsuan uang/surat berharga	-	1	2	2	1
21	Pemalsuan barang/benda	-	-	-	-	-
22	Penyelundupan barang/orang	-	1	1	-	2
23	Pelanggaran narkoba	3	1	-	-	-
24	Korupsi	-	-	1	1	2
	Jumlah	278	280	537	129	407

Sumber: Polres Kota dan Kabupaten Sukabumi, 2018

Kejadian kriminalitas di Kabupaten Sukabumi rentang tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Tindakan kriminalitas yang paling sering terjadi yaitu pencurian biasa/umum, pencurian kendaraan roda dua, dan perampokan dengan senjata tajam. Kondisi tersebut menunjukkan tindakan kriminalitas pencurian dan perampokan merupakan tindakan kriminalitas dengan intensitas tertinggi di Kabupaten Sukabumi.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan berdasarkan jenis kelamin dan usia di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.114.

Tabel 2.114 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020 (%)

Uraian	2018	2019	2020	Keterangan
0-14	27,96	27,67	27,34	Usia non produktif muda
15-64	65,72	65,79	65,83	Usia produktif
65+	6,32	6,55	6,82	Usia non produktif tua
Jumlah	100.00	100,00	100,00	
Rasio ketergantungan	**52,16**	**52,01**	**51,89**	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Rasio ketergantungan menunjukkan produktivitas yang ditunjukkan oleh kelompok umur, dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data di atas, terjadi penurunan nilai rasio ketergantungan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018, rasio ketergantungan sebesar 52,16 persen dan mengalami penurunan menjadi 51,89 persen pada tahun 2020. Angka ketergantungan sebesar 51,89 persen artinya setiap 100 penduduk usia produktif mempunyai tanggungan antara 51-52 orang penduduk yang belum dan/ tidak produktif lagi di usia (0-14 tahun) dan (> 65 tahun).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik rasio ketergantungan Kabupaten Sukabumi terus menurun setiap tahunnya. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, Indonesia telah mengalami fase transisi demografi dari tahun 2000 dengan rasio usia produktif sebesar 54 persen dan meningkat menjadi 66 persen pada tahun 2010. Indonesia akan mengalami puncak transisi demografi atau lazim dikenal sebagai bonus demografi pada tahun 2020-2030. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Sukabumi telah mengalami transisi demografi yang ditandai dengan kenaikan jumlah usia produktif

bekerja, diiringi dengan penurunan pertumbuhan dan jumlah penduduk usia muda.

Terjadinya fenomena transisi demografi atau bonus demografi disebabkan oleh menurunnya angka usia non produktif, salah satunya disebabkan oleh menurunnya angka kelahiran. Bonus demografi dari sudut pandang ekonomi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis karena semakin besarnya jumlah tabungan, investasi, dan aktivitas ekonomi dari penduduk usia produktif. Oleh karena itu, suatu daerah dapat melakukan akselerasi ekonomi dengan meningkatkan aktivitas sektornya. Bonus demografi dapat dirasakan sebagai bonus, apabila terpenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga perlu adanya pembangunan yang berpihak pada penguatan tata kelola penduduk, pemenuhan layanan dasar, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda untuk mempersiapkan bonus demografi.

B. Indeks Reformasi Birokrasi

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Penilaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.115.

Tabel 2.115 Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A	Komponen Pengungkit	60,00	29,06
	I.Pemenuhan	20,00	11,18
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,14
	III. Reform	30,00	12,75
B	Komponen Hasil	40,00	32,05
1	Akuntabilitas kinerja dan keuangan	10,00	7,55
2	Kualitas pelayanan publik	10,00	8,93
3	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10,00	9,30
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,27
	Indeks Reformasi Birokrasi 2020	100,00	**61,11**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
	Indeks Reformasi Birokrasi 2019	100,00	**61,06**
	Indeks Reformasi Birokrasi 2018	100,00	**60,20**

Sumber: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2021

Data pada table di atas menunjukkan nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dengan kategori "B". Adapun komponen peniliaian terdiri dari dua yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit mencapai nilai 29,06 poin dari bobot 60,00, sedangkan komponen hasil mencapai 32,05 poin dari bobot yang harus dicapai maksimal sebesar 40,00. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Sukabumi diantaranya yaitu: pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dibangun di tingkat Pemerintah Daerah dan PD, namun kondisi pelaksanaan reformasi Birokrasi pada tingkat PD belum sepenuhnya berjalan optimal jika dibandingkan dengan tingkat Pemerintah Daerah; penerapan *e-government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya optimal, karena belum adanya perencanaan yang komprehensif terkait pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan beberapa aplikasi yang sudah ada belum terintegrasi secara menyeluruh; dan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pada PD yang terkait dalam hal pelayanan masyarakat belum optimal, sistem kompensasi kepada penerima layanan dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh.

2.5 Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Makro

Secara umum capaian indikator makro Kabupaten Sukabumi cukup baik hingga tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 terdapat beberapa indikator makro yang kinerjanya negatif dan tidak mencapai target diakibatkan Pandemi Covid-19, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan, indikator yang bertahan dengan kinerja yang positif pada saat pandemi Covid-19 diantaranya indikator pembangunan manusia, dan indeks gini.

Target pembangunan yang telah dirancang pada RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi tolak ukur upaya pembangunan yang dilaksanakan. Secara umum pemerintah daerah berupaya untuk memaksimalkan kinerja dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut berkorelasi dengan ketercapaian target-target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas pada peran masyarakat untuk mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui konsumsi, investasi dan juga kegiatan perdagangan yang dilakukan.

Selain itu interkoneksi pembangunan yang dilakukan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten menjadikan pencapaian target relatif baik dengan program-kegiatan yang relevan dilaksanakan khususnya pada rentang tahun 2016-2019. Namun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak pandemi Covid-19 yang tercatat masuk ke Sukabumi sejak April 2020 secara langsung berpengaruh pada sektor riil yang meliputi ketenagakerjaan. Lebih lanjut, dampak pembatasan sosial tersebut berpengaruh pada tingkat kemiskinan dan juga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukabumi yang berkontraksi hingga 1,08 persen di tahun 2020. Pembangunan di Kabupaten Sukabumi pada akhirnya akan berdampak secara luas terhadap kualitas hidup masyarakat. Untuk mengukur hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator makro Kabupaten Sukabumi yang secara rinci tergambar dalam Tabel 2.116.

Tabel 2.116 Capaian indikator makro Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021					Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	64,75	65,08	65,42	65,96	66,08	65,13	65,49	66,05	66,87	66,88
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	1,23	1,20	1,33	1,16	1,26
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,31	8,08	7,88	7,70	7,55	8,13	8,04	6,76	6,22	7,09
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7-9	7-9	7-9	7-9	7-9	7,66	7,66	7,77	7,99	9,60
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,58	5,63	5,68	5,73	5,78	5,85	5,75	5,79	5,81	-1,08
6	Pendapatan Per Kapita	Rp(1.000)/ kapita	18.714,34	19.614,34	20.514.34	21.414.34	23.414,34	21.041,11	22.825,17	25.040,62	27.331,13	27.281,64
7	Indeks Gini	Poin	N.a	N.a	N.a	N.a	N.a	0,329	0,334	0,330	0,347	0,334

2.5.2 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. IKK tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Capaian IKK kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.117.

Tabel 2.117 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sukabumi tahun 2020

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	91,10%	1)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	544
					2)	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	78.077
					3)	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	78.077
					4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	5.994
					5)	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	7.042
					6)	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau	276

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	
					7)	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga Pemerintah	197
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,83%	1)	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	1.310
					2)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	27.804
					3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar	43.618

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						peserta didik dari Pemerintah Daerah	
					4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	220.807
					5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	54.085
					6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	12.682
					7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah	5.631
					8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	8.506
					9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3.921
					10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.438

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					11)	umlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	702
					12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.639
					13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.089
					14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.351
					15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.357
					16)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda	689

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	
					17)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	268
					18)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	570
					19)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	766
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96,57%	1)	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	1.310
					2)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima	27.804

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	
					3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	43.618
					4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	220.807
					5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	54.085
					6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12.682
					7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	5.631
					8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	8.506
					9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3.921

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	2.438
					11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	702
					12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.639
					13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	1.089
					14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.351
					15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.357
					16)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat	689

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	
					17)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	268
					18)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	570
					19)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	766
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	41,63%	1)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	43
					2)	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima	907

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	
					3)	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.266
					4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	772
					5)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	220
					6)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	135
					7)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	689
					8)	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan	27

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,05%	1)	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yangmemenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	0,05%
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	100%
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96,36%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	96,36%
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk	0,04
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,08%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	99,08%
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan persalinan sesuai standar	0,09
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	104,03%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	104,03%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	0,04
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	68,30%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	68,30%
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	0,04
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,54%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	42,89%
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	0,07
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	30,18%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	30,18%
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	0,09

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	43,85%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	43,85%
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	0,09
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84,23%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	84,23%
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	0,09
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72,94%	1)	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	72,94%
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0,09
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	106,28%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	106,28%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
			pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	0,09
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	0,09
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	0,09
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di	0%	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	38,65 Ha

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
			WS Kewenangan Kab/Kota				
					2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	0
					3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0
					4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0
					5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada
					6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada
					7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai	0

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						milik Pemerintah kabupaten/ kota	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan	0
					2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	
					3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	
					4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	
					5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						WS Kewenangan kabupaten/kota	
					6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	
					7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota	
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	59,28%	1)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	57,92%
					2)	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	1,35%
					3)	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	100%
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan	85,09%	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM	85,08%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
			jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				
					2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	0
					3)	Jumlah BUMD ana tau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	· PDAM 19 cabang · Non BUMD 45 KKM [Kelompok Kerja Masyarakat]
					4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0
					5)	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	0
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	79,06%	1)	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	79,05%
					2)	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan	597.800

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	
					3)	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	597.800
					4)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0
					5)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0
					6)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0
					7)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	79,05%
					8)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD Sakses aman	0
					9)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	79,05%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					10)	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0
					11)	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	
					12)	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	
					13)	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	
					14)	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	1)	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	100%
					2)	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	100%
					3)	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada
					4)	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	
					5)	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	
					6)	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	
					7)	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	
					8)	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/ kota yang dipelihara/dirawat	
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	71,43%	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.266,714 Km
					2)	Panjang jalan yang dibangun	0
					3)	Panjang jembatan yg dibangun	120 M
					4)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	87,085 Km
					5)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	132 M

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					6)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	32,405 Km
					7)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	15 M
					8)	Panjang jalan yang dipelihara	292,344 Km
					9)	Panjang jembatan yang dipelihara	0
		8	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	46,50%	1)	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	46.50 %
					2)	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	46.50 %
					3)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	46.50 %
					4)	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/ kota yang aktif dengan data termutakhir	1
					5)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di	0

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	
					6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0
					7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah	0
					8)	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0
					9)	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1
					10)	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau	0

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	
					11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	46,50%
					12)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/analis di wilayah kab/kota	46,50%
					13)	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	46,50%
					14)	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	46,50%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					15)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	100%
					16)	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	100%
					17)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	100%
					18)	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak Ada
					19)	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	93
					20)	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat	0

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						dalam proyek di wilayah Kab/Kota	
					21)	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	93
					22)	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	93
					23)	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	100%
					24)	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	100%
					25)	Jumlah pengawasan terkaitketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	100%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana danrencana penanganannya	100%
					2)	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	1.700
					3)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Jumlah RT : 2.574 Jumlah KK : 2.574 Jumlaj jiwa : 7.980
					4)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	80
					5)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0
					6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	80
					8)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jumlah RT : 2.574 Jumlah KK : 2.574
					9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	91,58%	1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	20.502
					2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah RT : 80 Jumlah KK : 80
					3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
					4)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan	20.502

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	
					5)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
					6)	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	2 Ha
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	93,29%	1)	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	93,29%
					2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	4.597
					3)	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	71,57 Ha
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,92%	1)	Jumlah rumah di kab/kota	756.163
					2)	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	4.597
					3)	Jumlah rumah tidak layak huni	54.174

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					4)	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0
					5)	Rasio rumah dan KK	119%
					6)	Jumlah rumah pembangunan baru	0
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	1)	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	3.722
					2)	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0
					3)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	3.722
					4)	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	3.722
					5)	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0
					6)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0
					7)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	9
					8)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	9

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					9)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	01.00	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	1)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	100%
					2)	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	100 orang
					3)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	6 Perda
					4)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	10 orang [PPNS]
					5)	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	7 SOP
					6)	Tersedianya sarana prasarana minimal	8 Jenis
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	1)	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%
					2)	memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	67	1)	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%
					2)	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%
					3)	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%
					4)	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100%
					5)	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan saranaprasarana penanggulangan bencana	100%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					6)	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	867.500	1)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%
					2)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%
					3)	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%
					4)	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	61,11%	1)	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	215 kasus

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					2)	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	-
					3)	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	-
					4)	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	8 Pos
					5)	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	205 Jenis
					6)	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	93 orang -50,54%
					7)	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas	93 Desa / 1.116 Orang

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	
					8)	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14 Menit			
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100,59%	1)	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	a. 1 layanan data dan pengaduan SELARAS b. 386 layanan data dan pengaduan desa (PUSKESOS)
					2)	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	a. penyandang disabilitas terlantar : 6.813 jiwa b. lanjut usia terlantar : 106.983 jiwa c. anak terlantar :

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
							160.543 jiwa jumlah : 274.339 jiwa
					3)	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 tim 141 anggota
					4)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	8 klien
					5)	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 kendaraan TRC
					6)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	17 klien
					7)	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1. 386 puskesos desa 2. 1 rumah singgah selaras
					8)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	8 klien
					9)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	28 klien

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						yang memanfaatkan alat bantu	
					10)	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	5 alat bantu
					11)	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	20 paket
					12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	8 klien
					13)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-
					14)	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	1. 3 pekerja sosial di dinas 2. 318 pekerja sosial masyarakat (PSM) 3. 3 pekerja sosial di dinas 4. 318 pekerja sosial masyarakat (PSM) 5. 47 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
							6. 69 penyuluh sosial Jumlah : 437 orang
					15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar dikeluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	223 klien
					16)	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan Masyarakat	250 orang
					17)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	43 fasilitas
					18)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	270 jiwa

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					19)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	10 klien
					20)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	45 klien
					21)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	171 klien
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	103,64%	1)	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	1.575 jiwa
					2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	240 jiwa
					3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	33 tenda

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	247 jiwa
					5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	358 jiwa
					6)	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	50 orang
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80,95%	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Ada
					2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi Sda dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100 Kemudian nilai 100 dikurangi dengan hasil perhitungan selisih masing-masing indikator Kemudian hasil perhitungan di atas dijumlahkan dan dibagi 6	Belum ada data

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					3)	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	920 perusahaan
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	19,04%	1)	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%
					2)	Persentase instruktur Bersertifikat kompetensi	68%
					3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	4,62%
					4)	Persentase LPK yang terakreditasi	100%
					5)	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%
					6)	Jumlah penganggur yang dilatih	476 orang
					7)	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	99,80%
					8)	Persentase penyerapan lulusan	3,78%
					9)	Lulusan bersertifikat kompetensi	36,97%
					10)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon	100%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	
					11)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Tidak ada data
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	80,95%	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Tidak ada data
					2)	Data tingkat produktivitas total	Tidak ada data
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100%	1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	26,45%
					2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	4,73%
					3)	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB diperusahaan	9

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					4)	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100%
					5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%
					6)	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	2,28%
					7)	Jumlah mogok kerja	33
					8)	Jumlah penutupan perusahaan	4
					9)	Jumlah perselisihan kepentingan	21
					10)	Umlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	-
					11)	Jumlah perselisihan PHK	21
					12)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	7.274
					13)	Jumlah perselisihan yang Diselesaikan melalui Perundingan bipartite	-

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					14)	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota Yang diberdayakan	Ada
					15)	Persentase perselisihan Hubungan industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100%
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	26,83%	1)	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	4.464
					2)	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	17.549
					3)	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	60
					4)	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	85 orang

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					5)	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1 orang
					6)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	-
					7)	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota	-
					8)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	4.708
					9)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	406,00%
					10)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	244 orang
					11)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan yang diterbitkan	100%
					12)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja	100%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	
					13)	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	100%
					14)	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	-
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	56,59%	1)	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah Provinsi yang telah dilatih PUG	35 lembaga PD
					2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/ kota	52 program/kegiatan
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,02%	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3 media massa

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	11 lembaga
					3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%
					4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	16 lembaga
					5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	3 lembaga
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,22%	1)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	48 organisasi
					2)	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	386 kader
					3)	Jumlah lembaga layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	6 lembaga
					4)	Jumlah lembaga Layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan	6 lembaga

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	
					5)	Jumlah kebijakan/program Pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 kebijakan/program
					6)	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2 lembaga
					7)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	43,81%	1)	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada
					2)	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada
					3)	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada
					4)	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan	Ada

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	
					5)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada
					6)	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada
					7)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada
					8)	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100%
					2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0%
					3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti	0%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	
					4	Dokumen Izin membuka tanah	100%
					5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	15,79%			
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%			
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%			
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%			
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang	100%			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
			dilakukan melalui mediasi				
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	63,91%	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	52,43%	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	62,50%	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	
					2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	
					4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	
					5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	
					6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/ kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/ kota yang ditangani	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	99,87%	1)	Penerbitan akta perkawinan	100%
					2)	Penerbitan akta perceraian	100%
					3)	Penerbitan akta kematian	73,82%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					4)	Penyajian data kependudukan	100%
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	6,10%			
		3	Kepemilikan akta kelahiran	99,08%			
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	60,0%			
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	79,49%	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	19 Desa di 2 Kecamatan
					2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	34 Kecamatan
					3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	47 Posyandu

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	20 Desa
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	51,94%	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	8 Desa se Kecamatan Cidahu
					2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	8 Desa se Kecamatan Cidahu
					3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	74 Orang Kader Posyandu
					4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	2 LKD PKK dan BUMDES melaksanakan pameran UMKM di Bogor

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2	1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	Ada
					2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 – 49 tahun	24 Tahun
					3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15 – 19 tahun (Age Specipic Fertility Rate/ASFR 15 – 19 tahun)	4%
					4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100%
					5)	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	44 stake holders [MoU Kerjasama]
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70.96 %	1)	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	82,43%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					2)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	70,96%
					3)	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	4 Pokja [Kampung KB, SSK, Pendataan Keluarga dan Grand Design]
					4)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	99,71%
		3	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		1)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Kecamatan dengan unmeet tinggi 1]. Cisolok 18,00 % 2]. Waluran 16,65% 3]. Sukaraja 15,77% 4]. Cidadap 14,74% 5]. Cibadak 14,51%
					2)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	88,00%	1)	Persentase tersedianya fasilitas Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	64,28%
				100%			
				60,0%			
					2)	Terlaksananya pelayanan uji berkala	81,73%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					3)	Penetapan tariff angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0%
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,28	1)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	34,12%
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	3.66 %	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	3.66 %
					2)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	3.66 %
					3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ya
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan	64,87%	1)	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada	0

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
			secara online dan terintegrasi			Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	
					2)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	50%
					3)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	25,00%
					4)	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0
					5)	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan)	0

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						yang memanfaatkan sertifikat elektronik	
					6)	Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0
					7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0
					8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0
					9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data dipusat data pemerintah	50%
					10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	50%
					11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	0
					12)	Persentase perangkat daerah yang Mengimplementasi	50%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						inovasi yang mendukung smart city	
					13)	Persentase ASN pengelola TIK yang Tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	14,20%
					14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	Perbup SPBE Nomor 119 Tahun 2019
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69.99 %	1)	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kab/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota	0,86%
					2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%
					3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan	0

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menegah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	41,64%	1)	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17,07%
					2)	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerah kabupaten/kota	34,29%
					3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,70%
					4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,12%
					5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk	0

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	
					6)	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti Pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4,66%
					7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0
					8)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	
					9)	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6,99%
					10)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi	0,69%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	
					11)	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0
					12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0
					13)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,09%
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	0	1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	76,63%
					2)	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0.03%
					3)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.65%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					4)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0
					5)	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.1%
					6)	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	7,43%
					7)	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	4,02%
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	25,14%	1)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0
					2)	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	1
					3)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					4)	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0
					5)	Kegiatan pameran penanaman modal	0
					6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	616
					7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	17
					8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	8.180
					9)	Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 1.734.715.483.031,46
					10)	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	10
					11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	15
					12)	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	100%
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	4,97%	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	120 Orang/ 6 Keluarga
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	41,88%	1)	umlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	50 Orang
					2)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	50 Orang
		3	Peningkatan prestasi olahraga	7	1)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	31
					2)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	1)	Tersedianya buku profil daerah	Tidak

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0
					3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0
					4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0
					5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0
					6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	0
					7)	Persentase kelengkapan metadata indikator sectoral	0
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%			0
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	31,94%	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal disbanding banyaknya jumlah	100%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						kegiatan strategis yang harus diamankan	
					2)	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	2,6%
					3)	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori renda	0
					4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100%
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	40%	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	5 OPK

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	5 OPK
					3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2 OPK
					4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	2 lembaga
					5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	9 Cagar Budaya
					6)	Perlindungan cagar budaya Kab/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	9 Cagar Budaya
					7)	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar	-

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						Kab/Kota dengan dukungan data	
					8)	Pengembangan cagar budaya Kab/Kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-
					9)	Pemanfaatan cagar budaya Kab/Kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	9 Cagar Budaya
					10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	5 Koleksi
					11)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	272 Orang 10 Keg
					12)	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	
					13)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	5 Orang

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					14)	Pembentukan tim ahli cagar budaya Kab/Kota	-
					15)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	-
					16)	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	23 Orang
					17)	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	2 Orang
					18)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	2 Unit
					19)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	10 Kegiatan
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	79,07%	1)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	55,51%
					2)	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	46,10%
					3)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,05%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0
					5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12,93%	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0
					2)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0
					3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	62%	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	73%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					2)	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	42,68%
					3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%
					4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	33,33%
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	10%	1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	
					2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	
					3)	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						kabupaten/kota yang sesuai NSPK di Kab/Kota	
					4)	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kab/Kota yang sesuai NSPK	
					5)	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	
					6)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab/Kota yang sesuai NSPK	
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/ kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	42,627 ton	1)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	15 orang
					2)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					3)	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	2 IUP
					4)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	850 orang
					5)	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	4.227.966 ekor
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-98,30%	1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	-98,30%
					2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	5

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					3)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	36
					4)	Jumlah wisatawan Mancanegara per kebangsaan	2.226
					5)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	3
					6)	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Tidak ada
					7)	Jumlah industry pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Tidak ada
					8)	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	390%
					9)	Persentase SDM Peserta pembekalan Sector kepariwisataan	132%
					10)	Jumlah lokasi Yang memperoleh Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	4

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	-62,94%			
		3	Tingkat hunian akomodasi	698,3%			
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	33,84			
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,05			
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	628.445 ton/ha	1)	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	174 Unit
					2)	Prasaran pertanian yang digunakan	133 Unit
					3)	Penerbitan izin usaha pertanian	5
					4)	Persentase prasarana yang digunakan	100%
					5)	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	100%
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah		1)	Persentase fasilitasi Penanggulangan bencana	100%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
			Kasus Penyakit Hewan Menular				
	Kehutanan				1)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	
					2)	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	
					3)	Pemulihan ekosistem pada Tahura	
					4)	Menurunnya gangguankawasan TAHURA	
28	Energi dan Sumber Daya mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	1)	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	1
29	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	1)	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0%
					2)	Persentase penerbitan TDG	100%
					3)	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
					4)	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	
						a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0
						b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0
						c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0
					5)	Persentase pemeriksaan Fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0
					6)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100%
					7)	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana Distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0%
					8)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0.38 %
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	35,04 %.	1)	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	41,48%

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku	18.96 %.	1)	Persentase alat alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	18.96 %.
					2)	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	2,46%
31	Transmigrasi				1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	2 [dua] kawasan yang difasilitasi diluar pulau jawa, 5 [lima] kawasan transmigrasi lokal di kabupaten sukabumi
					2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	5 Satuan Pemukiman Transmigrasi Lokal di Kab. Sukabumi
					3)	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	5 Pemukiman
32	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	13,96 %			
		2	Rasio PAD	10.325.442,005			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3			
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2			
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	73,85 %			
		6	Opini Laporan Keuangan	10 [sepuluh] kali berturut turut mendapat predikat WTP [Wajar Tanpa Pengecualian]			
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%			
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang	12,05%			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
			Dilakukan Dengan Metode Kompetitif				
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	84,73 %			
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	192,80%			
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9,66%			
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%			
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	3,33 %			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
	(Manajemen Keuangan)						
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	5,86 %			
		3	Assets Management	Ya Ya Ya Ya			
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	4,87 %			
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	5.569.675.590			
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100%			
33	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	9%	1)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang	0%

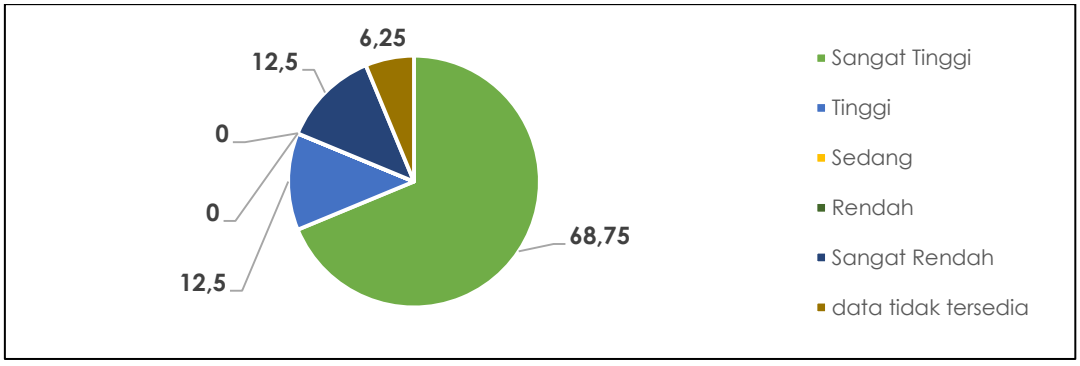
NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
						lokasinya di daerah kabupaten /kota	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	50%	1)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	20 %
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	642,42%	1)	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	100%
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	1)	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	100%
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan	100%			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTPUT
			jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota				
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	27 Perusahaan 12 Perusahaan 90 Perusahaan	1)	Persentase data perusahaan indusri menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri Kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	50%

2.5.3 Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Evaluasi pencapaian sasaran RPJMD tahun 2016-2021 bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, evaluasi ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Pada RPJMD tahun 2016-2021, terdapat 32 indikator kinerja yang menggambarkan komitmen dalam mewujudkan lima misi pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD pada tahun 2020, diperoleh rangkuman hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menentukan skala nilai peringkat capaian kinerja berdasarkan nilai realisasi kinerja dalam persentase dibagi kedalam lima kategori, yaitu sangat tinggi (91% ≤ 100%), tinggi (76% ≤ 90%), sedang (66% ≤ 75%), rendah (51% ≤ 65%), dan sangat rendah (≤50%). Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat sebanyak 2 indikator kinerja daerah yang datanya tidak tersedia, yaitu indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk dan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Hal ini disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19, sehingga kegiatan penganugerahan predikat Kabupaten Layak Anak tidak dapat diselenggarakan. Terdapat 22 indikator kinerja yang telah mencapai predikat sangat tinggi, atau sebanyak 68,75 persen. Adapun rangkuman capaian kinerja daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.105.



Gambar 2.105 Capaian kinerja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 (%)

Rasio capaian akhir sasaran strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 90,93 persen. Hingga tahun 2020, kalkulasi indikator kinerja dengan capaian yang belum mencapai 100 persen sebanyak 17 indikator. Namun, sebanyak 14 indikator yang realisasinya mencapai 100 persen. Indikator angka kematian ibu merupakan indikator dengan capaian yang negatif hingga -115,65 persen. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya pelayanan dasar kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah, belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah.

Adapun evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah secara umum berada pada kondisi yang cukup baik dengan capaian target yang tinggi. Namun, pada tahun 2020 terdapat indikator yang kinerjanya negatif diakibatkan dampak negatif pandemi Covid-19. Dampak negatif dari pandemi menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak optimal, baik dari segi anggaran yang mengalami *refocusing* hingga berdampak pada kinerja yang menurun. konsumsi pemerintah yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, proyek-proyek strategis, dan program kegiatan perangkat daerah, mengalami realokasi dan *refocusing* anggaran yang dimanfaatkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut berpengaruh terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan yang tidak optimal pada evaluasi kinerja daerah pada tahun 2020 hingga capaian akhir RPJMD periode 2016-2021. Adapun capaian indikator kinerja daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.118, dan capaian indikator kinerja pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 2.119.

Tabel 2.118 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target RPJMD Tahun					Capaian Target RPJMD Tahun					Rasio Capaian Akhir (%)	Predikat Capaian Akhir Tahun (2020)
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri																
Misi 1 : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Ekonomi Lokal Melalui Sektor Agribisnis, Pariwisata dan Industri Berwawasan Lingkungan																
1	Meningkatnya ketahanan pangan	Score Pola Pangan Harapan (PPH)	Score PPH	78 (Tahun 2017)	n.a	n.a	n.a	80,00	81,00	80,50	78,60	78,00	76,90	85,40	104,15	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,03	8,31	8,08	7,88	7,59	7,37	8,13	8,04	6,76	6,22	7,09	100,84	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA-PMDN	Persen	22.38 (PMDN) dan 15,6 (PMA)	5,00	5,25	5,50	6,00	6,50	-23,44	0,99	46,94	20,88	5,75	82,14	Tinggi
4	Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi	Persentase koperasi berkinerja baik	Persen	18,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	16,00	17,00	18,00	19,00	19,50	92,86	Sangat Tinggi
5		Persentase UMKM yang berkinerja baik	Persen	39,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	93,75	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	3.495.741 orang (keadaan Tahun 2015)	3.600.613	3.708.632	3.819.890	3.934.487	4.052.522	3.600.613	3.780.577	3.973.773	3.962.028	1.421.950	71,87	Sangat Rendah
7	Meningkatnya perdagangan dan industri	Nilai ekspor kabupaten	$	169.000.000	172.000.000	176.000.000	180.000.000	184.000.000	188.000.000	212.318.225	226.701.339	325.687.440,97	266.098.268	251.907.309	117,57	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target RPJMD Tahun					Capaian Target RPJMD Tahun					Rasio Capaian Akhir (%)	Predikat Capaian Akhir Tahun (2020)
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Religius																
8	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	1 : 350	n.a	n.a	n.a	1 : 400	1 : 450	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
9	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	Persentase Lembaga Keagamaan berkinerja baik	Persen	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	50,00	55,00	60,00	65,00	69,00	92,00	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	Persentase Aparatur mengikuti pengajian (Majelis Taklim Aparatur)	Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	65,00	65,00	70,00	75,00	30,00	35,29	Sangat Rendah
11	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	Persentase peningkatan penerimaan zakat, infaq dan sodaqoh PNS	Persen	70,00	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	75,00	75,00	103,77	82,95	81,02	85,28	Tinggi
12	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	4,50	n.a	n.a	n.a	26,19	26,44	5,30	43,18	27,88	26,89	25,11	94,37	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya partisipasi, pemberdayaan perempuan dan pengembangan hak-hak anak	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100,00	n.a	n.a	n.a	100,00	100,00	n.a	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya partisipasi, pemberdayaan perempuan dan	Predikat Kabupaten	Skor	Skoring	n.a	n.a	n.a	Pratama (600)	Madya (650)	n.a	n.a	n.a	Pratama (591,18)	n.a	84,45	n.a

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target RPJMD Tahun					Capaian Target RPJMD Tahun					Rasio Capaian Akhir (%)	Predikat Capaian Akhir Tahun (2020)
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	pengembangan hak-hak anak	Layak Anak (KLA)														
15	Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	63.75 (LPPD Tahun 2017)	55-70	55-70	55-70	55-70	55-70	n.a	63,75	62,72	62,68	61,56	87,94	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7.66 (LPPD Tahun 2017)	7-9	7-9	7-9	7-9	7-9	7,66	7,66	7,77	7,99	9,60	93,33	Sangat Tinggi
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional																
17	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Opini	Opini	n.a	n.a	n.a	WTP	WTP	n.a	n.a	n.a	WTP		100,00	Sangat Tinggi
18	Peningkatan kapabilitas ASN yang profesional	Persentase ASN yang kompeten	Nilai	n.a	n.a	n.a	n.a	49,32	50,32	n.a	n.a	n.a	45,99	24,89	47,57	Sangat Rendah
19	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai LPPD	Kategori	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	85,75	Tinggi
20	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kerjasama aktif antar Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dengan	Persen	7	n.a	n.a	n.a	71,43	85,71	n.a	n.a	n.a	75,00	97,70	97,70	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target RPJMD Tahun					Capaian Target RPJMD Tahun					Rasio Capaian Akhir (%)	Predikat Capaian Akhir Tahun (2020)
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
		Instansi Pemerintah dan Antar Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga/Masyarakat														
21	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Masyarakat atau Lembaga yang ditangani	Persen	100	n.a	n.a	n.a	100	100	n.a	n.a	n.a	98,58	100,00	100,00	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	77,00	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00	77,00	77,60	77,20	79,49	85,94	108,10	Sangat Tinggi
Misi 4 : Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah																
23	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 100.000KH	121,6/100.000 KH	40	45	35	30,00	27	109,31	109,59	104,25	89,38	85,06	-115,65	Sangat Rendah
24	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	23,98/1000KH	23	31,5	28,4	15	14	6,82	7,94	6,28	4,41	4,74	163,46	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman yang tertata	Persen	0	n.a	n.a	n.a	64,85	82,42	n.a	n.a	n.a	91,94	92,17	92,17	Sangat Tinggi
26	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana	Persentase peningkatan status desa sangat	Persen	29,13	28,61	28,08	27,56	27,03	26,51	29,13	28,61	23,62	10,24	2,10	191,92	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target RPJMD Tahun					Capaian Target RPJMD Tahun					Rasio Capaian Akhir (%)	Predikat Capaian Akhir Tahun (2020)
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	dasar permukiman	tertinggal dan tertinggal														
27	Meningkatnya harapan hidup masyarakat yang berdaya saing	Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	70,03	69,79	69,82	69,85	70,42	70,50	70,14	70,26	70,49	70,73	70,97	100,55	Sangat Tinggi
28	Meningkatnya rata-rata lama sekolah masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,79	6,46	6,51	6,56	6,84	6,89	6,74	6,79	6,80	7,02	7,07	101,87	Sangat Tinggi
29	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	Persen	50,85	42,85	46,85	50,85	54,85	57,85	51,11	54,13	54,59	63,28	71,42	119,33	Sangat Tinggi
30	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Persentase Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten	Persen	52,00	57,00	62,00	68,00	73,00	77,00	48,90	45,87	69,73	58,75	59,28	72,29	Tinggi
31	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Persentase peningkatan kinerja pelayanan transportasi	Km/ Jam	100	42	44	46	57,50	42,75	42	43,5	44,5	33,66	34,50	110,74	Sangat Tinggi
32	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,28	53,75	54,40	55,05	56,65	57,30	56,85	64,16	56,28	57,93	62,11	107,18	Sangat Tinggi

Tabel 2.119 Evaluasi Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT														
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi														
1	Pemerintahan Umum													
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,48	5,58	5,63	5,68	5,73	5,78	5,83	5,85	5,75	5,79	5,81	-1,08
	PDRB Perkapita	Rp (dlm Juta)	16,91	18,71	19,61	20,51	21,41	22,31	23,21	21,04	22,83	25,04	27,33	27,28
	Angka Kemiskinan	Persen	8,88	8,31	8,08	7,88	7,7	7,7	7,43	8,13	8,04	6,76	6,22	7,09
Fokus Kesejahteraan Masyarakat														
1	Pendidikan													
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,12	12,52	12,72	12,92	13,12	13,32	13,52	12,18	12,19	12,20	12,22	12,23
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,36	6,46	6,51	6,56	6,61	6,66	6,71	6,74	6,79	6,80	7,02	7,07
2	Kesehatan													
	Menurunnya Jumlah Kematian Ibu	per 100.000 KH	54	40	45	35	30	27	27	109,31	109,59	104,25	89,38	85,06
	Menurunnya Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	23	23	31,5	28,4	25,56	23,06	21	6,82	7,94	6,28	4,41	4,74
	Angka Harapan Hidup	tahun		69,79	69,82	69,85	69,88	69,91	69,94	70,14	70,26	70,49	70,73	70,97
	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	90	90	90	90	90	90	90	75,16	81,80	85,00	90,00	100,00
3	Ketenagakerjaan													
	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	93,55	93,64	93,75	93,84	93,94	94,05	94,15	93,55	94,88	94,84	92,23	90,40
Fokus Seni Budaya dan Olahraga														
1	Kebudayaan													
	Budaya daerah yang dikembangkan	Adat	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00	9,00	8,00	4,00
	Jumlah group/sanggar kesenian	Sanggar	5	10	10	10	10	10	10	10,00	10,00	30,00	25,00	13,00
2	Pemuda dan Olahraga													
	Olahraga berprestasi	Cabor	10	17	17	24	17	17	17	17,00	17,00	17,00	10,00	17,00
	Sarana prasarana olahraga	Lapang	36	20	20	21	20	20	20	20,00	23,00	23,00	61,00	32,00

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	Pemuda produktif	Orang/ Thn	8	30	30	30	30	30	30	30,00	30,00	30,00	10,00	0,00
	Lembaga pemuda	OKP/Th n	10	10	10	10	10	10	10	10,00	10,00	10,00	5,00	10,00
ASPEK PELAYANAN UMUM														
Fokus Layanan Urusan Wajib														
1	Pendidikan													
	APK SD Sederajat	Persen	109,06	108,65	108,06	107,56	107,06	106,56	106,06	113,12	112,76	113,28	103,74	102,01
	APK SMP Sederajat	Persen	94,59	95,09	95,59	96,09	96,59	97,09	97,59	101,94	103,62	103,66	114,09	102,37
	APM SD Sederajat	Persen	98,47	98,57	98,67	98,77	98,87	98,97	99,07	98,19	98,24	99,05	99,08	96,80
	APM SMP Sederajat	Persen	75,43	75,93	76,43	76,93	77,43	77,93	78,43	76,03	79,18	79,53	82,02	89,72
	Jumlah SD yang memenuhi SPM	Sekolah	0	0	10,00	20,00	30,00	40,00	53,00	0,00	10,00	20,00	28,00	40,00
	Jumlah SMP yang memenuhi SPM	Sekolah	0	0	10,00	20,00	30,00	40,00	53,00	0,00	2,00	4,00	19,00	37,00
	Setiap SD/MI memiliki jumlah guru kelas yang cukup (rasio antara guru kelas dengan jumlah siswa 1 : 32 orang)	Persen	42,98	42,99	43,00	43,01	43,02	43,03	43,04	48,63	51,34	63,37	64,01	64,72
	Setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran (11 mata pelajaran), dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran (7 rumpun)	Persen	52,81	53,81	54,81	55,81	56,81	57,81	58,81	21,54	29,78	58,50	58,76	58,92
	Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di setiap SD/MI minimal 2 orang untuk setiap satuan pendidikan	Persen	98,92	98,93	98,94	98,95	98,96	98,97	98,98	99,29	99,59	99,42	99,63	99,68
	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70Persen atau lebih (untuk	Persen	68,32	69,32	70,32	71,32	72,32	73,32	74,32	94,53	89,26	92,12	92,47	92,88

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	daerah khusus sebanyak 40Persen atau lebih)													
	APK PAUD (3-6 tahun)	Persen	50,34	51,22	52,10	57,10	62,10	67,10	72,10	55,66	56,60	57,77	58,83	51,54
	Angka kelulusan SD	Persen	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka Kelulusan SMP	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka DO SD	Persen	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04
	Angka DO SMP	Persen	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,25	0,25	0,13	0,12	0,15
	Angka melanjutkan dari SD Sederajat ke SMP Sederajat	Persen	95,72	95,82	95,92	96,02	96,12	96,22	96,32	99,57	97,81	98,70	99,16	99,43
	Angka melanjutkan dari SMP Sederajat ke SMA Sederajat	Persen	68,07	68,17	68,27	68,37	68,47	68,57	68,67	74,82	78,90	80,16	82,20	81,43
2	Kesehatan													
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	73	76	77	78	79	86	80	130,16	119,50	115,00	79,00	100,00
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	83	90	94	95	96	97	98	84,07	92,10	95,00	89,00	100,00
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	92,8	95	95,5	96	96,5	97	98	89,01	89,00	92,00	86,00	95,00
	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	Persen	94,5	91	92	93	94	95	96	89,01	92,00	94,00	93,00	100,00
	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) sesuai standar	Persen	104,9	96	97	98	98	99	99		92,30	103,00	106,00	n.a
	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) sesuai standar	Persen	101	87	88	89	90	91	95	100,20	97,70	99,00	96,00	100,00
	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	Persen	68,8	80	90	95	95,5	96	96,5	62,70	61,90	95,00	95,00	100,00
	Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	102	100	100	100	100	100	100	100,23	103,40	95,00	107,00	100,00
	cakupan peserta KB aktif	Persen	72,1	67	68	69	70	71	72					
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100		100	100	100	100	100	78,68	111,41	59,00	80,00	100,00

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di fasilitas kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	60,55	62,56	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Puskesmas dibandingkan Jumlah Penduduk dalam kurun waktu tertentu dibagi 100.000	rasio	2,41	2,45	2,54	2,62	2,71	2,75	2.77	1,39	n.a	n.a	2,75	2,36
	Jumlah Puskesmas Pembantu dibandingkan jumlah Penduduk dalam kurun waktu tertentu dibagi 100.000	rasio	5,33	5,41	5,5	5,58	5,67	5,75	5.80	3,07	n.a	n.a	5,75	5,75
	Cakupan PHBS di Tatanan RT	Persen	40	43	46	49	52	54	56	48,39	49,01	45,00	51,00	51,00
	Cakupan strata desa siaga aktif	Persen	5,27	29,29	52,87	76,63	100	100	100	36,27	51,03	95,00	100,00	100,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	Perda Dokumen RDTR	Dok	0	2	1	1	0	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Dokumen RTBL	Dok	0	0	2	2	2	2	2	2,00	2,00			
	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	Persen	42,85	42,85	46,85	50,85	54,85	57,85	59,85	51,11	54,13	54,59	63,28	71,42
	Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten	Persen	57	57	62	68	73	77	82	48,90	45,87	69,73	58,75	59,28
	Cakupan Tempat Sampah	Persen	74	79	84	89	92	95	100		83,90	84,00	68,00	80,35
	Persentase pengurangan sampah perkotaan	Persen	2,16	4	6	8	10	12	24	2,16	15,12	28,37	28,40	28,72
	Persentase pengangkutan sampah	Persen	14,40	16,40	18,40	20,40	22,4	24,40	26,4	14,40	11,98	19,03	19,89	23,72
	cakupan rumah layak huni	Persen	85	85,02	85,04	85,06	85,08	86	86,02	85,29	89,76	90,05	90,05	91,88

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota	Persen	3,45	5,45	7,45	9,45	11,45	13,45	15	3,45	0,00	0,00	30,74	32,20
	Tingkat kondisi infrastruktur sumber daya air dalam rangka konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persen	57	57	62	68	73	77	82	39,25	0,00	0,00	0,00	n.a
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persen	0,5	0,52	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,52	1,07	1,13	1,14	1,16
	masterplan pertamanan dan pemakaman	dok	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman													
	Cakupan layanan air minum perdesaan	Persen	44,95	46	47	48	49	50	51,00	44,18	193,00	48,78	48,22	56,08
	cakupan pelayanan air minum perkotaan	Persen	9,62	9,62	10,62	11,62	12,62	13,62	14,62	10,77	0,00	0,00	22,30	28,97
	cakupan pelayanan air limbah domestik	Persen	35,55	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	37,35	0,00	0,00	47,69	79,76
	Persentase pengurangan sampah perkotaan	Persen	2,16	4	6	8	10	12	24	2,16	15,12	28,37	28,40	28,72
	Persentase pengangkutan sampah	Persen	14,40	16,40	18,40	20,40	22,4	24,40	26,4	14,40	11,98	19,03	19,89	23,72
	Persentase pengoperasian TPA	Persen	30	30	30	30	30	40	40	15,00	15,00	30,00	30,00	70,00
	kawasan kumuh	Persen	60	60	65	70	75	80	85	100,00	95,70	16,55	8,06	7,83
	persentase Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota	Persen	3,45	5,45	7,45	9,45	11,45	13,45	15	3,45	0,00	0,00	30,74	32,20
	Pengurangan Luas Genangan	Persen	47,50	42,5	37,5	32,5	27,5	22,5	17,5	47,50	0,00	0,00	47,50	47,50
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten	Persen	35,57	35,57	40,65	45,74	50,82	55,9	60,98		40,65	40,65	40,65	40,65

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK	Persen	83	83	83	83	88	94	100	83,00	83,00	80,49	89,17	61,11
	persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Persen	24	34	44	54	64	74	84		33,00	38,35	69,70	70,45
	jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK	unit	11	1	7	7	7	7	7		0,00	0,00	3,00	2,00
5	Perencanaan Pembangunan													
	Konsistensi dokumen perencanaan	Persen	0	75	80	85	90	95	100	95,00	97,80	97,80	90,00	100,00
6	Perhubungan													
	Tersedianya simpul jaringan transportasi berbasis jalan dan keretaapi	Persen	50	55	60	65	70	75	75	52,00	59,00	63,00	68,00	70,00
	Tersedianya simpul jaringan transportasi berbasis perairan	Lokasi	0	0	1	1	2	2	3	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	Tersedianya perlengkapan Jalan (Fasilitas Lalu lintas dan PJU)	Persen	35	37	40	45	50	55	60	36,00	40,00	45,00	50,00	50,00
	Tersedianya navigasi dan fasilitas keselamatan pelayaran	Persen	35	35	37	40	42	45	50	35,00	37,00	39,00	40,00	42,00
	Tersedianya sarana angkutan umum publik dan operasional perhubungan	Persen	55	55	60	65	75	77	80	55,00	57,00	65,00	75,00	75,00
	Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas di jalan	km/jam	40	42	44	46	48	50	52	41,00	1,83	44,50	47,50	48,00
7	Menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan	kali/ tahun	40	50	100	100	100	100	100	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	meningkatnya pengawasan dan pengendalian perairan	kali/ tahun	8	8	10	10	10	10	10	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	meningkatnya kinerja angkutan umum	Persen	75	76	77	78	80	82	85	3,13	77,00	77,00	80,00	80,00
	meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Persen	75	78	80	82	85	87	90	76,00	3,33	82,00	84,50	85,00
8	Pertanahan													
	Fasilitasi pembahasan penyelesaian masalah pertanahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fasilitasi dan terinventarisasinya hak-hak atas tanah Pemkab Sukabumi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fasilitasi Penatagunaan Tanah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	98,00	100,00	98,00
9	Kependudukan dan Catatan Sipil													
	Cakupan Kepemilikan KK	Persen	90,4	92	94	96	98	99	100	95,41	96,00	96,00	99,00	99,00
	Cakupan Kepemilikan KTP	Persen	89,18	91	92	96	97	99	100	89,00	98,94	98,87	100,00	99,87
	Cakupan Kepemilikan akta kelahiran	Persen	71,89	73	80	84	88	90	91	78,00	82,00	99,99	94,11	99,08
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Persen	0,03	25	50	75	100	100	100	27,54	51,00	76,86	100,00	73,82
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Swasta dan Organisasi Perempuan	Orang	476	476	487	487	487	487	487	430		487	6,95	487,00
	Pengembangan Hak-hak Anak	Orang	50	90	130	170	210	250	290	108		170		250,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Perempuan	Orang	300	425	400	400	400	400	400	515		400	100,00	400,00
	Pencegahan dan Penanggulangan WNI-	Orang	300	350	360	370	380	390	400	387		370		390,00

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan bagi Perempuan dan Anak													
11	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera													
	cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif			70,5	70,55	70,6	70,65	70,7	70,75	69,47	70,78	70,88	71,05	70,96
	cakupan pasangan yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmet Need)			8,64	8,6	8,55	8,5	8,45	8,4	17,28	14,33	13,22	12,05	10,94
	cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB			80	80,55	80,6	80,7	80,8	80,9	81,75	81,77	85,66	85,75	86,86
	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkaatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB			87	87,1	87,2	80,3	80,4	80,5	86,00	86,08	87,52	88,16	89,17
12	Sosial													
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Orang	344	399	414	424	429	434	439	514	477	605	599	319
	Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan	Lembaga	18	10	10	10	10	10	10	11	48	27	60	2

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).													
13	Ketenagakerjaan													
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	63,71	55-70	55-70	55-70	55-70	55-70	55-70	63,75	63,75	62,72	62,68	61,56
	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	53,60	54,67	55,77	56,88	58,02	59,18	60,36	35,60	57,86	78,18	52,22	26,82
	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	8,09	07-12	07-12	07-12	07-12	07-12	07-12	7,66	7,66	7,77	7,99	9,60
	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah													
	Jumlah Koperasi yang berkinerja baik	Persen	15	16	17	18	19	20	21	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00
	Jumlah UMKM yang berkembang dan berdaya saing terlegalisasi	Persen	30	33	36	39	42	45	48	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00
15	Kebudayaan													
	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Buah/ Thn	1	1	1	1	1	1	1	17,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	festival seni dan budaya	Kali/Thn	5	5	12	12	12	12	12	5,00	5,00	12,00	15,00	20,00
16	Kepemudaan dan Olahraga													
	Sarana dan prasarana kepemudaan	Unit/Thn	1	0	1	0	1	0	1	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Penciptaan dan Penumbuhan entrepreuner baru	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
	jumlah Kegiatan pembinaan LSM, OKP/Ormas yang	LSM,OKP/ Ormas	200	200	200	200	250	300	300	200	125,00	100,00	250,00	300,00

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	terdaftar dan aktif di Kabupaten Sukabumi													
	jumlah kegiatan pendidikan/pembinaan politik daerah	orang	400	400	400	400	400	400	400	600	250,00	100,00		200,00
	Jumlah kegiatan Patroli Pemeliharaan Tibum Tranmas	keg	47	60	120	200	250	365	365	60	200,00	156,00		
	Jumlah PPNS	Org	2	1	2	3	4	4	4	1	0,00	0,00		10,00
	Jumlah anggota linmas desa terlatiih dalam tanggap darurat penanggulangan bencana	orang	386	500	1000	1500	1500	1500	1.500	500	886,00	1497,00		100,00
	Jumlah Pelanggaran PERDA	kali		25	30	40	50	50	50	85	30,00	39,00		33,00
18	Penunjang Urusan Pemerintahan													
	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	Orang	126	165	168	128	130	125	127	163,00	122	171,00		96,00
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	Orang	105	115	175	120	120	120	120	90,00	120	90,00		87,00
	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	Orang	662	0	200	200	200	200	200		207			10,00
	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	Persen	0,12	0,145	0,135	0,13	0,125	0,12	0,115	0,280	0,084	0,232		0,10
	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	100	100	100	100	100	100	100	125,00	114,07	100,62		80,00
	penataan Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan	27	4	4	4	4	4	4	4,00	4,00	4,00	8,00	5,00
	Dokumen pembentukan DOB Kabupaten Sukabumi Utara	dok	0						1					0,00
	LPPD,RPPD dan ELPPD	dok	3	3	3	3	3	3	3	5,00	6,00	5,00		
	Persentase Produk hukum yang disosialisasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	Advokasi hukum aparatur (perdata/ptun)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Penyuluhan Hukum	kali	3	4	5	6	7	8	9	4,00	6,00	5,00	4,00	1,00
	Jumlah Perda yang diundangkan	buah	25	25	25	25	25	25	25	17,00	16,00	16,00	11,00	10,00
	Prosentasi Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.	Persen	85	85	90	92	94	95	96	82,00	90,30	94,6		74,00
	Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD	Temuan	18	18	17	17	16	16	15	19,00				7,00
	Rasio Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atau Lembaga dengan jumlah pengaduan yang ditangani	Persen	92	83	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00		100,00
	Raperda dan Perbup APBD yang ditetapkan	dok	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4,00	4,00	39,00	
	Perbup tentang Pergesaran Penjabaran APBD yang ditetapkan	dok	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
19	Ketahanan Pangan													
	Penanganan Kerawanan Pangan	desa	87	7	16	16	16	16	16	7	16	16	16	16,00
	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Persen	93,3	95,3	98,3	99.0	100	100	100	95,3	98	99	98	101,00
	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Persen	79,6	80	82	85	86	88	89	80	82	85	82	85,4
	Distribusi dan Akses Pangan	desa	80	5	5	5	5	5	5	7,00	5	5	5	
	jumlah produksi padi	TON	886.304	885.882	894.741	903.600	912.458	921.317	921.317	963.925	920.894	919.127	906.626	931.334
	Jumlah produksi jagung	TON	38.424	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000	96.157	64.714	98.825	137.350	175.864
	Jumlah produksi kedelai	TON	10.922	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.480	4.228	35.092	7.246	28.496

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah produksi ubi kayu	TON	156.844	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000	170.000	130.860	137.385	98.552	110.463	119.117
	Jumlah produksi cabe	TON	26.912	27.450	28.000	28.560	29.131	29.713	29.713	23.387	21.086	27.469	33.214	23.497
	Jumlah produksi tomat	TON	24.147	24.630	25.133	25.636	26.149	26.672	26.672	19.749	17.185	19.376	16.016	14.445
	Jumlah produksi bawang merah	TON	395	403	411	420	428	437	437	908	1.274	938	455	608
	Jumlah produksi daging sapi dan kerbau	TON	1.606	1.623	1.639	1.655	1.672	1.672	1.688	1.727	1.773	1.827	1.808	1.971
	Jumlah produksi daging domba dan kambing	TON	1.477	1.492	1.507	1.522	1.537	1.537	1.553	816	822	1.692	822	1.863
	Jumlah produksi daging unggas	TON	53.274	54.777	56.325	57.918	59.557	59.557	61.245	56.189	57.400	59.267	57.833	50.356
	Jumlah produksi telur	TON/THN	33.652	31.619	31.959	32.303	32.650	32.650	33.002	33.391	33.658	37.646	31.824	38.689
	Jumlah produksi susu	LITER/ THN	5.003.520	5.053.555	5.104.091	5.155.132	5.206.683	5.206.683	5.258.750	7.859.271	5.335.359	6.095.585	5.335.880	7.186
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	Jumlah BUMDesa yang berkembang	Desa	381	5	10	10	10	10	10	5	10	10	10,00	n.a
	Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri	Kelompok		2	2	2	2	2	2	2	2	4	2,00	2,00
	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat	Desa	111	2	2	2	2	2	2	0	2	3	9,00	27,00
	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Klpk	14	5	5	5	5	5	5	5	5	10	1,00	3,00
21	Statistik													
	Buku Kabupaten Sukabumi Dalam Angka	Buku	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Buku PDRB Kabupaten Sukabumi	Buku	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Persentase keterisian SIPPD	Persen	41	50	60	70	80	90	90					
22	Kearsipan													

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	OPD yang menerapkan arsip secara baku	Persen		44,76	47,62	52,38	59,05	61,9	64,76	42,62	47,00	56,63	60,98	62,19
	Peningkatan SDM Pengelola kearsipan	kali		8	10	12	14	17	20	8,00		15,00	18,00	14,00
23	Komunikasi dan Informatika													
	Penyampaian informasi publik melalui jalinan komunikasi dan kerjasama dengan media	Persen	25	25	35	45	55	65	75	25	35	45		
	Penyampaian informasi publik melalui media informasi yang di kelola Pemerintah Daerah	Persen	25	25	35	45	55	65	75	25	35	45	90,00	95,00
	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pemda berbasis IT	Persen	35	35	45	55	65	75	85	35	45	55		55,00
24	Perpustakaan													
	Jumlah koleksi bahan perpustakaan di Kab. Sukabumi	Eksemplar	48.605	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000	60.000	50.000	53.005	54.805	55.810	54.920
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	36.588	36.800	38.000	41.000	45.000	47.000	47.000	36.800	61.714	54.659	588.188	971.592
Fokus Layanan Urusan Pilihan														
1	Pertanian													
	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	Persen	23,35	23	22,65	22,3	21,95	21,6	21,25					
	Produksi padi	TON	886.304	885.882	894.741	903.600	912.458	921.317	921.317	963.925	920.894	919.127	906.626	931.334
	Produksi jagung	TON	38.424	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000	96.157	64.714	98.825	137.350	175.864
	Produksi kedelai	TON	10.922	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.480	4.228	35.092	7.246	28.496

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah produksi Karet	Ton	7.571	7.779	7.987	8.195	8.403	8.611	8.819	3.478	8.509,08	3.472	17.093,93	12.873,07
	Jumlah produksi Teh	Ton	6.140	6.278	6.416	6.554	6.692	6.830	6.968	8.316	8.279,97	8.316	10.065,93	14.263,24
	Jumlah produksi Kelapa	Ton	45.000	45.450	45.900	46.350	46.800	47.250	47.700	12.119	53.461,06	na	139.013,50	61.377,80
	Jumlah produksi Cengkih	Ton	1.296	1.329	1.362	1.395	1.428	1.461	1.491	6.663	2.139,40	6.692	na	Na
	Jumlah produksi daging sapi dan kerbau	TON	1.606	1.623	1.639	1.655	1.672	1.672	1.688	1.727	1.773	1.827	1.808	1.971,00
	Jumlah produksi daging domba dan kambing	TON	1.477	1.492	1.507	1.522	1.537	1.537	1.553	816	822	1.692	822	1.863,00
	Jumlah produksi daging unggas	TON	53.274	54.777	56.325	57.918	59.557	59.557	61.245	56.189	57.400	59.267	57.833	50.356,00
	Jumlah produksi telur	TON/ THN	33.652	31.619	31.959	32.303	32.650	32.650	33.002	33.391	33.658	37.646	31.824	38.689,00
	Jumlah produksi susu	LITER/ THN	5.003.520	5.053.555	5.104.091	5.155.132	5.206.683	5.206.683	5.258.750	7.859.271	5.335.359	6.095.585	5.335.880	7.185,60
	Kelembagaan petani :	kelompok	3806	775	760	760	760	760	760	795,00	760,00	760,00		
	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	Gapoktan	350	25	25	25	25	25	25	53,00	25	25	25,00	
	Jumlah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)	Unit	14	3	3	3	3	3	3	5,00	3	3		
	Jumlah Koperasi Pertanian (KOPTAN)	Unit	18	8	8	8	8	8	8	9,00	8	8		
	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Unit	106	25	25	25	25	25	25	53,00	25	25		
2	Pariwisata													
	Peningkatan Sarana Prasarana objek wisata	ODTW/ tahun	5	5	5	5	5	5	5		5,00	3,00	4,00	5,00
	Meningkatnya kunjungan wisatawan:													

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	Lokal	orang/ tahun	3.380.193	3.481.599	3.586.047	3.693.628	3.804.437	3.918.570	4.036.127	3.485.066	3.657.767	3.719.483	3.831.068	1.419.724
	Mancanegara	orang/ tahun	115.548	119.014	122.585	126.262	130.050	133.952	137.970	115.547	122.810	127.145	130.960	2.226
	Event wisata	event/ tahun	6	6	12	12	12	12	12	12	12	10	16	3
3	Kelautan dan Perikanan													
	Konsumsi perikanan	Persen	25,6	10Persen	10Persen	10Persen	10Persen	10Persen	10Persen					
	Produksi perikanan tangkap	TON	13.790	14.066	14.348	14.635	14.927	15.226	15.530					
	Produksi ikan konsumsi	TON	29.551,40	34070	42870	53440	65650	80618,2	80618,2	n.a	33.857,06	35.322,46	38.042,87	34.983,33
	Produksi benih ikan konsumsi	EKOR	3.700.777.850	3.885.816.743	4.080.107.580	4.284.112.959	4.498.318.607	4.723.234.537	4.723.234.537	4.083.401.200	4.120.956.182	4.323.474.189	4.271.139	4.227.966
	Produksi ikan hias	EKOR	93.869.700	98.563.185	103.491.344	108.665.911	114.099.207	119.804.167	119.804.167	101.124.700	104.836.732	107.278.082	109.879.536	105.796.817
4	Perdagangan													
	Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang penting	Komoditas	10	10	10	10	10	10	10		10,00	10,00	10,00	10,00
	Nilai Ekspor tahun berjalan	US $	169.000.000,00	172.000.000,00	176.000.000,00	180.000.000,00	184.000.000,00	188.000.000,00	191.000.000,00	212.318.225,11	226.701.339,00	325.687.440,97	266.098.268,43	251.907.309,00
	jumlah temuan barang yang diawasi	Persen	80	75	70	65	60	55	50		70	65		n.a
	tertera ulangnya alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persen	18	20	23	26	29	34	44		23	26	29,00	29,00
	pembangunan pasar rakyat	pasar	2	3	2	2	2	2	2	5,00	3	3	2	0,00
	peningkatan pasar rakyat	pasar	8	1	1	1	2	2	2	4,00	1	3	2	0,00
	pengembangan pasar rakyat	pasar	13	1	1	3	2	2	3	3,00	1	15	2	0,00
5	Perindustrian													

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Produk IKM yang berkualitas	Produk	500	550	600	650	700	750	800					653,00
	IKM produktif	Persen	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9	9,1	8,60	8,70	8,90	8,91	9,10
6	Ketransmigrasian													
	Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pd tahun berjalan	Persen/thn	17,3	15	16,2	16,8	17	17,5	17,5	30,00	5,00	16,60	16,60	0,00
	Jumlah KK transmigran yg dibina	KK	55	30	30	30	30	30	30	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00
ASPEK DAYA SAING DAERAH														
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah														
1	Penunjang Urusan Pemerintahan													
	LPE Konstan 2010	Persen	5,48	5,58	5,63	5,68	5,73	5,78	5,83					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	skor	76	77	77,5	78	78,5	79	79,5	77,00	77,60	77,20	79,49	85,94
	Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	11	11	17	10	8,66	10	16	7,74	45,65	-29,28	9,63	6,63
	Jalinan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah	Mou & PKS	5	1	1	1	1	1	1	1,00	7,00	4,00	49,00	57,00
	Jalinan kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi pemerintah	Mou & PKS	0	0	1	0	1	0	1		2,00	9,00		
	Jalinan kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak ke tiga dan masyarakat	Mou & PKS	16	3	3	3	3	3	3	3,00	9,00	6,00		
2	Penataan Ruang													
	Dokumen Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan Ruang	Dok	0	0	2	1	1	1	1	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00
3	Penanaman Modal													
	Izin Usaha yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Persen	5	5	5,25	5,5	6	6,5	7	-73,96	149,26	48,92	93,06	23,28
	Kenaikan Nilai Realisasi PMA	Persen	5	5	5,25	5,5	6	6,5	7	36,17	-32,45	45,29	-40,70	-42,92

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2014)	Target						Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
	Pelayanan penanaman modal dan Perlindungan Investasi	Persen	0,48	0,52	0,51	0,5	0,49	0,48	0,47					0,21
	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa													
Fokus Sumber Daya Manusia														
1	Indeks Pembangunan Manusia	Point	64,07	64,75	65,08	65,42	65,96	66,08	66,41	65,13	65,49	66,05	66,87	66,88
2	TPAK	Persen	55-70	55-70	55-70	55-70	55-70	55-70	55-70	63,75	63,75	62,72	62,68	61,56

2.5.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi: SPM bidang pendidikan, SPM bidang kesehatan, SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, SPM bidang perumahan rakyat, SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan SPM bidang sosial. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar secara rinci tersaji pada Tabel 2.120.

Tabel 2.120 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Persen)	Realisasi 2019 (Persen)	Realisasi 2020 (Persen)
Pendidikan					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	99,67	91,10
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	SD 99,54 SMP 90,62	98,83 96,57
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-8 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi	100	84,65	41,63

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Persen)	Realisasi 2019 (Persen)	Realisasi 2020 (Persen)
		dalam pendidikan kesetaraan			
Kesehatan					
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	95	96,36
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	98	99,08
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	104,08
7	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	68,30
8	Pelayanaan Kesehatan pada usia pendididkan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	97	97,50
9	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	97	30,20
10	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	65	43,85

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Persen)	Realisasi 2019 (Persen)	Realisasi 2020 (Persen)
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	84,23
12	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga Negara penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	72,90
13	Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	100	106,30
14	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	JUmlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100
15	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodefici ency Virus/HIV)	Jumlah warga Negara dengan terinfeksi virus yangm melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
16	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari	100	81,33	85,08

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Persen)	Realisasi 2019 (Persen)	Realisasi 2020 (Persen)
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	61,39	79,05
Perumahan Rakyat					
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memeperoleh rumah layak huni	100	60,61	100
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kab/kota yang memeperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	71,05	91.57
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat					
20	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada	100	100	100
21	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100
22	Pelayanan pencegahan	Jumlah Warga Negara yang	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Persen)	Realisasi 2019 (Persen)	Realisasi 2020 (Persen)
	dan kesiapsiagaan terhadap bencana	memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
23	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100
Sosial					
25	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100	100	128,46
26	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabiltasi social di luar panti	100	50	129
27	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100	300,99	106,50
28	Rehabilitasi social dasar tuna social	Jumlah warga Negara / gelandangan dan	100	77,03	89,60

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Persen)	Realisasi 2019 (Persen)	Realisasi 2020 (Persen)
	khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social di luar panti			
29	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	243,20	100

Berdasarkan realisasi indikator SPM urusan pendidikan, capaian tahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan belum adanya indikator yang mencapai target SPM. Hal tersebut disebabkan oleh, aksesibilatas menuju sarana pendidikan belum merata di seluruh wilayah, dan perhatian terhadap pendidikan anak usia dini masih kurang. Realiasai indikator SPM urusan kesehatan pada tahun 2020 menunjukkan sebanyak 4 indikator yang mencapai target, kondisi tersebut menurun dari capaian tahun 2019. Capaian indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif dan usia lanjut merupakan indikator dengan capaian tersendah. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah, dan masih rendahnya pelayanan dasar kesehatan yang disediakan pemerintah daerah.

Realisasi indikator SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, meskipun realisasinya belum mencapai target. Selain itu, Realisasi indikator SPM urusan perumahan rakyat mengalami peningkatan, dengan salah satu indikatornya telah mencapai target. Di samping itu, realisasi indiaktor SPM urusan sosial dan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, dan sebagian besar indikatornya telah mencapai target SPM.

2.6 Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program yang akan dilaksanakan suatu daerah. Adanya pengarusutamaan isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana, dan/atau program bertujuan untuk memastikan konsep pembangunan berkelanjutan terintegrasi di dalam dokumen perencanaan. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi target pembangunan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan. Pencapaian target TPB dinilai berdasarkan ketercapaian indikator-indikator turunan TPB terhadap target nasional. Adanya kesenjangan antara kondisi eksisting dengan target nasional menjadi salah satu pertimbangan yang diintegrasikan dalam perumusan KRP yang relevan dengan tujuan suatu daerah.

Terdapat 215 indikator TPB yang relevan terhadap Kabupaten Sukabumi. Kondisi ketercapaian indikator tersebut kemudian dianalisis dan dikelompokkan menjadi empat yaitu indikator yang dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mecapai target nasional, indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, serta indikator yang tidak ada data. Berdasarkan hasil analisis ketercapaian indikator TPB, indikator yang telah mencapai target sebesar 32,1 persen dengan jumlah 69 indikator, indikator yang belum mencapai target sebesar 18,6 persen dengan jumlah 40 indikator, indikator yang perlu peningkatan sebesar 11,6 persen dengan jumlah 25 indikator, indikator yang perlu penurunan sebesar 5,6 persen dengan jumlah 12 indikator, dan indikator yang tidak memiliki data sebesar 32,1 persen dengan jumlah 69 indikator. Adapun ringkasan capaian TPB Kabupaten Sukabumi secara rinci tersaji dalam Tabel 2.121.

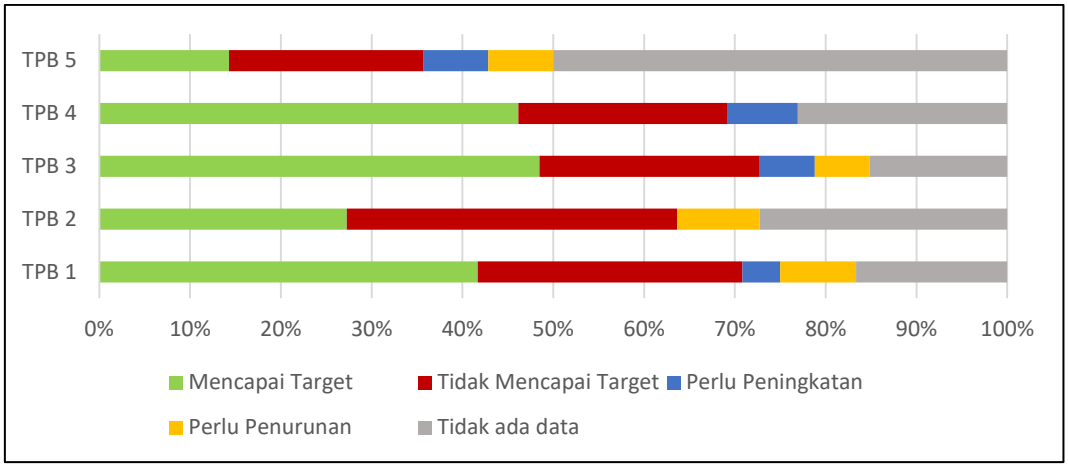
Tabel 2.121 Capaian TPB Kabupaten Sukabumi

TPB	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	Perlu Peningkatan	Perlu Penurunan	Tidak ada Data	Jumlah
TPB 1	10	7	1	2	4	24
TPB 2	3	4	0	1	3	11
TPB 3	16	8	2	2	5	33
TPB 4	6	3	1	0	3	13
TPB 5	2	3	1	1	7	14
TPB 6	5	3	4	0	6	18
TPB 7	0	0	0	0	2	2
TPB 8	6	3	1	1	8	19
TPB 9	2	0	4	0	7	13
TPB 10	2	3	1	0	5	11
TPB 11	2	2	2	2	1	9
TPB 12	0	0	0	0	5	5
TPB 13	1	0	0	1	0	2
TPB 15	0	0	4	0	0	4
TPB 16	8	1	0	2	10	21
TPB 17	6	3	4	0	3	16
Jumlah	**69**	**40**	**25**	**12**	**69**	**215**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026

2.6.1 Ketercapaian Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima TPB diantaranya adalah tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, dan tujuan 5. Jumlah indikator yang terdapat pada pilar sosial adalah 96 indikator. Berdasarkan hasil analisis TPB yang memiliki persentase indikator telah mencapai target paling tinggi adalah TPB 3 sebesar 48,5 persen dengan jumlah 16 indikator. TPB yang memiliki persentase indikator tidak mencapai target paling tinggi adalah TPB 2 sebesar 36,4 persen dengan jumlah 4 indikator. TPB dengan persentase indikator perlu peningkatan paling tinggi adalah TPB 4 sebesar 7,7 persen dengan jumlah 1 indikator. TPB dengan persentase indikator perlu penurunan paling tinggi adalah TPB 2 sebesar 9,1 persen dengan jumlah 8 indikator. TPB dengan persentase indikator tidak ada data paling tinggi adalah TPB 5 sebesar 50 persen dengan jumlah 7 indikator. Adapun capaian indikator TPB Kabupaten Sukabumi pilar sosial secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.106.

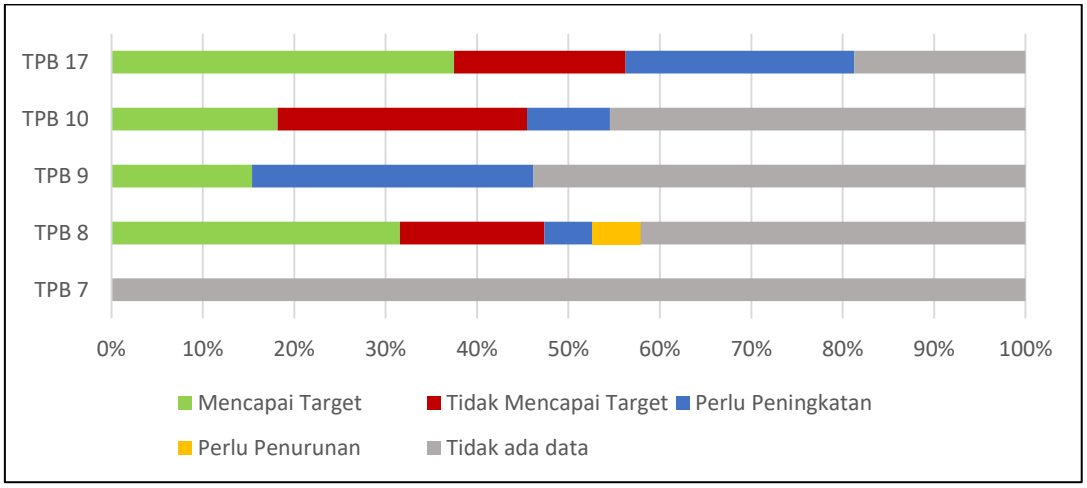


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026

Gambar 2.106 Ketercapaian Indikator TPB Kabupaten Sukabumi Pilar Sosial (%)

2.6.2 Ketercapaian Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima TPB diantaranya adalah tujuan 7, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10, dan tujuan 17. Adapun ketercapaian indikator TPB pilar ekonomi di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.107.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026

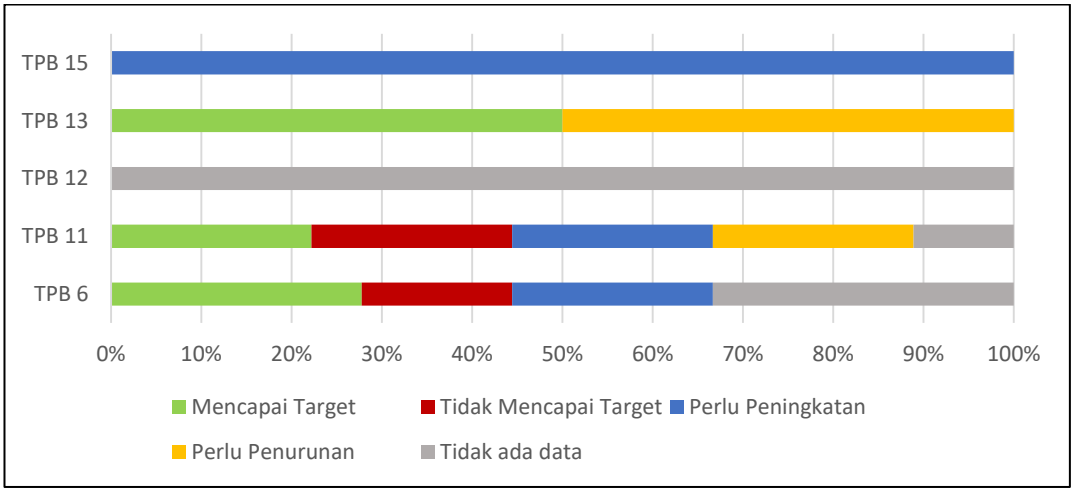
Gambar 2.107 Ketercapaian Indikator TPB Kabupaten Sukabumi Pilar Ekonomi (%)

Total untuk pilar ekonomi sebanyak 61 indikator. Berdasarkan hasil analisis TPB yang memiliki persentase indikator telah mencapai target paling tinggi adalah TPB 17 sebesar 37,5 persen dengan jumlah 6 indikator. TPB yang memiliki persentase indikator tidak mencapai target paling tinggi adalah TPB 10 sebesar 27,3 persen dengan jumlah 3 indikator. TPB dengan

persentase indikator perlu peningkatan paling tinggi adalah TPB 9 sebesar 30,8 persen dengan jumlah 4 indikator. TPB dengan persentase indikator perlu penurunan paling tinggi adalah TPB 8 sebesar 5,3 persen dengan jumlah 1 indikator. TPB dengan persentase indikator tidak ada data paling tinggi adalah TPB 7 sebesar 100 persen dengan jumlah 2 indikator.

2.6.3 Ketercapaian Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup lima TPB yaitu tujuan 6, tujuan 11, tujuan 12, tujuan 13, dan tujuan 15. Banyaknya jumlah indikator untuk pilar lingkungan adalah 38 indikator, Berdasarkan hasil analisis TPB yang memiliki persentase indikator telah mencapai target paling tinggi adalah TPB 13 sebesar 50 persen dengan jumlah 1 indikator. TPB yang memiliki persentase indikator tidak mencapai target paling tinggi adalah TPB 11 sebesar 22,2 persen dengan jumlah 2 indikator. TPB dengan persentase indikator perlu peningkatan paling tinggi adalah TPB 15 sebesar 100 persen dengan jumlah 4 indikator. TPB dengan persentase indikator perlu penurunan paling tinggi adalah TPB 13 sebesar 50 persen dengan jumlah 1 indikator. TPB dengan persentase indikator tidak ada data paling tinggi adalah TPB 12 sebesar 100 persen dengan jumlah 5 indikator. Adapun ketercapaian indikator TPB pilar lingkungan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.108.

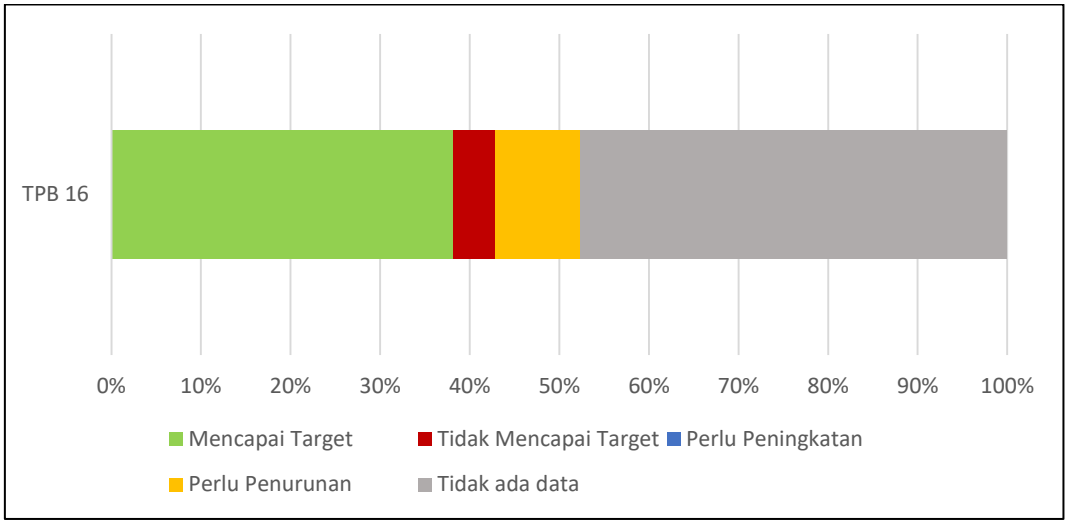


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026

Gambar 2.108 Ketercapaian Indikator TPB Kabupaten Sukabumi Pilar Lingkungan (%)

2.6.4 Ketercapaian Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola mencakup TPB 16 dengan jumlah indikator 21 indikator. Berdasarkan hasil analisis, persentase indikator dengan target tercapai sebesar 38,10 persen dengan 8 indikator. Persentase indikator yang tidak mencapai target sebesar 4,76 persen dengan jumlah 1 indikator, persentase perlu peningkatan sebesar 0 persen. Persentase indikator yang perlu penurunan sebesar 9,5 persen dengan 2 indikator. Persentase indikator yang tidak memiliki data sebesar 47,61 persen dengan jumlah 10 indikator. Adapun ketercapaian indikator TPB pilar hukum dan tatakelola di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.109.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026

Gambar 2.109 Ketercapaian Indikator TPB Kabupaten Sukabumi Pilar Hukum dan Tata Kelola (%)

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan anggaran yang baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) Pemerintah Daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kinerja pencapaian pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah serta struktur dan akurasi belanja. Neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 didasarkan pada kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Adapun penyajian serta analisisnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, struktur APBD Kabupaten Sukabumi terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

A. Komponen Pendapatan, terdiri dari:

1) Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah;

2) Pendapatan transfer yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah;
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Komponen Belanja, terdiri dari:
1) Belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
2) Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya;
3) Belanja tidak terduga;
4) Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

C. Komponen Pembiayaan, terdiri dari:
1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah (investasi), pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto tersebut dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sukabumi dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi serta proporsi pendapatan dan belanja daerah. Data yang digunakan dalam analisis tersebut adalah data realisasi APBD Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Adapun data tersebut tersaji dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Realisasi APBD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2020

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD (dalam juta rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	**Pendapatan Daerah**	**3.404.491**	**3.750.151**	**3.762.188**	**4.063.104**	**3.927.303**	**3,78%**
4.1.	Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PAD)	548.936	799.500	565.369	619.789	660.865	8,15%
4.1.01.	Pajak Daerah	205.356	236.812	235.668	267.563	271.105	7,42%
4.1.02.	Retribusi Daerah	34.516	41.652	38.982	31.585	22.273	-8,55%
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.542	9.479	9.724	8.485	11.538	9,20%
4.1.04.	Lain-Lain Pad Yang Sah	300.522	511.558	280.995	312.156	355.949	12,57%
4.2.	Pendapatan Transfer	2.846.115	2.915.591	2.929.548	3.138.185	2.939.675	0,93%
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.537.993	2.586.862	2.584.376	2.839.345	2.563.432	0,49%
	Bagi Hasil Pajak	81.315	80.117	87.026	77.424	81.409	0,32%
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	66.483	80.915	64.016	143.837	55.713	16,06%
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.595.761	1.575.410	1.580.415	1.654.344	1.494.698	-1,48%
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	466.837	213.281	232.696	590.117	253.637	12,84%
	Dana Penyesuaian	327.598	637.140	620.224	373.624	677.974	33,38%
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	308.121	328.729	345.171	298.840	376.243	6,04%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	202.838	219.323	236.419	259.578	250.254	5,53%
	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	105.283	109.406	108.752	39.263	125.989	40,08%
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.440	35.060	267.271	305.130	326.763	238,74%
4.3.01.	Pendapatan Hibah	9.440	31.389	249.217	286.762	315.565	237,89%
4.3.02.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	3.671	18.054	18.368	11.198	113,61%
5	**Belanja Daerah**	**3.388.582**	**3.674.930**	**3.824.205**	**4.081.695**	**4.027.793**	**4,48%**
5.1.	Belanja Operasi	2.381.440	2.561.221	2.673.104	2.865.395	2.759.016	3,85%
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.367.373	1.243.626	1.360.715	1.404.959	1.318.619	-0,63%
5.1.02.	Belanja Barang Dan Jasa	961.521	1.249.429	1.210.744	1.338.367	1.196.766	6,70%
5.1.03.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
5.1.04.	Belanja Subsidi	3.126	2.527	-	-	-	
5.1.05.	Belanja Hibah	42.576	56.561	78.014	99.028	217.971	54,46%
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	6.843	9.077	23.631	23.040	25.660	50,47%

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD (dalam juta rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
5.2.	Belanja Modal	551.261	545.841	614.381	603.785	449.099	-3,94%
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	5.672	9.855	17.936	33.583	4.114	38,81%
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	131.961	102.093	105.422	117.076	125.676	-0,24%
5.2.03.	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	178.812	163.354	225.523	257.896	122.239	-2,21%
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	227.364	214.767	204.760	126.565	127.832	-11,85%
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.630	55.106	58.856	67.611	68.371	188,48%
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	821	666	1.883	1.054	867	25,52%
5.3.	Belanja Tidak Terduga	3.132	5.591	7.972	4.366	206.583	1176,97%
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	3.132	5.591	7.972	4.366	206.583	1176,97%
		-	-	-	-	-	
5.4.	Belanja Transfer	452.750	562.277	528.748	608.149	613.095	8,51%
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	33.709	33.853	39.262	39.118	37.431	2,93%
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	419.041	528.424	489.486	569.031	575.664	9,04%
	Surplus/(Defisit)	**15.909**	**75.222**	**-62.017**	**-18.591**	**-100.490**	**140,22%**
6	**Pembiayaan**						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	275.751	276.094	330.601	250.465	218.279	-4,31%
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaan Tahun Sebelumnya	275.751	276.094	330.601	250.465	198.629	-6,27%
6.1.03.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	19.650	
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	13.790	20.715	18.116	33.245	30.304	28,08%
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	755	715	726	745	304	-15,09%
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	13.035	20.000	17.390	32.500	30.000	29,90%
6.2.03.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	
	Pembiayaan Netto	**261.960**	**255.380**	**312.485**	**217.220**	**187.975**	**-6,03%**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Darah Tahun Berjalan	**277.869**	**330.601**	**250.468**	**198.629**	**87.485**	**-20,48%**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2021

3.1.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Kinerja realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut terutama dikarenakan tidak terpenuhinya target pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2016, pendapatan daerah sempat melebihi target hingga 103,95 persen. Namun demikian, mulai tahun 2017 hingga tahun

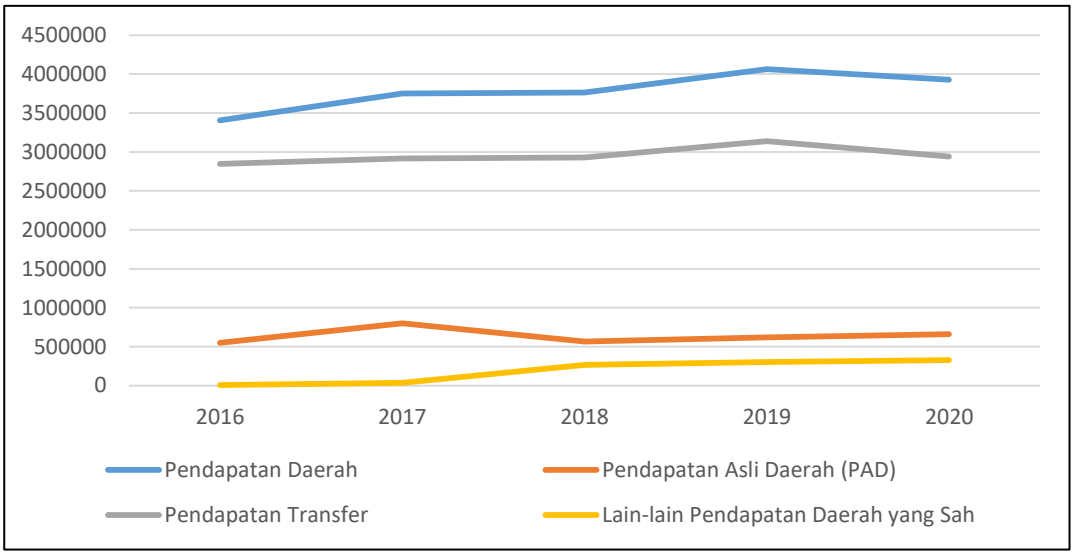
2020 pendapatan daerah tidak memenuhi target, dengan persentase capaian sebesar 99,03 persen pada tahun 2017, 99,60 persen pada tahun 2018, 99,75 persen pada tahun 2019, dan 97,44 persen pada tahun 2020. Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	APBD		%	Bertambah/ Berkurang
	Target	Realisasi		
2016	3.275.138.990.000	3.404.491.216.859	103,95	129.352.226.859
2017	3.787.061.995.602	3.750.151.137.874	99,03	(36.910.857.728)
2018	3.777.399.502.600	3.762.187.754.583	99,60	(15.211.748.017)
2019	4.073.458.814.000	4.063.103.668.997	99,75	(10.355.145.003)
2020	4.030.658.755.312	3.927.302.770.715	97,44	(103.355.984.597,00)
Rata-rata	**3.788.743.611.503**	**3.781.247.309.806**	**99,80**	**-7.496.301.697**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2021

Jika dilihat dari pertumbuhan realisasinya, pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,15 persen per tahun. Namun demikian, pada tahun 2020 pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan hingga 135,8 Milyar Rupiah atau sebesar -3,34 persen. Penurunan tersebut dikarenakan berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat hingga 9,72 persen akibat pengalihan relatif belanja nasional untuk mengatasi dampak pandemi covid-19. Tren Perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tersaji pada Gambar 3.1.



Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2021

Gambar 3.1 Tren Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

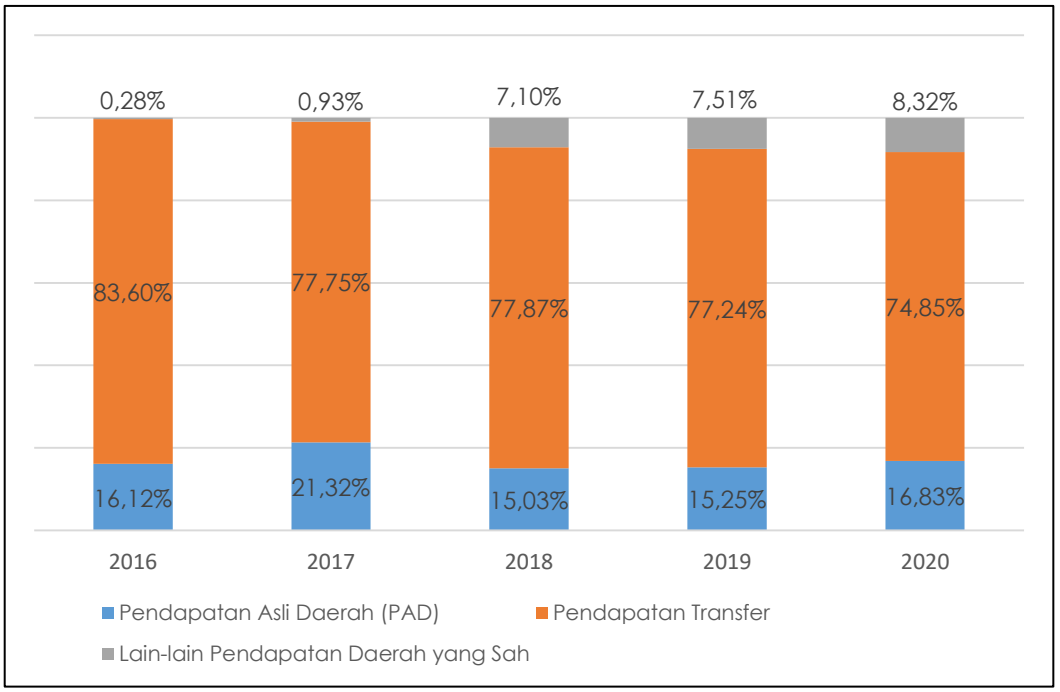
Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020, komponen pendapatan transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Proporsi pendapatan transfer pada tahun 2016 mencapai nilai tertinggi hingga 83,60 persen. Proporsi tersebut menurun cukup signifikan pada tahun 2017 hingga mencapai 77,75 persen, bahkan pada tahun 2020 proporsi komponen pendapatan transfer menurun tajam hingga menjadi 74,85 persen. Berbeda dengan komponen pendapatan transfer, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terus mengalami peningkatan dari 0,28 persen pada tahun 2016 menjadi 8,32 persen pada tahun 2020.

Perkembangan komponen pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukabumi cenderung fluktuatif. Setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 hingga mencapai 21,32 persen dibandingkan tahun 2016 yang hanya 16,12 persen, namun pendapatan asli daerah menurun proporsinya hingga mencapai 15,03 persen pada tahun 2018. Kendati demikian, pada tahun 2019 dan tahun 2020, proporsi pendapatan asli daerah meningkat kembali menjadi 15,25 persen dan 16,83 persen. Perkembangan proporsi realisasi komponen pendapatan daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Gambar 3.2.

Tabel 3.3 Perkembangan proporsi realisasi komponen pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Pendapatan Daerah (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	16,12	21,32	15,03	15,25	16,83
Pendapatan Transfer	83,60	77,75	77,87	77,24	74,85
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,28	0,93	7,10	7,51	8,32
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2020



Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2020 (diolah)

Gambar 3.2 Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Secara rinci target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, realisasi PAD selalu melebihi target yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian sebesar 103,79 persen. Hal ini tentunya sangat baik dan mengindikasikan keberhasilan kinerja penerimaan PAD di Kabupaten

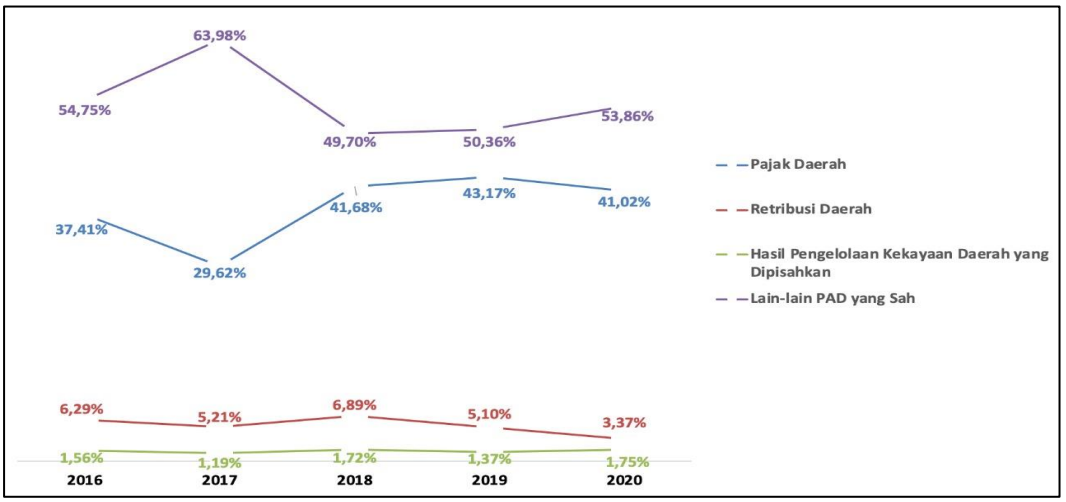
Sukabumi. Besaran target dan realisasi PAD Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Target dan realisasi PAD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		%	Bertambah/ Berkurang
	Target	Realisasi		
2016	532.785.856.000	548.936.312.987	103,03	16.150.456.987
2017	776.770.288.602	799.499.855.484	102,93	22.729.566.882
2018	545.634.867.000	565.369.086.733	103,62	19.734.219.733
2019	598.884.771.544	619.788.612.706	103.49	20.903.841.162
2020	624.253.231.412	660.864.870.832	105,86	36.611.639.420
Rata-rata	**615.665.802.912**	**638.891.747.748**	**103,79**	**23.225.944.837**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2020

PAD Kabupaten Sukabumi mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan dan penurunan pada setiap komponen pembentuknya. Komponen PAD yang memiliki kontribusi terbesar adalah komponen lain-lain PAD yang sah, yang mencapai 53,86 persen pada tahun 2020. Komponen kedua yang memiliki kontribusi terbesar adalah pajak daerah dengan kontribusi 41,02 persen pada tahun 2020, lalu diikuti retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan proporsi hanya 3,37 persen dan 1,75 persen pada tahun 2020. Kendati mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, komponen lain-lain PAD yang sah tetap mendominasi pada setiap tahunnya. Adapun pajak daerah mengalami peningkatan dari 37,41 persen pada tahun 2016 menjadi 41,02 persen pada tahun 2020. Untuk komponen retribusi daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 6,29 persen pada tahun 2016 menjadi 3,37 persen pada tahun 2020, sedangkan komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung stagnan berkisar antara 1,19 hingga 1,75 persen. Tren perkembangan proporsi realisasi komponen PAD Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 3.3 Proporsi Realisasi Komponen PAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Komponen lain-lain PAD yang sah, yang menjadi komponen dengan proporsi terbesar dalam PAD Kabupaten Sukabumi dibentuk dari berbagai jenis pendapatan, seperti Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Penerimaan Atas Penyelesaiaan Kerugian Daerah, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Penerimaan Denda/Bunga Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan Fasilitas Sosial dan Umum, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Pendapatan dari Operasional BLUD, Pendapatan Lainnya, Penerimaan Kafitasi Badan Penyelenggara JamSos BPJS, Penerimaan Piutang Pajak Daerah, dan Penerimaan Dana Bos. Dari semua jenis pendapatan dalam komponen lain-lain PAD yang sah, pendapatan dari operasional BLUD merupakan pendapatan dengan proporsi terbesar, yaitu mencapai 95,01 persen pada tahun 2020. Hal ini tentu saja menjadi keterbatasan dalam hal keleluasaan alokasi belanja yang menggunakan anggaran yang bersumber dari PAD, karena pendapatan dari operasional BLUD tidak dapat dialokasikan untuk membiayai program atau kegiatan lain kecuali untuk keperluan operasional BLUD Kembali. Di samping itu, terdapat juga penerimaan kafitasi JKN yang alokasinya sudah ditentukan dan tidak dapat dipergunakan untuk belanja program atau kegiatan lainnya.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang diterima Kabupaten Sukabumi berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana penyesuaian. Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi.

Realisasi pendapatan transfer dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu dari 103,81 persen pada tahun 2016 menjadi 95,87 persen pada tahun 2020. Hal tersebut tentu menjadi catatan tersendiri dan perlu perbaikan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, agar penyerapan anggaran ke depan dapat lebih optimal. Persentase realisasi pendapatan transfer dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

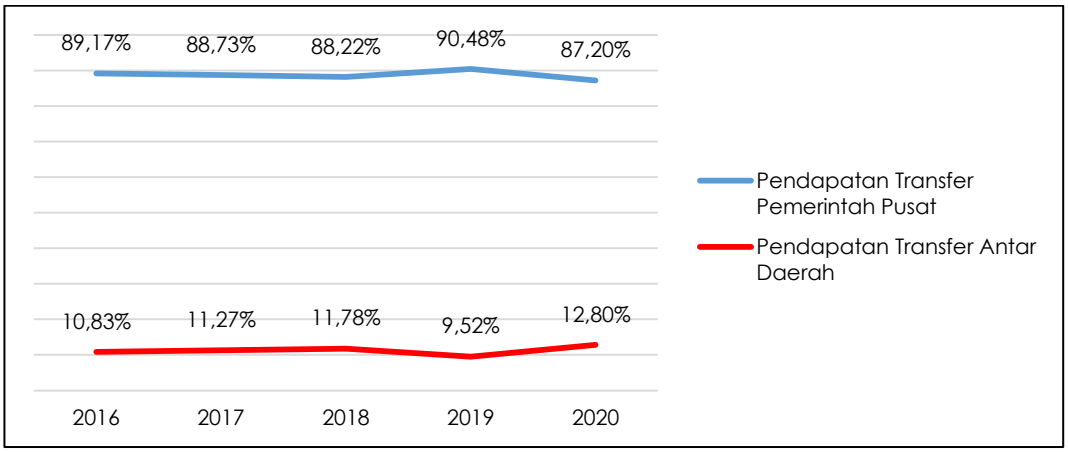
Tabel 3.5 Target dan realisasi pendapatan transfer Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer		%	Bertambah/ Berkurang
	Terget	Realisasi		
2016	2.741.591.411.000	2.846.114.579.472	103,81	104.523.168.472
2017	2.990.256.907.000	2.915.591.195.900	97,50	(74.665.711.100)
2018	2.969.683.081.170	2.929.547.752.627	98,65	(40.135.328.543)
2019	3.157.166.238.655	3.138.185.315.926	99,40	(18.980.922.729)
2020	3.066.411.386.929	2.939.674.546.327	95,87	(126.736.840.602)
Rata-rata	**2.276.100.666.426**	**2.271.743.637.407**	**99,88**	**-4.357.029.019**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2020

Realisasi pendapatan transfer dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa komponen pendapatan transfer pemerintah pusat memiliki proporsi terbesar, dan hanya relatif kecil berasal dari komponen pendapatan transfer antar daerah. Proporsi pendapatan transfer pemerintah pusat adalah 89,17 persen pada tahun 2016, 88,73 persen pada tahun 2017, 88,22 persen pada tahun 2018, 90,48 persen pada tahun 2019, dan 87,20 persen pada tahun 2020. Adapun pendapatan transfer antar daerah hanya mencapai 10,83 persen pada tahun 2016, 11,27 persen pada tahun 2017, 11,78 persen pada tahun 2018, 9,52 persen pada

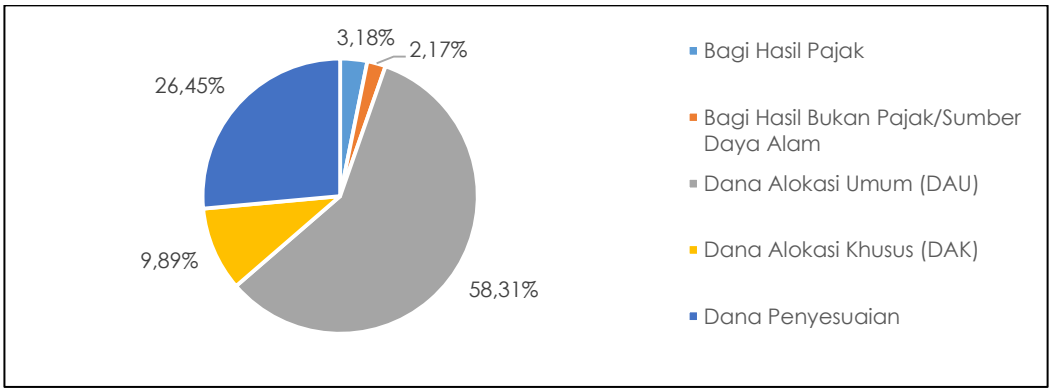
tahun 2019, dan 12,80 persen pada tahun 2020. Tren perkembangan proporsi realisasi pendapatan transfer dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 3.4 Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Jika dilihat dari komposisi pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) menjadi penyumbang terbesar dengan proporsi 58,31 persen pada tahun 2020. Proporsi terbesar selanjutnya adalah dana penyesuaian (26,45 persen), dana alokasi khusus (9,89 persen), bagi hasil pajak (3,18 persen), dan bagi hasil bukan pajak/SDA (2,17 persen). Proporsi realisasi masing-masing komponen pendapatan dalam pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.5.

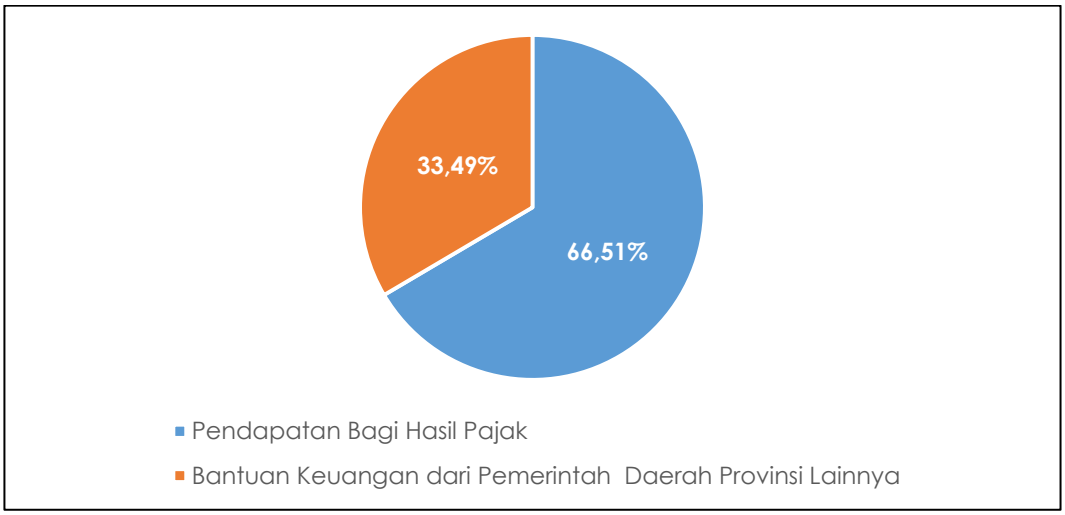


Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 3.5 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020

Di samping itu, untuk pendapatan transfer antar daerah, komponen pendapatan hasil pajak menjadi penyumbang terbesar dengan proporsi

mencapai 66.51 persen pada tahun 2020. Adapun bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi hanya mencapai 33,49 persen. Proporsi realisasi pendapatan hasil pajak dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi terhadap pendapatan transfer antar daerah pada tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 3.6 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2020

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

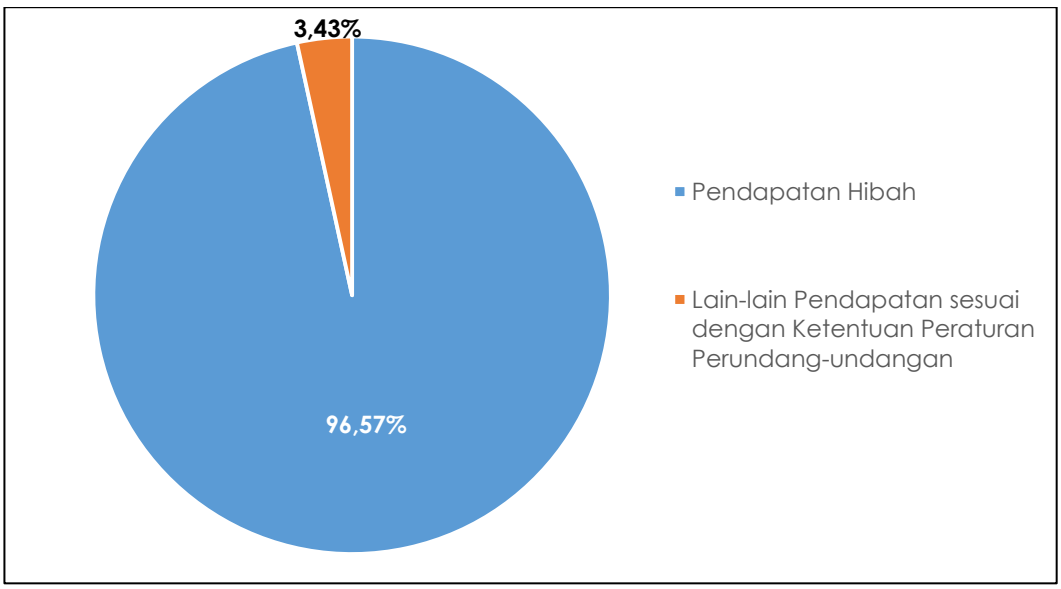
Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten sendiri pada tahun 2016, lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya bersumber dari pendapatan hibah. Adapun lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baru diperoleh dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, dari 9,4 Milyar Rupiah pada tahun 2016 menjadi 326,76 Milyar Rupiah pada tahun 2020. Namun demikian, jika dibandingkan dengan terget yang telah ditetapkan, pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan tahun 2020, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mencapai target, yaitu hanya 96,13 persen dan 96,11 persen. Target dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Target dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
	Target	Realisasi
2016	761.723.000	9.440.324.400
2017	20.034.800.000	35.060.086.490
2018	262.081.554.430	267.270.915.223
2019	317.407.803.801	305.129.740.365
2020	339.994.136.971	326.763.353.556

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2020

Pendapatan hibah merupakan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan proporsi tertinggi dibandingkan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2020 pendapatan hibah mencapai 96,57 persen, sedangkan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya 3,43 persen. Proporsi realisasi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 3.7 Proporsi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2020

d. Indeks Kemandirian Fiskal

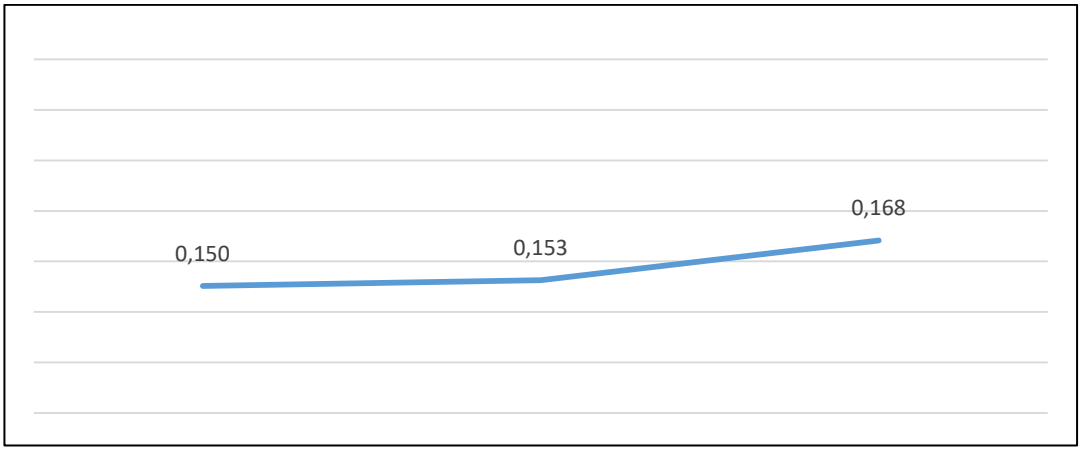
Menurut BPK (2020), kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Salah satu metode untuk menghitung kemandirian fiskal daerah adalah dengan menggunakan *Fiscal Autonomy Index* (FAI) atau tingkat kemandirian fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977). Formula Hunter (1977) dikembangkan di negara federal dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi. Formula tersebut menjadi rumit ketika diterapkan di negara-negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang rendah. Oleh karena itu, BPK melakukan modifikasi dalam menghitung tingkat kemandirian fiskal daerah menggunakan total pendapatan daerah sebagai *proxy* variabel belanja daerah, sehingga dihasilkan perbandingan antara PAD dengan total pendapatan. Hasil perhitungan IKF kemudian dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori/kondisi kemandirian fiskal yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Klasifikasi kondisi kemandirian fiskal daerah

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	0,00 ≤ IKF ≤ 0,25	Belum mandiri
2	0,25 ≤ IKF ≤ 0,50	Menuju kemandirian
3	0,50 ≤ IKF ≤ 0,75	Mandiri
4	0,75 ≤ IKF ≤ 1,00	Sangat mandiri

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan IKF Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020, Kabupaten Sukabumi masih termasuk dalam kategori belum mandiri. Hal ini dikarenakan nilai IKF Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah 0,25, yaitu dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 0,150, pada tahun 2019 sebesar 0,153, serta pada tahun 2020 sebesar 0,168. Tren perkembangan IKF Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.8.



Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 3.8 Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

Melihat kondisi di atas, maka salah satu kelemahan dari tingkat kemandirian fiskal yang masih belum mandiri adalah relatif tingginya ketidakpastian pendapatan dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Selain itu, aliran pendapatan transfer juga tidak sepenuhnya dalam kendali Pemerintah Kabupaten Sukabumi, sehingga ada kemungkinan terjadi keterlambatan proses pencairan atau bahkan terjadi *refocusing* yang menyebabkan pengurangan pendapatan transfer seperti yang terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021, akibat adanya pandemi covid-19. Sebaliknya, jika sumber pendapatan terbesar berasal dari PAD, maka proyeksi pendapatan akan lebih dapat diprediksi dengan baik, sehingga mempermudah perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

3.1.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Sukabumi berdasarkan pada prinsip-prinsip anggaran kinerja (*performance budget*) yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja dari input yang direncanakan, dengan memerhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga pada akhirnya pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Pada periode tahun anggaran 2016 hingga 2020, rata-rata target belanja daerah sebesar Rp4.033.879.761.994, sedangkan realisasinya sebesar Rp3.799.475.872.811. Adapun realisasi belanja daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu melebihi 90 persen, dengan capaian terbesar pada tahun 2016, yaitu sebesar 95,54 persen, dan capaian terkecil pada tahun 2017, yaitu sebesar 91,28 persen. Data target dan realisasi belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2016	3.546.934.415.000	3.388.582.158.300	95,54	(158.352.256.700)
2017	4.025.792.741.602	3.674.929.558.014	91,28	(350.863.183.558)
2018	4.090.252.816.600	3.824.205.058.246	93,50	(266.047.758.354)
2019	4.287.481.113.640	4.081.820.368.395	95,20	(205.660.745.245)
2020	4.218.937.723.129	4.027.842.221.100	95,47	(191.095.502.029)
Rata-rata	**4.033.879.761.994**	**3.799.475.872.811**	**94,20**	**(234.403.889.177)**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2021

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis neraca keuangan daerah digunakan untuk melihat kondisi keuangan daerah yang mencakup aset (aktiva) dan klaim atas aset tersebut yang berasal dari kewajiban/hutang dan ekuitas/modal (pasiva). Di sisi aktiva, jumlah aset lancar dan dana cadangan mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan rata-rata penurunan sebesar -11,85 persen dan -21,61 persen, sedangkan untuk investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya mengalami kenaikkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,92 persen, 6,66 persen dan 78,40 persen. Di sisi pasiva, jumlah kewajiban/hutang dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 73,18 persen, begitupun dengan ekuitas yang mengalami kenaikkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,60 persen. Rata-rata pertumbuhan neraca keuangan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2026 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Rata-rata pertumbuhan neraca keuangan daerah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2020

No	Uraian	Realisasi Neraca (dalam juta rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
I	**ASET**						
I-1	**ASET LANCAR**						
	Kas di Kas Daerah	139.222,79	90.101,20	27.858,33	143.225,70	28.371,13	57,39%
	Kas di Bendahara Penerimaan	87,23	65,05	32,00	47,58	-	-31,89%
	Kas di Bendahara Pengeluaran	8,32	0,77	0,03	0,03	-	-67,23%
	Kas di BLUD	17.693,86	5.855,59	17.674,89	35.572,07	56.988,40	74,10%
	Kas di Rekening Dana Kapitasi	51.246,28	62.665,75	36.492,59	-	-	-
	Setara Kas	71.913,97	171.913,97	172.441,31	19.783,59	2.761,63	-8,80%
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
	Piutang Pendapatan	232.429,05	208.976,41	208.818,06	49.953,52	147.725,97	27,37%
	Piutang Lainnya	23.907,34	22.918,81	44.819,72	43.524,13	5.882,35	0,51%
	Penyisihan Piutang	(178.018,99)	(164.954,90)	(169.433,08)	436,84	411,05	-27,70%
	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-
	Persediaan	93.995,69	47.163,36	44.912,51	37.262,67	28.580,55	-23,73%
	Jumlah Aset Lancar	452.485,54	444.706,01	383.616,35	329.806,12	270.721,09	-11,85%
I-2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	131.943,96	154.734,86	185.923,88	220.970,20	246.162,45	16,92%
I-3	**ASET TETAP**						
	Jumlah Aset Tetap	3.116.087,88	3.200.896,98	3.584.013,47	3.685.747,97	4.020.861,07	6,66%
I-4	**DANA CADANGAN**						
	Jumlah Dana Cadangan	17.463,79	18.178,37	18.904,76	19.650,15	303,85	-21,61%
I-5	**ASET LAINNYA**						
	Jumlah Aset Lainnya	71.773,91	66.102,06	65.460,61	280.609,28	263.172,37	78,40%
	JUMLAH ASET	**3.789.755,08**	**3.884.618,28**	**4.237.919,08**	**4.536.783,72**	**4.801.220,84**	**6,12%**

No	Uraian	Realisasi Neraca (dalam juta rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
II	**KEWAJIBAN**						
II-1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**						
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	17.630,81	24.863,03	70.755,03	66.043,29	114.774,08	73,18%
II-2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**						
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	**17.630,81**	**24.863,03**	**70.755,03**	**66.043,29**	**114.774,08**	**73,18%**
	Ekuitas	3.772.124,27	3.859.755,25	4.167.164,05	4.470.740,43	4.686.446,76	5,60%
	JUMLAH EKUITAS	**3.772.124,27**	**3.859.755,25**	**4.167.164,05**	**4.470.740,43**	**4.686.446,76**	**5,60%**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.789.755,08**	**3.884.618,28**	**4.237.919,08**	**4.536.783,72**	**4.801.220,84**	**6,12%**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2021 (diolah)

Analisis terhadap neraca keuangan daerah, selain melihat bagaimana pertumbuhan masing-masing komponen di dalamnya, perlu juga dilihat bagaimana kualitas dari neraca keuangan daerah tersebut. Untuk melakukan analisis tersebut digunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sedangkan rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Analisis rasio likuiditas menggunakan 2 (dua) jenis rasio, yaitu rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aktiva lancar atau aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio *quick* dihitung hampir sama dengan rasio lancar, namun aktiva lancarnya telah dikurangi persediaan. Hasil perhitungan rasio lancar Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 adalah sebesar 2,36, sedangkan rasio *quick* sebesar 2,11. Angka tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki jumlah aset lancar sebanyak 2,36 kali kewajiban jangka pendeknya, sedangkan jika dilihat aset lancar yang telah dikurangi persediaan, jumlahnya 2,11 kali kewajiban jangka pendeknya. Nilai tersebut mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kendati demikian, jika dilihat trennya, baik rasio lancar maupun rasio *quick* terus mengalami penurunan dari 2016

hingga 2020, yaitu dari 25,66 menjadi 2,36 untuk rasio lancar dan 20,33 menjadi 2,11 untuk rasio *quick*. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Sukabumi dari 17,6 Milyar Rupiah pada tahun 2016 menjadi 114,7 Milyar Rupiah pada tahun 2020.

Analisis rasio solvabilitas menggunakan 2 (dua) jenis rasio, yaitu rasio hutang/ kewajiban terhadap total aset (*Debt to Aset Ratio*/DAR) dan rasio hutang/ kewajiban terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*/DER). Pada tahun 2020, rasio hutang/ kewajiban terhadap total aset Kabupaten Sukabumi sebesar 2,39 persen, sedangkan rasio hutang/ kewajiban terhadap modal sebesar 2,45 persen. Nilai tersebut tergolong sangat rendah, karena menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukabumi hanya 2,39 persen dari total asetnya dan hanya 2,45 persen dari modal. Dengan demikian, mayoritas aset Pemerintah Kabupaten Sukabumi dibentuk dari modal yaitu sebesar 97,61 persen. Dilihat dari trennya, baik rasio hutang/ kewajiban terhadap total aset maupun rasio hutang/ kewajiban terhadap modal mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu dari 0,47 persen menjadi 2,39 persen untuk rasio hutang/ kewajiban terhadap total aset, dan dari 0,47 persen menjadi 2,45 persen untuk rasio hutang/ kewajiban terhadap modal. Data perkembangan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dpaat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Analisis neraca keuangan Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2020

No	Rasio Keuangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Rasio Likuiditas**					
a	Rasio Lancar	25,66	17,89	5,42	4,99	2,36
b	Rasio quick	20,33	15,99	4,79	4,43	2,11
2	**Rasio Solvabilitas**					
a	*Debt to Aset Ratio* (DAR)	0,47%	0,64%	1,67%	1,46%	2,39%
b	*Debt to Equity Ratio* (DER)	0,47%	0,64%	1,70%	1,48%	2,45%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2021 (diolah)

3.2 Kebijakan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan data realisasi belanja daerah, komponen belanja operasi merupakan jenis belanja yang mendominasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Proporsi rata-rata belanja operasi terhadap total belanja daerah adalah sebesar 69,71 persen, sedangkan proporsi rata-rata belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer berturut-turut hanya sebesar 14,63 persen, 1,14 persen, dan 14,52 persen. Di dalam belanja operasi sendiri, belanja pegawai menjadi jenis belanja yang paling dominan dengan proporsi rata-rata mencapai 35,39 persen dari total belanja daerah, sedangkan belanja barang dan jasa menjadi jenis belanja terbesar kedua yang masuk dalam komponen belanja operasi dengan proporsi rata-rata sebesar 31,31 persen dari total belanja daerah. Data proporsi realisasi jenis belanja daerah di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tersaji dalam Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Proporsi realisasi jenis belanja daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Kode Rekening	Uraian	Tahun					Proporsi Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
5	**Belanja Daerah**						
5.1.	**Belanja Operasi**	**70,28%**	**69,69%**	**69,90%**	**70,20%**	**68,50%**	**69,71%**
5.1.01.	Belanja Pegawai	40,35%	33,84%	35,58%	34,42%	32,74%	35,39%
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28,38%	34,00%	31,66%	32,79%	29,71%	31,31%
5.1.03.	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.1.04.	Belanja Subsidi	0,09%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
5.1.05.	Belanja Hibah	1,26%	1,54%	2,04%	2,43%	5,41%	2,53%
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	0,20%	0,25%	0,62%	0,56%	0,64%	0,45%
5.2.	**Belanja Modal**	**16,27%**	**14,85%**	**16,07%**	**14,79%**	**11,15%**	**14,63%**
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	0,17%	0,27%	0,47%	0,82%	0,10%	0,37%
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,89%	2,78%	2,76%	2,87%	3,12%	3,08%
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,28%	4,45%	5,90%	6,32%	3,03%	4,99%
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	6,71%	5,84%	5,35%	3,10%	3,17%	4,84%
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,20%	1,50%	1,54%	1,66%	1,70%	1,32%
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,02%	0,02%	0,05%	0,03%	0,02%	0,03%
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**0,09%**	**0,15%**	**0,21%**	**0,11%**	**5,13%**	**1,14%**
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	0,09%	0,15%	0,21%	0,11%	5,13%	1,14%
5.4.	**Belanja Transfer**	**13,36%**	**15,30%**	**13,83%**	**14,90%**	**15,22%**	**14,52%**
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	0,99%	0,92%	1,03%	0,96%	0,93%	0,97%
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	12,37%	14,38%	12,80%	13,94%	14,29%	13,56%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2021

Dari tabel di atas terlihat bagaimana besarnya proporsi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah. Salah satu komponen yang ada dalam belanja pegawai serta belanja barang dan jasa adalah belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019, realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Sukabumi terus mengalami peningkatan, yaitu dari 1,52 Triliun Rupiah menjadi 1,87 Triliun Rupiah. Namun, pada tahun 2020 realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan menjadi 1,84 Triliun Rupiah. Meskipun demikian, jika dirata-ratakan realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Sukabumi mengalami pertumbuhan sebesar 5,44 persen dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Data realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi Belanja (dalam juta rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Gaji dan tunjangan	936.726	846.257	837.865	894.541	809.146	-1,84%
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	86.961	86.481	224.309	246.761	487.159	54,09%
3	Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.516	6.257	9.648	10.521	9.610	19,63%
4	Insentif Pemungutan Pajak	9.776	10.154	10.889	17.174	12.693	11,29%
5	Insentif Pemungutan Retribusi	1.621	1.532	0	0	0	6,24%
6	Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	327.768	292.945	321.999	295.357	250.078	-4,42%
7	Belanja Honorarium PNS	57.468	59.955	164.714	236.710	19.823	27,95%
8	Belanja Honorarium Non PNS	75.336	85.659	105.662	101.506	95.363	7,33%
9	Uang Lembur	5	0	124.000	0	11	-18,96%
10	Belanja Pegawai Dana Bos	4.997	41.160	40.222	40.222	81.453	165,56%
11	Belanja Pegawai Pengelolaan Dana BLUD	15.085	15.080	18.829	24.306	74.319	60,22%
	Jumlah	**1.520.260**	**1.445.480**	**1.858.137**	**1.867.099**	**1.839.654**	**5,44%**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2021

Analisis terhadap realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat mengindikasikan baik atau tidaknya pengelolaan APBD untuk digunakan dalam pelayanan publik. Pengelolaan APBD yang baik tentu memiliki proporsi realiasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah yang kecil. Ukuran yang biasa menjadi standar adalah kurang dari 50 persen. Di Kabupaten Sukabumi

sendiri, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 proporsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah tidak pernah lebih dari 50 persen, bahkan angka tertinggi hanya mencapai 48,36 persen pada tahun 2018. Adapun pada tahun 2020 proporsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah hanya mencapai 45,33 persen. Data perkembangan proporsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tersaji dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi Belanja (dalam juta rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	1.520.260	1.445.480	1.858.137	1.867.099	1.839.654
B	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	3.402.372	3.695.644	3.842.321	4.114.940	4.058.096
	Persentase	44,68%	39,11%	48,36%	45,37%	45,33%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2021

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dari tahun 2016 hingga tahun 2020, penerimaan pembiayaan di Kabupaten Sukabumi cenderung fluktuatif, yaitu antara 218,27 Milyar Rupiah hingga 330,60 Milyar Rupiah. Sumber penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan pencairan dana cadangan. Di sisi pengeluaran pembiayaan terjadi peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019, yaitu dari 13,79 Milyar

Rupiah menjadi 33,24 Milyar Rupiah, namun pada tahun 2020 pengeluaran pembiayaan menurun Kembali menjadi 30,30 Milyar Rupiah. Komponen pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Sukabumi terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal daerah. Data pembiayaan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Pembiayaan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Kode Rek	Uraian	Realisasi (dalam juta rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	**Pembiayaan**					
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**275.751**	**276.094**	**330.601**	**250.465**	**218.279**
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaan Tahun Sebelumnya	275.751	276.094	330.601	250.465	198.629
6.1.03.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	19.650
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**13.790**	**20.715**	**18.116**	**33.245**	**30.304**
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	755	715	726	745	304
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	13.035	20.000	17.390	32.500	30.000
6.2.03.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	**261.960**	**255.380**	**312.485**	**217.220**	**187.975**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2021

Setelah melihat pertumbuhan pembiayaan di Kabupaten Sukabumi, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui defisit riil anggaran dan bagaimana defisit riil tersebut ditutupi. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020 defisit riil anggaran Kabupaten Sukabumi cenderung fluktuatif. Data perkembangan defisit riil Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Realisasi (dalam juta rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.404.491	3.750.151	3.762.188	4.063.104	3.927.303
Dikurangi realisasi:						
2	Belanja Daerah	3.388.582	3.674.929	3.824.205	4.081.820	4.027.842
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	13.790	20.715	18.116	33.245	30.304
	Defisit Riil	**2.119**	**54.507**	**(80.133)**	**(51.962)**	**(30.284)**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2020

Berdasarkan Tabel 3.15, selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, APBD Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami surplus yaitu sebesar 2,1 Milyar Rupiah dan 54,5 Milyar Rupiah, artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah. Namun

demikian, pada tahun lainnya mengalami defisit sebesar -80,13 Milyar Rupiah, -51,96 Milyar Rupiah, dan -30,28 Milyar Rupiah, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah. Selanjutnya, untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu. Kemampuan Kabupaten Sukabumi untuk menutup defisit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup defisit riil pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16 Komposisi penutup defisit riil anggaran kabupaten sukabumi tahun anggaran 2016-2020

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil (dalam juta rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	275.751	276.094	330.601	250.465	87.436
2	Pencairan Dana cadangan	17.500	0	0	0	19.650
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	10.000	0

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi, 2020

Tabel 3.16 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sukabumi mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar, sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil, sehingga pada tahun tersebut surplus riilnya tetap besar. SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SiLPA tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi *over target* dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah, sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah. Analisis realisasi SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Tabel 3.17 berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 3.17 Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	277.869.347.465		330.601.314.546		250.468.022.482		198.628.967.818		87.485.387.079	
2	Pelampauan pendapatan	129.352.226.859	46,55	(36.910.857.728)	(11,16)	(15.211.748.017)	(6,07)	(10.355.145.003)	(5,21)	(103.355.984.597)	(118,14)
3	Penghematan Belanja	158.352.256.700	56,99	350.863.183.588	106,13	266.047.758.354	106,22	205.786.376.755	103,60	191.145.078.029	218,49
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	(17.499.999.378)	(6,30)	(26.030.518)	(0,01)	546	0,00	(10.002.600.945)	(5,04)	0,54	0,00
5	Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	7.664.863.284	2,76	16.675.019.204	5,04	(367.988.401)	(0,15)	13.200.337.011	6,65	(303.706.354)	(0,35)

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kemudian dilakukan proyeksi baik komponen pendapatan, belanja maupun pembiayaan untuk tahun 2021 hingga tahun 2026. Adapun hasil proyeksi tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi 2021-2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4	**Pendapatan Daerah**	**3.993.710.455.863,00**	**3.827.741.506.872,80**	**4.145.340.680.181,58**	**4.575.673.537.167,99**	**5.145.986.629.539,60**	**5.936.330.982.102,00**
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PAD)**	**653.013.751.231,00**	**636.876.400.000,00**	**659.572.750.000,00**	**690.812.400.000,00**	**712.785.600.000,00**	**735.360.600.000,00**
4.1.01.	Pajak Daerah	261.432.000.000,00	275.313.000.000,00	289.197.000.000,00	309.974.500.000,00	320.137.500.000,00	333.718.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	22.210.500.000,00	22.742.700.000,00	22.944.000.000,00	23.195.000.000,00	23.459.000.000,00	23.687.000.000,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.908.000.000,00	10.770.100.000,00	11.166.150.000,00	11.557.300.000,00	11.953.500.000,00	13.265.000.000,00
4.1.04.	Lain-Lain Pad Yang Sah	358.463.251.231,00	328.050.600.000,00	336.265.600.000,00	346.085.600.000,00	357.235.600.000,00	364.690.600.000,00
4.2.	**Pendapatan Transfer**	**3.003.234.689.000,00**	**2.953.822.678.050,40**	**3.217.104.375.201,83**	**3.563.828.019.330,89**	**4.021.022.185.071,16**	**4.624.938.572.783,37**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.727.201.679.000,00	2.622.401.795.425,00	2.833.586.401.852,44	3.111.799.130.007,30	3.477.737.298.301,20	3.958.797.602.383,85
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	276.033.010.000,00	331.420.882.625,40	383.517.973.349,39	452.028.889.323,59	543.284.886.769,96	666.140.970.399,51
4.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**337.462.015.632,00**	**237.042.428.822,40**	**268.663.554.979,75**	**321.033.117.837,10**	**412.178.844.468,44**	**576.031.809.318,63**
4.3.01.	Pendapatan Hibah	55.880.305.632,00	26.182.384.200,20	49.296.389.885,36	92.815.613.625,87	174.753.935.385,11	329.028.023.837,50
4.3.02.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	281.581.710.000,00	210.860.044.622,20	219.367.165.094,39	228.217.504.211,23	237.424.909.083,33	247.003.785.481,13
5	**Belanja Daerah**	**3.983.994.479.644,00**	**3.885.761.536.197,79**	**4.229.583.829.221,04**	**4.744.799.029.525,46**	**5.151.503.482.851,50**	**5.933.584.173.508,84**
5.1.	**Belanja Operasi**	**2.823.498.044.284,00**	**2.498.614.074.005,65**	**2.676.173.331.941,06**	**2.896.695.098.302,16**	**2.964.724.003.637,90**	**3.379.802.015.725,85**
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.565.880.426.007,00	1.701.384.126.550,99	1.756.136.001.265,47	1.814.065.844.583,46	1.875.430.155.537,90	1.940.508.167.625,85
5.1.02.	Belanja Barang Dan Jasa	1.099.262.511.701,00	557.936.099.354,66	680.743.482.575,60	742.629.253.718,69	850.000.000.000,00	1.200.000.000.000,00
5.1.03.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.04.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.05.	Belanja Hibah	140.355.106.576,00	219.293.848.100,00	219.293.848.100,00	320.000.000.000,00	219.293.848.100,00	219.293.848.100,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	18.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
5.2.	**Belanja Modal**	**529.714.121.621,00**	**750.203.348.092,14**	**914.653.588.179,98**	**1.206.342.747.123,30**	**1.435.240.004.213,60**	**1.907.935.648.682,99**
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	27.238.529.500,00					

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	148.102.307.239,00					
5.2.03.	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	192.950.841.003,00					
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jarngan Dan Irigasi	157.381.726.279,00					
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.040.717.600,00					
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	-					
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**21.000.179.639,00**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	21.000.179.639,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5.4.	**Belanja Transfer**	**609.782.134.100,00**	**611.944.114.100,00**	**613.756.909.100,00**	**616.761.184.100,00**	**726.539.475.000,00**	**620.846.509.100,00**
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	42.546.375.000,00	44.708.355.000,00	46.521.150.000,00	49.525.425.000,00	51.539.475.000,00	53.610.750.000,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	567.235.759.100,00	567.235.759.100,00	567.235.759.100,00	567.235.759.100,00	675.000.000.000,00	567.235.759.100,00
	Surplus/(Defisit)	**9.715.976.219,00**	**(58.020.029.324,99)**	**(86.243.149.039,47)**	**(172.125.492.357,47)**	**(5.516.853.311,90)**	**2.746.808.593,15**
6	**Pembiayaan**						
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**30.284.023.781,00**	**30.284.023.781,00**	**30.284.023.781,00**	**75.284.023.781,00**	**30.284.023.781,00**	**30.284.023.781,00**
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.284.023.781,00	30.284.023.781,00	30.284.023.781,00	30.284.023.781,00	30.284.023.781,00	30.284.023.781,00
6.1.03.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	45.000.000.000,00	-	-
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**40.000.000.000,00**	**70.800.000.000,00**	**62.500.000.000,00**	**40.000.000.000,00**	**40.000.000.000,00**	**40.000.000.000,00**
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	32.500.000.000,00	32.500.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	40.000.000.000,00	38.300.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
6.2.03.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	**(9.715.976.219,00)**	**(40.515.976.219,00)**	**(32.215.976.219,00)**	**35.284.023.781,00**	**(9.715.976.219,00)**	**(9.715.976.219,00)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Darah Tahun Berjalan	**0,00**	**(98.536.005.543,99)**	**(118.459.125.258,47)**	**(136.841.468.576,47)**	**(15.232.829.530,90)**	**(6.969.167.625,85)**

3.3.2 Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Berdasarkan kondisi dan proyeksi pendapatan daerah, menentukan arah kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama dengan dinas penghasil.
2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
5. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
6. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
7. Melaksanakan akurasi data atas objek pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah.
8. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat.
9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah.

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan proyeksi terhadap pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat, serta prioritas utama. Pengeluaran tersebut terdiri dari belanja dan pengeluaran pembiayaan yang masuk dalam kategori wajib dan mengikat serta prioritas utama. Jenis belanja yang masuk dalam kategori tesebut diantaranya belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur,

belanja operasional BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD itu sendiri, belanja tidak terduga, serta belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, terdapat amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah, yang mewajibkan pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal dari tahun 2021 hingga tahun 2026, sehingga perhitungannya dipisahkan dalam kapasitas riil keuangan daerah. Proyeksi pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat, serta prioritas utama dari tahun 2021 hingga tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19 Proyeksi pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi Belanja (dalam juta rupiah)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	**Belanja**	**2.721.218**	**2.651.907**	**2.812.609**	**3.050.952**	**3.349.150**	**3.594.552**
1	Belanja Aparatur (selain belanja pegawai pengelolaan dana BLUD)	1.756.267	1.712.963	1.864.662	2.091.851	2.270.940	2.615.705
2	Belanja Operasional BLUD	334.169	302.000	308.890	316.890	326.670	333.000
3	Belanja Tidak Terduga	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Belanja Bagi Hasil	42.546	44.708	46.821	49.975	51.539	53.611
5	Belanja Bantuan Keuangan	567.236	567.236	567.236	567.236	675.000	567.236
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**40.000**	**70.800**	**62.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
1	Pembentukan Dana Cadangan*	0	32.500	32.500	10.000	10.000	10.000
2	Penyertaan Modal*	40.000	38.300	30.000	30.000	30.000	30.000
A+B	**Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**	**2.761.218**	**2.722.707**	**2.875.109**	**3.090.952**	**3.389.150**	**3.634.552**

*) Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2007

Setelah mengetahui proyeksi penerimaan yang terdiri dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta besaran pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk tahun 2021 hingga tahun 2026, maka dapat dihitung kapasitas riil keuangan daerah dalam kurun waktu tersebut. Kapasitas riil ini yang kemudian akan dialokasikan untuk pendanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 hingga tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi (dalam Juta Rupiah)					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan daerah	3.993.710	3.827.742	4.143.341	4.572.674	5.145.987	5.936.331
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	45.000	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	30.284	30.284	30.284	30.284	30.284	30.284
A	**Total Penerimaan**	**4.023.994**	**3.858.026**	**4.173.625**	**4.647.958**	**5.176.271**	**5.966.615**
B	**Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama**	**2.761.218**	**2.722.707**	**2.875.109**	**3.090.952**	**3.389.150**	**3.634.552**
A-B	**Kapasitas riil kemampuan keuangan**	**1.262.776**	**1.135.319**	**1.298.516**	**1.557.006**	**1.787.121**	**2.332.063**

Dari tabel di atas terlihat bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan penggunaan kapasitas riil tersebut agar terkelola dengan efektif dan efisien. Rencana pengunaan kapasitas riil keuangan daerah akan dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

a) Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada urusan pemerintahan yang bersifat wajib pelayanan dasar;
b) Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, terutama yang masuk dalam proyek prioritas;
c) Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Adapun proyeksi besaran anggaran untuk masing-masing prioritas tersaji dalam Tabel 3.21.

Tabel 3.21 Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2022-2026

No	Uraian	Proyeksi (Juta Rupiah)				
		2022	2023	2024	2025	2026
A	**Kapasitas riil kemampuan keuangan**	**1.135.319**	**1.298.516**	**1.557.006**	**1.787.121**	**2.332.063**
B	**Prioritas pembangunan**	**1.135.319**	**1.298.516**	**1.557.006**	**1.787.121**	**2.332.063**
1	Prioritas I	612.611	612.611	612.611	612.611	612.611
2	Prioritas II	360.089	289.844	355.345	399.162	356.017
3	Prioritas III	162.619	396.061	589.050	775.348	1.363.435

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan perbedaan/ kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan Kabupaten Sukabumi yang dijabarkan adalah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SDGs/Standar Nasional/dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau *trend*). Berdasarkan kondisi gambaran umum Kabupaten Sukabumi dan telaahan serta evaluasi kondisi daerah melalui kegiatan dan program pembangunan, maka permasalahan pembangunan di Kabupaten Sukabumi disajikan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan kinerja pembangunan makro nasional hingga daerah mengalami penurunan, begitu pula dengan Kabupaten Sukabumi. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2020 menyentuh angka -1,08 persen. Hal tersebut menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran hingga 12,45 persen, dan lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 18,37 persen.

Pemerintah pusat dan daerah memberlakukan beberapa kebijakan untuk mengurangi aktivitas masyarakat agar menekan penyebaran Pandemi Covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM). Kebijakan tersebut membatasi kegiatan perekonomian dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sukabumi hingga menyentuh 7,09 persen dan 9,60 persen.

B. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan penduduk di Kabupaten Sukabumi dapat diketahui dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH), yang dipakai sebagai dasar perhitungan indeks kesehatan dalam IPM. Indeks kesehatan penduduk Kabupaten Sukabumi selalu lebih rendah dari rata-rata penduduk Jawa Barat pada umumnya. Angka yang kecil ini disebabkan oleh kurangnya layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal lain yang juga mempengaruhi tingkat kesehatan penduduk yaitu pada kurangnya akses untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak. Dalam situasi akses air bersih rendah, biasanya masyarakat menggunakan air minum kemasan/isi ulang. Hal tersebut tentu akan menjadi tambahan pengeluaran masyarakat. Secara umum akses air bersih di Kabupaten Sukabumi juga masih rendah, padahal ketersediaannya dapat menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Artinya, kondisi lingkungan dari aspek sanitasi dan air bersih di Kabupaten Sukabumi berpotensi menurunkan kualitas kesehatan penduduk. Keluarga yang belum memiliki fasilitas sumber air dan jamban yang mandiri/layak perlu mendapatkan perhatian khusus. Fasilitas ini merupakan kebutuhan primer yang memiliki korelasi erat dengan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kesadaran masyarakat terkait kualitas lingkungan yang baik dan sehat perlu ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas kesehatan secara umum.

C. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi masih belum dapat dikatakan baik, atau masih belum ideal. Salah satu penyebabnya dikarenakan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sukabumi yang

rendah, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penduduk Jawa Barat. Faktor aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan yang disebabkan oleh terlalu luasnya wilayah layanan, merupakan penyebab dari menurunnya APM pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kecamatan-kecamatan yang wilayah layanannya terlalu luas, patut mendapat perhatian, diantaranya dengan upaya peningkatan akses infrastruktur atau upaya perbaikan sistem pembelajaran.

D. Rendahnya daya saing tenaga kerja

Daya saing tenaga kerja menjadikan setiap tenaga kerja memiliki peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Daya saing memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat berbanding positif dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan kualitas masyarakat dalam bekerja untuk lebih meningkatkan mutu dan keterampilan tenaga kerja agar lebih mudah diserap oleh lapangan usaha yang ada.

Kepala keluarga merupakan tulang punggung keluarga dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, utamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup di rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, pendidikan kepala keluarga menjadi penting adanya mengingat hal tersebut akan menentukan kualitas pekerjaan dan daya saing sebagai tenaga kerja untuk memperluas kesempatan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Daya saing tenaga kerja juga dapat dilihat dari karakteristik tenaga kerja, dimana pada tahun 2019 berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tercatat sebanyak 27.867 orang tenaga kerja yang terdaftar berdasarkan tingkat pendidikan. Sebagian besar tenaga kerja merupakan tamatan SMA yaitu sebanyak 70,64 persen, disusul oleh pekerja tamatan SMP sebanyak 18,24 persen, sedangkan tenaga kerja lulusan S2 hanya mencapai 0,03 persen.

Masih rendahnya daya saing tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi menyebabkan beberapa lapangan pekerjaan diisi oleh tenaga kerja yang

berasal dari luar Kabupaten Sukabumi. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah lain seperti konflik antar perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Tingkat ekonomi penduduk dapat dilihat dari indikator pengeluaran per kapita/tahun. Di antara kabupaten dan kota di Jawa Barat, posisi Kabupaten Sukabumi ada di urutan kelima terbawah. Artinya rata-rata tingkat ekonomi penduduk Kabupaten Sukabumi masih sangat rendah. Posisi ini hampir sama dengan daerah-daerah terdekat di Jawa Barat bagian selatan, seperti Cianjur, Bandung Barat, Garut dan Tasikmalaya. Ada kemungkinan faktor-faktor mendasar yang hampir sama yang turut mempengaruhi tingkat ekonomi ini. Ketertinggalan ini membutuhkan upaya sangat besar dan menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat, melalui peningkatan produktivitas dan kualitas kegiatan ekonomi agar diperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

E. Naiknya tingkat pengangguran

Pengangguran merupakan permasalahan penting yang dihadapi setiap daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi akan berdampak pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Sukabumi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, TPT mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 7,99 persen menjadi 9,60 persen. Kondisi tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebar dan menyerang semua aspek kehidupan masyarakat, dari mulai aspek kesehatan, ekonomi, hingga aspek sosial. Dibandingkan dengan TPT Jawa Barat tahun 2020 yang berada di angka 10,46 persen, TPT Kabupaten Sukabumi sebetulnya masih berada pada posisi yang lebih rendah. Namun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan TPT Nasional yang berada pada angka 7,07 persen.

Selain tingkat pengangguran, permasalahan lain pada sektor tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi adalah rendahnya serapan tenaga kerja laki-laki dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan. Dari data jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2016 hingga tahun 2020, proporsi

jumlah tenaga kerja perempuan terus meningkat dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja laki-laki, bahkan jika melihat data terakhir hingga tahun 2020, proporsi tenaga kerja perempuan mencapai 97,27 persen dibandingkan tenaga kerja laki-laki yang hanya 2,73 persen. Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan oleh kualifikasi keterampilan yang dibutuhkan dari jenis lapangan usaha yang tersedia cenderung lebih cocok diisi oleh tenaga kerja perempuan. Kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian semua pihak, karena jika tidak segera ditangani akan berpengaruh terhadap kualitas generasi muda Kabupaten Sukabumi di masa mendatang. Data jumlah pencari kerja yang ditempatkan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara rinci dapat di lihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan jenis kelamin tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan (Orang)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2016	6.666	8.045	14.711
2017	7.378	11.908	19.286
2018	2.605	10.549	13.154
2019	2.107	9.162	11.269
2020	122	4.342	4.464

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, 2021 (diolah)

Tabel 4.2 Proporsi pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan jenis kelamin tahun 2016-2020

Tahun	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)	
	Laki-Laki	Perempuan
2016	45,31	54,69
2017	38,26	61,74
2018	19,80	80,20
2019	18,70	81,30
2020	2,73	97,27

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021 (diolah)

Di tingkat pengawasan dan monitoring, masalah yang muncul saat ini adalah rendahnya tingkat kunjungan dalam rangka pembinaan, dan supervisi ke perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, hubungan pemerintah daerah dengan perusahaan perlu diperbaiki. Peningkatan

iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial juga masuk ke dalam proyek prioritas RPJMN 2020-2024. Melalui peningkatan hubungan industrial diharapkan perusahaan mendapatkan pemahaman mengenai penyusunan struktur skala upah, penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, koordinasi kebijakan cipta lapangan kerja, sertifikasi kelembagaan, keahlian, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta koordinasi kebijakan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan.

F. Perkembangan sektor ekonomi mikro yang belum optimal

Pengembangan ekonomi merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan pada suatu tatanan negara. Hal tersebut menjadi motor penggerak pembangunan yang akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu motor penggerak tersebut adalah usaha mikro kecil (UMK). Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99 persen (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01 persen atau sekitar 5.400 unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2 persen), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74 persen), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11 persen); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3 persen dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, peranan UMKM sangat besar dalam pembangunan ekonomi.

Apabila dibandingkan dengan batas atas kriteria omsetnya, rata-rata omset Usaha Mikro saat ini hanya sekitar 25 persen dari batas atas omset 300 juta rupiah, Usaha Kecil 65 persen, dan Usaha Menengah 59 persen. Hal ini seakan menyiratkan bahwa produktivitas Usaha Mikro masih jauh lebih rendah daripada Usaha Kecil maupun Menengah yang membuatnya secara umum lebih rapuh dan mungkin saja mudah tersaingi oleh tekanan persaingan. Oleh karena itu, harus ada pendampingan melekat dan terstruktur agar Usaha Mikro dapat meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas, dan daya tahannya dalam menghadapi

persaingan. Di sisi lain, pelaku Usaha Mikro juga perlu membuka diri terhadap kebaruan teknologi, khususnya dalam memanfaatkan berbagai solusi digital yang dapat memperluas pasar sekaligus menekan berbagai biaya produksi.

Jumlahnya yang sangat banyak dan besarnya peranan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara umum membuat peran keseluruhan UMKM khususnya Usaha Mikro bagi perekonomian sangat penting. Kabupaten Sukabumi tercatat memiliki sebanyak 105.250 UMK yang melakukan kegiatan usaha dari berbagai jenis usaha. Keseluruhan UMK yang berada di Kabupaten Sukabumi memiliki potensi yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Serapan Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Tenaga Kerja
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3,830,824
2	Industri Pengolahan	3,060,185
3	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1,347,363
4	Pendidikan	953,085
5	Pengangkutan dan Pergudangan	427,674
6	Kesenian, Hiburan rekreasi; Aktivitas jasa lainnya	388,367
7	Konstruksi	279,006
8	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	227,626
9	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	197,037
10	Informasi dan Komunikasi	184,944
11	Aktivitas Penyewaan	155,749
12	Real Estat	140,388
13	Pertambangan dan penggalian; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin; Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	109,084
14	Aktivitas Profesional	69,401
Jumlah		**11,370,733**

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2019

G. Kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sukabumi

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial akan menjadi sulit untuk diwujudkan jika permasalahan sosial di masyarakat masih tergolong tinggi. Secara umum permasalahan sosial di Kabupaten Sukabumi lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata di Jawa Barat. Dari berbagai permasalahan sosial yang dapat dianalisis berdasarkan data yang tersedia, masalah yang kerap muncul di Kabupaten Sukabumi dan yang relatif 'berat' dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, yaitu masalah pembakaran, pencurian dengan kekerasan, bunuh diri, penyandang cacat, pembunuhan, penipuan/penggelapan, pencurian, dan lokasi anak jalanan. Upaya mengatasi permasalahan sosial masyarakat ini sangat penting, dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban sehingga dapat mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi sebetulnya sudah cukup berhasil hingga sebelum pandemi covid-19. Hal ini ditandai dengan adanya penurunan angka kemiskinan dari 8,13 persen pada tahun 2016 menjadi 6,22 persen pada tahun 2019. Penurunan angka kemiskinan juga dapat dilihat pada hasil perhitungan indeks kedalaman kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika ditelaah, indeks kedalaman kemiskinan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 menurun dari 1,21 persen menjadi 0,66 persen. Demikian pula halnya dengan indeks keparahan kemiskinan yang mengalami penurunan. Indeks keparahan kemiskinan ini menggambarkan ketimpangan pendapatan antara penduduk miskin, atau penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Pada tahun 2016, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi sebesar 0,30 persen dan menurun menjadi 0,11 persen pada tahun 2019.

Namun demikian, pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia mulai awal tahun 2020 berpengaruh pula terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukabumi naik hingga mencapai 7,09 persen. Di samping itu, faktor lain yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten

Sukabumi adalah bencana alam. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam, dengan tingkat kejadian bencana yang cukup tinggi yaitu sebesar 698 kali bencana dengan 4.270 korban pada tahun 2019. Oleh karena itu, ke depan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi harus pula bersinergi dengan upaya peningkatan ketahanan bencana.

Aspek kesejahteraan sosial ini juga tidak luput dari tingkat kesejahteraan penduduknya. Kesejahteraan penduduk pada umumnya menjadi tujuan umum pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kesejahteraan mencerminkan berbagai aspek kehidupan yang terjadi di masyarakat. Pada umumnya tingkat kesejahteraan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu ukuran yang disusun UNDP dan telah digunakan di seluruh dunia, yang meliputi aspek (1) pengetahuan (2) kesehatan dan (3) pendapatan. Tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Sukabumi jauh lebih rendah dibandingkan penduduk Jawa Barat pada umumnya, walaupun tingkat pertumbuhannya lebih tinggi. Dibutuhkan terobosan kreatif dan sumber daya besar untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Persoalan aksesibilitas wilayah perlu ditangani secara sinergis-kolaboratif oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, kabupaten/kota di sekitarnya, termasuk juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

4.1.2 Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Bidang Pendidikan

Permasalahan pada bidang pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1) Aksesibilitas menuju sarana pendidikan belum merata di seluruh wilayah;
2) Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS);
3) Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal;

4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dan SMA sederajat masih rendah;
5) Masih terdapat angka putus sekolah;
6) Sarana dan prasarana pendidikan belum optimal terutama di daerah terpencil;
7) Masih rendahnya perhatian dan kesadaran masyarakat pada pendidikan dasar khususnya terhadap pendidikan anak usia dini;
8) Akreditasi lembaga penyelenggara PAUD masih sedikit;
9) Kurang ketersediaan guru;
10) Rendahnya pendidik dan tenaga kependidikan;
11) Rendahnya Kesejahteraan guru honorer;
12) Rendahnya adaptasi kurikulum untuk kebutuhan dunia kerja.

B. Bidang Kesehatan

Permasalahan pada bidang kesehatan di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1) Tingginya jumlah angka kematian ibu dan bayi menunjukkan masih rendahnya pelayanan dasar kesehatan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah;
2) Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah;
3) Aksesibilitas menuju sarana kesehatan masih rendah;
4) Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sukabumi terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) masih kurang;
5) Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang terutama dokter spesialis.
6) Masih tingginya angka stunting dan gizi buruk;
7) Akses rumah tangga untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak masih rendah;
8) Penyaluran penerima iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu belum optimal dan belum tepat sasaran;
9) Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor yang memiliki output terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal.

C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1) Belum mantapnya pelayanan jaringan jalan sebagai penghubung utama antar wilayah khususnya daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kota seperti ruas jalan yang menuju wilayah selatan;
2) Belum mantapnya pelayanan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan/kawasan perkotaan utama;
3) Masih terdapat jembatan yang rusak;
4) Masih terdapat lebar jalan yang tidak sesuai peraturan dan terjadinya penyempitan jalan;
5) Masih rendahnya fasilitas penunjang dan jaringan jalan yang memadai menuju objek daya tarik wisata;
6) Rendahnya kualitas dan kuantitas Jaringan irigasi;
7) Realisasi luasan ruang terbuka hijau belum memenuhi target yang tercantum dalam RTRW;
8) Belum optimalnya perencanaan ruang wilayah;
9) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10) Belum optimalnya peran serta pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11) Terjadinya alih fungsi lahan;
12) Masih rendahnya penataan ruang yang dapat mendukung kegiatan investasi;
13) Kompleksitas aktivitas di kawasan jalur arteri berpotensi menghambat kegiatan ekonomi dan perlu pengembangan investasi di lokasi lain.

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1) Masih tingginya Rumah Tidak Layak Huni

   Pada tahun 2020 jumlah rumah di Kabupaten Sukabumi sebanyak 679.125 unit dan jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria

kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak 623.946 unit, sedangkan untuk rumah tidak layak huni (Rutilahu) memiliki jumlah sebesar 55.161 unit atau sebanyak 8,12 persen.

2) Masih terdapatnya kawasan kumuh

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 648/Kep 676-Distarkimsih -2014 fokus pencegahan kawasan kumuh berfokus pada 2 kecamatan dengan luasan kawasan kumuh yang belum ditangani hingga tahun 2020 sebesar 6,08 Ha atau 7,83 persen dari total luas kawasan kumuh. Namun, pada tahun 2020 telah diterbitkan SK Kumuh nomor 640/Kep.492-DPKP/2020 fokus pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh berkelanjutan menjadi 7 kecamatan dengan luasan 682,57 Ha.

3) Rendahnya cakupan pelayanan sumber air minum layak dan sanitasi layak.

Persentase cakupan pelayanan sumber air minum layak di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 sebesar 85,08 persen. Persentase sanitasi layak di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 sebesar 79,05 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Sukabumi belum seluruhnya tercakup oleh pelayanan sumber air minum layak dan sanitasi layak.

E. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya data, informasi dan pemetaan wilayah terkait potensi gangguan ketertiban umum;
2) Keterbatasan jumlah personel di tiap wilayah;
3) Tingkat kompetensi personel yang relatif rendah dalam teknis penyelenggaraan ketertiban umum;
4) Belum optimalnya fasilitas operasional untuk mendukung upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
5) Minimnya regulasi yang mengatur tentang aspek linmas;

6) Angka kriminalitas yang meningkat.

F. Bidang Sosial

Permasalahan pada bidang sosial adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2) Belum optimalnya pengelolaan database penerima bantuan sosial dan pangan;
3) Tingginya penyandang disabilitas, tuna sosial, anak berhadapan dengan kasus hukum masalah migran dan masalah sosial lainnya;
4) Belum optimalnya pelayanan BPJS Kesehatan;
5) Belum tepat sasaran penerima iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu;
6) Masih lemahnya kerukunan hidup internal dan antar umat beragama;
7) Sarana dan prasarana keagamaan belum merata dan memadai;
8) Masih rendahnya kualitas lembaga sosial dan keagamaan;

Selain permasalahan sosial diatas, terdapat pula permasalahan pada bidang penanggulangan bencana, yaitu:

1) Masih tingginya tingkat kerawanan bencana;
2) Masih kurangnya pegawai dan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi penanggulangan bencana;
3) Penanganan infrastruktur pasca bencana belum optimal;
4) Masih rendahnya jumlah kendaraan operasional untuk siaga bencana;
5) Rendahnya tingkat kesiagaan masyarakat dalam menanggapi bencana;
6) Jumlah anggota tim tanggap bencana yang berkompeten masih rendah;
7) Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih rendah.

4.1.2.2 Urusan Wajib Pemerintah yang Berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar

A. Bidang Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan bersifat multidimensi, yang dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks. Penanganan masalah ketenagakerjaan masih merupakan agenda yang perlu mendapat perhatian serius, karena masalah tersebut memiliki korelasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pada bidang tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1) Masih rendahnya kualitas kompetensi dan produktivitas pencari kerja;
2) Belum optimalnya perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
3) Belum optimalnya pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan serta hubungan industrial;
4) Belum optimalnya transformasi tenaga kerja menjadi wirausaha mandiri;
5) Belum optimalnya integrasi data ketenagakerjaan;
6) Masih timpangnya kesempatan ayng sama antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan kasus pernikahan anak;
2) Belum optimalnya program penciptaan kemandirian ekonomi untuk perempuan;
3) Masih rendahnya kesetaraan gender.

C. Bidang Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,

bergizi, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Permasalahan pada bidang pangan adalah sebagai berikut:

1) Masih banyak wilayah yang rentan rawan pangan;
2) Kurangnya diversifikasi Pangan dengan bahan pangan lokal;
3) Jaringan distribusi dan aksesibilitas pangan belum merata;
4) Kurangnya sinergi lintas sektoral dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan;
5) Pola konsumsi makan belum memenuhi syarat Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional hingga ke tingkat Kabupaten.

Ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi menjadi isu yang sangat mendalam. Keterkaitan antar sektor merupakan kunci dari isu tersebut. Menggunakan istilah *from farm to table* atau dapat diartikan dari ladang hingga ke meja makan dapat mengilustrasikan keterpaduan antar sektor yang ada untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi. Keterpaduan tersebut dapat dilihat mulai dari produksi bahan pangan yang meliputi pertanian, peternakan dan kelautan perikanan lalu distribusi pangan yang mencakup logistik, perdagangan dan transportasi hingga sektor jasa yang berkaitan dengan pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan memiliki peran yang strategis untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Sukabumi yang merupakan kabupaten terluas di Jawa Barat memiliki potensi produksi yang sangat tinggi. Hal tersebut didukung dengan data yang di keluarkan oleh BPS bahwa salah satu penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sukabumi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun, dibalik tingginya *share* pertanian terdapat beberapa kondisi yang harus mendapat perhatian bersama yakni stunting. Stunting selayaknya merupakan dampak dari masih belum optimalnya ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan publikasi Kementrian Pertanian, dari tahun 2018 hingga tahun 2020 Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan peringkat Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari Kabupaten se-Indonesia. Pada tahun 2018, IKP Kabupaten Sukabumi berada pada posisi ke-181 dari 416 Kabupaten di Indonesia, dan menjauh pada tahun 2020 menjadi peringkat ke-198.

D. Bidang Pertanahan

Permasalahan pada bidang pertanahan adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya penggunaan data spasial sebagai masukan pengambilan kebijakan;
2) Belum adanya mekanisme tersistem dan terstruktur dalam pengaturan, pengelolaan, penguasaan tanah atau ruang;
3) Data spasial masih tersebar di setiap sektor/PD sesuai bidang tugasnya dan belum terstandarisasi;
4) Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang pengelolaan data spasial di setiap sektor/ PD teknis;
5) Belum adanya basis data di bidang pertanahan yang detil dan lengkap;
6) Belum adanya kajian skala prioritas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan masih bersifat sektoral;
7) Belum tertibnya penguasaan dan peruntukan tanah aset pemda (sulitnya dilaksanakan peningkatan status hak atas tanah menjadi hak pakai pemda karena tidak lengkapnya bukti-bukti penguasaan/ peralihan hak).

E. Bidang Lingkungan Hidup

Kabupaten Sukabumi masih menghadapi permasalahan terkait dengan lingkungan hidup, diantaranya yaitu penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, belum optimalnya pengelolaan sampah daerah, masih rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, pengelolaan dan penanganan limbah rumah tangga dan industri B3, serta regulasi dan kelembagaan yang belum kuat. Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten Sukabumi selama lima tahun terakhir telah berada di atas target daerah, namun komponennya tidak seluruhnya sudah melebihi target. Komponen kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan pada tahun 2020 sudah melebihi target, namun komponen kualitas Air pada tahun 2019 dan 2020 masih berada di bawah target daerah. Isu mengenai indeks kualitas lingkungan akan selalu jadi perhatian utama karena seiring meningkatnya penduduk dan perekonomian Kabupaten Sukabumi akan berdampak pada kualitas lingkungan hidup. Masih rendahnya indeks kualitas air tersebut disebabkan oleh rumah tangga, pelaku usaha/UKM membuang limbahnya ke sungai secara langsung. Mahalnya pembuatan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) apabila dilakukan secara mandiri oleh para pelaku usaha menjadi faktor utama pembuangan limbah secara langsung ke sungai. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan kawasan/klaster industri sehingga pembangunan IPAL dapat dibina dan dilaksanakan secara bersama-sama.

Arah kebijakan nasional berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dilaksanakan dengan strategi pencegahan pencemaran dan kerusakan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, pemulihan pencemaran dan kerusakan serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan. Upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan perlu dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui program Sekolah berbasis lingkungan (SBL) di setiap kecamatan, peningkatan peran komunitas peduli lingkungan serta kebijakan yang ketat untuk

seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan data OSS terdapat sekitar 4000 usaha di Kabupaten Sukabumi dan masih banyak yang belum memiliki izin. Sebagian besar yang memiliki izin hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat-syarat perizinan. Terdapat sekitar 600 usaha yang menjadi target evaluasi dan validasi namun dalam satu bulan Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu melaksanakan ke 45 perusahaan dan sebagian besar tidak memenuhi kriteria evaluasi. Selain itu, daerah tidak memiliki kewenangan untuk perusahaan-perusahaan yang izinnya di provinsi seperti perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Permasalahan tersebut membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat, sehingga upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat. Selanjutnya upaya pemulihan dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan semua pihak melalui penerapan kolaborasi *pentahelix* dimana semua pihak ikut serta dalam pengelolaan lingkungan.

Arah kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah diantaranya dilaksanakan dengan strategi pengurangan dan pengelolaan sampah domestik dan sampah plastik. Berkaitan dengan hal tersebut, belum ada regulasi yang ketat di Kabupaten Sukabumi untuk mengurangi jumlah sampah daerah. Permasalahan yang mulai muncul adalah peningkatan sampah plastik sebesar 17 persen per tahun. Saat ini yang dilakukan adalah bagaimana pengelolaan sampah dapat dilakukan secara optimal sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup.

Kabupaten Sukabumi dengan wilayah yang sangat luas (412 ha) dengan 47 kecamatan, maka pengelolaan sampah tidak dapat dilaksanakan secara sentralistik karena jarak yang harus ditempuh terlalu jauh bagi moda transportasi sampah. Saat ini terdapat 2 TPA di Kabupaten Sukabumi, yaitu TPA Cimenteng yang mulai beroperasi tahun 1992, dengan luas lahan 7,5 Ha dan daya tampung sebanyak 250 Ton/hari, dan TPA Kadaleman yang mulai beroperasi dari tahun 2006, dengan luas lahan 1,9

Ha dan daya tampung 50 Ton/Hari. TPA tersebut tentu sangat kurang jika harus melayani seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan pembangunan TPA baru di Kabupaten Sukabumi. Di samping TPA, armada pengangkutan sampah saat ini masih sangat kurang, yaitu hanya berjumlah 73 Armada untuk melayani 36 kecamatan dengan 260 tenaga organik yang melekat pada setiap armada dan 109 tenaga kebersihan. Jumlah petugas kebersihan tersebut masih sangat jauh dari ideal untuk melayani 2,6 juta penduduk. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan strategi kebijakan yang tepat untuk menangani permasalahan sampah di Kabupaten Sukabumi karena masih ada 11 (sebelas) kecamatan belum terlayani armada persampahan, yaitu Kabandungan, Kalapanunggal, Parakansalak, Ciambar, Lengkong, Pabuaran, Curugkembar, Cidadap, Cidolog, Tegalbuleud, dan Cireunghas.

F. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

1) Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau pelayanan kependudukan;
2) Persentase kepemilikan akta kelahiran mengalami penurunan;
3) Sarana dan prasarana penunjang proses perekaman catatan kependudukan masih kurang memadai;
4) Kualitas database penduduk yang belum optimal.

G. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan aparatur desa yang kurang memadai;
2) Kurangnya optimalisasi potensi ekonomi desa karena data komprehensif desa tidak memadai;
3) Infrastruktur desa kurang memadai;
4) Masih rendahnya kecakapan bahasa asing di kawasan potensi wisata;

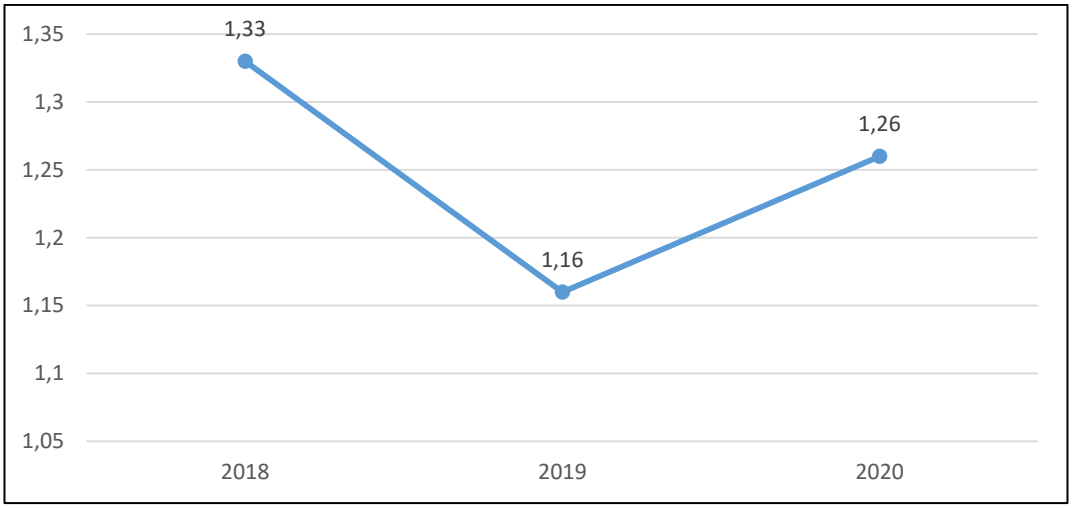
5) Potensi dan permasalahan desa belum diidentifikasi secara mendalam dan belum menjadi parameter dalam penyusunan rencana strategis;
6) Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal;
7) Masih rendahnya peran dan kewenangan aparatur desa dalam mendukung percepatan pembangunan di kawasan pedesaan.

H. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

1) Tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program KB terutama di kawasan non perkotaan masih relatif rendah;
2) Masih tingginya angka pernikahan usia dini;
3) Akses pemerataan program KB masih rendah yang terkendala luas wilayah;
4) Kompetensi dan sertifikasi petugas pelayanan KB masih relatif rendah;
5) Tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi mengalami perubahan yang fluktuatif yaitu 1,33 persen pada tahun 2018 menjadi 1,16 persen pada tahun 2019, dan meningkat kembali menjadi 1,26 pada tahun 2020. Upaya untuk terus menekan angka laju pertumbuhan penduduk ini harus tetap ditingkatkan mengingat kondisi ideal laju pertumbuhan penduduk berada pada angka 0,5 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 4.1.

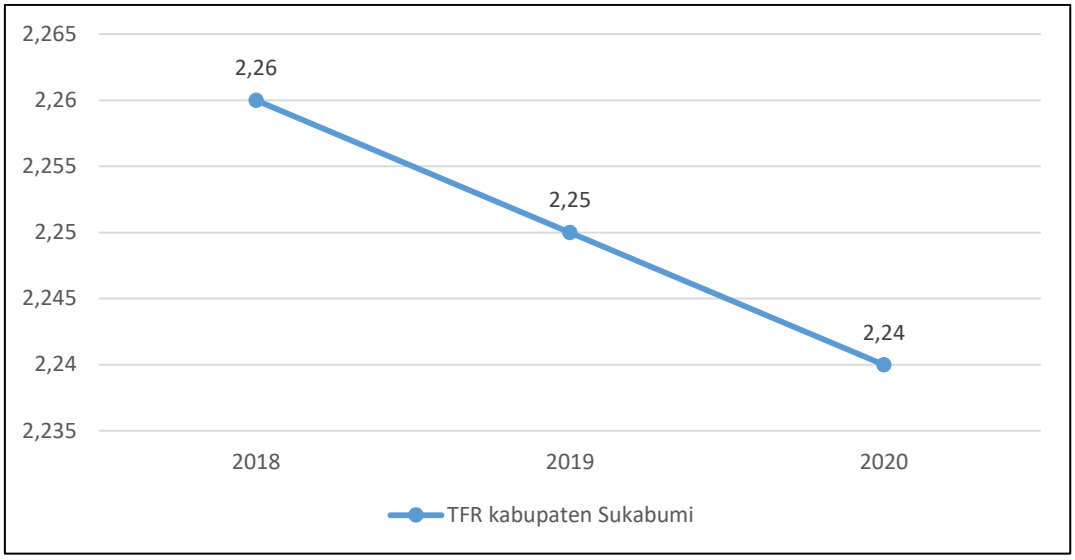


Sumber: DPPKB Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020

6) Masih tingginya Angka Kelahiran Total/*Total fertility rate* (FTR)

Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total merupakan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan hidup oleh seorang perempuan dari mulai usia reproduksi sampai akhir masa reproduksinya (usia 15-49 tahun). TFR ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukabumi sehingga perlu adanya upaya untuk menekan angka TFR ini agar berada pada kondisi yang ideal yaitu 2,1 yang berarti setiap wanita di Kabupaten Sukabumi selama usia reproduktifnya hanya melahirkan rata-rata sebanyak 2,1 bayi lahir hidup. TFR Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 4.2.



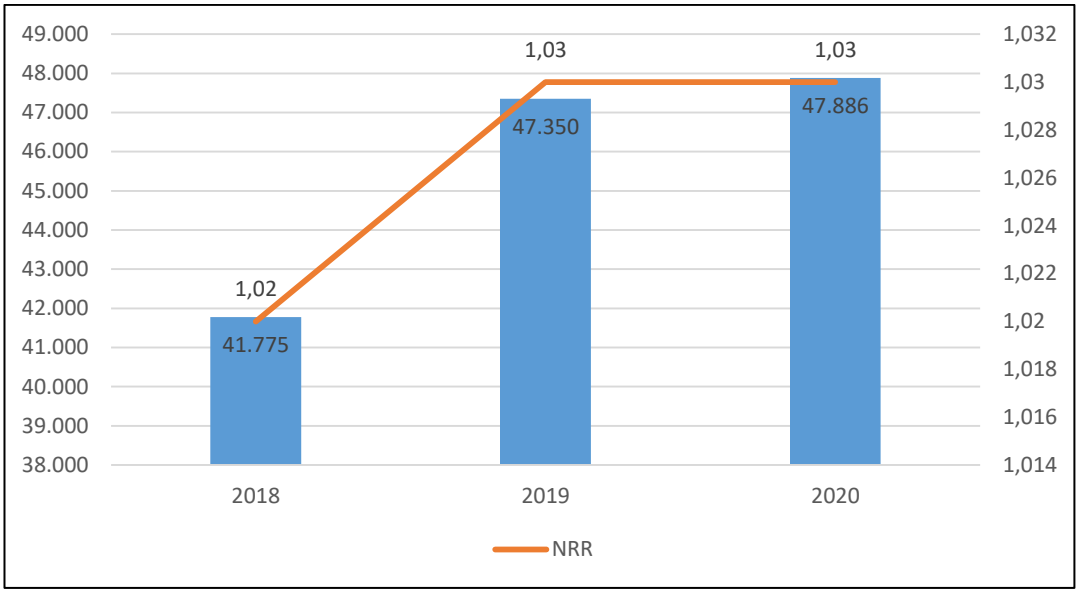
Sumber: DPPKB Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 4.2 *Total Fertility Rate* Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan angka Total TFR dari tahun 2018 yaitu 2,26 dan di tahun 2019 menjadi 2,25. Tentu saja hal ini cukup menggembirakan, namun upaya untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) menghendaki prasyarat tingkat fertilitas yang lebih rendah lagi, yaitu ke tingkat replacement level yang ditunjukkan dengan TFR 2,1 (kondisi ideal) yang merata di seluruh wilayah/kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

7) Masih tingginya tingkat reproduksi netto/*net reproduction rate* (NRR)

Tingkat Reproduksi Netto atau *Net Reproduction Rate* (NRR) adalah jumlah anak perempuan yang dilahirkan per 1.000 penduduk perempuan dengan mempertimbangkan kemungkinan bayi tersebut meninggal dalam usia reproduksi. Dikatakan reproduksi netto karena ukuran ini telah mempertimbangkan kemungkinan meninggal. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukabumi adalah NRR. Angka NRR yang ideal berada pada angka NRR=1 artinya setiap penduduk wanita akan digantikan oleh seorang anak wanita yang menggantikan posisi dirinya. Hal ini berarti bila NRR lebih dari 1 maka dapat dipastikan pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat. Kondisi NRR Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Sumber: DPPKB Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 4.3 Tingkat Reproduksi Netto atau *Net Reproduction Rate* (NRR) Kabupaten Sukabumi 2018-2020

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa NRR Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan pada tahun 2018 berada pada angka 1,02 menjadi 1,03 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya pertambahan bayi perempuan yang lahir hidup mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun kondisi ini masih cukup baik mengingat NRR=1 adalah angka yang ideal.

I. Bidang Perhubungan

Bidang perhubungan terbagi menjadi beberapa sektor yaitu Sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Sektor Pelayaran. Permasalahan yang terjadi pada setiap sektor adalah sebagai berikut:

1) Sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Belum optimalnya rekayasa lalu lintas di jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten;
- Masih banyak terdapat daerah rawan kecelakaan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan, tingginya pelanggaran angkutan umum penumpang dan barang, masih adanya PKB yang tidak sesuai akreditasi minimal;
- Belum optimalnya sistem manajemen lalu lintas untuk mengurangi kepadatan lalu lintas;

- Belum optimalnya pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek;
- Belum optimalnya pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- Belum terwujudnya pelayanan angkutan masal (umum) yang memadai;
- Belum optimalnya perencanan dan sistem jaringan transportasi;
- Masih tingginya tingkat Kemacetan Lalu Lintas di Kabupaten Sukabumi

  Kemacetan adalah kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati atau melebihi 0 km/jam, sehingga menyebabkan terjadinya antrian. Pada saat terjadinya kemacetan, nilai derajat kejenuhan pada ruas jalan akan ditinjau dimana kemacetan akan terjadi bila nilai derajat kejenuhan mencapai lebih dari 0,5.
- Pengembangan infrastruktur TIK bidang Perhubungan belum memadai

  Dinas Perhubungan belum mempunyai sistem TIK Terpadu, seperti pengambilan data secara digital, sistem monitoring, sistem operasi dan pengukuran kinerja, sistem keuangan, hingga sistem dukung kebijakan dan investasi;
- Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi masih belum memadai terutama Rambu, Marka, *Guard Rail* dan PJU;
- Kurang optimalnya simpul jaringan transportasi dan parkir yang di pengaruhi oleh: 1) Kurangnya tata guna lahan/pola ruang dengan banyak tumbuhnya pusat kegiatan baru seperti: perdagangan, Industri dan pabrik; 2) Pembangunan prasarana transportasi moda kereta api, udara dan laut dengan pembangunan rel *double track*, bandara dan pelabuhan regional; 3) Pembangunan jalan TOL Bogor, Sukabumi dan Cianjur.

2) Sektor Pelayaran
- Simpul transportasi berbasis perairan belum optimal;
- Navigasi dan fasilitas keselamatan pelayaran belum optimal;
- Pengawasan dan pengendalian perairan belum optimal;

- Fasilitas ASDP kurang memadai;
- SDM ASDP kurang memadai.

J. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah;
2) Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang kinerja penyelenggaran pemerintah daerah (*e-government*);
3) Kualitas jaringan telekomunikasi belum merata di seluruh wilayah di Kabupaten Sukabumi, sehingga masih terdapat 115 titik yang berstatus *blank spot area*.

K. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pada bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

1) Data yang berkaitan dengan UMKM belum terintegrasi. Data yang berkaitan dengan jumlah UMKM di Kabupaten Sukabumi kurang lengkap. Perlu dilakukan validasi mengenai data tersebut dan harus terukur kriteria validasinya. Data yang berkaitan dengan UMKM juga perlu dirapikan hingga klasterisasi data supaya dapat digunakan dengan mudah untuk pengembangan kebijakan selanjutnya berkaitan dengan kredit maupun pelatihan dan lain-lain.
2) Daya saing UMKM masih rendah. Teknologi yang dimiliki oleh para pelaku usaha UMKM sebagian besar masih tradisional. Untuk itu, perlu direalisasikan program digitalisasi UMKM. Namun, hal ini terkendala dengan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM yang belum mempunyai daya saing.
3) Koperasi belum memiliki keunggulan kompetitif. Koperasi saat ini dianggap kuno bagi para milenial. Selain itu, kurangnya kualitas SDM, kelembagaan dan pengawasan koperasi menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi saat ini.

L. Bidang Penanaman Modal

Penanaman modal memiliki peranan penting dalam mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal. Permasalahan pada bidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

1) Implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum optimal;
2) Masih terdapatnya regulasi PMPTSP yang tumpang tindih;
3) Kualitas pelayanan perizinan berbasis sistem informasi masih belum optimal;
4) Belum tersedianya data potensi unggulan daerah untuk memperkuat daya tarik investasi;
5) Belum optimalnya sinergitas antar sektor dalam mendukung investasi daerah.

Penanaman modal memiliki peranan penting dalam mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal. Isu sektor penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu diantaranya Implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar proses perizinan, penataan & sinkronisasi regulasi PMPTSP, peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital, penguatan daya tarik investasi melalui data potensi unggulan daerah, serta sinergitas antar sektor dalam mendukung investasi daerah.

Pengembangan investasi daerah diarahkan pada perwujudan iklim investasi yang menarik melalui pemberian insentif dan kemudahan kepada investor dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana dana stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya dan percepatan pemberian izin usaha. Selain itu, daya tarik investasi di Kabupaten Sukabumi adalah ketersediaan bahan baku industri pengolahan berbasis bahan lokal yang melimpah. Data potensi unggulan

daerah perlu disediakan pemerintah daerah untuk memperkuat daya tarik investasi.

M. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pada bidang kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya peran kelembagaan pemuda;
2) Masih rendahnya prestasi olahraga baik di kancah nasional maupun internasional;
3) Masih rendahnya sinergitas antara olahraga dan kebudayaan;
4) Masih rendahnya anggaran yang memadai dalam membangun sarana dan prasarana serta pembinaan prestasi olahraga.

N. Bidang Statistik

Permasalahan pada bidang statistik terkait dengan persentase keterisian data SIPD dimana ditargetkan terisi 70 persen ternyata tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena kesulitan untuk mengumpul seluruh elemen data yang ada di Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

O. Bidang Kebudayaan

Permasalahan pada bidang kebudayaan adalah sebagai berikut:

1) Sarana dan prasarana kurang memadai;
2) Pelestarian dan pengembangan budaya daerah belum optimal;
3) Belum adanya peraturan daerah terkait kebudayaan;
4) Belum optimalnya kurikulum yang menerapkan kearifan lokal di sekolah;
5) Belum optimalnya sinergitas antara program kebudayaan dan kepariwisataan;
6) Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai luhur dan unsur kearifan lokal.

P. Bidang Perpustakaan

Permasalahan di bidang perpustakaan adalah berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan, dimana terjadi penurunan dari 83.566 pengunjung pada tahun 2017 menjadi 11.104 pengunjung pada tahun 2020.

4.1.2.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Bidang Pariwisata

Permasalahan pembangunan untuk sektor pariwisata yang teridentifikasi yaitu belum kuatnya regulasi pengembangan pariwisata, belum optimalnya promosi pariwisata, masih rendahnya kualitas SDM dan industri pariwisata, belum optimalnya pembangunan destinasi pariwisata, serta masih rendahnya partisipasi dan kontribusi masyarakat. Regulasi mengenai pengembangan wisata akan erat kaitannya dengan bagaimana Kabupaten Sukabumi menentukan arah pengembangan wisata. Selain berkaitan dengan regulasi, isu strategis sektor pariwisata juga berkaitan dengan promosi. Promosi belum dapat dilaksanakan dengan optimal berkaitan dengan *tools marketing* dan *branding* baik skala lokal, nasional maupun internasional. Kabupaten Sukabumi belum memiliki kalender *event* pariwisata yang tetap karena masih mengkaji mana yang masih layak dan menarik untuk menarik para wisatawan.

Tantangan dalam pengembangan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan promosi tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Sukabumi yang masih rendah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder perlu adanya gerakan untuk meningkatkan budaya sadar wisata untuk Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Selain itu, kualitas SDM pariwisata sangat rendah, dimana penguasaan bahasa asing bagi SDM yang berkecimpung di sektor pariwisata masih sangat rendah. Pengelolaan daerah wisata juga masih belum optimal.

B. Bidang Pertanian

Dalam bidang pertanian terdiri dari dua urusan, yaitu urusan terkait pertanian dan peternakan. Permasalahan pada urusan pertanian adalah sebagai berikut:

1) Rendahnya produktivitas dan nilai tambah pertanian;
2) Rendahnya nilai tukar petani;
3) Rendahnya regenerasi SDM di sektor pertanian;

4) Pembangunan infrastruktur yang belum optimal;
5) Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian;
6) Data pertanian yang belum rapi;
7) Rendahnya kepemilikan lahan pertanian yaitu hanya sebesar 0,3 ha per rumah tangga petani (Sensus Pertanian, 2013);
8) Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian dan kurang optimalnya memproteksi Lahan Pertanian Produktif (LP2B).

Permasalahan pada urusan peternakan adalah sebagai berikut:

1) Rendahnya produktivitas ternak;
2) Menurunnya populasi dan *performance* Sumber Daya Genetik (SDG) ternak;
3) Kurangnya keterampilan SDM peternakan dan masyarakat veteriner;
4) Belum optimalnya pengembangan kawasan pengembalaan umum ternak;
5) Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana peternakan;
6) Kurangnya perhatian terhadap pengembangan agribisnis peternakan;
7) Rendahnya kesadaran terhadap Kesmavet; dan
8) Lemahnya pengawasan terhadap penegakan regulasi peternakan.

C. Bidang Kehutanan

Hutan berperan penting sebagai fungsi hidrologis. Namun demikian, terdapat permasalahan pada bidang kehutanan yaitu terjadinya deforestasi, sehingga berdampak pada berkurangnya daerah resapan air hujan. Hal ini menjadi salah satu penyebab bencana kekeringan, banjir, dan longsor yang terjadi di Kabupaten Sukabumi.

D. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan di bidang energi dan sumber daya mineral adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya panas bumi sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan serta berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.

E. Bidang Perdagangan

Permasalahan pada bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

1) Distribusi perdagangan dan nilai ekspor daerah masih belum optimal. Distribusi perdagangan belum terjadi secara efisien karena kendala multi sektor. Selain itu, banyak pelaku usaha belum memahami prosedur ekspor meskipun telah berpotensi untuk dapat melakukan ekspor;
2) Sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Sukabumi belum memadai. Banyak lahan-lahan di pasar yang belum memiliki sertifikat kepemilikan dan IMB. Pusat oleh-oleh di Kabupaten Sukabumi perlu dibangun untuk mendukung amenitas pariwisata.

F. Bidang Perindustrian

Permasalahan pada bidang perindustrian adalah sebagai berikut:

1) Data IKM yang belum diverifikasi dan belum terintegrasi dengan baik;
2) Masih rendahnya jumlah IKM berdaya saing, unggul dan produktif;
3) Pengembangan sentra IKM dan Kawasan Industri yang belum optimal;
4) Masih rendahnya IKM yang memanfaatkan teknologi digital baik dalam produksi maupun promosi dan pemasaran;
5) Belum kuatnya regulasi pengelolaan IKM.

G. Bidang Transmigrasi

Permasalahan pada bidang transmigrasi adalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan kuota target pemberangkatan;
2) Terjadinya perubahan regulasi;
3) Rendahnya tingkat kompetensi masyarakat translok;
4) Tidak tersedianya petugas pendampingan di setiap lokasi translok;
5) Kurangnya ketersediaan SDM fungsional dan keterbatasan anggaran.

H. Bidang kelautan dan Perikanan

Permasalahan pada bidang kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas sektor kelautan perikanan;
2) Masih rendahnya kualitas SDM kelautan dan perikanan;
3) Sistem *database* kelautan dan perikanan yang belum rapi dan terintegrasi;
4) Sarana prasarana kelautan perikanan yang belum memadai;
5) Rendahnya mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
6) Belum optimalnya fasilitas usaha, pembiayaan dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil;
7) Belum adanya sinergi pengelolaan ekosistem kelautan perikanan;
8) Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan klaster perikanan budidaya.
9) Belum optimalnya pengelolaan perikanan di perairan umum daratan.
10) Belum optimalnya pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

4.1.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

A. Bidang Perencanaan

Permasalahan bidang perencanaan adalah masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan baik di tingkat daerah maupun di tingkat perangkat daerah, sehingga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah. Permasalahan ini disebakan oleh rendahnya ketersediaan data pendukung yang berkualitas untuk menjadi dasar dalam perencanaan. Selain itu, belum selarasnya perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Sukabumi menjadi permasalahan selanjutnya yang harus diselesaikan.

B. Bidang Keuangan

Permasalahan pada bidang keuangan adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel;
2) Belum optimalnya peningkatan sumber-sumber pendapatan dan penerimaan daerah;
3) Belum optimal penyerapan anggaran pembangunan;
4) Belum mandirinya nilai kemandirian fiskal daerah yang ditandai dengan masih rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, yaitu hanya sebesar 15,25 persen.

C. Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan

Permasalahan pada bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

1) Kesenjangan kompetensi antar ASN yang masih tinggi;
2) Indeks Profesionalitas ASN masih rendah;
3) Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pendidikan aparatur belum optimal;
4) Proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi ASN kurang optimal.
5) Kurang optimalnya pemberdayaan sumber daya aparatur pemerintahan utamanya dalam peningkatan kualitas kinerja

   Kualitas sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadi suatu permasalahan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Peningkatan aparatur daerah yang profesional, berkualitas, dan amanah menjadi "pekerjaan rumah" bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari pencapaian *Good Governance* melalui Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mengefektifkan kinerja pemerintah daerah, di samping pemerintah perlu menambah jumlah PNS, namun perlu juga meningkatkan kualifikasi PNS dengan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam hal pelayanan dan kinerja. Hal ini akan memberikan pengaruh yang positif bagi peningkatan kapasitas

dan akuntabilitas kinerja, sehingga potensi sumber daya aparatur ini dapat dipergunakan secara optimal.

D. Fungsi Lainnya

Beberapa permasalahan lain dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah:

1) Rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan baik teknis maupun administrasi

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akuntabilitas keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan penyimpangan penggunaan anggaran. Fakta yang sangat mencolok sebagai bukti masih lemahnya *good governance* selama ini adalah tingginya korupsi yang terjadi. Korupsi dapat dikatakan merajalela terutama di kalangan birokrasi pada institusi publik atau lembaga pemerintah baik departemen maupun lembaga bukan departemen. Korupsi biasanya yang terjadi disertai dengan tindakan kolusi dan nepotisme dimana kedua belah pihak akan merasa diuntungkan dengan merugikan pihak negara.

2) Rendahnya kualitas pelayanan publik

Pelayanan yang berkualitas merupakan kemampuan aparatur negara dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada para konsumen dalam hal ini masyarakat dengan standar yang telah ditentukan. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan reformasi di Kabupaten Sukabumi ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami

kemunduran yang utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, dan diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur pemerintahan atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan menjadi hambatan berat bagi pelaksanaan pembangunan jika tidak diantisipasi dengan cara yang bijak.

3) Struktur kelembagaan PD rentan mengalami perubahan dalam jangka pendek dengan komposisi yang cenderung kurang proporsional;
4) Kurang optimalnya penegakkan supremasi hukum, keadilan dan hak asasi manusia serta kerjasama dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif pada beragam program kerja yang telah dirumuskan;
5) Pengelolaan wilayah administrasi kecamatan dan desa kurang optimal;
6) Proses sosialisasi Peraturan Daerah yang mengatur urusan sanksi terhadap pelanggaran belum optimal;
7) Rendahnya kepatuhan dan kepedulian masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8) Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
9) Rendahnya sinergitas antar PD dalam rangka penegakan Perda dan Perkada yang mengandung sanksi;
10) Rendahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
11) Masih rendahnya keteladanan dalam konsepsi dan praktek nilai-nilai Pancasila;
12) Masih rendahnya pembinaan dan evaluasi keberadaan Ormas dan OKP untuk mengantisipasi potensi konflik horisontal;

13) Masih rendahnya peran aktif Ormas dan OKP dalam mewadahi aspirasi masyarakat dengan berlandaskan kepentingan komunal dan penegakan keadilan secara objektif;
14) Masih rendahnya proses edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu yang aman dan jujur;
15) Masih rendahnya angka partisipasi pemilih yang terdaftar.

4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Rendahnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pola pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat kesejahteraan penduduknya. Engel (1857) menyatakan bahwa proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan akan menurun ketika pendapatan meningkat.

Pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mengalami penurunan yang dipicu oleh penyebaran Pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Disamping itu, berdasarkan jenis Kelompok barang, makanan merupakan kelompok barang yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020 persentase konsumsi kelompok makanan lebih dari 50 persen dibandingkan dari persentase pengeluaran bukan makanan. Pada tahun 2020 persentase pengeluaran untuk makanan sebesar 59,91 persen, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan sebesar 40,09 pesen. Hal tersebut menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masyarakat, sebagian besar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup makanan sehari-hari, sehingga persentasenya setiap tahun semakin besar dibandingkan dengan pengeluaran kelompok bukan makanan yang cenderung menurun. Dengan data-data tersebut dapat disimpulkan

bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi belum cukup baik, karena pengeluaran rumah tangganya masih didominasi untuk konsumsi makanan.

2. Defisit neraca perdagangan

   Besaran net ekspor Kabupaten Sukabumi terhadap PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 memiliki nilai negatif. Nilai ekspor sukabumi telah melebihi target namun terjadi defisit neraca perdagangan di Kabupaten Sukabumi, dimana nilai barang dan/jasa yang di impor lebih tinggi dibandingkan dengan nilai barang dan/ jasa yang di ekspor. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2010 kontribusi net ekspor pada PDRB ADHB menurut pengeluaran sebesar -11,44 persen, dan meningkat menjadi sebesar -6,83 persen pada tahun 2016, hingga pada tahun 2020 sebesar -5,19 persen. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan komoditas barang dan/ jasa yang dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten Sukabumi dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri.

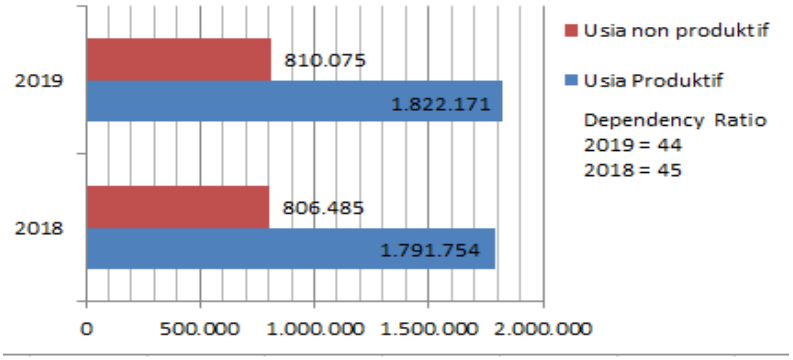
B. Fokus fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Infrastruktur wilayah merupakan hal yang sangat strategis di Kabupaten Sukabumi. Permasalahan yang telah diidentifikasi dari aspek ini yaitu belum optimalnya pengembangan kualitas infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar di seluruh daerah. Kondisi geografis dan topografi wilayah menjadi alasan tersendiri yang menyebabkan rendahnya tingkat aksesibilitas wilayah. Wilayah yang luas dengan medan yang cukup sulit menyebabkan belum semua daerah dapat terhubung dengan baik dan optimal. Rendahnya aksesibilitas juga disebabkan oleh masih terdapat kondisi jalan dengan kondisi rusak ringan dan berat sebanyak 28,6 persen, serta minimnya kuantitas dan kualitas fasilitas perhubungan terutama cakupan layanan transportasi publik, sehingga pergerakan orang dan barang menjadi lambat dan terbatas.

Pengembangan kawasan permukiman dan penanganan kawasan kumuh juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan masih minimnya fasilitas perumahan dan permukiman yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi standar kelayakan, seperti fasilitas air minum/air bersih, fasilitas pengolahan limbah domestik, fasilitas sanitasi, fasilitas persampahan dan drainase. Permasalahan lainnya yaitu terkait minimnya sarana prasarana penunjang pengembangan perekonomian kerakyatan yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan masih belum optimalnya pemberdayaan perekonomian rakyat, serta belum maksimalnya program dan kegiatan pemerintah dalam mengembangkan berbagai usaha mikro kecil dan menengah utamanya industri rumah tangga.

C. Fokus Sumber Daya Manusia

Permasalahan pada fokus sumber daya manusia dilihat dari Rasio beban ketergantungan atau *Dependency Ratio* (DR) yang merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency *ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio beban ketergantungan atau *Dependency Ratio* (DR) Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 4.4.



sumber: DPPKB Kabupaten Sukabumi, 2020

Gambar 4.4 Rasio Beban Ketergantungan atau *Dependency Ratio* (DR) Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2019

Rasio beban ketergantungan ideal berada pada angka 41 yang berarti 100 penduduk usia produktif berbanding 41 penduduk usia non produktif. Dari gambar 4.4 dapat dilihat rasio beban ketergantungan di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari 45 di tahun 2018 menjadi 44 ditahun 2019, berarti semakin banyak usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0-15 tahun dan >65 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa bonus demografi telah mulai terjadi di Kabupaten Sukabumi. Hal ini harus menjadi perhatian serius karena angka ini hanya menunjukkan perbandingan usia bukan secara nyata menunjukkan produktivitas (menghasilkan barang dan jasa/bekerja) pada usia produktif. Apabila rasio beban ketergantungan ini dimanfaatkan dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk (bonus demografi), namun apabila tidak dapat dimanfaatkan maka justru akan menjadi beban bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan semakin bertambahnya penduduk usia produktif yang justru tidak produktif (bencana demografi).

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun

waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis Kabupaten Sukabumi disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telaah RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025
2. Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024
3. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
4. Dinamika Internasional
5. Kebijakan RTRW Kabupaten Sukabumi
6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sukabumi

4.2.1 Telaah RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025

Dokumen RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani dalam perencanaan menengah Kabupaten Sukabumi untuk periode 2021-2026. Jika dilihat dari tahapannya, tahun 2021-2026 merupakan RPJMD tahapan terakhir atau RPJMD tahap ke-4 dalam rangka pencapaian pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025, visi pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah:

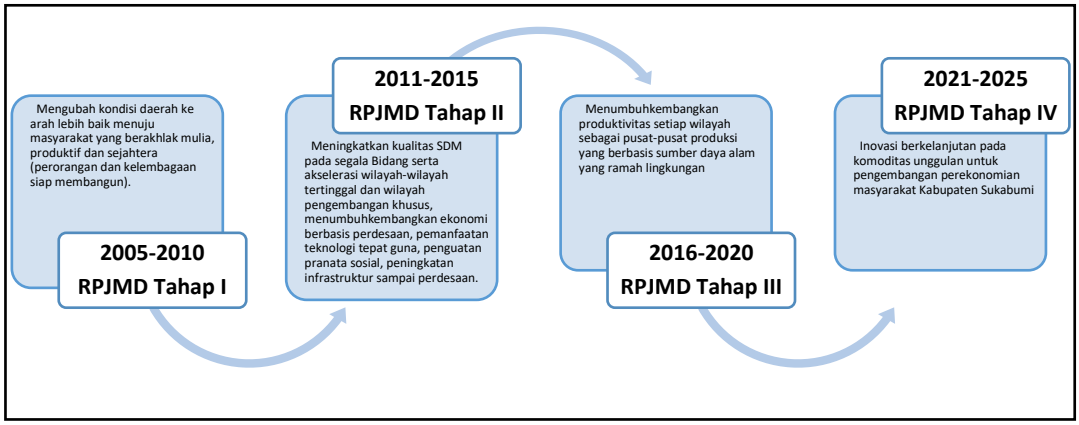
"**Dengan Iman dan Taqwa, Kabupaten Sukabumi Maju, Adil dan Sejahtera Tahun 2025**".

Upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi tersebut, akan dicapai melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa, Sehat, Cerdas dan Produktif.
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berorientasi Perekonomian Pedesaan dan Berwawasan Lingkungan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
4. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap

dalam kerangka pembangunan jangka menengah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.5.



Sumber: RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005-2025

Gambar 4.5 Rencana Tahapan Lima Tahunan Pencapaian Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025

Berdasarkan gambar di atas, RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD tahap ke-4. Tahapan ini ditujukan untuk mengembangkan inovasi berkelanjutan pada segala bidang terutama pada setiap komoditas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat dan wilayah Kabupaten Sukabumi. Upaya tersebut bertujuan agar sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi lebih inovatif dan memiliki daya saing dan daya juang yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain khususnya di Jawa Barat. Di samping itu, mereka dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan Jawa Barat dan nasional.

4.2.2 Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024

Isu strategis Nasional yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024 difokuskan pada pembangunan manusia, pengembangan ekonomi, pembangunan kewilayahan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan politik, hukum, keamanan dan pertahanan.

Isu-isu strategis tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
    - Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
    - SDM berkualitas dan berdaya saing

2. Pembangunan Ekonomi:
    - Pangan
    - Energi
    - Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital
    - Industri Manufaktur
    - Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan Kewilayahan:
    - Sentra Pertumbuhan
    - Komoditas Unggulan Daerah
    - Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
    - Transportasi
    - Telekomunikasi
    - Sumber Daya Air
    - Perumahan dan Permukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
    - Hukum dan Regulasi
    - Pertahanan, Keamanan dan Politik

Berdasarkan isu strategis di atas, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan 5) Transformasi Ekonomi. Dari Arahan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa prioritas pembangunan yang ingin dicapai untuk mewujudkan Visi dan Misi Nasional. Keterkaitan antara visi, misi, arahan Presiden, serta agenda pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Sumber: RPJMN 2020-2024

Gambar 4.6 Visi, Misi, Arahan Presiden, serta Agenda Pembangunan Nasional

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 terdapat 5 (lima) isu strategis, yaitu:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia.

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM

antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan menengah yang belum mencapai seratus persen.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat pada saat ini menunjukkan masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, seperti masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yangkurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.

Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi Covid-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19. Dalam kondisi pandemi Covid-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi pandemi Covid-19.

2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial.

Pada periode tahun 2015-2019 penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan dan kemiskinan perkotaan. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 serta keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri, menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. PPKS di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan, dan *human trafficking*, belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan PSKS.

3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung 45 persen, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya. Namun di sisi lain, dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang

tanpa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diutamakan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan diwujudkan pula melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan. Antisipasi dampak perubahan iklim melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diharapkan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi, serta mampu mempertahankan kesehatan masyarakat.

4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi Covid-19, maka semakin berdampak buruk terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami kontraksi. Dampak pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha, sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan *lockdown* di berbagai negara, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia, *social distancing* di tempat umum, dan pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan banyak destinasi wisata, pelaku usaha maupun pelaku seni yang tutup atau tidak melakukan aktivitasnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Bahkan pada saat PSBB tidak diberlakukan lagi dan

diterapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), belum mampu mendorong hidupnya kembali industri pariwisata.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang ditandai oleh turunnya Nilai Tukar Nelayan. Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degradasi lahan yang masih tinggi di DAS, pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi).

5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dampak pandemi Covid-19, serta kajian permasalahan dan isu strategis di Provinsi Jawa Barat, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 adalah:

1. Reformasi sistem kesehatan daerah
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan
4. Reformasi sistem perlindungan sosial

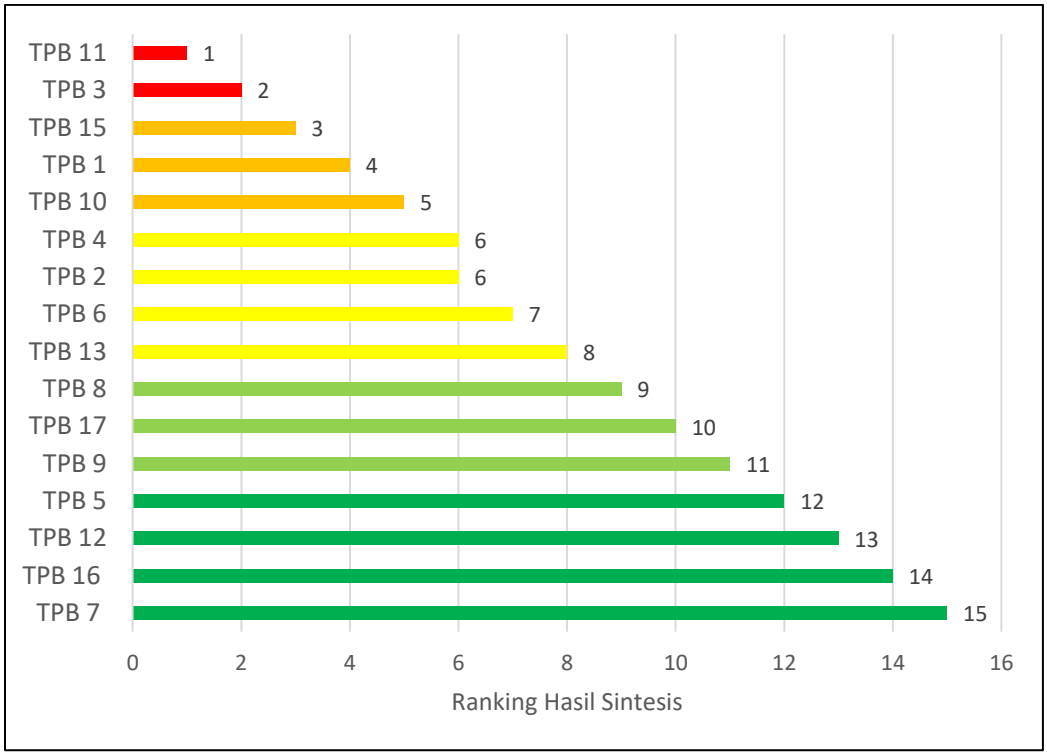
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah
8. Gerakan membangun desa
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata

4.2.4 Dinamika Internasional

Dinamika internasional yang memengaruhi pembangunan di Indonesia dan perlu diantisipasi atau direspon oleh Pemerintah Daerah. Beberapa isu yang menjadi fokus dunia internasional adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs, Revolusi Industri 4.0, dan perubahan iklim (*climate change*), yaitu:

A. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs dimulai pada tahun 2015 yang disusun untuk memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Tujuan dari SDGs memiliki keterkaitan satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah daerah bukan sekedar pelaksana dari agenda pembangunan, tetapi juga sebagai pembuat kebijakan, katalis perubahan dan tingkat pemerintahan yang paling ideal untuk menghubungkan tujuan SDGs dengan agenda pembangunan di daerah. Dari isu pembangunan berkelanjutan strategis yang telah didapatkan, kemudian dilakukan pengelompokkan isu pembangunan berkelanjutan ke dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil pengelompokan isu yang telah disebutkan di atas menjadi TPB prioritas. Hasil penapisan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan prioritas dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Sumber: KLHS RPJMD 2021-2026

Gambar 4.7 Hasil Penapisan TPB Prioritas

Berdasarkan hasil analisis pengelompokan isu pada Gambar 4.7 didapatkan 5 TPB prioritas. Dengan adanya TPB prioritas yang memerlukan perhatian khusus maka akan membantu dalam menganalisis dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi. Berikut ini merupakan hasil TPB prioritas:

1. TPB 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
2. TPB 3 Kehidupan sehat dan sejahtera
3. TPB 15 Ekosistem Daratan
4. TPB 1 Tanpa Kemiskinan
5. TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan

Berdasarkah hasil analisis di atas, terdapat kesamaan TPB prioritas jika dibandingkan dengan hasil TPB prioritas Provinsi Jawa Barat, yaitu pada TPB 3 dan TPB 15.

B. Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Pada era ini industri lebih mengedepankan konektivitas secara digital dan mencakup berbagai jenis teknologi yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas. Industri 4.0 memiliki potensi manfaat yaitu perbaikan kecepatan fleksibilitas produksi, peningkatan layanan kepada pelanggan dan peningkatan pendapatan. Industri 4.0 memberdayakan peran digitalisasi manufaktur pada jaringan suplai yang melibatkan integrasi informasi dari berbagai sumber dan lokasi untuk menggerakkan manufaktur dan distribusi secara fisik. Terwujudnya potensi manfaat tersebut akan memberi dampak positif terhadap perekonomian suatu negara.

Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, sektor industri nasional perlu banyak berbenah, terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing. Setidaknya terdapat 5 teknologi utama yang menopang pembangunan sistem industri 4.0 yaitu *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), *human-machine interface*, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D *printing*. Kelima unsur tersebut harus mampu dikuasai oleh perusahaan manufaktur Indonesia agar dapat bersaing.

Melalui adanya industri 4.0 yang mengedepankan digitalisasi, maka akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. *World Economic Forum* merilis 10 keahlian yang dibutuhkan para pekerja untuk menghadapi perubahan dikarenakan adanya industri 4.0 yaitu pemecahan masalah yang kompleks, berfikir kritis, kreativitas, manajemen sumber daya manusia, berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, penilaian dan pengambilan keputusan, berorientasi pada layanan, negosiasi dan fleksibilitas kognitif. Lebih dari setengah keterampilan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan *soft skill* yang menjadi salah satu faktor yang paling penting untuk dimiliki para pekerja di masa depan.

C. Perubahan Iklim

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Protokol Kyoto, yaitu konferensi global yang mengangkat isu tentang perubahan iklim. PBB mendefinisikan perubahan iklim sebagai gejala yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang berakibat pada terjadinya perubahan iklim yaitu banyaknya penggunaan energi terkait dengan bahan bakar yang berasal dari fosil, deforestasi hutan, dan sebagainya. Perubahan iklim yang terjadi ditandai dengan beberapa hal seperti perubahan pada suhu, curah hujan, dan pola angin.

Salah satu dampak perubahan iklim yang sering terjadi adalah bencana alam yang terkait dengan peningkatan suhu bumi. Peningkatan suhu bumi berdampak pada mencairnya lapisan es di bumi, sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan adanya risiko penggusuran penduduk yang bermukim di garis pantai. Hal ini jika dibiarkan saja tanpa adanya perubahan pada perilaku manusia, akan memicu terjadinya berbagai bencana lain terkait perubahan iklim yang berdampak pada keberlanjutan dan kelangsungan kehidupan di muka bumi serta keberlanjutan berbagai aspek yang mendukung kehidupan manusia.

Masih banyak sejumlah pihak dari kalangan pemerintah, pelaku bisnis dan industri, maupun masyarakat yang belum menyadari bahwa fenomena perubahan iklim telah terjadi seiring dengan intensitas kegiatan manusia di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi perubahan iklim. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan dampak perubahan iklim dapat diminimalisasi atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

4.2.5 Kebijakan RTRW Kabupaten Sukabumi

Perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 memerhatikan kebijakan penataan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 Perda Nomor 22 Tahun 2012. Tujuan penataan ruang Kabupaten Sukabumi adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata dan industri berwawasan lingkungan menuju kabupaten yang religius, maju dan sejahtera. Wilayah perencanaan RTRW terdiri dari 47 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sukabumi meliputi:

1. Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan;
2. Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan;
3. Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
4. Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal;
5. Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis;
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

4.2.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sukabumi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan ataupun sebaliknya. KLHS dimaksudkan untuk menyelenggarakan analisis secara sistematik, menyeluruh, dan partisipatif sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi. KLHS bertujuan

untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi, serta menjamin program/arahan kebijakan di Kabupaten Sukabumi telah memperhatikan keutuhan dan keselamatan lingkungan hidup.

KLHS Kabupaten Sukabumi merupakan KLHS RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terfokus pada 5 (lima) TPB prioritas sebagai berikut:

1. TPB 1 : Tanpa kemiskinan
2. TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
3. TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan
4. TPB 11 : Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
5. TPB 15 : Ekosistem darat

Berikut ini disajikan skenario terhadap 5 (lima) TPB prioritas KLHS berupa rekomendasi arah kebijakan, arahan program, dan para pihak yang dapat berkontribusi untuk mencapai *outcome* yang ditentukan.

1. TPB 1 : Tanpa kemiskinan

Terdapat dua *outcome* yang berkaitan dengan TPB 1, yang pertama yaitu menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. *Outcome* kedua yaitu meningkatnya kapasitas prasarana air baku dan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak dan sanitasi layak. Pada Tabel 4.4 disajikan arahan kebijakan, arahan program, dan pihak yang dapat terlibat untuk mewujudkan TPB 1 tanpa kemiskinan.

Tabel 4.4 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1 tanpa kemiskinan

Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemi	Program perlindungan dan jaminan sosial	• Dinas Sosial • Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Dinas Pertanian • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindustrian dan ESDM • Dinas Ketahanan dan Tata Ruang • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Peternakan • Dinas Tenaga Kerja • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Pariwisata • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia • Balai Latihan Kerja • Badan Perencanaan Pengembangan Daerah • Prov. Jawa Barat • Pemerintah kecamatan • Pemerintah desa • Pelaku usaha • LSM bidang pemberdayaan masyarakat • Organisasi dan mitra bidang pemberdayan masyarakat
		Program rehabilitasi sosial	
		Program pemberdayaan sosial	
		Program perencanaan tenaga kerja	
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
		Program penempatan tenaga kerja	
		Program pengendalian penduduk	
		Program pembinaan keluarga berencana	
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	
		Program pengembangan UMKM	
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	

Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
		Program penyuluhan pertanian	
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
Meningkatnya kapasitas prasarana air baku dan akses rumah tangga terhadap pelayanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan serta terwujudnya akses terhadap sanitasi layak dan peningkatan PHBS bagi seluruh masyarakat	Penuntasan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	• Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan daerah • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Kesehatan • Dinas Ketahanan dan Tata Ruang • Balai Konservasi Sumber Daya Alam • Balai Besar Wilayah Sungai • Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat • Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat • PDAM • Perhutani • Pemerintah Kecamatan • Pemerintah desa • LSM Bidang Lingkungan Hidup • Organisasi dan Mitra Lingkungan Hidup • Perguruan Tinggi/akademisi Universitas Muhammadiyah Sukabumi
	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang akses sanitasi layak	Program pengembangan permukiman	
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	
		Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	
	Pengelolaan dan pengendalian pencemar air dan sanitasi yang buruk sehingga menyebabkan terjadinya penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
	Peningkatan daya dukung penyediaan air dan mengefisiensikan	Program pengelolaan sumber daya air	
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	

Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
	pemanfaatannya	Program pengembangan permukiman	
		Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Program pengendaliasn pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
		Program Pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI)	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

2. TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera

Outcome yang diharapkan dari TPB 3 yaitu tertanganinya Pandemi Covid-19, fasilitas kesehatan yang sesuai standar dan peningkatan kesehatan masyarakat. Pada Tabel 4.5 disajikan arahan kebijakan, arahan program, dan pihak yang dapat terlibat untuk mewujudkan TPB 3 kehidupan sehat dan sejahtera.

Tabel 4.5 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 3 kehidupan sehat dan sejahtera

Outcome	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
Fasilitas kesehatan yang sesuai standar dan meningkatnya	Meningkatkan perbaikan infrastruktur dan sarana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	• Dinas Sosial • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Kesehatan

Outcome	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
kesehatan masyarakat	prasarana kesehatan		• Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Perhubungan • Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian • Polantas • Pemerintah Kecamatan • Pemerintah desa • Badan Nasional Penanggulangan Bencana • Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat • Kementrian Kesehatan • BPJS • IDI, IBI, IAI, PPNI • Pelaku usaha • LSM bidang kesehatan • LSM bidang kemasyarakatan Organisasi dan mitra bidang pemberdayan masyarakat
	Peningkatan kualitas SDMK	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	Mendorong peningkatan warga yang memiliki jaminan kesehatan	Program pemberdayan masyarakat bidang kesehatan	
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
	Mendorong penurunan jumlah korban jiwa akibat kecelakan lalu lintas	Peningkatan kondisi infrastruktur serta sarana prasarana lalu lintas	
Pandemi Covid-19 Tertangani	Melakukan adaptasi perubahan perilaku terhadap kondisi pandemi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	• Dinas Sosial • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Kesehatan • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Perhubungan • Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian • Polantas
	Meningkatkan resiliensi kota terhadap pandemi dengan melibatkan stakeholder	Program Penanggulangan Bencana	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	

Outcome	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
	Pemantauan penanganan pandemi melalui sistem informasi interaktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	• Pemerintah Kecamatan • Pemerintah desa • Badan Nasional Penanggulangan Bencana • Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat • Kementrian Kesehatan • BPJS • IDI, IBI, IAI, PPNI • Pelaku usaha • LSM bidang kesehatan • LSM bidang kemasyarakatan Organisasi dan mitra bidang pemberdayan masyarakat
		Program Penanggulangan Bencana	
	Penataan permukiman padat untuk mendukung terwujudnya prinsip physical distancing	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Program Penataan Bangunan & Lingkungannya	
		Program Pengembangan Permukiman	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

3. TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan

Outcome yang diharapkan untuk mewujudkan TPB 10 yaitu berkurangnya kesenjangan masyarakat dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Pada Tabel 4.6 disajikan Arahan kebijakan, arahan program, dan aktor yang dapat terlibat dalam mewujudkan TPB 10.

Tabel 4.6 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 10 berkurangnya kesenjangan

Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
Berkurangnya kesenjangan dengan peningkatan ekonomi masyarakat	Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemi	Program perlindungan dan jaminan sosial	• Dinas Sosial • Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Dinas Pertanian • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program rehabilitasi sosial	
		Program pemberdayaan sosial	
		Program perencanaan tenaga kerja	
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
		Program penempatan tenaga kerja	

Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
		Program pengendalian penduduk	• Dinas Perindustrian dan ESDM • Dinas Ketahanan dan Tata Ruang • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Peternakan • Dinas Tenaga Kerja • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Pariwisata • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia • Balai Latihan Kerja • Badan Perencanaan Pengembangan Daerah • Prov. Jawa Barat • Pemerintah kecamatan • Pemerintah desa • Pelaku usaha • LSM bidang pemberdayaan masyarakat • Organisasi dan mitra bidang pemberdayan masyarakat
		Program pembinaan keluarga berencana	
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	
		Program pengembangan UMKM	
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	
		Program penyuluhan pertanian	
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

4. TPB 11 : Kota dan pemukiman berkelanjutan

Terdapat dua *outcome* yang berkaitan dengan TPB 11, yang pertama yaitu terwujudnya ketahanan terhadap bencana, dan kedua yaitu terwujudnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efisien. Pada Tabel 4.7 disajikan arahan kebijakan, arahan program, dan pihak yang dapat terlibat untuk mewujudkan TPB 11 kota dan pemukiman berkelanjutan.

Tabel 4.7 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 11 kota dan pemukiman berkelanjutan

Outcomes	**Arahan kebijakan**	**Arahan program**	**Para pihak**
Terwujudnya ketahanan (*resilience*) terhadap bencana, sosial, dan ekonomi di Kab. Sukabumi	Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program perencanaan lingkungan hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program penataan bangunan Gedung Program Penanggulangan Bencana Program Penanganan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	• BAPPEDA • Dinas Kesehatan • BPBD • Dinas Pertanahan dan Tata Ruang • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Sosial • Dinas Perpustakaan dan Kerasipan • Dinas Pertanian • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Pemadam Kebakaran • Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat • Pelaku Usaha • Akademisi • LSM bidang penanganan bencana • LSM Bidang Lingkungan Hidup • Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup

Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
	Mengembangkan sarana dan prasarana yang tahan bencana	Program Penyelenggaraan jalan	• BAPPEDA • Dinas Kesehatan • BPBD • Dinas Pertanahan dan Tata Ruang • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Sosial • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Perpustakaan dan Kerasipan • Dinas Pertanian • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Pemadam Kebakaran • Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat • Pelaku Usaha • Akademisi • LSM bidang penanganan bencana • LSM Bidang Lingkungan Hidup • Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup
		Program Pengembangan perumahan	
		Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	
		Program Penataan Desa	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	
Terwujudnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efisien	Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	• BAPPEDA • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum

Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
		Program pengelolaan persampahan	• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Pertanahan dan Tata Ruang • Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat • Pelaku Usaha • Akademisi • LSM Bidang Lingkungan Hidup • Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan	1. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	
	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	
	Pengembangan kelambagaan, peraturan dan perundang-undangan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	
	Pengembangan alternatif sumber pembiayaan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

5. TPB 15 : Ekosistem darat

Outcome pada TPB 15 yaitu terlaksananya perencanaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Arahan kebijakan, arahan program, dan aktor yang dapat terlibat dalam mewujudkan TPB 15 dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 15 ekosistem darat

Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
Terwujudnya ketahanan (*resilience*) terhadap bencana, sosial, dan ekonomi di Kab. Sukabumi	Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program perencanaan lingkungan hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program penataan bangunan Gedung Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Program Penanggulangan Bencana Program Penanganan Bencana	• BAPPEDA • Dinas Kesehatan • BPBD • Dinas Pertanahan dan Tata Ruang • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Sosial • Dinas Perpustakaan dan Kerasipan • Dinas Pertanian • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Pemadam Kebakaran • Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat • Pelaku Usaha • Akademisi • LSM bidang penanganan bencana • LSM Bidang Lingkungan Hidup • Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup
	Mengembangkan sarana dan prasarana yang tahan bencana	Program Penyelenggaraan jalan Program Pengembangan perumahan Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman Program Penataan Desa	• BAPPEDA • Dinas Kesehatan • BPBD • Dinas Pertanahan dan Tata Ruang • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Sosial • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Perpustakaan dan Kerasipan • Dinas Pertanian • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Pemadam Kebakaran • Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat • Pelaku Usaha • Akademisi • LSM bidang penanganan bencana • LSM Bidang Lingkungan Hidup • Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup
Terwujudnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efisien	Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	• BAPPEDA • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Pertanahan dan Tata Ruang • Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat • Pelaku Usaha • Akademisi • LSM Bidang Lingkungan Hidup • Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup
		Program pengelolaan persampahan	
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan	Program pengelolaan persampahan	
	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	

Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
	Pengembangan kelambagaan, peraturan dan perundang-undangan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	
	Pengembangan alternatif sumber pembiayaan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

4.2.7 Pemetaan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pembangunan yang telah di identifikasi, maka disusun pemetaan masalah yang berfungsi untuk mengklasifikasikan permasalahan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi Kabupaten Sukabumi. Masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Perumusan masalah diidentifikasi dengan mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, dan penyelesaian masalah dipecahkan melalui strategi. Perumusan akar masalah diidentifikasi dengan beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci, dan pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Pemetaan masalah Kabupaten Sukabumi dikelompokkan kedalam lima kategori yang dianalisis menggunakan *Sustainable Livelihood Framework* dan SDG's, kemudian diperoleh masalah pokok pada setiap kategori, yaitu :

a. Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Permasalahan mengenai kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi yang masih rendah diidentifikasi dari pemetaan uraian masalah pembangunan sumber daya manusia, dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Pemetaan masalah pada sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
1	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Kualitas sumberdaya manusia	Kurangnya keterampilan SDM peternakan dan masyarakat veteriner	Peternakan
			Rendahnya kesadaran terhadap kesmavet	
			Masih rendahnya kualitas SDM kelautan dan perikanan	Perikanan
			Kurangnya diversifikasi pangan dengan bahan pangan lokal	Ketahanan pangan
			Masih rendahnya kualitas SDM pariwisata	Pariwisata
			Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup	Lingkungan Hidup
			Angka APM SMP dan APM SMA sederajat masih rendah	Pendidikan
			Rendahnya rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah	
			Masih terdapat angka putus sekolah	
			Masih rendahnya perhatian dan kesadaran masyarakat pada pendidikan dasar khususnya terhadap pendidikan anak usia dini	
			Tingkat kompetensi personel relatif rendah dalam teknis penyelenggaraan ketertiban umum	Linmas
			Masih kurangnya pegawai dan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi penanggulangan bencana	Kebencanaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
			Jumlah anggota tim tanggap bencana yang berkompeten masih rendah	
			Tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program KB terutama di non perkotaan masih relatif rendah	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Pernikahan usia dini yang tinggi	
			Tingkat *Total Fertility Rate* (TFR) dan laju pertumbuhan penduduk (LPP) tinggi	
			Masih rendahnya kesetaraan gender	Pemberdayaan perempuan dan anak
			Belum optimalnya peran kelembagaan pemuda	Kepemudaan
			Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sukabumi masih rendah	Kesehatan
			Tingginya jumlah Angka Kematian Ibu dan bayi menunjukkan masih rendahnya pelayanan dasar yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah	
			Masih tingginya angka stunting dan gizi buruk	
		Kuantitas sumberdaya manusia	Rendahnya regenerasi SDM di sektor pertanian	Pertanian
			Kurangnya ketersediaan guru	Pendidikan
			Rendahnya pendidik dan tenaga kependidikan	
2	Rendahnya daya saing sumberdaya manusia	Daya saing sumberdaya manusia	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dan SMA sederajat masih rendah	Pendidikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
			Rendahnya adaptasi kurikulum untuk kebutuhan dunia kerja	
			Masih rendahnya kecakapan bahasa asing di potensi wisata	Pemberdayaan masyarakat dan Desa
			Masih rendahanya kualitas kompetensi dan produktivitas pencari kerja	Tenaga Kerja
			Masih rendahnya prestasi olahraga baik di kancah nasional maupun internasional	Olahraga
			Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang pengelolaan data spasial di setiap sektor/PD teknis	Pertanahan
		Implementasi nilai dan norma	Belum optimalnya peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang	Kepegawaian serta diklat
			Rendahnya kepatuhan dan kepedulian masyarakat terhadap Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penegakan perda
			rendahnya pemahaman dan implementasi ideologi dan wawasan kebangsaan	Ideologi, politik dan pemahaman dini

b. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, serta tingginya permasalahan sosial, dan kerentanan bencana

Permasalahan mengenai rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena tingkat kemiskinan masyarakat, tingginya permasalahan sosial, dan rendahnya ketahanan bencana Kabupaten Sukabumi diidentifikasi dari

pemetaan uraian masalah pembangunan sosial dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Pemetaan masalah kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sukabumi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
1	Kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan bidang kesehatan	Penyaluran penerima iuran Jaminan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu belum optimal dan tepat sasaran	Kesehatan
		Kemiskinan	Masih banyak wilayah yang rentan rawan pangan	Ketahanan pangan
			Tingginya jumlah masyarakat yang rentan miskin (tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Sukabumi lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat)	Sosial
2	Permasalahan sosial	PPKS dan perlindungan terhadap ibu dan anak	Tingginya permasalahan sosial masyarakat	
			Pemberdayaan PPKS belum optimal	
			Tingginya penyandang disabilitas, tuna sosial dan anak yang berhadapan dengan kasus hukum, masalah migran dan masalah sosial lainnya	
			Belum optimalnya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan kasus pernikahan anak	Pemberdayaan perempuan dan anak
		Kriminalitas	Angka kriminalitas yang meningkat	Linmas
			Keterbatasan jumlah personel linmas ditiap wilayah	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
		Kesetaraan gender	Masih tingginya ketimpangan kesempatan yang sama antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki	Tenaga kerja
		Kerukunan umat beragama	Masih lemahnya kerukunan hidup internal dan antar umat beragama	Agama
			Masih rendahnya kualitas lembaga sosial dan keagamaan	
		Kurangnya kesadaran terhadap budaya dan pariwisata	Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai luhur dan unsur kearifan lokal	Kebudayaan
			Pelestarian dan pengembangan budaya daerah belum optimal	
			Masih rendahnya partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pariwisata	Pariwisata
3	Ketahanan bencana	Rawan bencana alam	Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejadian bencana	Kebencanaan
			Rendahnya tingkat kesiagaan masyarakat dalam menanggapi bencana	

c. Masih rendahnya nilai tambah kegiatan ekonomi

Rendahnya nilai tambah sektor perekonomian, daya dukung dan daya tampung yang rendah, serta belum optimalnya keterkaitan antar sektor dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sukabumi diidentifikasi dari pemetaan uraian masalah pembangunan ekonomi dan sumber daya alam, dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Pemetaan masalah berdasarkan kondisi ekonomi dan sumber daya alam Kabupaten Sukabumi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
1	Rendahnya produktivitas dan nilai tambah	Rendahnya nilai tambah/ pendapatan usaha sektor primer	Rendahnya produktivitas dan nilai tambah pertanian	Pertanian
			Rendahnya nilai tukar petani	
			Rendahnya mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Kelautan dan Perikanan
		Rendahnya produktivitas usaha sektor primer	Rendahnya produktivitas ternak	Peternakan
			Menurunnya populasi dan performance sumber daya ternak	
			Menurunnya populasi dan performance sumber daya ternak (bioteknologi)	
			Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas sektor kelautan perikanan	Kelautan dan Perikanan
2	Menurunnya daya dukung dan daya tampung ruang	Daya dukung lingkungan	Penurunan kualitas air	Lingkungan Hidup
			Penurunan kualitas udara	
			Pengelolaan dan penanganan limbah rumah tangga dan B3	
			Terjadinya alih fungsi lahan	Penataan Ruang
		Daya tampung ruang	Kompleksitas aktivitas di kawasan jalur arteri berpotensi menghambat kegiatan ekonomi dan perlu pengembangan investasi di lokasi lain	
			Masih rendahnya penataan ruang yang dapat mendukung kegiatan investasi	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
3	Belum optimalnya keterkaitan antar sektor dan wilayah dalam pembangunan ekonomi	Pengembangan ekonomi yang belum berbasis kawasan	Belum optimalnya pengembangan pengembalaan umum ternak	Peternakan
			Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya	Perikanan
			Pengembangan sentra IKM dan pendidikan yang belum optimal	Industri
		Kegiatan ekonomi yang belum berdaya saing	Rendahnya jumlah IKM berdaya saing, unggul dan produktif	
			Daya saing UMKM masih rendah	Perdagangan dan UMKM
			Koperasi belum memiliki keunggulan kompetitif	Koperasi
			Belum optimalnya promosi pariwisata	Pariwisata
			Distribusi perdagangan dan nilai ekspor daerah masih belum optimal	Perdagangan dan UMKM
			Belum optimalnya fasilitas usaha, pembiayaan dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil	Kelautan dan Perikanan
			Belum optimalnya perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Tenaga kerja

d. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar

Permasalahan mengenai sarana dan prasarana infrastruktur Kabupaten Sukabumi yang masih belum optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi

dan pelayanan publik diidentifikasi dari pemetaan uraian masalah pembangunan infrastruktur, dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Pemetaan masalah berdasarkan kondisi infrastruktur Kabupaten Sukabumi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
1	Infrastruktur Pendukung aktivitas ekonomi	Sektor Primer	Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Pertanian
			Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian (alsintan)	
			Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana peternakan	Peternakan
			Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang belum memadai (kapasitas mesin)	Kelautan dan Perikanan
			Fasilitas sektor ESDM yang belum memadai	ESDM
		Sektor sekunder	Masih rendahnya IKM yang memanfaatkan teknologi digital baik dalam produksi maupun promosi dan pemasaran	Perindustrian
		Sektor tersier	Sarana dan prasarana perdagangan belum memadai	Perdagangan dan UMKM
			Belum optimalnya pembangunan destinasi pariwisata	Pariwisata
2	Infrastruktur pelayanan dasar	Sarana dan Prasarana Umum	Aksesibilitas menuju sarana pendidikan belum merata di seluruh wilayah	Pendidikan
			Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal	
			Sarana dan prasarana belum oprimal terutama di daerah terpencil	
			Aksesibilitas menuju sarana kesehatan masih rendah	Kesehatan
			Akses terhadap air bersih dan sarana sanitasi layak masih rendah	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
			Sarana dan prasarana keagamaan belum merata dan memadai	Agama
			Belum optimalnya pengelolaan sampah daerah	Lingkungan
			Sarana dan prasarana kebudayaan kurang memadai	Kebudayaan
			Infrastruktur desa kurang memadai	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal	Pemerintah Desa
			Masih terdapat desa yang belum termasuk dalam Cakupan lingkungan yang didukung PSU	Perumahan dan Permukiman
			Capaian luasan RTH masih rendah	
			Masih terdapat rumah yang tidak layak huni	
			Masih terdapat daerah kumuh yang belum tertangani	
			Rendahnya cakupan pelayanan sumber air minum layak dan sanitasi layak	
		Sarana dan prasarana kebencanaan dan ketertiban	Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih rendah	Trantibum
			Belum optimalnya fasilitas operasional untuk mendukung upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Linmas
		Infrastruktur Perhubungan	Belum mantapnya pelayanan jaringan jalan sebagai penghubung utama antar wilayah khususnya daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kota seperti ruas jalan yang menuju wilayah selatan	Pekerjaan Umum

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
			Belum mantapnya pelayanan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan/perkotaan utama	
			Masih terdapat lebar jalan yang tidak sesuai peraturan dan terjadinya penyempitan jalan	
			Masih rendahnya fasilitas penunjang dan jaringan jalan menuju objek wisata cenderung kecil dan rusak	
			Masih terdapat jembatan yang rusak	
			Pengembangan infrastruktur TIK bidang perhubungan belum memadai	Perhubungan
			Kurang optimalnya simpul jaringan transportasi dan parkir	
			Terjadinya pengelompokkan atau pemusatan fasilitas pada perkotaan sehingga timbul potensi daerah rawan kemacetan	
			Belum optimalnya pelayanan angkutan masal (angkutan umum) sehingga angka kendaraan pribadi cukup tinggi dibandingkan dengan angkutan umum	
			Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi belum memadai terutama rambu, marka, *guard rall* dan PJU	
			Masih banyak daerah rawan kecelakaan, rendahnya kesadaran terhadap keselamatan, tingginya pelanggaran angkutan umum	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
			penumpang dan barang, dan masih adanya kabupaten yang memiliki PKB tidak sesuai akreditasi minimal	
			Masih tingginya tingkat kemacetan lalu lintas di Kabupaten Sukabumi	
			Belum optimalnya rekayasa lalu lintas di Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten	
			Belum optimalnya sistem manajemen lalu lintas untuk mengurangi kepadatan lalu lintas	
			Belum optimalnya pelayanan angkutan orang dalam trayek maupun tidak dalam trayek	
			Belum optimalnya perencanaan dan sistem jaringan transportasi	
			kualitas jaringan telekomunikasi belum merata di seluruh wilayah di Kabupaten Sukabumi, sehingga masih terdapat 115 titik yang berstatus blank spot area	Komunikasi dan informatika
			Simpul transportasi berbasis perairan belum optimal	Perhubungan
			Navigasi dan fasilitas keselamatan pelayaran belum optimal	
			Fasilitas ASDP kurang memadai	

e. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik dan reformasi birokrasi

Permasalahan mengenai kinerja pemerintahan dalam reformasi birokasi dan pelayanan publik Kabupaten Sukabumi yang masih rendah diidentifikasi dari pemetaan uraian masalah di bidang pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Pemetaan masalah berdasarkan kondisi pemerintah Kabupaten Sukabumi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
1	Penguatan kualitas pelayanan publik	Kelengkapan Data	Data pertanian yang belum rapi	Pertanian
			Sistem database kelautan dan perikanan yang belum rapi dan terintegrasi	Kelautan dan Perikanan
			Data IKM yang belum diverifikasi dan belum terintegrasi dengan baik	Perindustrian
			Data yang berkaitan dengan UMKM belum terintegrasi	Perdagangan dan UMKM
			Belum optimalnya integrasi data ketenagakerjaan	Tenaga Kerja
			Belum tersedianya data potensi unggulan daerah untuk memperkuat daya tarik investasi	Penanaman modal
			Belum optimalnya implementasi RDTR	
			Kurangnya optimalisasi potensi ekonomi desa karena data komprehensif desa tidak memadai	Pemberdayaan masyarakat dan desa
			Terbatasnya ketersediaan data, informasi dan pemetaan wilayah terkait gangguan ketertiban umum	Linmas
			Belum optimalnya pengelolaan database penerima bantuan sosial dan pangan	Sosial
			Kualitas database penduduk belum optimal	Kependudukan dan pencatatan sipil
			Belum optimalnya penggunaan data spasial sebagai masukan	Pertanahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
			pengambilan kebijakan pertanahan	
			Data spasial masih tersebar disetiap sektor/OPD sesuai bidang tugasnya dan belum terstandardisasi	
			Belum adanya basis data dibidang pertanahan yang detil dan lengkap	
		Pelayanan Publik	Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan berbasis sistem informasi	Penanaman modal
			Pelayanan aparatur desa yang kurang memadai	Pemerintah desa
			Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau pelayanan kependudukan;	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase kepemilikan akta kelahiran mengalami penurunan	
			Sarana dan prasarana penunjang proses perekaman catatan kependudukan kurang memadai	
			Kualitas database penduduk yang belum optimal.	
2	Regulasi/ kelembagaan	Regulasi/ kelembagaan	Lemahnya pengawasan terhadap penegakan regulasi peternakan	Peternakan
			Belum adanya sinergi pengelolaan ekosistem kelautan perikanan	Kelautan dan perikanan
			Belum kuatnya regulasi pengelolaan IKM	Perindustrian
			Masih terdapatnya regulasi PMPTSP yang tumpang tindih	Penanaman modal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
			Potensi dan permasalahan desa belum diidentifikasi secara mendalam dan belum menjadi parameter dalam penyusunan rencana dan strategi	Pemberdayaan masyarakat
			Kurangnya sinergitas antara olahraga dan kebudayaan	Olahraga
			Minimnya regulasi yang mengatur tentang aspek linmas	Linmas
			Belum adanya peraturan daerah terkait kebudayaan	Kebudayaan
			masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan baik di tingkat daerah maupun di tingkat perangkat daerah	Penunjang Pemerintahan (Bidang Perencanaan)
			Belum optimalnya peningkatan sumber-sumber pendapatan dan penerimaan daerah	Penunjang Pemerintah (keuangan)
			Minimnya sinergitas antar OPD dalam rangka penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang mengandung sanksi	Penegakan perda
			Belum optimalnya perencanaan ruang wilayah	Penataan ruang
			Belum adanya mekanisme tersistem dan terstruktur dalam pengaturan, pengelolaan, penguasaan tanah atau ruang	Pertanahan
			Belum adanya kajian skala prioritas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan masih bersifat sektoral	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
			Belum tertibnya penguasaan dan peruntukkan tanah Pemda	
3	Akuntabilitas kerja	Program yang belum optimal	Lemahnya pengawasan terhadap penegakan regulasi peternakan	Peternakan
			Jaringan distribusi dan aksesibilitas pangan belum merata (analisis akses pangan seperti nasional)	Ketahanan pangan
			Kurangnya sinergi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan	
			Belum kuatnya regulasi pengembangan pariwisata	Pariwisata
			Belum optimalnya pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan serta hubungan industrial	Tenaga Kerja
			Masih lemahnya sinergitas antar sektor dalam mendukung investasi daerah	Penanaman modal
			Akreditasi penyelenggara PAUD masih sedikit	Pendidikan
			Akses pemerataan program KB terkendala luas wilayah	Pengendalian penduduk dan KB
			Belum optimalnya program penciptaan kemandirian ekonomi untuk perempuan	Pemberdayaan perempuan dan anak
			Kurangnya edukasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penciptaan lingkungan dan perilaku yang sehat guna mencegah potensi timbulnya penyakit	Kesehatan
			Capaian pelayanan kepada penduduk miskin masih rendah	
			Pelayanan BPJS belum optimal	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
			Kurangnya anggaran yang memadai dalam membangun sarana dan prasarana serta pembinaan prestasi olahraga	Olahraga
			Belum optimalnya kurikulum yang menerapkan kearifan lokal di sekolah	Kebudayaan
			Belum optimalnya sinergitas antara program kebudayaan dan kepariwisataan	
			Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Penunjang Pemerintahan (Bidang keuangan)
			Belum optimalnya penyerapan anggaran pembangunan	
			Belum optimalnya proses sosialisasi Perda yang mengatur urusan sanksi terhadap pelanggaran tertentu	Penegakan Perda
			Mengekspresikan keteladanan dalam konsepsi dan praktek nilai-nilai kebangsaan yang ditunjukkan kepala daerah dan aparatur pemerintah	Ideologi, politik dan pengawasan dini
			Belum optimalnya pembinaan dan evaluasi keberadaan ormas dan OKP untuk mengantisipasi potensi konflik horizontal	
			Belum optimalnya proses edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu yang aman dan jujur	
			Persentase keterisian data SIPD dimana ditargetkan terisi 70	Statistika

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
			persen ternyata tidak terealisasi	
			Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Penataan ruang
4	Penataan Sistem Manajemen SDM	SDM Aparatur	Kompetensi dan sertifikasi petugas pelayanan KB masih rendah	Pengendalian penduduk
			Masih rendahnya peran dan kewenangan aparatur desa dalam mendukung percepatan pembangunan di pedesaan	Pemerintah desa
			Kesenjangan kompetensi antar ASN yang masih tinggi	Penunjang Pemerintahan (Bidang Kepegawaian dan Diklat)
			Indeks profesionalitas ASN masih rendah	
			Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pelatihan aparatur belum optimal	
			Proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi ASN kurang optimal	

4.2.8 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan permasalahan pembangunan, telaahan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, isu strategis nasional tahun 2020-2024, isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dinamika internasional, kebijakan RTRW Kabupaten Sukabumi, dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yaitu: (1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; (2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Permasalahan Sosial, dan Ketahanan Bencana; (3) Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah; (4) Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Pendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan (5) Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Secara umum lima isu strategis diuraikan sebagai berikut:

A. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Struktur penduduk Kabupaten Sukabumi dengan proporsi usia produktif yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya, mengharuskan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat Kabupaten Sukabumi mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Proporsi usia produktif hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 65,83 persen, dengan angka ketergantungan usia muda dan usia tua yang rendah. Hal tersebut menunjukkan Kabupaten Sukabumi telah mengalami fase transisi demografi dan puncak dari fase ini terjadi pada rentang tahun 2020-2030 yang lazim dikenal sebagai bonus demografi. Bonus demografi dapat dikatakan sebagai bonus apabila dapat dipenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dan daya saing di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. Kabupaten Sukabumi masih memiliki tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Indikator

untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia biasanya menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, dimana pada tahun 2019 dan 2020 tingkat IPM Kabupaten Sukabumi berada di posisi empat terbawah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

IPM daerah yang belum optimal dipengaruhi oleh masih rendahnya komponen pendidikan dan kesehatan penduduk Kabupaten Sukabumi. Angka Rata- rata Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi berada pada posisi 5 terbawah di Jawa Barat pada tahun 2019 dan 2020. Rata-rata penduduk Kabupaten Sukabumi menamatkan sekolahnya hingga kelas satu Sekolah Menengah Pertama. Selain permasalahan pada komponen pendidikan, terdapat permasalahan pada komponen kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Tingginya jumlah Angka Kematian Ibu, menandakan masih rendahnya pelayanan dasar kesehatan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, kesadaran masyarakat Kabupaten Sukabumi terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang masih rendah. Di samping itu, pada tahun 2020 adanya penyebaran pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, dan salah satunya menyerang sektor kesehatan masyarakat.

Kualitas kesehatan dan pendidikan penduduk Kabupaten Sukabumi yang belum optimal berpengaruh kepada produktivitas, pola hidup masyarakat, kualitas, dan pengambilan keputusan dalam pekerjaan. Terdapat tenaga kerja yang masih memiliki keterampilan yang rendah di setiap sektor lapangan usaha, sehingga berakibat pada rendahnya produktivitas lapangan usaha tersebut. Pada tahun 2019 tenaga kerja yang terdaftar di Kabupaten Sukabumi sebagian besar merupakan lulusan SMA sebanyak 70,64 persen, dan sebanyak 18,24 persen tenaga kerja merupakan lulusan SMP.

Peran pemuda dan olahraga juga menjadi perhatian dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk dalam

proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Kreativitas dalam segala bidang dapat menjadi pelopor terbentuknya prestasi dan inovasi. Terdapat beberapa permasalahan terkait peran pemuda dan olahraga yaitu belum optimalnya peran kelembagaan pemuda, minimnya prestasi olahraga baik di kancah nasional maupun internasional, serta sarana prasarana yang kurang memadai untuk pembinaan prestasi olahraga, dan kreativitas pemuda. Tantangan lain yang dihadapi daerah yaitu ketimpangan pembangunan manusia berdasarkan gender, indeks ketimpangan gender Kabupaten Sukabumi masih menunjukkan status ketimpangan yang tinggi. Komponen penyusunnya yaitu partisipasi angkatan kerja perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan pendidikan yang ditempuh antara penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan *gap* nilai yang cukup tinggi.

B. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Permasalahan Sosial, dan Ketahanan Bencana

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana manusia dalam keadaan makmur, sehat, damai, dan diikuti dengan rasa keselamatan. Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi kesejahteraan pemerataan ekonomi, permasalahan sosial merujuk pada kesejahteraan masyarakat secara sosial, dan ketahanan bencana merujuk pada kesejahteraan masyarakat yang memiliki rasa keselamatan. Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Pada tahun 2016 penduduk miskin Kabupaten Sukabumi mencapai 8,13 persen, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 6,22 persen.

Angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi menunjukkan penurunan yang signifikan setiap tahunnya, dimana angka tersebut sudah melampaui target dan lebih rendah dari angka kemiskinan rata-rata Jawa Barat dan Nasional. Namun, pada tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten

Sukabumi mengalami peningkatan, sebagai dampak dari penyebaran pandemi Covid-19. Apabila diidentifikasi dari tingkat garis kemiskinan dan pola pengeluaran masyarakat, garis kemiskinan Kabupaten Sukabumi berada di posisi bawah dari rata-rata Jawa Barat. Pola pengeluaran masyarakat menurut kelompok makanan dan bukan makanan, masih didominasi oleh kelompok makanan pokok dengan rasio peningkatan untuk konsumsi makanan lebih besar dibandingkan untuk kelompok bukan makanan. Asumsi terhadap fenomena tersebut adalah apabila pengeluaran konsumsi semakin tinggi untuk non makanan/pangan berupa komoditas sekunder dan/ tersier, maka kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Penentuan garis kemiskinan yang rendah, menyebabkan tingkat kemiskinan, kedalaman, dan keparahan kemiskinan Kabupaten Sukabumi pada level yang rendah, dan berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat. Namun, hal tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Sukabumi yang rendah, dengan angka penduduk rentan miskin di Kabupaten Sukabumi yang tinggi. Tingginya angka penduduk rentan miskin dibuktikan dengan tingginya persentase penduduk yang memiliki pengeluaran dengan kategori rendah, mendekati garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan dan masalah sosial merupakan permasalahan yang saling bersinggungan, dan memiliki hubungan sebab akibat. Sumber permasalahan sosial dapat disebabkan oleh bencana sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Bencana sosial kemasyarakatan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi diantaranya kasus sosial dan kriminalitas. Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh pada tingginya kasus sosial dan kasus kriminalitas. Kasus kriminalitas dengan intensitas permasalahan yang tinggi yaitu diantaranya kasus pembunuhan, pembakaran, penipuan, pencurian dengan kekerasan, pencurian, bunuh diri, lokasi anak jalanan, dan penyandang cacat.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Sukabumi secara umum mengalami penurunan dari 1.612.835 orang pada tahun

tahun 2019 menjadi 1.558.220 orang pada tahun 2020. Jumlah total PPKS tersebut didominasi oleh fakir miskin yaitu sebanyak 1.469.898 orang pada tahun 2020. Permasalahan PPKS secara umum disebabkan karena masih kurangnya pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, pengelolaan *database* penerima bantuan sosial dan pangan yang tidak tepat sasaran, tingginya penyandang disabilitas, tuna sosial, anak dengan kasus hukum, belum optimalnya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kasus pernikahan anak, serta belum optimalnya program penciptaan kemandirian ekonomi untuk perempuan dan kesetaraan gender.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di kategorikan sebagai bencana non-alam, yang berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Salah satu upaya untuk mencegah penyebaran pandemi yaitu membatasi interaksi, pembatasan aktivitas sosial, hingga menurunnya aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat, akibat terganggunya pola mata pencaharian masyarakat. Hingga pada tahun 2020, tingkat kemiskinan daerah, nasional, dan global mengalami peningkatan dengan menurunnya pendapatan masyarakat.

Sumber permasalahan sosial dapat terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Permasalahan sosial lainnya yang muncul dapat bersumber dari rentannya ketahanan bencana suatu daerah. Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat kerawanan terhadap terjadinya bencana yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya intensitas jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2020, total kejadian bencana mencapai 470 kejadian dengan jumlah korban sebanyak 5.482 jiwa. Jenis bencana yang terjadi diantaranya kekeringan, kebakaran, pergerakan tanah, gempa bumi, angin kencang, banjir, dan longsor. Kondisi tersebut menuntut pemerintahan daerah dan masyarakat Kabupaten Sukabumi agar mampu melakukan tindakan kesiapsiagaan, baik saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

C. Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah

Salah satu titik tolak pembangunan daerah yaitu dengan mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi mengalami perubahan yang fluktuatif pada rentang tahun 2016 hingga tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi sempat mengalami perlambatan, dan penguatan kembali pada rentang tahun tersebut, namun cenderung stabil hingga tahun 2019. Kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perekonomian mengakibatkan sebanyak 14 lapangan usaha mengalami penurunan nilai dan pelambatan pertumbuhan. Kontraksi tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan, dan jasa perusahaan.

Struktur perekonomian Kabupaten Sukabumi didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; dan perdagangan. Kontribusi sektor pertanian Kabupaten Sukabumi terhadap perekonomian daerah cenderung mengalami penurunan selama sepuluh tahun terakhir. Secara nilai besarannya selalu meningkat, namun laju pertumbuhan sektor pertanian terus mengalami perubahan yang fluktuatif dan cenderung tidak stabil.

Sektor manufaktur dengan kontribusi yang tinggi yaitu lapangan usaha industri pengolahan yang meningkat setiap tahunnya. Namun, laju pertumbuhan perekonomian dari sektor tersebut tumbuh secara fluktuatif. Sektor industri manufaktur berpotensi paling besar untuk mendorong pembangunan ekonomi, akan tetapi memiliki pertumbuhan yang tidak stabil, dikarenakan belum optimalnya pengembangan kawasan industri, dan masih rendahnya keunggulan yang dimiliki.

Apabila ditinjau dari sektor tersier yaitu sektor jasa salah satunya pariwisata dan jasa keuangan, kontribusi dari sektor tersebut masih sangat rendah bagi perekonomian Kabupaten Sukabumi. Sektor pariwisata Kabupaten Sukabumi yang menjadi salah satu sektor unggulan, masih memiliki

kontribusi dan penerimaan daerah yang rendah. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya promosi dan *branding* pariwisata, serta belum optimalnya pembangunan atraksi destinasi wisata, dan sebagian besar wisatawan yang berkunjung tidak menginap sehingga tidak meningkatkan nilai tambah bagi sektor pendukung pariwisata.

Permasalahan yang dihadapi dalam sektor primer yaitu nilai tambah dan produktivitas dari pelaku usaha pertanian yang masih rendah, aktivitas ekonomi pertanian dari hulu hingga hilir belum terintegrasi, pelaksanaan pengembangan sektor peternakan dan perikanan yang belum optimal, ketidakpastian cuaca, musim, dan hama, rendahnya regenerasi petani, dan tingginya alih fungsi lahan sehingga menurunnya luas lahan pertanian dan menyebabkan rendahnya penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani. Alih fungsi lahan terjadi dari lahan pertanian dan perkebunan menjadi permukiman, peningkatan infrastruktur, maupun aktivitas penunjang ekonomi lainnya. Hal tersebut dikarenakan lahan pertanian yang tidak dilindungi, sehingga beralih fungsi menjadi peruntukan lain. Pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka pemerataan infrastruktur dan ekonomi haruslah memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memiliki tantangan degradasi dan deplesi sumber daya alam, air, dan keanekaragaman hayati. Selain tingginya alih fungsi lahan, permasalahan lingkungan lainnya yaitu belum optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup daerah, luasan Ruang Terbuka Hijau yang kecil, dan jumlah timbulan sampah yang meningkat. Isu alih fungsi lahan turut menyumbang pada penurunan nilai indeks tutupan lahan. Hal tersebut banyak berpengaruh pada penurunan lahan pertanian, pengelolaan sumber daya pangan, dan menyebabkan kelangkaan sumber daya alam. Komponen kualitas lingkungan hidup lainnya yang belum optimal dan belum mencapai target daerah yaitu indeks kualitas air. Selain itu, kualitas udara Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi.

Pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya menghadapi tantangan mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan, keterbatasan infrastruktur, ketersediaan lahan, penataan ruang, dan kesejahteraan pelaku usaha yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk pemerataan pembangunan, tanpa harus mengganggu ekosistem dan sumber mata pencarian masyarakat. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya secara lestari untuk memproduksi barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta ditunjang dengan daya dukung sumber daya kelembagaan, sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

D. Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Pendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi pendukung dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Fokus utama infrastruktur di Kabupaten Sukabumi yaitu infrastruktur penunjang pelayanan dasar, dan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi. Pembangunan fokus utama infrastruktur tersebut ditopang oleh pelaksanaan transformasi digital, dan ketahanan bencana. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur disusun dan dilaksanakan secara lintas sektor untuk menciptakan pembangunan sarana dan prasarana yang merata.

Infrastruktur pelayanan dasar yaitu sarana dan prasarana penunjang pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, permukiman, pekerjaan umum, dan penataan ruang. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan Kabupaten Sukabumi masih mengalami ketimpangan antar wilayah, dan masih rendahnya aksesibilitas atau cakupan luas wilayah pelayanan sekolah dan layanan kesehatan. Semakin tinggi cakupan luas wilayah pelayanan sekolah dan kesehatan, maka semakin rendahnya aksesibilitas masyarakat untuk menjangkau sarana tersebut. Selain itu, masih terdapat sarana dan

prasarana yang belum optimal dalam menunjang kegiatan pendidikan yaitu ruang kelas masih dalam kondisi rusak dan tidak layak. Permasalahan sarana dan prasarana yang berpengaruh pada kesehatan yaitu masih belum optimalnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi yang layak.

Belum optimalnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, identik dengan lingkungan atau kawasan tempat tinggal penduduk yang kumuh. Kawasan kumuh di Kabupaten Sukabumi tersebar di beberapa Ibu Kota Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Permasalahan utama kawasan kumuh yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh termasuk pendanaan dan gerakan masyarakat. Hingga saat ini, masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani, dan masih terdapat rumah yang tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni tersebar cenderung merata baik di daerah pusat kota maupun daerah yang jauh dari perkotaan.

Jalan penghubung antar wilayah khususnya daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kota masih belum optimal, bahkan masih terdapat jalan dengan kondisi rusak berat, dan jembatan dalam kondisi rusak. Sebagian besar jalan sudah beraspal, namun jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat masih tinggi, dan belum mantapnya pelayanan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan/kawasan perkotaan. Adanya pengelompokan atau pemusatan fasilitas dan kegiatan di kawasan perkotaan, menimbulkan potensi daerah-daerah rawan kemacetan. Masalah lain yang mengakibatkan kemacetan yaitu, belum optimalnya pelayanan dan sistem angkutan umum, simpul jaringan transportasi dan tempat parkir yang belum terkendali, serta rekayasa lalu lintas jalan yang belum optimal.

Pengembangan infrastruktur fasilitas publik dan transportasi belum terintegrasi dengan aspek tata guna lahan dan tata ruang wilayah. Pembangunan infrastruktur harus merata dan terintegrasi, serta diarahkan untuk mewujudkan konektivitas antar daerah baik secara fisik maupun non-

fisik yang memenuhi layanan dasar bagi masyarakat, dan mendukung aktivitas perekonomian. Infrastruktur pendukung ekonomi merupakan infrastruktur yang mendukung aktivitas perekonomian baik sektor primer, sekunder, maupun tersier.

Pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas sektor pertanian, peternakan, dan kelautan yang mendukung dalam pembangunan ekonomi masih belum optimal. Pembangunan infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi masih rendah secara kualitas dan kuantitas. Pemanfaatan jaringan irigasi yang telah ada terkendala oleh rendahnya pemeliharaan kinerja operasional, pemeliharaan sistem irigasi dan tingkat keamanan, sehingga fungsi irigasi mengalami penurunan bahkan mengalami kerusakan. Jaringan irigasi dalam kondisi tidak berfungsi dengan baik mencapai hampir setengah dari jumlah yang ada. Selain itu, terdapat permasalahan dalam kelembagaan P3A, terutama dalam pemahaman terhadap tugas dan fungsi P3A dalam pengelolaan irigasi masih lemah. Kaderisasi anggota P3A masih belum optimal, yang mengurangi daya dukung terhadap era globalisasi dan IT dalam pengelolaan irigasi. Selain itu, belum optimalnya kinerja Komisi Irigasi (Bappeda, PU, Pertanian, P3A/GP3A) yang disebabkan koordinasi antar lembaga terkait di unsur Komir belum Optimal. Kondisi tersebut tentunya dapat memengaruhi produktivitas pangan daerah, sebagai lumbung padi nasional jika tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

Kawasan prioritas Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), kawasan industri, kawasan perkotaan, dan kawasan wisata yang belum berkembang, dikarenakan rencana pembangunan daerah belum mengacu pada RTRW dan adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW. Kegiatan pembangunan baik aktivitas ekonomi dan permukiman cenderung terpusat di daerah yang sudah berkembang, dan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut menyebabkan pembangunan yang tidak merata dan kurang memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerataan pembangunan infrastruktur perlu adanya dukungan dan koordinasi antar sektor, sehingga

mampu menciptakan dan mengembangkan pusat aktivitas pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan unggulan produk pertanian, kawasan industri, dan kawasan unggulan pariwisata.

Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Sukabumi berpotensi terhadap terjadinya bencana alam yang tinggi. Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, indeks risiko bencana Kabupaten Sukabumi termasuk kedalam kategori risiko bencana yang tinggi, dan masuk kedalam wilayah zona merah. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur baik pendukung pelayanan dasar, dan penunjang ekonomi yang memperhatikan potensi bencana.

E. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan membutuhkan kelembagaan atau tata kelola pemerintahan dan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, agar tercapai perencanaan dan pembangunan yang di cita-citakan. Aparatur pemerintahan memiliki peran yang strategis dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkualitas diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Kualitas sumber daya aparatur pemerintahan sangat penting dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aparatur yang profesional, berintegrasi, kreatif, inovatif, dan netral merupakan prasyarat agar dapat terwujud birokrasi yang berkinerja tinggi. Data evaluasi terhadap reformasi birokasi Kabupaten Sukabumi menunjukkan nilai akuntabilitas kinerja aparatur Kabupaten Sukabumi meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Evaluasi menunjukkan profesionalitas ASN Kabupaten Sukabumi masih sangat rendah, mencapai 59 poin dari skala 100 poin. Berdasarkan hasil survei terhadap pegawai pemerintahan Kabupaten Sukabumi atas integritas jabatan, menunjukkan kurang dari sepuluh persen pegawai pemerintah Kabupaten Sukabumi

telah memahami kinerja, ukuran, dan kontribusi terhadap organisasi. Hal tersebut menunjukkan, masih rendahnya pengetahuan aparat terhadap indikator keberhasilan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang muncul berkenaan dengan sumber daya aparatur yaitu proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi ASN pada bidang penunjang pemerintahan yang kurang optimal.

Berdasarkan evaluasi reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik Kabupaten Sukabumi menunjukkan pencapaian sebesar 8,93 poin dari bobot sebesar 10,00 poin pada tahun 2020. Angka tersebut menunjukkan, masih terdapat *gap* antara realitas kondisi layanan dan harapan kualitas pelayanan publik yang harus dilaksanakan. Peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pada Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi yang terkait langsung dalam hal pelayanan masyarakat belum optimal, sistem kompensasi kepada penerima layanan dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh.

Permasalahan lainnya yang terjadi yaitu pada bidang kelembagaan dan pelaksanaan regulasi. Beberapa permasalahan tersebut yaitu masih lemahnya pengawasan terhadap penegakan regulasi, kurangnya sinergi antar perangkat daerah dalam penataan, pelaksanaan, dan sinkronisasi regulasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum optimal dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Program yang tidak berjalan dengan optimal disebabkan oleh belum kuatnya regulasi dan rendahnya sinergitas antar sektor dalam mendukung program ataupun kegiatan, rendahnya perhatian terhadap pengembangan dan pelaksanaan program, belum optimalnya pengelolaan keuangan, serta rencana dan penyerapan anggaran yang rendah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pengelolaan *database*, dokumen, dan administrasi yang masih terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas. Regulasi yang disharmoni dan inkonsisten serta tumpang tindih, karena

belum optimalnya koordinasi dan integrasi antar perangkat daerah atau pemangku kebijakan, yang menyebabkan program dan kegiatan belum terlaksana secara optimal. Permasalahan lainnya yaitu, belum optimalnya kualitas pelayanan publik, sarana prasarana penunjang pelayanan, belum optimalnya pengelolaan keuangan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih lebih banyak dilakukan pada tingkat Pemerintahan Kabupaten Sukabumi, sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah belum sepenuhnya berjalan optimal jika dibandingkan dengan tingkat Pemerintah Daerah. Masih belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik daerah salah satunya disebabkan oleh wilayah administrasi Kabupaten Sukabumi yang luas, sehingga cakupan pelayanan publik pemerintah daerah juga cukup luas. Pemekaran kabupaten menjadi Kabupaten Sukabumi Selatan dan Kabupaten Sukabumi Utara menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Perkembangan penyebaran Pandemi Covid-19 yang tinggi, mengakibatkan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya pemulihan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu pemangkasan (*refocusing*) APBD dan berpengaruh pada berkurangnya pendapatan daerah, dan pengurangan belanja, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan karena adanya pemangkasan anggaran untuk pemulihan dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut berpengaruh pada proyeksi pendapatan tahun-tahun selanjutnya. Kondisi pendapatan daerah yang menurun, berdampak pada belanja daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan daerah kurang optimal, karena harus mendanai kegiatan-kegiatan rangka pemulihan kesehatan, sosial, dan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Berdasarkan evaluasi APBD Kabupaten Sukabumi terhadap kemampuan keuangan daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2020 menunjukkan proporsi PAD dalam komponen pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang *fluktuatif,* namun cenderung menurun. Komponen PAD dari total pendapatan daerah memiliki proporsi yang paling sedikit dibandingkan dengan komponen pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi PAD merupakan salah satu ukuran untuk mengidentifikasi derajat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Menurunnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah, dan tingkat ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Sukabumi terhadap bantuan dana pusat dan/ provinsi semakin tinggi.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Pernyataan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 merupakan manifestasi cita-cita dari mimpi kepala daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi. Visi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dijadikan petunjuk arah bagi pembangunan daerah sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin"

Pernyataan visi Kabupaten Sukabumi di atas memiliki makna sebagai berikut:

5.1.1 Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif

Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.

5.1.2 Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

5.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum atas usaha-usaha yang akan ditempuh dalam mewujudkan pernyataan visi. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, yaitu:

1) Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing,
2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan,
3) Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah,
4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

5.2.1 Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing

Sejatinya, manusia memegang peran dan menjadi motor penggerak semua komponen yang ada di dunia, sehingga manusia adalah ujung tombak dalam pengelolaan sumberdaya alam secara keseluruhan. Untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, maka perlu dilakukan perubahan ke arah yang positif dengan membangun sumberdaya manusia yang handal dalam hal ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa/Allah SWT, norma sosial dan budaya lokal serta mampu mencari strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Sumber daya manusia berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sumberdaya lainnya demi pencapaian visi yang maksimal.

5.2.2 Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

SDM yang handal dan berdaya saing diharapkan mampu mendongkrak produktivitas dan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi unggulan daerah khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, namun tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang saat ini paling optimal memberikan dampak turunan positif di berbagai aspek yang ujungnya pada pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dengan penekanan pada agrobisnis dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini akan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

5.2.3 Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah

Pembangunan sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dipercepat jika akses penghubung antar wilayah terbangun dengan baik. Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topografi yang sangat beragam, menjadi tantangan dalam peningkatan konektivitas. Konektivitas wilayah ini tidak hanya terkait infrastruktur jalan, namun juga teknologi. Pembangunan infrastruktur baik *hardware* (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) maupun *software* (teknologi informasi dan komunikasi) akan membuka konektivitas antar wilayah di daerah. Konektivitas yang mudah dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing usaha dan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi baru. Kerja sama antar wilayah juga akan menjadi mudah, sehingga pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan.

5.2.4 Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel

Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih

diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, inovatif, sejahtera lahir batin diperlukan adanya reformasi birokrasi di tataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan *good governance*, sedangkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan *clean government*. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mampu membaca kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan dunia dengan mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (*e-government*).

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran *impact* pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi. Melalui misi organisasi kita dapat mengetahui untuk tujuan apa organisasi itu didirikan dan mengapa organisasi itu ada.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan didukung oleh data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya dalam dokumen RPJMD ini. Tujuan dan sasaran merupakan buah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga dapat menjembatani antara strategi dan arah kebijakan yang diambil selama periode RPJMD yang telah disesuaikan dengan dokumen

perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan dan sekaligus sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 memiliki indikator kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound*) untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Dalam jangka panjang sasaran pembangunan daerah keberhasilannya dilihat dari capaian indikator makro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini sebagaimana Tabel 5.1. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak *(Impact*) dimana keberhasilan maupun kegagalan pencapaiannya ditentukan oleh pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat sektoral, regional dan nasional, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu kerja sama vertikal pusat ke daerah, serta kerja sama horizontal yang melibatkan perangkat-perangkat daerah yang didukung dengan kerja sama antar para pemangku kepentingan.

Tabel 5.1 Penetapan Indikator Makro Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,88	66,89	67,60	67,99	68,39	68,78	69,17	69,17
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,26	1,24	1,21	1,19	1,17	1,15	1,13	1,13
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,09	7,06	6,91	6,75	6,60	6,45	6,29	6,29
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,60	9,5 - 11,5	9 - 11	8,75 - 10,75	8,5 - 10,5	8,25 - 10,25	8 - 10	8 - 10
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	- 1,08	1,23-2,23	2,30-3,30	3,61-4,36	4,75-5,42	4,89-5,49	5,05-5,55	5,05-5,55
6	Pendapatan Per Kapita	Rp (1.000) / kapita	27.281	27.300-27.545	27.548-27.797	27.879-28.080	28.187-28.386	28.262-28.457	28.347 - 28.530	28.347-28.530
7	Indeks Gini	Poin	0,334	0,360-0,340	0,358-0,338	0,356-0,336	0,332	0,327	0,321	0,321

Hasil perumusan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tunjukkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator pembangunan jangka Menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN										
Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.										
T1: Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius.		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)**	**66,88**	**66,89**	**67,60**	**67,99**	**68,39**	**68,78**	**69,17**	**69,17**
	SS1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	69,10	73,70	74,50	75,20	76,00	76,00	77,80	77,80
	SS2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup (AHH) (Tahun)	70,97	71,08	71,26	71,45	71,63	71,81	72,00	72,00
		Angka kematian ibu (Per 100.000 KH)	85,22	85,00	84,00	83,00	82,00	81,00	80,00	80,00
		Angka kematian bayi (Per 1000 KH)	4,75	4,30	4,25	4,20	4,15	4,10	4,00	4,00
	SS3. Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	87,37	87,40	87,64	87,78	87,92	88,06	88,20	88,20

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
	SS4. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	7,07	7,21	7,32	7,43	7,55	7,66	7,77	7,77
		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,33	12,33	12,38	12,42	12,47	12,51	12,56	12,56
	SS5. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (Persen)	7,09	7,06	6,91	6,75	6,60	6,45	6,29	6,29
	SS6. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase pemajuan kebudayaan (Persen)	N/A	19,56	20,48	21,55	22,61	23,68	24,74	24,74
	SS7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	9,60	9,5 - 11,5	9 – 11	8,75 - 10,75	8,5 -10,5	8,25 - 10,25	8 - 10	8 - 10
Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan.										
T2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan		**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)**	-1,08	1,23-2,23	2,30-3,30	3,61-4,36	4,75-5,42	4,89-5,49	5,05-5,55	5,05-5,55

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
pariwisata berkelanjutan.										
	SS8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kelautan dan Perikanan (Persen)	1,05	1,93	2,33	2,73	3,13	3,53	3,92	3,92
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	84,60	84,60	85,10	85,60	86,10	86,60	87,10	87,10
	SS9. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata (Persen)	-4,58	-3	(-1) – 0,5	0,5 - 1	1 - 2	2- 3	3 - 4	3 - 4
	SS10. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata (Persen)	N/A	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	4,5

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
	SS11. Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas (Persen)	N/A	0,90	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	13,4
	SS12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (Poin)	62,11	62,77	66,85	67,41	68,11	68,79	69,47	69,47
Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.										
T3: Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas.		**Indeks kepuasan layanan infrastruktur (Poin)**	**NA**	**2,50**	**2,60**	**2,70**	**2,80**	**2,90**	**3,00**	**3,00**
	SS13. Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah (Persen)	70,21	70,21	76,17	82,12	88,08	94,04	100,00	100,00
	SS14. Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten (Persen)	71,42	71,42	63,53	67,53	71,53	75,53	79,53	79,53

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (Persen)	59,28	59,28	50,80	52,80	54,80	56,80	58,80	58,80
	SS15. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata (Persen)	8,81	13,15	17,49	21,83	26,17	30,51	34,85	34,85
	SS16. Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten (Persen)	43	43	43	51	60	67	75	75
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.										
T4: Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani (T4)		**Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)**	**61,11**	**62,00**	**63,00**	**64,00**	**65,00**	**66,00**	**66,00**	**66,00**
	SS17. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang	indeks kepuasan masyarakat (IKM) (Poin)	85,79	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	88,50

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
	profesional dan akuntabel									
		Indeks profesionalitas ASN (Poin)	51,01	51,01	60,20	66,40	71,40	74,90	77,50	77,50
		Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai akuntabilitas kinerja daerah (Poin)	64,48	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	76,00
	SS18. Meningkatnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah (Poin)	NA	56,00	57,50	58,50	59,00	59,50	60	60

Metodologi yang tergambar pada Gambar 5.1 merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara sasaran-sasaran strategis yang diadaptasi dari metodologi *balanced scorecard* dimana semua sasaran saling terkait untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) perspektif yakni perspektif masyarakat, perspektif internal proses, dan perspektif pengembangan.

a. Perspektif masyarakat

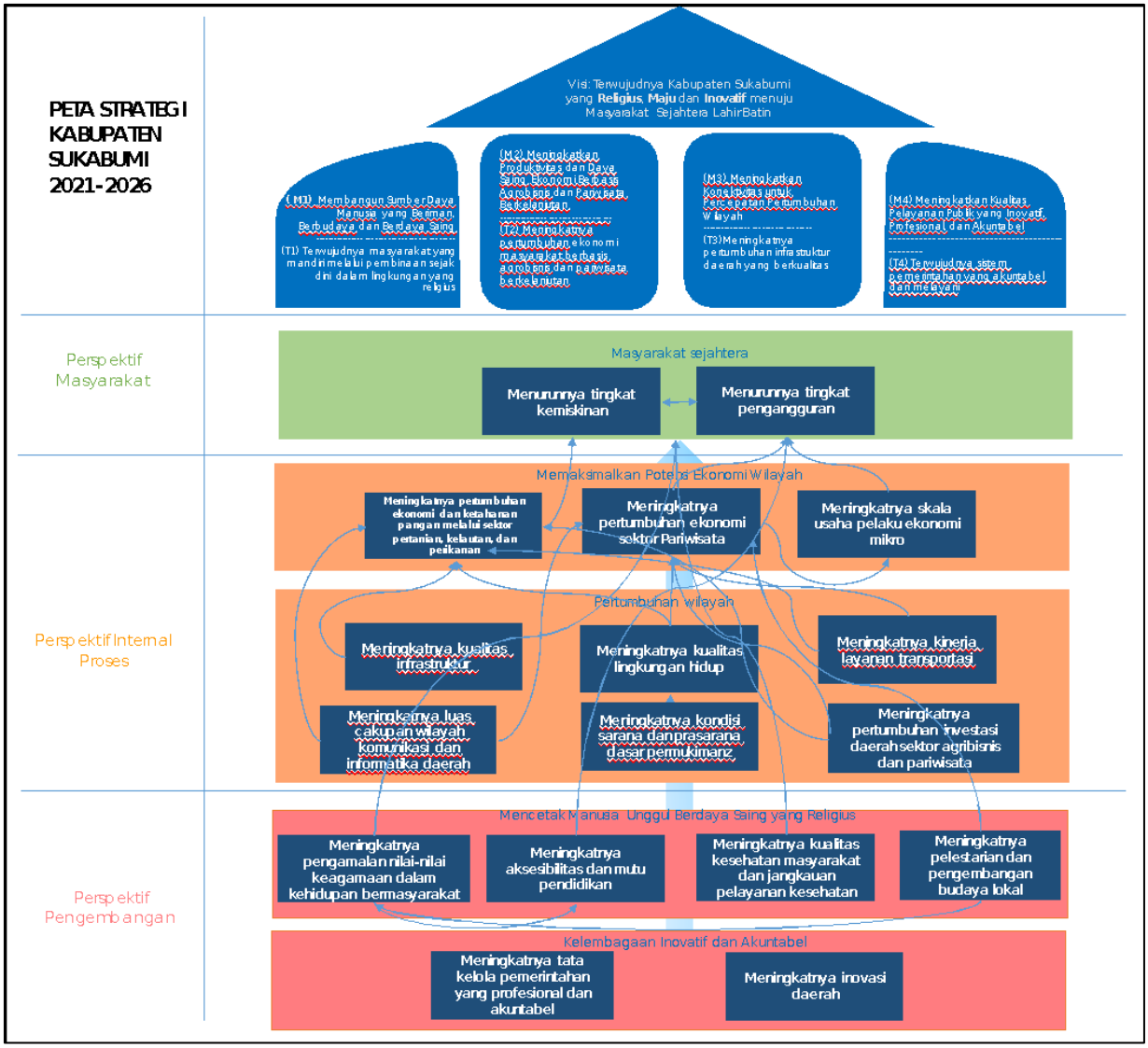
   Sudut pandang ini menjabarkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, dengan sasaran di dalamnya terkait erat terhadap definisi masyarakat sejahtera pada pernyataan visi dan misi.

b. Perspektif internal proses

   Sudut pandang ini menjabarkan proses internal yang harus diunggulkan Kabupaten Sukabumi dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi unggulan daerah diharapkan dapat digali semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat melalui perangkat daerah dari berbagai sektor yang saling bersinergi.

c. Perspektif pengembangan

   Sudut pandang ini menjabarkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan. Fokus pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah kesejahteraan yang distimulasi oleh pengembangan lembaga, manusia, dan inovasi.



Gambar 5.1 Peta Strategi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021- 2026

Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Jawa Barat 2018-2023, dan sasaran pembangunan RPJMN tahun 2020-2024. Secara rinci keterkaitan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Keterkaitan sasaran RPJMN, RPJMD Jawa Barat, dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	S9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata
		S18	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	S11	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S19	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	S10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata
				S7	Menurunnya tingkat pengangguran
		S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S14	Meningkatnya kualitas infrastruktur
				S16	Meningkatnya kinerja layanan transportasi
S3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera	S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	S8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan
		S11	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	S5	Menurunnya tingkat kemiskinan
		S12	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S4	Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak	S3	Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
S5	Meningkatnya perlindungan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S5	Menurunnya tingkat kemiskinan

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi	
	sosial bagi seluruh penduduk				
S6	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan	S3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	S2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
		S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	S3	Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak
		S6	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat Nasional	S3	Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak
S8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S5	Menurunnya tingkat kemiskinan
		S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	S8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan
S9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
		S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S6	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembanguna	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S6	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S1	Meningkatnya pengamalan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S1	Meningkatnya pengamalan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam	S1	Meningkatnya pengamalan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi	
	memperkukuh karakter bangsa		kerangka demokrasi		
		S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	S3	Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S14	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik	S14	Meningkatnya kualitas infrastruktur
				S15	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S17	Meningkatnya konektivitas wilayah	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusatpusat perekonomian	S16	Meningkatnya kinerja layanan transportasi
S18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusatpusat perekonomian	S16	Meningkatnya kinerja layanan transportasi
S19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	S9	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	S15	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
S20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
				S13	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah
S21	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi	
S22	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	S15	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	S15	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S23	Pembangunan rendah karbon	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S24	Menguatnya stabilitas polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik	S8	Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
		S21	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
				S18	Meningkatnya inovasi daerah

5.4 Prioritas Pembangunan Daerah 2021-2026

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan visi dan misi. Prioritas pembangunan tersebut tersaji pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi 2021-2026

Prioritas Pembangunan	
SDM	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan
Ekonomi	Pengembangan Komoditas Unggulan melalui Hilirisasi dan Perluasan Akses Pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah
	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan
Sosial	Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial
Infrastruktur	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah
Pemerintahan	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan ini akan dielaborasi melalui program-program unggulan yang akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam proyek strategis yang akan disajikan pada Bab VI RPJMD ini. Prioritas pembangunan di atas menjadi fokus utama dalam pencapaian sasaran strategis, tujuan daerah, visi daerah, hingga misi daerah. Keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan, sasaran strategis, tujuan daerah, misi daerah, dan visi daerah dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi

Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan
Visi	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin	
Misi 1:	Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing	
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius.	Meningkatnya pengamalan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	
	Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak	
	Menurunnya tingkat pengangguran	
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial
Misi 2 :	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan
	Meningkatnya pertumbuhan investasi sektor agribisnis daerah dan pariwisata	
	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	
Misi 3 :	Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.	
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah

Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan
daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur	
	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	
	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	
Misi 4 :	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.	
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya inovasi daerah	

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab V merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi cara-cara yang diambil tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang kemudian dijabarkan lebih rinci dengan serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Perumusan strategi memperhatikan masalah yang telah dituangkan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mendefinisikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung pembangunan daerah. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan merata ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan

tugas dan fungsi. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

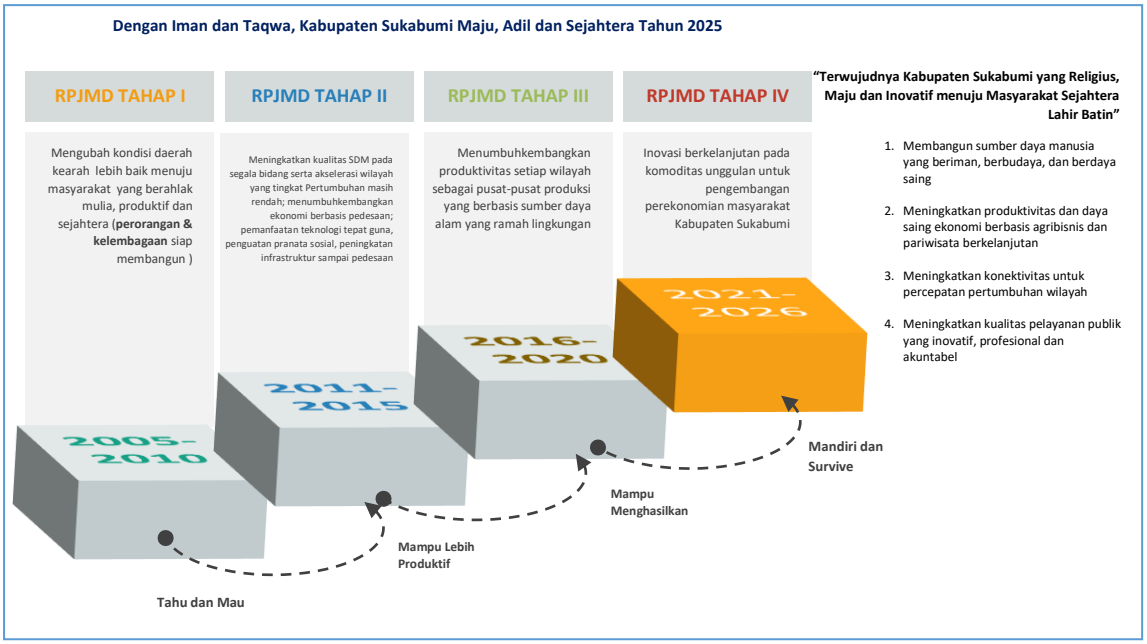
Bab ini menguraikan mengenai strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah yang dituangkan melalui rencana proyek prioritas, menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Berdasarkan Permasalahan dan Isu strategis yang telah dijelaskan pada Bab IV, kemudian dihubungkan dengan bagaimana target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V dapat dicapai. Maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut ini.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik - Tematik dan Integratif

Tahapan pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026 merupakan bagian dari perencanaan pada level yang lebih tinggi yaitu RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005-2025. RPJMD tahap ke empat atau terakhir ini memiliki tema "Inovasi berkelanjutan pada komoditas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Sukabumi". Tema ini menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD 2021-2026 yang akan dijabarkan dalam tema tahunan RPJMD sebagai pedoman pembangunan yang dituangkan dalam RKPD.

Posisi RPJMD tahap IV dan sinkronisasi terhadap RPJPD tahun 2005-2025 dapat dilihat pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1 Posisi RPJMD Tahun 2021-2026 dalam RPJPD 2005-2025

Berdasarkan tema RPJMD tahap IV, maka visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disusun pada bab sebelumnya telah sesuai dengan arahan perencanaan jangka panjang Kabupaten Sukabumi. Demi mempertajam pencapaian sasaran strategis tersebut, maka disusunlah rumusan strategi dan arah kebijakan yang diturunkan langsung dari sasaran strategis berdasarkan tema pembangunan lima tahunan. Sasaran strategis yang dirumuskan menggunakan metodologi *balanced scorecard* diharapkan dapat memberikan sasaran yang holistik dari 3 perspektif yang digunakan yaitu perspektif masyarakat, proses internal, dan pengembangan. Dengan demikian, cara yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis tersebut dapat secara akurat memberikan *impact* yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Strategi-strategi tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam arah kebijakan.

Rumusan arah kebijakan yang dibentuk merupakan fokus dari pilihan strategi, sehingga akan terarah serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan,

dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi disajikan pada Tabel 6.1, serta deskripsi dari setiap strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
Visi	**: TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN**					
Misi 1	**: Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.**					
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius	SS1	Meningkatnya pengamalan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	01.01	Meningkatkan infrastruktur fisik dan sosial masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas nilai-nilai keagamaan	01.01.01	Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan
					01.01.02	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kelembagaan keagamaan
					01.01.03	Meningkatkan kualitas pendidik keagamaan
					01.01.04	Meningkatkan kualitas keimanan guru dan siswa
	SS2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	02.01	Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dan peran aktif masyarakat	02.01.01	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
					02.01.02	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
					02.01.03	Meningkatkan promosi dan sosialisasi kesehatan masyarakat terutama dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit
					02.01.04	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera
					02.01.05	Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat menuju *Universal Health Coverage* (UHC)

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
			02.02	Meningkatnya peran *stakeholder* pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	02.02.01	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
					02.02.02	Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
					02.02.03	Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
					02.02.04	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
			02.03	Meningkatkan infrastruktur kesehatan	02.03.01	Meningkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan
					02.03.02	Mengembangkan fasilitas kesehatan masyarakat terhadap akses keterjangkauan masyarakat dalam menghadapi wabah penyakit.
	SS3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	03.01	Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan	03.01.01	Meningkatkan ketahanan keluarga serta partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan
	SS4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	04.01	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata	04.01.01	Meningkatkan pemerataan pengelolaan layanan pendidikan dan kualitas kurikulum
					04.01.02	Meningkatkan akreditasi kelembagaan pendidikan.
					04.01.03	Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan melalui peningkatan biaya operasional penyelenggaraan (BOP)
					04.01.04	Meningkatkan minat baca dan belajar tenaga pendidik dan masyarakat
	SS5	Menurunnya tingkat kemiskinan	05.01	Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu	05.01.01	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
					05.01.02	Meningkatkan pemerataan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial
					05.01.03	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi Masyarakat Miskin
	SS6	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	06.01	Melestarikan budaya warisan tradisional daerah sebagai potensi pengembangan daerah	06.01.01	Melestarikan dan mempromosikan objek pemajuan kebudayaan
					06.01.02	Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan
	SS7	Menurunnya tingkat pengangguran	07.01	Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja	07.01.01	Meningkatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan standar kebutuhan ketenagakerjaan melalui pelatihan institusional maupun non-institusional
					07.01.02	Menjalin kerjasama dengan stakeholder ketenagakerjaan dalam rangka penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri
			07.02	Memperluas kesempatan kerja	07.02.01	Optimalisasi Silent Center dalam rangka peningkatan kesempatan kerja
					07.02.02	Memperluas Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Laki-Laki
					07.02.03	Meningkatan Kesempatan Kerja pada Sektor Unggulan Pertanian dan Pariwisata
					07.02.04	Membuka kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri
					07.02.05	Mengoptimalkan peranan stakeholder ketenagakerjaan dalam memperluas kesempatan kerja
Misi 2	**: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan**					
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan	SS8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui	08.01	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan	08.01.01	Ektensifikasi lahan pertanian dan perikanan melalui peningkatan kerjasama pemanfaatan lahan
					08.01.02	Mengembangkan kawasan unggulan

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
pariwisata berkelanjutan.		sektor pertanian dan perikanan				berbasis potensi agribisnis
					08.01.03	Meningkatkan kualitas SDM dan layanan infrastruktur di kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis
					08.01.04	Mencetak agripreneur milenial yang potensial
					08.01.05	Optimalisasi peranan BUMD dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dan perikanan
					08.01.06	Optimalisasi peran swasta dan masyarakat melalui kerjasama pengembangan sektor pertanian, dan perikanan
					08.01.07	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan sektor pertanian dan perikanan
			08.02	Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada sektor pertanian dan perikanan, yaitu mendorong kemudahan aksesibilitas pembiayaan/permodalan agribisnis bagi para pelaku usaha pertanian dan perikanan	08.02.01	Mengembangkan skema *closed loop* dalam peningkatan nilai tambah pertanian
					08.02.02	Optimalisasi sektor swasta pada industri hilir komoditas pangan
			08.03	Menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	08.03.01	Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, cadangan dan keamanan pangan
					08.03.02	Mengkampanyekan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu
					08.03.03	Meningkatkan penganekaraman pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan
	SS9	Meningkatnya pertumbuhan	09.01	Membudayakan pelayanan	09.01.01	Membangun budaya insan pariwisata berkelas dunia

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
		ekonomi sektor Pariwisata		wisata kelas dunia	09.01.02	Mengkampanyekan nilai dan spirit kepariwisataan (Setiap kegiatan adalah event, setiap tempat adalah destinasi)
			09.02	Meningkatkan kualitas daya tarik dan promosi destinasi wisata unggulan	09.02.01	Meningkatkan Konsep 3A+2P wisata pada kawasan destinasi unggulan
					09.02.02	Pengembangan produk wisata unggulan daerah (wisata alam, wisata budaya, wisata halal, wisata religi dan wisata investasi)
					09.02.03	Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif daerah
					09.02.04	Memaksimalkan peranan pihak swasta dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan melalui zonasi untuk segmentasi
					09.02.05	Mendorong Kelembagaan Badan Pengelola CPUGG untuk menjadi Badan Usaha independen yang kredibel dan profesional
					09.02.06	Optimalisasi konsep *Community Based Tourism* dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah berbasis BUMDes
	SS10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	10.01	Meningkatkan daya tarik investasi daerah bidang agribisnis dan pariwisata	10.01.01	Memetakan potensi investasi daerah khususnya di bidang agribisnis dan pariwisata
					10.01.02	Meningkatkan promosi potensi investasi daerah berbasis digital
					10.01.03	Mendorong sinergi antar sektor dan *stakeholder* dalam peningkatan investasi daerah
					10.01.04	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kemudahan perizinan melalui penguatan implementasi OSS
	SS11	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	11.01	Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas produk pelaku usaha	11.01.01	Pemetaan Pelaku usaha berbasis skala usaha
					11.01.02	Meningkatkan kualitas SDM berbasis skala usaha
					11.01.03	Mendorong *branding* produk unggulan daerah

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
			11.02	Memetakan kebijakan intervensi yang tepat melalui pendataan pelaku usaha	11.02.01	Mendorong pertumbuhan sentra UMKM dan IKM
					11.02.02	Optimalisasi peranan kelembagaan koperasi dan BUMD dalam pengembangan usaha
					11.02.03	Mendorong pendirian BPR Syariah dalam mendukung peningkatan akses keuangan
					11.02.04	Memperluas akses pasar di dalam dan luar negeri
	SS12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12.01	Mengendalikan tingkat pencemaran lingkungan hidup	12.01.01	Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan
					12.01.02	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah berbasis rumah tangga (jakstrada)
					12.01.03	Meningkatkan kapasitas pelayanan persampahan daerah
Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah						
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	SS13	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	13.01	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian	13.01.01	Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika diinstansi Pemerintah dalam rangka mendukung SPBE
			13.02	Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika	13.02.01	Mengembangan Kapasitas SDM (IT) melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang
					13.02.02	Meningkatkan jumlah tenaga IT sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang
			13.03	Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung perluasan cakupan area	13.03.01	Melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyediaan layanan jaringan publik
	SS14	Meningkatnya kualitas infrastruktur	14.01	Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten	14.01.01	Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten sesuai target waktu penyelesaian

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
					14.01.02	Meningkatkan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial
			14.02	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	14.02.01	Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi kabupaten
	SS15	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	15.01	Meningkatkan cakupan infrastruktur sarana pelayanan dasar	15.01.01	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana air minum
					15.01.02	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana sanitasi (persampahan, air limbah domestik, drainase permukiman)
			15.02	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten, kawasan kumuh dan permukiman perdesaan	15.02.01	Membangun rumah layak huni untuk masyarakat terdampak bencana dan relokasi akibat pembangunan
					15.02.02	Mengembangkan kawasan permukiman yang tanggap bencana
			15.03	Meningkatkan ketersediaan RTH/Ruang Publik di kawasan perkotaan	15.03.01	Meningkatkan kualitas PSU permukiman
					15.03.02	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan RTH/Ruang Publik
			15.04	Meningkatkan kualitas P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah)	15.04.01	Meningkatkan kualitas pengelolaan P4T dan percepatan fasilitasi pelayanan bidang pertanahan
	SS16	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	16.01	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan transportasi	16.01.01	Meningkatkan Kualitas SDM perhubungan melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang
					16.02.01	Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi berkeselamatan yang menghubungkan wilayah strategis tingkat kabupaten

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
Misi 4	**: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel**					
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	SS17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	17.01	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	17.01.01	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
					17.01.02	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan *e-government*
					17.01.03	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan akuntabel
					17.01.04	Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan publik hingga ke desa dan kecamatan
					17.01.05	Menata pusat Pemerintahan Palabuhanratu
					17.01.06	Mendorong terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB)
	SS18	Meningkatnya inovasi daerah	18.01	Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah	18.01.01	Mendorong inovasi perangkat daerah berkelanjutan

Tabel 6.2 Deskripsi Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing			
01.01	Stategi ini merupakan upaya penguatan peran agama dalam meningkatkan implementasi nilai-nilai keagamaan pada kehidupan sosial bermasyarakat sehingga pada akhirnya dapat memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building). Peningkatan implementasi kualitas nilai-nilai keagamaan dapat diwujudkan dengan dukungan infratruktur fisik dan sosial. Dengan dukungan instrastruktur fisik berupa sarana dan prasarana ibadah dan lembaga keagamaan maka masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyu' sesuai dengan ajaran agamanya sehingga berbanding lurus dengan peningkatan kualitas keimanan mereka. Sedangkan dengan dukungan insfrastruktur sosial berupa peningkatan kualitas pendidik keagamaan dan penguatan peran forum lintas agama, maka diharapkan kerukunan umat beragama di masyarakat dapat diwujudkan.	01.01.01	Arah kebijakan untuk meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan bagi masyarakat dilakukan mengingat bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan dijadikan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia, dimana ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu : Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan RI. Peningkatan wawasan ideologi kebangsaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Dengan peningkatan wawasan ideologi kebangsaan maka toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat dapat diwujudkan.
		01.01.02	Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kelembagaan keagamaan didasari bahwa lembaga pendidikan dan keagamaan merupakan sarana penting dalam pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia. Melalui Lembaga ini, peserta didik memperoleh kesempatan mendapat pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam bidang tertentu serta pendidikan etika dan moral. Dengan demikian, adanya fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang memadai, maka diharapkan fungsi lembaga pendidikan dan kelembagaan keagamaan dapat berjalan optimal.

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
		01.01.03	Tenaga pendidik keagamaan mempunyai peran yang sangat strategis dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Dengan demikian, tenaga pendidik yang profesional diharapkan dapat mengantarkan peserta didik untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan dan kedekatan kepada pencipta-Nya. Arah kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan sistem pembelajaran secara terintegrasi dalam bentuk klasikal, non-klasikal atau melalui kombinasi klasikal dan non-klasikal (blended learning).
		01.01.04	Nilai manusia ada pada kualitas iman mereka. Hal ini tercermin tidak hanya sekedar menjalankan ritual ibadah secara kuantitas saja, tetapi juga secara kualitas dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkadung dalam ibadah tersebut baik terhadap Rabb-Nya, sesama manusia dan manusia dengan lingkunagnnya. Dalam konteks guru dan siswa, mengingat selain bagian komunitas pendidikan juga merupakan bagian dari masyarakat, maka dengan peningkatan kualitas keimanan guru dan siswa di lembaga pendidikan dan keagamaan diharapkan dapat menjadi katalisator implementasi kualitas nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat sehingga kerukunan umat beragama dapat terpelihara
02.01	Strategi ini didasari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan peran aktif masyarakat adalah komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan. SDM Kesehatan berperan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal, maka untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal tersebut dilakukan melalui:	02.01.01	Arah kebijakan ini yaitu Meningkatkan pelayanan kesehatan yang didukung dengan peningkatan dan penguatan mutu pelayanan kesehatan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, *percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)/ Angka Kematian Bayi (AKB) dan stunting, penanganan dan pencegahan penyakit termasuk penanganan wabah penyakit serta* peningkatan sistem kesehatan.

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
	1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan 3. Meningkatkan promosi kesehatan terutama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit 4. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera 5. Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat menuju Universal Health Coverage (UHC)	02.01.02	Arah kebijakan ini yaitu upaya bagaimana meningkatkan pemenuhan SDM Kesehatan yang belum merata di Puskesmas maupun di Rumah Sakit baik dokter maupun tenaga kesehatan lainnya serta upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kesehatan yang dibutuhkan.
		02.01.03	Arah kebijakan ini yaitu upaya memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan promosi kesehatan melalui upaya-upaya promotif dan preventif dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Germas serta upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
		02.01.04	Arah kebijakan ini yaitu upaya meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera agar terwujudnya kehidupan keluarga yang sejahtera, yang ditandai dengan kondisi dimana masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkat ekonominya, kesehatan maupun pendidikan serta meningkatnya kepesertaan masyarakat pada program KB.
		02.01.05	Arah kebijakan ini yaitu upaya meningkatkan cakupan kepesertaan masyarakat melalui perlindungan/jaminan kesehatan (BPJS) dalam rangka mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) serta upaya pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan termasuk kerjasama pemerintah dan swasta.
02.02	Strategi ini merupakan upaya peningkatan kualitas *pemuda* menjadi salah satu agenda strategis untuk mendapatkan manfaat bonus demografi. Kerangka pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan strategi dengan upaya untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas	02.02.01	Arah kebijakan ini yaitu upaya meningkatkan kesadaran bahwa pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan, upaya pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda dan organisasi kepemudaan sehingga dapat memainkan perannya dalam pembangunan secara optimal.

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
	kreatif dan inovatif. Selain itu, keolahragaan juga merupakan unsur penting dalam pembangunan manusia karena dinamika kegiatan sangat diperlukan oleh SDM yang menggerakkan roda kegiatan. Strateginya melalui pembinaan dan pengembangan, pembiasaan olah raga untuk gaya hidup dan akhirnya menjadi budaya berolahraga, bahkan wahana berprestasi. Sekarang SDM diperuntukkan sebagai modal kerja sehingga pengetahuan dan kemampuan serta keterlibatanya disaat pengambilan kebijakan sangat mendapat penekanan.	02.02.02	Arah kebijakan ini yaitu upaya membina dan mengembangkan olahraga rekreasi yang dapat menarik minat masyarakat untuk bergerak dan berolahraga sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat.
		02.02.03	Arah kebijakan ini yaitu upaya membina dan mengembangkan olahraga pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten dan upaya membina dan mengembangkan organisasi olahraga sehingga dapat menghasilkan lebih banyak bibit-bibit atlet berprestasi.
		02.02.04	Arah kebijakan ini yaitu upaya membina dan mengembangkan kepramukaan melalui peningkatan kapasitas SDM, organisasi, serta sarana dan prasarana kepramukaan.
02.03	Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana alat kesehatan dan pengembangan fasilitas kesehatan masyarakat	02.03.01	Arah kebijakan ini yaitu upaya Meningkatkan ketersediaan, sarana dan prasarana, alat kesehatan dan sediaan farmasi diantaranya melalui peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, peningkatan pengendalian monitoring dan evaluasi harga obat, dan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian
		02.03.02	Meningkatkan keterjangkauan, pemerataan dan akses ke pelayanan kesehatan masyarakat diantaranya melalui pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mulai dari fasilitas layanan primer hingga rujukan, pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer serta pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dasar

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
03.01	Strategi ini didasari pada salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan. berbagai upaya dalam meningkatnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan adalah dengan Meningkatkan ketahanan keluarga sehingga dapat mendorong Kesetaraan Gender dan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan.	03.01.01	Arah kebijakan ini didasari bahwa Keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pengembangan kemampuannya, kemampuan menghadapi tantangan dan mencegah resiko terhadap masalah di sekeliling mereka. Kemampuan SDM dan ketahanan dalam keluarga ini juga menjadi modal dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat mengimplementasikan kesetaraan gender sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan.
04.01	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata : Hal ini terjadi karena luasnya geografis dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (Tenaga pendidik) di Kabupaten Sukabumi yang menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan. Diharapkan dengan strategi diatas dapat mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah di Kabupaten Sukabumi, sehingga dapat menopang nilai capaian IPM. Strateginya dengan; • Memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dengan kemudahan dari sisi jarak maupun biaya yang terjangkau juga berupa layanan nondeskriminatif termasuk bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam layanan inklusif	04.01.01	Peningkatan pengelolaan pemerataan layanan pendidikan meliputi: • Perluasan akses pendidikan bermutu • Penguatan mutu dan relevansi yang berpusat pada perkembangan peserta didik • Pengembangan peserta didik yang berkarakter • Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan saatra srta pengarusutamaannya Peningkatan kualitas kurikulum adalah strategi peningkatan Layanan pendidikan berkualitas dengan penguatan system tata kelola pendidikan yang dilakukan pada peningkatan kemampuan belajar, pemamfaatan lingkungan secara maksimal, sarana prasarana yang baik, Monev yang terukur dan terencana serta hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
		04.01.02	1. Akeditasi adalah indikator mutu sebagai referensi untuk mengambil keputusan. 2. Memberikan informasi kinerja bahwa sejauh mana sekolah telah memenuhi layanan pendidikan yang memenuhi kriteria mutu 3. Bagi masyarakat sebagai pelanggan dapat mudah untuk mengetahui layanan sekolah dengan tingkat mutu layanannya.
		04.01.03	Arah kebijakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik khususnya tenaga pendidik honorer non PNS. Hal ini juga sekaligus memberikan motivasi bagi tenaga pendidik tersebut untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pembelajaran bagi para siswa didikannya.
		04.01.04	Arah kebijakan ini merupakan upaya untuk memperkaya informasi yang didapat oleh masyarakat melalui peningkatan minat baca masyarakat, dengan membaca informasi masyarakat juga mendapatkan pembelajaran hal-hal baru yang bisa diterapkan dalam kehidupan terutama untuk menghadapi era teknologi 4.0 yang sangat cepat dan dinamis.

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
05.01	Stategi ini didasari bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan upaya percepatan dan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh melalui koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan terpadu mencakup 4 hal, yaitu : 1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; 4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.	05.01.01	Arah Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui : 1. pemberdayaan sosial, dengan tujuan : a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 2. Rehabilitasi sosial yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.
		05.01.02	Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan sosial serta memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan berdasarkan data DTKS.
		05.01.03	Arah kebijakan ini bertujuan Meningkatnya pemenuhan infrastruktur layanan dasar bagi Masyarakat Miskin antara lain infrastruktur bagi masyarakat miskin berupa PAPAN (rehab rumah)/RS-RTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) serta penyediaan tempat penampungan pengungsi bagi masyarakat miskin dan rentan yang terkena korban bencana.

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
06.01	Ditengah arus globalisasi yang sangat deras ini seringkali terjadi penurunan nilai-nilai kebudayaan di masyarakat, padahal kebudayaan juga dapat dianggap sebagai aset penting yang berkontribusi terhadap pembangunan. Pembangunan daerah bukanlah hanya terkait dengan peningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tapi juga peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, memahami kebudayaan lokal merupakan sesuatu yang penting bagi pembangunan daerah maupun nasional . Melestarikan dan mendayagunakan kebudayaan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mendorong ekonomi	06.01.01	Arah kebijakan ini yaitu upaya melindungi, memanfaatkan, mengembangkan dan membina objek pemajuan kebudayaan yang menjadi jati diri daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya daerah dan meningkatkan kontribusi budaya terhadap pembangunan daerah.
		06.01.02	Arah kebijakan ini yaitu upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kbudayaan Pasal 39 yang berbunyi bahwa pemerintah daerah harus melakukan pembinaan pemajuan kebudayaan dengan melakukan peningkatan jumlah dan mutu SDM Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan.
07.01	Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja: Hal ini terkait dengan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi terkait sektor tenaga kerja, yaitu kualitas SDM. Diharapkan, dengan strategi diatas, pengembangan kualitas SDM bisa sesuai dengan kebutuhan serapan tenaga kerja, sehingga link and match antara sumberdaya manusia yang dipersiapkan dengan kebutuhan tenaga kerja bisa tercipta.	07.01.01	Guna mendukung kualifikasi dilakukan pemetaan tenaga kerja, penyesuaian kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja pada lapangan usaha yang tersedia baik melalui pelatihan institusional maupun non-institusional.
		07.01.02	Kerjasama yang dilakukan mengarah pada perluasan serapan tenaga kerja yang tidak hanya di dalam negeri tetapi juga meliputi luar negeri. Kerjasama dilakukan melalui MoU dengan lembaga ketenagakerjaan (SMK, BLK, LPK dan lembaga penyalur tenaga kerja) untuk mendorong serapan tenaga kerja.
07.02	Memperluas kesempatan kerja: Strategi ini dipilih karena masih kecilnya kesempatan kerja yang ada dibandingkan dengan bonus demografi termasuk usia produktif yang sedang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Oleh karenanya, sangat penting bagi daerah untuk meningkatkan kesempatan kerja, terutama bagi tenaga kerja laki-laki yang saat ini proporsi penyediaan kesempatan kerjanya sudah sangat sedikit (kurang dari 4 %) dibandingkan dengan kesempatan	07.02.01	Menjadikan silent center sebagai super apps yang melayani kebutuhan ketenagakerjaan mencakup infomasi kerja, perlindungan tenaga kerja dan kebutuhan lainnya.
		07.02.02	Mendorong penyetaraan kesempatan kerja bagi laki laki sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pekerjaan yang diatur dalam rencana tenaga kerja (RTK) makro-mikro dan regulasi yang mendukung.

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
	kerja baru untuk tenaga kerja perempuan. Kerjasama dengan pihak swasta dengan fokus peningkatan kesempatan kerja luar daerah dan luar negeri menjadi fokus dalam pelaksanaan strategi ini.	07.02.03	Perekonomian Kabupaten Sukabumi yang diarahkan pada sektor pertanian dan pariwisata secara langsung berimplikasi pada kebutuhan tenaga kerja pada sektor tersebut. Meningkatan kualifikasi tenaga kerja pada sektor pertanian dan pariwisata, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat hingga menjadi sektor kunci pembangunan ekonomi daerah yang saling bersinergi dengan aspek investasi pada kedua sektor tersebut.
		07.02.04	Melakukan promosi ketenagakerjaan untuk mendukung konsep: Kerjasama *Govenment to Government* (G to G) dengan destinasi ketenagakerjaan baik dalam maupun luar negeri yang menjadi modal dasar untuk ditindaklanjuti pada tahapan *Government to Business* (G to B) baik dalam maupun luar negeri.
		07.02.05	Melalui peguatan tripartid dengan peningkatan promosi ketenagakerjaan, penguatan informasi kerja dan pemenuhan aspek hak dan kewajiban pekerja yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan dapat mendorong perluasan kesempatan kerja.
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan			
08.01	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan: Strategi ini menjawab beberapa permasalahan terkait produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Masalah utama terkait sektor pertanian adalah kepemilikan lahan. Selain itu, sektor hilir pertanian juga menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Masalah regenerasi petani juga merupakan hal yang sangat mempengaruhi produktivitas. Diharapkan inovasi dalam luasan pengelolaan lahan, penentuan kawasan unggulan dan	08.01.01	Melakukan inventarisasi dan pemanfaatan lahan dengan: 1. Penguatan database aset lahan. 2. Pemanfaatan lahan yang tersedia. 3. Penciptaan lahan potensial yang dapat dikembangkan melalui optimalisasi peranan BUMD Agro Sukabumi Mandiri sebagai hub (*penghubung*) dalam pemanfaatan lahan.
		08.01.02	Melakukan pemetaan potensi unggulan pertanian berdasarkan potensi unggulan yang mengarah pada peningkatan nilai tambah di sektor pertanian.

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
	peningkatan regenerasi petani mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.	08.01.03	Optimalisasi kualitas SDM Pertanian sesuai dengan konsep, teknologi dan infrastruktur pertanian yang dapat diaplikasikan guna mendukung produktivitas pertanian.
		08.01.04	Mencetak pengusaha pertanian milenial yang mampu menjawab masalah nilai tambah di sektor pertanian baik dari produktivitas, distribusi maupun final goods pertanian.
		08.01.05	Mengoptimalisasi peranan BUMD Agro Sukabumi Mandiri (ASM) sebagai motor dan penghubung dalam peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan.
		08.01.06	Melalui upaya peningkatan nilai tambah komoditi unggulan sektor pertanian secara umum dengan pelibatan masyarakat juga kerjasama dengan swasta melalui Perumda ASM sebagai hub untuk memperluas jejaring pengembangan sektor pertanian dalam arti luas sesuai kewenangan kabupaten.
		08.01.07	Upaya peningkatan produktifitas sektor pertanian secara umum melalui penggunaan teknologi tepat guna yang mudah dioperasikan oleh para petani dan nelayan.
08.02	Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada sektor pertanian, kelautan, dan perikanan: Hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan merupakan salah satu masalah utama dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Sukabumi. Diharapkan dengan strategi ini, permasalahan sektor hilir pertanian ini dapat diselesaikan.	08.02.01	Mengadaptasi skema closed loop dalam rangka penguatan hubungan antara produsen, konsumen, lembaga pembiayaan dan pihak usaha yang berada dalam rantai usaha pertanian dengan MoU terkait. Melalui hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.
		08.02.02	Mendorong keterlibatan pihak swasta dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian di Sukabumi melalui promosi dan kemudahan investasi, insentif penggunaan lahan atau sarpras pendukung dan lainnya.

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
08.03	Menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman: Diharapkan dengan strategi ini, skor PPH Kabupaten Sukabumi bisa meningkat.	08.03.01	Melakukan upaya penguatan keamanan dan ketahanan pangan yang berfokus pada penyediaan, optimalisasi jalur distribusi, pemenuhan cadangan pangan.
		08.03.02	Melakukan upaya penyebaran informasi dan mengkampanyekan pada seluruh lapisan masyarakat, terutama anak usia sekolah terkait diversifikasi pangan berbasis local content guna mendukung kesimbangan gizi masyarakat.
		08.03.03	Menggiatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi di tingkat rumah tangga dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang memiliki pekarangan dalam budidaya anekaragam sumber pangan pada lahan terbatas.
09.01	Membudayakan pelayanan wisata kelas dunia: Budaya pariwisata merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Secara umum masyarakat Sukabumi belum memiliki budaya pariwisata yang bertingkat kelas dunia. Ini menjadi barrier utama dalam upaya menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai destinasi wisata tingkat dunia.	09.01.01	Meningkatkan kesadaran budaya wisata di masyarakat melalui Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona, pemanfaatan sosial media dan kampanye di sekolah. Selain itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan stakeholder lainnya terkait kepariwisataan.
		09.01.02	Melakukan branding melalui aksi langsung berkenaan dengan promosi pariwisata dan penanaman nilai penting yang harus dimiliki oleh masyarakat terkait spirit kepariwisataan. Dilakukan secara rutin guna menguatkan tagline kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi.
09.02	Meningkatkan kualitas daya tarik dan promosi destinasi wisata unggulan: Selain budaya, destinasi wisata merupakan prasyarat penting dalam upaya menuju destinasi wisata. Zonasi destinasi wisata untuk segmen konsumen yang berbeda dengan dikerjasamakan	09.02.01	Mendorong pihak swasta untuk aktif mengembangkan destinasi wisata unggulan melalui pengembangan atraksi, aksesibilitas, amenitas, pelaku usaha dan promosi di destinasi unggulan dan kemudahan regulasi terkait di Kabupaten Sukabumi.

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
	dengan pihak swasta dan BUMDes menjadi poin penting dalam upaya menjalankan strategi ini. Selain itu, pengembangan produk wisata tematis juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan nilai tambah destinasi wisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Sukabumi.	09.02.02	*Segmented tourism* menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan revenue dari pariwisata dibandingkan dengan mass tourism yang selama ini berkembang di Sukabumi. Selain itu pengembangan wisata investasi diharapkan dapat mendorong investor untuk melihat potensi Kabupaten Sukabumi, sehingga dapat meningkatkan investasi sektor pariwisata di Kabupaten Sukabumi.
		09.02.03	Membangun creative center kabupaten Sukabumi yang akan berperan sebagai pusat pengembangan komunitas ekonomi kreatif di Sukabumi. Selain itu, para pelaku ekonomi kreatif yang sudah ada didukung melalui peningkatan akses kepada investor dan swasta.
		09.02.04	Melakukan upaya intensifikasi sektor pariwisata dengan segmentasi berdasarkan kelas ekonomi, dan bekerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan destinasi wisata yang diperuntukan untuk wisatawan dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi.
		09.02.05	Melalui kelembagaan Badan Pengelola yang berbasis otoritas pengelolaan CPUGGp dengan pola penguatan pendidikan, ekologi dan pemberdayaan masyarakat guna mendorong kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi khususnya kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu. Lebih lanjut, diharapkan badan pengelola bisa berbentuk Perumda atau badan lain sebagai upaya peningkatan profesionalisme yang berperan sebagai hub center sehingga CPUGG mampu berkembang sebagai destinasi wisata tingkat dunia.
		09.02.06	Memaksimalkan peranan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi. Optimalisasi BUMDes dalam pengelolaan pariwisata diharapkan dapat menjangkau aspek pemberdayaan masyarakat desa dan menjadi alternatif dalam peningkatan nilai tambah kepariwisataan.

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
10.01	Meningkatkan daya tarik investasi daerah bidang agribisnis dan pariwisata: Secara umum, strategi ini tidak dibuat untuk membatasi investasi lain diluar sektor agribisnis dan pariwisata di Kabupaten Sukabumi. Dengan tanpa mengabaikan sektor lainnya, sektor agribisnis dan pariwisata menjadi sektor unggulan yang ingin dimajukan oleh Sukabumi. Dimulai dengan pemetaan potensi investasi daerah, strategi ini berujung di peningkatan kualitas kelembagaan dan kemudaha perizinan dengan harapan daya tarik daerah untuk investasi semakin meningkat.	10.01.01	Melakukan pemetaan berbasis wilayah kecamatan terkait potensi investasi utamanya dalam sektor unggulan yaitu agribisnis dan pariwisata yang selaras dengan misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.
		10.01.02	Mengoptimalkan peranan media digital termasuk influencer dan paid media untuk promosi Investasi di Kabupaten Sukabumi guna memperluas peluang masuknya investasi dalam maupun luar negeri.
		10.01.03	Membuat roadmap peningkatan investasi daerah termasuk pembagian peran semua stakeholder terkait.
		10.01.04	Upaya meningkatkan kualitas kelembagaan dan kemudahan perizinan melalui penguatan implementasi OSS yang mampu meningkatkan daya tarik investasi daerah pada sektor unggulan.
11.01	Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas produk pelaku usaha	11.01.01	Pemetaan pelaku UMKM dan IKM dari sisi aset, omset, jumlah tenaga kerja, komoditi dan kapasitas produksi untuk mengoptimalkan program-kegiatan yang dilakukan.
		11.01.02	Berdasarkan pemetaan yang ada, maka kebijakan intervensi akan semakin jelas termasuk peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan pemetaan yang dilakukan.
		11.01.03	Mengidentifikasi produk unggulan daerah dan melakukan strategi branding dengan profesional terkait produk unggulan Sukabumi agar mampu berdaya saing.

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
11.02	Meningkatkan kualitas kelembagaan pelaku usaha	11.02.01	Pembentukan sentra UMKM dan IKM menjadi lokus pengembangan dengan mengedepankan penguatan antar pelaku di Kabupaten Sukabumi.
		11.02.02	Mendorong peranan koperasi dan BPR dalam mendukung upaya pengembangan UMKM dan IKM khususnya dari aspek pembiayaan.
		11.02.03	Pendirian lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif pembiayaan pelaku usaha mikro dan kecil yang ada.
		11.02.04	Sebagai bentuk penguatan rantai nilai tambah diperlukan jalur pemasaran yang tidak hanya berorientasi pada dalam negeri tetapi juga luar negeri dengan tetap mengedepankan kualitas dan penggunaan sumber daya yang ada di Kabupaten Sukabumi.
12.01	Mengendalikan tingkat pencemaran lingkungan hidup: Strategi ini dibuat untuk mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran lingkungan hidup dan juga sampah, yang menjadi permasalahan utama pengelolaan lingkungan daerah Kabupaten Sukabumi. Terkait masalah persampahan, daerah harus memiliki arah kebijakan komprehensif baik dari hulu yang menyebabkan timbulan sampah dari skala rumah tangga sampai dengan kapasitas daerah dalam pengelolaan persampahan yang mengurusi bagian hilir terkait persampahan di Kabupaten Sukabumi.	12.01.01	Berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui parameter air, udara dan tutupan lahan akan ditingkatkan dengan menekankan pada pengurangan limbah, menekan laju pencemaran dan langkah preventif untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
		12.01.02	Penumbuhan budaya sadar bersih di tingkat rumah tangga dengan metode 3R dan menyediakan sarpras pendukung yang mencukupi untuk mendukung program tersebut. Program dimulai dari kawasan padat dan ramai mengingat keterbatasan sarpras pendukung.
		12.01.03	Melakukan peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan pada 7 wilayah yang tidak hanya berfokus pada skala besar tetapi juga penguraian sampah di tingkat mikro. Diperlukan peningkatan dari infrastruktrur pendukung seperti TPSS dan juga sarana pendukung lainnya seperti mobil sampah dan personel.

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah			
13.01	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung sektor komunikasi dan informatika baik hardware maupun software di semua instansi pemerintahan dalam rangka pengintegrasian sistem untuk peningkatan pelayanan publik dan pengamanan data.	13.01.01	Dalam rangka meningkatkan luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah, akan dilakukan melalui 3 strategi; pertama; strategi meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, informatika dan keamanan persandian yang arah kebijakannya dengan membangun infrastruktur pendukung dalam rangka implementasi SPBE daerah. kedua; strategi meningkatkan kapasitas SDM sektor informatika dengan arah kebijakan melalui pembinaan dan pelatihan terhadap pengelola sektor informatika serta penyediaan kebutuhan tenaga IT sehingga memenuhi kebutuhan minimal. ketiga; strategi meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung perluasan cakupan area yang kebijakannya diarahkan dengan melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi/penyedia layanan jaringan publik untuk meningkatkan cakupan area pelayanan dikawasan blankspot.
13.02	Peningkatan kapasitas SDM sebagai pengelola sistem sehingga memenuhi standar minimal dari sisi jumlah dan kualitas	13.02.01	
		13.02.02	
13.03	Peningkatan kualitas jaringan untuk memperluas cakupan area layanan sehingga meminimalisir area blankspot	13.03.01	
14.01	Peningkatan kualitas jaringan jalan kabupaten dengan mempertahankan kondisi jalan dan memperluas jaringan aksesibilitas wilayah.	14.01.01	Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur, strategi yang diambil adalah meningkatkan kualitas jaringan jalan dan kualitas jaringan irigasi kabupaten. Arah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas jalan adalah pertama; meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten dalam rangka mendukung aksesibilitas masyarakat dan kualitas pelayanan dasar. kedua; meningkatkan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial khususnya infrastruktur jalan yang menuju kawasan sentra ekonomi dan kawasan pariwisata. adapun untuk jaringan irigasi, arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas jaringan irigasi kewenangan kabupaten untuk mendukung sentra-sentra pertanian dan meningkatkan produksi dalam rangka ketahanan pangan daerah.
		14.01.02	
14.02	Peningkatan kualitas jaringan irigasi kewenangan kabupaten untuk mendukung sentra pertanian dalam upaya meningkatkan produksi sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah.	14.02.01	

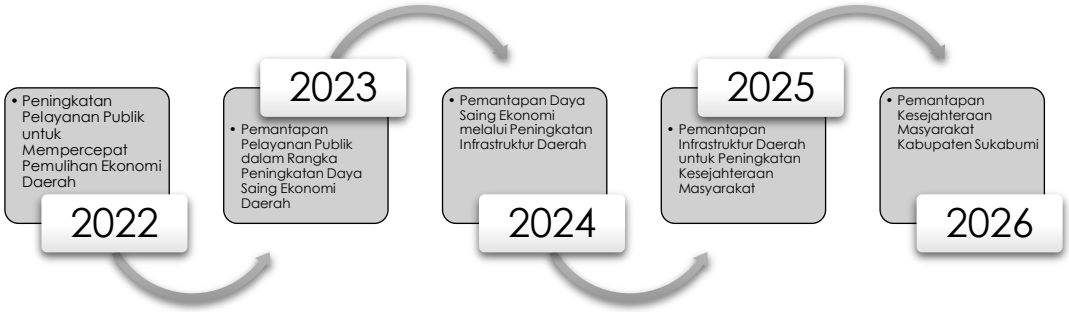
Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
15.01	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman sehingga memenuhi kriteria permukiman yang layak, aman dan nyaman.	15.01.01	Untuk meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman, dilakukan dengan menetapkan empat strategi. pertama; strategi meningkatkan cakupan infrastruktur sarana pelayanan dasar, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sarana air minum dan sanitasi (persampahan, air limbah domestik dan drainase permukiman) yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat dan pemenuhannya merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. pemenuhan ketersediaan dan kualitas sarana air minum diupayakan dengan pembangunan dan pengembangan jaringan air minum perpipaan maupun non perpipaan baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan. pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi diarahkan pada pembangunan instalasi komunal, peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan persampahan dan peningkatan kualitas jaringan drainase permukiman. kedua; strategi untuk meningkatkan kualitas permukiman di kawasan strategis kabupaten, kawasan kumuh dan permukiman perdesaan. arah kebijakan yang diambil untuk strategi ini adalah pemenuhan kebutuhan bangunan hunian layak yang terdampak bencana alam dan sosial dan pengembangan kawasan permukiman yang tanggap bencana. penyediaan hunian layak untuk masyarakat terdampak bencana merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai salah satu SPM daerah yang harus dijalankan. ketiga; strategi meningkatkan RTH/ruang publik di kawasan perkotaan, kebijakan untuk strategi ini diarahkan melalui penataan Prasarana Sarana Unitilas (PSU) di kawasan permukiman secara umum dan penyediaan ruang terbuka hijau/ruang publik di kawasan perkotaan sebagai bagian dari penyediaan lingkungan permukiman yang nyaman dan layak. ke empat; strategi
		15.01.02	
15.02	Peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan tata bangunan yang layak sehingga menjadi kawasan yang tanggap bencana.	15.02.01	
		15.02.02	
15.03	pemenuhan kebutuhan ruang publik/RTH di kawasan perkotaan sebagai bagian dari kawasan permukiman yang nyaman.	15.03.01	
		15.03.02	
15.04	peningkatan tata kelola administrasi tanah untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan.	15.04.01	

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
			peningkatan kualitas P4T diarahkan kebijakannya pada peningkatan kualitas manajemen pengelolaan dan pelayanaan dalam upaya tertib administrasi aset pertanahan.
16.01	peningkatan pelayanan transportasi melalui peningkatan manajemen pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung	16.01.01	peningkatan kinerja layanan transportasi akan dilakukan melalui strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan sektor transportasi yang lebih diarahkan pada peningkatan kualitas SDM perhubungan baik berupa pembinaan dan pelatihan maupun pemenuhan kebutuhan jumlah minimalnya, serta didukung dengan upaya mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah strategis kabupaten (sentra ekonomi dan pariwisata) dan kawasan-kawasan yang selama ini terisolir secara aksesibilitas transportasi umum.
		16.02.01	
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel			
17.01	Startegi ini merupakan upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis (dynamic governance) dengan menciptakan sistem pelayanan publik yang dinamis melalui reformasi birokrasi, diantaranya dengan meningkatkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Dengan strategi ini dapat mewujudkan good governance dan clean government. Hal ini didasari bahwa pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan layanan publik yg efektif, efisien, dan terjangkau hingga ke desa dan kecamatan.	17.01.01	Arah kebijakan ini meliputi upaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN, yang meliputi 4 dimensi, yaitu : dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur, maka kualitas pelayanan publik dapat meningkat. Hal ini didasari bahwa *Human resource* atau Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan ujung tombak pergerakan reformasi birokrasi, dimana SDM aparatur merupakan bagian di dalamnya.
		17.01.02	Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan sebagai respon terhadap perkembangan situasi yang dinamis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bentuk mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (*e-government*). Hal ini untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis (*dynamic governance*)

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
		17.01.03	Arah kebijakan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui upaya untuk meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan secara terpadu, transparan, dan akuntabel
		17.01.04	Arah kebijakan Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan publik hingga ke desa dan kecamatan ini dimaksudkan untuk percepatan pelayanan publik dan memperluas akses layanan publik hingga ke desa maupun kecamatan bahkan pelosok Kabupaten Sukabumi sehingga pelayanan publik akan lebih mudah di akses oleh masyarakat.
		17.01.05	Arah kebijakan ini dimaksudkan agar Palabuhanratu yang nota bene merupakan ibukota Kabupaten Sukabumi dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat, kegiatan sosial ekonomi, politik dan pemerintahan. Saat ini memang masih terdapat beberapa kantor Perangkat Daerah yang berada di luar Palabuhanratu, sehingga untuk menunjang terciptanya fungsi kawasan Palabuhanratu sebagai kawasan pusat pemerintahan yang menunjang administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka perkantoran seluruhnya akan dipindahkan ke Palabuhanratu.
		17.01.06	Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan. Hal ini didasari bahwa begitu luasnya rentang kendali dimana Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali
17.02	Stategi ini dilakukan untuk meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/ urusan daerah untuk mempercepat terwujudnya	17.02.01	Arah kebijakan ini mencakup upaya untuk mendorong perangkat daerah agar dapat melakukan inovasi daerah secara berkelanjutan

Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
	kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah. Dengan peningkatan inovasi daerah, maka berbanding lurus dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		dalam melaksanakan tupoksinya. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk iInovasi yang dilakukan perangkat daerah meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
18.01	Stategi ini dilakukan untuk meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/ urusan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah. Dengan peningkatan inovasi daerah, maka berbanding lurus dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	18.01.01	Arah kebijakan ini mencakup upaya untuk mendorong perangkat daerah agar dapat melakukan inovasi daerah secara berkelanjutan dalam melaksanakan tupoksinya. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk iInovasi yang dilakukan perangkat daerah meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan rumusan strategi dan kebijakan pada tabel 6.1, maka perlu ditetapkan tema tahunan dari fokus kebijakan. Penetapan tema atau fokus RPJMD periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005-2025, yaitu "Inovasi berkelanjutan pada komoditas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Sukabumi". Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Sukabumi, maka fokus pembangunan lima tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2 Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi 2021-2026

6.2 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

Penetapan strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan spasial (ruang) diperlukan dalam merumuskan keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi. Kebijakan pembangunan berbasis spasial (keruangan) ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang yang dirumuskan secara komprehensif memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, potensi sektoral, potensi investasi, dan struktur permukiman yang sudah terbentuk secara eksisting maupun proyeksi dalam jangka waktu 20 tahun. Amanat keterkaitan rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang menekankan perlunya integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara khusus disebutkan bahwa rencana pembangunan mempedomani RTRW dalam

penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. RTRW mengarahkan lokasi dan menjadi dasar menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukabumi.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW Kabupaten juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Berdasarkan tinjauan rencana tata ruang di tingkat atasnya, dalam konteks rencana pola ruang RTRWN, Kabupaten Sukabumi termasuk dalam kawasan andalan di Jawa Barat yaitu Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan adalah perikanan, pertanian, pariwisata, dan perkebunan. Sejalan dengan rencana pola RTRWN, dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi (bersama Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur) termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Sukabumi dan sekitarnya, dengan fokus pengembangan untuk Kabupaten Sukabumi adalah:

- Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, agroforestry, agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri non polutif dan tidak mengganggu resapan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan tangkap, serta pengembangan sub zona perikanan budidaya laut

khususnya budidaya lobster antara lain di perairan sukabumi selatan, pertambangan mineral logam dan non logam.

- Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi ditetapkan pula sebagai PKW, dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota-kota besar dan metropolitan, sehingga menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona lindung, penciptaan aktivitas ekonomi melalui penyediaan ruang-ruang investasi beserta dukungan sistem transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, serta harapan penataan ruang Kabupaten Sukabumi 20 tahun ke depan, maka tujuan penataan ruang Kabupaten Sukabumi 2032 adalah :

"Mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata dan industri berwawasan lingkungan menuju kabupaten yang religius, maju dan sejahtera"

Pernyataan tujuan tersebut di atas memiliki makna:

Efisien: dimaknai bahwa penataan ruang wilayah mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin, dilaksanakan secara tepat, cermat, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Produktif: dimaknai bahwa penataan ruang mampu menciptakan proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, disamping mampu memberikan daya tarik investasi dan meningkatkan daya saing dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah.

Berkelanjutan: dimaknai bahwa penataan ruang mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas lingkungan fisik serta mampu menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Berdaya saing: dimaknai bahwa bidang atau komoditas ekonomi yang dikembangkan selain mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan ekonomi wilayah kabupaten, mampu merespon pasar secara efisien dan efektif, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, serta juga mampu mengoptimalkan pemanfaatkan sumberdaya lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif minimal di lingkup wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek.

Di bidang agribisnis, pariwisata, dan industri : mengandung pengertian bahwa bidang agribisnis dan pariwisata memiliki potensi dan prospek bagi pengembangan wilayah, selain mendominasi kontribusi perekonomian kabupaten juga menjadi sumber pendapatan masyarakat; Di bidang industri: mengandung pengertian bahwa bidang industri memiliki potensi dan prospek bagi pengembangan wilayah, berkaitan dengan keberadaan dan perkembangan kegiatan industri yang ada di koridor Cicurug-Cibadak-Cicantayan-Cisaat dan sekitarnya, koridor Sukaraja–Sukalarang, koridor Cikembar – Cikembang, dan kawasan Padabeunghar Jampangtengah.

Kabupaten yang religius, maju dan sejahtera, dimaknai bahwa keseluruhan upaya pembangunan khususnya penataan ruang wilayah Kabupaten diarahkan menuju terwujudnya masyarakat yang religius, maju, adil, dan sejahtera sebagaimana visi yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025. Religius sesuai RPJMD Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016-2021 pada intinya adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang bermartabat dan berdaya saing.

Perwujudan tata ruang wilayah Kabupaten Sukabumi **yang efisien, produktif, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing**, dalam rangka mencapai sasaran:

1. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung minimal sebesar 50,76 persen dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan; Secara normatif, untuk mewujudkan kawasan lindung dan ruang untuk ketahanan pangan tersebut, diperlukan strategi *trade-off* yakni:
    - pergeseran sektor tradisional ke modern berdasarkan pembagian peran wilayah sesuai potensi, masalah dan karakteristik yg spesifik.
    - Strategi infrastruktur yang dikembangkan berupa konpensasi guna lahan yang mendukung sistem infrastruktur yang mantap melalui penerapan *zoning regulation*.
    - Ekonomi harus mampu menjelaskan dimana sektor pertanian primer dan sektor ekonomi strategis harus didukung oleh sektor lainnya. Dalam hal ini diperlukan penerapan *zoning regulation* atau kawasan strategis.
    - Pariwisata harus berperan sebagai kemasan penyempurna.
2. Tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur dan kawasan strategis; Secara normatif, untuk mewujudkan ruang investasi tersebut diperlukan sinergitas peran setiap sektor/ OPD.
3. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi.

4. Terlaksananya prinsip-prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

5. Terbangunnya penataan ruang kolaboratif, integratif, partisipatif yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, baik perorangan maupun kelembagaan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran penataan ruang di atas, maka tujuan dan sasaran penataan ruang Kabupaten Sukabumi tersebut hanya dapat dicapai melalui penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, di semua tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir. Untuk itu, diperlukan konsistensi yang terjaga antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam jangka panjang.

Penataan ruang ke depan juga perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan serta kerentanan terhadap bencana alam. Selain itu, diperlukan regulasi yang jelas agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang antar-sektor. Dalam kaitan ini diperlukan upaya penertiban ruang berupa pembenahan dan pembangunan ruang Kabupaten Sukabumi. Pembenahan ruang dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan dengan pertumbuhan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampungnya serta melakukan upaya-upaya pelestarian dan rehabilitasi terhadap pemulihan kondisi lingkungan yang ada. Sedangkan pembangunan ruang dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya ruang yang ada dalam rangka meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Sukabumi dilaksanakan dengan koordinasi yang mantap dan sistematis serta memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan, perlu ditetapkan prioritas penataan ruang Kabupaten Sukabumi untuk pencapaian tujuan dan sasaran penataan

ruang Kabupaten Sukabumi tahun 2030. Secara substantif, prioritas penataan ruang tersebut diharapkan selain dapat menjawab sasaran penataan ruang Kabupaten Sukabumi 2030 juga mampu menjawab isu utama penataan ruang yang meliputi aspek sosial-ekonomi, lingkungan, kewilayahan, dan kelembagaan.

6.2.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan pengembangan wilayah ditujukan untuk meminimalisasi ketimpangan, meningkatkan konektivitas wilayah, dan pengembangan potensi serta komoditas unggulan daerah. Ketimpangan wilayah di Kabupaten Sukabumi cenderung terjadi antara kecamatan-kecamatan di wilayah utara, dengan kecamatan-kecamatan di wilayah selatan. Kondisi ini secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh perbedaan ketersediaan infrastruktur di kedua wilayah.

Ketersediaan infrastuktur di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi cenderung masih rendah, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat konektivitas di wilayah tersebut. Hal ini tentu akan berakibat pada kurang optimalnya pengembangan potensi dan komoditas unggulan daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.

Dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan terutama di wilayah selatan Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang merumuskan rencana induk pengembangan wilayah Jawa Barat bagian selatan, yang terdiri dari rencana induk pengembangan infrastruktur, rencana induk pengembangan sektor agribisnis, rencana induk pengembangan sektor kelautan, dan rencana induk pengembangan sektor pariwisata. Rencana induk tersebut diharapkan akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten-Kabupaten yang berada di bagian

selatan Jawa Barat dalam menyusun kebijakan percepatan pembangunan.

Rencana pengembangan wilayah yang dituangkan dalam RPJMD ini memiliki konsep yang sesuai dengan rancangan rencana induk pengembangan wilayah Jawa Barat bagian selatan yaitu menggunakan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis sumber daya alam. Konsep tersebut diharapkan dapat menghasilkan *positif spillover* (*spread effect*) dari pengembangan pusat pertumbuhan (*growth center*) kepada kawasan *hinterland*-nya. Oleh karena itu, untuk mendorong terbentuknya keterkaitan antar dan intra pusat pertumbuhan (*spacial lag dependent*) dengan kawasan *hinterland*-nya, perlu dikembangkan komoditas unggulan (pertanian, kelautan dan perikanan, serta pariwisata) sebagai *prime mover* bagi pusat pertumbuhan tersebut.

Dalam konteks pengembangan wilayah secara lebih luas sesuai dengan RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032 telah ditetapkan kawasan strategis yang memiliki pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Kawasan strategis tersebut terdiri atas:

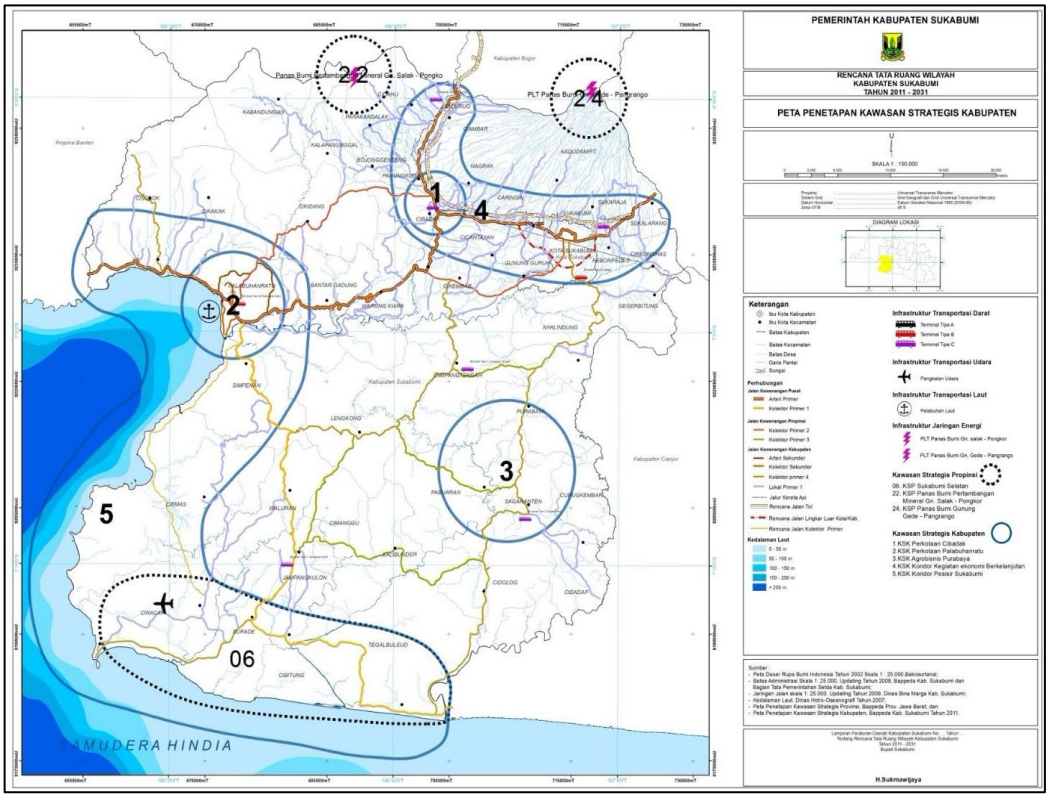
a) kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) meliputi:
   1. KSP Sukabumi bagian Selatan;
   2. KSK Cibadak Raya;
   3. KSK Perkotaan Palabuhanratu;
   4. KSK Agrobisnis Purabaya; dan
   5. KSK Koridor Cicurug – Sukabumi – Sukalarang. meliputi:
      a) Kecamatan Cicurug;
      b) Kecamatan Cidahu;
      c) Kecamatan Parungkuda;
      d) Kecamatan Ciambar;
      e) Kecamatan Nagrak;
      f) Kecamatan Cibadak;

g) Kecamatan Cicantayan;
h) Kecamatan Cisaat;
i) Kecamatan Kadudampit;
j) Kecamatan Sukabumi;
k) Kecamatan Sukaraja; dan
l) Kecamatan Sukalarang.

b) kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi, dan/atau daya dukung lingkungan terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi:

1. KSP Panas Bumi Gunung Gede – Pangrango; dan
2. KSP Panas Bumi dan Pertambangan Mineral Gunung Salak – Pongkor.

Pemetaan pembagian KSK dapat dilhat pada gambar 6.3.



Sumber: RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032

Gambar 6.3 Peta Kawasan Strategis di Kabupaten Sukabumi

Pengembangan wilayah bertujuan untuk kemakmuran wilayah dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada secara optimal dengan mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan

antardaerah sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, berdasarkan karakteristik, kondisi, dan potensi yang ada di setiap wilayah di Kabupaten Sukabumi telah menetapkan lima (5) Wilayah Pengembangan (WP) sebagai strategi untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan antardaerah. Lima WP tersebut terdiri atas WP Kawasan Pesisir dan Konservasi Terpadu, WP Koridor Sukabumi Utara, WP Perbatasan Barat, WP Perbatasan Timur, dan WP Kawasan Penunjang Pangan Daerah dengan cakupan wilayah setiap WP tercantum dalam Tabel 6.3. Penetapan WP dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan, dan fokus peningkatan keunggulan tiap WP.

Tabel 6.3 Wilayah pengembangan berdasarkan konsep pemanfaatan wilayah perekonomian

No	Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Kebijakan Wilayah Pengembangan	Arah Pengembangan	Prioritas Pembangunan RPJMD
1	Kawasan Pesisir dan Konservasi Terpadu	Cisolok Cikakak Palabuhanratu Simpenan Waluran Ciemas Surade Ciracap Cibitung Tegalbuleud	Sektor Strategis: Pariwisata, Perikanan dan Konservasi Fokus Pengembangan: 1. Palabuhanratu sebagai kawasan inti pengembangan 2. Kawasan sub inti seperti Palangpang Ciemas dan Ujung Genteng 3. Kawasan penunjang lainnya diluar tersebut diatas 4. Pengembangan pasar ternak	1. Mendorong Revalidasi CPUGGp; 2. Melengkapi 3A + 2P di sepanjang kawasan CPUGGp; 3. Peningkatan Kualitas SDM Perikanan dan Pariwisata; 4. Alih fungsi utama kawasan pesisir dari kawasan penangkapan ikan ke tempat wisata dan konservasi laut; 5. Mengalihkan zona penangkapan ikan ke wilayah yang lebih jauh dari garis pantai; 6. Meningkatkan kualitas Nelayan dan hasil tangkapannya; Optimalisasi Bumdes dalam pengelolaan Pariwisata dan sektor perikanan	1. Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf Internasional di sepanjang pesisir pantai; 2. Peningkatan kualitas SDM untuk pariwisata dan perikanan
2	Koridor Sukabumi Utara	Cicurug Ciambar Nagrak Caringin Cisaat Kadudampit Sukabumi	Sektor Strategis: Industri, Jasa, Pariwisata, Pertanian, Hortikultura, Konservasi	1. Pengelolaan dan Pembatasan Kawasan Industri dan permukiman 2. Proteksi lahan pertanian Produktif (LP2B);	1. Pengembangan dan agglomerasi sektor industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tamping;

No	Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Kebijakan Wilayah Pengembangan	Arah Pengembangan	Prioritas Pembangunan RPJMD
		Sukaraja Cibadak Sukalarang	Fokus Pengembangan: 1. Agglomerasi Industri Ciambar dan Cikembar 2. Kawasan Penyangga Cagar Biosfer TNGGP 3. Industri Pariwisata berbasis pertanian, hortikultura dan konservasi	3. Peningkatan Rantai Agribisnis; 4. Peningkatan sektor Jasa dan keuangan; 5. Peningkatan dan pengoptimalan sektor pariwisata berkelanjutan berbasis pada pertanian dan lahan konservasi; 6. Optimalisasi Bumdes dalam pengelolaan Pariwisata	2. Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan pariwisata
3	Perbatasan Barat (Kadalbadung)	Kalapanunggal Kabandungan Cikidang	Sektor Strategis: Pertanian dan Pariwisata Fokus Pengembangan: 1. KEK Cikidang Cibadak 2. Kawasan Penyangga Konservasi TNGHS 3. Hub Kabupaten untuk sektor primer	1. Inventarisasi Potensi Pertanian dan Pariwisata; 2. Proteksi lahan pertanian Produktif; 3. Penentuan hub (terminal) untuk komoditas sektor pertanian; 4. Kerjasama pengelolaan kawasan penyangga TNGHS; 5. Optimalisasi Bumdes dalam pengelolaan Pariwisata	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan pariwisata
4	Perbatasan Timur (Sukabumi-Cianjur)	Cidolog Curugkembar Cidadap Purabaya	Sektor Strategis: Pertanian Fokus Pengembangan: 1. Konektifitas kawasan perbatasan 2. Pengembangan Pasar Ternak sebagai Hub Komoditi Ternak Nasional 3. Pengembagan Sumber Daya Genetik Peternakan	1. Pengoptimalan potensi peternakan; 2. Pembangunan Pasar Ternak; 3. Peningkatan aksesibilitas	Peningkatan Akses dan Prasarana Peternakan
5	Kawasan Penunjang Pangan Daerah	Bantargadung Bojonggenteng Cicantayan Cikembar Cimanggu Cireunghas Gunung Guruh Jampang Kulon Jampang Tengah Kalibunder	Sektor Strategis: Sektor pertanian primer dan perkebunan	1. Proteksi lahan Produktif (LP2B); 2. Inventarisasi lahan potensial untuk reformasi akses lahan petani; 3. Kerjasama pengelolaan lahan potensial berdasarkan potensi (pertanian, perikanan dan peternakan);	1. Reformasi Akses Lahan untuk petani; 2. Kerjasama Pengelolaan lahan; 3. Pembangunan Gudang Pangan; 4. Pembangunan Industri hilir komoditi pangan

No	Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Kebijakan Wilayah Pengembangan	Arah Pengembangan	Prioritas Pembangunan RPJMD
		Kebonpedes Lengkong Nyalindung Pabuaran Parakansalak Purabaya Sagaranten Warungkiara		4. Replikasi close loop untuk komoditi unggulan; 5. Gudang Pangan untuk meningkatkan Daya Jual Komoditi; 6. Pembangunan industri hilir komoditi pangan	

1. Kawasan Kalapanunggal – Kabandungan – Cikidang - Cikakak

   A. Pengembangan Aksesibilitas

   Pengembangan Potensi jaringan jalan eksisting seperti :

   a) ruas jalan desa koridor Kabandungan (Kabandungan-Tugubandung-Cianaga) – Cikidang (Gunungmalang - Mekarnangka – Cikiray - Citoy) – Cikakak (Cirendang -Sirnarasa)
   b) ruas jalan desa koridor Kabandungan (Kabandungan-Tugubandung-Cianaga) – Cikidang (Gunungmalang-Mekarnangka-Cikiray-Citoy-Cijambe)

   B. Kecamatan Kabandungan

   Strategi pengembangan berdasarkan wilayah administrasi Kecamatan Kabandungan bahwa Kecamatan Kabandungan berperan sebagai:

   a) Mempertahankan zona / kawasan perbatasan serta penyangga kelestarian alam gunung Pangrango.
   b) Peningkatan aksesibilitas pendukung sektor unggulan (pertanian dan sayuran).
   c) Peningkatan aksesibilitas pendukung sektor potensi unggulan (pariwisata dan perdagangan).
   d) Peningkatan dan pembangunan aksesibilitas penghubung (Lingkar Barat) antar kecamatan / antar wilayah terutama menuju Ibu Kota Kabupaten (Palabuhanratu) dengan dukungan kajian kelayakan aksesibilitas.

e) Sebagai Sub Pusat Wilayah Pengembangan, Kabandungan berperan sebagai pembantu wilayah pusat pengembangan (WPP) KEK Cikidang.

C. Kecamatan Kalapanunggal

Strategi di Kecamatan Kalapanunggal dalam mendukung pengembangan wilayah berperan sebagai pendorong sekaligus pemeran dalam menjalankan perekonomian khususnya di bidang Agroeduwisata.

Beberapa langkah dan strategi yang akan dilakukan Kecamatan Kalapanunggal yaitu:

a) Peningkatan aksesibilitas pendukung sektor unggulan (pertanian dan sayuran)
b) Peningkatan aksesibilitas pendukung sektor potensi unggulan (pariwisata dan perdagangan) seperti:
   1. Pembangunan Agroeduwisata di Desa Gunung Endut
   2. Pembangunan Terminal Agro
   3. Peningkatan Akses Wisata Air Terjun
   4. Pemantapan dan pembinaan potensi ikan hias arwana
   5. Pemantapan dan pembinaan potensi pohon vanili, duren dan singkong
c) Sebagai Sub Pusat Wilayah Pengembangan, Kalapanunggal berperan sebagai pembantu wilayah pusat pengembangan (WPP) KEK Cikidang.

D. Kecamatan Cikidang

Kecamatan Cikidang merupakan pusat kawasan perekonomian (KEK Cikidang). strategi di Kecamatan Cikidang dalam mendorong pengembangan wilayah yaitu sebagai wilayah pusat pertumbuhan (WPP) yang berfungsi melayani kegiatan – kegiatan di wilayah Kalapanunggal-Kabandungan-Cikidang-Cikakak. Selain itu fungsi dari Kecamatan Cikidang adalah sebagai pusat kegiatan industri pengolahan, dan jasa hilir dan hulu dalam rangka mendukung agrobisnis dan industri pariwisata dalam mendorong pengembangan

sentra industri unggulan di kawasan Kalapanunggal-Kabandungan-Cikidang-Palabuhanratu-Cikakak.

E. Kecamatan Cikakak

Strategi pengembangan wilayah di Kecamatan Cikakak dalam mendorong pengembangan wilayah yaitu sebagai sub wilayah pusat pertumbuhan (SWPP) yang dilayani oleh Kecamatan Cikidang dan Palabuhanratu.

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Cikakak yaitu:

a) Peningkatan dan pembangunan aksesibilitas penghubung (Lingkar Barat) antar kecamatan / antar wilayah dari Kabandungan-Cikakak-Palabuhanratu.

b) Peningkatan aksesibilitas pendukung sektor unggulan (pertanian dan perkebunan)

c) Peningkatan aksesibilitas pendukung sektor potensi unggulan (pariwisata dan perdagangan) seperti:

1. Peningkatan Akses Wisata baik alam maupun bahari
2. Mengembangkan sentra produksi Perikanan baik darat maupun laut

2. Kawasan Kadudampit

Strategi pengembangan wilayah di Kecamatan Kadudampit diarahkan untuk pengembangan sektor pariwisata, baik alam maupun buatan.

3. Kawasan Curugkembar-Cidadap-Sagaranten

A. Kecamatan Curugkembar

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Curugkembar adalah diarahkan untuk budidaya sektor pertanian dan peternakan, yaitu:

a) Pengembangan sentra pertanian buah pisang

b) Pengembangan sentra pertanian cabai merah dan cabai rawit

c) Pengembangan sentra peternakan ruminansia (sapi dan kerbau)

B. Kecamatan Cidadap

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Cidadap diarahkan pada pengembangan budidaya peternakan, yaitu:

a) Pengembangan peternakan ruminansia domba

b) Pembangunan sentra pasar hewan

C. Kecamatan Sagaranten

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Sagaranten adalah sebagai sub wilayah pusat pertumbuhan (SWPP) perkotaan Sagaranten sebagai pusat pelayanan bagi kecamatan sekitar dan juga wilayah cianjur bagian selatan. Peningkatan dan pembangunan sarana pelayanan dasar di sektor kesehatan (optimalisasi RSUD), sektor pendidikan dan infrastruktur ekonomi/ perdagangan.

6.2.2 Kebijakan Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Berkaitan dengan pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Sukabumi, selain merujuk kepada penetapan sistem perkotaan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat, juga didasarkan atas tipologi kecamatan. Tipologi Kecamatan adalah pengklasifikasian kecamatan berdasarkan karakteristik dan potensi masing-masing kecamatan. Tipologi kecamatan yang dimaksud adalah berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik serta kapasitas tumbuh-kembang wilayah kecamatan tersebut. Secara normatif, kecamatan dengan sarana dan prasarana lebih lengkap ditempatkan pada hirarki lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan dengan sarana dan prasarananya yang kurang lengkap. Begitu pula dengan kapasitas tumbuh-kembang wilayah tersebut. Dengan demikian, rencana pengembangan sistem pusat kegiatan di Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai berikut:

1. PKW terdiri atas:
   a. PKW Palabuhanratu; dan
   b. PKW Sukabumi.
2. PKL terdiri atas:
   a. PKL Cibadak;
   b. PKL Jampangtengah;

c. PKL Jampangkulon;
d. PKL Sagaranten; dan
e. PKL Cicurug.

3. PPK terdiri atas:
   a. PPK yang mendukung PKW Palabuhanratu meliputi:
      1. PPK Cisolok;
      2. PPK Cikakak;
      3. PPK Simpenan; dan
      4. PPK Ciemas.
   b. PPK yang mendukung PKW Sukabumi meliputi:
      1. PPK Cisaat;
      2. PPK Sukabumi;
      3. PPK Gunungguruh;
      4. PPK Kadudampit;
      5. PPK Sukaraja;
      6. PPK Kebonpedes; dan
      7. PPK Nyalindung.
   c. PPK yang mendukung PKL Jampangkulon adalah PPK Surade.
   d. PPK yang mendukung PKL Cibadak adalah PPK Cikembar.

6.2.3 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Rencana pola ruang untuk ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi wilayah kabupaten diatur dengan pedoman tersendiri; dan harus mengikuti peraturan perundang - undangan terkait.

1. <u>Kawasan Lindung, terdiri atas:</u>

- kawasan hutan lindung;
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya, kawasan ruang terbuka hijau;

- kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
- kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

2. <u>Kawasan budi daya yang terdiri atas:</u>

- kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah;
- kawasan perdagangan dan jasa, yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta;
- kawasan industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan;
- kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
- kawasan ruang terbuka non hijau;

- kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana terjadi;
- kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- kawasan peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

Berdasarkan kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Sukabumi, maka kebijakan dan strategi pembangunan spasial dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 mengarahkan:

a. Pembangunan sektoral sesuai kebijakan pengembangan wilayah, serta arahan struktur ruang dan pola ruang, agar terwujud efektivitas pengelolaan pembangunan, terpenuhinya sarana dan prasarana minimal di setiap pusat kegiatan, terpenuhinya pelayanan publik, konektivitas, perlindungan kawasan berfungsi lindung untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan sektor ekonomi.

b. Pembangunan wilayah tetap harus memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan hidup, kelestarian fungsi lindung dan konservasi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat Kabupaten Sukabumi terutama pemenuhan terhadap kuantitas dan kualitas air bersih, lahan hutan dan pangan, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik yang aman dari kerawanan bencana

c. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Sukabumi dan rencana pembangunan Tahun **2012-2032**, dengan lintas sektoral, lintas wilayah, yang berkolaborasi dengan seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sukabumi 2032, maka strategi penataan ruang meliputi:

1. Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan dengan strategi meliputi:
    a. menetapkan kawasan-kawasan di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi kawasan lindung;
    b. meningkatkan fungsi kawasan lindung;
    c. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
    d. membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung; dan
    e. menetapkan kawasan konservasi plasma nutfah perikanan daratan.
2. Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan dengan strategi meliputi:
    a. meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;
    b. mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan;
    c. mempertahankan dan meningkatkan kawasan tanaman pangan lahan basah;
    d. melakukan percepatan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada kawasan tanaman pangan lahan basah; dan
    e. mengembangkan kawasan minapolitan perikanan tangkap dan minapollitan budidaya berbasis klaster komoditas.
3. Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya dengan strategi meliputi:
    a. mengembangkan kawasan wisata budaya;
    b. mengembangkan kawasan wisata alam;
    c. mengembangkan kawasan wisata buatan;

d. mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian; dan
e. mengembangkan dan meningkatkan akses dan konektivitas jalan menuju kawasan wisata.

4. Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal dengan strategi meliputi:
    a. menata kawasan peruntukan industri;
    b. membangun dan mengembangkan kawasan industri;
    c. membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri;
    d. mendorong pengembangan industri pertanian;
    e. menata dan mengembangkan industri rumah tangga, kecil dan menengah;
    f. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang serta menata arus orang dan barang kegiatan industri; dan
    g. meningkatkan kemitraaan antar-industri.
5. Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis dengan strategi meliputi:
    a. memantapkan pengembangan 2 (dua) WP dan 8 (delapan) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah Utara dan wilayah Selatan;
    b. menetapkan sistem pusat kegiatan PKW, PKL, PPK, dan PPL;
    c. memantapkan fungsi PKW, PKL, PPK dan PPL sesuai standar pelayanan minimal;
    d. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;
    e. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
    f. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan DAS dan mitigasi bencana;

g. menata kawasan perkotaan dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di wilayah Utara Kabupaten;
h. menata kawasan pesisir dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di wilayah Selatan Kabupaten; dan
i. Mendorong terwujudnya RUang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan minimal 30 persen.

6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
   a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
   b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
   c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
   d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

6.2.4 Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk indikasi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

A. Ketentuan Umum Zonasi;

   Ketentuan umum peraturan zonasi digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
   b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan

c. ketentuan khusus

Ketentuan umum peraturan zonasi tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Kabupaten dalam menerbitkan perizinan.

B. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Ketentuan perizinan ketentuan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan perundang-undangan harus ditempuh dan dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Ketentuan perizinan meliputi:

a. bentuk izin pemanfaatan ruang; dan
b. mekanisme pemberian izin pemanfaatan ruang.

Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang. Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk:

a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, indikasi program, ketentuan umum peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau zona berdasarkan rencana tata ruang.

C. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

D. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dunia usaha dan masyarakat yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRWK, berupa aspek pengaturan atau kebijakan, aspek ekonomi dan aspek pembangunan. Insentif kepada Pemerintah Desa dapat diberikan dalam bentuk:

a. kompensasi;
b. dukungan program serta kegiatan pembangunan,
c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
d. penghargaan.

Insentif kepada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dapat diberikan dalam bentuk:

a. keringanan retribusi Daerah;
b. kompensasi;
c. kerjasama pendanaan;
d. penyediaan infrastruktur;
e. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
f. penghargaan.

E. Arahan Sanksi.

Sanksi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten. Sanksi dikenakan kepada pejabat dan penerima izin. Sanksi yang diberikan berupa sanksi adminitratif. Jenis pelanggaran rencana tata ruang terdiri atas:

a. pelanggaran fungsi ruang;
b. pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang;
c. pelanggaran tata massa bangunan;
d. pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan; dan
e. pelanggaran salah satu atau beberapa ketentuan kewajiban dan/atau larangan dan/atau ketentuan peraturan zonasi dalam perda terkait.

Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:

a. hasil pengawasan penataan ruang;
b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; dan
c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

6.3 Prioritas pembangunan dan Proyek Prioritas Daerah

Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 akan difokuskan dalam 6 (enam) prioritas. Hal ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Rincian 6 (enam) prioritas pembangunan daerah tersebut adalah:

1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan;
2) Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial;
3) Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah;
4) Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan;
5) Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah; dan
6) Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas pelayanan publik.

Prioritas pembangunan di atas menjadi fokus utama dalam pencapaian sasaran pembangunan, sasaran prioritas, tujuan daerah, visi daerah, hingga misi daerah. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, prioritas pembangunan, dengan proyek prioritas Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Prioritas Pembangunan, dengan Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi

Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
Visi	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin		
Misi 1:	Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing		
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Beasiswa pendidikan bagi siswa Hafidz Al-Quran.
			Peningkatan kesejahteraan guru dan BOP Madrasah Diniah (MD)/Lembaga Pendidikan Alquran (LPQ
			Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (Pontren, MDTA, Majelis Taklim) serta tempat /rumah ibadah (masjid, mushola
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan		Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas
			Pelayanan Kesehatan Keliling (Dokter masuk kampung)
			Beasiswa kedokteran
			Pembangunan RSUD Sukalarang
	Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak		Pemberdayaan perempuan (PERAHU KERTAS : Perempuan Hebat untuk Keluarga Berkualitas)
	Menurunnya tingkat pengangguran		Peningkatan kecakapan hidup/*Life Skill*
			Pengembangan pusat ketenagakerjaan yang terintegrasi (SILENT Center : *Sukabumi Integrated Labour and Employment Cente*

Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan		Peningkatan BOP PAUD
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal		Pengembangan Pusat Budaya Berbasis Masyarakat (BUMI KURING: *Sukabumi Cultural Building*)
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial	Pembangunan Rutilahu (Bedah Kampung)
			Jaminan kesehatan masyarakat miskin dan Kades / Perangkat Desa
Misi 2 :	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kelautan, dan perikanan	Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah	Penataan Pasar Tradisional (Pasar Semi Modern)
			Pembangunan pasar induk
			Digitalisasi pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan
			Bantuan permodalan untuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
			Fasilitasi pengembangan usaha IKM dan UMKM berbasis masjid (BUMI : Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi)
			Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreneur)
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan	Penataan destinasi wisata unggulan

Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
	Meningkatnya pertumbuhan investasi sektor agribisnis daerah dan pariwisata		Pengembangan wisata budaya
	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi		Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melalui BUMDES
			Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreneur)
			Peningkatan kecakapan hidup/Life Skill
Misi 3 :	Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.		
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	*Zero Blank Spot Internet Area*
	Meningkatnya kualitas infrastruktur		Pembangunan Jalan Lingkar Palabuhanratu – Cisolok
			Pembangunan Jalan Kadudampit – Sukaraja
	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman		Pembangunan Jalan Nagrak – Cicurug
	Meningkatnya kinerja layanan transportasi		Pembangunan Jalan Kebonrandu – Pamuruyan
			Peningkatan jalan penunjang perekonomian (akses sentra produksi, wisata, dan akses ekonomi lainnya)
			Pengembangan infrastruktur pertanian di kawasan LP2B
			Pembangunan ruang publik tematik (sarana olahraga, pusat UMKM, ramah gender

Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
Misi 4 :	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.		
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas pelayanan publik	Penataan pusat pemerintahan Palabuhanratu
	Meningkatnya inovasi daerah		Redistribusi pelayanan publik ke Kecamatan hingga Desa
			Pembangunan mall pelayanan publik
			Digitalisasi pelayanan publik (Desa dan Kabupaten)
			Integrasi sistem pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis digital
			Peningkatan insentif (Petugas RT dan RW)
			Peningkatan BOP Penyuluh Pertanian

Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, maka ditetapkan beberapa proyek strategis daerah. Proyek ini disusun untuk membuat RPJMD lebih konkrit dalam menjawab isu-isu pembangunan, prioritas pembangunan daerah, dan manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan berdaya ungkit terhadap capaian visi dan misi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026.

Sumber pendanaan proyek strategis Kabupaten Sukabumi menerapkan prinsip kolaborasi yaitu APBD Kabupaten Sukabumi, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, dan dana lainnya yang sesuai perundang-undangan. Adapun penjelasan kolaborasi pendanaan proyek prioritas Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan daerah memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan yang berasal dari APBN terdiri atas: (1) Dana perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta dana transfer khusus yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik. (2) Dana Insentif Daerah (DID), dan (3) Dana Desa.

2. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Publik Provate Partnership* (PPP)

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah pendapatan daerah yang belum mampu sepenuhnya membiayai pembangunan. Pada kondisi ini, skema pembiayaan KPBU dapat menjadi solusi dengan menerapkan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan.

3. Dana Umat

Salah satu potensi sumber pendanaan lainnya yaitu dana masyarakat/umat. Dari berbagai jenis dana umat yang berpotensi yaitu zakat dan wakaf uang, untuk itu perlu adanya komitmen dan kerja sama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, dan badan zakat, serta masyarakat Kabupaten Sukabumi secara umum untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

4. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sumber pendanaan pembangunan lainnya yaitu dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Kolaborasi stakeholders menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi CSR yang mampu memberdayakan masyarakat yaitu dalam bentuk keterlibatan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program-program CSR. Peran pemerintah akan menjadi sangat penting, sebab sebagai pemegang otoritas regulasi memiliki kontrol terhadap aktivitas dalam masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Dengan

kekuasaan, legitimasi pemerintah dapat mempengaruhi dan mengarahkan program CSR agar sejalan dengan orientasi pembangunan daerah. Dengan demikian, proyek prioritas dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana sumber pendanaan proyek-proyek strategis daerah tersaji dalam Tabel 6.5. Adapun penjelasan proyek-proyek strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Beasiswa pendidikan bagi siswa Hafidz Al-Quran

   Beasiswa pendidikan bagi siswa hafidz Al-Quran merupakan salah satu upaya untuk membuka akses kepada anak usia sekolah untuk dapat bersekolah, sekaligus membentuk sumberdaya manusia yang religius sejak usia dini. Bentuk apresiasi dan kepedulian kepada siswa ini diberikan khususnya kepada mereka yang memiliki kemampuan hafalan Al-Qur'an, memiliki keterampilan dan kematangan pribadi yang baik, salah satunya ditunjukkan dengan prestasi atau sertifikat penghafal Al-Qur'an yang telah dicapai. Melalui program ini diharapkan dapat memacu dan meningkatkan motivasi anak-anak di Kabupaten Sukabumi untuk terus menghafal Al-Quran dan memberikan keberkahan bagi orangtua dan kehidupannya.

2) Peningkatan kecakapan hidup/*Life Skill*

   Peningkatan kecakapan hidup/*Life Skills* dimaksudkan untuk menambah dan mengembangkan berbagai keterampilan atau kemampuan, untuk dapat beradaptasi agar mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. Di era pandemi saat ini banyak kaum muda yang kehilangan pekerjaan secara formal, sehingga dibutuhkan kreativitas untuk bertahan hidup melalui pembekalan kecakapan hidup yang dipergunakan untuk menghasilkan pendapatan. Menghadapi era ekonomi digital saat ini menciptakan SDM berkualitas yang dilengkapi dengan talenta, kreatifitas, inovasi adalah suatu keharusan, sehingga memenuhi standar tersebut diperlukan peningkatan kecakapan

hidup. Melalui program ini, pemuda tidak hanya dibekali pendidikan dan keterampilan tetapi juga penguatan karakter diri yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan globalisasi di bidang ketenagakerjaan saat ini.

3) Peningkatan BOP PAUD

Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas harus dimulai sejak usia dini. Pemerintah pusat telah memberikan perhatian dengan menggelontorkan sejumlah anggaran untuk BOP PAUD, sehingga dalam rangka menyokong optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pemerintah daerah juga akan menyiapkan tambahan anggaran dalam rangka peningkatan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) tersebut.

4) Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas

Pemberian pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat di Puskesmas akan menjadi pelayanan yang baru pertama dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten Sukabumi. Pelayanan kesehatan gratis berlaku untuk semua masyarakat Kabupaten Sukabumi, sehingga bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan tidak akan ditarik biaya retribusi yang berobat di seluruh Puskesmas di Kabupaten Sukabumi. Hal ini dilakukan untuk membuka akses layanan kesehatan bagi semua masyarakat sebagai salah satu upaya mewujudkan pembangunan SDM yang sehat dan berkualitas.

5) Pelayanan Kesehatan Keliling (Dokter masuk kampung)

Dalam rangka mendekatkan masyarakat dengan layanan kesehatan, selain menyiapkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas, juga akan digulirkan program pelayanan kesehatan keliling (Dokter masuk kampung). Melalui program ini masyarakat akan lebih mudah, efektif dan efisien untuk berkonsultasi sekaligus berobat langsung dengan dokter yang bertugas.

6) Pengembangan Pusat Budaya Berbasis Masyarakat (BUMI KURING: *Sukabumi Cultural Building*)

Budaya adalah peradaban, oleh sebab itu diperlukan peningkatan kepekaan masyarakat untuk terus melestarikan budaya lokal Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu potensi wisata. Terkait hal tersebut akan dibangun pusat budaya berbasis masyarakat (BUMI KURING = Sukabumi *Cultural Building*) yang akan menjadi wadah masyarakat, pemuda, komunitas pelaku dan pemerhati seni budaya Kabupaten Sukabumi untuk mengembangkan diri dan melestarikan seni budaya lokal.

7) Pemberdayaan perempuan (PERAHU KERTAS: Perempuan Hebat untuk Keluarga Berkualitas)

Pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi perempuan di segala bidang. PERAHU KERTAS adalah akronim dari perempuan hebat untuk keluarga berkualitas, dimana program ini menekankan pada penguatan perempuan dengan meningkatkan kapasitas diri, sehingga masalah-masalah keluarga dapat diminimalisir.

8) Beasiswa kedokteran

Salah satu program terkait pendidikan yang akan diusung adalah pemberian bantuan berupa tambahan uang kuliah bagi mahasiswa kedokteran asal kabupaten sukabumi yang berprestasi. Seyogianya pendidikan tinggi adalah kewenangan pemerintah provinsi, namun mengingat kebutuhan tenaga kesehatan yang cukup tinggi di Kabupaten Sukabumi maka Pemerintah Daerah hadir melalui skema pembiayaan bantuan uang kuliah untuk memberikan kemudahan bagi anak muda Kabupaten Sukabumi untuk meraih impian sebagai seorang dokter. Fakultas Kedokteran dipilih mengingat Kabupaten Sukabumi dengan wilayah yang luas masih sangat membutuhkan tenaga dokter untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga harapannya putra daerah yang dijamin pendidikannya

melalui beasiswa tersebut bersedia untuk mengabdi di Kabupaten Sukabumi setelah lulus nantinya.

9) Peningkatan kesejahteraan guru dan BOP Madrasah Diniah (MD)/Lembaga Pendidikan Alquran (LPQ)

   Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan sebagai wujud perhatian pemerintah daerah kepada guru MD/LPQ untuk mendukung visi daerah mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius, maka akan disiapkan bantuan BOP MD/LTQ untuk meringankan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

10) Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (Pontren, MDTA, Majelis Taklim) serta tempat /rumah ibadah (masjid, mushola)

    Keberpihakan terhadap pendidikan keagamaan dan rumah ibadah bagi masyarakat juga menjadi perhatian dengan menyiapkan anggaran untuk membangun fasilitas dan meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung terselenggaranya pendidikan dan pelaksanaan ibadah bagi masyarakat.

11) Penataan Pasar Tradisional (Pasar Semi Modern)

    Pasar tradisional merupakan representasi dari pusat perekonomian rakyat. Pasar tradisional umumnya terkesan kumuh, kotor, dan padat oleh pengunjung, sehingga biasanya mengakibatkan kemacetan di kawasan sekitar pasar. Penataan pasar tradisional menjadi pusat perdagangan semi modern merupakan upaya untuk tetap mempertahankan model perekonomian pasar tradisional namun dikemas dengan penataan modern yang strategis dan memperhatikan aspek kebersihan, kenyamanan dan kesehatan, yang akan menjadi pendongkrak dan penggerak perekonomian masyarakat.

    Penataan harus mampu menjawab persoalan kenyamanan bagi masyarakat yang berbelanja di pasar serta mampu meningkatkan

daya saing pedagang pasar. Akibat pendemi yang terjadi, pasar yang memenuhi standar kesehatan menjadi suatu kebutuhan prioritas, dimana pasar harus ditata dengan mengedepankan konsep lingkungan yang higienis, pembatasan kontak fisik pembeli dengan pedagang maupun antar pembeli, pengaturan jam operasional pedagang, serta memberikan marketing training untuk penerapan belanja melalui aplikasi *online*, sehingga belanja secara daring di pasar tradisional bisa menjadi pilihan masyarakat. Program penataan pasar ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya mewujudkan tertib tata ruang untuk Kabupaten Sukabumi yang lebih baik, tertib, asri dan nyaman untuk dihuni (*livable city*).

12) Penataan destinasi wisata unggulan

Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai kawasan yang terkenal dengan eksotisme wisata keindahan alamnya. Potensi ini, jika dikembangkan dengan serius maka sektor pariwisata akan memberikan *multiplier effect* yang besar dan menjadi peluang yang sangat baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks tersebut diatas, maka pengembangan pariwisata harus digarap secara serius, terarah dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi ekonomi yang signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai andalan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Penataan destinasi wisata baik yang berbasis alam, budaya dan buatan/minat khusus, dilakukan melalui konsep perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*sustainable tourism development/ecotourism*) yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi (*growth*), pemerataan (*equity*) dan keberlanjutan (*sustainability*).

Penataan destinasi wisata unggulan difokuskan pada 4 (empat) komponen yang dikenal dengan konsep 4A, yang harus dimiliki oleh objek wisata yaitu atraksi (*attraction*), aksessibilitas (*accessibility*),

fasilitas (*amenity*) dan pelayanan tambahan *(ancilliary*). akselerasi pertumbuhan sektor pariwisata dilakukan melalui kerjasama pengembangan, promosi dan pemasaran wisata.

13) Pengembangan wisata budaya

Pengembangan wisata budaya tidak terlepas dari konsep pengembangan pariwisata unggulan, namun dengan mengedepankan unsur budaya lokal asli daerah Kabupaten Sukabumi sebagai produk wisata. Terdapat banyak titik lokasi di Kabupaten Sukabumi yang memiliki nilai historis dan beragam daya tarik budaya yang layak diangkat menjadi objek daya tarik wisata. Berbagai festival, ritual, kesenian, museum, teater dan fasilitas budaya, serta situs-situs bersejarah merupakan elemen wisata warisan budaya (*cultural heritage tourism*) yang menjadi tujuan wisatawan pada saat ini.

Pengembangan wisata budaya merupakan upaya pemerintah daerah dalam melestarikan budaya lokal dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga aset-aset budaya yang ada bisa direvitalisasi dan menjadi bagian dari konsep 4A (atraksi) yang bisa dinikmati setiap tahunnya. revitalisasi yang dilakukan meliputi aspek *Something to See* (seperti kampung adat, rumah adat, tarian tradisional, ritual adat, situs), *Something to Do* (seperti membatik, membuat souvenir, membuat makanan lokal) dan *Something to Buy* (seperti souvenir dan makanan khas).

14) Pembangunan pasar induk

Pasar induk adalah pasar utama yang merupakan pusat transit berbagai komoditas dari berbagai wilayah dan pusat penyalur barang kebutuhan untuk pasar lain. Keberadaan pasar induk mampu memperkuat perputaran ekonomi daerah dengan memotong panjangnya rantai pasok suatu komoditas. Selama ini produk pertanian dari Kabupaten Sukabumi didistribusikan langsung ke pasar di luar daerah (Jakarta dan Bandung) dengan rantai pasok yang panjang, sehingga margin harga di tingkat petani dan pedagang

sangat tinggi. Selain proses distribusi dengan biaya transportasi yang tinggi, dan nilai tambah yang diterima petani rendah. Di samping itu, seringkali *brand* produk asli Kabupaten Sukabumi juga tidak begitu dikenal karena di-rebranding menjadi produk daerah lain. Pembangunan pasar induk diharapkan menjadi solusi pemasaran produk khususnya pertanian Kabupaten Sukabumi, menjadi *icon* pasar grosir produk pertanian, serta menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang akan menjadi kebanggaan Kabupaten Sukabumi.

15) Digitalisasi pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan

Saat ini sedang marak pengembangan digitalisasi pada sektor pertanian Indonesia atau lebih dikenal dengan Pertanian 4.0. Digitalisasi pertanian dalam hal ini diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam rantai proses agribisnis yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produksi.

16) Bantuan permodalan untuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan)

Dengan diberlakukannya UU No. 6 Thn 2014 dan berakhirnya PNPM Mandiri pedesaan, UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM Mandiri pedesaan saat ini masih berjalan dan menjadi salah satu sumber dana bergulir (simpan pinjam) yang dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu sumber permodalan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keberadaan UPK diharapkan mampu menghambat berkembangnya praktik "Bank Emok" yang selama ini menjerat masyarakat. Namun dalam praktiknya, pengembangan UPK menghadapi banyak tantangan khususnya permodalan. Terkait dengan hal tersebut, maka akan diberikan bantuan permodalan untuk UPK serta menerapkan skema tertentu (bantuan permodalan mempertimbangkan tingkat kelancaran pengembalian kredit pada UPK), untuk meminimalisir terjadinya kredit macet dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir di UPK. Tujuan pengembangan UPK melalui bantuan permodalan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi

masyarakat mendapatkan pinjaman dana untuk wirausaha/ IKM/UMKM.

17) Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melalui BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Desa yang bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pendapatan asli desa. UU No. 6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa BUMDES dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Mengingat pariwisata dijadikan sektor utama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, maka dalam pengelolaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat luas.

Masyarakat yang tinggal di wilayah pengembangan destinasi pariwisata harus dipacu berperan aktif mengorganisir kegiatan pariwisata melalui optimalisasi fungsi BUMDES sebagai *small enterprise* di desa. Sebagai provider lokal, BUMDES berperan sebagai pelaku usaha, penyedia tenaga kerja lokal, maupun sebagai tuan rumah (*host*) dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan, yang seluruhnya melibatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam lokal. Peran BUMDES dalam pengelolaan pariwisata ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja melalui penumbuhan dan pengembangan UMKM terutama *START-UP*, pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi dan pemasaran produk melalui *E-COMMERCE*.

18) Fasilitasi pengembangan usaha IKM dan UMKM berbasis masjid (BUMI : Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi)

BUMI adalah program pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid, pesantren dan lembaga keagamaan. Sasaran program ini adalah pesantren yang memiliki unit usaha, atau lembaga keuangan mikro aktif yang ada diinstitusi keagamaan. Tujuan dari program BUMI

adalah agar masyarakat tidak menemukan kesulitan akses terhadap sumber pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Dana pembiayaan tersebut adalah dana kelola bersama, dengan pendekatan program melalui Bina Ruhiyah (kecerdasan spiritual) dan Bina Rupiah (kecerdasan finansial).

19) Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreneur)

Santripreneur adalah akronim dari dua kata, yaitu santri (siswa yang mendalami ilmu agama di pesantren) dan *entrepreneur* (wirausaha). Penggabungan dua kata tersebut menggambarkan upaya pembangunan manusia yang religius dari sisi agama, bermoral dalam perilaku, cakap dalam berbisnis, kreatif dan inovatif dalam berkarya. Meneladani Rasulullah Muhammad SAW yang selama 25 tahun berprofesi sebagai *entrepreneur* sejati, melalui program ini diharapkan akan muncul kaum milenial penggerak ekonomi daerah yang kreatif menciptakan lapangan pekerjaan berbasis pondok pesantren, mesjid dan lembaga keagamaan.

Pengembangan kewirausahaan pesantren melalui konsep santripreneur ini akan menjadi program andalan, yaitu: (1)menghadapi bonus demografi dan keterbatasan kesempatan kerja bagi pemuda/generasi milenial, (2) mengoptimalkan potensi umat sebagai perancang industri (IKM/UMKM) berbasis pesantren dengan memanfaatkan kemudahan teknologi di era revolusi industri 4.0, (3) salah satu bentuk upaya pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid (santri tetap berada di lingkungan pesantren menciptakan industri kreatif dan memasarkan produk melalui pasar online), serta (4) dalam jangka panjang santri akan menjadi arsitek perubahan penggerak perekonomian daerah.

20) Pengembangan pusat ketenagakerjaan yang terintegrasi (SILENT Center : *Sukabumi Integrated Labour and Employment Center*)

SILENT CENTER (Sukabumi *Integrated Labour and Employment Center*) adalah solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah di sektor ketenagakerjaan terutama menghadapi kondisi pandemi

Covid-19. SILENT CENTER merupakan sebuah sistem terintegrasi berbasis teknologi informasi (*software*, kelembagaan serta jaringannya), yang berisi data ketenagakerjaan secara komprehensif, seperti informasi tenaga kerja, lowongan kerja, pelatihan kerja, pemagangan, pelayanan ketenagakerjaan (seperti kartu kuning), dan lain-lain. Sistem ini nantinya dapat digunakan oleh semua pihak baik calon tenaga kerja yang ingin mencari pekerjaan, mencari pelatihan kerja, atau membuat kartu kuning dan lain-lain. Bagi perusahaan yang ingin mencari tenaga kerja yang berkualitas dan terampil, ataupun tenaga kerja yang sudah bekerja yang memiliki permasalahan ketenagakerjaan. Seluruhnya dilakukan berbasis online, sehingga akan membatasi mobilitas orang untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Sistem ini akan meminimalisir peluang-peluang terjadinya pungutan liar dalam proses *recruitment* ketenagakerjaan, dan bagi perusahaan pun akan sangat diuntungkan karena dapat memperoleh tenaga kerja yang terlatih. Pengawasan dan pengendalian dari pemerintah juga akan dipermudah dengan menggunakan sistem ini. Seluruh permasalahan terkait ketenagakerjaan akan disajikan secara transparan dalam sistem termasuk proses mediasi dan penyelesaiannya yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Secara kelembagaannya sistem ini akan diperkuat aspek hukum dan sistem kelembagaan yang melibatkan semua stakeholders seperti tenaga kerja, perusahaan dan pemerintah. Melalui sistem ini pelayanan ketenagakerjaan dapat dilakukan secara cepat, transparan, murah dan dapat diakses oleh semua masyarakat Kabupaten sukabumi dimanapun berada berbasiskan teknologi informasi yang terintegrasi.

21) Pembangunan Rutilahu (Bedah Kampung)

Kebutuhan rumah yang layak huni di Kabupaten Sukabumi masih cukup tinggi. Hal ini terutama bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Rumah yang layak tentunya akan mendorong meningkatnya kesehatan penghuninya. Oleh karena itu,

melanjutkan upaya yang telah dilakukan sejak tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan terus memberikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Sukabumi, dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan dana lainnya yang sah secara perundang-undangan.

22) Jaminan kesehatan masyarakat miskin dan Kades / Perangkat Desa

Dalam upaya mempertahankan capaian cakupan pelayanan kesehatan 95 persen di Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari *Universal Health Coverage* (UHC) perlu di berikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin serta perangkat desa yang belum mendapatkan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi dapat merasakan pelayanan kesehatan yang sama di fasilitas-fasilitas kesehatan di Kabupaten Sukabumi.

23) Pembangunan Jalan Lingkar Palabuhanratu – Cisolok

Kondisi geografis Kabupaten Sukabumi yang berada selatan jawa dan berada di patahan lempengan aktif atau sesar cimandiri menjadi ancaman bencana yang besar bagi masyarakat. Berdasarkan beberapa hasil penelitian Selatan Pulau Jawa memiliki potensi bencana gempa bumi yang sangat besar dan tsunami dengan gelombang yang sangat tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dikarenakan ada 8 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu disiapkan jalur evakuasi dan mitigasi bencana yang memadai. Salah satu jalur yang perlu dibangun adalah jalan alternatif Cisolok-Palabuhanratu. Selain untuk mempermudah proses mitigasi bencana, jalur tersebut juga dapat membuka akses jalur distribusi barang-barang perekonomian khususnya hasil pertanian, serta memperlancar jalur Pariwisata yang telah ada saat ini.

24) Pembangunan Jalan Kadudampit – Sukaraja

Potensi pariwisata di Kabupaten Sukabumi sangat besar, salah satunya yang ada di kawasan Kecamatan Kadudampit dan Kecamatan Sukabumi. Saat ini dengan adanya *suspension bridge* di Kecamatan Kadudampit menjadi magnet utama pariwisata di Kabupaten Sukabumi, sehingga beberapa tempat wisata lainnya khususnya di wilayah sukabumi utara tidak terkunjungi seperti Pondok halimun. Oleh karena itu, untuk meningkatkan konektivitas antar objek wisata di wilayah utara Kabupaten Sukabumi akan dibangun jalan kadudampit-sukaraja. Hal ini diharapkan menjadi solusi untuk mendongkrak permasalahan akses wisata dan perekonomian masyarakat sekitar.

25) Pembangunan Jalan Nagrak – Cicurug dan Jalan Kebonrandu – Pamuruyan

Koridor utara Kabupaten Sukabumi yang dihubungkan oleh jalan nasional dari Kecamatan Sukalarang hingga Kecamatan Cicurug merupakan jalur utama perekonomian di Kabupaten Sukabumi. Tersendatnya jalur tersebut dapat mengakibatkan biaya distribusi barang menjadi lebih besar. Selama ini, sumbatan-sumbatan yang terjadi di koridor utara di sebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya pasar-pasar tradisional, hingga keberadaan beberapa pabrik dengan jumlah pekerja yang cukup banyak. Untuk mengatasi hal tersebut, sebelumnya Pemerintah Daerah terus mendorong pemerintah pusat untuk merealisasikan Pembangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi), dan di rencanakan tahun 2021 jalan tol tersebut akan tersambung Hingga Cibadak, dan sukabumi pada tahun berikutnya. Di samping itu, Pemerintah Daerah sendiri merencanakan untuk membangun jalan alternatif yaitu ruas jalan nagrak-cicurug dan kebonrandu-pamuruyan. Diharapkan dengan jalan alternatif tersebut masalah kemacetan pada koridor utara Sukabumi dapat teratasi.

26) Pembangunan RSUD Sukalarang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sektor kesehatan maka fasilitas layanan kesehatan harus tersedia dan merata di seluruh wilayah. Sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau oleh seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, maka ke depan akan dibangun RSUD di Kecamatan Sukalarang. Kabupaten Sukabumi telah memiliki 3 RSUD (Sekarwangi, palabuhanratu, dan Sagaranten) dan 1 RSUD milik pemerintah Provinsi di Kecamatan Jampangkulon. RSUD Sukalarang dibangun untuk melayani masyarakat di wilayah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kota Sukabumi yang selama ini memperoleh layanan kesehatan dari RSUD Kota Sukabumi. Melalui pembangunan RSUD yang didukung dengan sarana prasarana dan tenaga kerja medis yang profesional diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

27) Peningkatan jalan penunjang perekonomian (akses sentra produksi, wisata, dan akses ekonomi lainnya)

Peningkatan jalan penunjang kegiatan perekonomian di Kabupaten Sukabumi akan terus dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Hal ini menjadi salah satu fokus utama pembangunan untuk menekan biaya distribusi barang serta memudahkan akses wisatawan ke objek Wisata di Kabupaten Sukabumi. Peningkatan jalan-jalan strategis ini tentunya akan disinergikan dengan pengembangan pelaku-pelaku utama perekonomian di setiap sentra-sentra produksi atau objek wisata.

28) Pengembangan infrastruktur pertanian di kawasan LP2B

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan upaya pemerintah dalam melindungi dan mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan/sawah yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman dan aktivitas ekonomi lainnya. Untuk meningkatkan efektifitas LP2B pemerintah daerah akan

memberikan stimulus kepada petani pemilik lahan produktif dengan menyediakan infrastruktur penunjang pertanian yang memadai. Selain itu, selama ini pemerintah juga masih terus memberikan stimulus kemudahan mendapatkan benih, pupuk dan saprodi lainnya, kemudahan dalam memasarkan produk pertanian, sampai pada jaminan asuransi produksi.

29) Pembangunan ruang publik tematik (sarana olahraga, pusat UMKM, ramah gender)

Ruang publik tematik yang dimaksud adalah ruang terbuka hijau/taman yang diberi daya tarik dengan tema tertentu sesuai hasil kajian kebutuhan (sarana olah raga, kesenian, pusat kuliner, UMKM, ramah gender, ramah anak) untuk mewadahi aktivitas komunitas, untuk keseimbangan ekologi dan meningkatkan kualitas kehidupan penduduk Kabupaten Sukabumi dalam rangka mewujudkan kota layak huni (livable city). Pembangunan ruang publik tematik akan diawali dengan inventarisasi ketersediaan lahan, memetakan kebutuhan tematik dan memaksimalkan kolaborasi bersama stakeholders (khususnya CSR perusahaan), percepatan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung tema pada tiap ruang publik tersebut.

30) Zero Blank Spot Internet Area

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang mudah diakses secara cepat, tepat, dan akurat menjadikan kehidupan digital sebagai salah satu kebutuhan utama di masa sekarang. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Sukabumi dalam menghadapi era industri 4.0 tersebut adalah masih adanya wilayah yang memiliki akses internet buruk, bahkan belum terjangkau internet sama sekali sehingga menjadi daerah *blank spot*. Tanpa akses internet yang menyentuh masyarakat, maka pelayanan publik dan aktivitas sosial budaya dan ekonomi lainnya akan sulit diwujudkan. Lebih lanjut, akses internet yang merata adalah suatu keharusan untuk menciptakan Kabupaten Sukabumi yang inovatif dan pintar (konsep *smart city*) yang akan

memudahkan warga Kabupaten untuk mendapatkan informasi dengan tepat dan cepat. Apalagi pada kondisi pandemi covid-19 saat ini dimana seluruh aktifitas fisik dan mobilitas manusia dibatasi, akses internet yang stabil sangat dibutuhkan masyarakat untuk tetap produktif. *Zero blank spot internet area* adalah jawaban dari tantangan tersebut di atas, program ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi merdeka internet, sehingga nantinya tidak ada lagi daerah kecamatan dan desa yang tidak terjangkau internet.

31) Penataan pusat pemerintahan Palabuhanratu

Sebagaimana PP nomor 66 tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Sukabumi, maka Palabuhanratu telah ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten yang juga berfungsi sebagai ibukota pemerintahan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat, kegiatan sosial ekonomi, politik dan pemerintahan. Saat ini memang masih terdapat beberapa kantor Perangkat Daerah yang berada di luar Palabuhanratu, sehingga untuk menunjang terciptanya fungsi kawasan Palabuhanratu sebagai kawasan pusat pemerintahan yang menunjang administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka perkantoran seluruhnya akan dipindahkan ke Palabuhanratu.

32) Redistribusi pelayanan publik ke Kecamatan hingga Desa

Dalam program ini, pelimpahan sebagian kewenangan bupati yang dilaksanakan Perangkat Daerah kepada camat dan kepala desa akan ditambah dan diperluas sehingga pelayan publik akan lebih mudah di akses oleh masyarakat. Di samping itu, kebijakan tersebut akan diikuti oleh penyediaan sarana dan pra sarana penunjang pelayanan publik.

33) Pembangunan mall pelayanan publik

Pembangunan Mall Pelayanan Publik adalah terobosan pelayanan publik bagian dari reformasi birokrasi, yang merupakan perluasan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendekatkan, meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat,

mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dengan melibatkan instansi vertikal, BUMN/D, dan swasta dalam satu tempat terpusat. Pembangunan gedung yang dilengkapi dengan aplikasi yang mampu mengintegrasikan semua pelayanan ini nantinya selain akan memperpendek alur birokrasi pelayanan administrasi, perizinan, non perizinan, diharapkan akan membatasi praktek-praktek pungli yang meresahkan masyarakat.

34) Digitalisasi pelayanan publik (Desa dan Kabupaten)

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, maka komitmen mengembangkan *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, mengedepankan pelayanan publik menjadi salah satu titik strategis yang harus mendapat perhatian khusus pada saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, *e-government* atau pemerintahan digital sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membantu proses penyampaian informasi secara lebih efektif kepada masyarakat. Sebagai bagian dari konsep *smart city* dari sisi *smart government*, implementasi *e-government* dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan menggunakan teknologi informasi, yang bertujuan untuk memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik, mendorong pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, mendorong sisi pemanfaatan dari keterbukaan informasi, dan mendorong tingkat partisipasi publik di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Melalui digitalisasi pelayanan publik, seluruh layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipenuhi lebih cepat, tepat, dan akurat. Program ini sangat dibutuhkan terutama saat masa pandemi covid-19 seperti saat ini, dimana pemenuhan layanan masyarakat dapat dilakukan secara daring tanpa interaksi fisik/manual langsung dengan petugas.

35) Integrasi sistem pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis digital

Dalam rangka mewujudkan *e-government,* maka seluruh sistem (aplikasi) yang selama ini sudah terbangun namun masih dikelola secara terpisah yang ditujukan baik untuk pelayanan publik maupun manajemen internal pemerintahan akan ditata dan dibangun secara terintegrasi, sehingga antar aplikasi akan terhubung dengan aplikasi lainnya. Integrasi dilakukan dengan membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan pelayanan publik. Dengan demikian, seluruh lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

36) Peningkatan insentif (Petugas RT dan RW)

Peran penting petugas RT dan RW di Wilayah yang memiliki tanggung jawab besar bagi terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib, aman, nyaman, dan asri perlu ditunjang oleh dukungan insentif dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, ke depan insentif tersebut akan diberikan kepada seluruh petugas RT dan RW.

37) Peningkatan BOP Penyuluh Pertanian

Pertanian sebagai salah satu sektor utama di Kabupaten Sukabumi dan yang memberikan kontribusi PDRB terbesar selama ini, masih belum bisa memberikan kesejahteraan kepada pelaku usahanya yaitu petani. Di samping kendala teknis seperti sarana dan prasarana yang tentunya menjadi fokus utama pemerintah daerah, peningkatan kapasitan SDM petani juga akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Untuk melaksanakan hal tersebut, peran penting penyuluh pertanian sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dengan tujuan seperti yang disampaikan tadi, BOP Penyuluh Pertanian akan ditingkatkan untuk menunjang tugas-tugas penyuluh dalam meningkatkan kapasitas petani di Kabupaten Sukabumi.

Tabel 6.5 Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi

No	Kegiatan	Sumber Anggaran						*Timeline*					
		APBN	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	KPBU	Swasta	Sumber Anggaran Lainnya	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	**Bidang Sumber Daya Manusia**												
1	Beasiswa pendidikan bagi siswa Hafidz Al-Quran			√				√	√	√	√	√	√
2	Peningkatan kecakapan hidup/Life Skill			√				√	√	√	√	√	√
3	Peningkatan BOP PAUD			√				√	√	√	√	√	√
4	Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas			√				√	√	√	√	√	√
5	Pelayanan Kesehatan Keliling (Dokter masuk kampung)			√				√	√	√	√	√	√
6	Pengembangan pusat budaya berbasis masyarakat (BUMI KURING : Sukabumi Cultural Building)		√	√				√	√	√	√	√	√
7	Pemberdayaan perempuan (PERAHU KERTAS : Perempuan Hebat Untuk Keluarga Berkualitas)			√					√	√	√	√	√

No	Kegiatan	Sumber Anggaran						*Timeline*					
		APBN	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	KPBU	Swasta	Sumber Anggaran Lainnya	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8	Beasiswa kedokteran			√				√	√	√	√	√	√
9	Peningkatan kesejahteraan guru dan BOP Madrasah Diniah (MD) / Lembaga Pendidikan Alquran (LPQ)			√				√	√	√	√	√	√
10	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (Pontren, MDTA, Majelis Taklim) serta tempat / rumah ibadah (masjid, mushola)		√	√				√	√	√	√	√	√
II	**Bidang Ekonomi**												
1	Penataan Pasar	√	√	√	√				√	√	√	√	√
2	Penataan destinasi wisata unggulan	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
3	Pengembangan wisata budaya		√	√				√	√	√	√	√	√
4	Pembangunan pasar induk			√	√	√			√	√	√		

No	Kegiatan	Sumber Anggaran						*Timeline*					
		APBN	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	KPBU	Swasta	Sumber Anggaran Lainnya	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Digitalisasi pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
6	Bantuan permodalan untuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan)			√				√	√	√	√	√	√
7	Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melalui BUMDES			√				√	√	√	√	√	√
8	Fasilitasi pengembangan usaha IKM dan UMKM berbasis masjid (BUMI : Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi)			√				√	√	√	√	√	√
9	Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreuneur)			√				√	√	√	√	√	√
10	Pengembangan pusat ketenagakerjaan yang terintegrasi (SILENT Center : Sukabumi			√				√	√	√	√	√	√

No	Kegiatan	Sumber Anggaran						*Timeline*					
		APBN	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	KPBU	Swasta	Sumber Anggaran Lainnya	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Integrated Labour and Employment Center)												
III	**Bidang Sosial**												
1	Pembangunan Rutilahu (Bedah Kampung)	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
2	Jaminan kesehatan masyarakat miskin dan Kades / Perangkat Desa			√					√	√	√	√	√
IV	**Bidang Infrastruktur**												
1	Pembangunan Jalan Lingkar Palabuhanratu - Cisolok	√	√	√					√	√	√		
2	Pembangunan Jalan Kadudampit – Sukaraja		√	√					√	√	√	√	
3	Pembangunan Jalan Nagrak – Cicurug		√	√					√	√	√	√	
4	Pembangunan Jalan Kebonrandu – Pamuruyan		√	√					√	√	√	√	
5	Pembangunan RSUD Sukalarang		√	√					√	√	√		

No	Kegiatan	Sumber Anggaran						*Timeline*					
		APBN	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	KPBU	Swasta	Sumber Anggaran Lainnya	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Peningkatan jalan penunjang perekonomian (akses sentra produksi, wisata, dll)		√	√				√	√	√	√	√	√
7	Pengembangan infrastruktur pertanian di kawasan LP2B			√				√	√	√	√	√	√
8	Pembangunan ruang publik tematik (sarana olahraga, pusat UMKM, ramah gender)			√	√	√		√	√	√	√	√	√
9	Zero Blank Spont Internet Area			√	√	√		√	√	√	√	√	√
V	**Bidang Pemerintahan**												
1	Penataan pusat pemerintahan Palabuhanratu		√	√				√	√	√	√		
2	Redistribusi pelayanan publik hingga ke desa dan kecamatan			√				√	√	√	√	√	√
3	Pembangunan mall pelayanan publik			√				√	√	√			

No	Kegiatan	Sumber Anggaran						*Timeline*					
		APBN	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	KPBU	Swasta	Sumber Anggaran Lainnya	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Digitalisasi pelayanan publik (Desa dan Kabupaten)			√				√	√	√	√	√	√
5	Integrasi sistem pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis digital			√				√	√	√	√	√	√
6	Peningkatan insentif (Petugas RT dan RW)			√				√	√	√	√	√	√
7	Peningkatan BOP Penyuluh Pertanian		√	√				√	√	√	√	√	√

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2026, yang telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Dalam menentukkan kerangka pendanaan pembangunan, pemerintah daerah memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan permasalahan daerah serta isu strategis yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang.

Belanja pembangunan dialokasikan dengan menerapkan prinsip *money follow programme*. Dalam hal ini program yang menjadi prioritas adalah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, serta belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lainnya. Program-program tersebut disusun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam penggunaannya, kebijakan belanja daerah dilakukan dengan akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2022 hingga tahun 2026 disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7. 1 Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2021-2026 Kabupaten Sukabumi

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5	**Belanja Daerah**	**3.885.761.536.197,79**	**4.229.583.829.221,04**	**4.744.799.029.525,46**	**5.151.503.482.851,50**	**5.933.584.173.508,84**
5.1.	**Belanja Operasi**	**2.498.614.074.005,65**	**2.676.173.331.941,06**	**2.896.695.098.302,16**	**2.964.724.003.637,90**	**3.379.802.015.725,85**
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.701.384.126.550,99	1.756.136.001.265,47	1.814.065.844.583,46	1.875.430.155.537,90	1.940.508.167.625,85
5.1.02.	Belanja Barang Dan Jasa	557.936.099.354,66	680.743.482.575,60	742.629.253.718,69	850.000.000.000,00	1.200.000.000.000,00
5.1.03.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.05.	Belanja Hibah	219.293.848.100,00	219.293.848.100,00	320.000.000.000,00	219.293.848.100,00	219.293.848.100,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
5.2.	**Belanja Modal**	**750.203.348.092,14**	**914.653.588.179,98**	**1.206.342.747.123,30**	**1.435.240.004.213,60**	**1.907.935.648.682,99**
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5.4.	**Belanja Transfer**	**611.944.114.100,00**	**613.756.909.100,00**	**616.761.184.100,00**	**726.539.475.000,00**	**620.846.509.100,00**
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	44.708.355.000,00	46.521.150.000,00	49.525.425.000,00	51.539.475.000,00	53.610.750.000,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	567.235.759.100,00	567.235.759.100,00	567.235.759.100,00	675.000.000.000,00	567.235.759.100,00

Adapun asumsi penyebab target anggaran belanja pegawai mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu, sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah ASN (PNS dan P3K).
2. Skema peningkatan kesejahteraan pegawai.
3. Potensi kenaikan harga-harga barang disebabkan inflasi.

7.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta target indikator kinerja, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Rencana program perangkat daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode Tahun 2022 sampai dengan 2026, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Sukabumi, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel 7. 2 Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Sukabumi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**															
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase APK Sekolah Dasar	%	101,82	102,22	289.400	102,62	289.900	103,2	292.400	103,42	308.900	103,82	295.400	103,82	1.476.000
		Persentase APK Sekolah Menengah Pertama	%	99,43	99,83	115.150	100,23	135.150	100,63	125.450	101,03	145.650	101,43	135.850	101,43	657.250
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	51,54	51,94	82.100	52,34	83.100	52,74	84.100	53,14	85.100	53,54	86.100	53,54	420.500
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	84,1	84,5	23.700	84,9	24.200	85,3	24.700	85,7	25.200	86,1	25.700	86,1	123.500
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%	0,96	19,25	2.100	38,51	2.100	57,76	2.100	77,02	2.100	96,27	2.100	96,27	10.500
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi kebutuhan PTKnya	%	50,9	50,95	16.600	51	16.600	51,05	16.600	51,1	16.600	51,15	16.600	51,15	83.000
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang belum memiliki izin operasional menjadi memiliki izin operasional	%	73,14	73,84	600	74,54	600	75,24	600	75,94	600	76,64	600	76,64	3.000
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Rata-rata nilai peserta didik pada mata pelajaran bahasa sunda	%	7,02	7,15	2.300	7,28	2.300	7,41	2.300	7,54	2.300	7,67	2.300	7,67	11.500
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**															
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	%	60	62	420.000	64	430.000	66	450.000	68	470.000	70	490.000	70	2.260.000
		Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	15	16	150.000	17	168.995	18	180.000	19	200.000	20	220.000	20	918.995
		Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang berizin	%	100	100	6.000	100	7.000	100	8.000	100	9.000	100	10.000	100	40.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	35	37	38.500	39	42.350	41	46.585	43	51.244	45	56.368	45	235.047
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin	%	100	100	2.200	100	2.420	100	2.662	100	2.928	100	3.221	100	13.431
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	28	31	5.500	34	6.050	37	6.655	40	7.321	43	8.053	43	33.579
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**															
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	59,28	50,8	87.382	52,8	93.293	54,8	98.310	56,8	103.691	58,8	109.470	58,8	492.146
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	85,08	86,67	100.000	87,72	100.000	88,78	100.000	89,84	100.000	90,90	100.000	90,90	500.000
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sistem Pengelolaan Persampahan	%	9,68	12,90	5.000	11,29	6.000	12,90	6.500	11,29	6750	11,29	7250	21,32	31.500
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	%	79,76	80,82	50.000	81,57	50.000	82,33	50.000	83,09	50.000	83,84	50.000	83,84	250.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota	%	32,5	38,12	45.000	42,62	45.000	47,12	45.000	51,62	45.000	56,12	45.000	56,12	225.000
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang memiliki PSU kualitas baik	%	8	24	70.000	40	70.000	60	87.500	80	87.500	100	87.500	100	402.500
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang kondisi baik	Unit	27	12	185.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	585.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	Unit	2	4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	100.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	%	71,42	63,53	207.846	67,53	346.592	71,53	463.267	75,53	549.645	79,53	417.934	79,53	1.985.285
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	%	100	100	550	100	550	100	550	100	550	100	550	100	2.750
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaran pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	%	80	82,4	2.000	84	2.000	85,8	2.000	87,6	2.000	89,6	2.000	89,6	10.000
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**															
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tidak layak huni akibat bencana dan relokasi pembangunan yang tertangani.	%	100	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	15.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata	%	8,81	17,49	20.000	21,83	20.000	26,17	20.000	30,51	20.000	34,85	20.000	34,85	100.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	%	91,88	92,76	87.500	93,48	87.500	94,21	87.500	94,93	87.500	95,65	87.500	95,65	437.500
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah kawasan perumahan yang memiliki PSU kualitas baik	unit	12	15	6.000	15	6.000	15	6.000	15	6.000	15	6.000	15	30.000
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**															
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	95	95	4.510	95	4.515	95	4.968	100	5.198	100	5.198	100	24.387
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50	60	1.500	65	1.500	70	2.000	75	2.000	75	2.000	75	9.000
		Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	%	30	40	623	45	650	50	700	50	750	50	750	50	3.473
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pesentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	1	1	9.488	1	11.885	1	10.320	1	10.745	1	11.415	1	53.853

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	5	5	4.770	5	5.455	5	5.010	5	5.195	5	5.590	5	26.020
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	2.860	100	2.860	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	14.720
		Persentase capaian upaya pendukungan terhadap Penataan Sistem dasar penanggulangan Bencana	%	NA	100	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100	2.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	Menit	15	14	2.458	14	11.653	13	6.903	13	6.965	12	7.013	12	34.991
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	100	587,565	100	3.148,08	100	6.444,55	100	6.795,80	100	7.549,58	100	24.526
		Persentase Penurunan Tingkat Kebakaranan	%	3,97	4,13	2.062	4,31	2.090	4,50	2.134	4,72	2.363	4,95	2.363	4,95	11.012
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**															
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	%	8,67	15,94	2.141	18,91	2.144	18,91	2.184	18,91	2.234	18,67	2.284	18,67	10.985
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pekerja migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	21,63	15,67	50	15,67	50	15,67	50	15,67	50	15,67	50	15,67	250
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS/PMKS yang tertangani dan berfungsi sosial di luar panti.	%	8,55	18,29	6.618	18,29	6.617	18,29	6.617	18,29	6.617	18,29	6.617	18,29	33.086
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	17,30	17,07	5.253	16,81	5.245	16,54	6.176	16,27	5.215	16,01	6.146	16,01	28.035
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	%	100,00	100,00	1.443	100,00	1.605	100,00	1.815	100,00	2.013	100,00	2.068	100,00	8.943
		Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat	%	16,55	16,73	797	16,68	793	16,68	793	16,68	793	16,68	793	16,68	3.968

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
		pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana														
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman makam Pahlawan yang dikelola	%	100,00	100,00	154	100,00	185	100,00	222	100,00	267	100,00	320,5	100,00	1.149
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**															
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	90	92	160	94	160	96	160	98	160	100	160	100	800
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,1	2,3	7.180	2,5	7.500	2,7	7.750	2,9	7.785	3	7.925	3	38.140
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	27	28	6.210	29	5.915	30	6.140	31	6.140	32	6.140	32	30.545
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	1.830	100	1.930	100	1.930	100	1.730	100	2.080	100	9.500
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**															
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE)	Nilai	80	85	2.800	90	2.872	90	2.885	95	2.885	95	2.885	95	14.327
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tingkat kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,0032	0,0032	966	0,0032	966	0,0032	1.000	0,0032	1.000	0,0032	1.000	0,0032	4.932
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	%	97,99	98,02	3.150	98,06	4.950	98,09	5.000	98,12	5.000	98,15	5.000	98,15	23.100
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat akurasi data gender dan anak	%	100,00	100,00	390	100,00	390	100	400	100	400	100	400	100	1.980

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	12,17	26	1.770	26	1.770	100	1.923	100	2.053	100	2.230	100	9.746
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	0,01874	0,01874	1.220	0,01874	1.220	0,01874	1.300	0,01874	1.300	0,01874	1.300	0,01874	6.340
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**															
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	%	14,29	12,5	2.000	11,1	4.500	10	4.500	18,18	4.500	15,38	4.500	81,45	20.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	%	23,37	25,49	2.200	31,87	3.500	38,24	3.500	44,61	3.500	50,98	3.500	100	16.200
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	%	14,47	17,11	500	17,11	750	17,11	750	17,11	1.000	17,11	1.000	100	4.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	%	100	100	1.000	100	1.000	100	1.250	100	1.500	100	1.500	100	6.250
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**															
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan permasalahan pertanahan	%	100	100	350	100	400	100	450	100	500	100	500	100	2.200
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Bidang Tanah / Tahun	9	9	60.000	9	60.000	9	60.000	9	60.000	9	60.000	9	300.000
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH	Presentase Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	%	3	3	600	3	600	3	600	3	600	3	600	3	3.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
	KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE															
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	%	0	1	300	1	200	1	200	0	0	0	0	3	700
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Percepatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)	Bidang Tanah / Tahun	100386	100386	7.616	100386	7.616	100386	7.616	100386	7.616	100386	7.616	100386	38.080
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**															
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun per tahun	%	100	100	2.100	100	2.200	100	2.300	100	2.400	100	2.500	100	11.500
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	%	68	58	5.800	61	6.200	65	6.600	68	7.000	71	7.400	71	33.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola	%	10	10	5.100	10	5.400	10	5.700	10	6.000	10	6.300	10	28.500
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	%	1,73	1,73	1.900	1,73	2.000	1,73	2.100	1,73	2.200	1,73	2.300	1,73	10.500
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	%	4,33	4,33	2.700	4,33	2.900	4,33	3.100	4,33	3.300	4,33	3.500	4,33	15.500

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang dibina	%	67	100	1.400	100	1.550	100	1.700	100	1.850	100	2.000	100	8.500
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	%	5	5	1.600	5	1.700	5	1.800	5	1.900	5	2.000	5	9.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	%	1,2	1,2	600	1,2	700	1,2	800	1,2	900	1,2	1.000	1,2	4.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan	%	90	90	1.400	90	1.550	90	1.700	90	1.850	90	2.000	90	8.500
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	%	50,4	54,4	57.800	58,4	59.800	62,4	61.800	66,4	63.800	70,4	65.800	70,4	309.000
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**															
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	76	81	700	86	750	91	1.000	96	1.000	97,7	1.000	97,7	4.450
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	95	97	450	98	750	99	1.000	99	1.000	99	1.000	99	4.200
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PD/Instansi/Badan Hukum Indonesia yang bekerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	25	40	1.800	50	750	65	1.000	80	1.000	90	1.000	90	5.550
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase PD/Instansi yang memanfaatkan Data Profil Kependudukan	%	75	80	60	85	100	90	150	95	150	95	150	95	610
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)
					Target		Target		Target		Target		Target		Target	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase status desa mandiri	%	5,00	10,20	1.000	15,49	1.000	20,73	1.500	25,98	1.500	31,23	1.500	31,23	6.500
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang telah melakukan kerjasama	%	9,19	10,50	1.000	11,81	1.000	13,12	1.500	14,44	1.500	15,75	1.500	15,75	6.500
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Desa yang Telah Dikelola dengan Baik	%	12,34	17,59	3.000	22,83	4.600	28,08	5.000	33,33	5.000	38,58	5.000	38,58	22.600
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi	%	1,05	1,31	10.000	1,57	15.000	1,84	15.000	2,10	15.000	2,36	15.000	2,36	70.000
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**															
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya berusia dibawah 20 Tahun	%	NA	2,5	5.050	2,47	5.050	2,43	5.050	2,40	5.050	2,35	5.050	2,35	25.250
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peningkatan pemakaian kontrasepsi	%	69,62	68,1	20.000	68,3	20.100	68,36	20.300	68,45	20.500	68,5	20.700	68,50	101.600
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera yang ber-KB Di Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	82,5	82,53	12.500	82,65	13.500	82,76	13.500	82,85	13.500	83	13.500	83,00	66.500
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**															
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Rasio	0,26	0,25	17.496	0,24	17.996	0,23	18.496	0,22	18.996	0,21	19.496	0,21	92.480
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rasio	0,3	0,45	2.500	0,6	3.000	0,75	3.500	0,9	4.000	1	4.500	1	17.500
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**															
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah,	%	10	20	7.000	40	5.000	60	5.000	80	5.000	100	5.000	100	27.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
		disampaikan secara cepat dan tepat														
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses TIK yang tersedia	%	14	31	14.000	48	35.000	65	35.000	83	35.000	100	35.000	100	154.000
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**															
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	%	NA	100	60	100	70	100	80	100	90	100	100	100	400
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Akuntable	%	1	1	300	2	364	3	433	4	508	5	684	5	2.289
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	%	NA	5	80	5	100	5	120	5	140	5	160	5	600
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	%	1	1	422	1	506	1	607	1	729	1	875	1	3.139
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase Koperasi yang berkualitas	%	NA	1	188	2	226	3	271	4	326	5	391	5	1.402
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	%	0,5	2,5	8876	5,0	3451	7,5	4141	10,0	4970	12,5	5964	12,5	27.402
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0,2	1,80	775	2,11	930	2,60	1.116	3,10	1.339	3,70	1.607	3,70	5.767
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**															
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Peta Potensi Investasi Daerah Berbasis Digital	Kecamatan	8	8	520	8	1.100	8	1.100	8	600	7	600	47,00	3.920
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	5	6	1.210	8,12	1.335	9,74	1.550	11,36	1.650	12,99	1.850	53,57	7.595

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu	%	90	95	735	100	821	100	936	100	1.067	100	1.216	100,00	4.776
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan Penanaman Modal	%	6	9,74	400	12,99	470	16,23	556	19,48	641	23	751	87,66	2.818
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Investasi yang memenuhi Standar Persyaratan OSS	%	25	35	150	45	150	55	150	65	150	75	150	75,00	750
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**															
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	%	6	6	824	13	1.800	16	2.200	19	2.600	21	3000	21	10.424
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase Peningkatan Olahraga Pendidikan, penyelenggaraan olahraga tingkat Kabupaten dan Provinsi, Organisasi Olahraga dan Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan	%	50	100	26.000	100	22.100	100	22.100	100	22.100	100	22.100	100	114.400
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan dan pengembangan organiasasi Kepramukaan	%	0	100.00	2.400	100.00	2.400	100.00	2.400	100.00	2.400	100.00	2.400	100.00	12.000
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**															
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang di update secara berkala	%	16	32	1.000	49	1.000	66	1.000	83	1.000	100	1.000	100	5.000
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**															
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi	%	13	31	1.200	48	1.100	65	900	82	1.000	100	1.000	100	5.200
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya / OPK dan lembaga adat daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	45	100	1.200	100	1.300	100	1.400	100	1.500	100	1.600	100.00	7.000
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Peningkatan Kesenian Tradisonal daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	5	20	300	20	300	20	400	20	400	20	600	100.00	2.000
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Peningkatan Sejarah Lokal yang dibina	%	2	20	150	20	150	20	150	20	150	20	150	100.00	750
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Peningkatan Cagar Budaya yang ditetapkan dan dikelola	%	10	20	400	20	400	20	400	20	400	20	500	100.00	2.100
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan Layanan Museum terhadap masyarakat	%	10	15	250	20	1.100	20	1.100	25	1.300	20	1.100	100.00	4.850
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**															
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	NA	5	4.370	5,5	5.000	6	6.000	6,5	7.000	7	8.000	7	30.370
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara dan naskah kuno yang diinventarisasi dan dilestarikan	Eksemplar	30	230	560	430	800	630	1.050	830	1.300	1.030	1.550	1.030	5.260
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**															
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	25	50	500	60	648	70	1.569	80	1.726	90	1.899	90	6.342
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	%	25	50	600	60	912	70	2.093	80	2.303	90	2.533	90	8.441
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase peningkatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	25	50	80	60	96	70	242	80	266	90	293	90	977

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**															
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	2	2	10.964	2	22.732	2	28.202	2	30.985	2	40.720	12	133.603
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2	2	8.976	2	10.486	2	10.710	2	10.924	2	11.143	12	52.239
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	%	0	2	805	2	915	2	785	2	605	2	930	10	4.040
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Peningkatan Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	%	2	2	2.054	2	6.634	2	7.769	2	8.199	2	8.429	12	33.085
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**															
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dibangun	%	4	4	16.200	4	35.000	4	35.000	4	35.000	4	35.000	24	156.200
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Promosi Daya Tarik Wisata	%	5	5	6.350	5	8.000	5	8.000	5	8.000	5	8.000	30	38.350
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan prasarana dan ekosistem ekonomi kreatif	%	20	20	650	20	1.200	20	1.200	20	1.200	20	1.200	100	5.450
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	%	10	10	2.800	10	2.800	10	2.800	10	2.800	10	2.800	60	14.000
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	%	100	100	2759	100	3032	100	3331	100	3379	100	3628	100	16.129
		Persentase sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh peternak	%	100	100	7981,062	100	8490	100	8855	100	8520	100	6455	100	40.301
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	%	100	100	43802	100	44500	100	45820	100	46690	100	47810	100	228.622
		Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan oleh peternak	%	100	100	5956,1	100	7285	100	7485	100	6785	100	7085	100	34.596
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	%	5	5	1522,1431	5	3020	5	2810	5	2130	5	2370	30	11.852
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi	%	0	100	430	100	430	100	430	100	430	100	430	100	2.150
		Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan yang difasilitasi	%	100	100	250	100	300	100	350	100	400	100	450	100	1.750
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha pertanian	%	0	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100	1.750
		Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha peternakan	%	0	100	506,3375	100	510	100	540	100	570	100	610	100	2.736
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	100	100	11082,6	100	6975	100	7327	100	7679	100	8036	100	41.100
		Persentase kelembagaan peternak yang meningkat kapasitasnya	%	100	100	870	100	880	100	890	100	900	100	900	100	4.440
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**															
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase layanan fasilitasi izin pemanfaatan panas bumi daerah	%	100	100	750	100	750	100	750	100	750	100	750	100	3.750
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**															
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran perusahaan yang Difasilitasi	%	0	100	400	100	500	100	500	100	500	100	500	100	2.400

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100	4.020	100	5.000	100	4.216	100	3.850	100	4.246	100	21.332
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah	%	100	100	508	100	561	100	620	100	686	100	759	100	3.134
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Produk daerah Siap Ekspor	%	0	2	971	6	1.138	12	1.336	16	1.570	24	1.848	24	6.863
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat ukut, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	0	29	400	34	805	39	110	44	115	49	120	49	1.550
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk unggulan Lokal yang masuk pusat sarana distribusi perdagangan	Produk	0	14	350	16	420	18	504	20	605	22	726	22	2.605
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**															
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jumlah IKM Mandiri	%	9,1	9,34	35.000	9,58	40.000	9,81	40.000	10,05	40.000	10,29	40.000	10,29	195.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Jumlah perusahaan yang memiliki izin usaha	%	1,34	1,48	550	1,82	550	1,96	550	2,2	550	2,2	550	2	2.750
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase IKM yang melaporkan data industry melalui akun SIINAS	%	100	100	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100	2.000
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**															
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	20	20	135	20	160	20	135	20	135	20	135	100	700
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	16,6	16,6	350	20	350	20,4	350	21,2	350	21,8	350	100	1.750

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**															
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	11	12	1.400	12,5	3.950	13	3.950	13,5	3.950	14	3.950	14	17.200
		Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana	%	100	100	1.350	100	3.450	100	3.450	100	3.450	100	3.450	100	15.150
		Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan, keuangan dan Pelaporan tepat waktu	%	100	100	36.680	100	40.450	100	40.450	100	40.450	100	40.450	100	198.480
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah	%	88	88,5	29.100	89	29.100	89,5	29.100	90	29.100	92	29.100	92	145.500
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skoring LPPD Kabupaten	Poin	3,62	3,65	1.525	3,67	1.700	3,7	1.900	3,8	2.050	4	2.100	4	9.275
		Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	%	100	100	1.575	100	1.600	100	1.700	100	1.850	100	1.900	100	8.625
		Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	%	75	75	925	75	1.050	75	1.150	75	1.400	75	1.500	75	6.025
		Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	%	100	100	56.650	100	56.650	100	71.050	100	71.200	100	71.200	100	326.750
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian yang terlaksana	%	100	100	2.000	100	2.000	100	2.675	100	2.850	100	2.950	100	12.475
		Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi	%	95	95,5	750	96	750	97	900	98	1.050	98	1.050	98	4.500
		Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Predikat	Proaktif	Proaktif	1.200	Strategis	1.200	Strategis	1.900	Unggul	2.150	Unggul	2.150	Unggul	8.600
		Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi sumber daya alam berwawasan lingkungan	%	9	18	1.025	18	1.100	27	1.150	27	1.250	27	1.300	27	5.825
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Persidangan dan Perundang-undangan	%	95	95	2.600	95	2.600	95	2.600	95	2.600	95	2.600	95	13.000
		Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Bagian Umum	%	95	95	33.975	95	33.975	95	48.975	95	48.275	95	48.275	95	213.475
		Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran	%	95	95	9.625	95	9.625	95	9.625	95	9.625	95	9.625	95	48.125
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5.01	**PERENCANAAN**															
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	%	100	100	2.300	100	2.300	100	2.300	100	2.500	100	2.500	100	11.900
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai	25,04	25,28	1.203	25,52	1.500	25,76	1.600	26,00	1.600	26,24	1.600	26,24	7.503
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		25,85	26,09	1.200	26,33	1.300	26,57	1.400	26,81	1.400	27,05	1.400	27,05	6.700
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		26,12	26,36	1.127	26,60	1.450	26,84	1.500	27,08	1.500	27,32	1.500	27,32	7.077
5.02	**KEUANGAN**															
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketercapaian mandatory APBD	%	100	100	3.080	100	3.388	100	3.727	100	4.099	100	4.509	100	18.803
		Persentase realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah	%	92	92,5	738.565	93	746.685	93,5	751.805	94	756.925	94,5	762.045	94,5	3.756.025
		Persentase ketercapaian penyusunan Laporan keuangan	%	100	100	1.650	100	1.815	100	1.997	100	2.196	100	2.416	100	10.074

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
		pemerintah daerah yang akuntabel														
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Aset daerah	%	100	100	3.960	100	4.356	100	4.792	100	5.271	100	5.798	100	24.177
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	28,24	5,13	12.647	5,08	13.000	4,73	13.623	6,74	14.619	3,13	15.114	3,13	69.003
5.03	**KEPEGAWAIAN**															
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai dimensi kualifikasi	Nilai	13,13	13,2	1.900	13,4	1.900	13,4	2.250	13,4	2.437,5	13,5	2.625	13,5	11.113
		Persentase Pemenuhan Pegawai Akibat Pemberhentian	%	100	100	2.500	100	2.500	100	3.294	100	3.568,5	100	3.843	100	15.706
		Persentase Ketersuaian Jabatan dengan Kualifikasi dan Kompetensi	%	100	100	1.800	100	1.800	100	2.160	100	2.340	100	2.520	100	10.620
		Nilai Dimensi Disiplin dan Kinerja	Nilai	27	27	1.759	28	1.800	28	2.110,8	29	2.286,7	29	2.462,6	29	10.419
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**															
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Dimensi Kompetensi	Nilai	10,88	20	13.000	25	14.000	30	15.432	32,5	16.133	35	16.835	35	75.400
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**															
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/diimplementasikan	%	NA	50	1.800	62,5	1.800	62,5	1.800	75	1.800	87,5	1.800	87,5	9.000
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**															
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**															
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3,1	3.496	3,2	3.772	3,3	4.094	3,4	4.425	3,5	4.799	3,5	20.587
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3	1.012	3	1.115	3	1.297	3	1.485	3	1.623	3	6.533

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7.01	**KECAMATAN**															
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	%	89,4	90,34	7.050	91,26	7.050	92,13	7.050	92,95	7.050	93,32	7.050	93,32	35.250
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	100,00	7.050	100,00	7.050	100,00	7.050	100,00	7.050	100,00	7.050	100,00	35.250
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada	%	80	60,00	4.700	40,00	4.700	20,00	4.700	0,00	4.700	0,00	4.700	0,00	23.500
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100,00	4.700	100,00	4.700	100,00	4.700	100,00	4.700	100,00	4.700	100,00	23.500
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa	%	89,4	90,34	4.700	91,26	4.700	92,13	4.700	92,95	4.700	93,32	4.700	93,32	23.500
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**															
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**															
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	indeks	80	81,5	2.668	82	2.743	82,5	2.823	83	2.805	83,5	2.807	83,5	13.846
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Persentase Partisipasi Masyarkat dalam Pemilu	%	75,5	76	19.221	76,5	23.868	77	323.453	77,5	268	78	31.037	78	397.847

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
	ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Profesionalisme Ormas	Indeks	70	70,5	3.742	71	3.742	71,5	3.728	72	2.800	72,5	3.802	72,5	17.814
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Indeks	69	69,5	5.660	70	6.174	70,5	5.689	71	6.758	71,5	7.686	71,5	31.967
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	%	10	15	7.427	20	8.102	25	23.777	30	9.452	35	10.136	35	58.894
X	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	17.220	100	30.444	100	30.444	100	30.444	100	30.444	100	138.996
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	1.381.830	100	1.756.794	100	1.756.794	100	1.756.794	100	1.756.794	100	8.409.006
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	34.440	100	58.888	100	58.888	100	58.888	100	58.888	100	269.992
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	36.080	100	59.549	100	59.549	100	59.549	100	59.549	100	274.276

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	98.400	100	109.679	100	109.679	100	109.679	100	109.679	100	537.116
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	34.440	100	59.888	100	59.888	100	59.888	100	59.888	100	273.992
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	12.300	100	30.460	100	30.460	100	30.460	100	30.460	100	134.140
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan adminstrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	8.200	100	20.096	100	20.096	100	20.096	100	20.096	100	88.584

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah dideskripsikan melalui indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan tanda yang dijadikan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran, dan tujuan. Oleh karena itu, indikator yang terbentuk juga akan menjadi gambaran dari keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Keluaran (*output*) mencerminkan berfungsinya proses dalam suatu lembaga dalam menjalankan kegitan operasional yang sifatnya rutinitas. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) permendagri tersebut, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Di samping itu, terdapat pula capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

8.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Indikator makro ini dipengaruhi oleh keberhasilan berbagai program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator makro tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini.

Dalam penentuannya, peranan daerah dalam penentuan indikator makro daerah sangat dipengaruhi oleh faktor luar seperti kebijakan nasional dan kondisi umum global maupun nasional. Oleh karenanya penting dalam penentuan indikator makro daerah untuk memperhitungkan banyak hal seperti target indikator makro nasional dan provinsi, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan penanganan pandemi dalam asumsi yang diambil untuk penentuan target indikator makro daerah. Adapun beberapa asumsi yang diambil dalam penentuan target indikator makro daerah Kabupaten Sukabumi adalah:

1. Vaksinasi selesai di tahun 2022;
2. Tidak ada pengurangan dana alokasi dari Pusat ke Daerah (untuk sektor unggulan);
3. Strategi penanganan pandemi sudah masuk ke tahap pemulihan ekonomi dari level nasional hingga daerah; dan
4. Inflasi stabil dengan acuan PDRB Deflator 1,46 di tahun 2020.

Proyeksi indikator makro Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Proyeksi indikator makro Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,88	66,89	67,60	67,99	68,39	68,78	69,17	69,17
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,26	1,24	1,21	1,19	1,17	1,15	1,13	1,13
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,09	7,06	6,91	6,75	6,60	6,45	6,29	6,29
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,60	9,5 - 11,5	9 - 11	8,75 - 10,75	8,5 - 10,5	8,25 - 10,25	8 - 10	8 - 10
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	- 1,08	1,23-2,23	2,30-3,30	3,61-4,36	4,75-5,42	4,89-5,49	5,05-5,55	5,05-5,55
6	Pendapatan Per Kapita	Rp (1.000) / kapita	27.281	27.300-27.545	27.548-27.797	27.879-28.080	28.187-28.386	28.262-28.457	28.347 - 28.530	28.347-28.530
7	Indeks Gini	Poin	0,334	0,360-0,340	0,358-0,338	0,356-0,336	0,332	0,327	0,321	0,321

8.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan merumuskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengukur kinerja urusan pemerintahan daerah, pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Proyeksi target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2026

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	98,8	99,18	99,56	99,94	100
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	%	64,4	73,3	82,2	91,1	100
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		0,056	0,060	0,064	0,068	0,071
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	%	100	100	100	100	100

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		0	0	0	0	0
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		0	0	0	0	0
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	50,80	52,80	54,80	56,80	58,80
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	86,67	87,72	88,78	89,84	90,90
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	80,82	81,57	82,23	83,09	83,84
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota						
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	63,53	67,53	71,53	74,53	79,53

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
		8	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		0	0	0	0	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	%	50,80	52,80	54,80	56,80	58,80
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	7,93	11,89	15,85	19,81	23,78
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	12,77	21,83	30,90	39,96	49,02
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	unit	42	57	72	87	102
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	95	95	95	100	100

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50	60	65	70	75
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	6900	6900	6900	6900	6900
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	30	30	30	30	30
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	14	14	13	13	12
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	92	94	96	98	100
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,3	2,5	2,7	2,9	3
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	4.550	4.600	4.650	4.700	4.750
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100	100	100
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	28	29	30	31	32
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	60	70	80	90	100
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0,0187	0,0187	0,0187	0,0187	0,0187
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	25,49	31,87	38,24	44,61	50,98
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	100	100	100
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	Poin	66,85	67,41	68,11	68,79	69,47
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	54,4	58,4	62,4	66,4	70,4

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	12,5	11,11	10	9,09	8,33
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	%	76	81	86	91	96
			Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	45	55	65	75	85
			Kepemilikan akta kelahiran	%	95	96	97	98	99
			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	25	40	50	65	80
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	0	0	0	0	0
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	38,46	38,46	38,46	38,46	46,15
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2.30	2,28	2,26	2,24	2,22

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
		2	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	68,1	68,3	68,36	68,45	68,5
		3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	%	10,94	10,83	10,81	10,78	10,75
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Ratio	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Ratio	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Perangkat Daerah	16	17	17	17	17
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Layanan Publik	24	30	35	45	55
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	70	70	70	70	70
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menegah	1	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	%	1	1	1	1	1
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	2,1	2,6	3,1	3,7	4,1
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	2	2	2	2	2

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	10	10	10	10	10
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	10	10	10	10	10
		3	Peningkatan prestasi olahraga	%	2	2	2	2	2
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah	84	84	84	84	84
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Perangkat Daerah	84	84	84	84	84
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Point	296	386	471	556	645
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	10	10	10	10	10
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	55	56	60	63	65
		2	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	%	5	5,5	6	6,5	7

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	60	65	70	75	80
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	55	60	65	70	75
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/ kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	40.823	41639	42472	43322	44187
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	3	3	3	3	3
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	%	3	3	3	3	3
		3	Tingkat hunian akomodasi	%	28	30	33	35	37
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	30	30	30	30	30

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	10	10	10	10	10
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton	6,375	6,5	6,625	6,75	6,875
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	100	100	100	100	100
29	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	39	41	43	45	47
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku	%	29	34	39	44	49
30	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		5	5	5	5	5
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	50	60	70	80	90

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini:						
			- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)		20	20	20	20	20
			- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)		20	20	20	20	20
			- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)		50	30	10	0	0
31	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	13,7	13,5	13,3	13,1	13
		2	Rasio PAD	%	16,64	15,91	15,1	13,85	12,39

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	73,6	73,4	73,2	73	73
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	100	100	100	100	100
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	72	75	75	80	80
33	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	196	196	197	197	198
		2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	11	11	12	12	13
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	100	100	100	100	100

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
34	Manajemen Keuangan	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100	100	100	100	100
		3	Assets management						
			1. Apakah ada daftar aset tetap ?		1. Ada	1. Ada	1. Ada	1. Ada	1. Ada
			2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap ?		2. Ada	2. Ada	2. Ada	2. Ada	2. Ada
			3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ?		3. Ada	3. Ada	3. Ada	3. Ada	3. Ada
			4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?		4. Tercantum	4. Tercantum	4. Tercantum	4. Tercantum	4. Tercantum
		4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4,5	4,3	4,2	4,1	4

8.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur. Pengukuran tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Target pencapaian IKU daerah akan menjadi perjanjian kinerja Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap tahunnya. Pencapaian tersebut merupakan akumulasi dari capaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau capaian indikator yang bersifat mandiri setiap tahun. Dengan demikian, kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Kabupaten Sukabumi telah menetapkan target-target capaian IKU daerah untuk periode 2021-2026, yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Sukabumi. Target pencapaian ini pada akhirnya akan menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian IKU daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3 Penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026

Kode IKU	IKU	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
IK1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	69,10	73,70	74,50	75,20	76,00	76,00	77,80	77,80
IK2	Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	70,97	71,08	71,26	71,45	71,63	71,81	72,00	72,00
IK3	Angka kematian ibu	Per 100.000 KH	85,22	85,00	84,00	83,00	82,00	81,00	80,00	80,00
IK4	Angka kematian bayi	Per 1000 KH	4,75	4,30	4,25	4,20	4,15	4,10	4,00	4,00
IK5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,37	87,40	87,64	87,78	87,92	88,06	88,20	88,20
IK6	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,07	7,21	7,32	7,43	7,55	7,66	7,77	7,77
IK7	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,23	12,33	12,38	12,42	12,47	12,51	12,56	12,56
IK8	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,09	7,06	6,91	6,75	6,60	6,45	6,29	6,29
IK9	Persentase pemajuan kebudayaan	Persen	N/A	19,56	20,48	21,55	22,61	23,68	24,74	24,74

Kode IKU	IKU	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
IK10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,60	9,5 - 11,5	9 - 11	8,75 - 10,75	8,5 -10,5	8,25 - 10,25	8 - 10	8 - 10
IK11	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Persen	1,05	1,93	2,33	2,73	3,13	3,53	3,92	3,92
IK12	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	84,60	84,60	85,10	85,60	86,10	86,60	87,10	87,10
IK13	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	Persen	-4,58	-3	(-1) – 0,5	0,5 – 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	3 - 4
IK14	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata	Persen	N/A	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	4,5
IK15	Persentase pelaku usaha naik kelas	Persen	N/A	0,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	13,4

Kode IKU	IKU	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
IK16	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	62,11	62,77	66,85	67,41	68,11	68,79	69,47	69,47
IK17	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	Persen	70,21	70,21	76,17	82,12	88,08	94,04	100,00	100,00
IK18	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	Persen	71,42	71,42	63,53	67,53	71,53	75,53	79,53	79,53
IK19	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	Persen	59,28	59,28	50,80	52,80	54,80	56,80	58,80	58,80
IK20	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata	Persen	8,81	13,15	17,49	21,83	26,17	30,51	34,85	34,85

Kode IKU	IKU	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
IK21	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	43	43	43	51	60	67	75	75
IK22	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	poin	85,79	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	88,50
IK23	Indeks profesionalitas ASN	poin	51,01	51,01	60,20	66,40	71,40	74,90	77,50	77,50
IK24	Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IK25	Nilai akuntabilitas kinerja daerah	poin	64,48	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	76,00
IK26	Indeks inovasi daerah	poin	NA	56,00	57,50	58,50	59,00	59,50	60,00	60,00

8.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Target pencapaian SPM sangat penting dikarenakan salah satu prioritas pendanaan paling utama setiap tahunnya adalah untuk memenuhi target SPM. Adapun target capaian indikator SPM di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.4.

Tabel 8.4 Penetapan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Kondisi Kinerja Awal (%)		Target (%)				
			2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	91,1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	SD : 98,83 SMP : 96,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	41,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada	100	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Kondisi Kinerja Awal (%)		Target (%)				
			2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026
7	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	128,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabiltasi social di luar panti	129	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	106,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial dasar diluar panti	89,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Kondisi Kinerja Awal (%)		Target (%)				
			2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026
13	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	100
14	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari	85,08	86,08	88,08	91,06	94,04	97,02	100,00
15	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	79,05	82,76	85,84	89,21	92,58	95,95	100,00
16	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memeperoleh rumah layak huni	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kab/kota yang memeperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	91,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	96,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Kondisi Kinerja Awal (%)		Target (%)				
			2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026
19	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	99,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	104,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	68,3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	97,5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	30,2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	43,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	84,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga Negara penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan	72,9	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa	106,3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Kondisi Kinerja Awal (%)		Target (%)				
			2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026
	dengan Gangguan Jiwa Berat	berat yang terlayani kesehatan							
28	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan terinfeksi virus yangm melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB IX

PENUTUP



BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi selama periode 2021-2026. Dengan demikian, pembangunan daerah menjadi lebih sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan nasional, dan provinsi. Oleh karena itu, setiap unsur Perangkat Daerah yang terlibat, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, dokumen RPJMD ini wajib terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sukabumi. RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara harmonis dan konsisten. Selain itu, perlu dijelaskan juga terkait pedoman transisi dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2027.

9.1 Pedoman Transisi

Pada masa transisi peralihan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, dimana RPJMD tahun 2021-2026 juga berakhir pada periode yang sama, maka tidak akan terjadi kekosongan regulasi saat berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan pada masa transisi, setelah RPJMD berakhir, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2026 akan menyusun RKPD tahun 2027 yang berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2032, serta peraturan teknis lain yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Penyusunan RKPD tahun 2027 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2026. Selain itu, RKPD tahun 2027 disusun untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional, provinsi, kabupaten dan lain-lain.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati untuk masa bakti 2021-2026. RPJMD juga mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 dan berbagai kebijakan serta program prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RPJMD, Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPJMD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan adanya dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Dokumen RPJMD sebagai pedoman dalam menyusun Renstra PD dan rencana kerja tahunan (Renja PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan;
2) Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi;
3) Untuk menjamin agar target capaian setiap sasaran dan indikator dapat dicapai secara optimal, maka Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen ini, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah
4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap indikator Renstra PD serta ketercapaian dalam pelaksanaannya;
5) RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini.

Bupati Sukabumi,

ttd

Drs. H. Marwan Hamami, MM